



# WORKING SMARTER. GROWING STRONGER.

BEKERJA LEBIH CERDAS. TUMBUH LEBIH KUAT.



**Kantor Pusat Corporate Office**

PT International Nickel Indonesia Tbk  
Plaza Bapindo  
Citibank Tower  
22<sup>nd</sup> floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190

T: +62-21-524 9000  
F: +62-21-524 9020  
www.pt-inco.co.id

**Kantor Operasi Operations Offices**

Sorowako 92984  
South Sulawesi  
Indonesia

Jl. Somba Opu  
PO Box 1143  
Makassar 90001  
South Sulawesi  
Indonesia

T: +62-411-873 731  
F: +62-411-856 157

**Registrasi Saham Share Registrar**

PT International Nickel Indonesia Tbk  
Plaza Bapindo  
Citibank Tower  
22<sup>nd</sup> floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190

T: +62-21-524 9031  
F: +62-21-524 9020  
E: ptishareadmin@valeinco.com

**Auditor Auditors**

Kantor Akuntan Publik  
Tanudiredja, Wibisana & Rekan - PwC Indonesia  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6  
Jakarta 12940

T: +62-21-521 2901  
F: +62-21-5290 5555  
www.pwc.com/id

**Penasehat Hukum Legal Counsel**

Mochtar Karuwin Komar  
Wisma Metropolitan II  
14<sup>th</sup> floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31  
Jakarta 12920  
T: +62-21-571 1130  
F: +62-21-571 1162, 570 1686  
www.mkklaw.net

**Peringatan atas Pernyataan-Pernyataan mengenai Masa Depan**

Dalam dokumen ini mungkin terdapat rencana, proyeksi dan strategi, dan tujuan Perseroan tertentu, yang bukan merupakan pernyataan fakta historis dan perlu dipahami sebagai pernyataan mengenai masa depan berdasarkan hukum yang berlaku. Pernyataan mengenai masa depan tergantung pada risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan keadaan dan hasil aktual Perseroan di masa depan berbeda dari yang diharapkan atau diindikasikan. Tidak ada jaminan bahwa hasil-hasil yang diantisipasi oleh Perseroan, atau diindikasikan oleh pernyataan-pernyataan mengenai masa depan, akan tercapai

**Caution Regarding Forward Looking Statements**

This document may contain certain plans, projections, and strategies and objectives of the Company that are not statements of historical fact and would be treated as forward looking statements under applicable law. Forward looking statements are subject to risks and uncertainties that may cause actual events and the Company's future results to be different than expected or indicated by such statements. No assurance can be given that the results anticipated by the Company, or indicated by such forward looking statements, will be achieved.



## **BEKERJA LEBIH CERDAS. TUMBUH LEBIH KUAT.**

PT International Nickel Indonesia Tbk (PTI) bekerja untuk meningkatkan setiap aspek operasional. Kami berfokus pada inovasi untuk mengoptimalkan produktivitas, efisiensi dan profitabilitas dalam operasional kami saat ini, dan membangun tolok ukur bagi penambangan di masa depan. Tanggung jawab lingkungan hidup dan sosial sangat penting karena kami terus membangun hubungan yang semakin kuat dengan masyarakat sekitar.

Sebagai bagian dari operasional global Vale, kami bekerja lebih cerdas dan tumbuh lebih kuat. Kekuatan inilah yang akan memastikan kami menjunjung komitmen terhadap karyawan dan masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, dan menghasilkan nilai tinggi bagi para pemegang saham kami.

## **WORKING SMARTER. GROWING STRONGER.**

PT International Nickel Indonesia Tbk (PTI) is working to improve every aspect of our operations. We are focused on innovation to optimize productivity, efficiency and profitability in our operations today and establish the benchmark for mining in the future. Environmental and social responsibilities are key as we continue to build even stronger relationships with our communities.

As part of Vale's global operations, we're working smarter and growing stronger. It is that strength that will ensure we uphold our commitment to our employees, communities and other stakeholders and deliver superior value to our shareholders.

## STRATEGI KAMI

# OUR STRATEGY

Sebagai bagian dari operasional global Vale, PTI bekerja keras meningkatkan setiap aspek operasional kami. Kami sedang melaksanakan rencana bisnis dan mengukur keberhasilan kami berdasarkan enam tujuan strategis berikut:

### **PERTUMBUHAN**

Meningkatkan kapasitas produksi dan penggunaan sumber daya secara menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan kami dan persyaratan Kontrak Karya kami.

### **EFISIENSI**

Meningkatkan efisiensi operasi kami untuk meningkatkan profitabilitas dan mengimbangi penurunan harga nikel.

### **TENAGA KERJA**

Memastikan keterlibatan penuh tenaga kerja kami untuk melaksanakan strategi, dan agar tenaga kerja pada jumlah yang tepat, menyediakan kapabilitas yang tepat, pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat dengan biaya yang tepat.

### **LISENSI SOSIAL**

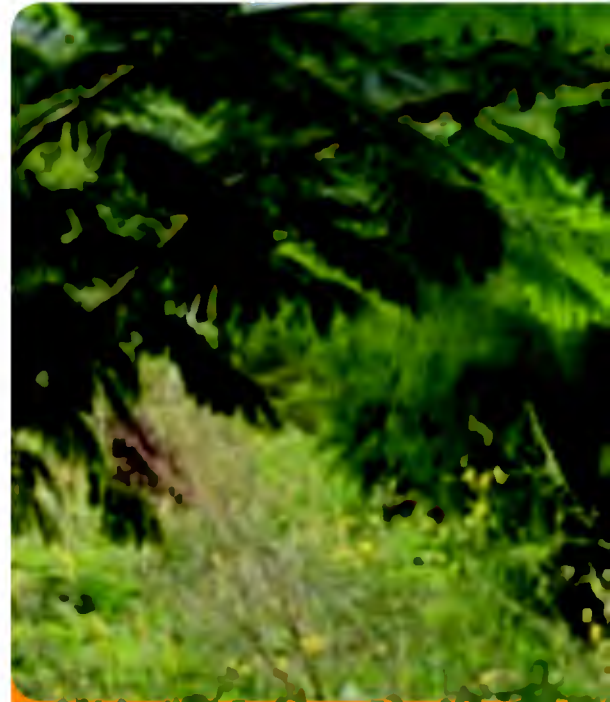
Usaha berkesinambungan untuk meraih lisensi sosial bagi operasional kami.

### **PERLINDUNGAN ASET**

Bertanggung jawab secara aktif terhadap perlindungan aset-aset strategis.

### **REPUTASI**

Memastikan bahwa tindakan-tindakan secara efektif mendemonstrasikan dan mengkomunikasikan nilai-nilai dalam mengelola persepsi para pemangku kepentingan dan meningkatkan reputasi.





As part of Vale's global operations, PTI is working tirelessly to improve every aspect of our operations. We are executing our business plans and measuring our success based on these six strategic objectives:

### **GROWTH**

Profitably increase our production capacity through brown field and green field expansions and resource utilization to meet the needs of all our stakeholders and the requirements of our Contract of Work.

### **EFFICIENCY**

Increase the efficiency of our operations in order to improve profitability and offset downturns in nickel price.

### **WORKFORCE**

Ensure we fully engage our workforce in the execution of our strategy, and that our workforce is the right size, providing the right capabilities at the right place and time for the right cost.

### **SOCIAL LICENSE**

Continuously act to earn our social license to operate.

### **ASSET PROTECTION**

Take active responsibility for the protection of our strategic assets.

### **REPUTATION**

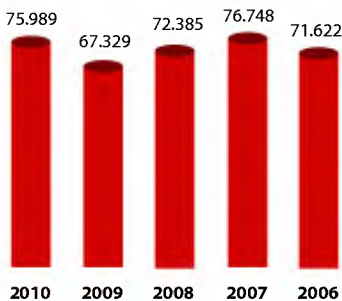
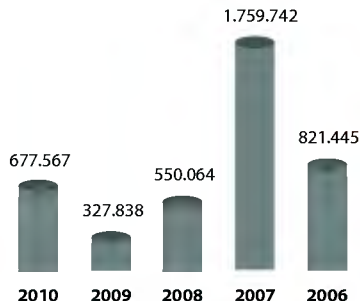
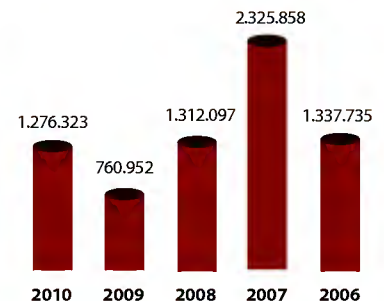
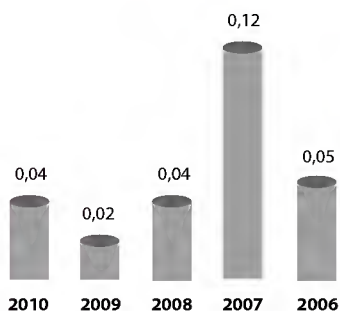
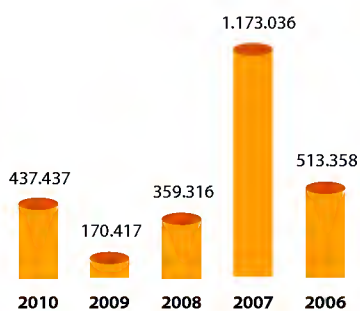
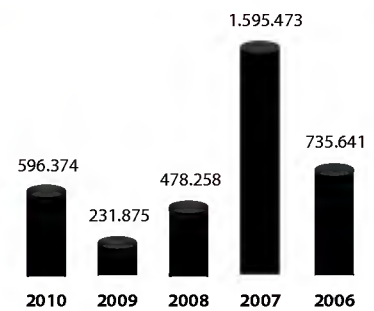
Ensure our actions effectively demonstrate and communicate our values in order to manage the perceptions of our stakeholders and enhance our reputation.

## RINGKASAN KINERJA

## PERFORMANCE HIGHLIGHTS

## HASIL YANG BAIK PADA TAHUN 2010

PTI membukukan laba bersih sebesar AS\$437,4 juta pada tahun 2010 yang merupakan peningkatan 157% dari AS\$170,4 juta pada tahun 2009. Hasil yang lebih baik pada tahun 2010 ini terutama disebabkan oleh harga realisasi jual rata-rata yang lebih tinggi dan volume penjualan yang lebih besar karena peningkatan produksi. Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA) kami pada tahun 2010 meningkat signifikan sebesar 107% menjadi AS\$677,6 juta dari AS\$327,8 juta pada tahun 2009. Perbaikan EBITDA pada tahun 2010 ini terutama disebabkan oleh kenaikan margin per unit nikel dalam matte yang dijual dan volume penjualan yang lebih besar karena peningkatan produksi.

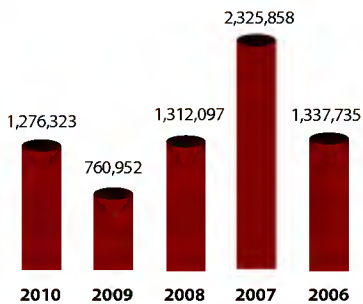
PRODUKSI  
(metrik ton)EBITDA  
(dalam ribuan AS\$)PENJUALAN  
(dalam ribuan AS\$)LABA BERSIH PER SAHAM  
(AS\$/saham)LABA BERSIH  
(dalam ribuan AS\$)LABA OPERASI  
(dalam ribuan AS\$)

## STRONG RESULTS IN 2010

PTI reported US\$437.4 million in net earnings in 2010 compared to US\$170.4 million in 2009, a 157% increase. The improved result was mainly driven by higher average realized selling price and greater sales volume due to higher production. Our Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) increased significantly by 107% in 2010 to US\$677.6 million from US\$327.8 million in 2009. The improvement in 2010 EBITDA was driven by a higher margin per unit of nickel in matte sold and greater sales volume due to higher production.

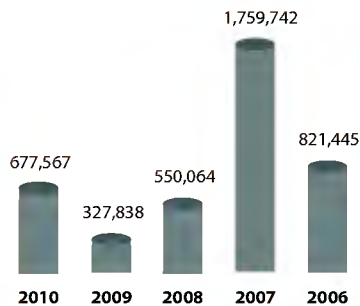
### SALES

(US\$, in thousands)



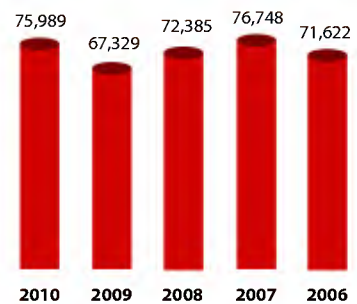
### EBITDA

(US\$, in thousands)



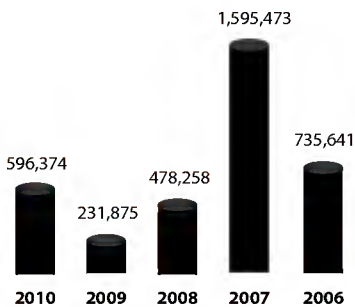
### PRODUCTION

(metric tons)



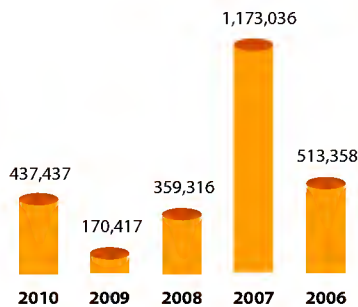
### OPERATING PROFIT

(US\$, in thousands)



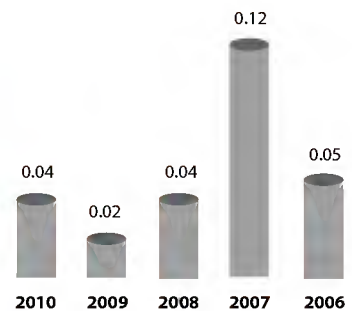
### NET EARNINGS

(US\$, in thousands)



### EARNINGS PER SHARE

(US\$/share)



# DAFTAR ISI

## TABLE OF CONTENTS

7	<b>Profil Perusahaan Company Profile</b>
8	Sekilas PTI PTI at a glance
10	Visi, misi, sasaran dan nilai-nilai kami Our vision, mission, goals and values
14	Profil pemegang saham Shareholder profile
19	<b>Ulasan tahun 2010 2010 in Review</b>
20	Ulasan tahun 2010 The year in review
26	Ikhtisar data keuangan penting Key financial highlights
28	Ikhtisar saham dan surat berharga Stock and securities highlights
34	Penghargaan Awards
36	Ulasan pasar nikel tahun 2010 2010 Nickel market review
38	Cadangan mineral Mineral reserves
42	Perubahan Kontrak Karya Changes to Contract of Work
44	Risiko dan ketidakpastian Risks and uncertainties
51	<b>Dewan Komisaris Board of Commissioners</b>
52	Profil Dewan Komisaris Commissioner profiles
56	Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners
69	<b>Direksi Board of Directors</b>
70	Profil Direksi Director profiles
72	Laporan Direksi Report of the Board of Directors
94	<b>Laporan Komite Audit Report of the Audit Committee</b>
97	<b>Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance</b>
98	Komitmen kami terhadap tata kelola yang baik Our commitment to good governance
100	Ikhtisar kegiatan tata kelola tahun 2010 Governance highlights for 2010
102	Kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik tata kelola Governance policies and practices
102	Dewan Komisaris Board of Commissioners
104	Direksi Board of Directors
110	Komite Audit Audit Committee
114	Komite Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Committee
116	Tata kelola operasional Operational governance
125	<b>Sumber Daya manusia Human Resources</b>
126	Komitmen terhadap karyawan kami Our commitment to our people
139	<b>Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility</b>
140	Komitmen kami terhadap tanggung jawab sosial Our commitment to social responsibility
146	Ikhtisar lingkungan hidup kesehatan dan keselamatan Environmental health and safety highlights
148	Program pengembangan masyarakat Community development programs
163	<b>Analisa dan Pembahasan Manajemen Management's Discussion &amp; Analysis</b>
260	<b>Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2010 Responsibility for the 2010 Annual Report</b>
262	<b>Pernyataan Direksi Directors' Statements</b>
263	<b>Laporan Keuangan Financial Statements</b>
321	<b>Informasi Perusahaan Corporate Information</b>
322	Sejarah perusahaan Corporate history
326	Nama dan alamat institusi atau pendukung profesional pasar modal Name and address of institutions or professionals supporting the capital market
327	Akuntan independen Perusahaan Company Independent Accountant
328	Biografi Dewan Komisaris Board of Commissioners' biographies
340	Biografi Direksi Board of Directors' biographies
346	<b>Peristilahan Glossary of terms</b>





PROFIL PERUSAHAAN

# COMPANY PROFILE

## SEKILAS PTI

# PTI AT A GLANCE

PTI adalah produsen nikel utama dunia. Selama lebih dari empat dekade sejak penanda-tanganan Kontrak Karya kami dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 1968, PTI telah menyediakan pekerjaan, meningkatkan kehidupan masyarakat di lingkungan operasional kami, menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memberikan sumbangsih positif bagi perekonomian Indonesia.

<b>Nama</b>	PT International Nickel Indonesia Tbk
<b>Alamat</b>	Plaza Bapindo Citibank Tower Lantai 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190  T: +62-21-524 9000 F: +62-21-524 9020 www.pt-inco.co.id
<b>Tanggal Didirikan</b>	Juli 1968
<b>Kegiatan Usaha</b>	PTI memproduksi nikel dalam matte, yang merupakan produk antara, dari bijih lateritik pada fasilitas-fasilitas penambangan dan pengolahan terpadu kami di dekat Sorowako di pulau Sulawesi. Seluruh produksi kami dijual berdasarkan kontrak jangka panjang dalam denominasi dollar AS kepada pabrik pemurnian di Jepang.
<b>Jumlah Karyawan</b>	3.136 karyawan tetap 3.006 karyawan kontrak
<b>Bursa Efek</b>	Bursa Efek Indonesia (BEI:INCO) Terdaftar pada tanggal 16 Mei 1990
<b>Jumlah Saham (000)</b>	9.936.339 saham ditempatkan dan disetor penuh
<b>Pemegang Saham</b>	Vale Canada Limited* – 58,73% Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., Ltd. – 20,09% Publik dan pemegang saham lainnya – 21,18%

\* Vale Canada Limited adalah satu perusahaan yang merupakan kelompok usaha Vale S.A Base Metals. Vale Canada Limited (Cale Canada), sebelumnya Vale Inco Limited, berubah sejak 31 Agustus 2010.

PTI is one of the world's premier producers of nickel. For more than four decades, since the signing of our Contract of Work with the Indonesian Government in 1968, PTI has provided skilled jobs, enhanced lives in the communities in which we operate, benefited shareholders and contributed positively to the Indonesian economy.

<b>Name</b>	PT International Nickel Indonesia Tbk
<b>Address</b>	Plaza Bapindo Citibank Tower 22 <sup>nd</sup> floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190  T: +62-21-524 9000 F: +62-21-524 9020 www.pt-inco.co.id
<b>Date of incorporation</b>	July 1968
<b>Business activities</b>	PTI produces nickel in matte, an intermediate product, from lateritic ores at our integrated mining and processing facilities near Sorowako on the island of Sulawesi. Our entire production is sold in U.S. dollars under long-term contracts for refining in Japan.
<b>Number of employees</b>	3,136 employees 3,006 contractors
<b>Stock exchange</b>	Indonesia Stock Exchange (IDX:INCO) Registered May 16, 1990
<b>Shares (000s)</b>	9,936,339 issued and fully paid shares
<b>Shareholders</b>	Vale Canada Limited* – 58.73% Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. – 20.09% Public and other shareholders – 21.18%
	*Vale Canada Limited is one of the companies that comprise Vale S.A.'s larger Base Metals business. Vale Canada Limited (Vale Canada), formerly Vale Inco Limited, changed since August 31, 2010.

## VISI, MISI, SASARAN DAN NILAI-NILAI KAMI

# OUR VISION, MISSION, GOALS AND VALUES

Pasar berfluktuasi. Teknologi terus berubah. Strategi-strategi kami mengelola perubahan-perubahan ini dalam pendekatan bisnis kami. Namun visi, misi, nilai-nilai dan sasaran-sasaran kami tetap sama. Inilah yang menjadi ciri kami dan melandasi budaya perusahaan kami yang kuat.

### VISI KAMI

Menjadi salah satu produsen nikel primer utama dunia dan melebihi standar-standar kesempurnaan dalam eksplorasi, pengembangan, implementasi proyek dan operasional bisnis.

### MISI KAMI

Mentransformasi sumber-sumber daya mineral Indonesia menjadi pembangunan yang makmur dan berkesinambungan.

### SASARAN-SASARAN KAMI

1. Mengoperasikan tempat kerja yang aman dan sehat, yang mencerminkan penatalayanan lingkungan hidup yang bertanggung jawab.
2. Memberikan hasil yang kompetitif dan berkesinambungan bagi para pemegang saham melalui operasi produksi nikel yang menguntungkan.
3. Berkomunikasi secara pro-aktif dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, masyarakat, pemerintah, pelanggan dan pemasok, untuk memastikan terjalinnya hubungan baik yang berkesinambungan.

Markets fluctuate. Technologies continue to evolve. Our strategies address these changes in our approach to our business. But our vision, our mission, our values and goals remain constant. They define who we are and serve as the foundation of our strong corporate culture.

## OUR VISION

To be one of the world's leading primary nickel producers and surpass the established standards of excellence in exploration, development, project implementation and business operations.

## OUR MISSION

To transform Indonesian mineral resources into a prosperous and sustainable development.

## OUR GOALS

1. Operate a safe and healthy workplace that reflects responsible environmental stewardship.
2. Deliver sustainable and competitive returns to shareholders through profitable nickel producing operations.
3. Communicate proactively with stakeholders, including shareholders, employees, communities, governments, customers and suppliers, to ensure strong ongoing relationships.

## NILAI-NILAI KAMI

Kami bangga akan nilai-nilai kami di PTL. Kami telah menciptakan perusahaan dengan budaya yang mendorong keberhasilan kami, dan nilai-nilai serta perilaku yang dilaksanakan setiap hari.

### Etika dan Transparansi

Perilaku organisasi kami yang bertindak atas dasar integritas, kepatuhan hukum, prinsip-prinsip moral dan kesepakatan perilaku yang ditetapkan dan diterima oleh masyarakat, serta mengkomunikasikan secara jelas kebijakan-kebijakan kami dan hasilnya.

### Kesempurnaan Kinerja

Upaya mencapai peningkatan dan pengendalian proses yang berkesinambungan, menggunakan indikator kinerja yang diakui sebagai praktik terbaik, mempromosikan budaya kinerja tinggi dan memastikan pencapaian dan kesinambungan kelebihan kompetitif yang bertahan lama.

### Kewirausahaan

Pola pikir kami yang teguh sebagai organisasi yang cepat dan gigih mencari peluang baru dan solusi-solusi inovatif dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan yang berubah, memastikan pelaksanaan strategi yang bersumbangsih terhadap pertumbuhan kami.

### Tanggung Jawab Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup

Kami mengakui kebutuhan agar dimensi-dimensi ini selalu seimbang, mempromosikan pengembangan dan memastikan kesinambungan.

### Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan

Kami tidak akan pernah mengabaikan keselamatan. Manusia lebih penting daripada hasil dan benda-benda materi. Tidak pernah ada pertimbangan lain dalam hal keselamatan hidup seseorang – pilihan kami hanya kehidupan, kesehatan dan keselamatan karyawan, masyarakat dan pelanggan kami.

### Kebanggaan

Hasil dari nilai-nilai ini. Kami berperilaku sebagai pemilik usaha, gigih berusaha mencapai sasaran-sasaran kami yang telah ditetapkan, berbagi dan merayakan hasil-hasil dan memperkuat relasi. Kami bangga membangun sesuatu yang akan menghasilkan perbedaan.



## OUR VALUES

At PTI, we are proud of our values. We've created a company whose culture fuels our success, and where our values and behaviours are lived every day.

**Ethics and Transparency** Our behaviour as an organization, by acting with integrity, abiding by the law, moral principles and behavioral covenants established and accepted by society and by clearly communicating our policies and results.

**Excellence in Performance** The quest for continuous improvement and process control, using performance indicators acknowledged as best practice, promoting a high-performance culture and ensuring that long-lasting competitive advantages are obtained and sustained.

**Entrepreneurship** Our determined mindset as an organization that rapidly and unrelentingly seeks new opportunities and innovative solutions in the face of shifting challenges and needs and ensuring the execution of strategies that contribute to our growth.

**Economic, Social and Environmental Responsibility** We acknowledge the need for these dimensions to be constantly in balance, promoting development and ensuring sustainability.

**Prioritizing Health and Safety** We will never forgo safety. People are more important than results and material goods. There is never a choice to be made regarding someone's life — our only choice is the life, health and safety of our employees, communities and customers .

**Pride** The result of all these values. We behave as owners of the business, in the relentless quest to achieve our defined goals, sharing and celebrating results and strengthening relationships. We are proud to build something that will make a difference.

## PROFIL PEMEGANG SAHAM

# SHAREHOLDER PROFILE

### PEMEGANG SAHAM UTAMA

Para pemegang saham utama kami mayoritas per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham Utama	Persentase
Vale Canada Limited	58,73
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	20,09
Publik	20,14
Vale Japan Limited	0,55
Mitsui & Co., Ltd.	0,35
Sumitomo Corporation	0,14

Saham PTI yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi (termasuk dalam pemegang saham publik di atas) dapat dilihat pada tabel berikut.

	Jumlah Saham	%
Ciho D. Bangun	2.080	-

### RENTANG KEPEMILIKAN SAHAM

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah pemegang saham PTI pada tahun 2010 dan 2009, dikategorikan berdasarkan rentang jumlah saham yang dimiliki.

Rentang Kepemilikan Saham	2010		2009	
	Jumlah Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Pemegang Saham
1-1.000	1.575.568	1.936	2.048.173	2.481
1.001-5.000	24.212.800	6.879	9.168	9.168
5.001-10.000	16.221.816	1.926	3.138	3.138
10.001-100.000	112.843.701	3.420	5.594	5.594
100.001-1.000.000	245.175.283	761	1.005	1.005
>1.000.000	9.536.309.552	296	9.391.098.182	256



## MAJOR SHAREHOLDERS

Major shareholders, as of December 31, 2010, are as follows:

Major Holders of Shares	% of class
Vale Canada Limited	58.73
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	20.09
Public	20.14
Vale Japan Limited	0.55
Mitsui & Co., Ltd.	0.35
Sumitomo Corporation	0.14

Shares of PTI owned by members of the Board of Commissioners and Board of Directors (included as public shareholders above) are shown in the table below.

	Jumlah Saham Total Shares	%
Ciho D. Bangun	2,080	-

## SHARE RANGE

The table below shows the number of PTI shareholders, categorized by range of shares owned, for 2009 and 2010.

Range of Share Owned	2010		2009	
	Number of Shares	Number of Shareholders	Number of Shares	Number of Shareholders
1-1,000	1,575,568	1,936	2,048,173	2,481
1,001-5,000	24,212,800	6,879	9,168	9,168
5,001-10,000	16,221,816	1,926	3,138	3,138
10,001-100,000	112,843,701	3,420	5,594	5,594
100,001-1,000,000	245,175,283	761	1,005	1,005
>1,000,000	9,536,309,552	296	9,391,098,182	256

## KEPEMILIKAN SAHAM

20 pemegang saham terbesar PTI pada tahun 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

2010		2009		2009	
PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	%	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	%
1 VALE CANADA LIMITED	5.835.607.960	58,73	VALE INCO LIMITED	5.835.607.960	58,73
2 SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.	1.996.281.680	20,09	SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.	1.996.281.680	20,09
3 PT JAMSOSTEK (PERSERO) – JHT	75.927.000	0,76	REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS 90829.40.00	85.666.500	0,86
4 VALE JAPAN LIMITED	54.083.720	0,54	PT JAMSOSTEK (PERSERO) - JHT	75.927.000	0,76
5 PT AIA FINL - UL EQUITY	50.201.500	0,51	VALE INCO JAPAN LIMITED	54.083.720	0,54
6 BBH LUXEMBOURG S/A FIDELITY FD, SICAV-INDONESIA FD	47.257.500	0,48	SSB H61B DYNAMIC VALUE FUND OF CANADA-2144604194	47.304.200	0,48
7 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS 90829.40.00	45.937.000	0,46	JPMCB-JPMORGAN FUND ICVC - JPM NATURAL RESOURCES FUND -2157804182	43.500.000	0,44
8 JPMCB-JPMORGAN FUND ICVC - JPM NATURAL RESOURCES FUND -2157804182	43.500.000	0,44	FORTIS EKUITAS -89763.4000	37.146.000	0,37
9 BNYM SA/NV AS CUST OF EMPLOYEES PROVIDENT FUND	43.403.500	0,44	CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND	35.816.500	0,36
10 PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE-REF	42.482.500	0,43	MONSIEURIE & CO., LTD.	35.060.640	0,35
11 JPMCB-JPMORGAN FUNDS -2157804185	41.000.000	0,41	PT JAMSOSTEK (PERSERO) - NON JHT	32.095.000	0,32
12 CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND	39.701.500	0,40	JPMCB-JPMORGAN FUNDS -2157804185	30.879.500	0,31
13 MITSUI & CO., LTD.	35.060.640	0,35	GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE	30.129.485	0,30
14 BBH BOSTON S/A VANGRD EMG MKTS STK INFD	33.768.650	0,34	FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V	30.010.000	0,30
15 RD BNP PARIBAS EKUITAS - 897634000	33.419.000	0,34	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE-REF	29.393.000	0,30
16 PT JAMSOSTEK (PERSERO) - NON JHT	32.095.000	0,32	PT AIA FINL - UL EQUITY	27.055.000	0,27
17 HBAP RE 086 BEST INVESTMENT CORPORATION	21.328.500	0,21	RD FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS	22.953.000	0,23
18 JP MORGAN CHASE BANK RE ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY - 2157804030	20.704.500	0,21	JPMCB-VANGUARD PRCS METALS AND MINING FUND -2157804101	22.500.000	0,23
19 THE NORTHERN TRUST S/A AVFC	20.202.470	0,20	CB HONGKONG S/A CFSIL AC WS GLOBAL RESOURCES FUND	21.649.500	0,22
20 THE NORTHERN TRUST AND COMPANY S/A FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	18.409.476	0,19	BNYM SA/NV AS CUST OF EMPLOYEES PROVIDENT FUND	21.247.500	0,21

## INFORMASI LEBIH LANJUT

PTI mengumumkan di media massa mengenai peristiwa-peristiwa dan informasi material perusahaan selain hasil-hasil keuangan triwulanan secara rutin. Informasi ini dapat dilihat pada situs kami [www.pti-inco.co.id](http://www.pti-inco.co.id).

Pemegang saham atau publik yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut mengenai PTI dipersilahkan menghubungi departemen hubungan investor kami.

web : [www.pti-inco.co.id](http://www.pti-inco.co.id)  
 telephone: +62-21-524 9000  
 fax : +62-21-524 9020  
 email : [pti.investorrelations@valeinco.com](mailto:pti.investorrelations@valeinco.com)

PT International Nickel Indonesia Tbk  
 Plaza Bapindo - Citibank Tower, Lantai 22  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
 Jakarta 12190 – Indonesia  
 Departemen Hubungan Investor

## SHARE HOLDINGS

The holdings of PTI's 20 largest shareholders for 2010 and 2009 are shown below.

2010			2009		
SHAREHOLDER	NUMBER OF SHARES	%	SHAREHOLDER	NUMBER OF SHARES	%
1 VALE CANADA LIMITED	5,835,607,960	58.73	VALE CANADA LIMITED	5,835,607,960	58.73
2 SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.	1,996,281,680	20.09	SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.	1,996,281,680	20.09
3 PT JAMSOSTEK (PERSERO) - JHT	75,927,000	0.76	REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS 90829.40.00	85,666,500	0.86
4 VALE JAPAN LIMITED	54,083,720	0.55	PT JAMSOSTEK (PERSERO) - JHT	75,927,000	0.76
5 PT AIA FINL - UL EQUITY	50,201,500	0.51	VALE JAPAN LIMITED	54,083,720	0.54
6 BBH LUXEMBOURG S/A FIDELITY FD, SICAV-INDONESIA FD	47,257,500	0.48	SSB H61B DYNAMIC VALUE FUND OF CANADA-2144604194	47,304,200	0.48
7 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS 90829.40.00	45,937,000	0.46	JPMCB-JPMORGAN FUND ICVC - JPM NATURAL RESOURCES FUND -2157804182	43,500,000	0.44
8 JPMCB-JPMORGAN FUND ICVC - JPM NATURAL RESOURCES FUND -2157804182	43,500,000	0.44	FORTIS EKUITAS -89763.4000	37,146,000	0.37
9 BNYM SA/NV AS CUST OF EMPLOYEES PROVIDENT FUND	43,403,500	0.44	CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND	35,816,500	0.36
10 PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE-REF	42,482,500	0.43	mitsui & co., ltd.	35,060,640	0.35
11 JPMCB-JPMORGAN FUNDS -2157804185	41,000,000	0.41	PT JAMSOSTEK (PERSERO) - NON JHT	32,095,000	0.32
12 CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND	39,701,500	0.40	JPMCB-JPMORGAN FUNDS -2157804185	30,879,500	0.31
13 MITSUI & CO., LTD.	35,060,640	0.35	GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE	30,129,485	0.30
14 BBH BOSTON S/A VANGRD EMG MKTS STK INFD	33,768,650	0.34	FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V	30,010,000	0.30
15 RD BNP PARIBAS EKUITAS - 897634000	33,419,000	0.34	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE-REF	29,393,000	0.30
16 PT JAMSOSTEK (PERSERO) - NON JHT	32,095,000	0.32	PT AIA FINL - UL EQUITY	27,055,000	0.27
17 HBAP RE 086 BEST INVESTMENT CORPORATION	21,328,500	0.21	RD FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS	22,953,000	0.23
18 JP MORGAN CHASE BANK RE ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY - 2157804030	20,704,500	0.21	JPMCB-VANGUARD PRCs METALS AND MINING FUND -2157804101	22,500,000	0.23
19 THE NORTHERN TRUST S/A AVFC	20,202,470	0.20	CB HONGKONG S/A CFSIL AC WS GLOBAL RESOURCES FUND	21,649,500	0.22
20 THE NORTHERN TRUST AND COMPANY S/A FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	18,409,476	0.19	BNYM SA/NV AS CUST OF EMPLOYEES PROVIDENT FUND	21,247,500	0.21

## FOR MORE INFORMATION

PTI issues news releases announcing corporate material events and information as well as regular quarterly financial results. These may be found on our website at [www.pt-inco.co.id](http://www.pt-inco.co.id).

Shareholders or other members of the public who are interested in obtaining additional information about PTI are invited to contact our investor relations department.

web : [www.pt-inco.co.id](http://www.pt-inco.co.id)  
 telephone: +62-21-524 9000  
 fax : +62-21-524 9020  
 email : [pti.investorrelations@valeinco.com](mailto:pti.investorrelations@valeinco.com)

PT International Nickel Indonesia Tbk  
 Plaza Bapindo - Citibank Tower, 22<sup>nd</sup> Floor  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
 Jakarta 12190 – Indonesia  
 Attention: Investor Relations



ULASAN TAHUN 2010

# 2010 IN REVIEW

## ULASAN TAHUN 2010

# THE YEAR IN REVIEW

PTI melakukan investasi dalam proses-proses, fasilitas-fasilitas dan karyawan kami untuk membangun bisnis bagi masa depan. Dengan fokus yang kukuh untuk perbaikan yang berkesinambungan, kami memperbaiki efisiensi, produktivitas dan kualitas operasi kami untuk memastikan kesinambungan dan meningkatkan hasil bagi para pemangku kepentingan.

### 1. Pertumbuhan

Meningkatkan kapasitas produksi dan penggunaan sumber daya secara menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan dan persyaratan Kontrak Karya kami.

- Mencapai pendapatan penjualan bersih lebih dari AS\$1.276,3 juta – peningkatan 68%
- Mencapai laba bersih AS\$437,4 juta – peningkatan 157%
- Menghasilkan laba bersih per lembar saham AS\$0,04 – peningkatan 100%
- Produksi nikel dalam matte meningkat 13% menjadi 75.989 metrik ton
- Pengiriman nikel dalam matte meningkat 13% menjadi 75.839 metrik ton

### 2. Efisiensi

Meningkatkan efisiensi operasional kami untuk meningkatkan profitabilitas dan mengimbangi penurunan harga nikel.

- Biaya operasi aktual lebih rendah 9% dari rencana tahun 2010
- Biaya unit variabel aktual 4% di bawah rencana tahun 2010

### 3. Investasi

Memperluas kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan biaya. Proyek Karebbe adalah inisiatif utama program efisiensi energi dan pengurangan biaya kami.

Ringkasan Proyek Karebbe:

- Penyelesaian proyek telah mencapai 78%.
- Lebih dari AS\$315,8 juta telah digunakan dari anggaran AS\$410,0 juta.
- Proyek ini diharapkan selesai sesuai rencana, yaitu pada semester kedua tahun 2011.

**Kinerja konsisten PTI yang dipadu dengan keinginan untuk bertumbuh dalam peluang investasi yang baik.**

**PTI's consistent performance combined with our appetite to grow results in an excellent investment opportunity.**



PTI is investing in our processes, facilities and people to build our business for the future. With an unwavering focus on continuous improvement, we're improving the efficiency, productivity and quality of our operations to ensure their sustainability and enhance returns to our stakeholders.

**1. Growth**

Profitably increase our production capacity through brown field and green field expansions and resource utilization to meet the needs of all our stakeholders and the requirements of our Contract of Work.

- Achieved net sales revenues of over US\$1,276.3 million – 68% increase
- Achieved net earnings of US\$437.4 million – 157% increase
- Delivered net earnings per share of US\$0.04 – 100% increase
- Increased production of nickel in matte 13% to 75,989 metric tons
- Increased nickel in matte deliveries 13% to 75,839 metric tons

**2. Efficiency**

Increase the efficiency of our operations in order to improve profitability and offset downturns in nickel price.

- Actual fixed cost 9% lower than 2010 plan
- Actual unit variable cost 4% below 2010 plan

**3. Investments**

Expand production capacity, increase energy efficiency and cost reduction. The Karebbe project is the main initiative of our energy efficiency and cost reduction program.

Karebbe project highlights:

- Achieved 78% of project completion
- Over US\$315.8 million spent out of US\$410.0 million budget
- This project is expected to be completed in the second half of 2011 as planned.

#### 4. Tenaga kerja

Memastikan keterlibatan penuh tenaga kerja kami untuk melaksanakan strategi, dan agar tenaga kerja pada jumlah yang tepat, menghasilkan kapabilitas yang tepat, pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat dengan biaya yang tepat.

- Produktivitas tenaga kerja meningkat 11% dari tahun 2009 melalui pelatihan dan pengembangan berkesinambungan
- Lebih dari 87.000 jam-karyawan diinvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan tenaga kerja
- Lebih dari 11.000.000 jam kerja tanpa *Lost Time Injury* (LTI) – pencapaian tertinggi kami selama ini
- Implementasi struktur organisasi 7-tingkat Vale dan *Scorecard* Kinerja Karyawan
- Finalisasi negosiasi dengan Serikat Pekerja untuk Perjanjian Kerja Bersama selama dua tahun mendatang

#### 5. Lisensi Sosial

Usaha berkesinambungan untuk meraih lisensi sosial bagi operasional kami.

- Menginvestasikan hampir sejumlah AS\$6,4 juta dalam inisiatif-inisiatif tanggung jawab sosial
- Menyediakan fasilitas air bersih di kecamatan Towuti, Wasuponda dan Nuha
- Implementasi proyek perintisan Sistem Manajemen Lingkungan Hidup ISO 14001
- Mencapai tingkat kepatuhan 92,66% terhadap Standar Bahaya Utama

#### 6. Perlindungan Aset

Bertanggung jawab secara aktif terhadap perlindungan aset-aset strategis.

- Total pertanggung jawaban untuk seluruh aset Perseroan pada saat ini adalah AS\$2.774 juta
- Semua aset Perseroan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh semua risiko industri dan, tapi tidak terbatas pada gempa bumi, kebakaran, kerusakan mekanis atau listrik termasuk gangguan usaha lainnya



#### 4. Workforce

Ensure we fully engage our workforce in the execution of our strategy, and that our workforce is the right size, providing the right capabilities at the right place and time for the right cost.

- Increased workforce productivity 11% over 2009 through ongoing training and development
- Invested over 87,000 person-hours in workforce training and development
- Achieved over 11,000,000 working hours without Lost Time Injury (LTI) – a world-class achievement in the mining industry
- Implemented the Vale 7-Level organization structure and Employee Performance Scorecard
- Finalized negotiations with Workers' Union on a new two-year Collective Labour Agreement

#### 5. Social License

Continuously act to earn our social license to operate.

- Invested nearly US\$6.4 million in community development initiatives
- Provided clean water facilities in Towuti, Wasuponda and Nuha sub-districts
- Implemented ISO 14001 Environmental Management System pilot project
- Achieved 92.66% compliance for Major Hazard Standards

#### 6. Asset Protection

Take active responsibility for the protection of our strategic assets.

- The total insured value for all assets was up to a maximum of US\$2,774 million
- All of PTI's assets are insured against the risk of direct physical loss or damage caused by industrial risks, including but not limited to earthquake, fire and electrical or mechanical breakdown and include related business interruption

## 7. Reputasi

Memastikan bahwa tindakan-tindakan kami mendemonstrasikan dan mengkomunikasikan secara efektif nilai-nilai kami dengan tujuan untuk mengelola persepsi para pemangku kepentingan dan meningkatkan reputasi kami.

- Peringkat biru pada penilaian kinerja lingkungan hidup
- Penghargaan emas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Manajemen Lingkungan Hidup Tambang
- Penghargaan perunggu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Keselamatan Tambang
- Penghargaan Tata Kelola Perusahaan dari Indonesian *Institute of Corporate Directorship* (IICD) untuk Peran Terbaik Pemangku Kepentingan
- Kepemimpinan tata kelola perusahaan yang kuat dari Dewan Komisaris



## 7. Reputation

Ensure our actions effectively demonstrate and communicate our values in order to manage the perceptions of our stakeholders and enhance our reputation.

- Blue rating for environmental performance assessment
- Ministry of Energy and Mineral Resources gold award for Mine Environmental Management
- Ministry of Energy and Mineral Resources bronze award for Mine Safety
- The Indonesian Institute for Corporate Directorship award for Best Role of Stakeholders
- Strong leadership in corporate governance by the Board of Commissioners



## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

# KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

**Hasil-Hasil Operasional**  
(dalam ribuan dollar A5 kecuali jika dinyatakan lain)

Tahun yang berakhir pada  
tanggal 31 Desember,  
Year ended December 31,

**Results of Operations**  
(in thousands of US dollars except as otherwise indicated)

	2010	2009	2008	2007	2006
Produksi nikel dalam matte (metrik ton) <b>Nickel in matte production (metric tons)</b>	<b>75,989</b>	67,329	72,385	76,748	71,622
Pengiriman nikel dalam matte (metrik ton) <b>Nickel in matte deliveries (metric tons)</b>	<b>75,839</b>	66,890	73,048	76,657	71,713
Harga realisasi rata-rata (dolar per metrik ton) <b>Average realized price (dollar per metric ton)</b>	<b>16,568</b>	11,227	17,724	29,881	18,356
<b>Data Laporan Laba Rugi Statement of Earnings Data:</b>					
Penjualan <b>Sales</b>	<b>1,276,323</b>	760,952	1,312,097	2,325,858	1,337,735
Harga pokok penjualan <b>Cost of goods sold</b>	<b>652,245</b>	516,059	808,472	682,867	569,913
Laba kotor <b>Gross profit</b>	<b>624,078</b>	244,893	503,625	1,642,991	767,822
Biaya penjualan, umum dan administrasi <b>Selling, general and administrative expenses</b>	<b>27,704</b>	13,018	25,367	47,518	32,181
<b>Laba usaha Operating profit</b>	<b>596,374</b>	<b>231,875</b>	<b>478,258</b>	<b>1,595,473</b>	<b>735,641</b>
<b>(Beban)/pendapatan lainnya Other (expenses)/income</b>					
Beban bunga <b>Finance costs</b>	<b>(4)</b>	(190)	(605)	(1,503)	(1,990)
Lainnya, bersih <b>Others, net</b>	<b>(25,378)</b>	5,699	(12,190)	83,778	12,248
Selisih kurs <b>Currency translation adjustments</b>	<b>10,351</b>	(680)	(2,211)	(1,305)	(1,006)
Jumlah (beban)/pendapatan lainnya, bersih <b>Total other (expense)/income, net</b>	<b>(15,031)</b>	4,829	(15,006)	80,970	9,252
Laba sebelum pajak penghasilan <b>Earnings before income tax</b>	<b>581,343</b>	236,704	463,252	1,676,443	744,893
Beban pajak penghasilan <b>Income tax expense</b>	<b>143,980</b>	66,287	103,936	503,407	231,535
<b>Laba bersih Net earnings</b>	<b>437,363</b>	<b>170,417</b>	<b>359,316</b>	<b>1,173,036</b>	<b>513,358</b>
Saham yang dikeluarkan dan dibayar penuh (dalam ribuan) <sup>a)</sup> <b>Fully paid and issued shares (in thousands)<sup>a)</sup></b>	<b>9,936,339</b>	9,936,339	9,936,339	9,936,339	9,936,339
Jumlah saham yang diperdagangkan (dalam ribuan) <sup>a)</sup> <b>Number of shares traded (in thousands)<sup>a)</sup></b>	<b>4,314,781</b>	4,472,088	3,979,295	2,194,155	1,898,770
Modal kerja bersih <b>Net working capital</b>	<b>553,598</b>	542,274	382,905	384,754	708,457
Rata-rata modal kerja tahunan <b>Average yearly working capital</b>	<b>547,936</b>	462,590	383,830	546,606	520,642
Jumlah aset <b>Total assets</b>	<b>2,190,235</b>	2,027,556 <sup>b)</sup>	1,843,186	1,887,196	2,122,732
Belanja barang modal kas <b>Cash capital expenditures</b>	<b>153,108</b>	137,927	185,277	102,317	109,999
Jumlah kewajiban <b>Total liabilities</b>	<b>510,395</b>	446,250 <sup>b)</sup>	322,302	500,668	439,954
Jumlah hutang <b>Total debt</b>	<b>140,561</b>	141,264 <sup>b)</sup>	7,725	14,487	13,760
Jumlah ekuitas <b>Total equity</b>	<b>1,679,840</b>	1,581,306	1,520,884	1,386,528	1,682,778
EBITDA <sup>b)</sup> <b>EBITDA<sup>b)</sup></b>	<b>677,567</b>	327,838	550,064	1,759,742	821,445
Harga saham pada akhir tahun (Rp) (jumlah penuh) <sup>a)</sup> <b>Share price at year-end (IDR) (full amount)<sup>a)</sup></b>	<b>4,875</b>	3,650	1,930	9,625	3,100
Rupiah/A\$5 kurs tengah pada akhir tahun (jumlah penuh) <b>Rupiah/US\$ mid rate at year-end (full amount)</b>	<b>9,000</b>	9,500	11,100	9,300	9,100
Jumlah karyawan tetap pada akhir tahun <b>Total permanent employees at year-end</b>	<b>3,136</b>	3,319	3,610	3,735	3,440

**Hasil-Hasil Operasi**  
(dalam ribuan dollar A5 kecuali jika dinyatakan lain)

Tahun yang berakhir pada  
tanggal 31 Desember,  
Year ended December 31,

**Results of Operations**  
(in thousands of US dollars except as otherwise indicated)

	2010	2009	2008	2007	2006
<b>Rasio Profitabilitas Profitability Ratios</b>					
Laba kotor/penjualan <i>Gross profit/sales</i>	0.49	0.32	0.38	0.71	0.57
Laba usaha/penjualan <i>Operating profit/sales</i>	0.47	0.30	0.36	0.69	0.55
Laba bersih/penjualan <i>Net earnings/sales</i>	0.34	0.22	0.27	0.50	0.38
Laba bersih/jumlah asset <i>Net earnings/total assets</i>	0.20	0.08	0.19	0.62	0.24
Laba bersih/ekuitas <i>Net earnings/equity</i>	0.26	0.11	0.24	0.85	0.31
Tingkat pengembalian rata-rata modal (%) <sup>d)</sup> <i>Return on average capital employed (%)<sup>d)</sup></i>	32.8%	14.6% <sup>f)</sup>	31.6%	108.2%	49.1%
Laba bersih per saham dasar (A5\$/saham) <i>Earnings per share (US\$/share)</i>	0.04	0.02	0.04	0.12	0.05
<b>Rasio Likuiditas Liquidity Ratios</b>					
Aset lancar/kewajiban lancar <i>Current assets/current liabilities</i>	4.50	7.24	4.76	2.53	4.60
(Aset lancar-kewajiban lancar)/jumlah aset <i>(Current assets - current liabilities)/total assets</i>	0.25	0.27	0.21	0.20	0.33
<b>Analisa struktur modal/rasio hutang Capital Structure Analysis/Financial Leverage Ratios</b>					
Kewajiban/ekuitas <i>Liabilities/equity</i>	0.30	0.28 <sup>f)</sup>	0.21	0.36	0.26
Kewajiban/aset <i>Liabilities/assets</i>	0.23	0.22	0.17	0.27	0.21
Hutang/jumlah aset <i>Debt/total assets</i>	0.06	0.07	0.00	0.01	0.01
Hutang/jumlah ekuitas <i>Debt/total equity</i>	0.08	0.09 <sup>f)</sup>	0.01	0.01	0.01
Hutang/EBITDA <i>Debt/EBITDA</i>	0.21	0.43 <sup>f)</sup>	0.01	0.01	0.02
Hutang/nilai perusahaan <i>Debt/enterprise value</i>	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00
Arus kas dari operasi/jumlah hutang <i>Operating cash flow/total debt</i>	4.56	1.46 <sup>f)</sup>	37.50	96.71	36.39
Hutang/( arus kas dari operasi dikurangi dividen) <i>Debt/(operating cash flow minus dividends)</i>	0.47	1.42 <sup>f)</sup>	0.12 <sup>g)</sup>	(0.21) <sup>g)</sup>	0.04 <sup>g)</sup>
<b>Rasio Dividen Dividend Ratios</b>					
Dividen/sumber dana untuk dividen <i>Dividends/net earnings</i>	0.77	0.63 <sup>g)</sup>	0.63 <sup>g)</sup>	1.25 <sup>g)</sup>	0.21 <sup>g)</sup>
Dividen per saham <i>Dividends per share/share price</i>	0.06	0.03	0.13 <sup>g)</sup>	0.14 <sup>g)</sup>	0.03 <sup>g)</sup>
<b>Rasio Pemanfaatan Arus Kas Cash Flow Coverage Ratios</b>					
Arus kas dari operasi/penjualan <i>Operating cash flow/sales</i>	0.50	0.27	0.22	0.60	0.37
Arus kas dari operasi/belanja barang modal <i>Operating cash flow/capital expenditures</i>	3.50	1.48	1.59	12.08	4.54
Arus kas dari operasi/dividen <i>Operating cash flow/dividends</i>	3.22	1.88	-	1.17	0.96
<b>Rasio Analisa Pasar Modal Capital Market Analysis Ratios</b>					
Kapitalisasi pasar (A5\$ juta) <sup>g)</sup> <i>Market capitalization (US\$ million)<sup>d)</sup></i>	5,382	3,818	1,728	10,284	3,385
Nilai perusahaan (A5\$ juta) <sup>g)</sup> <i>Enterprise value (US\$ million)<sup>d)</sup></i>	5,119	3,698 <sup>f)</sup>	1,569	10,004	2,921
Harga terhadap nilai buku (kali) <sup>g)</sup> <i>Price to book value (times)<sup>g)</sup></i>	3.20	2.41	1.14	7.42	2.01

a) Disajikan kembali untuk mencerminkan pemecahan saham Perusahaan 1:4 efektif pada 3 Agustus 2004 dan 1:10 efektif pada 15 Januari 2008  
b) EBITDA = laba sebelum pajak + biaya bunga + penyusutan, deplesi dan amortisasi  
c) Laba sebelum pajak penghasilan dibagi dengan rata-rata modal tahunan yang digunakan (total ekuitas + total hutang)  
d) Nilai perusahaan = kapitalisasi pasar + jumlah hutang - kas dan setara kas;  
Kapitalisasi pasar = jumlah saham x harga saham (Rp)/nilai tukar  
e) Harga saham akhir tahun dalam dollar dibagi ekuitas per saham (jumlah ekuitas/jumlah saham yang diterbitkan)  
f) Berubah karena reklasifikasi aset lainnya yaitu biaya pinjaman tanggungan menjadi pinjaman untuk menyesuaikan dengan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.  
g) Disajikan kembali untuk mencerminkan pembayaran tunai dividen untuk tahun yang bersangkutan.

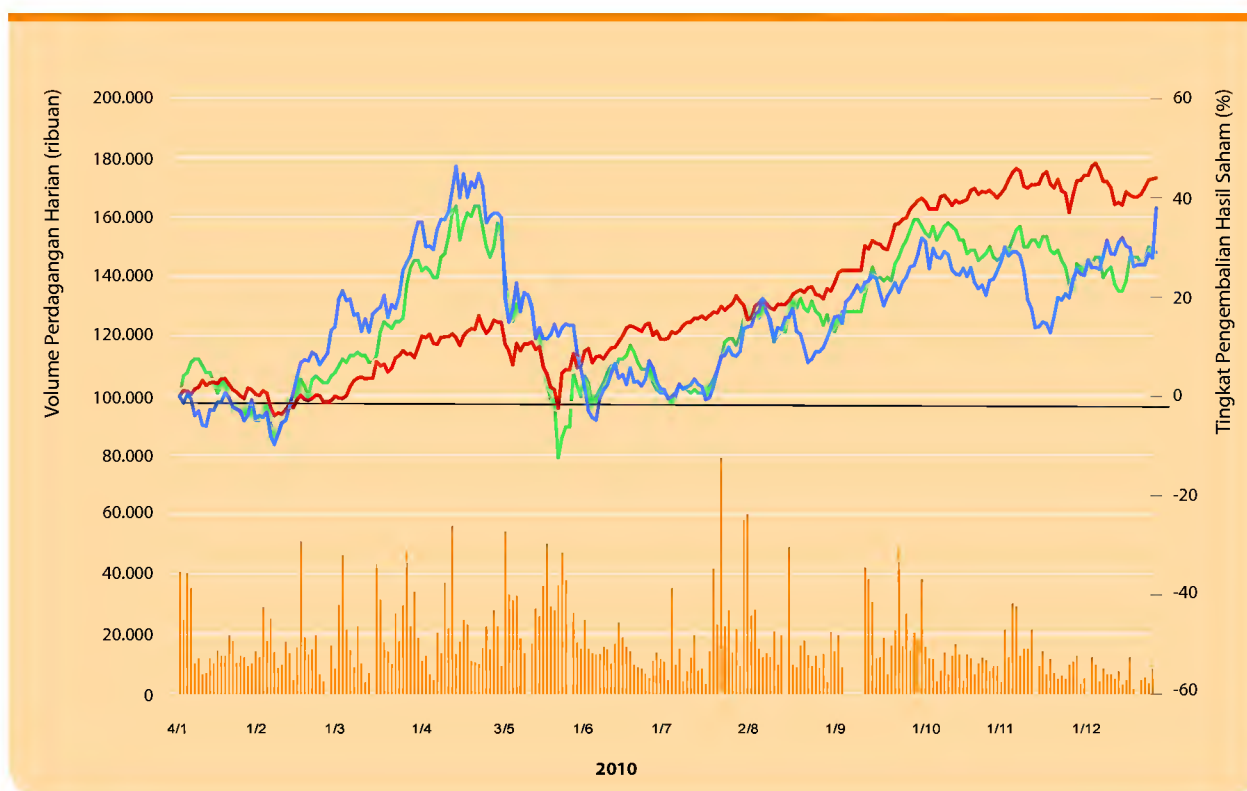
a) Restated to reflect split of the Company's shares on a four-for-one basis effective August 3, 2004 and a 10-for-one basis effective January 15, 2008  
b) EBITDA = Earnings before tax + interest expense + depreciation, depletion and amortization  
c) Earnings before income tax divided by yearly average capital employed (total equity + total debt)  
d) Enterprise value = market capitalization + total debt - cash and cash equivalents;  
Market capitalization = number of shares x share price (IDR)/exchange rate  
e) Share price at year-end in dollars divided by equity per share (total equity/total issued shares)  
f) Changed due to reclassification of other assets deferred borrowing costs to borrowings to conform to the basis on which the financial statements for the year ended December 31, 2010 have been presented  
g) Restated to reflect cash dividends payment for the year

## IKHTISAR SAHAM DAN SURAT BERHARGA

# STOCK AND SECURITIES HIGHLIGHTS

### KINERJA SAHAM

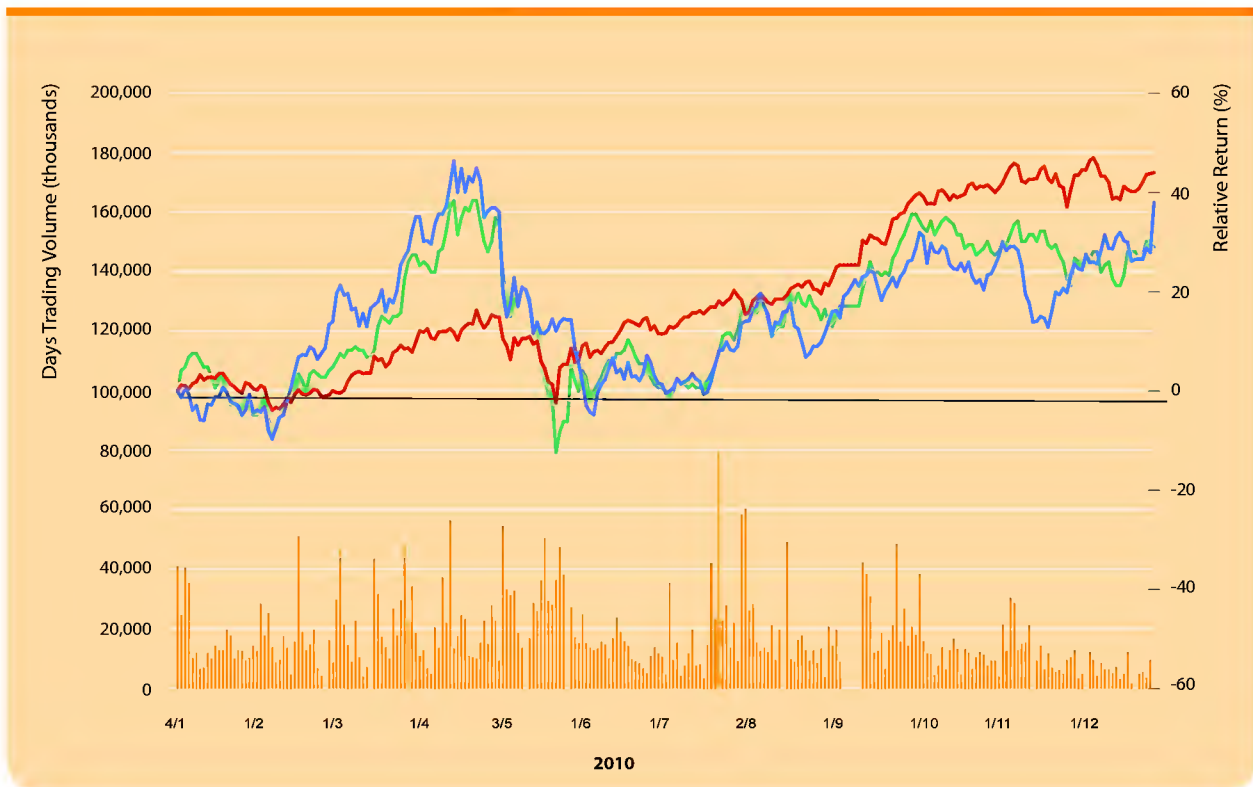
Grafik di bawah ini memperlihatkan tingkat pengembalian hasil saham PTI pada tahun 2010 dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia dan harga tunai nikel di Bursa Logam London (LME). Secara keseluruhan, harga saham PTI meningkat 34% dibandingkan tahun sebelumnya dibandingkan dengan peningkatan harga tunai LME sebesar 28% dan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan BEI sebesar 44%.



- Volume Perdagangan Harian (Saham)
- Indeks Harga Saham Gabungan (%)
- Saham PTI (%)
- Tunai LME (%)

## STOCK PERFORMANCE

The graph below shows the 2010 relative return on PTI's stock compared with the IDX Composite Index and the London Metal Exchange (LME) cash price. In aggregate, PTI's shares appreciated 34% year over year compared to increases in the LME cash price of 28% and the IDX Composite Index of 44%.



● Daily Trading Volume (Shares)

● IDX Composite Index (%)

● PTI's Stock (%)

● LME Cash (%)

## HARGA SAHAM

Tabel di bawah ini menunjukkan pergerakan harga saham PTI per triwulan dan rata-rata volume transaksi harian tahun 2010 dibandingkan dengan 2009.

	Triwulan	Terendah	Tertinggi	Penutupan	Jumlah Saham yang Diperdagangkan (ribuan)
2010	1	3.350	4.775	4.725	1.133.167
	2	3.200	5.200	3.750	1.290.628
	3	3.600	4.900	4.875	1.205.665
	4	4.425	5.100	4.875	685.322

	Triwulan	Terendah	Tertinggi	Penutupan	Jumlah Saham yang Diperdagangkan (ribuan)
2009	1	1.950	2.825	2.225	744.399
	2	2.200	4.750	4.150	1.487.984
	3	3.525	5.100	4.150	1.253.119
	4	3.000	4.375	3.650	986.584





## SHARE PRICE

The table below shows the quarterly changes in PTI's share price and the average daily trading volume in 2010 compared to 2009.

	Quarter	Lowest	Highest	Closing	Volume Trading (thousands)
2010	1	3,350	4,775	4,725	1,133,167
	2	3,200	5,200	3,750	1,290,628
	3	3,600	4,900	4,875	1,205,665
	4	4,425	5,100	4,875	685,322

	Quarter	Lowest	Highest	Closing	Volume Trading (thousands)
2009	1	1,950	2,825	2,225	744,399
	2	2,200	4,750	4,150	1,487,984
	3	3,525	5,100	4,150	1,253,119
	4	3,000	4,375	3,650	986,584



## SEJARAH DIVIDEN

Berikut ini ringkasan dividen yang dibayarkan dalam lima tahun terakhir.

Tahun	Dividen	Tanggal Pembayaran	Jumlah Dividen	
			AS/Saham	RpSaham
2010	10 Interim	22 Oktober	0,02000	178.440
	09 Akhir	-	-	-
	08 Akhir	14 April	0,01410	128.170
2009	09 Interim	29 Desember	0,01107	107.720
	08 Akhir	-	-	-
2008*	08 Interim	-	-	-
	07 Akhir	06 Mei	0,02264	208.150
2007*	07 Interim	7 Desember	0,09787	918.021
	06 Akhir	11 Mei	0,05000	454.500
2006*	06 Interim	5 Desember	0,00250	22.858
	05 Akhir	12 Mei	0,00850	74.588

\*Jumlah saham yang diperdagangkan telah disesuaikan dengan pemecahan nilai nominal saham 1:10 efektif sejak tanggal 15 Januari 2008.

Dividen dinyatakan dalam dollar AS. Bagi pemegang saham Indonesia, dividen dibayarkan dalam Rupiah yang nilainya setara dengan dividen yang dinyatakan dalam dollar AS, berdasarkan tarif kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pencatatan dividen. Dividen bagi pemegang saham asing dibayarkan dalam dollar AS.

## DIVIDEND HISTORY

Below is a summary of dividends paid in the past five years.

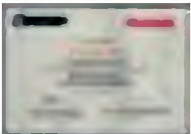
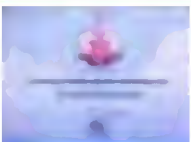
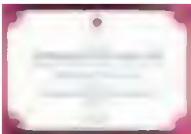


Year	Dividend	Date	Dividend Amount*	
			US\$/Share	RpShare
2010	10 Interim	22 October	0.02000	178,440
	09 Final	-	-	-
	08 Final	14 April	0.01410	128,170
2009	09 Interim	29 December	0.01107	107,720
	08 Final	-	-	-
2008*	08 Interim	-	-	-
	07 Final	06 May	0.02264	208,150
2007*	07 Interim	7 December	0.09787	918,021
	06 Final	11 May	0.05000	454,500
2006*	06 Interim	5 December	0.00250	22,858
	05 Final	12 May	0.00850	74,588

\*Restated to reflect a split of PTI's shares on a 10-for-one basis effective on January 15, 2008.

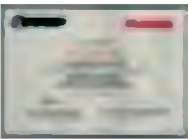
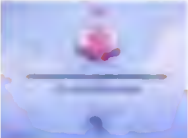
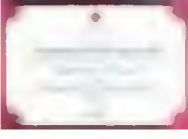


Dividends are declared in U.S. dollars. Indonesian shareholders are paid dividends in the rupiah equivalent of the dividend declared in U.S. dollars, based upon the middle rate determined by the Bank of Indonesia rate on record date of the dividend. Foreign shareholders are paid dividends in U.S. dollars.

## PENGHARGAAN AWARDS

PTI bangga menerima penghargaan atas prestasi lingkungan hidup dan operasional kami pada tahun 2010. Penghargaan-penghargaan ini adalah kesaksian atas komitmen kami terhadap perbaikan yang terus menerus dan kesempurnaan kinerja dalam setiap aspek operasi kami.

	Penghargaan	Kategori	Diberikan Oleh
	Penghargaan Tambang ke 2	Perusahaan Pertambangan Terbaik dalam Kepatuhan Lingkungan Hidup 25 Mei 2010	Majalah Pertambangan Indonesia Tambang
	SWA 100 Pencipta Kekayaan Terbaik 2010	Perusahaan Publik Terbaik Indonesia 2010 berdasarkan Metode WAITM (Wealth Added Index) Method* 1 Juli 2010	Majalah SWA Sembada oleh Stern Stewart & Co
	Penghargaan Laporan Tahunan 2009	Perusahaan publik swasta non-keuangan 22 September 2010	BAPEPAM-LK; Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Bursa Efek Indonesia; PEFINDO (PT Pemeringkat Efek Indonesia)
	Penghargaan Laporan Tahunan 2009	Pembebasan Audit Pajak untuk Tahun Fiskal 2009 18 September 2010	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak
	Penghargaan Aditama	Kategori Emas untuk Program Manajemen Lingkungan Hidup Pertambangan 2010 30 September 2010	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	Penilaian PROPER 2010	Peringkat Biru 10 Desember 2010	Kementerian Lingkungan Hidup
	Penghargaan IICD 2010 ke 2 untuk Tata Kelola Perusahaan	Peran Terbaik Pemangku Kepentingan 19 November 2010	IICD (The Indonesian Institute for Corporate Directorship)
	Upakarti Pratama Keselamatan Pertambangan	Penghargaan Perunggu atas Keselamatan Pertambangan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PTI is proud to have been recognized for our environmental and operational achievements in 2010. These awards are a testimony to our commitment to continuous improvement and performance excellence in every aspect of our operations.

	<b>Name of Award</b>	<b>Category</b>	<b>Awarded By</b>
	The 2 <sup>nd</sup> Tambang Award	Best Mining Company in Environmental Compliance May 25, 2010	The Indonesian Mining Magazine Tambang
	SWA 100 Best Wealth Creators 2010	Indonesia Best Public Companies 2010 Based on WAI™ (Wealth Added Index) July 1, 2010	SWA Sembada Magazine. By Stern Stewart & Co
	Annual Report Award 2009	Listed Non-Financial Private September 22, 2010	BAPEPAM-LK (Indonesian Capital Market Supervisory Agency); Ministry of Finance of the Republic of Indonesia; IDX (Indonesia Stock Exchange); PEFINDO (PT Pemeringkat Efek Indonesia)
	Annual Report Award 2009	Exemption of Tax Audit for Fiscal Year 2009 September 18, 2010	Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Directorate General of Taxes
	Aditama Award	Gold Category for The Mining Environmental Management Program 2010 September 30, 2010	Ministry of Energy and Mineral Resources
	2010 PROPER Assessment	Blue Rating December 10, 2010	State Ministry of Environment
	2 <sup>nd</sup> Annual IICD Corporate Governance Award 2010	The Best Role of Stakeholders November 19, 2010	The Indonesian Institute for Corporate Directorship
	Upakarti Pratama Mine Safety	Bronze Award for Mine Safety	Ministry of Energy and Mineral Resources

## ULASAN PASAR NIKEL TAHUN 2010

# 2010 NICKEL MARKET REVIEW

PTI memproduksi nikel dalam matte berkadar tinggi yang dijual kepada dua pelanggan, yaitu Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., berdasarkan kontrak jangka panjang. Dalam kondisi harga nikel bagaimana pun, PTI beroperasi seefektif dan efisien mungkin untuk memaksimalkan nilai dari operasional kami.

Rata-rata harga tunai nikel di LME pada tahun 2010 adalah AS\$21.809, meningkat 48% dari tahun 2009. Ini merupakan harga nikel nominal ketiga tertinggi sejak perdagangan dimulai di Bursa Logam London (LME) pada tahun 1979 dan keempat tertinggi setelah disesuaikan dengan inflasi.

Kenaikan harga pada tahun 2010 didorong oleh pemulihan ekonomi dan pencapaian tingkat produksi baja nirkarat tahunan yang tertinggi – industri baja nirkarat mengkonsumsi dua-per-tiga dari produksi nikel dunia. Setelah dua tahun resesi ekonomi dan tidak ada penimbunan baja nirkarat pada tahun 2008 dan 2009, produksi baja nirkarat dunia meningkat 23% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 31,8 juta ton pada tahun 2010. Produksi baja nirkarat terutama kuat pada semester pertama dan mendorong kenaikan harga pada bulan Maret dan April. Koreksi harga terjadi pada bulan Mei dan Juni, dan salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran ekonomi. Namun sentimen ekonomi yang membaik ikut mendorong kenaikan harga sepanjang sisa tahun itu. Menurut perkiraan Dana Moneter Internasional, output ekonomi dunia pada tahun 2010 meningkat kuat sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan penurunan sebesar 0,6% pada tahun 2009.

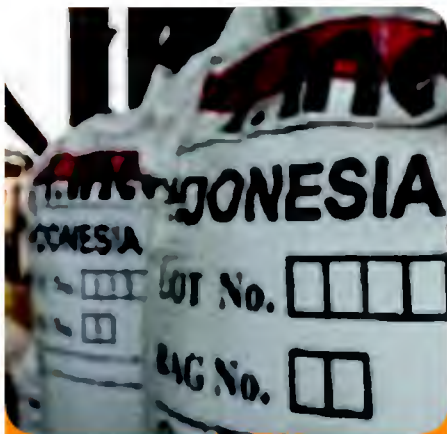
Sementara produksi baja nirkarat global meningkat, produksi baja nirkarat Cina meningkat secara dramatis menjadi sekitar 12 juta ton atau 38% dari produksi dunia. Baja nirkarat yang bukan produksi Cina diperkirakan meningkat 22%, tetapi masih jauh di bawah puncak tahun 2006 sehingga masih ada ruang untuk pemulihan lebih lanjut. Rasio rongsokan baja nirkarat tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu diperkirakan sebesar 42%. Pasar non baja nirkarat menunjukkan peningkatan sepanjang tahun dengan pulihnya industri-industri otomotif, minyak dan gas, dan pembuatan pesawat terbang.

Pasokan nikel diperkirakan meningkat 8% dari tahun 2009. Produksi ferro-nikel Cina meningkat lebih dari 60% pada tahun 2010, dan merupakan lebih dari separuh dari peningkatan pasokan nikel dunia. Meskipun pasokan nikel meningkat, pasar nikel dunia diperkirakan akan defisit dengan cadangan di LME sebesar 136.890 ton pada akhir tahun, turun dari 158.424 ton pada tahun 2009.

Ke depan, pasokan diperkirakan akan meningkat dengan kehadiran proyek-proyek nikel baru, dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan pada negara-negara berkembang diharapkan akan terus meningkatkan permintaan nikel dunia.

**Sentimen ekonomi yang membaik mendorong kenaikan harga nikel mencapai 48% pada akhir tahun dibandingkan tahun sebelumnya.**

## Improving economic sentiment helped to move the price of nickel higher to close the year up 48% from 2009.



Kantong berisi nikel dalam matte yang siap untuk di export.

Bags containing nickel in matte are ready for export shipment.

PTI produces a high-grade nickel in matte product that is sold to two customers, Vale's Canada and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., under long-term contracts. In any nickel price environment, PTI operates as efficiently and effectively as possible in order to maximize the value of our operations.

London Metal Exchange (LME) nickel cash prices averaged US\$21,809 per metric ton in 2010, an increase of 48% from 2009. This result represents the third highest nominal nickel price since trading began on the LME in 1979 and the fourth highest adjusting for inflation.

Driving the price increase in 2010 was a recovering economy and a new annual record level of stainless steel production – stainless steel accounting for approximately two-thirds of world nickel consumption. After two years of economic recession and stainless steel de-stocking in 2008 and 2009, world stainless steel production rose 23% year over year to an estimated 31.8 million tons in 2010. Stainless production was especially strong in the first half of the year helping to drive prices higher in March and April. By May and June, economic worries were one of the factors leading to a price correction. However, improving economic sentiment helped to move the price higher for the balance of the year. According to International Monetary Fund estimates, world economic output increased a strong 5% year over year in 2010, compared to a decline of 0.6% in 2009.

While stainless steel production increased globally, China's ramp-up of stainless steel production rose dramatically to approximately 12 million tons or 38% of world production. Stainless steel production outside of China is estimated to have risen 22% year over year but still remained well below 2006 peak levels, leaving room for further recovery. The stainless steel scrap ratio remained unchanged year over year at an estimated 42%. Non-stainless markets showed improvements throughout the year with recoveries in the world automotive, oil and gas and aerospace industries.

Nickel supply is estimated to have risen 8% from 2009 levels. Accounting for more than half of the increase in world nickel supply, Chinese production of nickel pig iron and ferro-nickel rose over 60% in 2010. Despite the increase in nickel supply, the world nickel market is estimated to have been in a deficit with LME stocks finishing the year at 136,890 tons, down from 158,424 tons in 2009.

Looking ahead, supply is anticipated to expand as new nickel projects are brought on line. However, in some cases there may be delays. In addition the ongoing economic growth of emerging countries is expected to strongly drive world nickel demand following the commodities super cycle.

## CADANGAN MINERAL

# MINERAL RESERVES

Tabel, diskusi dan catatan berikut memperlihatkan perkiraan Cadangan Mineral Terduga dan Terbukti serta data terkait per 31 Desember 2010 dan 2009. Perkiraan yang ditunjukkan dalam tabel, diskusi dan catatan dapat mencakup perbedaan karena pembulatan, sehingga menjadi tidak konsisten dengan beberapa angka yang dibahas sebelumnya.

	Per 31 Desember 2010		Per 31 Desember 2009	
	Juta ton	% Kadar	Juta ton	% Kadar
<b>CADANGAN BIJIH</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)(6)</sup> (dalam juta metrik ton (Mt))				
Terbukti	<b>75,4</b>	<b>1,83</b>	82,3	1,84
Terduga	<b>38,3</b>	<b>1,71</b>	38,8	1,70
<b>Total Terbukti dan Terduga</b>	<b>113,7</b>	<b>1,78</b>	121,1	1,79

#### CATATAN:

(1) Perkiraan cadangan mewakili, sesuai dengan peraturan dan keputusan yang diberlakukan SEC, termasuk definisinya, bagian kandungan mineral yang dapat secara ekonomis dan sah diekstraksi atau diproduksi pada saat cadangan ditentukan. "Cadangan Terbukti" adalah cadangan yang (i) kuantitasnya dihitung dari dimensi-dimensi yang terungkap pada galian, pari dan lubang-lubang penambangan dan pemboran; dimana kadar dan kualitasnya dihitung dari hasil pengambilan sampel yang rinci; dan (ii) lokasi inspeksi, pengambilan sampel serta pengukurannya berjarak sedemikian dekatnya dan karakter geologinya didefinisikan sedemikian baiknya sehingga ukuran, bentuk, kedalaman dan kandungan mineral dari cadangan tersebut dapat ditentukan dengan baik.

"Cadangan Terduga" adalah cadangan yang kuantitas dan kadar dan/atau kualitasnya ditentukan dari informasi serupa dengan yang digunakan untuk cadangan terbukti, namun lokasi inspeksi, jarak pengambilan sampel dan pengukurannya lebih berjauhan atau sebaliknya, tidak berjarak. Tingkat kepastiannya, meskipun lebih rendah daripada tingkat kepastian cadangan terbukti adalah cukup tinggi untuk mengasumsikan keberlanjutan antar titik-titik pengamatan.

Sehubungan dengan ketentuan dan peraturan SEC, total perkiraan cadangan bijih dihitung berdasarkan pada sejumlah asumsi, seperti metode penambangan, biaya produksi dan biaya-biaya lain, tingkat pemulihan logam, pemulihan bijih dan faktor-faktor dilusi. Nilai ekonomi dari cadangan bijih yang diperkirakan per akhir tahun 2010 ditentukan dengan menggunakan harga perkiraan metal jangka panjang Vale yang tidak melebihi harga metal rata-rata selama tiga tahun terakhir, berdasarkan harga tunai LME sesi pagi setiap hari dalam setiap bulan dari periode 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2010, untuk nikel adalah AS \$19.000/ton dengan penyesuaian terhadap diskon yang mencerminkan produk nikel dalam matte PTL. Berkenaan dengan nilai tukar, digunakan rata-rata nilai tukar dolar AS - Rupiah Indonesia (Rp) selama tiga tahun terakhir yaitu AS\$1=Rp9.687.

Guna menunjukkan kelayakan ekonomis atas perkiraan cadangan mineral akhir tahun 2010, biaya operasi dan biaya tetap didasarkan pada biaya anggaran kami untuk penggunaan jangka panjang pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan pengurangan biaya bahan bakar minyak dan diesel yang diakibatkan oleh harga bahan bakar minyak dan diesel yang lebih rendah, penurunan konsumsi bahan bakar minyak ketika proyek Karebbe dapat memasok listrik tenaga air, pengurangan konsumsi bahan bakar minyak pada pengoperasian pengering dengan konversi menjadi pemakaian batubara, dan menghentikan penyediaan awan setelah proyek Karebbe kami beroperasi. Faktor pemulihan nikel pabrik pengolahan kami juga didasarkan pada rencana operasi tahunan tersebut yang disesuaikan setiap tahun.



The following table, discussion and notes show our estimates of Proven and Probable Mineral Reserves and related data as of December 31, 2010 and 2009. The estimates shown in the table, discussion and notes may reflect rounding differences and, accordingly, may be inconsistent with certain numbers shown.

	As of December 31, 2010		As of December 31, 2009	
	Mt	% Grade	Mt	% Grade
<b>MINERAL RESERVES</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)(6)</sup> (in million metric tons (Mt))				
Proven	<b>75.4</b>	<b>1.83</b>	82.3	1.84
Probable	<b>38.3</b>	<b>1.71</b>	38.8	1.70
<b>Total Proven and Probable</b>	<b>113.7</b>	<b>1.78</b>	121.1	1.79

NOTES:

(1) Estimated reserves represent, in accordance with applicable rules and regulations of the SEC, including the definitions there under, the portion of a mineral deposit that could be economically and legally extracted or produced at the time the mineral reserve is determined. "Proven Mineral Reserves" are mineral reserves for which (i) the quantity is calculated from dimensions revealed in outcrops, trenches, workings or drill holes; grade and quality are assessed from the results of detailed sampling; and (ii) the sites for inspection, sampling and measurement are spaced so closely and the geologic character is so well defined that size, shape, depth and mineral content of reserves are well established.

"Probable Mineral Reserves" are mineral reserves for which the quantity and grade and/or quality are determined from information similar to that used for proven mineral reserves, but the sites for inspection, sampling and measurement are farther apart or are otherwise less adequately spaced. The degree of assurance, although lower than for proven mineral reserves, is high enough to assume continuity between points of observation.

For the purposes of SEC rules and regulations, total mineral reserve estimates are based on a number of assumptions, such as mining methods, production and other costs, metal recovery rates and ore recovery and dilution factors. The economic viability of the estimated mineral reserves as of year-end 2010 was determined using Vale's long-term metal pricing forecast that did not exceed the last three-year average metal prices, based on LME daily morning cash prices each day of the months for the period from January 1, 2008 to December 31, 2010, for nickel at US\$19,000/ton, with adjustments made for discounts reflecting the intermediate nature of PTI's nickel in matte product. With respect to currencies, the latest three-year average U.S. dollar-Indonesian rupiah (Rp) exchange rate of US\$1.00 = Rp9,687 was used.

For the demonstration of the economic viability of the 2010 year-end mineral reserve estimates, operating and fixed costs were based on our 2011 annual budget plan costs for long-term usage. These reflected reductions in future oil and diesel costs due to lower future oil and diesel prices, a decrease in oil consumption when our Karebbe project supplies hydroelectric power, a decline in future oil consumption in dryer operations from converting to coal, and the elimination of cloud seeding once our Karebbe project comes on line. The nickel recovery factor of our process plant is based on its annual historical achievement and is adjusted each year.

- (2) Perseroan memperkirakan cadangan mineral sesuai dengan definisi dalam Standar-standar CIM mengenai Definisi dan Pedoman Sumber Daya Mineral dan Cadangan yang ditetapkan oleh Dewan CIM Lembaga Pertambangan, Metalurgi dan Petroleum Canada pada tanggal 11 Desember 2005 (Pedoman CIM);

Sesuai dengan Pedoman CIM tersebut, total perkiraan cadangan mineral dihitung berdasarkan sejumlah asumsi seperti metode pertambangan, produksi dan biaya-biaya lain, tingkat pemulihan logam dan pemulihan bijih serta faktor-faktor dilusi. Kami mengembangkan rencana usaha kami menggunakan cakupan waktu yang mencerminkan pandangan kami atas harga-harga logam untuk jangka panjang dan siklus historis yang relevan untuk tiap logam dan asumsi-asumsi utama jangka panjang lainnya. Harga harga logam jangka panjang dan asumsi-asumsi kunci lainnya berbeda (dalam beberapa hal perbedaannya sangat mencolok) dari rata-rata tiga tahunan untuk logam yang kami hasilkan dan nilai tukar yang sesuai. Akan tetapi, apabila asumsi-asumsi jangka panjang ini digunakan lebih untuk mengembangkan perkiraan-perkiraan tersebut daripada perkiraan rata-rata tiga tahunan sebagaimana dimaksud dalam Catatan (1) di atas, perkiraan cadangan mineral dalam tabel pada bagian "Cadangan Mineral" ini per akhir tahun 2010 juga akan ekonomis dan perkiraan-perkiraan ini tidak akan berubah drastis mengingat sifat dasar mineralisasi dalam kandungan yang kami miliki dan kepentingan relatif dari sejumlah faktor lainnya yang digunakan dalam menyusun perkiraan-perkiraan ini. Untuk tahun 2010, asumsi harga jangka panjang kami perkiraan tidak melebihi harga tunai nikel rata-rata historis LME sesi pagi selama tiga tahun terakhir (2008-hingga-2010) sebesar AS\$19.000/ton dengan penyesuaian dilakukan untuk diskonto bagi produk matte yang diproduksi oleh PTI.

- (3) Perkiraan cadangan mineral untuk daerah penambangan kami di Sorowako dan Petea mewakili produk kami dari tanur pengering (*Dry Kiln Product*). Cadangan mineral yang diperkirakan di wilayah penambangan Sorowako meliputi faktor-faktor dilusi dan hilangnya bijih karena proses pemulihan tambang dan penyaringan selama penyiapan bijih nikel. Cadangan mineral yang diperkirakan tidak meliputi nikel yang hilang karena peleburan. Rata-rata pemulihan nikel setelah pengolahan, yang digunakan untuk perkiraan cadangan mineral akhir tahun 2009 adalah 88,17%, berdasarkan rata-rata hasil dari pabrik pengolahan selama periode 2004-2010.

- (4) Cadangan mineral kami diperkirakan dengan menggunakan teknik-teknik pembuatan model blok dan metode-metode interpolasi geostatistik. Ukuran-ukuran blok standar digunakan dengan parameter-parameter yang berbeda yang diterapkan pada setiap kandungan dan dalam setiap lapisan limonit dan saprolit. Volume penambangan diperkirakan dengan menggunakan ketebalan bijih minimum dua meter dan material di bawah *cut-off grade* diklasifikasikan sebagai material buangan apabila ketebalannya sama dengan atau kurang dari dua meter. Volume mineral dikonversi ke tonase dengan menggunakan faktor-faktor tonase basah yang sesuai. Faktor-faktor pemulihan melalui pengayakan yang didasarkan pada produksi aktual diterapkan untuk mengkonversikan produk run of mine guna menyetarakan dengan produk tanur pengering (*Dry Kiln Product*). Pemulihan tambang dan dilusi dimasukkan dalam perkiraan cadangan mineral.

Untuk kepentingan pengumpulan data, verifikasi data, pembuatan model geologi, pembuatan blok model untuk perkiraan Cadangan Mineral, kami menerapkan "Pedoman Praktik Terbaik untuk Eksplorasi Mineral" dan "Perkiraan Sumber Daya Mineral dan Cadangan – Pedoman Praktik Terbaik" (tahun 2003) dari Lembaga Penambangan dan Metalurgi Kanada (CIM) bagi seluruh kegiatan operasional dan properti mineral kami.

- (5) Tabel di atas memperlihatkan cadangan mineral berdasarkan rencana tambang yang berakhir pada 31 Desember 2035. Usia tambang yang berakhir pada 2035 ini berdasarkan berakhirnya Kontrak Karya aktual pada tahun 2025 ditambah perpanjangan satu kali 10 tahun.

- (6) Perkiraan cadangan mineral dilaporkan atas dasar kepemilikan 100%.

### Ringkasan perubahan perkiraan cadangan mineral antara tahun 2009 dan 2010

Total cadangan mineral terduga dan terbukti di Proyek Sorowako telah berkurang sebesar 7,36 juta ton (DKP/dmt) (atau 6 %) dari tahun 2009 sebagai akibat dari:

- Depleksi tambang (berkurang 4,35 juta ton)
- Rancang ulang dan sterilisasi lubang tambang (berkurang 0,8 juta ton)
- Pengurangan cadangan limonit karena tidak diperlukan lagi sebagai umpan pabrik pengolahan (berkurang 1,19 juta ton)
- Konversi cadangan mineral menjadi sumber daya mineral (berkurang 3,95 juta ton)
- Perubahan model blok (meningkat 0,72 juta ton)
- Perubahan faktor konglomerasi di Blok Barat (meningkat 2,21 juta ton)

Pada tahun 2010 tidak ada pembukuan perkiraan cadangan mineral untuk Pomalaa, Bahodopi, wilayah di luar Sorowako, dan cadangan pantai Sulawesi.

(2) The Company estimates mineral reserves in accordance with: the definitions under the CIM Standards on Mineral Resources and Reserves Definitions and Guidelines adopted by the CIM Council of the Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum on December 11, 2005 (CIM Guidelines).

For the purposes of the CIM Guidelines, total mineral reserve estimates are based on a number of assumptions, such as mining methods, production and other costs, metal recovery rates and ore recovery and dilution factors. We develop our business plans using a time horizon that reflects our view of long-term metals prices over the relevant historical cycle for each metal and other key long-term assumptions. These long-term metal prices and other key assumptions are different (in some cases materially different) from the latest three-year averages for the metals we produce and relevant exchange rates. However, if these long-term assumptions for metal prices and other key related assumptions were used in developing our estimates, rather than the three-year averages referred to in Note (1) above, the mineral reserves estimates in the table in this "Mineral Reserves" section as of year-end 2010 would also be economic and they would not change to any significant degree, given the nature of the mineralization in our deposits and the relative importance of a number of other factors that were used in developing the estimates. For 2010, our long-term price assumptions did not exceed the three-year (2008-2010) historical average LME daily morning cash price for nickel of US\$19,000/ton, with adjustments made for discounts for the matte product produced by PTI.

(3) The mineral reserve estimates for our Sorowako and Petea mining area represent the product from dryer kilns (Dry Kiln Product). The estimated mineral reserves at the Sorowako mining area include factors for dilution and ore losses due to mining and screening recovery during ore preparation. The estimated mineral reserves do not include nickel losses due to smelting. The average nickel recovery after processing, used for our year-end 2010 mineral reserve estimates, was 88.17%, based on the average process plant results for the period 2004 - 2010.

(4) Our mineral reserves are estimated using block modeling techniques and geostatistical interpolation methods. Standard block sizes are used with different parameters applied to each deposit and in each of the limonite and saprolite layers. Mining volumes were estimated using a minimum ore thickness of two metres and material below cut-off grade was classified as internal waste if it was equal to or less than two metres thick. The mineral volumes were converted to tonnages using appropriate wet tonnage factors. Screening recovery factors based on actual production are applied to convert the run of mine product to equivalent Dry Kiln Product. Mining recovery and dilution are included in the estimation of the mineral reserves.

For the purposes of data collection, data verification, geological modeling, block modeling, Mineral Resource estimation and Mineral Reserve estimation, we apply the Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum "Mineral Exploration Best Practice Guidelines" and "Estimation of Mineral Resources and Reserves – Best Practice Guidelines" (2003) for all our current operations and mineral properties.

(5) The table above shows mineral reserves based on a mine ending on December 31, 2035. This 2035 mine ending date is based on actual CoW ending at 2025 plus one 10-year renewal.

(6) Mineral reserves estimates are reported as if 100% ownership.

#### Summary of changes to estimated mineral reserves between 2009 and 2010

The total proven and probable mineral reserves at the Sorowako Project have decreased by about 7.36 Mt (DKP/dmt) or 6% from 2009:

- Mine depletion (4.35 Mt reduction)
- Pit redesign and sterilization (0.8 Mt reduction)
- Disallowance of limonite reserve no longer required to meet plant feed chemistry (1.19 Mt reduction)
- Conversion of mineral reserves to mineral resources (3.95 Mt reduction)
- Block model changes (increase of 0.72 Mt)
- Changes in the conglomerate factor in the West Block (increase of 2.21 Mt)

No mineral reserve estimates are reported in 2010 for Pomalaa, Bahodopi, Sorowako Outer Areas or Sulawesi Coastal Deposits.

## PERUBAHAN KONTRAK KARYA

# CHANGES TO CONTRACT OF WORK

Pada tanggal 3 November 2010 PTI mengumumkan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Keputusan No. 483.K/30/DJB/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang mengkonfirmasi pengembalian beberapa blok dalam wilayah Kontrak Karya kami di Sulawesi Tenggara. Keputusan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 10 Desember 2009. Blok-blok yang dilepaskan adalah Malupulu, Torobulu, Lasolo dan Paopao, dengan perkiraan jumlah luas sebesar 28.000 hektar atau mewakili 12,8% dari total wilayah Kontrak Karya kami. PTI mengajukan pelepasan ini mempertimbangkan rencana penambangan jangka panjang di bawah Undang-Undang Pertambangan yang baru. Pengembalian wilayah ini tidak berdampak terhadap rencana penambangan atau cadangan kami, dan akan memberikan kesempatan pada Pemerintah untuk mempertimbangkan alternatif pembangunan bagi wilayah tersebut sesuai dengan prioritas perencanaannya. PTI tidak merencanakan pelepasan lebih lanjut karena memiliki rencana konkrit untuk mengembangkan area Kontrak Karya yang tersisa.

On November 3, 2010, PTI announced that Indonesia's Minister of Energy and Mineral Resources issued Decree No. 483.K/30/DJB/2010 dated October 25, 2010 confirming the relinquishment of certain blocks of our Contract of Work (CoW) area in South East Sulawesi. The decree was effective as of December 10, 2009. The relinquished blocks consist of Malupulu, Torobulu, Lasolo and Paopao, representing a total area of approximately 28,000 hectares or 12.8% of the total current CoW area. The relinquishment was proposed by PTI after considering its long-term mining plan prepared under the new Indonesian Mining Law. The relinquishment will not impact PTI's mining plan or our reserves and will permit the Government to consider alternative development for the areas in accordance with its planning priorities. PTI does not plan any further relinquishments since we have concrete plans to grow and to develop the remaining CoW areas.

## RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN

# RISKS AND UNCERTAINTIES

Cadangan mineral adalah perkiraan berdasarkan asumsi dan parameter yang ada saat ini. Tingkat keyakinan perkiraan tergantung pada beberapa ketidak-pastian, termasuk namun tidak terbatas pada: perubahan harga nikel dan/atau biaya produksi di masa depan; selisih antara ekspektasi ukuran, kadar nikel dan tingkat pemulihan dengan aktual; dan perubahan-perubahan parameter proyek karena perubahan rencana produksi.

Volume dan kadar cadangan mineral aktual yang diperoleh dari cadangan mineral PTI saat ini dapat kurang atau lebih dari perkiraan karena beberapa ketidak-pastian tersebut. Selain itu, fluktuasi harga nikel dan kurs, serta perubahan dalam biaya-biaya modal dan operasional dapat menyebabkan sejumlah cadangan masa depan menjadi tidak ekonomis untuk ditambang.

## UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN BARU

Pada tanggal 16 Desember 2008, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Pertambangan Baru (UU Pertambangan Baru) menggantikan Undang-Undang Pertambangan tahun 1967. UU Pertambangan Baru berlaku efektif sejak tanggal 12 Januari 2009. Pada tahun 2010, beberapa peraturan pelaksanaan UU Pertambangan Baru telah dikeluarkan, tetapi beberapa hal belum diatur. PTI terus mengamati perkembangan yang terjadi dan mengkaji dampak yang mungkin terjadi atas kegiatan operasional kami dengan adanya perubahan peraturan.

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan, termasuk PTI, suatu daftar berisikan sembilan hal yang ingin dibahas sehubungan dengan Kontrak Karya, dengan maksud untuk melakukan penyesuaian yang mungkin terhadap persyaratan Kontrak Karya. Hal-hal tersebut mencakup wilayah Kontrak Karya, kewajiban Pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB), dan pengolahan di dalam negeri. PTI telah mengirimkan tanggapan kami atas setiap hal tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral dan saat ini menunggu jawaban Kementerian. Pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian mengenai hal-hal ini kemungkinan akan terjadi pada tahun 2011.

Berkaitan dengan skema izin pertambangan yang baru, UU Pertambangan Baru menetapkan batasan luas maksimum bagi wilayah eksplorasi dan izin produksi. Namun demikian, pemegang Kontrak Karya dapat dikecualikan dari penerapan aturan tersebut, tergantung pada hasil kajian pemerintah atas rencana kegiatan jangka panjang pemegang Kontrak Karya tersebut. Sebagaimana disyaratkan oleh UU Pertambangan Baru, PTI juga telah melakukan presentasi dan menyampaikan laporan kepada Menteri ESDM atas rencana kegiatan jangka panjang kami untuk

Mineral reserves are estimates based on assumptions and parameters currently available. The level of confidence in the estimates depends on uncertainties including, but not limited to, future changes in nickel prices and/or production costs, differences in size, grade and recovery rates from those expected and changes in project parameters due to alterations in production plans.

The volume and grade of mineral reserves actually recovered from PTI's current mineral reserve estimates may be less or more than estimated due to these uncertainties. In addition, price fluctuations in nickel and exchange rates and changes in operating and capital costs may in the future render certain reserves uneconomic to mine.

## NEW MINING LAW

On December 16, 2008, the Indonesian Government passed the New Mining Law, superseding the 1967 Mining Law. The New Mining Law became effective on January 12, 2009. In 2010, certain government regulations implementing the New Mining Law were promulgated, but some remain outstanding. PTI is following the development of these regulations and evaluating the impacts these regulatory changes may have on our operations.

The Indonesian Government has presented to mining companies, including PTI, a list of nine items it wishes to discuss in respect to the Contract of Work (CoW), with a view towards possible adjustments to the CoW terms. These items include the CoW area, tax and non-tax state revenue obligations and domestic processing. PTI has sent our response to each item to the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) and is now waiting for feedback from the Ministry. It is likely further discussions with the Ministry on these matters will take place in 2011.

In relation to the new mining licensing scheme being introduced, the New Mining Law sets a maximum area for exploration and production licenses. However, CoW holders may be exempted from application of these rules depending on the outcome of the Government's review of the respective holders' long-term activity plan. As required by the New Mining Law, PTI has also made a presentation and submitted a report to MEMR on our long-term activity plan for the CoW area covering all reported mineral reserves located in the CoW area, excluding the four blocks that have been relinquished as of December 2009.

A CoW holder may obtain a mining business license (IUP as defined under the New Mining Law) for an extended operating term upon application to the Government once the CoW expires. The applicable implementing regulation (Government Regulation No. 23 of 2010 or GR 23/2010) provides that an existing CoW may be

wilayah Kontrak Karya yang meliputi seluruh cadangan mineral yang dilaporkan yang berada di wilayah Kontrak Karya, di luar empat blok yang dilepaskan sejak bulan Desember 2009.

Pemegang Kontrak Karya dapat memperoleh izin usaha pertambangan (IUP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan Baru) untuk perpanjangan jangka waktu operasi melalui permohonan kepada Pemerintah jika Kontrak Karya berakhir. Peraturan pelaksana yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 atau "PP 23/2010") mengatur bahwa Kontrak Karya yang telah ada dapat diperpanjang dalam bentuk IUP hingga maksimal dua periode masing-masing 10 tahun tergantung pada apakah Kontrak Karya tersebut telah pernah diperpanjang. Dalam negosiasi untuk menyesuaikan Kontrak Karya dengan UU Pertambangan Baru, PTI telah meminta konfirmasi bahwa PTI berhak atas dua kali perpanjangan masing-masing 10 tahun untuk periode setelah tahun 2025. Terdapat juga ketentuan dalam PP 23/2010 yang menyatakan bahwa setelah kemungkinan perpanjangan telah habis, pemegang Kontrak Karya dapat berpartisipasi dalam proses tender (dengan hak untuk menyamai) jika ingin terus berada di daerah pertambangan yang relevan. Jika di masa depan PTI tidak bisa mendapatkan kepastian tentang hak untuk mendapatkan dua kali perpanjangan, PTI akan dapat terus melanjutkan kegiatannya setelah tahun 2035 hanya jika berhasil dalam proses tender sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pertambangan yang Baru untuk wilayah Kontrak Karyanya, namun kemungkinan ini tidak termasuk dalam perkiraan kami saat ini.

Terdapat beberapa peraturan pelaksanaan yang diterbitkan berdasarkan UU Pertambangan Baru yang bisa berdampak pada PTI, namun peraturan-peraturan tersebut masih belum lengkap dan beberapa rincian tertentu masih belum jelas, termasuk rincian mengenai aturan harga patokan atau harga referensi untuk produk-produk nikel, untuk tujuan perlindungan pendapatan pemerintah. Selain itu, beberapa peraturan masih dalam bentuk draft, termasuk yang berkaitan dengan persyaratan nilai tambah domestik. PTI, bersama dengan perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama dan para anggota dari Indonesian Mining Association (IMA) terus memantau perkembangan yang ada dengan seksama. Hal yang sudah menjadi jelas adalah bahwa perusahaan-perusahaan seperti PTI sekarang harus memenuhi persyaratan untuk membentuk dana cadangan dalam bentuk deposito berjangka sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban-kewajiban pasca penutupan tambang. Dalam keadaan dimana peraturan-peraturan terus berkembang seperti sekarang ini, dampak-dampaknya yang pasti baru akan diketahui atau lebih dipahami secara bertahap ketika peraturan-peraturan baru yang masih belum keluar itu diterbitkan dan isu-isu baru yang mungkin timbul berdasarkan peraturan tersebut dapat terjawab atau terselesaikan.

## UNDANG-UNDANG KEHUTANAN

Undang-Undang Kehutanan (UU Kehutanan) Indonesia No. 41 tahun 1999 membatasi kegiatan penambangan terbuka dan beberapa kegiatan tertentu lainnya yang tidak terkait kehutanan di dalam kawasan yang ditentukan sebagai "hutan lindung." UU Kehutanan tidak memiliki ketentuan peralihan yang mengatur mengenai izin dan kontrak pertambangan yang telah ada sebelumnya, seperti Kontrak Karya.



extended in the form of an IUP for up to a maximum of two periods of 10 years, depending on whether the CoW has previously been extended. In the negotiation to conform the CoW with the New Mining Law, PTI has requested a confirmation that we are entitled to two extensions of a 10-year period each for the period post 2025. There is also a provision in GR 23/2010 that states that after the extension possibilities have been exhausted, the holder may participate in a tender process (with a right to match) if it wishes to continue its presence in the relevant mining area. Where in the future PTI is unable to secure confirmation of its right to two extensions, it will be able to continue operations beyond 2035 only if it is successful in a tender process as contemplated by the New Mining Law for its CoW areas, but this possibility is not included in our estimates at this time.

There have been implementing regulations issued under the New Mining Law that could have an impact on PTI, but they are still incomplete and certain details are still outstanding, including details with respect to benchmark price or reference price rules for nickel products, for the purpose of protection of the Government's revenues. Further, some regulations are still in draft form, including those in respect to a domestic value-adding requirement. PTI, together with other companies in the industry and members of the Indonesian Mining Association (IMA) are following the developments closely. What has become clear is mining companies such as PTI are now subject to the requirement to establish a sinking fund in the form of a time deposit to serve as security for post-mine closure obligations. In this constantly evolving regulatory environment, the full effects will become known or better understood only gradually when the still outstanding regulations are issued and new issues that may be introduced by the regulations are answered or resolved.

## FORESTRY LAW

Indonesian Law No. 41 of 1999 regarding Forestry (Forestry Law) restricts open pit mining and certain other non-forestry related activities within areas designated as "protected forest." The Forestry Law has no transitional provisions with respect to pre-existing mining contracts and licenses, such as the CoW.

To avoid uncertainties with respect to pre-existing mining contracts, the Indonesian Government enacted Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2004, which was later on approved by the Parliament as Law No. 19 of 2004, which principally aimed to give protection to the pre-existing mining contracts and licenses by allowing them to continue their mining activities until the expiry of their contracts or licenses term. Further, as implementing regulation to Law No. 19 of 2004, Presidential Decree No. 41 of 2004 was issued identifying 13 pre-existing mining contracts and licenses, including PTI's, and confirming the allowance for them to continue their mining activities within protected forest area up to the expiration of their respective contracts or licenses. The Presidential Decree, however, provides a requirement that these 13 mining contracts or licenses should be subject to obtaining a land use permit issued by Minister of Forestry.

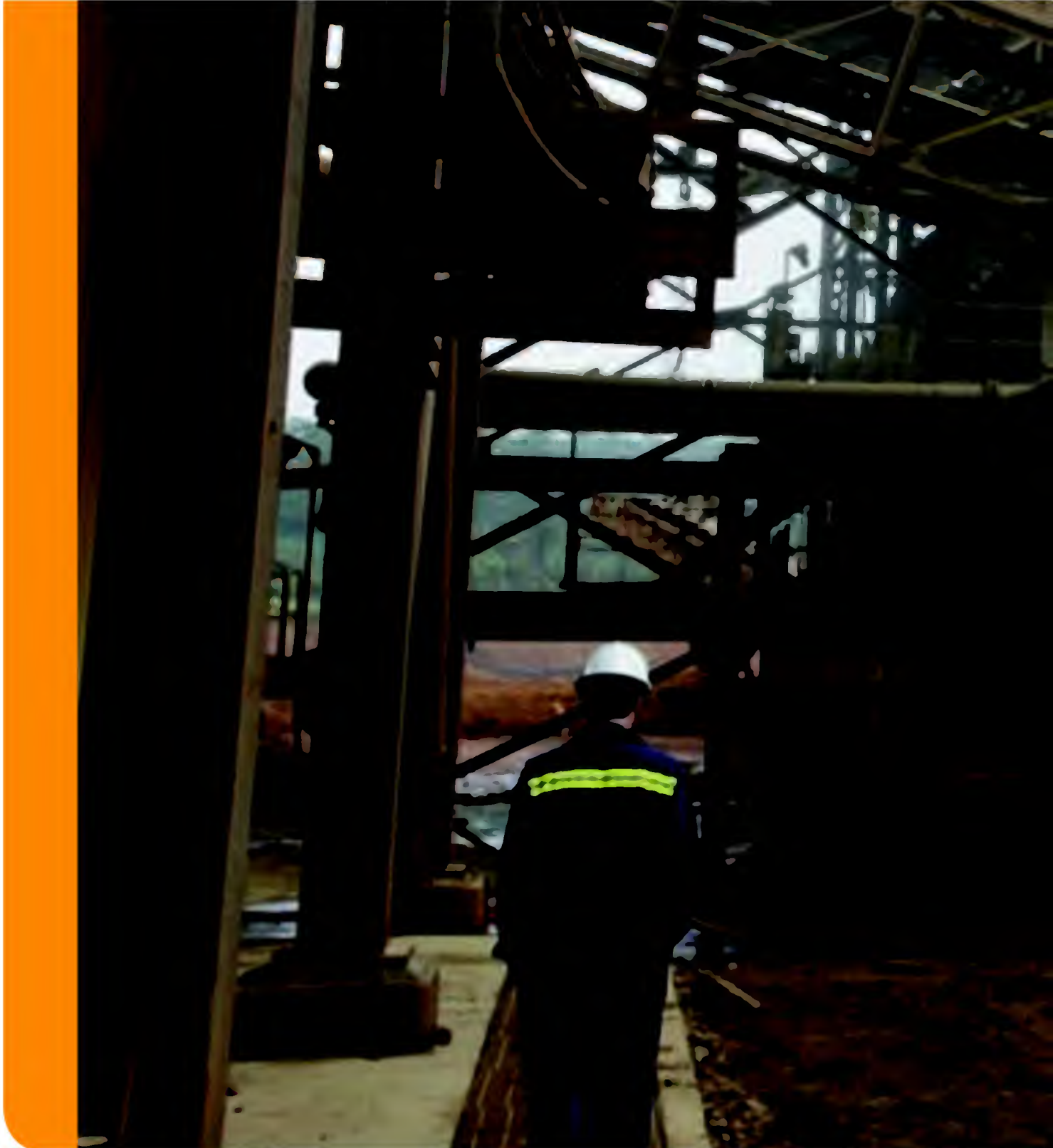
Untuk mengatasi ketidak-pastian hukum mengenai kontrak pertambangan yang telah ada sebelumnya, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 tahun 2004, yang pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi kontrak-kontrak dan izin-izin pertambangan yang telah ada sebelumnya dengan mengizinkan mereka untuk melanjutkan kegiatan pertambangannya sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau izin tersebut. Selanjutnya sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 19 tahun 2004, diterbitkanlah Keputusan Presiden No. 41 tahun 2004 yang mengidentifikasi 13 pemegang izin dan kontrak pertambangan yang telah ada sebelumnya, termasuk PTI, dan mengkonfirmasi izin untuk perusahaan-perusahaan tersebut untuk meneruskan kegiatan pertambangan mereka dalam kawasan hutan lindung sampai akhir masa kontrak atau izin. Walaupun demikian, Keputusan Presiden tersebut memberikan persyaratan bahwa ke-13 perusahaan yang memiliki kontrak atau izin tersebut harus memperoleh izin pinjam pakai yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan.

Faktanya, sebagian besar area yang merupakan hak PTI untuk menjalankan kegiatan pertambangannya berdasarkan CoW, merupakan area yang dikategorikan sebagai hutan lindung. Semula, PTI berpandangan bahwa Kontrak Karya telah memberikan semua izin yang diperlukan, dan karena itu PTI tidak diharuskan memohon izin pinjam pakai. Namun pada tahun 2008, atas permintaan Kementerian Kehutanan, PTI mengajukan permohonan izin pinjam pakai kehutanan dengan syarat hak-hak PTI sebagaimana diatur dalam Kontrak Karya tidak diabaikan.

Peraturan-peraturan yang diterbitkan di bawah UU Kehutanan dan izin kehutanan menambah biaya keuangan PTI. Beberapa beban tambahan ini adalah: (i) dalam bentuk pembayaran tahunan PNBPN yang dihitung berdasarkan rumus khusus tarif tetap yang tergantung pada tujuan penggunaan dan jenis kawasan hutan yang akan digunakan dikalikan dengan luas kawasan hutan yang digunakan tersebut. Tarif tetap ini berkisar antara Rp1,2 sampai Rp3,0 juta per hektar per tahun; (ii) biaya penebangan pohon; rincian prosedur dan perhitungan biaya ini masih bergantung pada peraturan pelaksanaan yang akan diterbitkan kemudian; dan (iii) kewajiban menanam ulang / merehabilitasi wilayah yang luasnya sama dengan luas wilayah hutan yang dipergunakan; rincian prosedur dan persyaratannya juga masih bergantung pada peraturan pelaksanaan yang akan diterbitkan kemudian.

In fact, a significant portion of the area PTI is authorized to mine under the CoW is considered to be protected forest. Initially, PTI took the position that the CoW granted all necessary permits and therefore it was not required to apply for a land use permit. However, in 2008, at the request of the Ministry of Forestry, PTI applied for the forestry land use permit subject to the condition that our rights as provided in the CoW are not abrogated.

The regulations issued under the Forestry Law and the forestry permit impose additional financial costs on PTI. Some of the additional burdens are: (i) annual non-tax state revenue payment to be calculated based on a specific formula of fixed tariffs—ranging from Rp1.2 to Rp3.0 million per hectare per annum—depending on the purpose of the proposed use and type of forest area being used multiplied by the size of forest area being used; (ii) stumpage fee; the detailed procedure and calculation of which are still subject to further implementing regulations; and (iii) the obligation to revegetate/rehabilitate an area equal to the size of the forest area being used, the detailed procedures and terms of which are also still subject to further implementing regulations.



DEWAN KOMISARIS

# BOARD OF COMMISSIONERS



## PROFIL DEWAN KOMISARIS

# COMMISSIONERS PROFILE

### DEWAN KOMISARIS KAMI

Dewan Komisaris PTI memperhatikan penata-layanan bisnis Perseroan. Mereka mengawasi keuangan, operasional, lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial, dan memegang kepemimpinan dalam memastikan kesempurnaan praktik-praktik tata kelola perusahaan.

#### **Peter Poppinga**

Presiden Komisaris

Komisaris sejak: tahun 2009

Ketua Komite Tata Kelola

President Commissioner

Commissioner since: 2009

Chairman of the Corporate Governance Committee



#### **Nicolaas D. Kanter**

Wakil Presiden Komisaris

Komisaris Independen

Komisaris sejak: tahun 2009

Vice President Commissioner

Independent Commissioner

Commissioner since: 2009



## OUR BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners provides stewardship to PTI's business. They oversee financial, operational, environmental and social responsibility matters, and take a leadership role in ensuring excellence in corporate governance practices.



**Irwandy Arif**

Komisaris Independen  
Komisaris sejak: tahun 2010  
Independent Commissioner  
Commissioner since: 2010



**Takeshi Kubota**

Komisaris  
Komisaris sejak: tahun 2005  
Anggota Komite Tata Kelola  
Commissioner  
Commissioner since: 2005  
Member of the Corporate Governance Committee

**DEWAN KOMISARIS**

**BOARD OF  
COMMISSIONERS**

**Harumasa Kurokawa**

Komisaris

Komisaris sejak: tahun 2010

Commissioner

Commissioner since: 2010



**Tito Martins**

Komisaris

Komisaris sejak: tahun 2009

Commissioner

Commissioner since: 2009



**Arief T. Surowidjojo**

Komisaris Independen

Komisaris sejak: tahun 2009

Ketua Komite Audit

Anggota Komite Tata Kelola

Independent Commissioner

Commissioner since: 2009

Chairman of the Audit Committee

Member of the Corporate Governance Committee



*Biografi Dewan Komisaris disajikan pada bagian Informasi Perusahaan dari Laporan Tahunan ini.*





**Jennifer Maki**

Komisaris

Komisaris sejak: tahun 2007

Commissioner

Commissioner since: 2007



**Arif S. Siregar**

Komisaris

Komisaris sejak: tahun 2010

Commissioner

Commissioner since: 2010



**Mark Travers**

Komisaris

Komisaris sejak: tahun 2009

Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi, Sumber Daya dan  
Kompensasi Manajemen

Commissioner

Commissioner since: 2009

Member of the Corporate Governance Committee

*Biographies of Board of Commissioners members are included in the Corporate Information section of this report.*

## LAPORAN DEWAN KOMISARIS

# REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Merupakan kehormatan bagi kami untuk melaporkan kepada anda kegiatan dan pencapaian PTI pada tahun 2010.

### **Bekerja lebih cerdas. Tumbuh lebih kuat.**

Kami sangat bangga untuk mengumumkan bahwa PTI tetap membukukan laba di tengah tantangan kondisi ekonomi pada tahun 2008 dan 2009. Pada saat ekonomi global dan pasar nikel dunia menguat pada tahun 2010, PTI berada pada posisi yang tepat untuk mengkapitalisasi perkembangan fundamental dan meningkatkan potensi menuju tahun 2011.

“Bekerja lebih cerdas dan tumbuh lebih kuat” adalah tema Laporan Tahunan 2010 PTI dan tema untuk masa depan. “Bekerja lebih cerdas” menjabarkan fokus PTI pada inovasi dan produktivitas. “Tumbuh lebih kuat” menggarisbawahi sasaran PTI untuk peningkatan produksi yang akan datang berdasarkan pada landasan yang berkesinambungan. Strategi PTI sejalan dengan sinyal yang jelas dari para pemegang saham.

Bekerja lebih cerdas – PTI tengah berupaya meningkatkan setiap aspek usahanya dan berfokus pada inovasi untuk memastikan pengembangan yang berkesinambungan dan mengoptimalkan efisiensi dan profitabilitas, dan pada saat yang sama menyadari bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup merupakan kunci dalam terus membangun hubungan yang makin lebih baik dengan pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat.

Keberhasilan pengimplementasian program pengurangan sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), yang dilakukan oleh PTI dan pusat teknologi Vale Canada adalah salah satu contoh pendekatan inovatif oleh PTI dalam menjalankan usahanya. Peningkatan pada peralatan penting serta pengembangan program manajerial, pelatihan dan keahlian untuk karyawan PTI akan membantu meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan aset-aset strategis PTI. Hal ini merupakan tujuan jelas yang disampaikan oleh para pemegang saham.

Tumbuh lebih kuat – Sejalan dengan visi para pemegang saham, PTI sangat fokus dalam pertumbuhan. Untuk mengkapitalisasi peluang dari pasar nikel yang kuat, PTI berencana melanjutkan investasi dalam kegiatan usahanya, dan memperkirakan akan menginvestasikan sebesar AS\$232 juta pada belanja



**PETER POPPINGA**

Presiden Komisaris *President Commissioner*

**Mendorong pertumbuhan. Di tahun 2011, kami berencana untuk menginvestasikan sejumlah AS\$232 juta, 27% lebih tinggi dibandingkan 2010.**

Dear stakeholders,

It is our pleasure to report to you PTI's activities and accomplishments for 2010.

### **Working smarter. Growing stronger.**

We are very proud to announce that PTI remained profitable during the challenging economic environment in 2008 and 2009. As the global economy and world nickel markets gained strength in 2010, PTI was well positioned to capitalize on improving fundamentals and to leverage its potential looking forward into 2011.

"Working smarter and growing stronger" is the theme for PTI's 2010 annual report and for the future. "Working smarter" describes PTI's focus on innovation and productivity. "Growing stronger" underscores PTI's goal for future production increases based on a sustainable foundation. PTI's strategy is in response to a clear signal from its shareholders.

Working smarter – PTI is working to improve every aspect of its business and is focused on innovation and higher productivity to ensure its sustainable development and to optimize efficiency and profitability, while recognizing that environmental and social responsibility are key in continuing to build even stronger relationships with the Government and community stakeholders.

The successful implementation of the sulphur dioxide abatement program, carried out by PTI and Vale Canada's technology centre, is just one example of the innovative approach PTI is applying to its business. Improvement in key equipments, managerial programs and in skills training and development for PTI's employees will help drive productivity and maximize PTI's strategic assets. This is a clear objective from the shareholders.

Growing Stronger – Aligned with the shareholders vision, PTI is definitively focused on growth. In order to capitalize on opportunities resulting from the strong nickel market, PTI plans to continue to expand its business and estimates investing US\$232 million on capital expenditures in 2011, 27% higher than actual 2010 capital expenditures. PTI intends to set aside funds in the capital plan to build a road from Bahodopi to Sorowako and to develop further the Bahodopi region in alignment with its CoW undertakings. PTI's mid-term goal is to increase production capacity to 90 kilo tons. Projects are already approved to support this goal and studies are being carried out to determine the potential for additional increases.

**Fostering growth.  
For 2011, we plan to  
invest US\$232 million,  
27% higher than 2010.**

barang modal tahun 2011, 27% dari belanja barang modal aktual tahun 2010. PTI merencanakan menyisihkan dana dari rencana modal untuk membangun jalan dari Bahodopi ke Sorowako dan membangun tambang di Bahodopi sebagai bagian dari kesanggupan Kontrak Karya kami. PTI akan mengeksplorasi semua kemungkinan untuk mencapai produksi minimum sebesar 90 kilo ton dalam jangka menengah. Proyek-proyek pendukung telah disetujui dan studi untuk mendapatkan potensi peningkatan produksi lebih tinggi sedang dilakukan.

Dewan Komisaris telah mengkaji ulasan manajemen tentang usaha PTI dan dengan yakin mendukung rencana mereka untuk melanjutkan investasi yang berhati-hati dalam kegiatan usaha. Kami percaya Direksi telah menghitung dengan tepat perkiraan jumlah belanja modal tahun 2011. Kami juga mendukung rencana manajemen berkenaan dengan kesanggupan Kontrak Karya. Hal ini konsisten dengan tujuan pertumbuhan dari para pemegang saham dan mendukung tujuan dari pemangku kepentingan lainnya.

Menengok kembali ke tahun 2010, PTI melaporkan peningkatan laba bersih sebesar 157% dibandingkan tahun sebelumnya. Penjualan meningkat 68% dibandingkan tahun 2009. Rata-rata harga realisasi jual naik 48% dan selaras dengan itu PTI meningkatkan produksi sebesar 13%. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham meningkat menjadi AS\$338,8 juta pada tahun 2010, dibandingkan dengan AS\$106,9 juta pada tahun 2009.

Ke depan, kekuatan dan potensi PTI untuk sukses berkelanjutan adalah bukti. Strategi kunci dan keunggulan kompetitif mencakup infrastruktur operasional yang sangat baik dan peningkatan basis energi hydro yang dihasilkan biaya produksi yang rendah. Perjanjian penjualan yang mengikat dan pasti, sumber daya alam yang besar dan tim kepemimpinan yang berdedikasi serta berpengalaman merupakan keunggulan kompetitif tambahan.

### **Produsen Nikel dalam Matte Berbiaya Rendah**

Posisi berbiaya rendah PTI didorong oleh cadangan bijih bermutu tinggi, tenaga kerja terlatih dan berpengalaman dan fasilitas-fasilitas pembangkit listrik tenaga air berbiaya rendah. Pasokan daya listrik tenaga air mengurangi eksposur PTI terhadap bahan bakar minyak yang mahal dan memberikan keuntungan biaya yang signifikan terhadap sebagian besar produsen nikel laterit lainnya.

### **Kontrak Penjualan Jangka Panjang dan Kontrak-Kontrak Lainnya dengan Pelanggan Utama**

Seluruh produksi PTI wajib dijual kepada dua pemegang saham utama, yang membeli seluruh nikel dalam matte yang diproduksi Perseroan (Vale Canada – 80% dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. – 20%). Komitmen ini ditetapkan dalam perjanjian penjualan yang berlaku hingga Kontrak Karya berakhir. Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. memiliki kepentingan jangka panjang dalam kesinambungan keberhasilan operasi PTI. Vale Canada adalah produsen nikel terbesar di dunia dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. adalah satu di antara perusahaan-perusahaan penambangan dan pengolahan terbesar di Jepang. PTI juga memperoleh keuntungan dari perjanjian bantuan teknologi dan manajemen dengan Vale Canada, yang berlaku hingga berakhirnya Kontrak Karya.

**Kekuatan PTI adalah jelas. Kelebihan strategis penting PTI mencakup infrastruktur operasi yang unggul, perjanjian penjualan yang aman, basis sumber daya alam yang melimpah dan kepemimpinan oleh tim yang berpengalaman.**

**PTI's strength is evident. Its key strategic advantages include an excellent operational infrastructure, secure sales agreements, a substantial natural resource base and an experienced leadership team.**

The Board of Commissioners has reviewed management's outline of PTI's business and confidently supports their plan to continue prudent investment in the business. We believe that the Board of directors has appropriately calculated the estimated amount for 2011 capital expenditures. The Board of Commissioners also supports management's plan in relation to CoW undertakings. It is consistent with the growth objectives of shareholders and supports other stakeholder objectives.

Looking back at 2010, PTI reported a 157% increase in net earnings year over year. Sales rose by 68% compared to 2009. The average realized selling price increased by 48% and accordingly, PTI increased production by 13%. Dividend payments to shareholders increased to US\$338.8 million in 2010, compared to US\$106.9 million in 2009.

Looking ahead, PTI's strength and potential for continued success is evident. Its key strategic and competitive advantages include an excellent operational infrastructure with an increased hydro energy base resulting in low production costs. Solid and captive sales agreements, a substantial natural resource base and a dedicated and experienced leadership team are additional competitive advantages.

### **Low-Cost Producer of Nickel in Matte**

The drivers of PTI's low-cost position include its high-quality ore reserves, well-trained and highly experienced workforce and captive low-cost hydroelectric power generating facilities. Access to hydroelectric power reduces PTI's exposure to expensive fossil fuels and provides a significant cost advantage over most other laterite nickel producers.

### **Long-Term Sales and Other Contracts with Major Customers**

All of PTI's production is committed to two major customers, who are obligated to purchase all of the nickel in matte it produces (Vale Canada – 80% and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. – 20%). These commitments are set forth in sales agreements that continue until the expiration of the CoW. Vale Canada and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. have long-term strategic interests in the continuing success of PTI's operations. Vale Canada is one of the world's largest producers of nickel and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. is one of Japan's largest mining and smelting companies. PTI also benefits from its long-term management and technology assistance agreements with Vale Canada, which continue until the expiration of the CoW.

### **Substantial Mineral Reserves**

Estimated mineral reserves at December 31, 2010 were 75.4 million metric tons of proven ore reserves grading 1.83% nickel and 38.3 million metric tons of probable ore reserves grading 1.71% nickel, which are sufficient to support PTI's operations for approximately 25 years at current production levels. PTI takes the position that it has the right to two extensions based on its interpretation of the New Mining Law, but in view of the requirements to have mining rights and reasonable certainty of their continuance before declaring a mineral reserve, PTI elects to use a conservative approach and only declares mineral reserves until year end 2035. If possession of continuing mining rights after 2035 can be confirmed then PTI could report more mineral reserves provided that economic viability of these additional mineral reserves is demonstrated by industry standard feasibility studies.

## Cadangan Mineral yang Melimpah

Perkiraan cadangan mineral per 31 Desember 2010 adalah 75,4 juta metrik ton cadangan bijih terbukti berkadar nikel 1,83% dan 38,3 juta metrik ton cadangan bijih terduga berkadar nikel 1,71%. Kami yakin bahwa cadangan bijih terbukti dan terduga ini cukup untuk mendukung operasi PTI selama sekitar 25 tahun pada tingkat produksi saat ini. PTI mengambil posisi bahwa PTI memiliki hak untuk dua kali perpanjangan didasarkan pada interpretasinya terhadap UU Pertambangan Baru, tetapi mengingat persyaratan bagi dimilikinya hak untuk menambang dan kepastian yang wajar akan kelanjutannya sebelum mendeklarasikan cadangan mineral, PTI memilih untuk menggunakan pendekatan konservatif dan hanya menyatakan cadangan mineral sampai dengan akhir tahun 2035. Jika kepemilikan hak untuk menambang yang berkelanjutan setelah tahun 2035 dapat dipastikan maka PTI dapat melaporkan lebih banyak cadangan mineral asalkan kelayakan ekonomi dari cadangan mineral tambahan ini ditunjukkan oleh studi kelayakan standar industri.

## Profil Keuangan yang Kuat dengan Eksposur Terhadap Nilai Tukar Lokal yang Terbatas

PTI telah membukukan laba sejak tahun 1987, termasuk pada tahun 2009 di tengah krisis ekonomi dunia. Perseroan memiliki eksposur terbatas terhadap nilai tukar lokal karena seluruh pendapatan diperoleh dalam dollar AS sesuai dengan perjanjian penjualan; terlebih lagi, hanya sekitar 15% total biaya tunai dalam denominasi Rupiah.

## Tim Manajemen yang Berpengalaman Luas di Indonesia

Tim manajemen PTI terdiri dari para profesional kawakan yang telah memiliki pengalaman dan pengetahuan luas dalam industri, bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah dan mematuhi Kontrak Karya. Selain itu, PTI telah memiliki lebih dari 40 tahun pengalaman menambang dan beroperasi di Indonesia.

## KERJASAMA DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Indonesia adalah negara dalam transisi. Sebagai negara demokrasi yang sedang berkembang, pemerintah, para menteri dan institusi-institusi non-pemerintah bekerja sama untuk memahami dan memperkuat peran mereka dalam rezim yang baru. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan publik berespon terhadap perubahan-perubahan dalam kebijakan publik, hukum-hukum dan peraturan-peraturan sambil terus memastikan bahwa mereka memenuhi ekspektasi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Pada tahun 2010, sejumlah perubahan hukum mempengaruhi bisnis PTI, termasuk UU Pertambangan Baru, UU Lingkungan Hidup dan serangkaian peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Kontrak Karya PTI adalah instrumen hukum fundamental yang mendasari pelaksanaan bisnis kami. Indonesia terus mengalami dampak ketidak-pastian politik dan hukum sepanjang tahun 2010. Beberapa ketidak-pastian ini berkembang dari terbitnya UU Pertambangan Baru. Meski pun dampak penuh dari perubahan-perubahan ini masih belum diketahui, PTI sedang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk menemukan cara-

**PTI berada di barisan terdepan dalam hal tata kelola perusahaan di Indonesia, dan merupakan satu di antara sedikit perusahaan publik yang secara sukarela telah membentuk komite Tata Kelola.**

## Strong Financial Profile with Limited Local Currency Exposure

PTI has been profitable every year since 1987, including 2009 during the world economic crisis. It has limited local currency exposure because all of its revenue is received in U.S. dollars, pursuant to sales agreements; moreover, on average only about 15% of total cash costs were denominated in rupiah.

## Experienced Management Team with Extensive History in Indonesia

PTI's management team is comprised of seasoned professionals who have extensive experience and knowledge of the industry, working with central and regional governments and adhering to the CoW. Additionally, PTI has more than 40 years of mining and operating experience in Indonesia.

## WORKING WITH STAKEHOLDERS

Indonesia is a country in transition. As a burgeoning democracy, governments, their ministries and non-governmental agencies are working to understand and solidify their roles within the new regime. At the same time, public companies are responding to changes in public policy, laws and regulations while continuing to ensure they fulfill the expectations of shareholders and other stakeholders.

In 2010, there were a number of changes to laws effecting PTI's business, including the New Mining Law, Environmental Law and a series of government and ministerial regulations. PTI's CoW is the fundamental legal instrument under which it conducts its business. Indonesia continued to be impacted by political and legal uncertainties during 2010. Some of these uncertainties stem from the passage of the New Mining Law. While the full effect of these changes is yet to be determined, PTI is working closely with the Government of Indonesia to find appropriate measures to ensure that the implementation of the New Mining Law will not discount the importance of shareholders' interests.

**PTI is a forerunner in good corporate governance in Indonesia and one of the few publicly traded corporations to have voluntarily established a Corporate Governance committee.**

### Excellence in corporate governance

Corporate governance is the framework of rules and practices by which a company ensures accountability, fairness and transparency in its relationships with all of its stakeholders. PTI is a forerunner in good corporate governance in Indonesia and one of the few publicly traded corporations to have voluntarily established a Corporate Governance committee of its Board of Commissioners.

PTI's corporate governance policies ensure that a strong framework is in place so that the Board of Commissioners and Board of Directors are able to effectively review and evaluate PTI's business operations and ensure they meet strategic objectives and reflect environmental and social responsibility best practices.

Within this framework, open communication between the Board of Commissioners and the PTI Board of Directors is critical. The Board of Directors reports regularly to the Board of Commissioners. In addition, directors and commissioners meet from time to time to review and discuss proposals relevant to company operations

cara yang tepat untuk memastikan agar implementasi UU Pertambangan Baru tidak mengurangi pentingnya kepentingan pemegang saham.

### Kesempurnaan dalam tata kelola

Tata kelola perusahaan adalah kerangka sekumpulan peraturan dan praktik yang digunakan oleh Perseroan untuk memastikan pertanggung-jawaban, keadilan dan transparansi dalam relasinya dengan semua pemangku kepentingan. PTI adalah yang terdepan dalam tata kelola perusahaan di Indonesia, dan satu di antara sedikit perusahaan publik yang secara sukarela telah membentuk komite tata kelola pada tingkat Dewan Komisaris.

Kebijakan-kebijakan tata kelola PTI memastikan kerangka yang kuat bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengkaji dan mengevaluasi secara efektif operasi bisnis PTI dan memastikan operasi tersebut mencapai tujuan strategis Perseroan dan mencerminkan praktik terbaik tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup.

Dalam kerangka ini, komunikasi terbuka antara Dewan Komisaris dan Direksi PTI sangat penting bagi pengawasan yang efektif. Direksi menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris. Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris mengadakan pertemuan informal untuk mengkaji dan membahas proposal-proposal yang relevan bagi operasi dan kinerja Perseroan. Komunikasi yang sering dan terbuka antara Direksi dan Dewan Komisaris memastikan hubungan kerja yang kuat antara keduanya dan merupakan dasar bagi pengawasan yang efektif dan tata kelola perusahaan yang sangat baik.

**Briefing rutin sedang berlangsung sebelum kegiatan kerja dimulai.**

**A routine briefing takes place before work activities begin.**





and performance. Frequent and open communication between directors and commissioners ensures a strong working relationship between the two Boards and is fundamental to effective oversight and excellent corporate governance.

#### Ensuring compliance

Good corporate governance is not the exclusive jurisdiction of PTI's Corporate Governance Committee. One of the primary functions of good governance is to ensure compliance with all relevant regulations. These regulations affect all aspects of PTI's business. Mining and production operations, environmental performance, risk management, finance and public company obligations are all effected by laws and government and ministerial regulations. The Board of Commissioners is supported by its Corporate Governance Committee and Audit Committee, as well as the Board of Directors, to ensure PTI's compliance in these areas.

Ensuring PTI's compliance with regulations must be achieved in a way that benefits all of its stakeholders. While PTI is accountable to local and central governments and other regulators, it is also accountable to its employees, members of the communities in which it operates and its shareholders. The Board of Commissioners works to ensure PTI complies in a manner that provides mutual benefit to all stakeholders.



### Memastikan kepatuhan

Tata kelola perusahaan bukan hanya bagi Komite Tata Kelola PTI. Salah satu fungsi utama tata kelola adalah memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan yang relevan. Peraturan-peraturan ini mempengaruhi seluruh aspek bisnis PTI. Operasi penambangan dan produksi, kinerja lingkungan hidup, manajemen risiko, kewajiban keuangan dan perusahaan publik semua dipengaruhi oleh hukum-hukum dan peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Dewan Komisaris didukung oleh Komite Tata Kelola dan Komite Audit, dan juga oleh Direksi, untuk memastikan kepatuhan PTI dalam bidang-bidang ini.

Memastikan kepatuhan PTI terhadap peraturan harus dilakukan dengan cara yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan. Selain bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dan daerah, PTI juga bertanggung jawab kepada karyawan, anggota masyarakat di lingkungan operasi dan pemegang saham. Dewan Komisaris memastikan agar kepatuhan PTI dilaksanakan dalam cara yang sama bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan.

### Mempromosikan keterlibatan

Sementara peran dan tanggung jawab dalam pemerintahan demokrasi Indonesia yang baru terus ditentukan, perusahaan-perusahaan publik mencari cara untuk beroperasi dengan efektif di dalamnya.

PTI dan Dewan Komisaris mendukung dan mendorong keterlibatan pemangku kepentingan. Dialog efektif antara perusahaan publik, pemerintah pusat dan daerah dan pemangku kepentingan masyarakat adalah kunci bagi solusi jangka panjang yang akan menghasilkan manfaat bersama dan memastikan transparansi dan akuntabilitas.

### Memprioritaskan tanggung jawab sosial

Inovasi dalam tanggung jawab sosial dan perlindungan lingkungan hidup merupakan kunci bagi kesinambungan dan kemakmuran jangka panjang PTI di Indonesia. Hal ini sangat penting bagi pengembangan bentuk-bentuk energi baru, cara-cara baru untuk membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, dan masa depan pertambangan.

Pada tahun 2010, PTI menginvestasikan AS\$6,4 juta untuk inisiatif-inisiatif pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Perseroan juga melakukan investasi signifikan dalam program pengurangan emisi sulfur dan sekitar AS\$148,0 juta telah digunakan untuk proyek pembangkit listrik tenaga air Karebbe.

Pada tahun 2010, PTI mempublikasikan Laporan Kesinambungan yang pertama, yang mencakup data dan informasi terkait dengan program-program dan aktivitas-aktivitas kesinambungan dan inisiatif-inisiatif pembangunan berkesinambungan yang dilakukan sepanjang tahun 2009. Data diperoleh dari unit-unit bisnis PTI dan merupakan informasi relevan, penting dan berpengaruh bagi pengambilan keputusan dalam usaha-usaha kesinambungan, khususnya yang berkaitan dengan kinerja, dan berdampak terhadap aspek-aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial.

Prestasi kesehatan dan keamanan lingkungan PTI tahun 2010 termasuk pencapaian lebih dari 11.000.000 jam kerja tanpa *Lost Time Injury*. Investasi pada karyawan terlihat jelas dalam lebih dari 87.000-karyawan yang didedikasikan bagi aktivitas-

**Dialog yang efektif antara pemangku kepentingan dari sektor swasta, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat adalah kunci untuk memperoleh solusi jangka panjang.**

**Effective dialogue  
between the private  
sector, central and  
local governments and  
community stakeholders  
is key to finding long-  
term solutions.**

**Promoting engagement**

As roles and responsibilities within Indonesia's new democracy continue to be determined, public companies are seeking ways to operate effectively within it.

PTI and its Board of Commissioners support and encourage stakeholder engagement. Effective dialogue between the private sector, central and local governments and community stakeholders is key to finding long-term solutions that will provide mutual benefit and ensure transparency and accountability.

**Making social responsibility a priority**

Innovation in social responsibility and environmental protection are vital to PTI's sustainability and the long-term prosperity of Indonesia. It is crucial to the development of new forms of energy, new ways of building strong relationships with the community and the future of mining.

In 2010, PTI invested US\$6.4 million in education, health and welfare and community initiatives. It also made investments in its programs to reduce sulphur emissions and US\$148.0 million was spent on the Karebbe hydroelectric generation project.

In 2010, PTI published its first Sustainability Report, which covers data and information related to activities and sustainability programs and sustainable development initiatives that were conducted during 2009. The data was collected from PTI business units and presents relevant, important and influential information for decision-making in sustainability efforts, particularly in relation to economic, environmental and social performance.

Environmental health and safety achievement for 2010 includes PTI's achievement of over 11,000,000 hours worked without Lost Time Injury. This is a world-class achievement, and the people of PTI must be congratulated. Investment in employees is evident in the more than 87,000 person-hours dedicated to training and development activities – the equivalent of 26 hours of classroom training per employee.

**Changes to Board of Commissioners composition**

At its Extraordinary General Meeting of Shareholders held on March 5, 2010, shareholders approved the appointment of Peter Poppinga as the President Commissioner of PTI and Tito Martins as Commissioner. Mr. Poppinga is a Vale employee and Executive Vice President, Base Metals, Asia and Pacific. Based in Asia, Mr. Poppinga's appointment demonstrates Vale's Base Metals business' commitment to PTI and to Indonesia.

On April 16, 2010, PTI held an Annual General Meeting of Shareholders that approved the appointment of Peter Poppinga as the President Commissioner, Jennifer Maki, Tito Martins, Mark Travers, Arif S. Siregar, Takeshi Kubota, and Naoyuki Tsuchida as Commissioners and also approved Nicolaas D. Kanter, Irwandy Arif, and Arief T. Surowidjojo as Independent Commissioners.

On October 28, 2010, PTI held an Extraordinary General Meeting of Shareholders that accepted Naoyuki Tsuchida's resignation and appointment of Harumasa Kurokawa as Commissioner as Mr. Tsuchida's successor. We extend our thanks to Mr. Tsuchida for his valuable service to our Board.

aktivitas pelatihan dan pengembangan – setara dengan 26 jam pelatihan di ruang kelas per karyawan.

### **Perubahan Komposisi Dewan Komisaris**

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 5 Maret 2010, pemegang saham menyetujui pengangkatan Peter Poppinga sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Tito Martins sebagai Komisaris. Bapak Poppinga adalah karyawan dan Executives Vice Preseident, Base Metals, Asia dan Pasific. Berbasis di Asia pengangkatan Bapak Poppinga menunjukkan komitmen usaha Vale Bese Metals ke PTI dan Indonesia.

Pada tanggal 16 April 2010, PTI mengadakan RUPS Tahunan yang menyetujui pengangkatan Peter Poppinga sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Jennifer Maki, Tito Martins, Mark J. Travers, Arif S. Siregar, Takeshi Kubota, dan Naoyuki Tsuchida sebagai Komisaris Perseroan, dan juga menyetujui pengangkatan Nicolaas D. Kanter, Irwandy Arif, dan Arief T. Surowidjojo sebagai Komisaris Independen.

Pada tanggal 28 Oktober 2010, PTI mengadakan RUPS Luar Biasa yang menerima pengunduran diri Naoyuki Tsuchida dan mengangkat Harumasa Kurokawa sebagai Komisaris menggantikan Tsuchida. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tsuchida atas perannya yang berharga dalam Dewan Komisaris.

### **Komite-Komite yang disupervisi oleh Dewan Komisaris**

Dua komite membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan peran penatalayanan: Komite Audit dan Komite Tata Kelola. Masing-masing komite mempertimbangkan hal-hal dalam lingkup tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris. Deskripsi rinci mengenai komite-komite ini serta peran, tanggung jawab dan aktivitas mereka dapat dibaca pada bagian Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PTI telah dan akan selalu menjadi kontributor penting bagi kemakmuran dan pembangunan Indonesia, berkomitmen untuk menghasilkan manfaat melalui pertumbuhan jangka panjang berbiaya rendah yang menguntungkan. Kami bermaksud mencapai tujuan-tujuan kami melalui relasi yang kuat dengan pemerintah, karyawan, investor, masyarakat dan pelanggan.

Atas nama Dewan Komisaris



### **Peter Poppinga**

Presiden Komisaris

### Committees supervised by the Board of Commissioners

Two committees assist the Board of Commissioners in carrying out our stewardship role: the Audit Committee and the Corporate Governance Committee. Each Committee considers matters within the scope of its Charter and reports to the Board of Commissioners. A detailed description of these committees and their role, responsibilities and activities can be found in the Corporate Governance section of this report.

PTI has always been and will remain a key contributor to Indonesia's prosperity and development, committed to delivering benefits to all its stakeholders through profitable, low-cost and long-term growth. PTI intends to accomplish its objectives through strong relationships with governments, employees, investors, communities and customers.

On behalf of the Board of Commissioners



**Peter Poppinga**  
President Commissioner



DIREKSI

# BOARD OF DIRECTORS



Dari kiri ke kanan From left to right:  
Fabio Bechara, Bernardus Irmanto,  
Tony Wenas, Claudio R. C. Bastos,  
Ciho Bangun

## PROFIL DIREKSI

# DIRECTOR'S PROFILE

### DIREKSI KAMI

Direksi PTI bertanggung jawab atas manajemen Perseroan yang efektif, efisien dan berhati-hati. Dengan berfokus pada inovasi, Direksi dan tim manajemen kami memimpin PTI selagi kami membangun tolok ukur bagi pertambangan di masa depan.

#### **Tony Wenas**

Presiden Direktur  
Diangkat pada tahun 2010  
President Director  
Appointed 2010



#### **Bernardus Irmanto**

Wakil Presiden Direktur  
Diangkat pada tahun 2010  
Vice President Director  
Appointed 2010



*Pada tanggal 16 Februari 2011 PTI mengadakan RUPS Luar Biasa yang menyetujui pengangkatan Fabia Bechara sebagai Direktur PTI.*

*Dalam rapat yang sama, pemegang saham menerima pengunduran diri Claudia Bastas sebagai Wakil Presiden Direktur dan pengangkatan beliau sebagai Direktur.*

*Selanjutnya, pemegang saham menyetujui pengangkatan Bernardus Irmanto, sebelumnya Direktur PTI, menjadi Wakil Presiden Direktur PTI.*

*Biografi Direksi dimuat pada bagian Informasi Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.*



## OUR BOARD OF DIRECTORS

PTI's Board of Directors is responsible for the effective, efficient and prudent management of the company. With a keen focus on innovation, our Board of Directors and management teams are leading PTI as we establish the benchmark for mining in the future.



**Ciho Bangun**  
Direktur  
Diangkat pada tahun 2002  
Director  
Appointed 2002



**Claudio R. C. Bastos**  
Direktur  
Diangkat pada tahun 2007  
Director  
Appointed 2007



**Fabio Bechara**  
Direktur  
Diangkat pada tahun 2011  
Director  
Appointed 2011

*On February 16, 2011, PTI held on Extraordinary General Meeting of Shareholders that approved the appointment of Fabio Bechoro as a Director of PTI.*

*At the some meeting, the shoreholders accepted the oppointment of Bernordus Irmonto, formerly o Director of the Compony, to become Vice-President Director of the Compony while Claudio Bostos remains o member of the Boord of Directors of the Compony.*

*Biographies of Boord of Directors members ore included in the Corporote Information section of this report.*

## LAPORAN DIREKSI

# REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

### TUMBUH LEBIH KUAT.

Kepada pemegang saham, karyawan, mitra dan anggota masyarakat kami,

Dari segala sisi, tahun 2010 adalah tahun keberhasilan bagi PTI. PTI melaksanakan inisiatif-inisiatif baru yang dirancang untuk memperbaiki efisiensi operasional dan mendukung strategi pertumbuhan kami.

#### Kinerja Keuangan

PTI melaporkan laba bersih sebesar AS\$437,4 juta pada tahun 2010 dibandingkan dengan AS\$170,4 juta pada tahun 2009, peningkatan 157%.

Penjualan kami naik menjadi AS\$1.276,3 juta, 68% lebih tinggi dari penjualan tahun 2009 sebesar AS\$761,0 juta. Rata-rata harga realisasi pada tahun 2010 adalah AS\$16.568 per metrik ton, naik 48% dari AS\$11.227 per metrik ton pada tahun 2009.

Produksi nikel dalam matte kami adalah 75.989 metrik ton pada tahun 2010 dibandingkan dengan 67.329 metrik ton pada tahun 2009, peningkatan sebesar 13% atau 8.660 metrik ton.

Pengiriman nikel dalam matte meningkat menjadi 75.389 metrik ton pada tahun 2010 dari 66.890 metrik ton pada tahun 2009.

Komponen terbesar dari harga pokok penjualan adalah biaya bahan bakar minyak, bahan pembantu, jasa dan kontrak, biaya karyawan, dan depresiasi, amortisasi dan depleksi. Harga pokok penjualan naik 26% menjadi AS\$652,3 juta pada tahun 2010 dari AS\$516,1 juta pada tahun 2009. Kenaikan ini disebabkan oleh pengiriman yang lebih banyak dan biaya produksi yang lebih tinggi.

Biaya produksi naik sebesar AS\$136,1 juta menjadi AS\$655,6 juta pada tahun 2010 dari AS\$519,5 juta pada tahun 2009. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh lebih tingginya harga bahan bakar, bahan pembantu, kontrak dan jasa, dan karyawan, serta meningkatnya depresiasi, amortisasi dan depleksi, dan pembayaran royalti dan retribusi air kepada Pemerintah Indonesia. Kenaikan pada pos-pos ini sebagian diimbangi oleh konsumsi persediaan berjumlah besar sulfur, biaya konsultansi, dan biaya asuransi yang masing-masing lebih rendah daripada tahun 2009.

Imbal hasil dan rasio-rasio keuangan PTI pada tahun 2010 lebih kuat daripada tahun 2009. Perseroan membukukan tingkat pengembalian aset 20%, tingkat



**TONY WENAS**

Presiden Direktur *President Director*

**Kami bangga  
menyajikan hasil-  
hasil tahun 2010 dan  
mengkonsolidasi  
peluang untuk  
tumbuh.**

## GROWING STRONGER.

Dear shareholders, employees, partners and members of our communities,

By all measures, 2010 was a successful year for PTI. PTI implemented new initiatives designed to improve operational efficiency and support our growth strategy.

### Financial performance

PTI reported net earnings of US\$437.4 million in 2010 compared to US\$170.4 million in 2009, a 157% increase year over year.

Our sales rose to US\$1,276.3 million, 68% higher than 2009 sales of US\$761.0 million. The average realized selling price in 2010 was US\$16,568 per metric ton, up 48% from US\$11,227 per metric ton in 2009.

Our nickel in matte production was 75,989 metric tons in 2010 compared to 67,329 metric tons in 2009, a 13% or 8,660 metric ton increase.

Nickel in matte deliveries rose to 75,839 metric tons in 2010 from 66,890 metric tons in 2009.

The largest components of cost of goods sold are fuels, supplies, services and contracts, employee costs and depreciation, amortization and depletion. Cost of goods sold rose 26% to US\$652.3 million in 2010 from US\$516.1 million in 2009. This increase resulted from higher deliveries and higher cost of production.

Cost of production rose to US\$655.6 million in 2010 from US\$519.5 million in 2009. The increase was primarily due to higher costs for fuel, supplies, services and contracts and employees, as well as increased depreciation, amortization and depletion and royalty and water levy payments to the Government of Indonesia. These costs were partially offset by lower sulphur cost due to decreased price, lower consulting costs and lower costs of insurance compared to 2009 spending.

PTI's financial returns and ratios were stronger in 2010 compared to 2009. With a 20% return on assets, a 26% return on equity and a 33% return on average capital employed, we recorded 150%, 136% and 120% increases for return on assets, return on equity and return on average capital employed respectively from 2009.

**We are proud to present  
the 2010 results and  
to consolidate the  
opportunities to growth.**

pengembalian ekuitas 26% dan tingkat pengembalian rata-rata modal 33%, yang masing-masing merupakan peningkatan sebesar 138%, 142% dan 125% dari tingkat pengembalian aset, tingkat pengembalian ekuitas, dan tingkat pengembalian rata-rata modal pada tahun 2009.

Secara keseluruhan, kami sangat diuntungkan oleh rata-rata harga nikel dalam matte yang lebih tinggi dan volume penjualan yang lebih besar sebagai hasil peningkatan produksi.

### Dividen

Kebijakan Perseroan adalah melakukan pembayaran dividen berdasarkan ketersediaan kas, sampai sejumlah laba ditahan, setelah melakukan penyisihan yang berhati-hati untuk modal kerja, keperluan pembayaran hutang dan belanja barang modal.

Berikut adalah catatan historis pembayaran dan rasio dividen kami:

	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Laba bersih (AS\$ juta)	437,4	170,4	359,3	1.173,0	513,4
Dividen yang diumumkan dari laba tahunan (AS\$ juta)	198,7	110,0	140,1	1.197,4	521,7
Dividen yang diumumkan dari laba tahunan (AS\$/lembar saham)	0,02	0,01	0,01	0,12	0,05
Rasio pembayaran dividen	0,77	0,63	0,63	1,02	1,02
Total dividen tunai yang dibayarkan dalam setahun (AS\$ juta)	338,8	110,0	225,0	1.469,3	109,3

\*Jumlah saham yang diperdagangkan telah disesuaikan dengan pemecahan nilai nominal saham 1:10 efektif sejak tanggal 15 Januari 2008.

Pada tanggal 5 Maret 2010, pemegang saham menyetujui dividen final dan dividen luar biasa untuk tahun 2008 sebesar AS\$0,0141 per lembar saham, dibayarkan pada tanggal 14 April 2010 kepada pemegang saham. Pada tanggal 16 September 2010, Perseroan mengumumkan pembagian dividen interim tahun 2010 sebesar AS\$0,02 per lembar saham, dibayarkan pada tanggal 22 Oktober 2010 kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 8 Oktober 2010. Perseroan telah memenuhi persyaratan cadangan wajib umum berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

### Kendala pada Kinerja

Meskipun banyak keputusan penting menyangkut masa depan PTI berada di tangan kami, ada faktor-faktor penting tidak dapat kami kendalikan, seperti harga nikel, perubahan permintaan atau tingkat cadangan nikel, kondisi ekonomi dan politik domestik dan internasional, harga bahan bakar minyak, dan peraturan pertambangan baru.

Walaupun biaya bahan bakar minyak meningkat, pasar nikel yang kuat menolong mengimbangi dampak negatif dari kenaikan biaya.

Rata-rata harga tunai nikel LME adalah AS\$21.809 per metrik ton pada tahun 2010, meningkat 48% dari tahun 2009. Ini menunjukkan hasil yang kuat, merupakan harga nikel nominal ketiga tertinggi sejak perdagangan dimulai di Bursa Logam London (LME) pada tahun 1979 dan keempat tertinggi setelah disesuaikan dengan inflasi.

Kenaikan harga pada tahun 2010 didorong oleh pemulihan ekonomi dan pencapaian tingkat produksi baja nirkarat tahunan yang tertinggi – industri

Overall, we benefited substantially from higher average nickel in matte price and greater sales volume as the result of increased production.

### Dividends

PTI's policy is to make dividend payments based on available cash, up to the amount of retained earnings, after prudently making provision for working capital, debt service requirements and capital expenditures.

The following is our historical record of dividend payments and ratios:

	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Net earnings (US\$ million)	437.4	170.4	359.3	1,173.0	513.4
Dividends declared from annual earnings (US\$ million)	198.7	110.0	140.1	1,197.4	521.7
Dividends declared from annual earnings (US\$/share)	0.02	0.01	0.01	0.12	0.05
Dividend payout ratio	0.77	0.63	0.63	1.25	0.21
Total cash dividends paid out in a year (US\$ million)	338.8	110.0	225.0	1,469.3	109.3

\*) Restated to reflect a split of PTI's shares on a 10-for-one basis effective on January 15, 2008.

On March 5, 2010, shareholders approved a final and extraordinary dividend for 2008 of US\$0.0141 per share, payable on April 13, 2010 to shareholders. On September 16, 2010, PTI announced an interim dividend distribution for 2010 of US\$0.02 per share, payable on October 22, 2010 to shareholders of record as of October 8, 2010. The Company has fulfilled its mandatory reserve requirement under Indonesian Company Law.

### Constraints on performance

While many decisions crucial to PTI's future remain in our hands, there are key factors that we cannot control, such as the nickel price, changes in nickel demand or stock levels, political and economic conditions domestically and internationally, fuel prices and new mining legislation.

While fuel costs increased, a strong nickel market helped offset the negative impact of cost increases.

LME nickel cash prices averaged US\$21,809 per metric ton in 2010, an increase of 48% from 2009. This is a strong result, representing the third highest nominal nickel price since trading began on the LME in 1979 and the fourth highest adjusting for inflation.

Driving the price increase in 2010 was a recovering economy and a new annual record level of stainless steel production – stainless steel accounting for approximately two-thirds of world nickel consumption. After two years of economic recession and stainless steel de-stocking in 2008 and 2009, world stainless steel production rose 23% year over year to an estimated 31.8 million tons.

baja nirkarat mengkonsumsi dua-per-tiga dari produksi nikel dunia. Setelah dua tahun resesi ekonomi dan tidak ada penimbunan baja nirkarat pada tahun 2008 dan 2009, produksi baja nirkarat dunia meningkat 23% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 31,8 juta ton.

Bahan bakar minyak adalah komponen terbesar dari biaya produksi kami, yaitu sekitar 41%. Kami terutama menggunakan bahan bakar minyak bersulfur tinggi (HSFO) dan diesel berkecepatan tinggi (HSD) untuk mengoperasikan pabrik pengolahan dan armada tambang dan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik thermal. HSFO mencapai 77% dari biaya bahan bakar minyak dan pelumas kami pada tahun 2010, dibandingkan dengan 79% pada tahun 2009. Sedangkan HSD mewakili sekitar 21% dari biaya bahan bakar minyak dan pelumas kami pada tahun 2010, dibandingkan dengan 19% pada tahun 2009. Biaya bahan bakar minyak dan pelumas lain menempati sekitar 1% dari biaya bahan bakar minyak dan pelumas.

Biaya bahan bakar minyak dan pelumas meningkat AS\$95,0 juta pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009. Dari peningkatan sebesar AS\$95,0 juta tersebut, AS\$70,8 juta adalah untuk HSFO, dan hampir seluruh sisanya untuk biaya HSD.

### **Bekerja lebih cerdas**

PTI bekerja lebih cerdas untuk mendukung strategi pertumbuhan kami. Kami sedang memperbaiki efisiensi, produktivitas dan kualitas operasi kami melalui serangkaian inisiatif strategis yang dirancang untuk memanfaatkan kekuatan operasi global Vale dan praktik-praktik terbaik industri pertambangan.

### **One Vale**

Program Global One Vale (One Vale) adalah program transformasi bisnis yang bertujuan menyederhanakan dan menstandarkan proses-proses di seluruh fungsi bisnis Vale. Salah satu hasil proyek adalah SAP ERP (Perencanaan Sumber Daya Perusahaan), suatu sistem yang digunakan untuk memadukan proses-proses bisnis inti menjadi satu sistem, dan terpilih sebagai solusi terbaik yang dapat memenuhi persyaratan bisnis Vale yang rumit.

Proyek ini diluncurkan pada triwulan ke empat tahun 2008 dengan tujuan yang jelas, yaitu menjadi proyek perintis solusi SAP ERP bagi Vale sekaligus untuk mengevaluasi kesempatan menggunakan solusi One Vale untuk operasi-operasi lain di seluruh dunia. Pendekatan ini dimulai dengan menggunakan format SAP yang sudah ada untuk industri pertambangan, untuk mengembangkan solusi khusus untuk Vale dan menduplikasi atau memperbaikinya untuk operasi-operasi lainnya.

Sasaran proyek ini adalah untuk merealisasikan keuntungan bisnis global sebagai berikut:

- Fisibilitas pengeluaran pengadaan, cadangan, perawatan pabrik dan aset yang ditujukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, perbaikan produktivitas karyawan, manajemen biaya dan manajemen modal;
- Manajemen risiko dan kepatuhan yang lebih baik;
- Pertumbuhan dan pengembangan di masa depan;
- Fasilitas proyek-proyek transformasi lain, seperti layanan bersama dan manajemen kas global.

Tantangan usaha dan teknologi informasi, seperti risiko kepatuhan dan pemasok, mendorong PTI untuk berpartisipasi dalam Program Global One Vale dan menerapkan SAP ERP. Implementasi sistem ini akan mencakup proses-proses bisnis yang saat ini dikerjakan di Ellipse ERP, termasuk Keuangan dan Pengendalian,

**Bekerja lebih cerdas.  
Kami  
mengimplementasikan  
strategi untuk  
meningkatkan efisiensi,  
produktifitas dan  
kualitas operasional  
kami.**

**Working smarter.  
We are implementing  
strategic initiatives to  
improve our efficiency,  
productivity and quality  
of our operation.**

Fuels are the largest components of our production cost at about 41%. We primarily use high sulphur fuel oil (HSFO) and high-speed diesel (HSD) to operate our process plant and mining fleet and to fuel our thermal power generators. HSFO accounted for about 78% of our fuels and lubricants cost in 2010, compared to 79% in 2009. HSD accounted for about 21% of our fuels and lubricants cost in 2010, compared to 19% in 2009. Other fuels and lubricants accounted for about 1% of our fuels and lubricants costs.

Fuels and lubricants costs increased by US\$95.0 million in 2010 compared to 2009. HSFO represented US\$70.8 million of the US\$95 million increase and HSD represented substantially all of the remaining increase.

**Working smarter**

PTI is working smarter to support our growth strategy. We're improving the efficiency, productivity and quality of our operations through a series of strategic initiatives designed to leverage the strength of Vale's global operations and mining industry best practices.

**One Vale**

The One Vale Global Program (One Vale) is a business transformation program that aims to simplify and standardize processes across Vale business functions. One of the outcomes of the projects was that SAP ERP (Enterprise Resource Planning), a system used to integrate core business processes into a single system, was selected as the best solution capable of satisfying Vale's complex business requirements.

The project was launched in the fourth quarter of 2008, with a clear objective to pilot the SAP ERP solution for Vale with a parallel initiative to evaluate the opportunity to use the One Vale solution for other operations around the world. The approach was to begin with a pre-existing SAP template for the mining industry and build a specific solution for Vale and replicate or improve it for other operations.

The goals of the project are to realize the following global business benefits:

- Visibility of procurement spending, stock, plant maintenance and assets which will lead to better decision making, improved employee productivity, cost management and capital management
- Improved compliance and risk management
- Future growth and extensibility
- Facilitation of other transformation projects, such as shared services and global cash management

Business and information technology challenges, such as vendor and compliance risks, prompted PTI to participate in the One Vale Global Program and implement SAP ERP. The scope of the system implementation will encompass business processes that are currently being run in Ellipse ERP which include Finance and Controlling, Procurement and Materials Management, Environment Health

Pengadaan dan Manajemen Barang, Kesehatan dan keselamatan lingkungan hidup, Penjualan dan Distribusi, Perawatan Pabrik, Manajemen Produksi dan Kualitas. Bidang yang tidak dicakup adalah Sumber Daya Manusia dan *Payroll* yang akan tetap dilaksanakan di Ellipse.

Implementasi proyek One Vale PTI dijadwalkan tanggal 1 Juli 2011.

### Sistem Produksi Vale

Sistem Produksi Vale (VPS) adalah sistem produksi terpadu yang dikembangkan oleh Vale dan merupakan komponen penting dalam strategi PTI. VPS memungkinkan kami mengatur dan menstruktur proses-proses, karyawan dan teknologi untuk mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas aset dan akhirnya menghasilkan nilai yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan kami. VPS adalah fondasi bagi kesempurnaan operasional, dan memastikan kami memenuhi komitmen untuk melakukan usaha selaras dengan standar-standar yang ditetapkan, mencapai hasil-hasil yang diharapkan dan memupuk budaya perbaikan tanpa henti.

VPS menetapkan standarisasi yang diperlukan dan ekspektasi perbaikan dalam empat bidang utama yang disebut dimensi dalam terminologi VPS, yaitu Karyawan, Operasi, Perawatan dan Manajemen, bersama dengan tiga bidang pendukung: Kesehatan, Keselamatan, Lingkungan Hidup.

VPS mendorong dan memungkinkan keselarasan dan standarisasi proses-proses operasi dan berbagi praktik terbaik antar operasi-operasi global Vale. Selain

**Haulmaster sedang menanti  
pengisian cairan terak  
ke dalam ladle.**

**A haulmaster waits to fill the truck's  
ladle with slag.**





and Safety, Sales and Distribution, Plant Maintenance, Production and Quality Management. Not included are Human Resources and Payroll which will continue to be executed in Ellipse.

Implementation of the One Vale PTI Project is scheduled for July 1, 2011.

#### **Vale Production System**

The Vale Production System (VPS) is an integrated production system developed by Vale and a key component of PTI's strategy. VPS allows us to organize and structure our processes, people and technologies to lower costs, increase assets productivity and ultimately deliver better value to our stakeholders. VPS is the foundation of operational excellence, and ensures we fulfill our commitment to run our business in accordance with established standards, achieve expected results and nurture our culture of continuous improvement.

VPS establishes required standardization and improvement expectations in four primary areas, which are called dimensions in VPS terminology: People, Operations, Maintenance and Management, as well as three support areas: Health, Safety and Environment.

VPS encourages and enables alignment and standardization of operational processes and the sharing of best practices across Vale's global operations.



itu, sistem ini mendukung perbaikan dalam manajemen operasi kami dengan memfokuskan sumber daya pada sasaran-sasaran spesifik dan memastikan tanggung jawab untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.

VPS akan diimplementasikan dalam jangka waktu lima-sampai-enam tahun, dalam tahapan-tahapan yang mengintegrasikan operasi-operasi dalam PTI, bisnis-bisnis nikel Vale, dan akhirnya dengan seluruh operasi global Vale.

Kami memulai implementasi VPS pada awal tahun 2010 sebagai proyek perintisan bagi bisnis nikel global Vale. Selama tahun itu, tim Integrasi VPS Vale melakukan audit atas berbagai dimensi di seluruh PTI. Hasil-hasil PTI akan menjadi dasar bagi penilaian berkesinambungan keberhasilan kami mencapai standar-standar kesempurnaan operasi yang ditetapkan oleh VPS.

### ***Operational and Maintenance Improvement Program***

Pabrik pengolahan PTI memulai *Operational and Maintenance Improvement Program* (OMIP) untuk meningkatkan pengoperasian peralatan yang belum optimal sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas aset. Perwakilan PTI telah mengunjungi tiga lokasi industri di Australia untuk mendapatkan pemahaman keunggulan operasional. Atas dasar ini, OMIP telah diterapkan untuk PTI.

### ***Shared Services Organization***

Untuk mencapai tujuan-tujuan pertumbuhan kami, PTI memfokuskan usaha pada bidang-bidang peningkatan produksi, efisiensi operasi dan kinerja tenaga kerja. *Shared Service Organization* (SSO) kami sangat penting dalam memungkinkan unit-unit usaha agar lebih fokus pada operasi masing-masing dan meningkatkan efisiensi operasional. Sejak pendiriannya, SSO telah berfokus untuk mengkonsolidasikan aktivitas dan standarisasi, mengatur dan meningkatkan proses bisnis yang berkaitan dengan layanan pengiriman.

SSO mendorong kedewasaan operasi kami dengan mempromosikan perencanaan permintaan layanan yang lebih baik dan juga dengan menyediakan perbandingan biaya terhadap kualitas. Paradigma baru ini sangat penting bagi efisiensi organisasi. Selain itu, nilai perbaikan tanpa henti dalam organisasi layanan bersama akan terus mendorong agenda efisiensi kami.

SSO pertama kali didirikan di PTI pada bulan Juni 2009, dimulai dengan operasi IT. Pada bulan Februari 2010, SSO PTI mencakup operasi IT, pengadaan, layanan kontrak, pergudangan, layanan karyawan, piutang, payroll, neraca umum dan administrasi pelatihan.

Pada bulan Desember 2010, layanan hutang dan payroll juga menjadi bagian SSO. Ini menandai langkah penting dalam integrasi kami dengan operasi global Vale, dan mendemonstrasikan secara positif keuntungan menjadi bagian dari organisasi global.

Pada tahun 2011, kami akan terus berfokus pada implementasi model SSO global, termasuk implementasi kesepakatan tingkat layanan, serta memperkuat manajemen relasi pelanggan internal. Ini akan menstandarkan cara SSO mendorong perencanaan permintaan layanan, menyediakan transparansi biaya dan kualitas, dan menstandarkan cara-cara memperoleh layanan.

In addition, the system supports improvements in the management of our operations by focusing resources on specific goals and ensuring accountability in meeting those goals.

VPS will be implemented over a five to six year timeframe, in stages that include integration within PTI's operations, Vale's Base Metals business and ultimately with all of Vale's global operations.

We began the implementation of VPS in early 2010 as a pilot project for Vale's global Base Metals business. During the year, the Vale VPS Integration team conducted audits across all of PTI. The results will serve as the baseline for the ongoing measurement of our success in meeting the standards of operational excellence established by VPS.

### **Operational and Maintenance Improvement Program**

PTI's process plant is embarking on a continuous improvement program to improve the operations of the bottleneck equipment in order to increase production and productivity of the existing assets.

Selected participants from PTI visited three industrial sites in Australia to understand the process as we work towards operational excellence. With this knowledge, an operational and maintenance improvement plan has been established for PTI.

### **Shared Services Organization**

In order to realize our growth objectives, PTI is focusing our efforts in the areas of production improvements, operational efficiency and workforce performance. Our shared services organization model (SSO) is critical in that it allows business units to be more focused on their operations and improving their operational efficiency. Since its establishment, SSO has focused on consolidating activities and standardizing, rationalizing and improving the business process associated with the delivery of services.

SSO drives the maturity of our operations by promoting better demand planning and also providing visibility to cost versus quality. This new paradigm is fundamental to operational efficiency. In addition, there is a continuous improvement value within the shared services organization that will sustainably drive our efficiency agenda.

SSO was first established at PTI in June 2009, beginning with the IT operations of the organization. As of February 2010, the PTI SSO includes IT operations, procurement, contract services, warehouses, employee services, accounts payable, payroll, general ledger and training administration.

By December 2010, accounts payable and payroll services were made part of SSO. It marked an important step in our integration with the global Vale operation and was a positive demonstration of the benefit of being part of a global organization.

In 2011, continuing focus will be given to the implementation of a global SSO model, including the implementation of service level agreements, as well as strengthening internal customer relationship management. This will standardize the way PTI SSO will drive services demand planning, provide transparency to cost and quality and standard ways to acquire services.

## Perencanaan Bisnis Terpadu

Inisiatif Perencanaan Bisnis Terpadu (IBP) diimplementasikan pada tahun 2009 di tengah krisis keuangan global. Ketika itu, harga nikel diperkirakan akan tetap rendah selama beberapa tahun sehingga perlu segera meningkatkan efisiensi operasional untuk memperbaiki profitabilitas PTI dan mempertahankan posisi kompetitif kami dalam pasar nikel global.

Saat ini, bukan kemampuan kami mengatasi krisis keuangan yang mendorong inisiatif perbaikan yang terus menerus, melainkan fokus pada budaya sadar biaya yang telah kami ciptakan – untuk meniadakan kelebihan dan meneguhkan banyak perubahan positif yang memungkinkan kami bekerja lebih cerdas dan tumbuh lebih kuat.

Tujuan inisiatif IBP adalah meningkatkan efisiensi biaya di seluruh operasi kami dan mendukung terciptanya anggaran yang realistis melalui penyediaan informasi biaya yang akurat untuk rencana lima-tahun kami. IBP berkaitan erat dan saling melengkapi dengan inisiatif Anggaran Berbasis Nol (ZBB), yang didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan anggaran realistis berdasarkan perkiraan beban kerja untuk tahun berjalan serta tolok ukur batasan-batasan teknis.

Sebagai bagian yang terpadu dengan inisiatif IBP, kami telah mengembangkan rencana Perbaikan Efisiensi enam-tahun (2009 sampai 2014) yang berbeda dengan proses anggaran tahunan untuk mengelola dan mengendalikan biaya-biaya operasi terhadap angka-angka 2009. Rencana Perbaikan Efisiensi mencakup proyek-proyek yang khusus dirancang untuk mengurangi biaya, memperbaiki proses bisnis dan meningkatkan produktivitas.

Implementasi proyek dalam bidang-bidang:

- Perbaikan organisasi
- Rasionalisasi manfaat
- Sistem manajemen dan model pengambilan keputusan
- Standar-standar perbaikan
- Perbaikan sistem kepatuhan yang ada saat ini
- Maksimisasi sumber-sumber daya internal, produktivitas dan kesempatan

Estimasi perbaikan biaya dari rencana Perbaikan Efisiensi dimasukkan ke dalam anggaran operasional tahunan untuk mendorong realisasi manfaat-manfaat ini dan mendukung pendekatan ZBB bagi pengembangan anggaran. Jika ada kenaikan dari acuan 2009 yang dinormalisasi, hal ini akan dikaji oleh manajemen PTI untuk menentukan apakah biaya-biaya tersebut dapat diterima relatif terhadap aturan-aturan manajemen risiko dan strategis kami.

Keberhasilan diukur melalui perbandingan biaya operasional tahunan aktual dengan acuan tahun 2009 setelah dinormalisasi untuk peningkatan produksi, harga komoditi dan biaya layanan strategis, dan juga kajian rencana kerja rinci dari seluruh departemen untuk mendukung proyek-proyek peningkatan efisiensi yang dilaksanakan sesuai rencana.

## Kajian Proyek Pengembangan

PTI terus mempelajari berbagai kesempatan bagi pertumbuhan, efisiensi, pengurangan biaya dan perbaikan lingkungan hidup. Substitusi dan efisiensi energi, penghematan biaya dan perbaikan lingkungan hidup tetap menjadi fokus investasi modal masa depan dan program pengembangan kami.

### **Integrated Business Planning**

Our Integrated Business Planning (IBP) initiative was implemented in 2009 during the global financial crisis. At that time, nickel prices were expected to remain low for several years and there was an immediate need to increase operational efficiencies in order to improve PTI's profitability and maintain our competitive position in the global nickel market.

Today, it is not our ability to withstand a financial crisis that drives our continuous improvement initiatives, but our focus on sustaining the cost-conscious culture we have created – to eliminate excess and to reinforce the many positive changes that allow us to work smarter and grow stronger.

The objective of the IBP initiative is to improve cost efficiencies across our entire operation and support the creation of realistic budgets by providing accurate costs for our five-year plan. IBP is closely linked and complementary to the Zero Based Budget (ZBB) initiative, which is driven by the need to create realistic budgets based on the predicted workload for the year as well as benchmarked technical limits.

As an integral part of the IBP initiative, we have developed a six year (2009 to 2014) Efficiency Improvement plan, distinct from the annual budgeting process, to manage and control operating costs against a 2009 baseline. The Efficiency Improvement plan includes specific projects designed to reduce cost, improve business processes and increase productivity.

Projects are being implemented in the areas of:

- Organization improvement
- Benefit rationalization
- Management systems and decision making models
- Improvement of standards
- Improvement of compliance to existing systems
- Maximization of internal resources, productivity and opportunity

Estimated cost improvements from the Efficiency Improvement plan are built into annual operating budgets to drive the realization of these benefits and support the ZBB approach to budget development. Any increases from a normalized 2009 baseline are reviewed by PTI management to determine if the costs are justified relative to our strategic and risk management imperatives.

Success is measured through the comparison of actual annual operating costs to a 2009 baseline after normalization for incremental production, commodity prices and cost of strategic services as well as a review of detailed action plans from all departments to confirm efficiency improvement projects were executed as planned.

### **Project Development Studies**

PTI continues to study various opportunities for growth, efficiency, cost reduction and environmental improvement. Energy substitution and efficiency, cost reduction and environmental improvement remain the focal points of our future capital investments and developments program.

## TUMBUH LEBIH KUAT - INVESTASI PADA MASA DEPAN KAMI

PTI memfokuskan diri untuk tumbuh lebih kuat. Untuk mengkapitalisasi kesempatan dari pasar nikel yang diproyeksikan kuat, kami merencanakan melanjutkan investasi dalam kegiatan usaha kami. Kami memperkirakan akan menginvestasikan sebesar AS\$232 juta pada belanja barang modal tahun 2011, terdiri dari AS\$120 juta untuk modal kesinambungan, AS\$97 juta untuk modal pertumbuhan dan AS\$15 juta untuk kesehatan dan keselamatan lingkungan hidup. Jumlah ini 27% dari belanja barang modal aktual tahun 2010. Selain itu, kami berencana untuk menyisihkan dana dari rencana modal untuk membangun jalan dari Bahodopi ke Sorowako dan membangun tambang di Bahodopi sebagai bagian dari kesanggupan Kontrak Karya kami. PTI akan mengeksplorasi semua kemungkinan untuk mencapai produksi minimum sebesar 90 kilo ton dalam jangka menengah.

### Proyek Karebbe

Proyek Karebbe adalah inisiatif utama dalam program efisiensi energi dan pengurangan biaya kami. Proyek ini diumumkan pada bulan Oktober 2004, dengan tujuan untuk meningkatkan produksi tahunan. Dengan seluruh kontrak utama telah ditanda-tangani dan pembangunan bendungan sedang dilaksanakan, saat ini kami mengantisipasi proyek Karebbe akan mulai beroperasi pada semester kedua tahun 2011.

Fasilitas Karebbe diharapkan akan mengurangi risiko pasokan energi pada musim kemarau, dan menurunkan biaya tunai per unit produksi nikel dengan menggantikan pembangkit listrik thermal yang mahal dengan pembangkit listrik tenaga air. Proyek Karebbe akan menghasilkan cukup daya listrik untuk mengoperasikan tanur-tanur listrik di fasilitas Sorowako, sehingga mengurangi ketergantungan kami pada pembangkit listrik thermal yang mahal.

Proyek Karebbe adalah inisiatif utama dalam program efisiensi energi dan pengurangan biaya kami. Sumber energi terbarukan ini akan meniadakan beberapa ratus ribu metrik ton emisi gas rumah kaca per tahun, dibandingkan dengan pasokan listrik dari pembangkit thermal konvensional. Selain itu, PTI berencana untuk memasok tiga megawatt listrik setiap tahun dari pembangkit listrik Karebbe di Balambano bagi masyarakat di sekitarnya. Kami mengharapkan ini akan mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah terdekat.

Dari perspektif lingkungan hidup, sumber energi terbarukan ini akan meniadakan beberapa ratus ribu metrik ton emisi gas rumah kaca per tahun, dibandingkan dengan pasokan listrik dari pembangkit thermal konvensional.

Ini merupakan prestasi luar biasa bagi kelestarian lingkungan hidup. Proyek Karebbe mendukung usaha-usaha dan komitmen pemerintah Indonesia dalam menghadapi pemanasan global, dan PTI bangga akan karyanya dalam bidang ini.

### Peningkatan pembangkit listrik Larona

Kami melanjutkan peningkatan dua pembangkit listrik tenaga air di Larona yang telah beroperasi hampir tanpa henti selama 30 tahun dan sedang mencapai akhir usia rancangannya. Generator ketiga diperbaharui pada tahun 2002. Proyek kami mencakup pembaharuan generator No. 1 dan No. 2, dan kami harap akan diselesaikan dengan biaya lebih rendah dari anggaran AS\$36,7 juta pada tahun 2012.



Proyek Karebbe - Januari 2010.  
Karebbe Project - January 2010.

**Proyek Karebbe merupakan prestasi luar biasa bagi pelestarian lingkungan hidup dan mendukung komitmen dan usaha pemerintah Indonesia dalam menghadapi pemanasan global.**



**Proyek Karebbe - Februari 2011.**  
**Karebbe Project - February 2011.**

**The Karebbe project is an extraordinary achievement in environmental sustainability and supports the efforts and commitment of the Indonesian government in addressing global warming.**

## **GROWING STRONGER – INVESTING IN OUR FUTURE**

PTI is focused on growing stronger. In order to capitalize on the opportunities the projected strong nickel market presents, we plan to continue to invest in our business. We estimate we will invest US\$232 million on capital expenditures in 2011, consisting of US\$120 million for sustaining capital, US\$97 million for growth capital and US\$15 million for health, safety and the environment. This amount is 27% higher than actual 2010 capital expenditures. In addition, we intend to set aside funds in our capital plan to build a road from Bahodopi to Sorowako and to develop a Bahodopi mine as part of our CoW undertakings. PTI will explore all opportunities to achieve a minimum production of 90 kilo tons in the mid-term.

### **Karebbe project**

The Karebbe project is the main initiative in our energy efficiency and cost reduction program. The project was announced in October 2004, with the objective of raising annual production. With all main contracts awarded and construction of the dam underway, we currently expect that the Karebbe project will be operational in the second half of 2011.

The Karebbe facility is expected to reduce energy supply risk in dry years and lower the unit cash cost of nickel production by replacing expensive thermal power with hydroelectricity. The Karebbe project will produce enough hydroelectric energy to operate the electric furnaces at the Sorowako facility, thereby reducing our reliance on expensive thermal power.

The Karebbe project is the main initiative of our energy efficiency and cost reduction program. From an environmental perspective, this renewable energy source will eliminate several hundred thousand metric tons per year of greenhouse gas emissions, compared to conventional thermal power supplies. In addition, PTI plans to supply three megawatts of electricity each year from the delivery point of the Karebbe generation at the Balambano switchyard to surrounding communities. We expect this to stimulate the growth of nearby small and medium-sized industries.

This is an extraordinary achievement in environmental sustainability. The Karebbe project supports the efforts and commitment of the Indonesian government in addressing global warming, and PTI is proud of its work in this field.

### **Larona generators upgrade**

We are continuing to upgrade two of the Larona hydroelectric power plant's generators, which have been operating almost continuously for 30 years and are reaching the end of their expected design life. A third generator was upgraded in 2002. Our project includes upgrading Generators No. 1 and No. 2, and we expect it will be completed below our budget of US\$36.7 million. We expect the project to be completed by 2012.

### Proyek konversi dan transportasi batu bara

Kami telah memulai tahap pertama dari proyek dua tahap untuk menggantikan HSFO dengan bubuk batu bara dalam kegiatan operasional tertentu dan mencakup pembaharuan infrastruktur pengelolaan komoditi dalam jumlah besar saat ini. Tujuan utama tahap pertama adalah mengganti sumber energi pengering dari HSFO menjadi bubuk batu bara, termasuk memperbaharui infrastruktur penanganan material dalam jumlah besar saat ini. Tahap kedua adalah konversi tanur pereduksi. Studi kelayakan untuk tahap pertama telah diselesaikan pada awal tahun 2008 dan proyek dimulai pada triwulan pertama tahun 2008. Proyek ini akan memberikan keleluasaan bagi PTI untuk memilih menggunakan batu bara atau HSFO tergantung pada kondisi ekonomi terkait dengan sumber energi. Total biaya tahap pertama diperkirakan sekitar AS\$100 juta, dan kami mengharapkan proyek ini selesai pada tahun 2012.

### TANUR REAKTOR ADAPTIF NO. 4

Lingkup proyek ini adalah instalasi sistem stabilisasi kebutuhan tenaga pada Tanur No. 4. Tujuan utama proyek adalah mengurangi fluktuasi daya listrik dan meminimalkan "downtime" tanur semasa instalasi untuk mendukung peningkatan produksi lebih lanjut. Reaktor ini adalah prototipe dan jika proyek ini berhasil, kami akan memasang reaktor pada tanur-tanur lain juga. Uji integrasi pabrik dan teknik telah diselesaikan pada akhir tahun 2010.

### KINERJA LINGKUNGAN HIDUP

Tanggung jawab lingkungan hidup merupakan prioritas bagi PTI. Kami bekerja membangun peran kepemimpinan dalam kinerja lingkungan hidup, dan kami bangga akan pencapaian kami yang signifikan sejauh ini. Namun kami menyadari bahwa kami mampu dan harus berbuat lebih.

Pada bulan September 2010, PTI menerima penghargaan Aditama (Emas) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk manajemen lingkungan hidup dan kepatuhan. Pada bulan Desember 2010 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menganugerahkan peringkat Biru pada PTI dalam program PROPER sebagai bagian dari penilaian kepatuhan lingkungan hidup tahunan KLH.

Kami telah memulai implementasi Sistem Manajemen Lingkungan Hidup Vale (EMS) yang didasarkan pada persyaratan ISO 14001. EMS akan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk memastikan kepatuhan terhadap Kebijakan bagi Pengembangan yang berkesinambungan dan tujuan-tujuan Lingkungan Hidup Vale.

Salah satu fokus utama kami dalam memperbaiki efisiensi lingkungan hidup adalah melanjutkan pengembangan program reduksi sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>). Uji coba awal telah menunjukkan potensi perbaikan efisiensi sulfur, dan uji coba lebih lanjut direncanakan pada tahun 2011. Jika berhasil, pendekatan ini akan dilanjutkan dengan instalasi prototipe sistem penambahan sulfur pada tahun 2012 dan mulai menghasilkan reduksi permanen bagi emisi SO<sub>2</sub>.

### MELIBATKAN MASYARAKAT

PTI selalu percaya bahwa keberhasilan kami berkaitan langsung dengan keberhasilan dan kemakmuran masyarakat lokasi operasi kami. Bagian Pengembangan Masyarakat dalam Laporan Tahunan ini melaporkan banyak proyek kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang telah kami lakukan pada tahun lalu.

**Kami harus memupuk hubungan baik dengan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kami yang berubah. Pertumbuhan kami sebagai perseroan tergantung kepada kemampuan kami meraih izin sosial untuk beroperasi.**



### Coal conversion and transportation project

We have begun the first phase of a two-phase project that will replace HSFO with pulverized coal in some of our operations and involves the upgrade of our existing bulk commodity material handling infrastructure. The main objective of phase one is to convert the energy source in our dryers from HSFO to pulverized coal, including upgrading our existing bulk commodity material handling infrastructure. The second phase will involve conversion of the kilns. This project will provide PTI with the flexibility to use either coal or HSFO depending on the prevailing economics associated with these fuel sources. The estimated total cost for phase one is about US\$100 million, and we expect to complete this work in 2012.

### ADAPTIVE REACTOR FURNACE NO. 4

The scope of this project is to install a power demand stabilization system on Furnace No. 4. The primary project objectives are to reduce power fluctuation and minimize furnace 'downtime' during installation to support further increases in production. This adaptive reactor is a prototype and if the project is successful, we will install adaptive reactors on other furnaces as well. At the end of 2010, engineering and factory integration tests had been completed.

### ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

Environmental responsibility is a priority for PTI. We are working to establish our leadership role in environmental performance and we are proud of our significant achievements so far. However, we recognize we are able to, and must, do more.

In September 2010, PTI received the Aditama (Gold) Award from Indonesia's Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) for environmental management and compliance. In December 2010, PTI received the Blue Rating from the State Ministry of Environment (KLH) for its PROPER program as part of the annual KLH environmental compliance assessment.

We have begun the implementation of Vale's Environmental Management System (EMS), based on the requirements of ISO 14001. This EMS will be used as a reference and guideline to ensure compliance with Vale's Policy for Sustainable Development and Environmental Objectives.

One of our primary areas of focus in improving our environmental efficiency is the continued development of the sulphur dioxide (SO<sub>2</sub>) reduction program. Early tests have demonstrated a potential improvement in sulphur efficiency, and further tests are planned for 2011. If successful, the approach will lead to installation of a prototype sulphur addition system in 2012 and further permanent reductions in SO<sub>2</sub> emissions.

### ENGAGING COMMUNITIES

PTI has always believed that our success is directly linked to the success and prosperity of the communities in which we operate. In the Community Development section of this Annual Report, you can learn about the many health, education and infrastructure projects we have undertaken over the past year.

**We must nurture strong relationships with local governments to meet the needs of our changing communities. Our growth as a company depends on our ability to earn our social license to operate.**

Kami menyadari bahwa untuk masa depan kami harus terus memelihara relasi yang kuat dengan pemerintah setempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah. Pertumbuhan kami sebagai perusahaan tergantung kemampuan kami meraih izin sosial untuk beroperasi. Ini adalah tanggung jawab yang kami pandang serius.

## KEPEMIMPINAN

Pada tanggal 5 Maret 2010, dalam RUPS Luar Biasa pemegang saham menyetujui pengangkatan Peter Poppinga sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Tito Martins sebagai Komisaris. Bapak Poppinga adalah karyawan dan Executives Vice Preseident, Base Metals, Asia dan Pasific. Berbasis di Asia pengangkatan Bapak Poppinga menunjukkan komitmen usaha Vale Bese Metals ke PTI dan Indonesia. Dalam rapat yang sama, pemegang saham menyetujui pengunduran diri Arif S. Siregar dan mengangkat Tony Wenas sebagai Presiden Direktur.

Pada tanggal 16 April 2010, RUPS Tahunan menyetujui pengangkatan Peter Poppinga sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Jennifer Maki, Tito Martins, Mark J. Travers, Arif S. Siregar, Takeshi Kubota, dan Naoyuki Tsuchida sebagai Komisaris Perseroan, dan juga menyetujui pengangkatan Nicolaas D. Kanter, Irwandy Arif, dan Arief T. Surowidjojo sebagai Komisaris Independen. Dalam rapat yang sama, pemegang saham juga menyetujui pengangkatan kembali Tony Wenas sebagai Presiden Direktur, Claudio Bastos sebagai Wakil Presiden Direktur dan Helwanurrachman Djumiril sebagai Direktur.

Helwanurrachman Djumiril mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 15 Juni 2010.

Pada tanggal 28 Oktober 2010, PTI menyelenggarakan RUPS Luar Biasa untuk menyetujui pengunduran diri Naoyuki Tsuchida's dan mengangkat Harumasa Kurokawa sebagai Komisaris menggantikan Tsuchida. Pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Bernardus Irmanto sebagai Direktur Perseroan yang bertanggung jawab atas Layanan Korporat dan Sumber Daya Manusia. Pengangkatan Mr. Kurokawa dan Bapak Irmanto akan berakhir pada RUPS Tahunan tahun 2012.

RUPS Luar Biasa diadakan pada tanggal 16 Februari 2011. Dalam rapat ini, pemegang saham menyetujui pengunduran diri Claudio Bastos sebagai Wakil Presiden Direktur dan mengangkat Claudio Basto sebagai Direktur, Fabio Bechara sebagai Direktur, dan Bernardus Irmanto sebagai Wakil Presiden Direktur. Masa jabatan akan berakhir pada RUPS Tahunan tahun 2012.

Dewan Komisaris PTI telah berfokus pada perbaikan praktik-praktik tata kelola. Pada bulan Oktober 2010, Dewan Komisaris mengadopsi piagam baru bagi Komite Tata Kelola, Nominasi, Sumber Daya dan Kompensasi Manajemen dan Komite ini diganti nama menjadi Komite Tata Kelola. Silahkan baca mengenai kebijakan dan praktik tata kelola PTI pada Laporan Tahunan ini.

## PROSPEK BISNIS

Berdasarkan sudut pandang usaha kami, Indonesia terletak strategis dalam wilayah Asia Pasifik, yang memegang rekor tingkat pertumbuhan tertinggi konsumsi nikel selama 30 tahun terakhir, dan pertumbuhan yang tinggi ini diharapkan terus berlanjut.

Looking ahead, we recognize that we must continue to nurture strong relationships with local governments in order to meet the needs of our changing communities. Our growth as a company depends on our ability to earn our social license to operate. It is a responsibility we take very seriously.

## LEADERSHIP

On March 5, 2010, at an Extraordinary General Meeting of Shareholders, shareholders approved the appointment of Peter Poppinga as the President Commissioner of PTI and Tito Martins as Commissioner. Mr. Poppinga is Executive Vice President Base Metals Asia and Pacific. Based in Asia, Mr. Poppinga's appointment demonstrates Vale's Base Metals business' commitment to PTI and to Indonesia. At the same meeting, shareholders approved the resignation of Arif S. Siregar as President Director and appointed Tony Wenas as President Director.

On April 16, 2010, at our Annual General Meeting of Shareholders, the appointment of Peter Poppinga as the President Commissioner of PTI, Jennifer Maki, Tito Martins, Mark Travers, Arif S. Siregar, Takeshi Kubota, and Naoyuki Tsuchida as Commissioners was approved. At the same time, shareholders also approved the appointment of Nicolaas D. Kanter as the Vice President Commissioner and Independent Commissioner, Irwandy Arif and Arief T. Surowidjojo as Independent Commissioners. At the same meeting, shareholders approved the reappointment of Tony Wenas as President Director, Claudio Bastos as Vice President Director and Helwanurrachman Djumiril as a Director.

Helwanurrachman Djumiril tendered his resignation as a Director of PTI on June 15, 2010.

On October 28, 2010, PTI held an Extraordinary General Meeting of Shareholders that accepted Naoyuki Tsuchida's resignation and appointment of Harumasa Kurokawa as Commissioner as Mr. Tsuchida's successor. Shareholders also approved the appointment of Bernardus Irmanto as Director responsible for Human Resources and Corporate Services. The terms of Mr. Kurokawa's and Mr. Irmanto's appointments will expire at the Annual General Meeting of Shareholders in 2012.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders was held on February 16, 2011. At this meeting, the shareholders accepted the resignation of Claudio Bastos as Vice President Director and his appointment as a Director, Fabio Bechara as a Director and Bernardus Irmanto as Vice President Director. Their terms will expire at Annual General Meeting of Shareholders in 2012.

PTI's Board of Commissioners has focused on enhancing our corporate governance practices. In October 2010, the Board of Commissioners adopted a new charter for the Corporate Governance, Nomination, Management Resources and Compensation Committee and the committee was renamed the Corporate Governance Committee. Please refer to Corporate Governance Policies and Practices section of this report for more information.

## BUSINESS PROSPECTS

Indonesia is well situated within the Asia-Pacific region, which has recorded the world's highest growth rates in nickel consumption over the past 30 years. These strong growth rates are expected to continue.

Kesempatan penggunaan nikel terus tumbuh. Menurut *The International Nickel Study Group* (INSG) Oktober 2010 penggunaan (konsumsi) nikel primer dunia diperkirakan meningkat dari 1,24 juta metrik ton pada tahun 2009 menjadi 1,43 juta metrik ton pada tahun 2010, dan diharapkan terus meningkat menjadi 1,53 juta metrik ton pada tahun 2011. Baja nirkarat yang mengandung nikel hadir dalam berbagai ragam penggunaan dan peralatan karena sangat tahan lama dan mudah dibersihkan. Baja nirkarat dan produk-produk lainnya dapat ditemukan hampir di mana saja, dalam begitu banyak aplikasi yang berdampak bagi hidup kita sehari-hari, dari peralatan sederhana sampai peralatan teknologi canggih. Baja campuran dengan tipikal kandung nikel kurang dari 1% sering digunakan untuk produk-produk seperti penyangga bangunan dan peralatan listrik. Logam campuran non-besi, yang mengandung nikel dan sedikit atau tanpa besi, banyak digunakan dalam pembuatan komponen pesawat terbang. Nikel adalah material terbaik untuk memproses produk berbentuk plat seperti furnitur metal. Daftar penggunaan nikel primer murni nyaris tanpa akhir.

## FOKUS PADA INOVASI

Bekerja lebih cerdas menuntut PTI melakukan inovasi dalam setiap aspek operasi. Tentu saja inovasi tergantung pada kemampuan kita untuk memperoleh teknologi baru dan mengaplikasikannya dengan berhasil pada operasi tambang dan produksi kami. Namun lebih dari teknologi, inovasi tergantung pada kemampuan kami memelihara budaya yang ulet, responsif dan berjiwa wirausaha. Kami menyadari kebutuhan untuk membawa perusahaan kami pada arah yang akan memungkinkan kami mengkapitalisasi sumber daya kami yang melimpah dan kesempatan-kesempatan di masa depan.

Kunci keberhasilan yang berkesinambungan ada pada inovasi, membawa ide-ide baru bagi operasi kami, proses-proses kami, masyarakat kami, dan perlindungan lingkungan hidup. Kami tetap berkomitmen terhadap bisnis kami, kemakmuran Indonesia dan menghasilkan nilai luar biasa bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan kami.

Direksi senang menantikan saat melaporkan kemajuan Perseroan kepada anda.



**Tony Wenas**  
Presiden Direktur



**Bernardus Irmanto**  
Wakil Presiden Direktur



**Claudio R. C. Bastos**  
Direktur



**Cihon Bangun**  
Direktur



**Fabio Bechara**  
Direktur

**Kunci  
kesinambungan  
keberhasilan kami  
terletak pada  
kemampuan kami  
untuk berinovasi,  
menghasilkan  
ide-ide baru bagi  
operasi kami,  
proses-proses kami,  
masyarakat kami  
dan perlindungan  
lingkungan hidup.**

**The key to our ongoing success lies in our ability to innovate, bringing new ideas to our operations, our processes, our communities and the protection of our environment.**

The opportunities for nickel use continue to grow. According to The International Nickel Study Group (INSG) report from October 2010, global primary nickel consumption was estimated to increase from 1.24 million metric tons in 2009 to 1.43 million metric tons in 2010, and a further increase to 1.53 million metric tons is expected in 2011. Nickel-containing stainless steel is present in a broad range of consumer and industrial applications because it is durable in harsh environments, hygienic, fashionable and fully recyclable. Stainless steel and other products can be seen almost everywhere in a host of applications that impact our daily lives, from simple tools to sophisticated technology. Low alloy steel, with a nickel content of typically less than 1%, is frequently used in products such as support beams for buildings and electrical appliances. Non-ferrous alloys, containing nickel and little or no iron, are widely used in the manufacture of aeronautical components. Nickel is the best material for plating products such as metal furniture. The list of uses of pure primary nickel is almost endless.

### FOCUS ON INNOVATION

Working smarter demands that PTI innovate every aspect of our operations. Certainly, innovation depends on our ability to harness new technologies and successfully apply them to our mining and production operations. But beyond new technology, innovation depends on our ability to nurture a culture that is agile, responsive and entrepreneurial. We recognize the need to move PTI in a direction that will allow us to capitalize on our vast resources and the opportunities that lie ahead.

The key to our ongoing success lies in our ability to innovate, bringing new ideas to our operations, our processes, our communities and the protection of our environment. We remain committed to our business, the prosperity of Indonesia and to delivering exceptional value to our shareholders and all our stakeholders.

The Board of Directors looks forward to reporting our company's progress to you.



**Tony Wenas**  
President Director



**Bernardus Irmanto**  
Vice President Director



**Claudio R. C. Bastos**  
Director

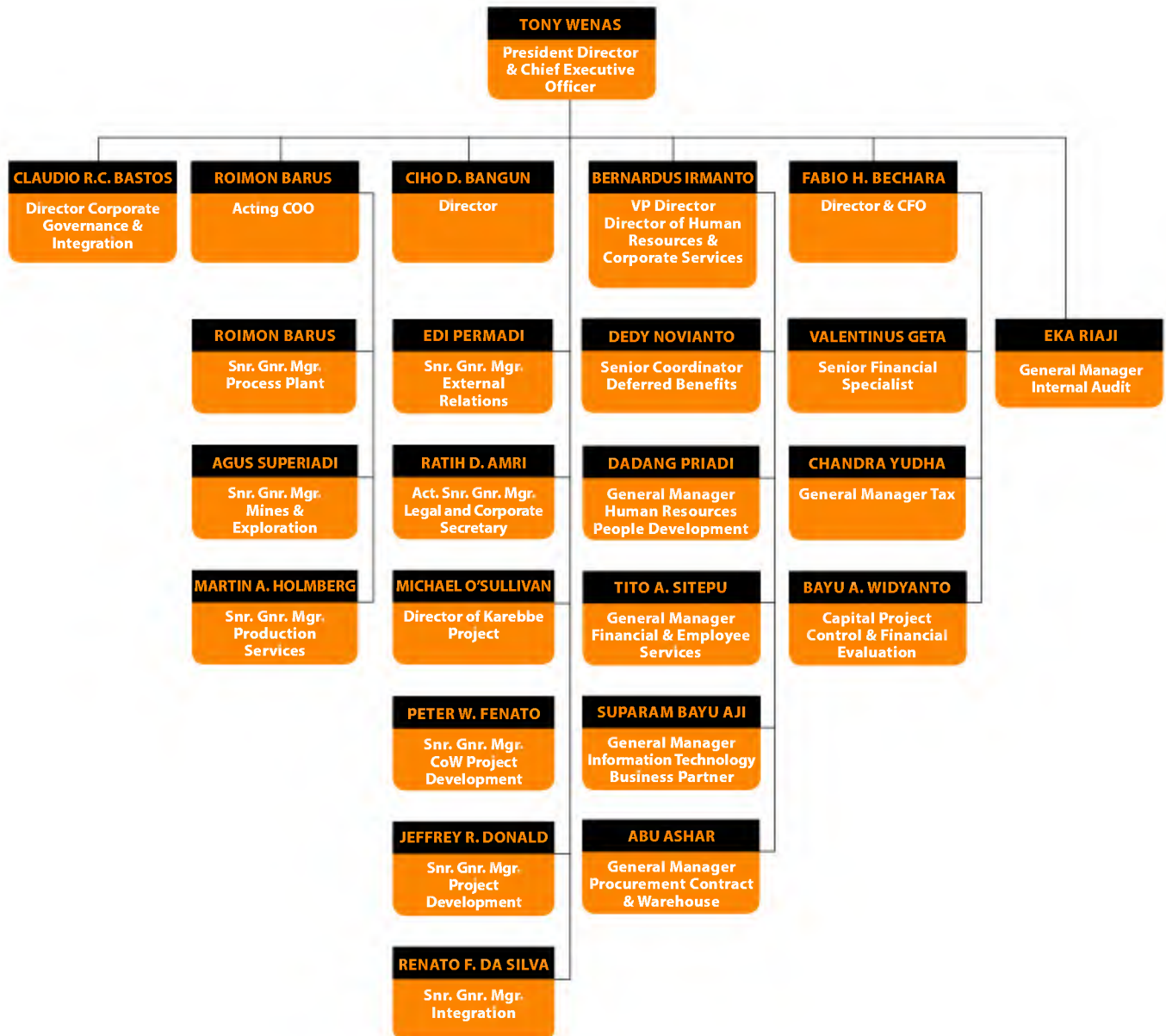


**Cihon Bangun**  
Director



**Fabio Bechara**  
Director





## LAPORAN KOMITE AUDIT

# REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

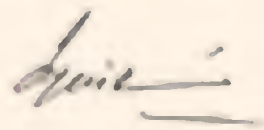
Komite Audit adalah satu dari komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Anggota-anggota Komite Audit adalah pihak-pihak yang independen terhadap PTI, dan Ketua Komite Audit adalah seorang Komisaris Independen. Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep.41/PM/2003 yang menetapkan bahwa semua perusahaan publik di Indonesia wajib memiliki Komite Audit, Piagam Komite Audit yang mengatur maksud, otoritas, komposisi, rapat dan operasi, masa jabatan dan tanggung jawab (terkait dengan proses pelaporan keuangan dan audit internal, pengawasan dan pengaturan manajemen risiko) yang ditetapkan dan dievaluasi secara berkala.

Masa jabatan Komite Audit diatur dalam Piagam, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Fungsi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tanggung jawab pengawasan atas hal-hal yang melibatkan pelaporan keuangan dan efektivitas proses-proses audit internal dan eksternal, yang bertujuan untuk memastikan kecukupan pengendalian internal dan kualitas dan integritas pelaporan keuangan Perseroan.

Pada tanggal 16 April 2010, Dewan Komisaris mengangkat Arief T. Surowidjojo sebagai Ketua Komite Audit menggantikan Rozik B. Soetjipto, dan Erry Firmansyah sebagai anggota Komite Audit menggantikan Jusuf Halim. Dewan Komisaris juga mengangkat kembali Kanaka Puradiredja sebagai anggota Komite Audit untuk masa jabatan kedua.

Sepanjang tahun 2010 Komite Audit mengadakan enam rapat dan semua anggota yang menjabat hadir dalam setiap rapat. Dalam rapat-rapat ini Komite Audit mengevaluasi Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, laporan dan kinerja keuangan triwulanan, rencana audit internal dan eksternal dan kemajuannya, dan temuan-temuan signifikan serta rencana tindakan manajemen, dan juga profil risiko PTI dan pengendalian risiko.

Dalam rapat-rapat tersebut, Komite Audit membahas isu-isu yang dicakup oleh Piagam Komite Audit dengan manajemen, auditor internal, auditor eksternal Perseroan dan semua pihak yang dianggap layak dan relevan oleh Komite Audit. Temuan-temuan dicatat dalam catatan rapat dan dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris.



**Arief T. Surowidjojo**  
Ketua Komite Audit



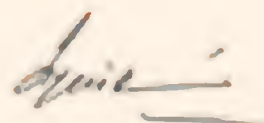
The Audit Committee is one of the committees formed by the Board of Commissioners. The members of the Audit Committee are independent of PTI and the Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner. In compliance with Decree number Kep.41/PM/2003 of the Chairman of Bapepam-LK (The Indonesian Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency) stipulating that all Indonesian public companies must have an Audit Committee, a formal Audit Committee Charter governing the purpose, authority, composition, meeting and operation, terms of service and responsibilities (relating to the process of financial reporting and internal audit, risk management, control and governance) has been established and regularly reviewed.

The Audit Committee's terms of reference are stipulated in the Charter, which has been approved by the Board of Commissioners. The functions of the Audit Committee are to assist the Board of Commissioners in discharging its oversight responsibilities regarding matters involving financial reporting and the effectiveness of the external and internal audit processes, with the aim of ensuring the adequacy of internal controls and the quality and integrity of the Company's financial reporting.

On April 16, 2010, the Board of Commissioners appointed Arief T. Surowidjojo as the Chairman of Audit Committee replacing Rozik B. Soetjipto, and Erry Firmansyah as Audit Committee member replacing Jusuf Halim. The Board of Commissioners also reappointed Kanaka Puradiredja for a second term as an Audit Committee member.

During 2010, the Audit Committee held six meetings and all members then in office were in attendance at each meeting. During these meetings the Audit Committee reviewed the Company's Annual Financial Statements, quarterly financial reports and performances, the external and internal audit plan, its progress, and their respective significant findings and management action plans, as well as PTI's risk profile and risk controls.

In such meetings, the Audit Committee discussed issues covered under the Audit Committee Charter with the management, Internal Audit, external auditors of the Company and any parties the Audit Committee deems appropriate and relevant. The findings, recorded in minutes of meeting, were reported in the meetings of the Board of Commissioners.



**Arief T. Surowidjojo**  
Chairman of the Audit Committee



TATA KELOLA PERUSAHAAN

# CORPORATE GOVERNANCE

## KOMITMEN KAMI TERHADAP TATA KELOLA YANG BAIK

# OUR COMMITMENT TO GOOD GOVERNANCE

Tata Kelola yang baik adalah fondasi komitmen Perseroan terhadap para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk merancang dan menerapkan praktik-praktik tata kelola yang memastikan agar PTI dikelola dengan standar integritas tertinggi untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang dan mengembangkan masyarakat di wilayah kami beroperasi.

**PTI senantiasa melakukan uji kebisingan pada lingkungan kerja.**

**PTI consistently conducts noise-tests at the working area.**



Good corporate governance is the cornerstone of our commitment to our stakeholders. The Board of Commissioners and Board of Directors are committed to designing and implementing corporate governance practices that ensure PTI is managed with the highest standards of integrity so that we maximize long-term shareholder value and improve the communities in which we operate.



## IKHTISAR KEGIATAN TATA KELOLA TAHUN 2010

# GOVERNANCE HIGHLIGHTS FOR 2010

Dewan Komisaris berkomitmen untuk melakukan kajian berkala atas kebijakan, praktik dan prosedur tata kelola PTI untuk memastikan agar semua itu konsisten dengan hukum, peraturan-peraturan dan tolok ukur pasar modal yang berlaku, dan dengan tepat mencerminkan praktik-praktik terbaik yang diakui oleh lembaga dan otoritas tata kelola.

Pada tahun 2010 PTI memulai pelaksanaan beberapa rencana kerja untuk meningkatkan praktik tata kelola kami.

### **MATRIKS DELEGASI OTORITAS**

Direksi memperbaharui matriks delegasi otoritas untuk lebih mendukung lingkungan operasi PTI. Matriks ini mencerminkan proses pengambilan keputusan dan alur informasi yang lebih baik dengan menetapkan pengendalian yang harus dipatuhi untuk semua persetujuan pengeluaran. Implementasi matriks ini memperkuat disiplin dalam standarisasi dan konsolidasi proses-proses bisnis penting. Proses-proses ini akan menjadi lebih baik dengan adanya pengendalian yang ditetapkan dalam matriks melalui konsolidasi dan standarisasi. Matriks akan mengkondisikan disiplin yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan seluruh karyawan.

### **NORMA PENGADAAN**

Direksi mengadopsi Norma Pengadaan baru yang menyederhanakan dan menstrukturkan seluruh praktik pengadaan untuk memastikan bahwa semua pembelian dilakukan secara transparan, jelas dan dengan pengendalian yang relevan untuk mencapai nilai terbaik.

### **PERNYATAAN BENTURAN KEPENTINGAN KARYAWAN**

Pernyataan benturan kepentingan didistribusikan kepada karyawan untuk menyatakan jika ada potensi benturan kepentingan dan/atau komitmen. Setiap tahun seluruh karyawan wajib menyerahkan pernyataan benturan kepentingan.

### **TIM IMPLEMENTASI TATA KELOLA**

Pada tahun 2010 tim Implementasi Tata Kelola melanjutkan pemantauan kinerja PTI terhadap tolok ukur yang ditetapkan pada tahun 2007 dalam suatu studi independen yang dilakukan oleh kantor penasehat hukum Mochtar Karuwin dan Komar, dan menyimpulkan bahwa PTI mematuhi semua kebijakan dan prosedur. Selain itu, Dewan Komisaris mengawasi implementasi rekomendasi-rekomendasi yang belum dilaksanakan.

Pada tahun itu juga tim memperbaiki pemahaman tata kelola seluruh perusahaan dengan mengimplementasikan portal situs informasi. Selanjutnya, tim telah merevisi alur kebijakan dan prosedur eksekutif dan metode pertanggung-jawaban.

The Board of Commissioners is committed to regular reviews of PTI's corporate governance policies, practices and procedures to ensure that they are consistent with applicable laws, regulations and stock exchange listing standards and that they appropriately reflect best practices recognized by corporate governance bodies and authorities.

PTI initiated several action plans in 2010 to enhance our corporate governance practices.

### **DELEGATION OF AUTHORITY MATRIX**

The Board of Directors prepared an updated delegation of authority matrix to better support PTI's operating environment. The matrix represents an improved decision-making process and flow of information by outlining the controls to be followed for the approval of all spending. The implementation of this matrix enforces discipline in the standardization and consolidation of key business processes. These processes will be enhanced by the controls outlined in the matrix through consolidation and standardization. The matrix will provide the discipline necessary to ensure compliance by all employees.

### **PROCUREMENT NORM**

The Board of Directors adopted a new Procurement Norm which streamlines and structures all procurement practices to ensure that all purchases are conducted in a transparent and clear manner with all relevant controls to obtain best value.

### **EMPLOYEES' CONFLICT OF INTEREST STATEMENT**

A conflict of interest statement was distributed to employees for disclosing potential conflict of interests and/or commitments. All employees have an obligation to submit a conflict of interest statement annually.

### **CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION TEAM**

In 2010, the Corporate Governance Implementation team continued to monitor PTI's performance against standards established in the 2007 independent study, carried out by the law firm of Mochtar Karuwin and Komar, and found PTI to be in compliance with all policies and procedures. In addition, the Board of Commissioners oversaw implementation of the remaining recommendations.

Also this year, the team improved company-wide understanding of corporate governance by implementing an informational website portal. Further, the team has revised executive policy and procedures flow and accountability methodology.

## KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DAN PRAKTIK-PRAKTIK TATA KELOLA

# GOVERNANCE POLICIES AND PRACTICES

Kebijakan-kebijakan tata kelola perusahaan PTI memastikan bahwa adanya kerangka yang kokoh sehingga Dewan Komisaris dan Direksi dapat mengkaji dan mengevaluasi secara efektif bisnis dan operasional PTI dan memastikan mereka mencapai tujuan strategis Perseroan dan mencerminkan praktik-praktik terbaik dalam lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial.

## DEWAN KOMISARIS

### Komposisi

Anggaran Dasar PTI menetapkan bahwa Dewan Komisaris harus terdiri tidak kurang dari 10 dan tidak lebih dari 15 anggota. Jumlah anggota saat ini ditetapkan 10 orang.

Tiga anggota Dewan Komisaris PTI – Nicolaas D. Kanter, Irwandy Arif dan Arief T. Surowidjojo – adalah Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan peraturan pasar modal Indonesia.

### Tugas, Peran dan Tanggung Jawab

Fungsi utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas Direksi dan menyediakan penatalayanan secara menyeluruh atas bisnis dan urusan-urusan Perseroan.

Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab ini Dewan Komisaris mengkaji dan menyetujui terlebih dahulu beberapa keputusan penting terkait dengan manajemen PTI yang dibuat oleh Direksi sesuai dengan anggaran dasar. Usulan keputusan atau tindakan penting yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris mencakup, antara lain:

1. status badan usaha Perseroan; struktur modal; rencana bisnis dan strategi tahunan dan jangka panjang;
2. laporan keuangan triwulanan dan tahunan;
3. akuisisi dan divestasi penting;
4. aliansi strategis dan tindakan-tindakan lain sebagaimana dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar.

Investasi modal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang melebihi tingkat yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris juga harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris. Sebagai bagian dari proses untuk terus meningkatkan praktik Tata Kelola, Dewan Komisaris berharap agar daftar tersebut direvisi dari waktu ke waktu untuk menyediakan peran pengawasan yang konsisten dengan praktik-praktik terbaik yang berlaku.

**Tata kelola perusahaan adalah kerangka peraturan dan praktik yang digunakan oleh suatu perseroan untuk memastikan pertanggung-jawaban, keadilan dan transparansi dalam relasi dengan semua pemangku kepentingannya.**



**Corporate governance is the framework of rules and practices by which a company ensures accountability, fairness and transparency in its relationships with all of its stakeholders.**

PTI's corporate governance policies ensure that a strong framework is in place so that the Board of Commissioners and Board of Directors are able to effectively review and evaluate PTI's business operations and ensure they meet our strategic objectives and reflect environmental and social responsibility best practices.

## **BOARD OF COMMISSIONERS**

### **Composition**

PTI's Articles of Association stipulate that its Board of Commissioners must consist of not less than 10 and not more than 15 members. The number of members is currently fixed at 10.

Three members of PTI's Board of Commissioners – Nicolaas D. Kanter, Irwandy Arif and Arief T. Surowidjojo – are Independent Commissioners as defined under Indonesian capital market laws and regulations.

### **Duties, Roles and Responsibilities**

The principal function of the Board of Commissioners is to supervise the Board of Directors and to provide overall stewardship of the business and affairs of the Company.

To fulfill these duties and responsibilities, the Board of Commissioners reviews and approves in advance certain major decisions relating to PTI's management made by the Board of Directors as set out in the Articles of Association. Major proposed decisions or actions subject to the prior approval of the Board of Commissioners include, among other matters:

1. The Company's corporate status, capital structure, annual and long-term business and strategic plans
2. Quarterly and annual financial statements
3. Major acquisitions or divestitures
4. Strategic alliances and other actions as required under the Articles of Association

Capital investments and other expenditures that exceed levels established by the Board of Directors are also subject to prior approval by the Board of Commissioners. The Board of Commissioners expects that, as part of a continuous process of improving good corporate governance practices, this list will be revised from time to time to provide for a supervisory role consistent with prevailing best practices.

## Kompensasi

Seluruh biaya perjalanan, akomodasi dan biaya-biaya lain yang timbul terkait dengan setiap rapat Komisaris Independen dibayar oleh PTI. Komisaris lainnya tidak menerima kompensasi dari PTI. Rentang kompensasi masing-masing anggota Dewan Komisaris yang pernah menjabat pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Dollar AS (nilai penuh)	0	1-100.000	100.001-200.000	200.001-300.000	300.001-800.000
Anggota Dewan Komisaris	8	4	-	-	-

## Rapat

Untuk melaksanakan mandatnya, Dewan Komisaris mengadakan rapat yang terjadwal rutin setiap tahun dan rapat-rapat tambahan jika diperlukan. Pada tahun 2010 Dewan Komisaris melaksanakan empat rapat:

- 5 Maret 2010 di Jakarta
- 15 April 2010 di Jakarta
- 22 Juli di Toronto
- 28 Oktober 2010 di Jakarta

Komisaris	Jumlah rapat yang dihadiri	Persentase Kehadiran
Peter Poppinga	4	100
Nicolaas D. Kanter	4	100
Takeshi Kubota	4	100
Harumasa Kurokawa*	1	25
Jennifer Maki	4	100
Tito Martins	4	100
Arif Siregar	3	75
Mark Travers	4	100
Irwandy Arif	3	75
Arief T. Surowidjojo	4	100

\* Mr. Kurokawa menghadiri semua rapat yang diadakan selama menjabat sebagai Komisaris.

## DIREKSI

### Komposisi

Anggaran Dasar PTI menetapkan bahwa Perseroan dikelola oleh Direksi yang terdiri dari tidak kurang dari tiga dan tidak lebih dari sepuluh anggota. Anggaran Dasar juga menetapkan bahwa Direksi diawasi oleh Dewan Komisaris. Saat ini ada lima anggota Direksi.

### Tugas, Peran dan Tanggung Jawab

Direksi bertanggung jawab atas manajemen Perseroan yang efektif, efisien dan berhati-hati, serta tunduk pada peran pengawasan menyeluruh Dewan Komisaris.

### Compensation

All travel, accommodation and other expenses incurred by Independent Commissioners in connection with each meeting of the Board of Commissioners are paid for by PTI. Other Commissioners do not receive compensation from PTI. The range of compensation of the members of the Board Commissioners in office at any time during 2010 was as follows:

US\$ (full amount)	0	1 - 100,000	100,001-200,000	200,001-300,000	300,001-800,000
<b>Board of Commissioners</b>					
Member	8	4	-	-	-

### Meetings

In order to carry out its mandate, the Board of Commissioners holds regularly scheduled meetings annually and additional meetings if required. In 2010, the Board of Commissioners held four meetings:

- March 5 in Jakarta
- April 15 in Jakarta
- July 22 in Toronto
- October 28 in Jakarta

Commissioner	Number of meetings attended	% Attendance
Peter Poppinga	4	100
Nicolaas D. Kanter	4	100
Takeshi Kubota	4	100
Harumasa Kurokawa *	1	25
Jennifer Maki	4	100
Tito Martins	4	100
Arif Siregar	3	75
Mark Travers	4	100
Irwandy Arif	3	75
Arief T. Surowidjojo	4	100

\* Mr. Kurokawa attended all meetings that were held while he was a Commissioner.

## BOARD OF DIRECTORS

### Composition

PTI's Articles of Association stipulate that the Company be managed by a Board of Directors consisting of not less than three and not more than 10 members. The Articles of Association also stipulate that the Board of Directors be supervised by the Board of Commissioners. There are currently five members of the Board of Directors.

### Duties, Roles and Responsibilities

The Board of Directors is responsible for the effective, efficient and prudent management of the Company, subject to the Board of Commissioners' overall supervisory role.

Dengan demikian, Dewan Komisaris berharap manajemen memenuhi tujuan-tujuan penting berikut ini:

1. Melaporkan secara komprehensif, akurat dan tepat waktu penyelenggaraan bisnis dan urusan-urusan Perseroan secara umum, dan urusan-urusan spesifik yang manajemen anggap material atau membawa konsekuensi signifikan bagi Perseroan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya
2. Bertindak tepat waktu dan memutuskan secara tepat semua keputusan yang diperlukan terkait dengan bisnis dan operasi Perseroan, sesuai dengan seluruh hukum dan ketentuan atau kewajiban yang berlaku dan dalam kerangka kebijakan perusahaan yang berlaku, dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham jangka panjang
3. Melakukan proses penetapan anggaran tahunan secara komprehensif dan memantau kinerja finansial dan operasi Perseroan secara seksama sesuai dengan rencana bisnis tahunan yang disetujui Dewan Komisaris
4. Mengkaji secara berkesinambungan rencana-rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang Perseroan serta pelaksanaannya dalam semua bidang kegiatan utama, dengan memperhatikan, antara lain, faktor-faktor penting, kondisi pasar yang berubah, dan perubahan dalam hukum, peraturan dan teknologi yang berlaku
5. Melaksanakan kebijakan, prosedur dan proses yang tepat untuk memastikan tingkat perilaku dan integritas tertinggi dari manajemen dan karyawan Perseroan di seluruh dunia

**Yosphina Koniman, operator truk PTI sedang bekerja.**

**Yosphina Koniman, a PTI truck operator, at work.**



Accordingly, the Board of Commissioners expects management to meet the following key objectives:

1. Report, in a comprehensive, accurate and timely fashion, on the business and affairs of PTI generally, and on any specific matters that management considers to be of material or significant consequence for PTI, its shareholders and other stakeholders
2. Take timely action and make all appropriate decisions necessary with respect to PTI's business and operations, in accordance with all applicable legal and other requirements or obligations and within the framework of corporate policies in effect, with a view to maximizing long-term shareholder value
3. Conduct a comprehensive annual budgeting process and monitor closely PTI's financial and operating performance in conjunction with its annual business plan approved by the Board
4. Review on an ongoing basis near-term and long-term strategic plans and their implementation in all key areas of activity in light of, among other critical factors, evolving market conditions and changes in applicable laws, regulations and technology
5. Implement appropriate policies, procedures and processes to ensure the highest level of conduct and integrity of PTI's management and employees

The Board of Directors expects that, as part of a continuous process of improving corporate governance practices, this list will be revised from time to time to reflect prevailing best practices.



Sebagai bagian dari proses perbaikan berkesinambungan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan, Direksi berharap agar daftar di atas direvisi dari waktu ke waktu untuk mencerminkan praktik-praktik terbaik yang ada.

Sesuai dengan Piagam Direksi yang diadopsi pada tahun 2008, Direksi telah menyampaikan laporan-laporan kepada Dewan Komisaris terkait dengan, antara lain, manajemen Perseroan, operasi dan tanggung jawab sosial.

Direksi, dipimpin oleh Presiden Direktur, mengawasi empat bidang fungsional berikut dalam Perseroan, yaitu: operasi, urusan-urusan perusahaan, hukum dan keuangan.

### Kompensasi

Kompensasi tahunan Direksi dikaji dan disetujui oleh Komite Tata Kelola, Nominasi, Sumber Daya dan Kompensasi Manajemen dalam Dewan Komisaris. Tingkat kompensasi dimaksudkan agar mencerminkan norma-norma pasar dan keinginan PTI untuk menarik dan mempertahankan potensi manajemen yang terbaik.

Rentang remunerasi masing-masing anggota Direksi yang pernah menjabat pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Dollar AS (nilai penuh)	\$0	\$1-\$100.000	\$100.001-\$200.000	\$200.001-\$300.000	\$300.001-\$800.000
<b>Anggota Direksi</b>	-	-	1	-	5

### Rapat

Untuk melaksanakan mandatnya, Direksi mengadakan rapat sesuai keperluan. Pada umumnya, rapat dijadwalkan untuk membahas hasil-hasil keuangan triwulanan dan rekomendasi dividen, tetapi rapat dapat dilakukan untuk membahas masalah yang muncul dari waktu ke waktu.

Pada tahun 2010 ada 40 rapat.

Anggota Direksi	Jumlah Rapat yang Dihadiri	Persentase Kehadiran
Tony Wenas	31	78
Claudio Bastos	39	98
Ciho Bangun	38	95
Bernardus Irmanto	5	13

### Perbaikan berkesinambungan

PTI berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan dukungan yang diperlukan bagi Direksi untuk terus menerus mengembangkan dan meningkatkan keterampilan dan memastikan hanya praktik manajemen terbaik yang dilaksanakan.

Untuk memenuhi komitmen ini, Direksi PTI berpartisipasi atau menghadiri program-program berikut: Dewan Sumber Daya Manusia Global dalam kelompok usaha Vale; konferensi-konferensi industri pertambangan; rapat-rapat kepemimpinan; dan konferensi-konferensi sumber daya manusia internasional.

In compliance with the Board of Directors' Charter adopted in 2008, the Board of Directors has been providing reports to the Board of Commissioners relating to the management of the Company, its operations and corporate social responsibility, among other matters.

The Board of Directors, led by our President Director, oversees the following four functional areas of the Company: operations, corporate affairs, legal and finance.

#### Remuneration

Annual remuneration of the Board of Directors is reviewed and approved by the Corporate Governance Committee of the Board of Commissioners. Compensation levels are intended to reflect market norms and PTI's desire to attract and retain outstanding management talent.

Range of remuneration of the members of the Board of Directors in office at any time during 2010 was as follows:

US\$ (full amount)	0	1 - 100,000	100,001-200,000	200,001-300,000	300,001-800,000
<b>Board of Directors</b>					
Member	-	-	1	-	5

#### Meetings

In order to carry out its mandate, the Board of Directors holds meetings as required. Generally, meetings are scheduled to consider quarterly financial results and dividend recommendations, but meetings can be called to deal with matters that may arise from time to time.

In 2010, there were 40 meetings.

Members of Board of Directors	Number of Meetings Attended	% Attendance
Tony Wenas	31	78
Claudio Bastos	39	98
Ciho Bangun	38	95
Bernardus Irmanto	5	13

#### Continuous Improvement

PTI is committed to providing Directors with the opportunity and support necessary to continuously develop and upgrade their skills and ensure that only superior management practices are followed.

In order to meet this commitment, PTI's Directors participated in or attended the following programs: Global Human Resources Council within Vale, mining industry conferences, leadership meetings and international human resources conferences.

## KOMITE AUDIT

### Komposisi

Komite Audit PTI terdiri dari tiga anggota dan dipimpin oleh Arief T. Surowidjojo, seorang komisaris independen. Anggota-anggota lainnya adalah Kanaka Puradiredja dan Erry Firmansyah. Mr. Kanaka, yang diangkat untuk masa jabatan kedua pada tanggal 16 April 2010 tidak memiliki hubungan lain dengan Perseroan. Bapak Firmansyah, yang diangkat pada tanggal 16 April 2010, juga tidak memiliki hubungan lain dengan Perseroan. Anggota-anggota Komite Audit hanya diperkenankan menjabat maksimal dua masa jabatan berturut-turut, masing-masing selama dua tahun. Bapak Surowidjojo diangkat sebagai Ketua Komite Audit pada tanggal 16 April 2010.

#### **Arief T. Surowidjojo**

Ketua Komite Audit  
Diangkat pada tahun 2010  
Anggota independen



Arief T. Surowidjojo adalah Ketua Komite Audit dan juga Komisaris Independen. Biografi Bapak Surowidjojo disajikan pada bagian Informasi tentang Perusahaan. Arief T Surowidjojo School of Law University of Washington 1984 (LLM). Lubis Ganie Surowidjojo 1998-2004) WWF International Indonesia (PT Holcim Indonesia Tbk, PT Sampoena Agro Tbk, PT Indika Energy Tbk, Agrakom Multicitra Siberkom (detik.com), Indonesia, PT Justika Siar Publika (hukumonline.com).

#### **Kanaka Puradiredja**

Diangkat pada tahun 2008  
Anggota independen

Kanaka Puradiredja memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang akuntansi publik. Beliau adalah mantan Managing Partner dan Chairman KPMG Indonesia and mantan Senior Partner Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono. Saat ini beliau adalah Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Komite Audit Indonesia. Beliau juga adalah anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Profesional Manajemen Risiko dan Wakil Ketua Ikatan Komisaris dan Direksi Indonesia. Bapak Puradiredja adalah mantan anggota Dewan Pengurus Transparansi Internasional dan anggota atau mantan anggota komite audit pada berbagai perusahaan publik. Bapak Puradiredja meraih gelar sarjana dalam bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Pajajaran, Bandung.

#### **Erry Firmansyah**

Diangkat pada tahun 2010  
Anggota independen



Bapak Firmansyah meraih gelar sarjana dalam bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1975. Beliau memulai karir sebagai auditor pada Kantor Akuntan Drs. Hadi Sutanto (Correspondent Price Waterhouse) pada tahun 1982. Kemudian beliau bekerja pada Kantor Konsultan PT Sumarno Pabottinggi Management dan pada kelompok usaha Lippo sebagai Executive Director sampai tahun 1998. Bapak Firmansyah menjabat sebagai Presiden Direktur pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dari tahun 1998 sampai 2002. Pada



## AUDIT COMMITTEE

### Composition

PTI's Audit Committee consists of three members and is chaired by Arief T. Surowidjojo, an Independent Commissioner. The other members are Kanaka Puradiredja and Erry Firmansyah. Mr. Kanaka, who was appointed to a second term on April 16, 2010, has no other relationship with the Company. Mr. Firmansyah, who was appointed on April 16, 2010, also has no other relationship with the Company. Members of the Audit Committee are only permitted to serve a maximum of two consecutive two-year terms. Mr. Surowidjojo was appointed as Chairman of the Audit Committee on April 16, 2010.

### Arief T. Surowidjojo

Chairman of Audit Committee

Appointed 2010

Independent member

Arief T. Surowidjojo is Chairman of the Audit Committee and is also an Independent Commissioner. For Mr. Surowidjojo's a biography, please refer to Corporate Information section.



### Kanaka Puradiredja

Appointed 2008

Independent member

Kanaka Puradiredja has more than 30 years of experience in public accounting. He is a former Managing Partner and Chairman of KPMG Indonesia and former Senior Partner in Kanaka Puradiredja, Suhartono Public Accounting Firm. Currently, he is the Chairman of Honorary Board of Indonesian Institute of Audit Committee. He is also a member of the Honorary Board of Professionals in Risk Management Association and a Vice Chairman of Indonesian Institute of Commissioners and Directors. Mr. Puradiredja is a former member of the Executive Board of International Transparency and a member or former member of the audit committee of various public companies. Mr. Puradiredja graduated from the Faculty of Economics of Padjajaran University, Bandung, where he majored in accounting.

### Erry Firmansyah

Appointed 2010

Independent member

Mr. Firmansyah graduated in accounting from University of Indonesia in 1975. He began his career as an auditor in the accounting firm Drs. Hadi Sutanto (Correspondent Price Waterhouse) in 1982. He then worked for PT Sumarno Pabottinggi Management and Lippo Group as an Executive Director until 1998. Mr. Firmansyah served as a President Director of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia from 1998 to 2002. Also in 1998, he became President Director of the Indonesia Stock Exchange, a position he held until July 2009.

tahun 1998 juga, beliau menjadi Presiden Direktur pada Bursa Saham Indonesia, sampai bulan Juli 2009.

Saat ini, Bapak Erry Firmansyah menjabat sebagai Komisaris Independen pada sejumlah perusahaan termasuk PT Unilever Indonesia Tbk, 2009, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Astra International Tbk, dan 2010, PT Pefindo (Persero) 2010. Beliau juga adalah Presiden Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Beliau berkontribusi aktif kepada beberapa organisasi, termasuk KADIN sebagai Wakil Ketua Komite Keuangan, anggota Dewan Donatur Universitas Andalas, anggota Dewan Penasehat IAI, anggota Dewan Penasehat IAMI, dan anggota Dewan Penasehat CWMA.

### Tugas, Peran dan Tanggung Jawab

Komite Audit melakukan pengawasan dan melaksanakan tugas-tugas berikut:

1. memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris
2. mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris
3. melaksanakan fungsi-fungsi lain terkait dengan tugas-tugas Dewan Komisaris, termasuk:
  - (i) mengkaji laporan keuangan Perseroan
  - (ii) mengkaji independensi dan obyektifitas auditor independen
  - (iii) mengkaji lingkup dan kecukupan audit-audit yang dilakukan oleh auditor independen Perseroan
  - (iv) mengkaji efektifitas kegiatan-kegiatan audit internal
  - (v) mengkaji kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Selain itu, Komite Audit diwajibkan melaporkan secara triwulanan kegiatan-kegiatannya kepada Dewan Komisaris dan menyusun ringkasan kegiatan tahunan untuk dimasukkan ke dalam Laporan Tahunan.

#### Kegiatan dan inisiatif pada tahun 2010

#### Rencana untuk tahun 2011

Mengkaji Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, laporan keuangan dan kinerja triwulanan	Membuat rencana kerja tahunan
Mengevaluasi rencana audit internal dan eksternal, kemajuannya, dan temuan-temuan signifikan audit	Mengkaji proses-proses pengendalian internal
Mengkaji rencana kerja manajemen	Mengkaji rekomendasi audit dan kemajuan implementasi masing-masing.
Mengkaji profil risiko dan pengendalian risiko Perseroan	
Mengkaji Piagam Komite Audit	

### Rapat

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004, tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit wajib menyelenggarakan sejumlah rapat yang memenuhi persyaratan minimum Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pada tahun 2010 Komite Audit melaksanakan enam rapat dan semua anggota yang saat itu menjabat hadir dalam setiap rapat.

Currently, Mr. Firmansyah serves as an Independent Commissioner for a number of companies including PT Unilever Indonesia Tbk, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Astra International Tbk and PT Pefindo (Persero). He also serves as President Commissioner of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

He actively contributes to organizations including KADIN as a Vice Chief of Finance Committee, and as a Member of Donating Council of Andalas University, Member of Advisory Council of IAI, Member of Advisory Council of IAMI and a Member of Advisory Council of CWMA.

#### Duties, Roles and Responsibilities

The Audit Committee provides oversight and fulfills these duties:

1. Provides an opinion to the Board of Commissioners on any reports or other matters conveyed by the Board of Directors to the Board of Commissioners
2. Identifies matters that require the attention of the Board of Commissioners
3. Carries out other functions related to the duties of the Board of Commissioners, including:
  - (i) reviewing the annual and quarterly financial statements
  - (ii) reviewing the independence and objectivity of its independent auditor
  - (iii) reviewing the scope and sufficiency of the audits conducted by PTI's independent auditor
  - (iv) reviewing the effectiveness of internal audit activities
  - (v) reviewing PTI's compliance with applicable capital markets laws and regulations

In addition, the Audit Committee is required to report quarterly on its activities to the Board of Commissioners and prepare a summary of its annual activities for inclusion in the Annual Report.

#### 2010 activities and initiatives authorized under the Charter of the Audit Committee      Looking Ahead to 2011

Reviewed the Annual Financial Statements, quarterly financial reports and performances	Prepare the annual work plan
Reviewed external and internal audit plan, its progress and respective significant findings	Review internal control processes
Reviewed management action plans	Review audit recommendations and the status of their implementation
Reviewed PTI's risk profile and risk controls	
Reviewed the Audit Committee Charter	

#### Meetings

According to Bapepam-LK Regulation No. IX.I.5, attachment to the Decision of Chairman of Bapepam-LK No. Kep-29/PM/2004, dated September 24, 2004, regarding Guidelines on Establishment and Working Implementations of Audit Committee, the Audit Committee shall hold meetings whose frequency must meet minimum requirements of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association. During 2010, the Audit Committee held six meetings and all members then in office were in attendance at each meeting.

Anggota Komite Audit	Jumlah Rapat yang Dihadiri	Persentase Kehadiran
Arief T. Surowidjojo	6	100
Kanaka Puradiredja	6	100
Erry Firmansyah	6	100

Dalam rapat-rapat ini Komite Audit membahas dengan auditor eksternal mengenai rencana audit, ruang lingkup audit, temuan-temuan penting audit, kecukupan pengendalian internal dan isu-isu pelaporan keuangan lainnya. Komite Audit juga mengadakan rapat dengan audit internal untuk membahas rencana audit internal, kecukupan pengendalian internal, temuan audit yang signifikan dan tindak lanjutnya. Komite juga mengadakan satu kali rapat dengan Tim Manajemen Risiko untuk membahas isu-isu manajemen risiko.

## KOMITE TATA KELOLA

### Komposisi

Komite Tata Kelola dibentuk pada bulan Januari 2006. Komite ini terdiri empat anggota yang dipilih setiap tahun dari Dewan Komisaris, termasuk dua anggota dari Vale Canada, satu anggota dari Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. dan satu Komisaris Independen.

#### **Peter Poppinga**

Ketua Komite  
Diangkat pada tahun 2009  
Chairman of Committee  
Appointed 2009



#### **Mark Travers**

Diangkat pada tahun 2010  
Appointed 2010



*Biografi anggota-anggota Komite Tata Kelola disajikan pada bagian Informasi tentang Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.*

Members of Audit Committee	Number of Meetings Attended	% Attendance
Arief T. Surowidjojo	6	100
Kanaka Puradiredja	6	100
Erry Firmansyah	6	100

During these meetings, the Audit Committee discussed with the external auditors the audit plan, scope of audit, key audit findings, adequacy of internal controls and other financial reporting issues. They also met with PTI's internal audit group to discuss the internal audit plan, adequacy of internal controls, significant audit findings and follow-up actions. One meeting was held with the Risk Management Team to discuss risk management issues.

## CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

### Composition

The Corporate Governance Committee was established in January 2006. It consists of four members elected annually from the Board of Commissioners, including two nominees of Vale Canada, one nominee of Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. and one Independent Commissioner.



**Takeshi Kubota**  
Diangkat pada tahun 2009  
Appointed 2009



**Arief T. Surowidjojo**  
Diangkat pada tahun 2009  
Appointed 2009

*Biographies of Corporate Governance Committee members are included in the Corporate Information section of this report.*

### Tugas, Peran dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab utama dari Komite Tata Kelola adalah membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menyetujui kompensasi dan remunerasi Direksi dan pejabat-pejabat senior PTI, termasuk Presiden Direktur
2. Mengawasi administrasi program kompensasi insentif PTI dan menyetujui pemberian kompensasi insentif dalam program tersebut
3. Memantau perkembangan praktik-praktik terbaik tata kelola
4. Mempertimbangkan kemungkinan benturan kepentingan
5. Memantau secara tahunan perkembangan dan perubahan dalam praktik-praktik terbaik tata kelola, tolok ukur dan persyaratan olah lembaga-lembaga pemerintah, non-pemerintah dan pasar modal

Selain itu, Komite Tata Kelola wajib menyampaikan laporan triwulanan mengenai kegiatan-kegiatannya kepada Dewan Komisaris dan membuat ringkasan kegiatan tahunan untuk dicantumkan dalam Laporan Tahunan.

#### Kegiatan dan inisiatif tahun 2010 yang diotorisasi oleh Piagam Komite Tata Kelola

#### Rencana untuk tahun 2011

Merevisi Piagam Komite Tata Kelola – 10 Oktober 2010	Implementasi mekanisme baru/revisi whistle-blower
Implementasi rekomendasi lanjutan dari kajian penasehat hukum eksternal tahun 2008	
Menerbitkan Pedoman Etika Perilaku	
Merevisi Matriks Delegasi Otoritas	

### Rapat

Komite Tata Kelola wajib menyelenggarakan sekurang-kurangnya dua rapat setiap tahun. Pada tahun 2010, Komite melaksanakan dua rapat, yaitu pada tanggal 15 Juli 2010 dan pada tanggal 3 Desember 2010, dan yang dihadiri oleh semua anggota yang menjabat.

Anggota Komite Tata Kelola	Jumlah Rapat yang Dihadiri	Persentase Kehadiran
Peter Poppinga	2	100
Mark Travers	2	100
Takeshi Kubota	2	100
Arief T. Surowidjojo	2	100

## TATA KELOLA OPERASIONAL

Selain pengawasan tata kelola yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, PTI telah melaksanakan berbagai kebijakan dan praktik operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap praktik terbaik tata kelola. Kami percaya metode kami memperkuat secara signifikan budaya melakukan yang terbaik di PTI dan semakin memperlihatkan komitmen kami terhadap tata kelola perusahaan yang baik.

### Ringkasan kegiatan tata kelola operasional tahun 2010

- Matriks evaluasi yang lebih jelas dan lebih terstruktur untuk memilih pemenang tender telah diadopsi dan diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi dalam proses tender kontrak. Matriks ini membantu memperbaiki daya saing tender
- Prosedur baru bagi proses pembayaran telah dibentuk untuk memberikan pedoman dan tanggung jawab yang jelas dalam proses pembayaran

### Duties, Roles and Responsibilities

The main duties and responsibilities of the Corporate Governance Committee are to assist the Board of Commissioners with respect to matters such as:

1. Reviewing and approving the compensation and remuneration of the PTI's Board of Directors and senior officers, including the President Director
2. Overseeing the administration of the PTI's incentive compensation plans and approving awards of incentive compensation under such plans
3. Monitoring developments in corporate governance best practices
4. Considering questions of possible conflicts of interest
5. Annually monitoring developments and changes in corporate governance best practices, standards and requirements by all applicable regulatory agencies, self-regulatory bodies and stock exchanges

In addition, the Corporate Governance Committee is required to report quarterly on its activities to the Board of Commissioners and prepare a summary of its annual activities for inclusion in the Annual Report.

2010 activities and initiatives authorized under the Charter of the Corporate Governance Committee	Looking Ahead to 2011
Revised Corporate Governance Committee Charter – October 10, 2010	Implementation of new / revised whistle-blower mechanism
Implemented further recommendations made by external counsel in 2008 study	
Rolled out Code of Ethical Conduct	
Prepared a revised Delegation of Authority Matrix	

### Meetings

The Corporate Governance Committee is required to hold at least two meetings each year. During 2010, two meetings took place, one on July 15, 2010 and one on December 3, 2010, and all members were in attendance.

Members of Corporate Governance Committee	Number of Meetings Attended	% Attendance
Peter Poppinga	2	100
Mark Travers	2	100
Takeshi Kubota	2	100
Arief T. Surowidjojo	2	100

## OPERATIONAL GOVERNANCE

In addition to the governance oversight provided by our Board of Commissioners and Board of Directors, PTI has implemented a variety of operational policies and practices to ensure our adherence to governance best practices. We believe our approach significantly strengthens the culture of excellence at PTI and further demonstrates our commitment to good corporate governance.

### Operational governance highlights for 2010

- A clearer and more structured evaluation matrix for the awarding of tenders has been adopted and implemented to improve the transparency in contract award process. The matrix helps to improve tender competitiveness
- A new payment process procedure has been established to provide guidelines and clear responsibilities in the payment process

## Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor

### Indra Ginting

Direktur Hubungan Investor dan Sekretaris Perusahaan  
Desember 2003 – Februari 2011

Sejak Februari 2011 Bapak Ginting telah mengundurkan diri dari Perseroan.

### Ratih Amri

Direktur Hukum dan Pelaksana Sekretaris Perusahaan

Ibu Ratih Amri untuk sementara bertindak sebagai Sekretaris Perusahaan dari PTI setelah Bapak Indra Ginting mengundurkan diri dari perseroan sejak bulan Maret 2011. Ibu Amri bergabung dengan PTI dalam bulan September 2005 sebagai Penasehat Hukum Internal Perseroan dan mengemban jabatan sebagai Direktur Hukum sejak bulan April 2007. Beliau memulai karirnya sebagai seorang associate di salah satu kantor hukum terkemuka di Jakarta, Mochtar Karuwin Komar, dari tahun 1996 sampai dengan 2005 sebelum bergabung dengan perseroan. Ibu Amri memegang gelar sarjana di bidang hukum dan ekonomi, keduanya dari Universitas Indonesia dan gelar magister dalam bidang Hukum Bisnis Internasional dari Universitas Leiden, Belanda.



### Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagai pejabat pelaksana Sekretaris Perusahaan, Ibu Amri menjalankan fungsi yang dipersyaratkan oleh peraturan pasar modal Indonesia dengan mengikuti perkembangan dalam peraturan-peraturan tersebut dan bertindak sebagai pejabat penghubung antara PTI dan publik, dan juga antara PTI dengan Bapepam – LK dan IDX.

Selain itu, sebagai Direktur Hukum, Ibu Amri menangani pelbagai urusan hukum perseroan meliputi, antara lain, permasalahan hukum strategis dari perseroan, kepatuhan, litigasi, hubungan industrial dan segi-segi hukum menyangkut operasi dan proyek-proyek perseroan, dan bertanggung jawab kepada Direksi perseroan.

## UNIT AUDIT INTERNAL

### Martifa Fradevita

Pelaksana Kepala Audit Internal  
Januari 2010 – November 2010

Sementara PTI melakukan pencarian dan seleksi untuk jabatan Kepala Audit Internal, Martifa Fradevita bertindak sebagai Pelaksana Kepala Audit Internal. Ibu Fradevita bergabung dengan PTI pada bulan Januari 2004 sebagai Auditor Senior dan dipromosikan menjadi Penyelia, Audit Internal, pada bulan Februari 2005. Sebelum bergabung dengan PTI, beliau bekerja pada beberapa kantor akuntan publik. Ibu Fradevita meraih gelar sarjana dalam bidang akuntansi dari Universitas Pajajaran, Bandung.



### Corporate Secretary and Director of Investor Relations

#### Indra Ginting

Director of Investor Relations and Corporate Secretary  
December 2003 – February 2011

Mr. Ginting resigned his position effective as of February 2011.

#### Ratih Amri

Director Legal and Acting Corporate Secretary

Ms. Ratih Amri is temporarily acting as PTI's Corporate Secretary after Mr. Ginting left the company as of February 2011. Ms. Amri joined PTI in September 2005 as Corporate Counsel and assumed the role of Director, Legal in April 2007. She began her career as an associate in one of the leading law firms in Jakarta, Mochtar Karuwin Komar. Ms. Amri has a bachelor's degrees in law and economics, both from the University of Indonesia, and a master's degree in international business law from the University of Leiden, the Netherlands.

#### Duties and Responsibilities

As acting Corporate Secretary, Ms. Amri fulfills the role required by Indonesian capital market regulations by keeping abreast with these regulations and acting as a liaison between PTI and the public, as well as between PTI, Bapepam-LK and the IDX.

In addition, as a Director, Legal, Ms. Amri is responsible for various legal matters including, among others, strategic corporate legal matters, compliance, litigation, industrial relations, and legal aspects of operational and project-related matters. She reports to the Board of Directors.

## INTERNAL AUDIT UNIT



#### Martifia Fradevita

Acting Head of Internal Audit  
January 2010 – November 2010

While PTI sought to fill the role of Head of Internal Audit, Ms. Martifia Fradevita served as Acting Head of Internal Audit. Ms. Fradevita holds the position of Supervisor, Internal Audit. She joined PTI in January 2004 as Senior Auditor and was promoted to Supervisor, Internal Audit, in February 2005. Prior to joining PTI, she worked with different public accounting firms. Ms. Fradevita has a Bachelor of Accountancy degree from the University of Padjadjaran in Bandung.

### **Eka Riaji**

Kepala Audit Internal  
November 2010 – sekarang



Eka Riaji diangkat sebagai Kepala Audit Internal pada tanggal 15 November 2010. Beliau memiliki hampir lima belas tahun pengalaman dalam bidang audit, keuangan dan akuntansi. Sebelum bergabung dengan PTI, beliau menjabat sebagai Kepala Audit Internal pada PT Holcim Indonesia Tbk, Manager Keuangan dan Akuntansi pada PT Schering Plough Indonesia Tbk, dan Analis Keuangan dan Auditor pada kelompok usaha Raja Garuda Mas dan Gajah Tunggal. Bapak Riaji meraih gelar sarjana dalam bidang akuntansi dari Universitas Airlangga, Surabaya, magister dalam bidang bisnis dari University of Wolongong dan magister dalam bidang perbankan dan keuangan dari University of Technology, Sydney, Australia. Beliau juga adalah Certified Internal Auditor, Certified Information System Auditor dan Certified Fraud Examiner.

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Kepala unit Audit Internal memimpin departemen Audit Internal dalam melakukan mandatnya untuk memberikan pendapat yang obyektif dan independen dan jasa konsultansi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi operasi PTI. Pemegang jabatan ini juga mengelola tim audit untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya dengan menggunakan metode sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola.

Kepala unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direksi dan menyampaikan laporan berkala mengenai status tindak lanjut temuan yang signifikan dan rencana audit tahunan kepada Direksi dan Komite Audit.

### **Rencana Audit Tahunan**

Kepala unit Audit Internal memimpin pembuatan rencana audit berbasis risiko tahunan, dengan masukan dari manajemen senior dan evaluasi dari Direksi. Rencana audit tahunan dilaksanakan oleh staf Audit Internal sepanjang tahun dan terdiri dari audit atas operasi PTI, proyek-proyek modal, dan sistem teknologi informasi. Rencana kerja audit manajemen dikaji berkala dan dilaporkan kepada Komite Audit dalam rapat triwulanan.

### **Pengendalian internal atas pelaporan keuangan**

PTI adalah anak perusahaan tidak langsung dari Vale. Vale adalah perusahaan publik yang tercatat di Amerika Serikat. Karena itu, Vale diwajibkan patuh pada ketentuan Section 404 dari Undang-Undang Sarbanes-Oxley Tahun 2002, suatu peraturan yang diberlakukan di AS mengenai pelaporan perusahaan dan persyaratan-persyaratan yang terkait. Vale telah mengembangkan kerangka pengendalian internal atas pelaporan keuangan berdasarkan kerangka kerja yang dibuat oleh Pengendalian Internal - Kerangka Kerja Terpadu yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Kerangka ini berlaku bagi seluruh anak perusahaan Vale, termasuk Vale Canada Limited dan PTI.

### **Kebijakan Whistle-Blower**

Sesuai dengan komitmen kami terhadap standar perilaku bisnis dengan etika tertinggi, PTI telah menerapkan kebijakan whistle-blower untuk memberikan kepada seluruh karyawan saluran untuk melaporkan insiden-insiden kegiatan yang tidak etis.

### **Eka Riaji**

Head of Internal Audit  
November 2010 - present

Eka Riaji was appointed as Head of Internal Audit in November 15, 2010. He has approximately 15 years experience in auditing, finance and accounting. Prior to joining PTI, he was the Head of Internal Audit at PT Holcim Indonesia Tbk, Finance and Accounting Manager in PT Schering Plough Indonesia Tbk and Financial Analyst and Auditor at Raja Garuda Mas and Gajah Tunggal Groups. Mr. Riaji holds a bachelor's degree in accounting from the University of Airlangga in Surabaya, Indonesia, a Master of Commerce from the University of Wolongong and a Master of Business in banking and finance from the University of Technology in Sydney, Australia. He is also a Certified Internal Auditor, a Certified Information System Auditor and a Certified Fraud Examiner.

### **Duties and Responsibilities**

The Head of Internal Audit leads the Internal Audit Department in fulfilling its mandate to provide independent and objective assurance and consulting services designed to add value to PTI's operations. This individual also manages an audit team to support the organization in accomplishing its objectives by bringing a systematic and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, control and governance processes.

The Head of Internal Audit is responsible to the Board of Directors and provides regular updates on the status of significant audit action items and the annual audit plan to the Board of Directors and the Audit Committee.

### **Annual Audit Plan**

The Head of Internal Audit leads the development of the annual risk-based audit plan, with input from senior management and review by the Board of Directors. The annual audit plan is carried out by Internal Audit staff throughout the year and consists of audits of PTI's operations, capital projects and information systems. Management's audit action plans are reviewed regularly and reported to the Audit Committee in their quarterly meetings.

### **Internal control over financial reporting**

PTI is an indirect subsidiary of Vale. Vale is a public company registered in the United States. As such, Vale is required to comply with Section 404 requirements of the Sarbanes-Oxley Act 2002, a U.S. regulation dealing with corporate reporting and related requirements. Vale has developed an internal control framework over financial reporting based on the framework established in Internal Control – Integrated Framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). This framework is applied in all subsidiaries of Vale, including Vale Canada Limited and PTI.

### **Whistle-blower policy**

In accordance with our commitment to the highest ethical standards of business conduct, PTI has implemented a whistle-blower policy to provide all employees with a channel to report incidents of unethical activities.

### Manajemen Risiko

Ulasan mengenai risiko yang teridentifikasi atau dijumpai oleh Perseroan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko-risiko ini dijelaskan secara rinci pada bagian Analisa dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

### Kegiatan dan beban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

2008	2009	2010
AS\$5.000.000	AS\$7.200.000	AS\$6.400.000

Total belanja tahun 2010 sebesar AS\$6.400.000.

Kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan dan beban yang dicatat pada tahun 2010 dijelaskan rinci pada bagian Komitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial dalam Laporan Tahunan ini.

### Untuk informasi lebih lanjut

Pemegang saham atau anggota masyarakat lainnya yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut mengenai PTI dipersilahkan menghubungi departemen hubungan investor kami.

web : [www.pt-inco.co.id](http://www.pt-inco.co.id)  
 telephone: +62-21-524 9000  
 fax : +62-21-524 9020  
 email : [pti.investorrelations@valeinco.com](mailto:pti.investorrelations@valeinco.com)

**PT International Nickel Indonesia Tbk**  
**Plaza Bapindo - Citibank Tower, 22nd Floor**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55**  
**Jakarta 12190 – Indonesia**  
**Departemen Hubungan Investor**

### Risk Management

A description of risks identified or encountered and the efforts undertaken to manage these risks are described in further detail of the Management's Discussion and Analysis in this Annual Report.

### Corporate Social Responsibility activities and expenses

2008	2009	2010
US\$5,000,000	US\$7,200,000	US\$6,400,000

Total expenditures for 2010 totaled US\$6,400,000.

The corporate social responsibility activities undertaken and expenses incurred in 2010 are described in further detail in the Our Commitment to Social Responsibility section in this Annual Report.

### For more information

Shareholders or other members of the public who are interested in obtaining additional information about PTI are invited to contact our investor relations department.

**web** : [www.pt-inco.co.id](http://www.pt-inco.co.id)  
**telephone** : +62-21-524 9000  
**fax** : +62-21-524 9020  
**email** : [pti.investorrelations@valeinco.com](mailto:pti.investorrelations@valeinco.com)

**PT International Nickel Indonesia Tbk**  
**Plaza Bapindo - Citibank Tower, 22<sup>nd</sup> Floor**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55**  
**Jakarta 12190 – Indonesia**  
**Attention: Investor Relations**





SUMBER DAYA MANUSIA

# HUMAN RESOURCES

## KOMITMEN TERHADAP KARYAWAN KAMI

# OUR COMMITMENT TO OUR PEOPLE

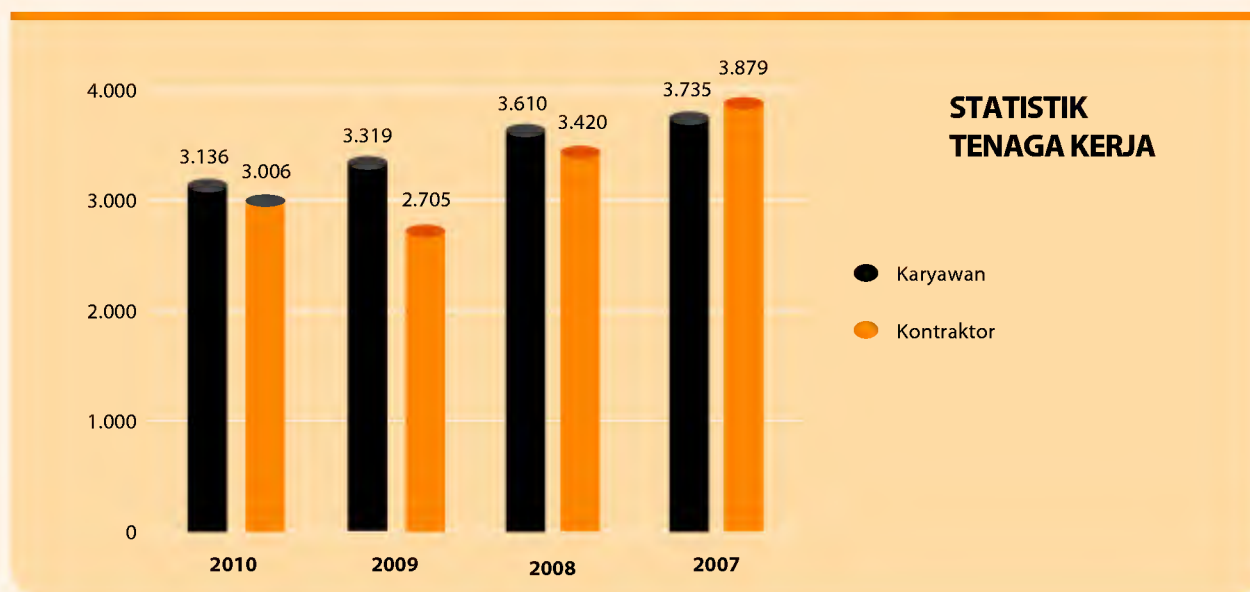
Keberhasilan PTI tergantung kepada aset terpenting kami – karyawan kami. Untuk memastikan agar mereka tetap di antara yang paling terampil dalam industri, kami terus meningkatkan kapabilitas tenaga kerja kami melalui berbagai keterlibatan, pengembangan dan pelatihan.

### IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI 7-TINGKAT KEPEMIMPINAN VALE

Pada tahun 2010, PTI menyelaraskan inisiatif sumber daya manusia dengan Vale. Dengan mengoptimalkan hubungan struktural dan fungsional dan membangun jalur karir yang jelas, sekarang kami lebih dapat memanfaatkan kompetensi karyawan, menyediakan kesempatan pengembangan profesional yang relevan dan melaksanakan rencana suksesi strategis.

### STATISTIK TENAGA KERJA

Per tanggal 31 Desember 2010, PTI mempekerjakan 3.136 karyawan yang didukung oleh 3.006 tenaga kontrak.





PTI's success depends on our most vital asset – our people. To ensure they remain among the most skilled in our industry, we work diligently to continuously improve the capabilities of our workforce through a broad range of engagement, development and training programs.

### IMPLEMENTATION OF VALE'S 7-LEADRESHIP ORGANIZATION STRUCTURE

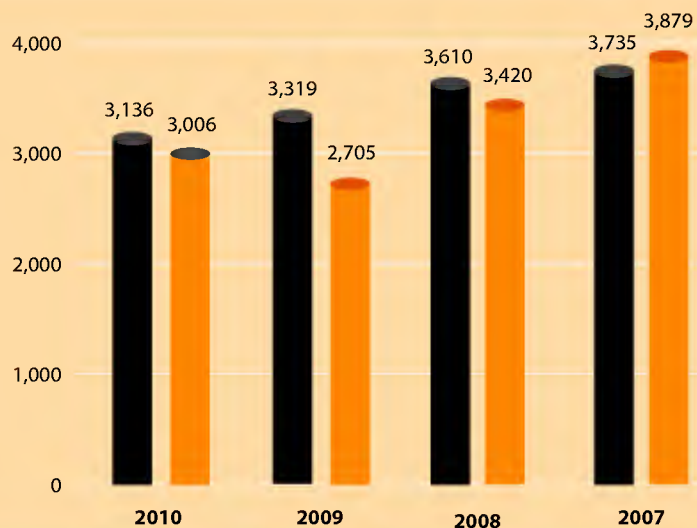
In 2010, PTI aligned our human resource initiatives with those of Vale. By optimizing structural and functional relationships and establishing well-defined career paths, we are now better able to leverage the competencies of our people, provide relevant professional development opportunities and implement strategic succession plans.

### WORKFORCE STATISTICS

As of December 31, 2010, PTI employed 3,136 people with support from 3,006 contractors.

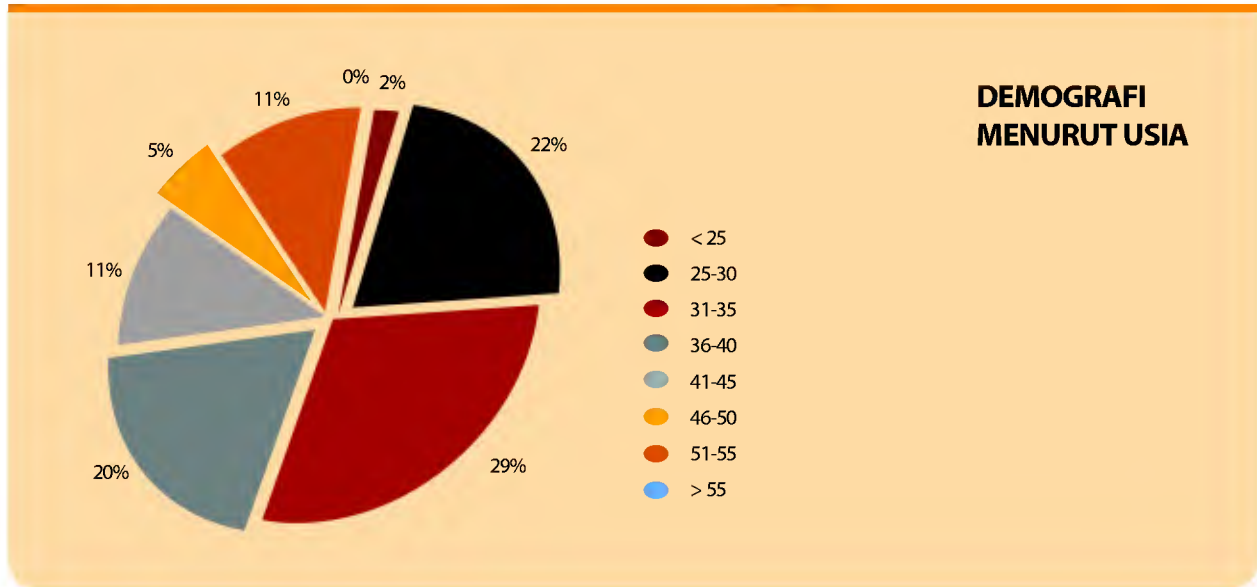
#### WORKFORCE STATISTICS

- Employees
- Contractors

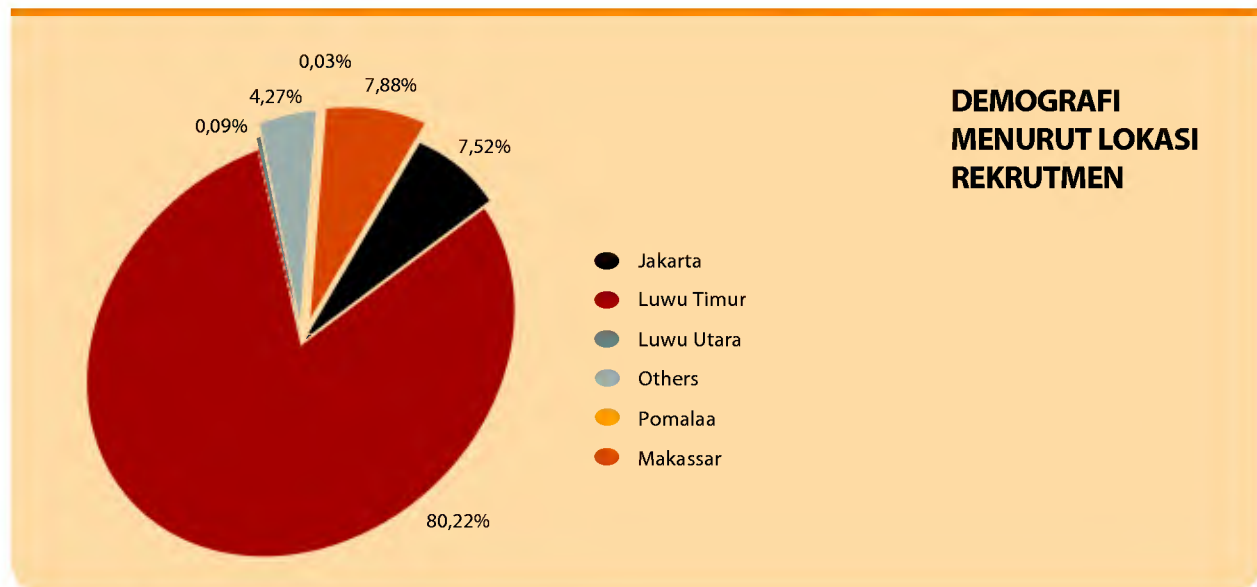


## KERAGAMAN TENAGA KERJA KAMI

Pada tahun 2010, kelompok usia 31 – 35 tahun merupakan kelompok usia karyawan PTI yang terbesar (29%). Keseimbangan yang tepat antara pengalaman dan usia muda telah berkontribusi kepada percepatan transformasi PTI menjadi perusahaan yang dinamis namun handal.



Keragaman tenaga kerja kami juga dicerminkan dalam keragaman latar belakang karyawan. Hal ini memberikan kepada PTI perspektif yang kaya dalam pengambilan keputusan dan penanganan masalah sehari-hari.

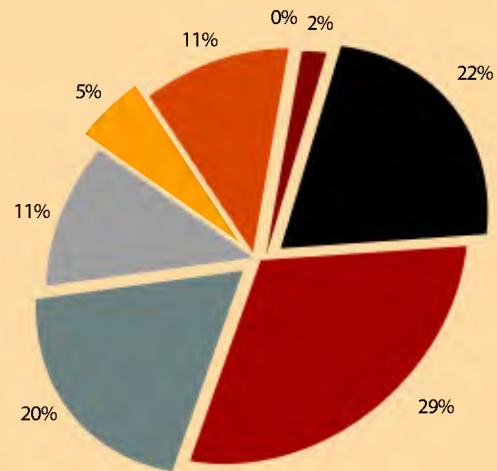


## DIVERSITY IN OUR WORKFORCE

In 2010, the 31 to 35 year age group represented the largest group of PTI employees (29%). The right balance of experience and youth has contributed to the accelerated transformation of PTI into a dynamic yet reliable company.

### DEMOGRAPHICS BY AGE

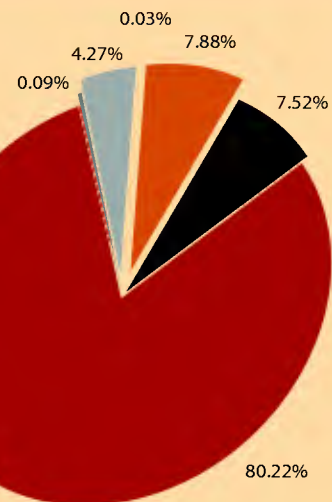
- < 25
- 25-30
- 31-35
- 36-40
- 41-45
- 46-50
- 51-55
- > 55



The diversity of our workforce is also represented by the variety of backgrounds our people come from. It provides PTI with a rich perspective in day-to-day decision-making and problem solving.

### DEMOGRAPHICS BY POINT OF HIRE

- Jakarta
- Luwu Timur
- Luwu Utara
- Others
- Pomalaa
- Makassar







## PRODUKTIVITAS LEBIH BAIK

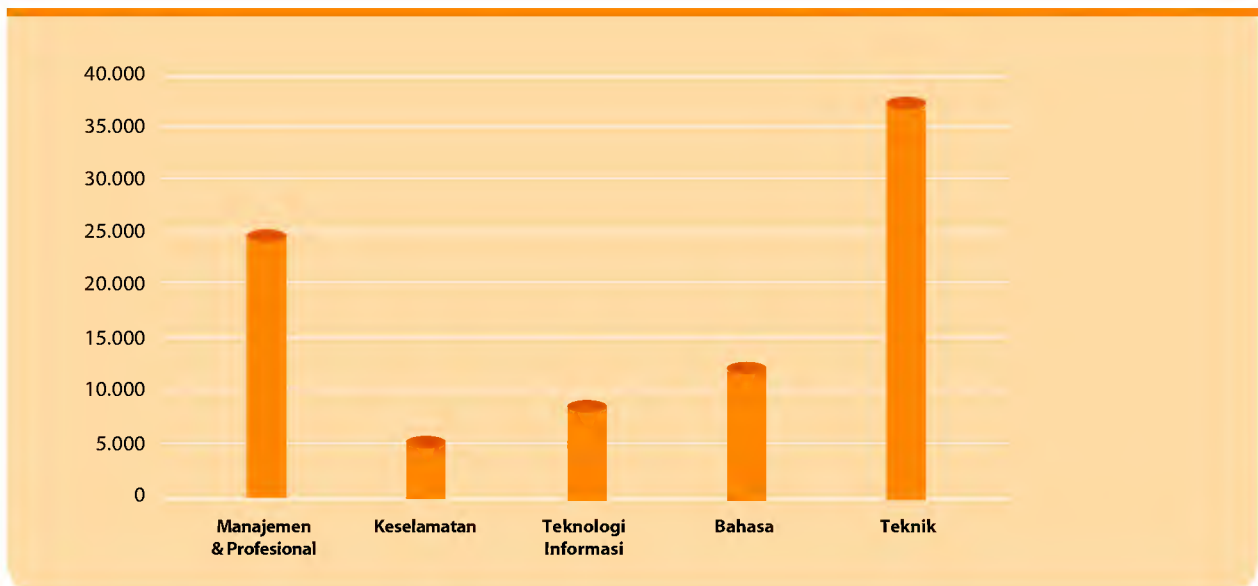
Tingkat produktivitas terus meningkat sejak tahun 2007 melalui perbaikan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja kami.



## PENGEMBANGAN KARYAWAN

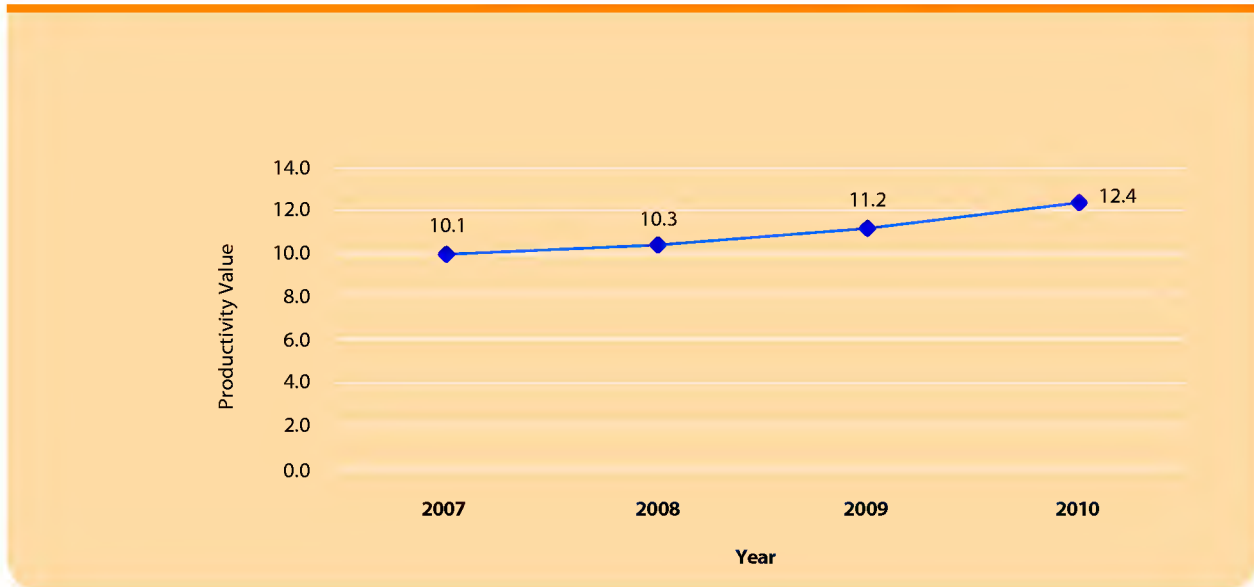
PTI berkomitmen terhadap pengembangan profesional tenaga kerja kami. Pada tahun 2010 kami melanjutkan usaha untuk meningkatkan kapabilitas karyawan melalui berbagai program pengembangan, baik dalam keterampilan maupun kompetensi. Program-program ini mencakup pengembangan manajerial dan profesional, bahasa, teknologi informasi, keselamatan kerja, dan operator dan perdagangan.

Secara keseluruhan, lebih dari 87.000 jam-karyawan didedikasikan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan dan pengembangan – setara dengan 26 jam pelatihan di ruang kelas per karyawan.



## IMPROVED PRODUCTIVITY

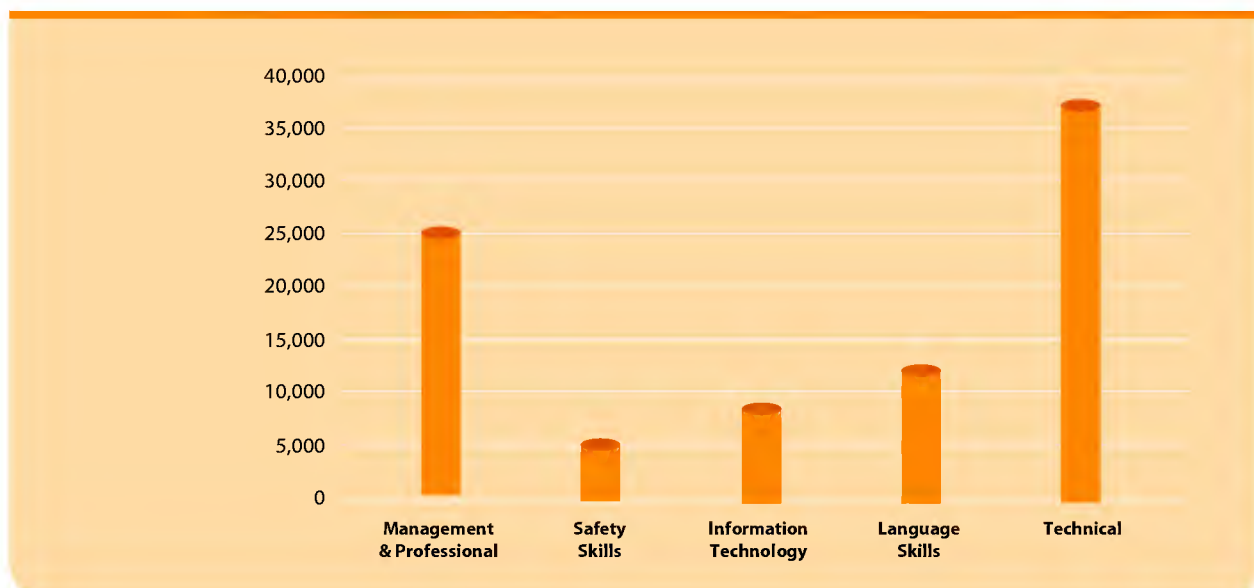
Productivity levels have increased continuously since 2007 through improvement in the skills and competencies of our workforce.



## EMPLOYEE DEVELOPMENT

PTI is committed to the professional development of our workforce. In 2010, we continued our efforts to enhance our employees' capabilities through various development programs, both in hard skills and soft competencies. These programs included managerial and professional development, language, information technology, safety and operator and trades development.

In total, more than 87,000 person-hours were dedicated to training and development activities – the equivalent of 26 hours of classroom training per employee.



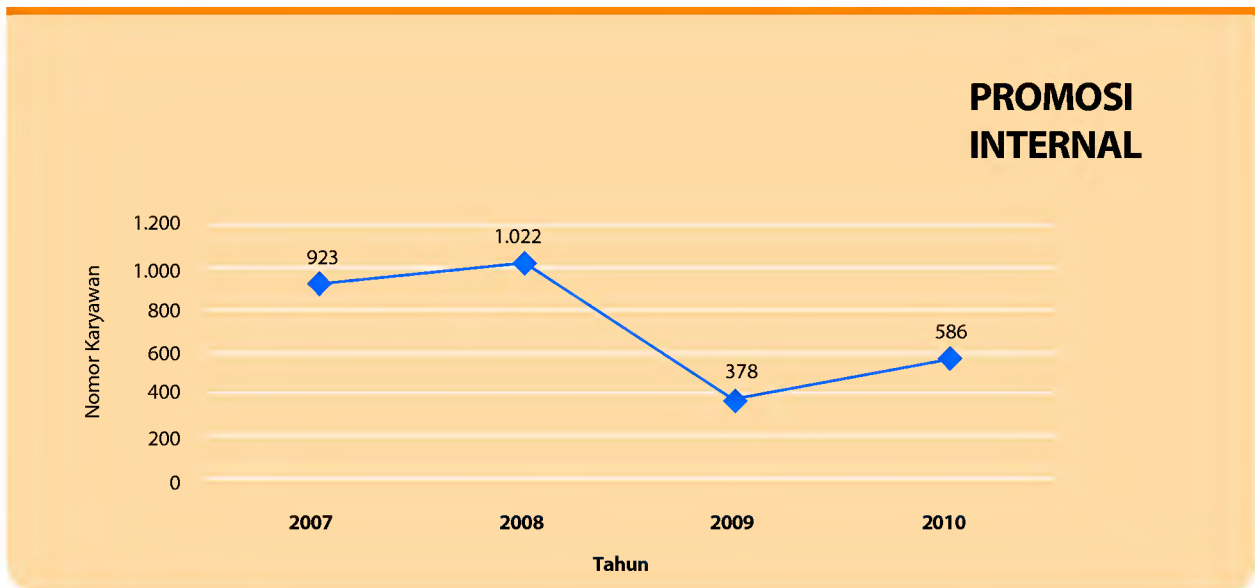
Program-program pelatihan kami selaras dengan standar kualifikasi profesional dan teknikal yang diakui dalam industri. Kualifikasi-kualifikasi untuk bidang teknik dan perdagangan ini konsisten dengan tolok ukur nasional, seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau internasional yang ada, seperti kerangka kerja kualifikasi Australia. Sejumlah ahli geologi, tambang dan teknik perawatan mencapai tingkat kelulusan 100% dalam penilaian yang diadakan oleh badan sertifikasi profesional Lembaga Sertifikasi Profesi Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (LSP Perhapi). Relasi PTI dengan Perhapi akan berlanjut pada tahun 2011 dan seterusnya karena kami menjadi pusat evaluasi terdaftar untuk kualifikasi profesional pertambangan dan geologi.

## PROGRAM KERJA SAMA

Berkaitan dengan inisiatif tanggung jawab sosial kami, PTI memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa melalui program kerja-sama. Pada tahun 2010, 26 mahasiswa dari universitas nasional dan daerah berpartisipasi dalam program magang intensif selama enam bulan dalam berbagai departemen di PTI. Sejak dimulai tujuh tahun yang lalu, program ini terbukti efektif mempersiapkan mahasiswa memasuki karir profesional mereka.

## RENCANA SUKSESI

Rencana suksesi sangat penting bagi kesinambungan dan pertumbuhan jangka panjang PTI. Pada tahun 2010, PTI melaksanakan sistem perencanaan suksesi baru yang mencakup semua posisi staf senior ke atas. Hasilnya adalah peta potensi di dalam PTI yang akan menjadi dasar bagi pengembangan, penempatan dan promosi karyawan.





Our training programs align with industry-recognized professional and technical qualification standards. These include qualifications for engineers and trades that are consistent with available national, such as *Badan Nasional Sertifikasi Profesi* (BNSP, National Board of Professional Certification) or international standards, such as the Australian qualification framework. A number of PTI geologists, mining and maintenance engineers achieved a rate of 100% pass in their assessment by the professional certifying body *Lembaga Sertifikasi Profesi Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (LSP Perhapi)*. The relationship between PTI and Perhapi will continue in 2011 and beyond as we become a registered assessment centre for mining and geological professional qualifications.

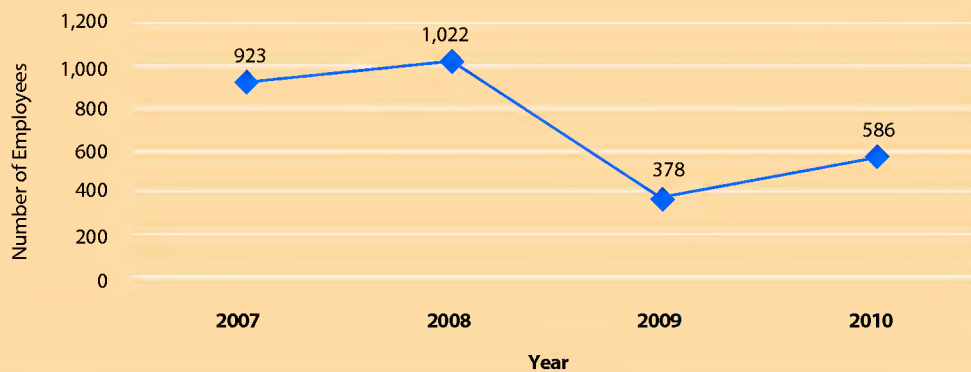
## CO-OP PROGRAMS

In conjunction with our social responsibility initiatives, PTI offers internships to university students through our co-op programs. In 2010, 26 co-op students from local and national universities participated in intensive, six-month programs in various PTI departments. Since its inception seven years ago, the co-op program has proved to be very effective in preparing students for their professional careers.

## SUCCESSION PLANNING

Succession planning is vital to PTI's long-term sustainability and growth. In 2010, PTI implemented a new succession planning system that includes all senior staff positions and higher. The result is a map of talents within PTI that will serve as the basis for employee development, placement and promotion.

## INTERNAL PROMOTION



## SCORECARD KINERJA KARYAWAN

Manajemen kinerja adalah faktor penting dalam mengelola tenaga kerja produktif dan mendorong kinerja keseluruhan PTI. Pada tahun 2009, PTI bergabung dalam inisiatif Vale mengimplementasikan *Scorecard* Kinerja Karyawan, yang dirancang untuk memotivasi dan memberikan penghargaan kepada karyawan menurut kinerja kerja mereka. Pada tahun 2010, 972 karyawan tingkat staf sampai manajemen senior dinilai dengan sistem ini. Kami akan terus menggunakan *Scorecard* Kinerja Karyawan pada tahun 2011 dan meningkatkan jumlah karyawan yang dinilai dengan alat ini. Pada akhirnya, semua karyawan PTI akan dievaluasi menggunakan *scorecard*, memastikan seluruh organisasi berfokus pada tujuan-tujuan strategis yang didefinisikan secara jelas.

## PENDIDIKAN TEKNIS

Untuk mendukung pengembangan tenaga kerja lokal Indonesia dan membangun sumber tenaga kerja lokal yang kuat untuk mendukung operasi kami, PTI telah mendirikan sejumlah sekolah teknik di negara ini.

Salah satunya adalah ATS (Akademi Teknik Sorowako). ATS didirikan pada tahun 1991 dan diakui secara formal sebagai institusi pendidikan tinggi non-pemerintah oleh Direktorat Pendidikan Nasional (DIKTI) pada tahun 1993.

Sejak tahun 1991, ATS telah menghasilkan lebih dari 500 lulusan dan teknisi. Mereka menjadi inti sumber daya lokal bagi PTI dan para kontraktor. ATS meraih sertifikasi ISO 9001:2000 yang diterbitkan oleh TÜV International pada tahun 2010.

Program Pelatihan Industri (PPI) PTI melalui program satu dan dua tahun telah menghasilkan lebih dari 500 operator peralatan berat dan mekanik pemula bagi industri di Indonesia. Pada tahun 2010, PPI menghasilkan 129 lulusan yang sebagian besar sekarang bekerja di PTI atau perusahaan pertambangan lainnya.

## HUBUNGAN INDUSTRI

PTI dan serikat pekerja, FSP-KEP, mencapai kesepakatan untuk perjanjian kerja bersama (CLA) yang baru pada Januari 2011. Negosiasi berlangsung sangat ko-operatif dan kesepakatan yang saling menguntungkan telah dicapai dan akan memastikan kondisi kerja yang lebih baik bagi karyawan dan daya saing jangka panjang PTI.

## EMPLOYEE PERFORMANCE SCORECARD

Performance management is a key factor in managing a productive workforce and driving PTI's overall performance. In 2009, PTI joined Vale's initiative and implemented the Employee Performance Scorecard, designed to motivate and reward employees according to their work performance. In 2010, 972 employees, representing all staff up to senior management were measured using the new system. We will continue to use the Employee Performance Scorecard in 2011 and increase the number of employees assessed with this tool. Ultimately, all PTI employees will be evaluated using this scorecard, ensuring the entire organization is focused on clearly defined strategic objectives.

## TECHNICAL EDUCATION

To support the development of Indonesia's local workforce and to build a strong local labour pool to support our operations, PTI has established a number of technical schools across the country.

One of these schools is ATS (Akademi Teknik Sorowako – Sorowako Technical Academy). ATS was founded in 1991 and was formally accepted as a non-governmental higher education institution under the National Education Government Directorate (DIKTI) in 1993.

Since 1991, ATS has produced more than 500 trades people and technicians. For PTI and local contractors, they have been a core resource of local talent. ATS achieved ISO 9001:2000 certification by TÜV International in 2010.

PTI's Industrial Training Program (PPI), through its one- and two-year programs, has supplied more than 500 heavy equipment operators and entry-level mechanics to Indonesian industry. In 2010, PPI produced 129 graduates, most of who are now working at PTI or other mining companies.

## INDUSTRIAL RELATIONS

PTI and the labour union, FSP-KEP, reached an agreement on a new collective labour agreement (CLA) in January 2011. The negotiations were extremely co-operative and a mutually beneficial agreement was reached that will ensure better working conditions for employees and PTI's long-term competitiveness.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

# CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Hasan Basri kordinator usaha kertas daur ulang menghasilkan amplop untuk kebutuhan PT Inco dan beragam kerajinan lainnya berupa binatang-binatang.

Hasan Basri, coordinator of recycled paper, runs a recycled paper venture that produces envelopes to fulfill PTI's administrative requirements as well as handcrafts animal artistry.

## KOMITMEN KAMI TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL

# OUR COMMITMENT TO SOCIAL RESPONSIBILITY

PTI berkomitmen untuk melindungi lingkungan hidup kami dan meningkatkan taraf hidup masyarakat tempat kami tinggal dan bekerja. Komponen integral dari visi Vale menjadi perusahaan tambang terbaik dan terbesar di dunia mencakup komitmen yang teguh terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup. Di PTI, kami bangga atas pekerjaan yang kami lakukan dan merencanakan apa yang dapat kami capai di masa depan.

### KOMITMEN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

PTI berkomitmen melaksanakan praktik-praktik terbaik internasional dalam manajemen lingkungan hidup untuk melindungi lingkungan hidup kami dari potensi dampak dan risiko operasi. Kami mengembangkan budaya perusahaan yang mewajibkan setiap karyawan terlibat dan berkomitmen terhadap kesempurnaan kinerja lingkungan hidup. Kami terus berinvestasi untuk memperbaiki inisiatif-inisiatif rehabilitasi tanah progresif, pengendalian mutu limbah, pengendalian polusi udara dan pengelolaan sampah.

Pada tahun 2010, PTI melakukan beberapa proyek kajian lingkungan hidup yang melibatkan partisipasi konsultan-konsultan nasional dan internasional. Hasil-hasil kajian ini akan menjadi data dasar lingkungan hidup dan rujukan bagi program pengembangan dan perbaikan lingkungan hidup yang berkesinambungan.

Selanjutnya, kami memulai implementasi Sistem Manajemen Lingkungan Hidup Vale (EMS) berdasarkan persyaratan ISO 14001. EMS akan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk memastikan kepatuhan terhadap Kebijakan Vale untuk Tujuan-Tujuan Pengembangan dan Lingkungan Hidup yang Berkesinambungan.

Pada bulan September 2010, PTI menerima Penghargaan Aditama (Emas) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai salah satu perusahaan pertambangan terbaik dalam pengelolaan dan kepatuhan lingkungan hidup. Pada bulan Desember 2010, PTI menerima peringkat Biru dari Menteri Negara Kehutanan untuk program penilaian kepatuhan lingkungan hidup PROPER.

PTI is committed to protecting our environment and enhancing the communities in which we live and work. An integral component of our strategy includes an unwavering commitment to environmental and social responsibility. At PTI, we are proud of the work we have done and look ahead to what we may accomplish in the future.

## OUR COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT

PTI is committed to international best practices in environmental management to protect our environment from potential operational impacts and risks. We work towards the development of a corporate culture in which every employee is involved and committed to excellence in environmental performance. We continue to invest in the improvement of progressive land rehabilitation, discharged effluent quality control, air pollution control and waste management initiatives.

In 2010, PTI conducted several environmental study projects that included the participation of national and international consultants. The results of the studies will provide environmental baseline data and references for ongoing environmental program development and improvement.

Further, we began the implementation of Vale's Environmental Management System (EMS), based on the requirements of ISO 14001. The EMS will be used as a reference and provide guidelines to ensure compliance with Vale's Sustainable Development Policy.

In September 2010, PTI received the Aditama (Gold) Award from the Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) as one of the best mining companies in environmental management and compliances. In December 2010, PTI received the Blue Rating from the State Ministry of Environment (KLH) for its PROPER program environmental compliance assessment.

**Simulasi penyelamatan yang dilakukan oleh Fire and Rescue PTI.**

Simulation of a safety evacuation process carried out by the PTI's Fire and Rescue team.







## PROGRAM PENGURANGAN SULFUR DIOKSIDA

PTI melanjutkan pengembangan program pengurangan Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>) sebagai proyek lingkungan hidup utama untuk mendukung kesinambungan bisnis Perseroan.

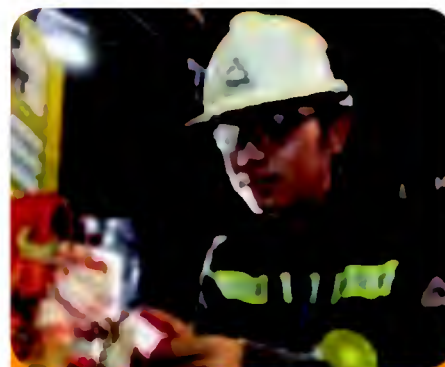
Pencapaian program ini pada tahun 2010 mencakup:

- Penyelesaian proyek besar pemantauan mutu emisi SO<sub>2</sub> dan udara
- Penyelesaian draft studi kelayakan awal SO<sub>2</sub> scrubbing
- Keberhasilan dalam tahap uji proyek efisiensi sulfur
- Pekerjaan awal oleh konsultan independen yang akan mengkaji berbagai opsi pengurangan SO<sub>2</sub>

Sesuai dengan persyaratan AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan), PTI telah menyelesaikan studi kelayakan awal atas proyek SO<sub>2</sub> scrubbing. Kami berhasil melakukan beberapa uji coba proyek efisiensi sulfur dalam pabrik. Proyek ini bertujuan mengubah titik injeksi sulfur dalam pabrik pengolahan untuk mencapai efisiensi sulfur yang lebih baik dan mengurangi emisi SO<sub>2</sub>.

Uji coba awal telah menunjukkan adanya potensi perbaikan efisiensi sulfur, dan uji coba lebih lanjut direncanakan pada tahun 2011. Jika berhasil, cara ini akan dilanjutkan dengan instalasi proto-tipe sistem penambahan sulfur pada tahun 2012 dan awal dari reduksi permanen emisi SO<sub>2</sub>.

Di masa depan kami akan terus melakukan investasi untuk mendapatkan teknologi yang tepat bagi program pengurangan emisi SO<sub>2</sub> kami sebagai bagian dari kepatuhan PTI terhadap standar emisi udara.



**Papan Pengendali Permit (*Permit Control Board*) merupakan kunci keselamatan dalam menjalankan kegiatan di pabrik pengolahan Perseroan.**

**The Permit Control Board is key to the safe operation at PTI's processing plant.**

## SULPHUR DIOXIDE ABATEMENT PROGRAM

PTI continued development of our sulphur dioxide (SO<sub>2</sub>) reduction program as a major environmental project to support the sustainability of our business.

The key achievements of the program for 2010 include:

- Completion of a major SO<sub>2</sub> emission and air quality-monitoring project
- Completion of the draft SO<sub>2</sub> scrubbing preliminary feasibility study
- Successful test work on sulphur efficiency projects
- Commencement of work by an independent consultant to review various SO<sub>2</sub> abatement options

In accordance with the requirements of the AMDAL (Environmental Impact Assessment) document, PTI has completed a preliminary feasibility study on SO<sub>2</sub> scrubbing. We successfully conducted several in-plant trials on sulphur efficiency projects. These projects aim to change the point of injection of sulphur in the process plant, and thus achieve greater efficiency of sulphur, reducing SO<sub>2</sub> emissions.

Early tests have demonstrated a potential improvement in sulphur efficiency, and further tests are planned for 2011. If successful, the approach will lead to installation of a prototype sulphur addition system in 2012 and further permanent reductions in SO<sub>2</sub> emissions.

Looking ahead, we will continue to invest in the appropriate technology for our SO<sub>2</sub> emissions reduction program as a part of PTI's compliance with air emission standards.

## IKHTISAR LINGKUNGAN HIDUP, KESEHATAN DAN KESELAMATAN

# ENVIRONMENTAL, HEALTH AND SAFETY HIGHLIGHTS

Pada tahun 2010, PTI mencapai tonggak berikut dalam kesehatan dan keamanan lingkungan hidup:

- Lebih dari 11.000.000 jam kerja tanpa *Lost Time Injury* (LTI) – prestasi tertinggi kami
- 92,66% tingkat kepatuhan dalam audit Standar Bahaya Utama (MHS) yang dilakukan oleh auditor eksternal
- Implementasi proyek perintisan Sistem Manajemen Lingkungan Hidup (EMS) ISO 14001 sesuai standar Vale
- Mendukung latihan gawat darurat Rumah Sakit sebagai bagian dari rencana kesiapan gawat darurat RS
- Partisipasi dalam *Indonesia Fire and Rescue* sebagai Penilai
- Partisipasi sebagai anggota Tim Pemulihan Bencana Nasional di Mentawai
- Peningkatan peringkat kinerja lingkungan hidup

Fasilitas pembibitan PTI.

PTI nursery facility.



In 2010, PTI achieved these environmental health and safety milestones:

- Attained over 11,000,000 working hours without Lost Time Injury (LTI) – our highest ever achievement
- Achieved 92.66% compliance score for Major Hazard Standards (MHS) audit conducted by external auditor
- Implemented pilot project for EMS following ISO 14001 as the Vale standard
- Supported hospital emergency drill as part of the hospital emergency preparedness plan
- Participated with Indonesia Fire and Rescue as an Event Assessor
- Participated as a member of the National Disaster Recovery Team at Mentawai
- Improved environmental performance assessment rating



## PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

# COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMS

### KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT KAMI

PTI bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat daerah dalam wilayah operasinya di propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Sasaran kami adalah memperkuat kemitraan antara PTI, karyawan kami, pemerintah daerah dan masyarakat.

#### Program Pengembangan Masyarakat

PTI telah menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial melalui program Pengembangan Masyarakat yang sistematis dan terpadu. Tujuan kami adalah memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat, termasuk menyediakan dasar ekonomi yang berkesinambungan yang dapat menjadi pengganti setelah kegiatan-kegiatan pertambangan PTI berakhir.

Program Pengembangan Masyarakat kami difokuskan pada beberapa sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, kewargaan dan masyarakat, seni dan budaya, dan olah-raga dan atletik. Dalam menentukan komponen program, PTI bekerjasama dengan pemerintah daerah dan konsultan melalui evaluasi kebutuhan dan merancang setiap program menurut kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.

Program Pengembangan Masyarakat kami dirancang berdasarkan masukan dari berbagai lapisan masyarakat lokal pada tingkat desa. Program mencakup periode lima tahun dan dirumuskan dan disepakati bersama paguyuban warga desa. Prioritas program dapat berubah melalui kajian tahunan, sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Rencana program lima tahun dipadukan dengan rencana pembangunan pemerintah daerah untuk memastikan sinergi dan meniadakan duplikasi. Keterlibatan konstruktif PTI dengan pemangku kepentingan mencerminkan komitmen kami sebagai warga-negara perusahaan yang baik untuk menciptakan dampak positif dalam wilayah lokasi operasi kami.

PTI memastikan program-program yang dilaksanakan berjalan efektif. Seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi setiap program. Proses ini dilaksanakan melalui rapat, diskusi dan koordinasi dengan pihak-pihak relevan.

Untuk melaksanakan program secara efektif, kami menggunakan Analisa Proyek Vektorial (VPA), suatu alat evaluasi yang dibuat oleh Unit Manajemen Proyek (PMU) dari Program Khusus Keamanan Pangan – Organisasi Pertanian dan Pangan (SPPFS-FAO) Indonesia pada tahun 2007. Dengan metode VPA kami dapat melihat dan memahami tingkat keberhasilan dan potensi untuk melanjutkan setiap program. Selain itu, kecenderungan kesinambungan dapat ditentukan jika evaluasi dilakukan dengan mengukur pola pikir setiap calon penerus program secara kualitatif. Perubahan-perubahan yang disebabkan oleh program-program



**Pemasangan jaring pada tebing untuk menunjang penghijauan.**

**Nets are installed on the hill side to support the revegetation process.**

## OUR COMMITMENT TO OUR COMMUNITIES

PTI is responsible for the welfare of the local communities in its operation areas in the provinces of South Sulawesi, Central Sulawesi and Southeast Sulawesi. Our goal is to strengthen the partnership between PTI, our employees, local government and communities.

### Community Development Programs

PTI has shown our commitment to social responsibility through our Community Development program in a systematic and integrated manner. Our objective is to improve the standard of living and welfare of local communities, including providing a sustainable economic base that can replace activities after PTI's mining activities have ceased.

Our Community Development program focuses on several sectors, including education, health, civic and community, arts and culture and sports and athletics. In determining the components of the program, PTI works with local government and consultants through a participatory needs assessment and designs each program according to the needs and potential of the local community.

Our Community Development programs are designed with input from a wide range of local communities at the village level. The programs cover a five-year time period formulated and agreed by village assembly. Program priority may change during yearly reviews, according to the changing needs of the community. The five-year plans are integrated with the local government's development plan ensure synergy and eliminate program duplication. PTI's constructive engagement with our stakeholders is a reflection of our commitment as a good corporate citizen to creating a positive impact in the areas where we operate.

PTI ensures the programs we implement are working effectively. All stakeholders are involved in monitoring and evaluating every program. The process is conducted through meetings, discussions and coordination with relevant parties.

In order to implement our programs effectively, we adopt Vectorial Project Analysis (VPA), an evaluation tool that was developed by the Project Management Unit (PMU) of Special Program for Food Security – Food and Agriculture Organization (SPPFS-FAO) Indonesia in 2007. Using the VPA method, we are able to see and understand the level of success and the potential to continue each program. In addition, the sustainability trend may be determined when the evaluation is conducted by measuring the mindset of the program beneficiaries in a qualitative manner. By measuring the livelihood and mindset, changes caused by the



**Reklamasi lingkungan di area pascatambang.**

**Environmental reclamation in post-mining areas.**

pengembangan masyarakat dapat dievaluasi melalui pengukuran pola pikir dan mata pencaharian. Hasil-hasil kami dapat dianalisa untuk memperbaiki kelemahan yang ada saat ini.

### Laporan Kesinambungan tahun 2009

Pada tahun 2010, PTI mempublikasikan Laporan Kesinambungan yang pertama, yang mencakup data dan informasi terkait dengan program-program dan aktivitas-aktivitas kesinambungan dan inisiatif-inisiatif pembangunan berkesinambungan yang dilakukan sepanjang tahun 2009. Data diperoleh dari unit-unit bisnis PTI dan menyajikan informasi relevan, penting dan berpengaruh bagi pengambilan keputusan dalam usaha-usaha kesinambungan, khususnya yang berkaitan dengan kinerja, dan berdampak terhadap aspek-aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial.

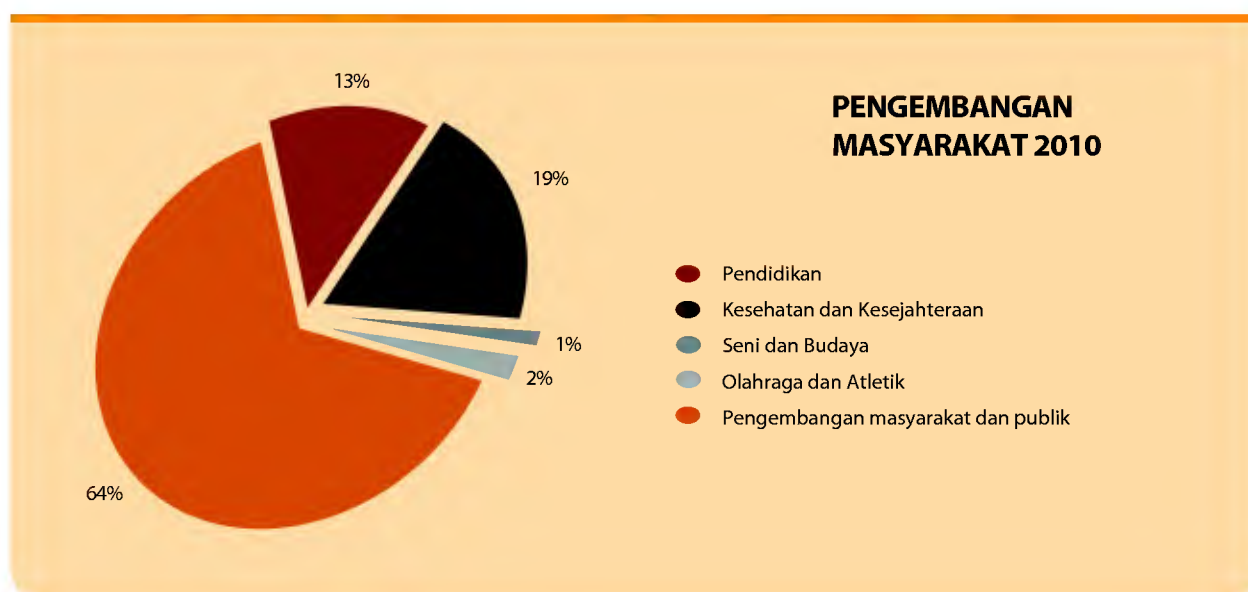
### Belanja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

2008	2009	2010
AS\$5.000.000	AS\$7.200.000	AS\$6.400.000

Total belanja tahun 2010 sebesar AS\$6.400.000.

Dana tersebut dialokasikan untuk proyek-proyek berikut:

Pendidikan	AS\$ 820.000
Kesehatan dan kesejahteraan	AS\$ 1.250.000
Seni dan budaya	AS\$ 94.000
Sport dan atletik	AS\$ 112.000
Kemasyarakatan	AS\$ 4.124.000





Community Development programs can be evaluated. Analysis of our results can be carried out to improve the existing weaknesses.

### 2009 Sustainability Report

In 2010, we published our first Sustainability Report, which covers data and information related to activities and sustainability programs and/or sustainable development that were conducted during 2009. The data was collected from PTI business units and presents relevant, important and influential information for decision-making in sustainability efforts, particularly in relation to the performance and impacts economic, environmental and social aspects.

### Corporate Social Responsibility expenditures

2008	2009	2010
US\$5,000,000	US\$7,200,000	US\$6,400,000

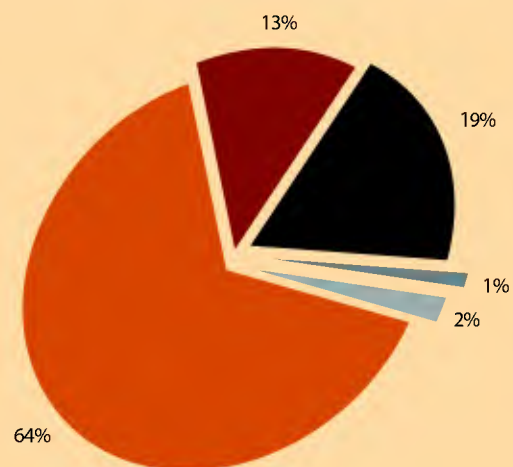
Total expenditures for 2010 totaled US\$6,400,000.

The funds were allocated to projects as follows:

Education	US\$ 820,000
Health and welfare	US\$ 1,250,000
Arts and culture	US\$ 94,000
Sports and athletics	US\$ 112,000
Civic and community development	US\$ 4,124,000

### COMMUNITY DEVELOPMENT 2010

- Education
- Health and welfare
- Arts and Culture
- Sports and athletics
- Civic and community development



**Buah endemik khas Sulawesi Dengen (Dillenia Serrata) diolah menjadi sirup oleh Victor Kasiban untuk dipasarkan secara umum, yang didukung oleh PTI.**

**Fruit from Sulawesi called 'Dengen' (Dillenia Serrata) is processed into a syrup product by Victor Kasiban, for sale to the market, supported by PTI.**

**Usaha makanan ringan (banana chips) yang dibuat dari bahan pisang dengan merek Sari Raos dikelola Bertin Butu Allo yang dipasarkan sampai ke Makassar merupakan binaan PTI.**

**Banana chips marketed under the 'Sari Raos' brand, managed by Bertin Butu Allo, are sold to Makassar fostered by PTI.**





## Pendidikan

Untuk mendukung inisiatif-inisiatif pendidikan, pada tahun 2010 PTI mengalokasikan AS\$820.000 untuk program-program pengembangan masyarakat yang berfokus pada pendidikan, termasuk dana untuk beasiswa, bantuan fasilitas sekolah, perpustakaan, dan berbagai acara dan sponsor pendidikan.

Melanjutkan karya kami pada tahun-tahun sebelumnya, PTI menyediakan bantuan pendidikan bagi anak-anak karyawan dan masyarakat setempat. Pada tahun 2010, PTI membantu 40 keluarga melalui pemberian bea-siswa tingkat SLTA dan universitas. Kami juga memberikan bea-siswa tingkat SD sampai universitas pada anak-anak masyarakat di Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara. Beasiswa-beasiswa ini mengakui prestasi akademis dan non-akademis dari anak-anak keluarga tak mampu. Lebih dari AS\$195.000 didistribusikan kepada lebih dari 600 pelajar.

PTI juga mengambil bagian dalam usaha-usaha memperbaiki kualitas dan kompetensi guru-guru di wilayah terpencil, khususnya di Kabupaten Luwu Timur, melalui Program Magang Guru. Pada tahun 2010, 61 guru berpartisipasi dalam program ini, yang dilaksanakan di kecamatan-kecamatan Nuha, Wasuponda, Towuti dan Malili. PTI menyediakan bantuan keuangan bagi para guru ini yang mencapai jumlah AS\$43.000. Selain itu, PTI mengadakan kelas-kelas khusus untuk meningkatkan kualifikasi profesional guru. Program ini diadakan bekerja sama dengan Universitas Negeri Makassar (UNM). Pada tahun 2010, 27 guru berpartisipasi dalam program ini dan PTI menginvestasikan dana sebesar AS\$38.000.

Sejak tahun 2004, PTI bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat (INSTYD), suatu organisasi lokal non-pemerintah yang berfokus pada pendidikan, dan didukung oleh pemerintah Luwu Timur menyediakan bantuan bimbingan belajar bagi pelajar SLTA yang mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi di Indonesia. Lebih dari 330 pelajar telah dibantu dan diterima di berbagai universitas. Investasi tahunan untuk program ini berjumlah AS\$10.000.

Sebagai bagian dari usaha kami membangun sumber daya manusia daerah dan menyediakan kesempatan bagi para lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja nyata, PTI menawarkan program magang bagi sarjana dan lulusan program diploma. Kami juga memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan kerja praktik dan riset bagi skripsi mereka. Pada tahun 2010, investasi untuk program ini lebih dari AS\$110.000.

PTI juga mendukung pemerintah daerah di seluruh empat kecamatan dalam wilayah masyarakat kami dalam perbaikan kualitas sekolah-sekolah. Kami membantu dalam pelatihan guru, peningkatan fasilitas dan materi pendidikan termasuk buku, peralatan laboratorium, dan meneruskan proyek pembangunan dan penyediaan buku bagi perpustakaan umum / rumah baca. Pada tahun 2010 kami mengalokasikan AS\$47.000 untuk perpustakaan umum. Kami juga menyediakan dua bis sekolah untuk kecamatan Wasuponda dan Malili, yang merupakan sumbangsih sebesar AS\$66.000.

Satu di antara kepedulian utama PTI adalah memperbaiki kapasitas pemuda daerah. Kami mendukung organisasi-organisasi pemuda setempat dengan menyediakan kesempatan-kesempatan pelatihan. Kami mengalokasikan AS\$63.000 untuk program ini pada tahun 2010.



**PTI aktif mendukung kegiatan pendidikan.**

**PTI actively supports education initiatives.**

### Education

To support our education initiatives, in 2010 PTI allocated US\$820,000 for education focused community development programs, including funds for scholarships, support for school facilities, libraries and various educational events and sponsorships.

Continuing our work from previous years, PTI provided educational assistance for our employees' children within the local communities. In 2010, PTI assisted 40 families with scholarships at the high school and university level. We also provided scholarships for community members from primary school through university in South, Central and Southeast Sulawesi. These scholarships recognize the both academic and non-academic achievements of children from disadvantaged families. More than US\$195,000 was distributed to over 600 students.

PTI also take part in efforts to improve the quality and competence of local teachers in remote areas, especially in the East Luwu Regency, through the Teacher Internship Program. In 2010, 61 teachers participated in this program, conducted in the Nuha, Wasuponda, Towuti and Malili sub-districts. PTI provided financial assistance for these teachers totaling US\$43,000. In addition, PTI conducts special classes for teachers to upgrade their professional qualifications. This program is offered in cooperation with the State University of Makassar (UNM). In 2010, 27 teachers took part in this program, and PTI invested US\$38,000.

Since 2004, PTI worked with the Institute of Community Development (INSTYD), a local non-governmental organization focused on education, and the East Luwu government to conduct a program to provide tutoring assistance to high school students as they prepare for admission entrance tests for universities in Indonesia. More than 330 students have been assisted and admitted to universities. The total annual investment in this program was US\$10,000.

As part of our efforts to develop local human resources and provide recent graduates the opportunity to gain real-life workplace experience, PTI offers an internship program for university and diploma graduates. We also allowed university students the opportunity to conduct practical work and research for their final paper. In 2010, the investment made in these programs was US\$110,000.

PTI also supports local governments in all four sub-districts in our community area in improving the quality of their schools. We assist with teacher training, facilities improvements and materials including books, laboratory equipment and teaching aids. In 2010, we contributed US\$135,000. We continued a project to build and provide books for public libraries/rumah baca. This year we allocated US\$47,000 for the public libraries. We also provided two school busses for the Wasuponda and Malili sub-districts, a US\$66,000 contribution.

One of PTI's major concerns is improving the capacity of local youth. We support local youth organizations by providing training opportunities. We allocated US\$63,000 for this program in 2010.

We also channel assistance in the education sector through our education foundation – the Yayasan Pendidikan Sorowako (YPS) with annual funding in the amount of US\$90,000.



Kami juga menyalurkan bantuan dalam sektor pendidikan melalui yayasan pendidikan kami (Yayasan Pendidikan Sorowako) dengan pendanaan tahunan sejumlah AS\$90.000.

PTI juga mendukung berbagai program dan acara yang diadakan dengan sasaran untuk meningkatkan pendidikan bagi masyarakat. Pada tahun 2010 kami memberikan total sebesar AS\$23.000 untuk mensponsori berbagai acara dan program kerja-sama.

### Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat adalah komponen penting dalam program pengembangan masyarakat PTI. Selain program-program kuratif, kami juga mempromosikan program-program preventif, termasuk pendidikan kesehatan untuk umum, pelatihan staf medis, kesehatan ibu dan anak, dan menyediakan dukungan bagi inisiatif dan kampanye kesehatan oleh pemerintah daerah. Kami menginvestasikan lebih dari AS\$1.250.000 untuk program-program kesehatan pada tahun 2010.

Pada awal tahun, bekerja sama dengan EMPATI, organisasi nir-laba lokal, kami melaksanakan inisiatif Pemetaan Kesehatan untuk suku-suku Pasitabe (Padoe, Karunsife dan Tambe'e) di kecamatan Wasuponda. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas anggota masyarakat tidak memiliki akses untuk memperoleh air bersih atau sanitasi yang layak, dan banyak yang menderita masalah kesehatan serius, termasuk mal-nutrisi.



**Alfrida Podandi adalah anggota kelompok usaha bersama yang menjalankan usaha peternakan telur ayam.**

**Alfrida Podandi is a member of a small joint venture group operating a poultry egg farm.**

**Erna Kristina Buria dengan usaha ayam ternaknya di Wasuponda.**

**Erna Kristina Buria at her poultry farm in Wasuponda.**

**Janiah Sulapi dengan telur bebek hasil peternakannya.**

**Janiah Sulapi is showing duck eggs from her poultry breeder farm.**



PTI also supports various programs and events that are centred towards the improvement of education in the community. In 2010, we provided sponsorship for events, and cooperative programs totaling US\$23,000.

### Health

Improving the quality of public health is an important component of PTI's community development program. Besides curative programs, we also promote preventive health programs, including public education on health, medical staff training, mother and child health and provide support for local government health initiatives and campaigns. We invested more than US\$1,250,000 for health programs in 2010.



At the beginning of the year, in cooperation with EMPATI, a local non-profit organization, we conducted a participatory Health Mapping initiative for the Pasitabe (Padoe, Karunsi'e and Tambe'e) ethnic group in the Wasuponda sub-district. Results showed that the majority of community members did not have access to clean water or adequate sanitation and many had serious health problems, including malnutrition.

Based on the mapping results, we developed several programs to help improve the overall welfare of the community. We conducted a pilot project on Community Led Total Sanitation, designed by UNICEF, that will help the community improve their quality of life by improving daily health management. These efforts represent



Berdasarkan hasil pemetaan, kami mengembangkan beberapa program untuk meningkatkan keseluruhan kesejahteraan masyarakat. Kami melakukan proyek perintisan Sanitasi Total yang Dipimpin Masyarakat, dirancang oleh UNICEF, yang akan menolong masyarakat meningkatkan kualitas hidup melalui perbaikan manajemen kesehatan harian. Program ini mencerminkan sumbangsih sejumlah AS\$27.500 dan akan berlanjut sepanjang tahun 2011, bersama dengan program-program kesehatan lainnya.

Rumah Sakit (RS) PTI di Sorowako menyediakan layanan dan bantuan kesehatan bermutu tinggi bagi masyarakat, khususnya yang tidak mampu. Pada tahun 2010, RS kami menerima lebih dari 3.300 kunjungan dari masyarakat seluruh Kabupaten Luwu Timur dan sekitarnya. PTI menginvestasikan AS\$850.000 untuk RS ini pada tahun 2010.

Kami juga membantu pembangunan sayap operasional tambahan untuk RS Sayang Rakyat di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari komitmen kami untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat. PTI menyumbangkan AS\$300.000 untuk proyek ini.

#### **Seni dan Budaya**

PTI menyediakan AS\$46.000 untuk mendukung program-program pengembangan masyarakat dalam bidang seni, dengan sasaran untuk melestarikan budaya daerah seperti permainan dan kesenian tradisional, pertunjukan musik dan tarian, dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok seni dan budaya daerah.

Kami juga menyumbangkan AS\$48.000 untuk mendukung berbagai program dan kelompok yang mewakili budaya wilayah operasi PTI. Ini termasuk dukungan bagi Forum Komunikasi Umat Beragama yang menciptakan program-program untuk mempertemukan kelompok-kelompok agama dan suku yang berbeda. Dukungan bagi gerakan demokrasi dan masyarakat umum dalam suatu masyarakat yang kaya dengan keragaman agama dan suku sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang damai.

#### **Olahraga dan Atletik**

PTI mendukung program-program olah-raga dan atletik melalui inisiatif-inisiatif peningkatan kapasitas, pembangunan fasilitas olah-raga, penyediaan peralatan olah-raga dan pengadaan acara. Berbagai cabang olah-raga yang didukung termasuk sepak-bola, rugby, basket, volley, taekwondo, karate, badminton, catur, pencak silat dan tennis. PTI juga mendukung kegiatan-kegiatan yang berfokus pada pemuda, seperti kelompok pencinta alam, pramuka dan kelompok otomotif. Total dana yang dialokasikan oleh PTI pada tahun 2010 adalah AS\$112.000

#### **Pembangunan masyarakat dan umum**

Pembangunan masyarakat dan umum adalah bidang utama program Pengembangan Masyarakat kami. Pada tahun 2010 anggaran yang dialokasikan untuk bidang ini saja lebih dari AS\$4,1 juta. Inisiatif-inisiatif pembangunan masyarakat dan umum mencakup pengembangan ekonomi bagi usaha mikro, kecil dan menengah, pertanian dan perkebunan, perikanan, seni dan budaya, dan olah-raga dan atletik.

Sejak tahun 2008, program Pengembangan Masyarakat telah berfokus pada pengembangan pertanian yang ramah lingkungan. Pada tahun 2010, kami fokus pada pengembangan pola terpadu bagi perkebunan dan peternakan sebagai bagian dari program pergtanian yang ramah lingkungan. Fokus dasar kami adalah



a contribution of US\$27,500. This program will continue through 2011, along with other health programs.

PTI's hospital in Sorowako provides high quality health services and assistance to the community, especially for those who cannot afford them. In 2010, our hospital received more than 3,300 visits from community members from all over East Luwu Regency and beyond. In 2010, PTI invested US\$850,000 in the hospital.

We also assisted in the construction of an additional operational wing for the Sayang Rakyat Hospital in Makassar, South Sulawesi, as part of our commitment to support quality health services for the community. PTI contributed US\$300,000 to the project.



Layanan kesehatan disediakan oleh rumah sakit Perseroan kepada masyarakat yang memerlukan perawatan lanjutan setelah mendapat rujukan dari puskesmas.

Healthcare services are provided by PTI's hospital to those in need of intermediate treatment following a referral by the local community health centre.

### Arts and Culture

Through our Community Development program, PTI provided US\$46,000 to support art programs that aim to preserve local arts such as traditional games and arts, music and dance performances and capacity building for local art and culture groups.

We also contributed US\$48,000 to support various programs and groups that represent the local culture in the areas where PTI operates. Included in this program is the Forum Komunikasi Umat Beragama, or Inter-Faith Forum, which creates programs to bring together different religious and ethnic groups. Supporting civil society and democratic movement in a community rich with different ethnic groups and religious affiliations is crucial in creating a peaceful community.

### Sports and Athletics

PTI supports programs in sports and athletics through capacity building initiatives, construction of sports facilities, provision of sports equipment and organizing events. Various sports were supported, including soccer, rugby, basketball, volleyball, taekwondo, karate, badminton, chess, pencak silat and tennis. PTI also supports youth-focused activities such as nature enthusiast groups, boy scouts and automotive groups. The total funds allocated by PTI in 2010 was US\$112,000.

### Civic and Community Development

Civic and Community Development is the main focus of our Community Development program. In 2010, the budget allocated for this area alone was over US\$4.1 million. Civic and Community Development initiatives include economic development for micro, small and medium enterprises, agriculture and plantations, fisheries, arts and culture and sports and athletics.

Since 2008, the PTI Community Development program has focused on environmentally friendly agriculture development. In 2010, we focused on developing an integrated scheme for plantations and livestock farming as a part of environmentally friendly agriculture program. Our basic focus for the program includes horticulture, cacao, mushroom, paddy, pepper, corn, chicken, cows, goats and ducks. The Wasuponda and Towuti sub-districts are the main areas that we focus to develop as "environmentally friendly farming" areas. For this program, we assist farmer groups by providing technical assistance, production facilities, training, seedlings and working capital. In addition, we make field visits to provide hands-on support and assist farmers by helping them find market channels for their end products.

program-program yang mencakup hortikultura, coklat, jamur, padi, merica, jagung, ayam, sapi, kambing dan bebek. Kecamatan Wasuponda dan Towuti adalah wilayah utama fokus kami dalam pengembangan “peternakan ramah lingkungan.” Dalam program ini kami membantu kelompok tani dengan memberikan bantuan teknis, fasilitas produksi, pelatihan, pembibitan dan modal kerja. Selain itu, kami melakukan kunjungan lapangan untuk memberikan dukungan praktis, dan membantu petani menemukan jalur pemasaran bagi produk akhir mereka.

Di kecamatan Towuti, khususnya desa Bantilang, kami melaksanakan program wajib tanam merica. Permintaan merica sangat tinggi, bahkan dari luar Luwu Timur. Dengan program ini, penghasilan masyarakat setempat telah meningkat secara signifikan. Setiap musim panen dapat menghasilkan minimal sekitar 600 kilogram merica seharga Rp 50.000 per kilogram.

Selain itu, kami juga mengembangkan peternakan ikan air tawar di daerah yang kami berdayakan. Berdasarkan evaluasi kebutuhan, kecamatan Towuti dan Wasuponda berpotensi besar untuk perikanan, dengan pengembang-biakan ikan di akuarium dan kolam. Sejak tahun 2008 PTI telah membantu peternak ikan lokal dengan pelatihan teknis, bibit ikan dan modal kerja.

Program Millenium Development Goals untuk wilayah pantai di kecamatan Malili memberikan bantuan lebih lanjut kepada nelayan dalam bentuk pergudangan untuk menyimpan rumput laut yang dipanen, pembangunan kapasitas masyarakat di wilayah pantai, pembangunan klinik kesehatan, konservasi pantai dan pengembangan wisata pantai sebagai sumber penghasilan alternatif bagi masyarakat. Kami juga mendirikan Radio Masyarakat di kecamatan Malili bekerjasama dengan pemuda setempat untuk menyebarkan informasi tentang isu-isu terkait pantai dan topik-topik lainnya.

Kami juga mengerjakan beberapa inisiatif yang dirancang untuk memberdayakan perempuan. Kami aktif menyediakan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi. Selain bisnis kue tradisional yang berkembang di kecamatan Malili, kami juga menolong kelompok-kelompok wanita di kecamatan Wasuponda untuk mengembangkan berbagai bisnis seperti toko roti, toko kelontong kecil dan cinderamata.

Pemuda dan tenaga kerja setempat adalah juga salah satu pemangku kepentingan kami. Kami mengadakan program-program kewira-usahaan yang memberikan kesempatan untuk membangun mata pencaharian yang berkesinambungan selain menjadi karyawan PTI. Program kami terdiri dari re-organisasi kelompok, pelatihan wira-usaha dan kesempatan bisnis, dan evaluasi rencana usaha. Kami harap dengan memperkuat kelompok akan meningkatkan kapasitas mereka, mendorong partisipasi dan pada akhirnya menolong mereka menjadi pencetus utama bisnis-bisnis yang layak dan berkesinambungan.

### **Infrastruktur**

Sepanjang tahun 2010, PTI memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan dan memperbaiki fasilitas publik bagi masyarakat di wilayah operasional kami dan sekitarnya. Beberapa dilakukan berdasarkan skema program kerja sama banyak pihak, dalam kemitraan dengan pemerintah daerah.

PTI membantu menyediakan fasilitas air bersih di beberapa daerah. Kami membangun proyek sistem air Pekalooa-Timampu di kecamatan Towuti dan sistem serupa di desa Koropansu di kecamatan Wasuponda. Kami juga mengadakan fasilitas air bersih di wilayah Sumasang dan Sorowako Baru di kecamatan Nuha. Investasi kami untuk air bersih berjumlah AS\$230.000 pada tahun 2010.

In the Towuti sub-district, especially in Bantilang village, we have implemented a "plant pepper program" (*wajib tanam merica*), where it is compulsory to plant pepper. The demand for pepper is very high, even from outside of East Luwu. With this program, the income of the local community has increased significantly. Each harvest season can produce a minimum of 600 kilograms at Rp 50,000 per kilogram.

In addition, we also developed fresh water fish farming in our community areas. Based on the needs assessment, Towuti and Wasuponda sub-districts have ample potential in fisheries, where the fish are cultivated in fish tanks and ponds. Since 2008, PTI has assisted local fisheries with technical training, fish seeds and working capital.

Our Millenium Development Goals coastal program in Malili sub-district continues, with further assistance for seaweed farmers. Our support includes warehousing to store the harvested seaweed, capacity building for the community in the coastal areas, coastal health clinics, coastal conservation and the development of coastal tourism as an alternative income source for the community. We have also established community radio in Malili sub-district in cooperation with a local youth group to distribute information on coastal-related issues and other topics.

We are also working on several initiatives designed to empower women in our communities. We actively provide opportunities for women to be part of the economic development process. Besides growing the traditional cookie business in the Malili sub-district, we have also helped women's groups in the Wasuponda sub-district develop various businesses such as bakeries, small grocery stores and handicrafts.

Youth and the local work force are also our major stakeholders. We offer entrepreneurship programs that provide opportunities to develop a sustainable livelihood, beyond employment with PTI. Our program consists of re-organizing groups, training on entrepreneurship and business opportunities and assessment of business plans. We hope that strengthening organizational groups will increase their capacity, encourage participation and ultimately help them become the major driver of feasible and sustainable businesses.

### **Infrastructure**

During 2010, PTI prioritized infrastructure development in order to increase services and public facilities for the communities in our operational and surrounding areas. Some were conducted based on a multi-party sharing program scheme, in partnership with local government.

PTI helped provide clean water facilities in several areas. We constructed the Pekalooa-Timampu water system project in Towuti sub-district and a similar system in Koropansu village, Wasuponda sub-district. We also provided clean water facilities for the Sumasang and Sorowako Baru areas in Nuha sub-district. Our investment in clean water totaled US\$230,000 in 2010.



**ANALISA DAN PEMBAHASAN  
MANAJEMEN**

# MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

PTI membukukan laba bersih sebesar AS\$437,4 juta pada tahun 2010, yang merupakan peningkatan 157% dibandingkan dengan AS\$170,4 juta pada tahun 2009. Hasil yang lebih baik pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh rata-rata harga realisasi jual yang lebih tinggi dan volume penjualan yang lebih besar karena peningkatan produksi.

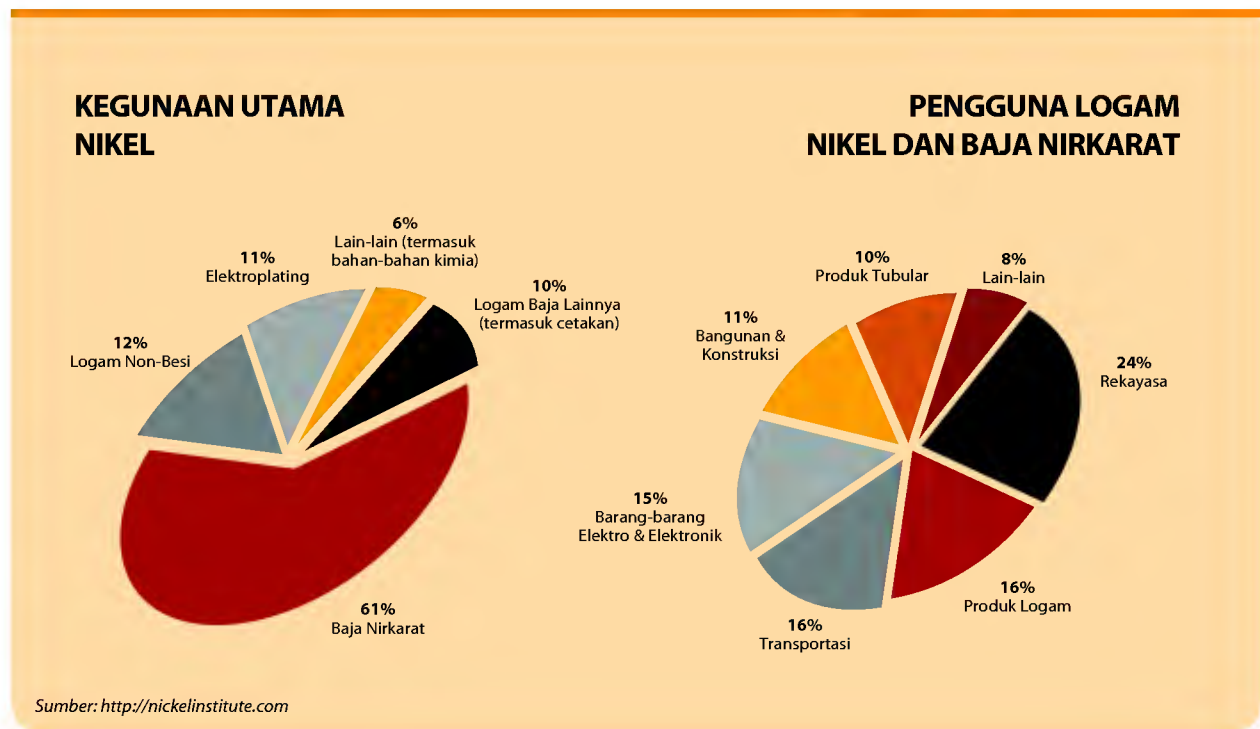
Analisa dan pembahasan manajemen atas Kondisi Keuangan dan Hasil-Hasil Operasi berikut ini wajib dibaca bersamaan dengan Laporan Keuangan PTI dan catatan terkait yang dimuat dalam Laporan Tahunan ini, yang dinyatakan dalam Dollar AS dan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum berlaku di Indonesia.

## ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KONDISI KEUANGAN DAN HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

### PANDANGAN UMUM

#### Industri Nikel

Nikel adalah logam mengkilat berwarna putih keperakan yang ditemukan pada tahun 1751. Titik lebur logam ini 1453° C, memiliki daya pengantar listrik dan panas yang relatif rendah, sangat tahan terhadap korosi dan oksidasi, sangat kuat dan tangguh jika dipanaskan, dan dapat ditarik dengan magnet. Sebagai logam murni, nikel banyak disukai, sangat tahan lama dan mudah dicampur dengan banyak logam lain. Nikel adalah logam serbaguna dengan kombinasi kualitas yang unik sehingga cocok digunakan untuk aneka ragam fungsi. Nikel digunakan dalam berbagai produk konsumen, industri, militer, transportasi darat, udara, laut,



In 2010, PTI reported net earnings of US\$437.4 million—a 157% increase compared to US\$170.4 million in 2009. The improved result was mainly driven by higher average realized selling price and greater sales volume due to higher production.

The following Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations should be read in conjunction with PTI's financial statements and related notes in this Annual Report, which are expressed in U.S. dollars and prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia.

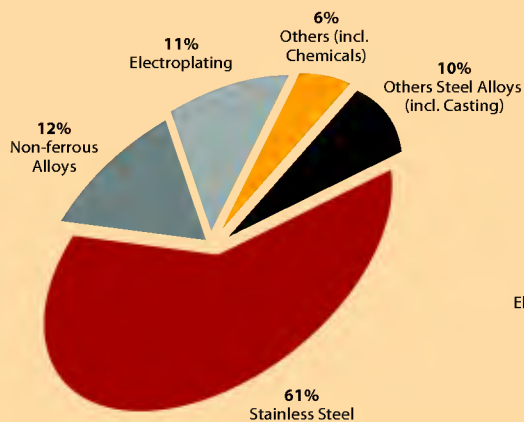
## MANAGEMENT'S DISCUSSION AND ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS

### GENERAL OUTLOOK

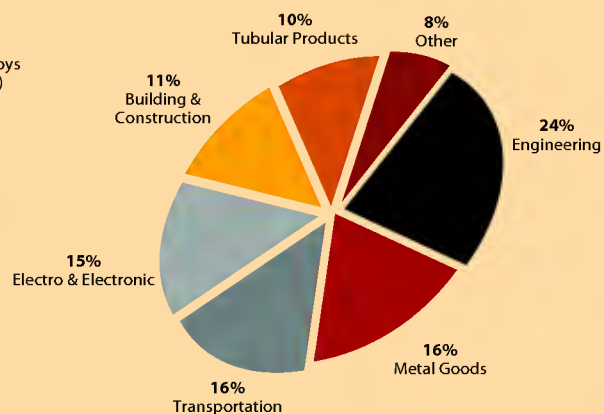
#### The Nickel Industry

Nickel is a lustrous, silvery-white metal that was discovered in 1751. It has a melting point of 1453° C, relatively low thermal and electrical conductivities, high resistance to corrosion and oxidation, excellent strength and toughness at elevated temperatures, and is capable of being magnetized. It is attractive and very durable as a pure metal, and alloys readily with many other metals. Nickel is a versatile metal with a unique combination of qualities that make it suitable for use in a diverse range of functions, and is widely used in a variety of products for consumer, industrial, military, transportation, aerospace, marine and architectural

### PRIMARY NICKEL USE



### NICKEL ALLOY AND STAINLESS STEEL USES

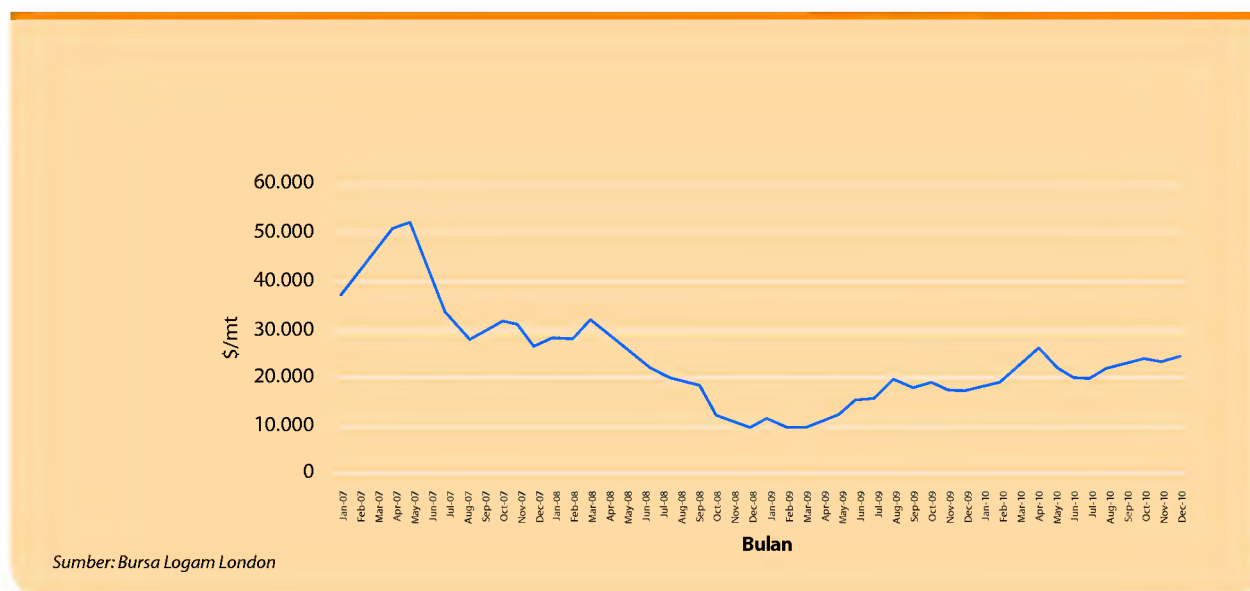


Source: <http://nickelinstitute.com>

dan aplikasi arsitektur. Bagi banyak negara, nikel mewakili kepentingan ekonomi dan strategis yang cukup besar, seperti terlihat dari penggunaannya dalam berbagai industri hilir. Nikel 'primer' diproduksi terutama dari bijih nikel. Jenis nikel lain yang digunakan dalam industri adalah nikel 'sekunder,' yang sebagian besar dipulihkan dari operasi rekrayasa dan pembuatan baja nirkarat austenitik bersama rongsokan mengandung nikel dari pabrik dan peralatan lawas. Aplikasi utama nikel adalah untuk baja nirkarat, yang saat ini mencapai sekitar 60% dari konsumsi nikel primer global tahunan. Selebihnya digunakan dalam besi campuran, logam-logam campuran non-besi, pembuatan plat, pengecoran logam dan aplikasi-aplikasi lain.

Harga nikel sangat dipengaruhi oleh volatilitas yang signifikan. Nikel dijual dalam pasar global aktif dan diperdagangkan dalam bursa komoditi, dimana bursa yang paling signifikan adalah London Metal Exchange (LME). Harga logam ini sangat berfluktuasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk ekspektasi dan kondisi aktual makro-ekonomi dan politik, tingkat permintaan dan pasokan, ketersediaan dan harga produk substitusi, tingkat persediaan, investasi yang dilakukan oleh manajer investasi komoditi dan tindakan-tindakan peserta pasar komoditi.

Nikel mulai diperdagangkan di LME pada tahun 1979 dan sejak itu telah mengalami beberapa siklus harga. Selama tujuh tahun terakhir kita menyaksikan periode harga nikel yang kuat didorong oleh pertumbuhan permintaan dari Cina, pasokan yang terbatas dan struktur biaya yang meningkat untuk proyek-proyek baru. Sejak tahun 2004 sampai 2010, rata-rata harga nikel yang telah disesuaikan dengan inflasi adalah sekitar AS\$22.900 per metrik ton, dibandingkan dengan AS\$10.700 sepanjang tahun 1979 sampai 2003. Rata-rata bulanan harga nikel dalam 4 tahun terakhir, yang disajikan dalam tabel di bawah ini, memperlihatkan volatilitas harga. Berdasarkan ekspektasi terhadap kelanjutan pertumbuhan pasar negara berkembang dan aplikasi luas nikel, kami optimis permintaan nikel akan terus menguat pada tahun-tahun mendatang.



### Gambaran Umum Perusahaan

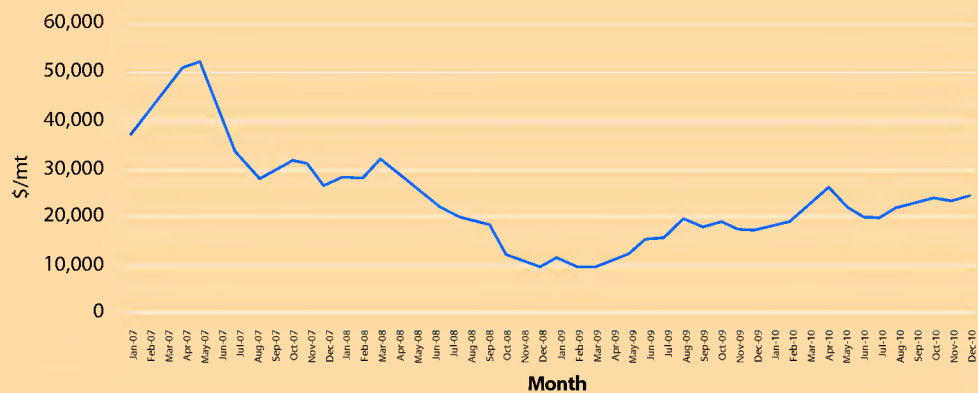
PTI mengoperasikan satu di antara tambang nikel laterit dan pabrik pengolahan terpadu terbesar di dunia, yang berlokasi di daerah terpencil dekat Sorowako di pulau Sulawesi di Republik Indonesia. Kami memproduksi nikel dalam matte,



applications. "Primary" nickel is produced principally from nickel ores while "secondary" nickel is used in industrial applications and is recovered as scrap largely from austenitic stainless steel manufacturing and fabricating operations along with nickel-containing scrap from obsolete plant and equipment. Stainless steel is the main application for nickel, currently accounting for approximately 60% of annual global primary nickel consumption. The remainder is used in alloy steel, non-ferrous alloys, plating, foundry and other applications.

The price of nickel is subject to significant volatility. Nickel is sold in an active global market and traded on commodity exchanges the most significant of which is the London Metal Exchange (LME). The price of this metal is affected by many factors, including actual and expected global macroeconomic and political conditions, levels of supply and demand, the availability and cost of substitutes, inventory levels and actions of participants in the commodity markets.

Nickel began trading on the LME in 1979 and has since experienced several price cycles. Over the past seven years, we have seen a strong period of nickel prices driven by strong demand from China, limited nickel supply and rising cost structure for new projects. From 2004 to 2010, inflation-adjusted nickel prices averaged approximately US\$22,900 per metric ton versus US\$10,700 from 1979 to 2003. Monthly average nickel prices for the last four years shown in the graph below illustrate the volatile nature of the price. Based on the expectation of continued emerging market growth and the wide application of nickel, we are optimistic for continued nickel demand growth in years to come.



Source: London Metal Exchange

### Company Overview

PTI operates one of the world's largest integrated laterite nickel mining and processing operations. Our operations are located near Sorowako, remote location on the Island of Sulawesi in Republic of Indonesia. We produce nickel in matte, an intermediate product used in making refined nickel. Our annual production of 75,989 metric tons of contained nickel in 2010 represents about 5% of the world's nickel supply. Given our excellent nickel reserves and resources, we provide

produk antara yang digunakan dalam pembuatan nikel layak jual. Produksi tahunan kami pada tahun 2010 sebesar 75.989 metrik ton nikel terkandung merupakan lebih dari 5% total pasokan nikel dunia. Berbekal cadangan nikel dan sumber daya yang melimpah, kami menyediakan pasokan jangka panjang yang handal bagi para konsumen hilir nikel, khususnya Jepang, negara tujuan pengapalan kami.

Saat ini kami beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia. PTI menandatangani Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Juli 1968 (Kontrak Karya Awal). Pada tanggal 15 Januari 1996, kami menandatangani Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Kontrak Karya Awal yang mengubah dan memperpanjang kontrak tersebut dari tanggal 1 April 2008 sampai dengan 28 Desember 2025. Kontrak Karya saat ini dapat diperpanjang dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk jangka waktu maksimum dua periode masing-masing 10 tahun berdasarkan peraturan yang berlaku. Pembahasan lebih rinci mengenai hal ini disajikan pada bagian Undang-Undang Pertambangan Baru pada Laporan Tahunan ini.

PTI memulai eksplorasi pada wilayah seluas 218.000 hektar, yang mencakup sekitar 12.000 hektar di Sorowako Timur dan Sorowako Barat; 8.000 hektar di Petea; 20.000 hektar di Pomalaa; dan 32.000 hektar di Bahodopi. Pada tahun 2010 Pemerintah menyetujui pengembalian wilayah seluas sekitar 28.000 hektar atau 12,8% dari total wilayah Kontrak Karya saat ini, dan berlaku surut efektif sejak tanggal 10 Desember 2009. Pembahasan lebih rinci disajikan pada bagian berjudul Peristiwa Penting pada tahun 2010 dalam Laporan Tahunan ini.



**Seorang karyawan memeriksa kualitas sample bijih.**

**A worker checks the quality of an ore sample.**



reliable long-term supply to downstream nickel consumers, especially in Japan, where our output is shipped.

We are currently operating in Indonesia under a Contract of Work (CoW) with the Government of Indonesia. PTI entered into a Contract of Work with the Government of Indonesia on July 27, 1968 (the Original CoW). On January 15, 1996, we signed an Agreement on Modification and Extension of the Original CoW, modifying and extending it from April 1, 2008 to December 28, 2025. The existing CoW may be extended in the form of *Izin Usaha Pertambangan* (IUP) for up to a maximum of two periods of 10 years based on the applicable implementing regulation. Please refer to New Mining Law section of the Annual Report for further discussion about this matter.

PTI began exploring 218,000 hectares, which covers approximately 12,000 hectares at the Sorowako East and Sorowako West blocks; 8,000 hectares at Petea; 20,000 hectares at Pomalaa; and 32,000 hectares at Bahodopi. In 2010, the Government approved the relinquishment of a total area of approximately 28,000 hectares or 12.8% of the total CoW area, which is retroactively effective from December 10, 2009. The total CoW area after the relinquishment became approximately 190,000 hectares. Please refer to the Significant Events in 2010 section for discussion about the relinquishment.



Operasi bisnis kami terdiri dari penambangan dan pengolahan bijih menjadi produk nikel antara, yaitu nikel dalam matte yang dijual berdasarkan penjanjian penjualan. Karena keragaman mutu bijih dalam wilayah Kontrak Karya kami, diperlukan perencanaan yang seksama, pengujian, pemilihan dan pencampuran sumber daya bijih untuk memastikan dan mempertahankan umpan yang konsisten bagi pabrik pengolahan. Bijih yang telah ditambang dan melalui berbagai proses penyaringan menjadi produk yang kami namakan produk stasiun penyaringan, yang mengandung besi, magnesia, mineral-mineral silika, kerikil, dan sejumlah kecil kobalt. Di pabrik pengolahan, produk stasiun penyaringan ini melalui sebuah *trommel* yang secara mekanis membuang sebagian material, lalu dipanaskan dengan proses untuk menghasilkan kalsin, yang kemudian dilebur untuk memperoleh produk nikel dalam matte yang mengandung sekitar 78% nikel dan 20% sulfur.

Pabrik peleburan kami berlokasi di Sorowako dan mencakup tiga pengering berbahan bakar minyak, lima tanur pereduksi, empat tanur listrik, dan tiga pengkonversi Pierce-Smith. Kami telah membangun dan memelihara infrastruktur pendukung yang mencakup fasilitas pelabuhan, jalan untuk mentransportasikan dan mengapalkan produk akhir kami dan terminal bahan bakar minyak di Mangkasa yang didukung dengan pompa bahan bakar minyak bertekanan tinggi dan dihubungkan dengan pipa-pipa 12 inci ke tanki penyimpanan bahan bakar minyak di wilayah pabrik kami.

Kami telah membangun dan memelihara kota modern dengan rumah sakit, sekolah dari TK sampai SLTA, fasilitas perbankan, kantor pos, kantor polisi, stasiun bis, pasar swalayan dan pusat perbelanjaan, pasar, mesjid, gereja, lapangan terbang, dan fasilitas olah raga dan rekreasi. Kota ini juga dilengkapi dengan sistem air minum dan pembuangan air kotor.

Kami juga memiliki dan mengoperasikan fasilitas-fasilitas pembangkit listrik tenaga air. Kami memiliki sebuah fasilitas pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas rata-rata 165 megawatt (MW) yang berlokasi di hulu Sungai Larona dan sebuah fasilitas pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas rata-rata 110 MW yang berlokasi 8 km ke hilir di Balambano, sekitar 25 km dari fasilitas pengolahan kami di Sorowako. Saat ini kami sedang membangun bendungan ketiga di Karebbe dengan kapasitas rata-rata 90 MW, yang diharapkan selesai dalam semester kedua tahun 2011. Selain itu, kami mengelola sebuah pembangkit listrik thermal berkapasitas 78 MW dengan generator diesel 54 MW yang terdiri dari Mirrless Blackstone dan Caterpillar dan generator turbin uap berbahan bakar *High Sulphur Fuel Oil* (HSFO) 24 MW yang berlokasi di Sorowako.

Vale Canada Limited (Vale Canada, sebelumnya Vale Inco Limited), yang merupakan bagian dari usaha Vale Base Metals dan penghasil nikel terbesar kedua di dunia, saat ini memiliki 58,73% saham kami, dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., satu di antara perusahaan tambang dan peleburan terbesar di Jepang, memiliki 20,09% saham kami. Selebihnya, 21,18% saham kami, dimiliki oleh publik dan pemegang saham lainnya.

#### PANDANGAN ATAS OPERASI

	2010	2009	Δ (%)
Produksi nikel dalam matte (metrik ton)	75.989	67.329	13
Pengiriman nikel dalam matte (metrik ton)	75.839	66.890	13

Our business operations consist of mining and processing ore to an intermediate nickel in matte product. Due to the variability of ore grades within our CoW area, careful planning, sampling, selection and blending of ore sources is required to ensure and maintain a consistent feedstock for the process plant. Mined ore goes through various screening processes and becomes a screening station product, which contains nickel, iron, magnesia, silica minerals, boulders and minor amounts of cobalt. At the process plant, the screening station material is run through a trommel to mechanically remove some of these materials then heated using a process called calcining. It is finally smelted to recover and produce a saleable nickel in matte product containing approximately 78.0% nickel and 20.0% sulphur.

Our smelting plant located at Sorowako includes three oil-fired rotary dryers, five reduction kilns, four electric furnaces and three Pierce-Smith converters. We have established and maintain our supporting infrastructure, including port facilities, roads to transport and ship our final granulated product and a fuel oil terminal at Mangkasa Point which supported by high compressor fuel pumps connected by a 12-inch pipeline to the fuel storage tank at our plant site area.

We have established and maintain modern town sites with a hospital, schools from nursery through high school, a bank, post office, police station, bus service, supermarket and shopping complexes, markets, a mosque, churches, an airport and sports and recreational facilities. The town sites are also equipped with drinking water and sewage systems.

We also own and operate our own hydroelectric power generating facilities. One facility, with an average generating capacity of 165 megawatts (MW), is located on the upper Laron River and another, with an average generating capacity of 110 MW, is located eight kilometres downstream at Balambano, approximately 25 kilometres from our processing facilities at Sorowako. We are currently building a third dam, at Karebbe, with an average generating capacity of 90 MW. We expect it will be completed in the second half of 2011. In addition, we support a 78 MW thermal power facility with a 54 MW diesel generator of Mirrless Blackstone and Caterpillar and a 24 MW high sulphur fuel oil (HSFO) steam turbine generator located at Sorowako.

Vale Canada Limited (Vale Canada, formerly Vale Inco Limited), which is part of the Vale's Base Metals business and the world's second largest nickel producer, currently owns 58.73% of our shares, and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., one of Japan's largest mining and smelting companies, owns 20.09% of our shares. The remaining 21.18% of our shares are owned by public and other shareholders.

## OPERATION OUTLOOK

	2010	2009	Δ (%)
Nickel in matte production (metric tons)	75,989	67,329	13
Nickel in matte production (metric tons)	75,839	66,890	13

## Produksi

Produksi nikel dalam matte kami adalah 75.989 metrik ton pada tahun 2010, meningkat 13% atau 8.660 metrik ton dibandingkan 67.329 metrik ton pada tahun 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penggunaan pembangkit listrik thermal yang lebih tinggi, yaitu 52 minggu dibandingkan dengan 15 minggu pada tahun 2009, sebagai tambahan dari pembangkit listrik tenaga air, sehingga menghasilkan lebih banyak kalsin pada tahun 2010, yaitu 4.129 kilo ton (kt) dibandingkan dengan 3.557 kt pada tahun 2009. Pada tahun 2010 kami menggunakan pembangkit listrik thermal lebih tinggi daripada tahun 2009; keputusan ini layak secara ekonomi karena harga nikel yang menguntungkan. Kami dapat melakukan optimalisasi penggunaan pembangkit listrik tenaga air pada tahun 2010 sebab rata-rata tinggi permukaan air danau lebih tinggi daripada tahun 2009 karena curah hujan yang tinggi. Dampak positif pada produksi ini sebagian diimbangi oleh penurunan tingkat pemulihan pada pabrik yang turun sedikit menjadi 89,9% pada tahun 2010 dari 90,2% pada tahun 2009.

Tingkat Keuntungan	2010	2009	Δ (%)
Laba kotor / penjualan	49%	32%	53
Laba operasi / penjualan	47%	30%	57
Laba bersih / penjualan	34%	22%	55
Laba bersih / total aset	20%	8%	150
Laba bersih / ekuitas	26%	11%	136
Tingkat pengembalian rata-rata modal (%)	33%	15%	120
Laba bersih per saham (AS\$/saham)	0,04	0,02	100

## Tingkat Keuntungan

Imbal hasil dan rasio-rasio keuangan PTI pada tahun 2010 lebih kuat daripada tahun 2009. PTI membukukan tingkat pengembalian aset 20%, tingkat pengembalian ekuitas 26% dan tingkat pengembalian rata-rata modal 33%, yang masing-masing merupakan peningkatan sebesar 150%, 136% dan 120% dari tahun 2009. Kami sangat diuntungkan oleh kenaikan rata-rata harga nikel dalam matte dan peningkatan produksi.

Pembahasan lebih rinci mengenai imbal hasil dan rasio-rasio keuangan dapat disajikan pada bagian Imbal Hasil dan Rasio Keuangan dalam Laporan Tahunan ini.

## ANALISA KINERJA KEUANGAN

(AS\$, dalam ribuan)	2010	2009	Δ (\$)	Δ (%)
Penjualan	1.276.323	760.952	515.371	68
Harga pokok penjualan	652.245	516.059	136.186	26
Laba kotor	624.078	244.893	379.185	155
Biaya penjualan umum dan administrasi	27.704	13.018	14.686	113
Laba operasi	596.374	231.875	364.499	157
Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, depleksi dan amortisasi (EBITDA)	677.567	327.838	349.729	107
(Beban)/pendapatan lainnya	(15.031)	4.829	(19.860)	(411)
Beban pajak penghasilan	143.980	66.287	77.693	117
Laba bersih	437.363	170.417	266.946	157

## Production

Our nickel in matte production was 75,989 metric tons in 2010 compared to 67,329 metric tons in 2009, a 13% increase. This increase was mainly driven by 52 weeks of used thermal power in 2010 compared to 15 weeks in 2009, in addition to hydroelectric power, resulting higher calcine throughput of 4,129 kilotons (kt) in 2010 compared to 3,577 kt in 2009. We utilized more thermal power generators in 2010 compared to 2009, which was economically feasible due to favourable nickel prices. We were able to continue optimizing our hydroelectric power generation in 2010 due to higher average lake water levels compared to 2009 because of high rainfall. These positive impacts on production were partially offset by a slight decrease in plant recovery to 89.9% in 2010 from 90.2% in 2009.

<b>Profitability</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>Δ (%)</b>
Gross profit/sales	49%	32%	53
Operating profit/sales	47%	30%	57
Net earnings/sales	34%	22%	55
Net earnings/total assets	20%	8%	150
Net earnings/equity	26%	11%	136
Return on average capital employed (%)	33%	15%	120
Earnings per share (US\$/share)	0.04	0.02	100

## Profitability

PTI's financial returns and ratios were stronger in 2010 compared to 2009. With a 20% return on assets, a 26% return on equity and a 33% return on average capital employed, the Company recorded 150%, 136% and 120% increases respectively from 2009. We benefited substantially from higher average nickel in matte prices and increased production.

Please refer to the Financial Returns and Ratios section of the Annual Report for further discussion about financial returns and ratios.

## FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

<b>(US\$, in thousands)</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>Δ (\$)</b>	<b>Δ (%)</b>
Sales	1,276,323	760,952	515,371	68
Cost of goods sold	652,245	516,059	136,186	26
Gross profit	624,078	244,893	379,185	155
Selling, general and administrative expenses	27,704	13,018	14,686	113
Operating profit	596,374	231,875	364,499	157
Earnings before interest, tax, depreciation, depletion and amortization (EBITDA)	677,567	327,838	349,729	107
Other (expenses)/income, net	(15,031)	4,829	(19,860)	(411)
Income tax expense	143,980	66,287	77,693	117
Net earnings	437,363	170,417	266,946	157

## Penjualan

Pada tahun 2010 penjualan kami meningkat menjadi AS \$1.276,3 juta, 68% lebih tinggi daripada penjualan tahun 2009 sebesar AS\$761,0 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh rata-rata harga realisasi jual dan pengiriman yang lebih tinggi. Rata-rata harga realisasi jual pada tahun 2010 adalah AS\$16.568 per metrik ton, naik 48% dari AS\$11.227 per metrik ton pada tahun 2009. Pengiriman nikel dalam matte meningkat menjadi 75.389 metrik ton pada tahun 2010 dari 66.890 metrik ton pada tahun 2009, selaras dengan peningkatan produksi. Kandungan kobalt dalam pengiriman kami adalah 1.196 metrik ton pada tahun 2010 dan 891 metrik ton pada tahun 2009, dan dinilai dengan harga nikel dalam matte.

	2010	2009	Δ (\$)	Δ (%)
Harga realisasi rata-rata (dollar per metrik ton)	16.568	11.227	5.341	48
Pengiriman nikel dalam matte (metrik ton)	75.839	66.890	8.949	13

## Harga Pokok Penjualan

Komponen terbesar dari harga pokok penjualan adalah biaya bahan bakar minyak, bahan pembantu, jasa dan kontrak, biaya karyawan, dan depresiasi, amortisasi dan depleksi. Harga pokok penjualan naik 26% menjadi AS\$652,3 juta

**Tim Long Term Planning dan Mine Engineering Department membahas peta rencana lima tahun.**

**Employees from the Long Term Planning Team and Mine Engineering Department discuss the five-year plan layout.**



### Sales

In 2010 our sales rose to US\$1,276.3 million, 68% higher than 2009 sales of US\$761.0 million. The increase was driven by higher average realized selling price and higher deliveries. The average realized selling price in 2010 was US\$16,568 per metric ton, up 48% from US\$11,227 per metric ton in 2009. Nickel in matte deliveries rose to 75,839 metric tons in 2010 from 66,890 metric tons in 2009, in line with higher production. Cobalt content in our deliveries was 1,196 metric tons in 2010 and 891 metric tons in 2009, and is valued at the nickel in matte price.

	2010	2009	Δ (\$)	Δ (%)
Average realized price (dollar per metric ton)	16,568	11,227	5,341	48
Nickel in matte deliveries (metric tons)	75,839	66,890	8,949	13

### Cost of Goods Sold

The largest components of cost of goods sold are fuels, supplies, services and contracts, employee costs and depreciation, amortization and depletion. Cost of goods sold rose 26% to US\$652.3 million in 2010 from US\$516.1 million in 2009.



pada tahun 2010 dari AS\$516,1 juta pada tahun 2009. Kenaikan ini disebabkan oleh pengiriman yang lebih banyak dan harga pokok per unit produksi yang lebih tinggi. Pembahasan lebih rinci mengenai tren biaya selama tahun 2010 dapat disajikan pada bagian Harga Pokok Produksi.

(AS\$, dalam ribuan)	2010	%	2009	%	Δ (\$)	Δ (%)
Bahan bakar minyak dan pelumas	269.594	41,1	174.553	33,6	95.041	54
Persediaan	105.652	16,1	95.041	18,3	10.611	11
Depresiasi, amortisasi dan deplesi	96.220	14,7	90.944	17,5	5.276	6
Biaya karyawan	76.092	11,6	66.531	12,8	9.561	14
Kontrak dan jasa	53.294	8,1	43.994	8,4	9.300	21
Royalti, pajak dan asuransi	28.844	4,4	23.270	4,5	5.574	24
Lainnya	22.252	3,4	14.832	2,9	7.420	50
Perubahan persediaan - barang dalam proses	3.665	0,6	10.305	2,0	(6.640)	(64)
<b>Harga pokok produksi</b>	<b>655.613</b>	<b>100,0</b>	<b>519.470</b>	<b>100,0</b>	<b>136.143</b>	<b>26</b>
Perubahan persediaan - barang jadi	(3.368)	-	(3.411)	-	43	(1)
<b>Harga pokok penjualan</b>	<b>652.245</b>	<b>-</b>	<b>516.059</b>	<b>-</b>	<b>136.186</b>	<b>26</b>

### Harga Pokok Produksi

Harga pokok produksi naik sebesar AS\$136,1 juta menjadi AS\$655,6 juta pada tahun 2010 dari AS\$519,5 juta pada tahun 2009. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh biaya-biaya yang lebih tinggi dari bahan bakar minyak, bahan pembantu, jasa dan kontrak, dan biaya karyawan, serta meningkatnya depresiasi, amortisasi dan deplesi, dan pembayaran royalti dan retribusi air kepada Pemerintah Indonesia. Kenaikan pada biaya-biaya ini sebagian diimbangi oleh biaya sulfur yang lebih rendah karena harga yang turun, biaya konsultasi yang lebih rendah, dan biaya asuransi.

PTI mengambil banyak langkah penting yang memungkinkan tercapainya pengurangan struktural biaya operasi dan biaya-biaya tetap dan peningkatan produktivitas secara keseluruhan.

- **Bahan bakar minyak dan pelumas.** Bahan bakar minyak adalah komponen terbesar dari biaya produksi kami, yaitu sekitar 41%. Kami terutama menggunakan HSFO dan *high speed diesel* (HSD) untuk mengoperasikan pabrik pengolahan dan armada tambang dan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik thermal. HSFO mencapai 78% dari biaya bahan bakar minyak dan pelumas kami pada tahun 2010, dibandingkan dengan 79% pada tahun 2009. Sedangkan HSD mewakili sekitar 21% dari biaya bahan bakar minyak dan pelumas kami pada tahun 2010, dibandingkan dengan 19% pada tahun 2009. Biaya bahan bakar minyak dan pelumas lain menempati sekitar 1% dari biaya bahan bakar minyak dan pelumas. Biaya bahan bakar minyak dan pelumas meningkat AS\$95,0 juta pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009. Dari peningkatan sebesar AS\$95,0 juta tersebut, AS\$70,8 juta adalah untuk HSFO, AS\$23,8 juta untuk HSD, dan AS\$0,4 juta untuk bahan bakar minyak dan pelumas lainnya.

Biaya HSFO pada tahun 2010 meningkat 51% dibandingkan tahun sebelumnya; 65% dari peningkatan ini disebabkan oleh rata-rata harga HSFO yang lebih tinggi dan 35% oleh penggunaan HSFO yang lebih banyak karena peningkatan produksi. Konsumsi HSFO kami 2,77 juta barrel pada tahun 2010 dengan biaya rata-rata sekitar AS\$75 per barrel, dibandingkan dengan 2,35 juta barrel dengan biaya rata-rata AS\$59 per barrel pada tahun 2009. Harga HSFO kami didasarkan pada indeks Singapore Platts. PTI menyadari signifikansi HSFO terhadap biaya keseluruhan; karena itu, kami sedang mengkaji berbagai cara untuk meningkatkan efisiensi konsumsi HSFO, dan kami tetap melanjutkan usaha untuk menemukan alternatif sumber daya yang lebih murah.

This increase resulted from higher deliveries and higher unit costs of production. Please refer to Cost of Production discussion for further explanation of the trends in costs during 2010.

(US\$, in thousands)	2010	%	2009	%	Δ (\$)	Δ (%)
Fuel and lubricants	269,594	41.1	174,553	33.6	95,041	54
Supplies	105,652	16.1	95,041	18.3	10,611	11
Depreciation, amortization and depletion	96,220	14.7	90,944	17.5	5,276	6
Employee costs	76,092	11.6	66,531	12.8	9,561	14
Services and contracts	53,294	8.1	43,994	8.4	9,300	21
Royalties, taxes and insurance	28,844	4.4	23,270	4.5	5,574	24
Others	22,252	3.4	14,832	2.9	7,420	50
Change in nickel inventory - in process	3,665	0.6	10,305	2.0	(6,640)	(64)
<b>Cost of production</b>	<b>655,613</b>	<b>100.0</b>	<b>519,470</b>	<b>100.0</b>	<b>136,143</b>	<b>26</b>
Change in nickel inventory - finished goods	(3,368)	-	(3,411)	-	43	(1)
<b>Cost of goods sold</b>	<b>652,245</b>	<b>-</b>	<b>516,059</b>	<b>-</b>	<b>136,186</b>	<b>26</b>

### Cost of Production

Cost of production rose by US\$136.1 million to US\$655.6 million in 2010 from US\$519.5 million in 2009. The increase was primarily due to higher costs for fuel, supplies, services and contracts and employment costs, as well as increased depreciation, amortization and depletion and royalty and water levy payments to the Government of Indonesia. These costs were partially offset by lower sulphur costs due to decreased price, lower consulting costs and lower costs of insurance.

PTI is continuing to undertake many important steps that enable us to achieve a reduction in structural operating and fixed costs and an improvement in overall productivity.

- **Fuel and lubricants.** Fuels are the largest components of our production cost at about 41%. We primarily use HSFO and high speed diesel (HSD) to operate our process plant and mining fleet and to fuel our thermal power generators. HSFO accounted for about 78% of our fuels and lubricants cost in 2010, compared to 79% in 2009. Meanwhile, HSD accounted for about 21% of our fuels and lubricants cost in 2010, compared to 19% in 2009. Other fuels and lubricants accounted for about 1% of these costs. Fuels and lubricants costs increased by US\$95.0 million in 2010 compared to 2009. Of the US\$95.0 million increase, US\$70.8 million was attributable to HSFO, US\$23.8 million related to HSD, and US\$0.4 million was associated to other fuel and lubricants.

HSFO costs increased 51% in 2010 compared to 2009 levels, with 65% of this increase driven by the higher average HSFO price and 35% by more HSFO usage in line with higher production. Our HSFO consumption was 2.77 million barrels in 2010 at an average cost of approximately US\$75 per barrel, compared to 2.35 million barrels at an average cost of US\$59 per barrel in 2009. Our HSFO price was based on the Singapore Platts indices. PTI recognizes the significance of HSFO to overall costs and accordingly, various ways of increasing the efficiency of our HSFO consumption are being studied and we continue to search for alternative and less expensive energy sources.

Biaya HSD pada tahun 2010 meningkat 71% dari tahun 2009, terutama karena lebih banyak digunakan. Selain itu, rata-rata harga HSD naik 11% dari rata-rata harga tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, konsumsi HSD meningkat 91,8 juta liter dari 60,3 juta liter pada tahun 2009 dan rata-rata harga naik menjadi AS\$0,62 per liter dari AS\$0,56 per liter. Faktor penting penyebab kenaikan konsumsi HSD adalah penggunaan pembangkit listrik thermal yang lebih banyak pada tahun 2010.

- **Bahan baku pembantu.** Bahan baku pembantu mewakili sekitar 16% dari biaya produksi kami pada tahun 2010 (2009: 18%), dan merupakan komponen biaya produksi terbesar kedua. Komponen utama biaya persediaan adalah komoditi berjumlah besar, ban, suku cadang dan peralatan mekanis habis pakai untuk peralatan. Total biaya persediaan lebih tinggi tahun 2010, terutama karena peningkatan produksi.
- **Biaya karyawan.** Biaya karyawan pada tahun 2010 meningkat 14% dari tahun 2009, dan merupakan sekitar 12% dari total biaya produksi, dibandingkan dengan 13% pada tahun 2009. Kontributor utama kenaikan biaya karyawan adalah penyesuaian gaji karyawan dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS karena hampir seluruh gaji karyawan dibayarkan sebagian besar dalam rupiah.
- **Jasa dan kontrak.** Jasa dan kontrak mewakili sekitar 8% dari biaya produksi kami pada tahun 2010, relatif sama dengan persentase tahun 2009. Komponen utama adalah jasa mekanik, konsultasi, tambang, tenaga kerja dan transportasi. Total biaya pada tahun 2010 naik 21% selaras dengan peningkatan produksi.
- **Royalti, pajak dan asuransi.** Biaya royalti, retribusi air, pajak dan asuransi pada tahun 2010 naik 24% dari tahun 2009 konsisten dengan peningkatan pengiriman dan harga nikel yang lebih tinggi dan sebagian diimbangi oleh pembayaran premi asuransi yang lebih rendah.
- **Lainnya.** Komponen biaya produksi lainnya terutama berkaitan dengan biaya-biaya pengembangan masyarakat, donasi, subsidi untuk pinjaman perumahan karyawan dan relokasi karyawan. Biaya lainnya meningkat AS\$7.4 juta pada tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh beban pengembangan masyarakat sebesar AS\$3,6 juta. Dedikasi kami untuk menolong masyarakat dicerminkan dalam peningkatan kontribusi keuangan bagi pengembangan masyarakat terutama ditujukan untuk bidang kesehatan, layanan sosial dan infra-struktur olah-raga.
- **Biaya produksi non-kas.** Biaya produksi non-kas, yang terdiri dari depresiasi, amortisasi dan depleksi, meningkat 6% pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009, disebabkan oleh kapitalisasi proyek-proyek pengeluaran modal yang telah selesai. 66% dari total proyek pengeluaran modal yang diselesaikan pada tahun 2010 adalah instalasi ESP pada tanur pereduksi No. 1, No. 2 dan No. 3 sejumlah AS\$47,0 juta.

#### Laba Kotor

Pada tahun 2010, peningkatan penjualan melebihi kenaikan harga pokok penjualan. Sebagai hasilnya, laba kotor meningkat 155% menjadi AS\$624,1 juta pada tahun 2010 dari AS\$244,9 juta pada tahun 2009. Marjin kotor naik menjadi 49% pada tahun 2010 dibandingkan dengan 32% pada tahun 2009.

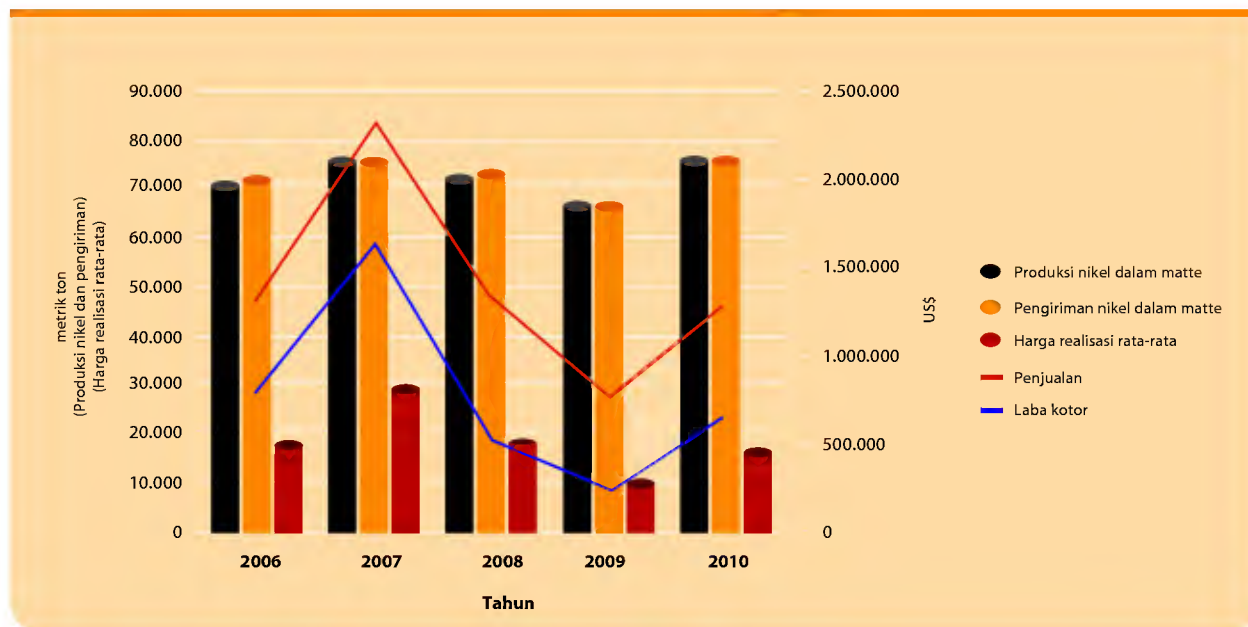
HSD costs increased 71% in 2010 from 2009 levels, primarily because of higher usage. In addition, the average HSD price was 11% above the prior year's average. In 2010, HSD usage increased to 91.8 million litres from 60.3 million litres in 2009 and the average cost rose to US\$0.62 per litre from US\$0.56 per litre. A key factor in the increased usage of HSD was higher utilization of thermal power in 2010.

- **Supplies.** Supplies accounted for about 16% of our production cost in 2010 (2009: 18%) representing the second largest component in our cost of production. The major components of supply costs are bulk commodities, tires, spare parts and other mechanical consumables for equipment. Total supplies were higher in 2010, mainly as a result of higher production.
- **Employee costs.** Employee costs were up 14% in 2010 from 2009 levels and accounted for approximately 12% of total manufacturing costs, compared to 13% in 2009. The main contributors to the increase in employee costs were employee salary adjustment and strengthening of the Indonesian rupiah against U.S. dollar, as employee costs are paid predominantly in rupiah.
- **Services and contracts.** Services and contracts accounted for about 8% of our production cost in 2010, relatively the same as 2009. The major components were mechanical, consulting, mining, labor and transportation services. Total costs rose 21% in 2010 in line with higher production.
- **Royalties, taxes and insurance.** Royalties, water levies, taxes and insurance costs were up 24% in 2010 from 2009 consistent with higher shipments and higher nickel prices and partially offset by lower insurance premium payments.
- **Others.** Other costs of production are mainly associated with community development, donations, a company subsidy on employee housing loans and employee relocation costs. Other costs rose by US\$7.4 million in 2010 from the 2009 level, mainly because of higher community development expenses of US\$3.6 million. Our dedication to helping communities was reflected in higher financial contributions to community development, mainly in the areas of health, social services and sports infrastructure.
- **Non-cash costs of production.** Non-cash costs of production, which consists of depreciation, amortization and depletion, were up by 6% in 2010 from 2009, due to higher capitalization of completed capital projects. 66% of total completed capital projects in 2010 was represented by the completed installation of ESPs on our reduction kilns No. 1, No. 2 and No. 3, for US\$47.0 million.

#### Gross Profit

In 2010, the increase in sales exceeded the increase in cost of goods sold. As a result, gross profit climbed 155% to US\$624.1 million in 2010 from US\$244.9 million in 2009. The gross profit margin was up to 49% in 2010 compared to 32% in 2009.

## Produksi nikel, pengiriman, rata-rata harga realisasi nikel, penjualan dan laba kotor



### Biaya Penjualan, Umum dan Administrasi

Pada tahun 2010, biaya penjualan, umum dan administrasi meningkat menjadi AS\$27,7 juta dari AS\$13,0 juta pada tahun 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan sebesar AS\$14,0 juta pada beban bantuan manajemen dan teknis yang dibayarkan kepada Vale Canada berdasarkan formula yang telah disepakati. Beban bantuan manajemen dan teknis berkaitan dengan realisasi proyek-proyek kami, kebutuhan-kebutuhan pembiayaan kami, pembangunan dan operasional dari fasilitas-fasilitas kami, dan pemasaran produk kami. Seluruh produksi nikel dalam matte PTI dijual kepada Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. berdasarkan perjanjian "harus ambil" untuk diproses lebih lanjut di fasilitas-fasilitas di Asia untuk memproduksi nikel yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Pemasaran produk jadi nikel kepada pelanggan – seperti pabrik-pabrik baja nirkarat dan produsen-produsen besi campuran – dilakukan oleh tenaga-tenaga penjualan Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Sebagai hasil dari perjanjian ini, kami tidak mengeluarkan biaya pemasaran dan penjualan.

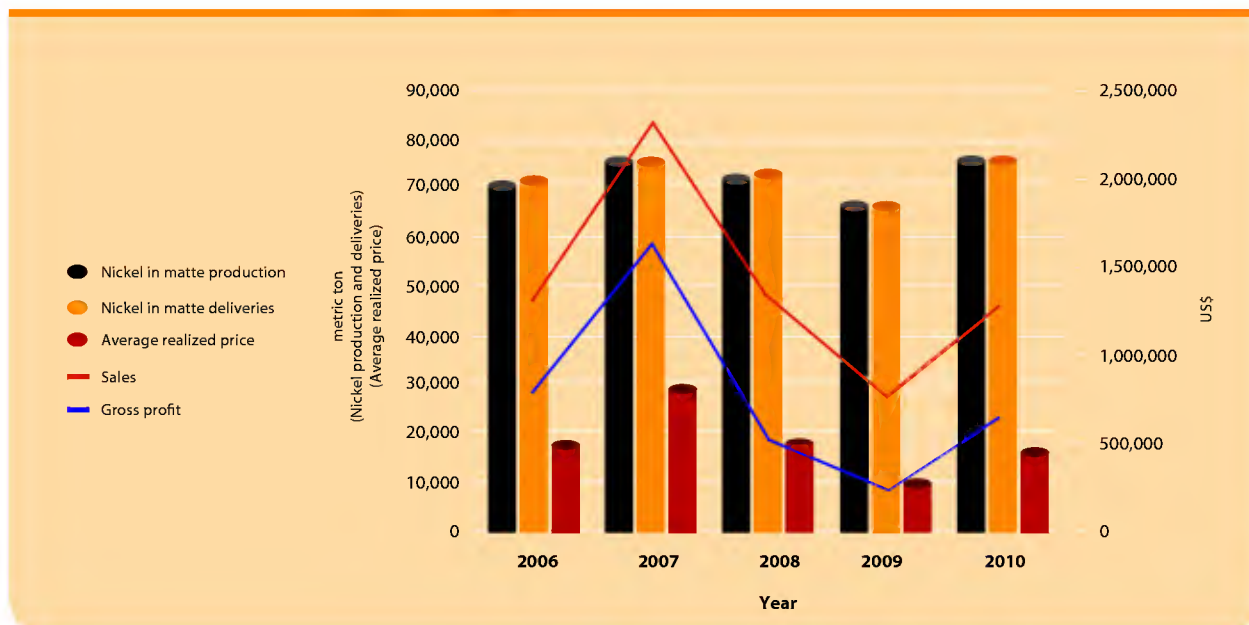
### Laba sebelum Biaya Bunga, Pajak, Depresiasi, Depleksi dan Amortisasi (EBITDA)

EBITDA meningkat signifikan sebesar 107% pada tahun 2010 menjadi AS\$677,6 juta dari AS\$327,8 juta pada tahun 2009. Peningkatan EBITDA pada tahun 2010 ini disebabkan oleh margin per unit nikel dalam matte terjual yang lebih tinggi dan volume penjualan yang lebih besar karena peningkatan produksi.

### Pendapatan dan Beban Lainnya

Pendapatan dan beban lainnya terdiri dari pendapatan keuangan, penyisihan untuk persediaan usang, beban keuangan, laba atau rugi selisih kurs, rugi pelepasan aset tetap, dan lainnya. Pembahasan lebih rinci atas setiap pos tersebut disajikan di bawah ini. Pada tahun 2010 kami membukukan beban lainnya, bersih sebesar AS\$15,0 juta dibandingkan dengan pendapatan lainnya, bersih sebesar AS\$4,8 juta pada tahun 2009.

### Nickel production, deliveries, average realized nickel price, sales and gross profit



### Selling, General and Administrative Expenses

In 2010, selling, general and administrative expenses rose to US\$27.7 million from US\$13.0 million in 2009. This increase was primarily due to an additional US\$14.0 million spent on management and technical assistance fees paid to Vale Canada, under an established formula. These fees relate to the realization of our projects, our financing needs, construction and operation of our facilities and the marketing of our products. All of PTI's nickel in matte is sold to Vale Canada and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. under "must-take agreements" for further processing at facilities in Asia to produce nickel for use in a wide range of applications. The marketing of finished nickel to customers – such as stainless steel mills and alloy steel producers – is carried out by Vale Canada's and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.'s sales forces. As a result of this arrangement, we do not incur any marketing and selling expenses.

### Earnings before Interest Expense, Tax, Depreciation, Depletion and Amortization (EBITDA)

Our EBITDA significantly increased by 107% in 2010 to US\$677.6 million from US\$327.8 million in 2009. The improvement in 2010 EBITDA was driven by higher margin per unit of nickel in matte sold and greater sales volume due to higher production.

### Other Expenses and Income

Other income and expenses consist of finance income, allowance for obsolete supplies, finance costs, gain or loss on currency translation adjustments, loss on disposal of property, plant and equipment and other miscellaneous items. Further discussion on each of these items is contained in the list below. In 2010, we recorded other expenses, net of US\$15.0 million compared to other income, net of US\$4.8 million in 2009.

(AS\$, dalam ribuan)	2010	2009	Δ (\$)	Δ (%)
Pendapatan / (beban) lainnya				
Pendapatan pembiayaan	737	358	379	106
Beban pembiayaan	(4)	(190)	186	(98)
Laba / (rugi) selisih kurs	10.351	(680)	11.031	(1.622)
Rugi pelepasan aset tetap	(1.529)	(1.182)	(347)	29
Penyisihan untuk persediaan usang, bersih	(1.201)	(2.872)	1.671	(58)
Lainnya, bersih	(23.385)	9.395	(32.780)	(349)
<b>Jumlah pendapatan / (beban) lainnya, bersih</b>	<b>(15.031)</b>	<b>4.829</b>	<b>(19.860)</b>	<b>(411)</b>

- **Pendapatan pembiayaan.** Pendapatan pembiayaan meningkat sebesar AS\$0,7 juta pada tahun 2010 dari AS\$0,4 juta pada tahun 2009, terutama disebabkan oleh rata-rata saldo deposito berjangka yang lebih tinggi selaras dengan peningkatan pendapatan.
- **Beban pembiayaan.** Beban pembiayaan turun sebesar AS\$0,2 juta disebabkan oleh saldo sewa pembiayaan yang lebih rendah pada tahun 2010 daripada tahun 2009. Tidak ada kewajiban sewa pembiayaan yang dibukukan oleh PTI per tanggal 31 Desember 2010. Seluruh beban pembiayaan Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior (SEFA) telah dikapitalisasi pada saldo pinjaman dan diamortisasi sampai akhir periode SEFA. Penjelasan lebih lanjut disajikan pada bagian Informasi Material tentang Investasi Hutang/Modal, Ekspansi, Divestasi, atau Restrukturisasi dalam Laporan Tahunan ini.



**Kegiatan rutin pemeriksaan harian memastikan keselamatan dan efisiensi operasi.**

**Daily maintenance checks ensure both safety and operation efficiency.**





(US\$, in thousands)	2010	2009	Δ (\$)	Δ (%)
<b>Other (expenses)/income</b>				
Finance income	737	358	379	106
Finance costs	(4)	(190)	186	(98)
Gain/(loss) on currency translation adjustments	10,351	(680)	11,031	(1,622)
Loss on disposal of property, plant and equipment	(1,529)	(1,182)	(347)	29
Allowance for obsolete supplies, net	(1,201)	(2,872)	1,671	(58)
Miscellaneous items, net	(23,385)	9,395	(32,780)	(349)
<b>Total other (expenses)/income, net</b>	<b>(15,031)</b>	<b>4,829</b>	<b>(19,860)</b>	<b>(411)</b>

- **Finance income.** Finance income rose to US\$0.7 million in 2010 from US\$0.4 million in 2009, mainly due to higher average time deposit balances in line with increased income.
- **Finance costs.** Finance costs decreased by US\$0.2 million due to lower financial lease balances in 2010 than in 2009. As at December 31, 2010, no obligation under finance leases was recorded by PTI. All of the finance costs related to the Senior Export Facility Agreement (SEFA) have been capitalized to the borrowings balance and amortized until end of the SEFA period. Please refer to the Material Information for Capital/Debt Investment, Expansion, Divestment, or Restructuring section in this Annual Report for further discussion about the SEFA.



- **Laba/(rugi) selisih kurs.** Pada tahun 2010, PTI membukukan laba selisih kurs sebesar AS\$10,4 juta dibandingkan dengan rugi sebesar AS\$0,7 juta pada tahun 2009. Ini terutama disebabkan oleh jumlah aset, terutama berupa pengembalian dana kelebihan pembayaran Pajak Penambahan Nilai (PPN) tahun-tahun sebelumnya, yang dinilai dalam denominasi Rupiah saat dollar AS relatif melemah terhadap Rupiah sepanjang tahun 2010.
- **Rugi pelepasan aset tetap.** Penghapus-bukuan aset tetap sedikit meningkat menjadi AS\$1,5 juta pada tahun 2010 dari AS\$1,2 juta pada tahun 2009. Penghapus-bukuan ditentukan berdasarkan hasil verifikasi fisik aset tahunan.
- **Penyisihan untuk bahan pembantu usang, bersih.** Penyisihan untuk bahan pembantu usang turun menjadi AS\$1,2 juta pada tahun 2010 dari AS\$2,9 juta pada tahun 2009. Penyisihan untuk persediaan usang dan persediaan barang perputaran lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan persediaan di masa depan.
- **Lainnya, bersih.** Pada tahun 2010 tercatat beban sebesar AS\$23,4 juta sedangkan pada tahun 2009 pendapatan sebesar AS\$9,4 juta. Perubahan signifikan ini terjadi karena beberapa faktor. Pada tahun 2009 kami membukukan penerimaan klaim asuransi sebesar AS\$26,2 juta dibandingkan dengan AS\$1,2 juta pada tahun 2010; peningkatan beban pajak yang terutama mencerminkan beban yang terkait dengan penilaian kurang bayar pajak penghasilan sebesar AS\$3,8 juta dan berbagai penilaian pajak sebesar AS\$3,7 juta; serta kenaikan beban riset dan pengembangan sebesar AS\$2,4 juta. Dampak ini sebagian diimbangi oleh penurunan biaya pesangon dan beban eksplorasi masing-masing sebesar AS\$3,3 juta dan AS\$2,4 juta.

#### Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak penghasilan kini dan tangguhan. Pajak penghasilan naik menjadi AS\$144,0 juta pada tahun 2010 dari AS\$66,3 juta pada tahun 2009. Peningkatan pajak penghasilan kini sebesar AS\$91,7 juta tersebut sebagian diimbangi dengan pengurangan sebesar AS\$14,0 juta pada pajak penghasilan tangguhan. Pajak penghasilan yang lebih tinggi selaras dengan kenaikan laba sebelum pajak penghasilan, yang meningkatkan laba kena pajak. Pada tahun 2010 laba kena pajak meningkat signifikan sebesar 146% dari tahun 2009, sedangkan tarif pajak penghasilan badan turun dari 28% pada tahun 2009 menjadi 25% pada tahun 2010. Pada tanggal 3 September 2008 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui perubahan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan yang kemudian ditanda-tangani oleh Presiden pada tanggal 23 September 2008. Salah satu keputusan perubahan ini menetapkan pajak penghasilan badan dengan tarif tetap sebesar 28% berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 dan selanjutnya diturunkan menjadi 25% pada tanggal 1 Januari 2010. PTI telah melakukan analisa untuk periode saat aset dan kewajiban pajak tangguhan akan dipulihkan dan telah menyesuaikan aset dan kewajiban pajak tangguhan sesuai dengan perubahan tarif dimaksud.

#### Laba Bersih

PTI membukukan laba bersih sebesar AS\$437,4 juta pada tahun 2010 dibandingkan dengan AS\$170,4 juta pada tahun 2009, meningkat sebesar 157%. Hasil tahun 2010 yang lebih baik ini disebabkan oleh rata-rata harga realisasi jual yang lebih tinggi dan volume penjualan yang lebih besar karena peningkatan produksi, sebagian diimbangi oleh pajak penghasilan yang lebih tinggi.

- **Gain/(loss) on currency translation adjustments.** In 2010, PTI recorded a gain on currency translation adjustment of US\$10.4 million compared to a US\$0.7 million loss in 2009. This was mainly due to a substantially higher level of assets, representing prior years' Value Added Tax (VAT) refund, valued in Indonesian rupiah while the U.S. dollar weakened relative to the Indonesian rupiah in 2010.
- **Loss on disposal of property, plant and equipment.** Property, plant and equipment write-offs slightly increased to US\$1.5 million in 2010 from US\$1.2 million in 2009. Write-offs are determined based on the results of annual physical assets verification.
- **Allowance for obsolete supplies, net.** The allowance for obsolete supplies decreased to US\$1.2 million in 2010 from US\$2.9 million in 2009. The allowance for obsolete and slow-moving inventory is determined on the basis of estimated future use of items.
- **Miscellaneous items, net.** In 2010, expenses of US\$23.4 million were reported while income of US\$9.4 million was reported in 2009. The significant change was due to several factors. In 2009 we reported receipt of an insurance claim in the amount of US\$26.2 million compared to US\$1.2 million reported in 2010; increase in tax expenses which mainly represent expenses related to 2008 corporate income tax underpayment assessments of US\$3.8 million and various tax assessments of US\$3.7 million; and an increase in research and development expenses of US\$2.4 million. These impacts were partially offset by the decrease in severance costs and exploration expenses of US\$3.3 million and US\$2.4 million respectively.

#### Income Taxes

Income tax expenses consist of current and deferred income tax expenses. Income tax expense rose to US\$144.0 million in 2010 from US\$66.3 million in 2009. An increase in current income tax expense of US\$91.7 million was partially offset by a US\$14.0 million decrease in deferred income tax. The higher current income tax expense is consistent with the increased earnings before income tax, which drove higher taxable profit. Taxable profit significantly increased by 175% in 2010 compared to 2009, meanwhile the corporate income tax rate declined from 28% in 2009 to 25% in 2010. On September 3, 2008 the House of Representatives approved amendments to the income tax law, which were signed into law by the President on September 23, 2008. One of these amendments stipulates that the income tax for corporations will be set at a flat rate of 28% beginning January 1, 2009 and further reduced to 25% on January 1, 2010. PTI has performed an analysis of the periods in which its deferred tax assets and liabilities will reverse and has valued its deferred tax assets and liabilities accordingly.

#### Net Earnings

PTI recorded net earnings of US\$437.4 million in 2010 compared to US\$170.4 million in 2009, a 157% increase. The improved 2010 result was driven by higher average realized selling price and greater sales volume due to higher production, partially offset by higher income tax expense.

## Aset

Total aset meningkat sebesar AS\$162,7 juta, atau 8%, karena peningkatan aset lancar dan aset tidak lancar, masing-masing sebesar AS\$82,5 juta dan AS\$80,2 juta. Pada tahun 2010, 32% dari total aset kami adalah dalam bentuk aset lancar dan 68% aset tidak lancar. Pada tahun 2009, 31% dari total aset kami adalah aset lancar dan 69% tidak lancar. Perubahan kecil dalam persentase aset lancar dan aset tidak lancar ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan saldo piutang usaha yang melebihi kenaikan aset tetap, dan diimbangi oleh penurunan piutang pajak, persediaan, dan biaya dibayar dimuka dan uang muka.

(AS\$, dalam ribuan)	2010	%	2009	%	Δ (\$)	Δ (%)
<b>ASET LANCAR</b>						
Kas dan setara kas	404.129	18,5	261.050	12,9	143.079	55
Piutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa	124.061	5,7	97.752	4,8	26.309	27
Piutang lainnya	10.893	0,5	8.310	0,4	2.583	31
Piutang pajak	63.858	2,9	132.695	6,5	(68.837)	(52)
Persediaan - nikel	35.287	1,6	35.584	1,8	(297)	(1)
Persediaan, bersih - bahan pembantu	66.699	3,0	82.065	4,0	(15.366)	(19)
Biaya dibayar di muka dan uang muka	6.768	0,3	11.780	0,6	(5.012)	(43)
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>711.695</b>	<b>32,5</b>	<b>629.236</b>	<b>31,0</b>	<b>82.459</b>	<b>13</b>

Kegiatan stripping di daerah tambang West Block.

Stripping activities in the West Block mining area.



### Assets

Total assets rose by US\$162.7 million, or 8%, due to an increase in current assets and non-current assets by US\$82.5 million and US\$80.2 million respectively. In 2010, 32% of our total assets were in the form of current assets and 68% were non-current assets. In 2009, 31% of our total assets were current and 69% were non-current. These slight changes in current and non-current assets percentages were driven mainly by higher cash and trade receivable balances which outweighed the increases in property, plant and equipment, and offset by lower taxes receivable, inventories, and prepaid expenses and advances.

(US\$, in thousands)	2010	%	2009	%	Δ (\$)	Δ (%)
<b>CURRENT ASSETS</b>						
Cash and cash equivalents	404,129	18.5	261,050	12.9	143,079	55
Trade receivables - related parties	124,061	5.7	97,752	4.8	26,309	27
Other receivables	10,893	0.5	8,310	0.4	2,583	31
Taxes receivable	63,858	2.9	132,695	6.5	(68,837)	(52)
Inventory - nickel	35,287	1.6	35,584	1.8	(297)	(1)
Inventory, net - supplies	66,699	3.0	82,065	4.0	(15,366)	(19)
Prepaid expenses and advances	6,768	0.3	11,780	0.6	(5,012)	(43)
<b>Total current assets</b>	<b>711,695</b>	<b>32.5</b>	<b>629,236</b>	<b>31.0</b>	<b>82,459</b>	<b>13</b>



(AS\$, dalam ribuan)	2010	%	2009	%	Δ (\$)	Δ (%)
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>						
Aset tetap, bersih	1.464.508	66,9	1.379.103	68,0	85.405	6
Aset lainnya	12.821	0,6	19.217	1,0	(6.396)	(33)
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.211	-	-	-	1.211	-
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>1.478.540</b>	<b>67,5</b>	<b>1.398.320</b>	<b>69,0</b>	<b>80.220</b>	<b>6</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.190.235</b>	<b>100,0</b>	<b>2.027.556</b>	<b>100,0</b>	<b>162.679</b>	<b>8</b>

**Aset Lancar.** Aset lancar per 31 Desember 2010 meningkat sebesar AS\$82,5 juta atau 13% dari 31 Desember 2009. Ini terutama karena peningkatan kas dan setara kas sebesar AS\$143,1 juta dan penurunan piutang usaha sebesar AS\$26,3 juta, diimbangi oleh pengurangan persediaan sebesar AS\$15,7 juta, penurunan biaya dibayar dimuka dan uang muka sebesar AS\$5,0 juta, dan piutang pajak yang lebih rendah AS\$68,8 juta.

- **Kas dan setara kas.** Pos ini terdiri dari kas dan rekening bank sebesar total AS\$6,0 juta dan setara kas AS\$398,1 juta dalam deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya. Komposisi kas dan setara kas berdasarkan mata uang disajikan dalam tabel di bawah ini. Rata-rata tingkat bunga deposito berjangka denominasi AS\$ adalah 0,20% dibandingkan dengan 0,23% pada tahun 2009, sedangkan rata-rata tingkat bunga deposito berjangka denominasi Rupiah adalah 6,5%, meningkat sedikit dari 6,0% pada tahun 2009. Total kas dan setara kas meningkat sebesar AS\$143,1 juta, yaitu dari AS\$261,0 juta pada tahun 2009 menjadi AS\$404,1 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan dari aktifitas operasi. Pembahasan lebih rinci mengenai kas dan setara kas disajikan pada bagian Arus Kas dalam Laporan Tahunan ini.

#### ARUS KAS DALAM LAPORAN TAHUNAN INI

(A\$, dalam ribuan)	2010	%	2009	%	Δ (\$)	Δ (%)
<b>Kas</b>	<b>23</b>	<b>0,0</b>	<b>37</b>	<b>0,0</b>	<b>(14)</b>	<b>(38)</b>
Bank						
Dollar A\$	3.816	0,9	2.511	1,0	1.305	52
Rupiah	2.158	0,6	1.842	0,7	316	17
<b>Jumlah Kas di Bank</b>	<b>5.974</b>	<b>1,5</b>	<b>4.353</b>	<b>1,7</b>	<b>1.621</b>	<b>37</b>
Deposito Berjangka						
Dollar A\$	398.090	98,5	256.621	98,3	141.469	55
Rupiah	42	0,0	39	0,0	3	8
<b>Jumlah Deposito Berjangka</b>	<b>398.132</b>	<b>98,5</b>	<b>256.660</b>	<b>98,3</b>	<b>141.472</b>	<b>55</b>
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>404.129</b>	<b>100,0</b>	<b>261.050</b>	<b>100,0</b>	<b>143.079</b>	<b>55</b>

- **Piutang usaha.** Piutang usaha per 31 Desember 2010 meningkat 27% atau AS\$26,3 juta dari tahun 2009, disebabkan oleh rata-rata harga jual piutang belum terbayar yang lebih tinggi, selaras dengan kenaikan harga nikel dunia, diimbangi oleh jumlah piutang belum terbayar yang lebih rendah. Seluruh produksi nikel dalam matte kami dijual berdasarkan kontrak penjualan "harus ambil" jangka panjang dalam denominasi dollar AS dengan dua pemegang saham terbesar kami, Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.; dengan demikian, seluruh piutang usaha kami terhutang pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. memiliki kepentingan strategis jangka panjang terhadap kesinambungan keberhasilan operasi kami. Pada umumnya piutang usaha kami dibayar dalam waktu 30 sampai 60 hari setelah pengapalan. Berdasarkan fakta ini tidak ada pencatatan untuk kemungkinan piutang tidak tertagih.

(US\$, in thousands)	2010	%	2009	%	Δ (\$)	Δ (%)
<b>NON-CURRENT ASSETS</b>						
Property, plant and equipment, net	1,464,508	66.9	1,379,103	68.0	85,405	6
Other assets	12,821	0.6	19,217	1.0	(6,396)	(33)
Restricted cash	1,211	-	-	-	1,211	-
<b>Total non-current assets</b>	<b>1,478,540</b>	<b>67.5</b>	<b>1,398,320</b>	<b>69.0</b>	<b>80,220</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>2,190,235</b>	<b>100.0</b>	<b>2,027,556</b>	<b>100.0</b>	<b>162,679</b>	<b>8</b>

**Current assets.** Current assets at December 31, 2010 were up US\$82.5 million or 13% from December 31, 2009. This occurred primarily because of an increase in cash and cash equivalents of US\$143.1 million and an increase in trade receivables of US\$26.3 million, offset by reduction in inventories of US\$15.7 million, a US\$5.0 million decrease in prepaid expenses and advances and lower taxes receivable by US\$68.8 million.

- **Cash and cash equivalents.** This item consists of cash and bank accounts amounting to US\$6.0 million and US\$398.1 million of cash equivalents in unrestricted time deposits. The composition of cash and cash equivalents based on currency is presented in the table below. The average interest rate of U.S. dollar time deposits for 2010 was 0.20% compared to 0.23% in 2009, while the average interest rate for rupiah time deposits was 6.5%, a slight increase from the 2009 rate of 6.0%. Total cash and cash equivalents increased by US\$143.1 million from US\$261.0 million in 2009 to US\$404.1 million in 2010, mainly due to the increase in sales from operational activities. Please refer to the Cash Flows section for detailed discussion of cash and cash equivalent movements.

#### COMPOSITION OF CASH AND CASH EQUIVALENTS

(US\$, in thousands)	2010	%	2009	%	Δ (\$)	Δ (%)
<b>Cash on Hand</b>	<b>23</b>	<b>0.0</b>	<b>37</b>	<b>0.0</b>	<b>(14)</b>	<b>(38)</b>
Cash in Banks						
US dollar	3,816	0.9	2,511	1.0	1,305	52
Rupiah	2,158	0.6	1,842	0.7	316	17
<b>Total Cash in Banks</b>	<b>5,974</b>	<b>1.5</b>	<b>4,353</b>	<b>1.7</b>	<b>1,621</b>	<b>37</b>
Time Deposits						
US dollar	398,090	98.5	256,621	98.3	141,469	55
Rupiah	42	0.0	39	0.0	3	8
<b>Total Time Deposits</b>	<b>398,132</b>	<b>98.5</b>	<b>256,660</b>	<b>98.3</b>	<b>141,472</b>	<b>55</b>
<b>Total Cash and Cash Equivalents</b>	<b>404,129</b>	<b>100.0</b>	<b>261,050</b>	<b>100.0</b>	<b>143,079</b>	<b>55</b>

- **Trade receivables.** Trade receivables at December 31, 2010 were up 27% or US\$26.3 million from 2009, due to a higher average sale price of the outstanding receivables, in line with higher global nickel prices, and offset by a lower quantity of outstanding receivables. All of our nickel in matte is sold under long-term, "must-take" U.S. dollar-denominated sales contracts with our two largest shareholders, Vale Canada and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.; accordingly, all of our trade receivables are due to related parties. Vale Canada and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. have long-term strategic interests in

- **Piutang lainnya.** Piutang lainnya meningkat sebesar AS\$2,6 juta, atau 31%, disebabkan oleh peningkatan piutang Dana Pensiun International Nickel Indonesia (DPI) sebesar AS\$1,6 juta, kenaikan piutang karyawan sebesar AS\$0,9 juta, dan sedikit kenaikan tagihan pada kontraktor, dan lain-lain sebesar AS\$0,1 juta.
- **Piutang pajak.** Piutang pajak turun sebesar AS\$68,8 juta, atau 52%, terutama disebabkan oleh kelebihan pembayaran Pajak penghasilan badan (PPH Badan) terkait tahun 2008 yang lebih rendah dibandingkan tahun 2009, sebagian diimbangi oleh piutang pajak dalam proses banding yang meningkat sebesar AS\$3,3 juta. Jumlah pajak dalam proses banding berasal dari keberatan atas penilaian PPN periode fiskal 2009 dan 2008 yang telah dibayar sebesar AS\$1,6 juta, dan keberatan atas penilaian PPh Badan tahun 2008 yang telah dibayar sebesar AS\$1,9 juta.
- **Persediaan, bersih.** Persediaan bersih untuk penyisihan persediaan usang turun sebesar AS\$15,7 juta atau 13% pada tahun 2010 dari tahun 2009, disebabkan oleh penurunan persediaan bahan pembantu sebesar AS\$15,4 juta dan persediaan nikel sebesar AS\$0,3 juta. Penurunan persediaan bahan pembantu terutama disebabkan oleh lebih rendahnya persediaan HSFO, HSD, ban, dan batu bara, diimbangi oleh persediaan sulfur yang lebih tinggi. Penurunan persediaan bahan pembantu ini juga disebabkan oleh berkurangnya persediaan dalam proses, sebagian diimbangi oleh peningkatan dalam persediaan nikel dalam matte. Penurunan persediaan dalam proses terutama disebabkan oleh jumlah yang lebih rendah diimbangi oleh harga pokok produksi per unit yang lebih tinggi, seperti dijelaskan pada bagian Biaya Produksi. Peningkatan persediaan nikel dalam matte terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dan harga pokok produksi per unit yang lebih tinggi.

Persediaan - Nikel	2010			2009		
	Kuantitas (dalam metrik ton)	Biaya/mt (AS\$)	Nilai (AS\$)	Kuantitas (dalam metrik ton)	Biaya/mt (AS\$)	Nilai (AS\$)
Persediaan dalam proses	11.083,04	2.494	27.639.635	13.915.44	2.250	31.305.345
Nikel dalam matte	683,13	11.194	7.646.874	532,33	8.038	4.278.764
<b>Jumlah persediaan - nikel</b>			<b>35.286.509</b>			<b>35.584.109</b>

- **Biaya dibayar dimuka dan uang muka.** Biaya dibayar dimuka dan uang muka turun sejumlah AS\$5,0 juta, atau 43%, karena penurunan biaya asuransi dibayar dimuka sebesar AS\$0,8 juta, dan penurunan pembayaran uang muka untuk kontraktor dan pemasok sebesar AS\$11,2 juta, diimbangi oleh re-klasifikasi uang muka jangka pendek untuk proyek Karebbe yang dibukukan sebagai aset lainnya pada tahun 2009. Penurunan pembayaran uang muka kepada kontraktor dan pemasok selaras dengan usaha-usaha kami untuk mengurangi pembayaran uang muka untuk memperbaiki arus kas.

**Aset tidak lancar.** Aset tidak lancar meningkat sebesar AS\$80,2 juta, didorong oleh kenaikan bersih dalam aset tetap sebesar AS\$85,4 juta dan kenaikan kas terbatas sejumlah AS\$1,2 juta, diimbangi oleh penurunan aset lainnya sebesar AS\$6,4 juta.

- **Aset tetap, bersih.** Aset tetap meningkat AS\$85,4 juta, disebabkan oleh perolehan modal pada tahun 2010 sebesar AS\$183,2 juta yang tampak dalam kenaikan aset tetap dalam penyelesaian. Angka ini sebagian diimbangi oleh depresiasi pada tahun 2010 sebesar AS\$96,2 juta, dan pengurangan bersih aset tetap sebesar AS\$1,5 juta. Informasi tentang kenaikan aset tetap dalam



the continuing success of our operations. Normally our trade receivables are collected within 30-to-60 days of shipment. Based on these facts, no accounts were determined to be uncollectible.

- **Other receivables.** Other receivables increased by US\$2.6 million, or 31%, due to an increase in receivables from Dana Pensiun International Nickel Indonesia (DPI) of US\$1.6 million, an increase in employee receivables of US\$0.9 million and a slight increase in recoveries from contractors and others of US\$0.1 million.
- **Taxes receivable.** Taxes receivable decreased by US\$68.8 million, or 52%. This is attributable to lower 2008 Corporate Income Tax (CIT) overpayment by US\$71.7 million and US\$0.4 million lower claimable 2010 VAT compared to 2009, and partially offset by higher receivable for taxes in dispute by US\$3.3 million. The tax in dispute represents an objection to VAT assessment paid of US\$1.6 million for 2009 and 2008 fiscal periods and objection for 2008 CIT assessment paid of US\$1.9 million.
- **Inventory, net.** Inventory net of allowance for obsolete supplies fell by US\$15.7 million or 13% in 2010 from the 2009 level, due to a decrease in supplies inventories of US\$15.4 million and in nickel inventories of US\$0.3 million. Supplies inventories declined mainly due to lower HSFO inventory, lower HSD inventory, lower tire stocks and lower coal inventory, offset by higher sulphur inventory. The decrease in nickel inventories was driven by lower in-process inventories, partially offset by higher nickel in matte inventory. The decrease in in-process inventories was mainly due to lower quantity offset by higher unit cost of production, as explained in the Cost of Production section. The increase in nickel in matte was mainly due to the higher unit cost of production, and higher quantity.

Inventory - Nickel	2010			2009		
	Quantity (in metric ton)	Cost/mt (US\$)	Value (US\$)	Quantity (in metric ton)	Cost/mt (US\$)	Value (US\$)
In-process inventory	11,083.04	2,494	27,639,635	13,915.44	2,250	31,305,345
Nickel in matte	683.13	11,194	7,646,874	532.33	8,038	4,278,764
<b>Total inventory - nickel</b>			<b>35,286,509</b>			<b>35,584,109</b>

- **Prepaid expenses and advances.** Prepaid expenses and advances fell by US\$5.0 million, or 43%, due to lower advances to contractors and suppliers by US\$11.2 million and lower prepaid insurance by US\$0.8 million, offset by US\$7.0 million reclassification of the short-term portion of an advance for the Karebbe project which was reported as other assets in 2009. Lower advances to contractors and suppliers was in line with our efforts to reduce advance payments to improve cash flows.

**Non-current assets.** Non-current assets were up by US\$80.2 million, driven by a net increase in property, plant and equipment of US\$85.4 million and an increase in restricted cash of US\$1.2 million, offset by decrease in other assets by US\$6.4 million.

- **Property, plant and equipment, net.** Property, plant and equipment (PPE) rose by US\$85.4 million, driven by the 2010 capital acquisition of US\$183.2 million, as shown through increased construction in progress. This was

penyelesaian disajikan dalam pembahasan mengenai proyek-proyek barang modal utama pada bagian Investasi Modal. Pengurangan aset tetap ditentukan berdasarkan hasil verifikasi tahunan atas fisik aset dan keputusan manajemen.

- **Aset lainnya.** Aset lainnya turun AS\$6,4 juta, atau 33%, terutama disebabkan re-klasifikasi pembayaran uang muka jangka pendek untuk proyek Karebbe sebesar AS\$7,0 juta menjadi pembayaran di muka dan uang muka, diimbangi oleh peningkatan pinjaman jangka panjang untuk karyawan sebesar AS\$0,6 juta.
- **Kas yang dibatasi penggunaannya.** Saldo kas yang dibatasi penggunaannya sebesar AS\$1,2 juta pada tahun 2010 merupakan saldo rekening pada Union Bank N.A. yang ditujukan untuk pembayaran hutang pokok dan bungapinjaman. Rekening ini dibuka untuk memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman terkait Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior (SEFA) antara PTI, Mizuho Corporate Bank Ltd. dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. untuk proyek Karebbe.

#### Kewajiban

Kewajiban PTI pada tahun 2010 meningkat sebesar AS\$64,1 juta, atau 14%, terutama disebabkan oleh kenaikan kewajiban lancar sebesar AS\$71,1 juta diimbangi oleh penurunan kewajiban tidak lancar sebesar AS\$7,0 juta. Pada tahun 2010, proporsi kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar adalah 31% dan 69%, sedangkan pada tahun 2009 proporsi kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar adalah 19% dan 81%.



**'Hot seat shift change' merupakan prosedur pergantian karyawan sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk meningkatkan efisiensi.**

**'Hot seat shift change' is a regular shift procedure executed by employees in accordance with the defined schedule to improve efficiency.**



partially offset by 2010 depreciation of US\$96.2 million, and PPE net disposals of US\$1.5 million. Please refer to our major capital projects discussion in the Capital Investment section for information about the increase in construction in progress. PPE disposals were determined based on the result of annual physical assets verification and management's decision.

- **Other assets.** Other assets fell by US\$6.4 million, or 33%, mainly driven by a reclassification of the short-term portion of the Karebbe project advance payment in the amount of US\$7.0 million to prepaid expenses and advances, offset by higher long-term loans to employees by US\$0.6 million.
- **Restricted cash.** The restricted cash balance of US\$1.2 million in 2010 represented the account with Union Bank N.A. which was intended for payment of loan principal and interest payable. This account was established in order to fulfill the loan agreement requirements related to the Senior Export Facility Agreement between PTI, Mizuho Corporate Bank Ltd. and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. for the Karebbe project.

#### Liabilities

PTI's liabilities in 2010 increased by US\$64.1 million, or 14%, mainly driven by an increase in current liabilities of US\$71.1 million, offset by decrease in non-current liabilities of US\$7.0 million. In 2010, the proportions of current and non-current liabilities were 31% and 69% respectively, while in 2009 the proportions of current and non-current liabilities were 19% and 81% respectively.



(AS\$, dalam ribuan)	2010	%	2009	%	Δ (\$)	Δ (%)
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>						
Hutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa	8.556	1,7	4.307	1,0	4.249	99
Hutang usaha - pihak ketiga	32.864	6,4	28.597	6,4	4.267	15
Beban akrual	43.069	8,5	29.969	6,7	13.100	44
Hutang pajak	49.416	9,7	8.712	1,9	40.704	467
Bagian jangka pendek kewajiban jangka panjang - sewa pembiayaan	-	-	1.708	0,4	(1.708)	(100)
Kewajiban lancar lainnya	24.192	4,7	13.669	3,1	10.523	77
<b>Jumlah kewajiban lancar</b>	<b>158.097</b>	<b>31,0</b>	<b>86.962</b>	<b>19,5</b>	<b>71.135</b>	<b>82</b>
<b>KEWAJIBAN TIDAK LANCAR</b>						
Kewajiban pajak penghasilan tangguhan	171.931	33,7	182.762	41,0	(10.831)	(6)
Kewajiban jangka panjang - pinjaman	140.561	27,5	139.556	31,3	1.005	1
Kewajiban imbalan kerja	3.235	0,6	2.452	0,5	783	32
Kewajiban penghentian pengoperasian aset	36.571	7,2	34.518	7,7	2.053	6
<b>Jumlah kewajiban tidak lancar</b>	<b>352.298</b>	<b>69,0</b>	<b>359.288</b>	<b>80,5</b>	<b>(6.990)</b>	<b>(2)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>510.395</b>	<b>100,0</b>	<b>446.250</b>	<b>100,0</b>	<b>64.145</b>	<b>14</b>

**Kewajiban Lancar.** Proporsi kewajiban lancar terhadap jumlah kewajiban pada tahun 2010 adalah 31%, lebih besar dari 19% pada tahun 2009 disebabkan oleh kenaikan signifikan pada hutang pajak, hutang usaha, beban akrual, dan kewajiban lancar lainnya, diimbangi oleh penurunan dalam sewa pembiayaan.

- **Hutang usaha.** Hutang usaha naik sebesar AS\$8,5 juta, atau 26%, disebabkan oleh kenaikan hutang usaha pada pihak ketiga sebesar AS\$4,3 juta, dan kenaikan hutang usaha pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar AS\$4,2 juta. Kenaikan hutang usaha pada pihak ketiga terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga HSFO, HSD, dan komoditi berjumlah besar yang diperlukan untuk produksi. Kenaikan hutang usaha pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa terutama disebabkan oleh kenaikan hutang biaya jasa bantuan manajemen dan teknis kepada Vale Canada.
- **Beban akrual.** Kenaikan sebesar AS\$13,1 juta pada beban akrual disebabkan oleh pencatatan akrual yang lebih tinggi AS\$6,2 juta pada barang modal, pencatatan akrual yang lebih tinggi masing-masing AS\$4,2 juta dan AS\$0,5 juta pada royalti dan retribusi air, pencatatan akrual hutang bunga Proyek Karebbe sebesar AS\$1,6 juta, dan pencatatan yang lebih tinggi AS\$0,6 juta pada barang dan jasa. Peningkatan jumlah beban akrual konsisten dengan peningkatan belanja barang modal, peningkatan produksi dan kenaikan rata-rata harga realisasi nikel.
- **Hutang pajak.** Pada tahun 2010, hutang pajak meningkat sebesar AS\$40,7 juta terutama disebabkan oleh hutang PPh Badan sebesar AS\$43,9 juta dibandingkan dengan AS\$4,8 juta pada tahun 2009 disebabkan oleh laba sebelum pajak yang lebih tinggi.
- **Sewa pembiayaan.** Tidak ada catatan kewajiban pada sewa pembiayaan per 31 Desember 2010 karena kewajiban pembayaran pokok telah dibayar lunas pada tahun 2010 dan tidak ada sewa pembiayaan baru sepanjang tahun 2010.
- **Kewajiban lancar lainnya.** Kewajiban lancar lainnya naik sebesar AS\$10,5 juta dari AS\$13,7 juta pada tahun 2009 menjadi AS\$24,2 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh pembayaran retensi AS\$9,9 juta kepada Kajima, pemasok pembangunan proyek Karebbe, sebesar 10% dari setiap pembayaran yang dilakukan kepada Kajima yang akan dilunasi pada saat penyelesaian proyek Karebbe.

(US\$, in thousands)	2010	%	2009	%	Δ (\$)	Δ (%)
<b>CURRENT LIABILITIES</b>						
Trade payables - related parties	8,556	1.7	4,307	1.0	4,249	99
Trade payables - third parties	32,864	6.4	28,597	6.4	4,267	15
Accrued expenses	43,069	8.5	29,969	6.7	13,100	44
Taxes payable	49,416	9.7	8,712	1.9	40,704	467
Current maturities of long term liabilities - finance leases	-	-	1,708	0.4	(1,708)	(100)
Other current liabilities	24,192	4.7	13,669	3.1	10,523	77
<b>Total current liabilities</b>	<b>158,097</b>	<b>31.0</b>	<b>86,962</b>	<b>19.5</b>	<b>71,135</b>	<b>82</b>
<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>						
Deferred income tax liabilities	171,931	33.7	182,762	41.0	(10,831)	(6)
Long term liability - Borrowings	140,561	27.5	139,556	31.3	1,005	1
Employee benefits liability	3,235	0.6	2,452	0.5	783	32
Asset retirement obligations	36,571	7.2	34,518	7.7	2,053	6
<b>Total non-current liabilities</b>	<b>352,298</b>	<b>69.0</b>	<b>359,288</b>	<b>80.5</b>	<b>(6,990)</b>	<b>(2)</b>
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>510,395</b>	<b>100.0</b>	<b>446,250</b>	<b>100.0</b>	<b>64,145</b>	<b>14</b>

**Current liabilities.** The higher proportion of current liabilities in 2010 of 31% to the total liabilities, compared 19% in 2009 was due to the significant increases in taxes payable, trade payables, accrued expenses and other current liabilities, offset by a decrease in finance leases.

- **Trade payables.** Trade payables rose by US\$8.5 million, or 26%, driven by an increase in trade payables to third parties of US\$4.3 million, and higher payables to related parties by US\$4.2 million. Higher trade payable to third parties was mainly influenced by higher prices of HSFO, HSD and major bulk commodities required for production. Higher payables to related parties were mainly due to an increase in outstanding management and technical assistance fees payable to Vale Canada.
- **Accrued expenses.** An increase of US\$13.1 million in accrued expenses resulted from higher accruals for capital items by US\$6.2 million, higher accruals for royalties and water levies of US\$4.2 million and US\$0.5 million respectively, US\$1.6 million accrued interest on the Karebbe loan and US\$0.6 million increase in goods and services accruals. The increase in total accrued expenses was consistent with higher capital acquisition, production and the increase in average realized nickel price.
- **Taxes payable.** An increase of US\$40.7 million taxes payable is mainly due to 2010 CIT payable of US\$43.9 million compared to US\$4.8 million in 2009 as a result of higher earnings before tax.
- **Finance leases.** No obligation under finance leases recorded at December 31, 2010, as the principal payment obligations have been fully paid during 2010. No new finance leases were entered into during 2010.
- **Other current liabilities.** Other current liabilities increased by US\$10.5 million from US\$13.7 million in 2009 to US\$24.2 million in 2010. This was mainly due to US\$9.9 million retention payments due to Kajima, a supplier for the Karebbe project construction, being 10% of each payment made to Kajima which will be settled upon completion of the Karebbe project.

**Kewajiban tidak lancar.** Kewajiban tidak lancar turun 2%, yaitu sebesar AS\$7,0 juta, terutama disebabkan oleh penurunan kewajiban pajak penghasilan tanggungan, diimbangi oleh kenaikan pada kewajiban penghentian pengoperasian aset; kenaikan pinjaman jangka panjang yang disebabkan oleh penurunan biaya penerbitan hutang tanpa amortisasi dan peningkatan kewajiban imbalan kerja.

- **Kewajiban pajak penghasilan tanggungan.** Penurunan pajak penghasilan tanggungan terutama disebabkan oleh selisih waktu antara depresiasi pajak dan akuntansi atas aset tetap, dan juga oleh kenaikan selisih waktu dari akrual/penyisihan.
- **Kewajiban jangka panjang – Pinjaman.** Kewajiban jangka panjang mencerminkan penarikan pertama pinjaman SEFA untuk mendanai proyek Karebbe. Analisa rinci tentang fasilitas ini disajikan pada bagian Likuiditas dan Kebijakan Struktur Modal pada Laporan Tahunan ini. Saldo pinjaman jangka panjang meningkat AS\$1,0 juta karena biaya yang lebih rendah dari penerbitan hutang yang belum diamortisasi berupa premi Asuransi Investasi dan Ekspor Nippon (NEXI) dan biaya jasa dimuka, yang dikapitalisasi pada saldo pinjaman.

PTI telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" sejak 1 Januari 2010. Dalam mengimplementasikan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006), PTI mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam aset dan kewajiban keuangan. Kewajiban jangka panjang - pinjaman kami, diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada nilai buku dikurangi biaya amortisasi.

- **Kewajiban imbalan kerja.** Kewajiban imbalan kerja terdiri dari imbalan kesehatan pasca kerja dan imbalan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. PTI memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. Kep-434/KM.17/1997 tanggal 31 Juli 1997 yang diumumkan dalam Lembaran Negara No. 73/1997 tanggal 12 September 12 untuk mendirikan Dana Pensiun International Nickel Indonesia, dana pensiun yang terpisah secara hukum yang membayarkan manfaat pasti atas pensiun, cacat atau kematian kepada karyawan yang telah memenuhi masa kerja tertentu. Saldo tahun 2010 adalah AS\$3,2 juta, sedikit lebih tinggi dari saldo AS\$2,5 juta pada tahun 2009.
- **Kewajiban penghentian pengoperasian aset.** Kewajiban penghentian pengoperasian aset merupakan kewajiban hukum yang dikaitkan dengan penghentian pengoperasian aset berwujud jangka panjang yang dihasilkan dari akuisisi, konstruksi atau pengembangan dan/atau operasi normal aset jangka panjang. Kewajiban penghentian pengoperasian aset yang lebih tinggi pada tahun 2010 disebabkan oleh tambahan biaya penambahan sepanjang tahun tersebut sebesar AS\$2,1 juta.
- **Transaksi derivatif**  
PTI tidak melakukan transaksi derivatif pada tahun 2010 atau 2009 dan tidak memiliki kontrak berjangka per 31 Desember 2010 atau 31 Desember 2009.

## Ekuitas

Jumlah ekuitas meningkat sebesar AS\$98,5 juta disebabkan oleh laba bersih tahun 2010 sebesar AS\$437,4 juta. Jumlah ini sebagian diimbangi oleh pembayaran dividen pada tahun berjalan sebesar AS\$338,8 juta. Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No. 1239/87/DJB/2010 tanggal 6 Mei 2010 untuk wilayah Sorowako dan No. 1240/87/DJB/2010 tanggal 6 Mei 2010 untuk wilayah Pomalaa, sejumlah AS\$7,5 juta dari cadangan jaminan reklamasi telah dipindahkan pada saldo laba ditahan tahun 2010. Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, PTI telah membentuk

**Non-current liabilities.** Non-current liabilities fell US\$7.0 million, or 2%, primarily due to a decrease in deferred tax liabilities, offset by an increase in asset retirement obligation, an increase in long-term borrowing due to lower unamortized debt issuance cost and an increase in employee benefits liability.

- **Deferred income tax liabilities.** The decrease in deferred tax liabilities mainly resulted from a timing difference between tax and accounting depreciation for property, plant and equipment, as well as an increase in timing difference from accruals/provision.
- **Long-term liability – Borrowings.** The long-term borrowings reflect the first drawdown of the SEFA loan for financing the Karebbe project. Please refer to the Capital Structure, Policy and Liquidity section and Material Information for Capital/Debt Investment, Expansion, Divestment or Restructuring section for detailed analysis and discussion about this facility. The balance of the long-term borrowing increased by US\$1.0 million due to a lower unamortized debt issuance cost of Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) premium and upfront fee, which were capitalized to the borrowing balance.

PTI has implemented Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) 50 (Revised 2006) "Financial Instruments: Presentation and Disclosures" and SFAS 55 (Revised 2006) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" since January 1, 2010. In implementing SFAS 50 (Revised 2006) and SFAS 55 (Revised 2006), PTI classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities. Our long-term borrowings are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

- **Employee benefits liability.** The employee benefits liability consists of post-employment medical benefits and benefits in relation to the labour law. PTI received approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. Kep-434/KM.17/1997 dated July 31, 1997, as published in State Gazette No. 73/1997 dated September 12, 1997, to establish Dana Pensiun International Nickel Indonesia, a separate trustee administered pension fund, from which all employees, after serving a qualifying period, are entitled to a defined benefit on retirement, disability or death. The 2010 balance was US\$3.2 million, marginally higher than the 2009 balance of US\$2.5 million.
- **Asset retirement obligation.** The asset retirement obligation provides for legal obligations associated with the retirement of a tangible long-lived asset that results from the acquisition, construction or development and/or the normal operation of a long-lived asset. The higher asset retirement obligation in 2010 was due to additional accretion expense during the year of US\$2.1 million.
- **Derivative transactions**  
PTI did not undertake any derivative transactions in 2010 or 2009 and did not have any outstanding futures contracts as at December 31, 2010 or December 31, 2009.

### Equity

Total equity increased by US\$98.5 million due to 2010 net earnings of US\$437.4 million. This was partially offset by dividends paid during the year of US\$338.8 million. Based on Decision Letters of the Directorate General of Mineral, Coal and Geothermal No. 1239/87/DJB/2010 dated May 6, 2010 for the Sorowako area and

cadangan minimum sebesar 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor sebesar AS\$5,34 juta, berdasarkan jumlah modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp248.408.468.000 (nilai penuh).

### Arus Kas

(AS\$, dalam ribuan)	2010	2009	Δ (\$)
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk):			
Aktivitas Operasional	640.844	206.453	434.391
Aktivitas Investasi	(153.108)	(137.927)	(15.181)
Aktivitas Pendanaan	(344.657)	26.417	(371.074)
Kenaikan bersih Kas dan Setara Kas	143.079	94.943	-
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	261.050	166.107	-
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	404.129	261.050	-

**Arus kas dari aktivitas operasional.** Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebelum belanja barang modal adalah AS\$640,8 juta pada tahun 2010 dibandingkan dengan AS\$206,5 juta pada tahun 2009. Perubahan terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar AS\$523,2 juta, kenaikan penerimaan lainnya sebesar AS\$109,4 juta, dan kenaikan pembayaran royalti, retribusi air dan pengembangan masyarakat sebesar AS\$6,9 juta; sebagian diimbangi oleh kenaikan pembayaran kepada pemasok sebesar AS\$148,6 juta, kenaikan pembayaran pajak penghasilan perseroan sebesar AS\$47,7 juta, dan kenaikan pembayaran kepada karyawan sebesar AS\$9,3 juta, dibandingkan dengan tahun 2009.

Padatahun 2010 penerimaan lainnya terutama terdiri dari penerimaan pengembalian pajak penghasilan sebesar AS\$66,3 juta, penerimaan pengembalian PPN sebesar AS\$69,3 juta, dan pendapatan sewa pembiayaan, sedangkan pada tahun 2009 penerimaan lainnya terutama terdiri dari klaim asuransi sebesar AS\$26,2 juta.





No. 1240/87/DJB/2010 dated May 6, 2010 for the Pomalaa area, US\$7.5 million was transferred during 2010 from reclamation guarantee reserve to retained earnings. In accordance with Indonesian Company Law No. 40/2007, PTI has set up a reserve amounting to a minimum of 20% of its issued and paid-up capital of US\$5.34 million, based on the issued and paid-up capital of IDR248,408,468,000 (full amount).

#### Cash Flows

Cash Flows (US\$, in thousands)	2010	2009	Δ (\$)
Net cash flows provided from (used for):			
Operating activities	640,844	206,453	434,391
Investing activities	(153,108)	(137,927)	(15,181)
Financing activities	(344,657)	26,417	(371,074)
Net Increase in Cash and Cash Equivalents	143,079	94,943	-
Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	261,050	166,107	-
Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	404,129	261,050	-

**Cash flows from operating activities.** Cash provided from operating activities, but before capital expenditures, was US\$640.8 million in 2010 compared to US\$206.5 million in 2009. The change was mainly due to a US\$523.2 million increase in cash receipts from customers, a US\$109.4 million increase in other receipts, and a US\$6.9 million decrease in payments for royalties, water levies and community development. This was partially offset by a US\$148.6 million increase in payments to suppliers, a US\$47.7 million increase in corporate tax payments and a US\$9.3 million increase in payments to employees, compared to 2009.

In 2010, other receipts consisted primarily of the corporate income tax refund of US\$66.3 million, a receipt of VAT refund of US\$69.3 million and finance income, while in 2009 other receipts consisted primarily of an insurance claim of US\$26.2 million.



**Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi.** Belanja barang modal kas naik menjadi AS\$153,1 juta pada tahun 2010 dari AS\$137,9 juta pada tahun 2009. Belanja barang modal utama mencakup Proyek Karebbe, tahap pelaksanaan pembangunan tanur nomor dua, pembelian peralatan, penggantian peralatan berat dan pengembangan tambang, yang secara total meliputi 89% dari jumlah belanja barang modal kas. Tidak ada aset tetap yang dibeli dengan sewa pembiayaan pada tahun 2010 and 2009.

**Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan.** Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah AS\$344,7 juta pada tahun 2010 dibandingkan dengan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar AS\$26,4 juta pada tahun 2009. Perubahan signifikan ini terutama disebabkan oleh pembayaran dividen yang lebih tinggi sebesar AS\$231,9 juta (2010: AS\$338,8 juta, 2009: AS\$106,9 juta), dan penerimaan penarikan pertama pada tahun 2009 dari pinjaman SEFA sebesar AS\$150 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan memperoleh dampak positif dari pembayaran beban pinjaman, sewa pembiayaan, dan pembayaran bunga sewa pembiayaan pada tahun 2010 yang lebih rendah sejumlah AS\$10,8 juta daripada tahun 2009.

Semua faktor arus kas di atas menjelaskan peningkatan saldo kas dan setara kas sebesar AS\$143,1 juta menjadi AS\$404,1 juta pada akhir tahun 2010 dari AS\$261,0 juta pada akhir tahun 2009.

Laporan arus kas tahun 2010 mencakup transaksi non-kas berupa beban pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tetap dalam penyelesaian sebesar AS\$7,5 juta (2009: Nihil).

### Imbal Hasil dan Rasio Keuangan

Imbal hasil dan rasio-rasio keuangan PTI pada tahun 2010 lebih kuat daripada tahun 2009, secara umum disebabkan oleh peningkatan produksi dan rata-rata harga realisasi nikel yang tinggi pada tahun 2010.

	2010	2009
<b>Rasio Profitabilitas</b>		
Laba kotor/penjualan	0,49	0,32
Laba operasi/penjualan	0,47	0,30
Laba bersih/penjualan	0,34	0,22
Laba bersih/jumlah aset	0,20	0,08
Laba bersih/ekuitas	0,26	0,11
Tingkat pengembalian rata-rata modal (%)	33%	15%
Laba bersih per saham (AS\$/saham)	0,04	0,02
<b>Rasio Likuiditas</b>		
Aset lancar/kewajiban lancar	4,50	7,24
(Aset lancar – kewajiban lancar)/Jumlah aset	0,25	0,27
<b>Analisa struktur modal hutang/rasio hutang</b>		
Kewajiban/ekuitas	0,30	0,28
Kewajiban/aset	0,23	0,22
Hutang/jumlah aset	0,06	0,07
Hutang/jumlah ekuitas	0,08	0,09
Hutang/EBITDA	0,21	0,43
Hutang/nilai perusahaan	0,03	0,04
Arus kas dari operasi/jumlah hutang	4,56	1,46
Hutang/( arus kas dari operasi dikurangi dividen)	0,47	1,42

**Cash flows used for investing activities.** Cash capital spending increased to US\$153.1 million in 2010 from US\$137.9 million in 2009. Major capital spending involved the Karebbe project, furnace number two rebuild implementation phase, equipment refurbishment, heavy equipment replacement and mine development, which in total constituted 89% of total cash capital spending. There was no property, plant and equipment acquired through finance leases in 2010 and 2009.

**Cash flows used for financing activities.** Cash used for financing activities was US\$344.7 million in 2010 compared with the cash inflow of US\$26.4 million in 2009. This significant movement was primarily due to an increase in dividend payments by US\$231.9 million (2010: US\$338.8 million, 2009: US\$106.9 million), and the receipt in 2009 of the first drawdown of the SEFA loan in the amount of US\$150 million. Our cash flow used for financing activities was favorably impacted by lower payments for finance charges, finance leases and interest on finance leases that were US\$10.8 million less in total in 2010 than in 2009.

All of the above factors explain the US\$143.1 million increase in the cash and cash equivalents balance to US\$404.1 million at year-end 2010 from US\$261.0 million at year-end 2009.

Included in the 2010 statements of cash flows were non-cash transactions, being the finance charges capitalized into construction in progress, amounting to US\$7.5 million (2009: Nil).

#### Financial Returns and Ratios

PTI's financial returns and ratios were stronger in 2010 compared to 2009, generally due to an increase in production and high nickel average realized price in 2010.

	2010	2009
<b>Profitability Ratios</b>		
Gross profit/sales	0.49	0.32
Operating profit/sales	0.47	0.30
Net earnings/sales	0.34	0.22
Net earnings/total assets	0.20	0.08
Net earnings/equity	0.26	0.11
Return on average capital employed (%)	33%	15%
Earnings per share (US\$/share)	0.04	0.02
<b>Liquidity Ratios</b>		
Current assets/current liabilities	4.50	7.24
(Current assets - current liabilities)/Total assets	0.25	0.27
<b>Capital Structure Analysis/Financial Leverage Ratios</b>		
Liabilities/equity	0.30	0.28
Liabilities/assets	0.23	0.22

	2010	2009
<b>Rasio Dividen</b>		
Dividen/laba bersih	0,77	0,63
Dividen per saham/harga saham	0,06	0,03
<b>Rasio Pemanfaatan Arus Kas</b>		
Arus kas dari operasional/penjualan	0,50	0,27
Arus kas dari operasional/belanja barang modal	3,50	1,48
Arus kas dari operasional/dividen	3,22	1,88
<b>Rasio Analisa Pasar Modal</b>		
Kapitalisasi pasar (AS\$ juta)	5.382	3.818
Nilai perusahaan (AS\$ juta)	5.119	3.698
Harga terhadap nilai buku (kali)	3,20	2,41

PTI dapat memanfaatkan perbaikan dan pemulihan ekonomi dunia pada tahun 2010 untuk mencapai rasio-rasio keuangan yang sangat positif, termasuk tingkat pengembalian aset 20%, tingkat pengembalian ekuitas 26% dan tingkat pengembalian rata-rata modal 33% pada tahun 2010. Rasio-rasio ini lebih tinggi daripada tingkat pengembalian aset 8%, tingkat pengembalian ekuitas 11% dan tingkat pengembalian rata-rata modal 15% pada tahun 2009. Pencapaian hasil-hasil keuangan yang lebih tinggi ini disebabkan oleh peningkatan pengiriman serta kenaikan harga nikel yang berdampak signifikan terhadap pendapatan perseroan.

PTI memiliki satu kelas saham, dan sebagai hasil dari pemecahan nilai nominal saham 1:10 yang disetujui pemegang saham pada tanggal 17 Desember 2007 dan berlaku efektif pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Januari 2008, PTI saat ini memiliki 9.936.338.720 saham yang dikeluarkan dan beredar. Laba per lembar saham adalah AS\$0,04 pada tahun 2010 dibandingkan dengan AS\$0,02 pada tahun 2009.

Harga saham PTI per akhir tahun 2010 meningkat 34% menjadi Rp4.875 dari Rp3.650 pada akhir tahun 2009, yang menyebabkan rasio harga pasar berbanding nilai buku naik 33%, dari 2,41 pada tahun 2009 menjadi 3,20 pada tahun 2010, serta peningkatan kapitalisasi pasar sebesar 41% menjadi AS\$5,4 milyar pada tahun 2010 dari AS\$3,8 milyar pada tahun sebelumnya. Nilai perusahaan PTI naik menjadi AS\$5,1 milyar pada tahun 2010 dari AS\$3,7 milyar pada tahun 2009, terutama disebabkan oleh harga saham yang lebih tinggi, sebagian diimbangi oleh kenaikan pada kas dan setara kas. Selain itu, nilai tahun 2010 dipengaruhi secara positif oleh penguatan rupiah terhadap dollar AS. Volume perdagangan saham kami turun 4% dari 4,5 milyar lembar saham (rata-rata harian 18,4 juta lembar saham) pada tahun 2009 menjadi 4,3 milyar saham (rata-rata harian 17,6 juta lembar saham) pada tahun 2010.

Rasio lancar per 31 Desember 2010 adalah 4,50, turun 34% dari 7,24 pada tahun 2009, disebabkan oleh kenaikan signifikan sebesar 82% dari kewajiban lancar yang melebihi kenaikan 13% pada aset lancar. Peningkatan kewajiban lancar disebabkan oleh kenaikan hutang usaha, hutang pajak dan akrual, selaras dengan peningkatan produksi, diimbangi oleh penurunan sewa pembiayaan. Peningkatan aset lancar disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lainnya. Pembahasan lebih rinci disajikan pada bagian Aset dan Kewajiban pada Laporan Tahunan ini.

	2010	2009
Debt/total assets	0.06	0.07
Debt/total equity	0.08	0.09
Debt/EBITDA	0.21	0.43
Debt/enterprise value	0.03	0.04
Operating cash flow/total debt	4.56	1.46
Debt/(operating cash flow minus dividends)	0.47	1.42
<b>Dividend Ratios</b>		
Dividends/net earnings	0.77	0.63
Dividends per share/share price	0.06	0.03
<b>Cash Flow Coverage Ratios</b>		
Operating cash flow/sales	0.50	0.27
Operating cash flow/capital expenditures	3.50	1.48
Operating cash flow/dividends	3.22	1.88
<b>Capital Market Analysis Ratios</b>		
Market capitalization (US\$ million)	5,382	3,818
Enterprise value (US\$ million)	5,119	3,698
Price to book value (times)	3.20	2.41

PTI took advantage of the improving world economy in 2010 to achieve strong positive ratios of return, including a 20% return on assets, 26% return on equity and 33% return on average capital employed in 2010. These ratios were above the 8% return on assets, 11% return on equity and 15% return on average capital employed in 2009. We managed to gain higher returns due to higher deliveries as well as increased nickel prices which have significant impact on the Company's revenue.

PTI has one class of shares and, as a result of a 10-for-one stock split approved by shareholders on December 17, 2007 and effective on the Indonesia Stock Exchange on January 15, 2008, currently has 9,936,338,720 shares issued and outstanding. Earnings per share were US\$0.04 in 2010 compared to US\$0.02 in 2009.

PTI's share price at year-end 2010 rose by 34% to IDR4,875 from IDR3,650 at year-end 2009, which led to an increase in the price-to-book value ratio of 33%, from 2.41 in 2009 to 3.20 in 2010, as well as an increase in market capitalization of 41%, to US\$5.4 billion in 2010 from US\$3.8 billion in 2009. PTI's enterprise value rose to US\$5.1 billion in 2010 from US\$3.7 billion in 2009, mainly driven by the higher share price, partially offset by higher cash and cash equivalents. In addition, 2010 value was also positively affected by the strengthening Indonesian rupiah against the U.S. dollar. The trading volume of our shares decreased by 4% from 4.5 billion shares (average daily: 18.4 million shares) in 2009 to 4.3 billion shares (average daily: 17.6 million shares) in 2010.

The current ratio at December 31, 2010 was 4.50, a decrease of 38% from 7.24 in 2009, due to a significant 82% increase in current liabilities outweighed by a 13% increase in current assets. The increase in current liabilities was driven by

Modal kerja bersih per 31 Desember 2010 hanya 2% lebih tinggi dari tahun 2009 karena kenaikan kewajiban lancar melebihi kenaikan aset lancar (82% vs 13%). PTI telah melakukan usaha-usaha signifikan dan mempertahankan perbaikan dalam pengelolaan modal kerja, yang ditunjukkan melalui pengurangan persediaan, dan saldo biaya dibayar dimuka dan uang muka.

Perputaran piutang pada tahun 2010 adalah 11,51 dibandingkan dengan 9,43 pada tahun 2009. Kenaikan terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada penjualan, yaitu sebesar 68%, karena harga nikel dan pengiriman yang lebih tinggi. Perputaran persediaan pada tahun 2010 adalah 5,9 dan lebih tinggi daripada 3,9 pada tahun 2009 disebabkan oleh kenaikan harga pokok penjualan. Perputaran aset naik sebesar 55% dari 0,38 pada tahun 2009 menjadi 0,58 pada tahun 2010, terutama karena peningkatan penjualan.

Rasio kewajiban terhadap ekuitas pada tahun 2010 adalah 0,30, dibandingkan dengan 0,28 pada tahun 2009. Rasio kewajiban terhadap aset adalah 0,23 dibandingkan dengan 0,22 pada tahun sebelumnya. Rasio hutang terhadap ekuitas adalah 0,08 dibandingkan dengan 0,09 pada tahun 2009. Rasio hutang terhadap EBITDA pada tahun 2010 adalah 0,21 sedangkan pada tahun 2009 adalah 0,43. Rasio hutang terhadap nilai perusahaan adalah 0,03 pada tahun 2010 dan 0,04 pada tahun 2009. Rasio jumlah hutang terhadap arus kas dari operasi dikurangi dividen adalah 0,47 pada tahun 2010 dibandingkan dengan 1,42 pada tahun 2009. Rasio-rasio ini masih relatif rendah, dan mengkonfirmasi kebijakan modal kami yang konservatif.

Marjin laba bersih pada tahun 2010 tetap kuat, yaitu sebesar 0,34 dibandingkan dengan 0,22 pada tahun 2009. Marjin ini meningkat 55% disebabkan oleh

**Karyawan dari Environment sedang mengamati kawasan penghijauan dari purna tambang.**

**Careful inspection is being carried out by Environmental Department staff at the post-mining reforestation area.**



higher trade payables, tax payables and accruals and was in line with higher production, offset by a decrease in finance leases. The increase in current assets was driven by an increase in cash and cash equivalents, trade receivables and other receivables. Please refer to the Assets and Liabilities section of the Annual Report for further discussion about current assets and current liabilities.

Net working capital on December 31, 2010 was only 2% higher than on the same date in 2009, due to increase in current assets being outweighed by an increase in current liabilities (13% versus 82%). PTI has made significant efforts and improved working capital management, which is demonstrated by decreases in inventories, prepaid expenses and advances balances.

The receivables turnover was 11.51 in 2010 compared to 9.43 in 2009. The increase was mainly driven by a significant increase in sales of 68%, as a result of higher nickel prices and deliveries. Inventory turnover in 2010 of 5.9 was higher than in 2009 of 3.9 due to higher cost of goods sold. Asset turnover was up by 53% to 0.58 in 2010 from 0.38 in 2009, mainly driven by higher sales.

The liabilities-to-equity ratio was 0.30 in 2010 compared to 0.28 in 2009. The liabilities-to-asset ratio was 0.23 in 2010 compared to 0.22 in 2009. The debt-to-equity ratio was 0.08 in 2010 compared to 0.09 in 2009. The debt-to-EBITDA ratio was 0.21 in 2010 and 0.43 in 2009. Debt-to-enterprise value was 0.03 in 2010 and 0.04 in 2009. Total debt-to-operating cash flow minus the dividends ratio was 0.47 in 2010 compared to 1.42 in 2009. These ratios were still relatively low, which underscored our conservative capital policies.



kenaikan rata-rata harga realisasi nikel dan kenaikan pengiriman pada tahun 2010 karena permintaan nikel yang tinggi disebabkan oleh kenaikan konsumsi nikel dan pemulihan kondisi ekonomi global.

Rasio pembayaran dividen pada tahun 2010 adalah 0,77 dibandingkan 0,65 pada tahun 2009. Pembahasan lebih lanjut disajikan pada bagian berjudul Analisa Kebijakan Dividen dan Rasio Pembayaran Dividen pada Laporan Tahunan ini.

Rasio arus kas dari aktivitas operasional terhadap penjualan adalah 0,50 pada tahun 2010 dan 0,27 pada tahun 2009. Peningkatan terjadi karena kenaikan arus kas bersih dari aktivitas operasional melebihi peningkatan penjualan. Pembahasan rinci dimuat pada bagian Arus Kas pada Laporan Tahunan ini.

## SOLVABILITAS DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

### Solvabilitas

Rasio solvabilitas membandingkan EBITDA terhadap jumlah kewajiban hutang. Hutang kami pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar AS\$140,6 juta, terdiri dari pokok pinjaman SEFA sejumlah AS\$150,0 juta, bersih dengan biaya penerbitan hutang yang belum diamortisasi berupa premi NEXI dan biaya jasa dimuka yang dikapitalisasi pada saldo pinjaman sebesar AS\$9,4 juta. Pokok pinjaman sebesar AS\$150,0 juta mewakili kurang dari separuh EBITDA PTI pada tahun 2010. Solvabilitas PTI diperlihatkan oleh peningkatan rasio EBITDA/Beban pembiayaan + Pokok pinjaman yaitu dari 2,19 pada tahun 2009 menjadi 4,52 pada tahun 2010. Rasio hutang terhadap ekuitas adalah 0,08 pada tahun 2010, lebih baik dari 0,09 pada tahun 2009. Rasio hutang terhadap EBITDA adalah 0,21 pada tahun 2010 dibandingkan dengan 0,43 pada tahun 2009. Berdasarkan rasio hutang berjalan terhadap EBITDA yang relatif rendah, kami yakin memiliki solvabilitas yang kuat dan kemampuan membayar hutang yang sangat tinggi.

	2010	2009
EBITDA/Beban pembiayaan + Pokok pinjaman	4,52	2,19

### Kolektibilitas Piutang

Seluruh piutang usaha kami terhutang kepada dua pemegang saham terbesar kami, Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.; dengan demikian, terhutang kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. memiliki kepentingan strategis jangka panjang terhadap kesinambungan keberhasilan operasi kami. Pada umumnya piutang usaha kami dibayar dalam waktu 30 sampai 60 hari setelah pengapalan; tidak pernah ada kesulitan dalam menagih piutang dan kami yakin akan tetap demikian.

## LIKUIDITAS DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

### Kebijakan Struktur Modal

Kebijakan struktur modal PTI ditetapkan untuk memfasilitasi pendanaan bagi pertumbuhan usaha kami dan memenuhi keperluan dividen pemegang saham, sambil mempertahankan neraca yang sehat. Karena itu, kami menekankan kebijakan hutang rendah saat pasar nikel sedang kuat untuk mempersiapkan menghadapi dampak arus kas yang melemah saat pasar nikel sedang turun. Kami senantiasa berusaha mempertahankan profil keuangan yang konservatif sesuai jenis industri kami.



Net earnings margin in 2010 remained strong at 0.34 compared to 0.22 in 2009. The margin increased by 55% due to higher average realized nickel price as well as deliveries in 2010. This was mainly a result of high demand for nickel due to an increase in nickel consumption and the recovery of global economies.

The dividend payout ratio was 0.77 in 2010 and 0.63 in 2009. Please refer to the section entitled Dividend Policy and Dividend Payout Ratio Analysis section for further discussion on this topic.

Operating cash flow-to-sales ratio was 0.50 in 2010 and 0.27 in 2009. The increase was due to the increase in net cash flows from operating activities outweighed by the increase in sales. Please refer to the Cash Flows section for further discussion.

## SOLVENCY AND CREDIT COLLECTIBILITY LEVEL

### Solvency

The solvency ratio measures the size of PTI's EBITDA as compared to total debt obligations. Our debt as of December 31, 2010 of US\$140.6 million consisted of the SEFA principal of US\$150.0 million, net with unamortized debt issuance costs of NEXI premiums and upfront fees which were capitalized to the borrowing balance in the amount of US\$9.4 million. The loan principal of US\$150.0 million represents less than half of PTI's 2010 EBITDA. The solvency of PTI was shown by the growth of EBITDA/Finance costs + Loan principal ratio from 2.19 in 2009 to 4.52 in 2010. The debt-to-equity ratio was 0.08 in 2010, an improvement from 0.09 in 2009. The debt-to-EBITDA ratio was 0.21 in 2010 compared to 0.43 in 2009. Given the relatively low ratio of outstanding loan to EBITDA, we believe our solvency profile is strong and our repayment capability is very high.

	2010	2009
EBITDA/Finance costs + Loan principal	4.52	2.19

### Collectibility

All of our trade receivables are due to our two largest shareholders, Vale Canada and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.; accordingly, they are due to related parties. Vale Canada and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. have a long-term strategic interest in the continuing success of our operations. Normally our trade receivables are collected within 30-to-60 days of shipment; there has never been any difficulty with collection and we are confident that will continue to be the case.

## CAPITAL STRUCTURE POLICY AND LIQUIDITY

### Capital Structure Policy

PTI's capital structure policy is set to facilitate the financing of our growth and satisfy the dividend needs of our shareholders, while maintaining a sound balance sheet. Accordingly, we emphasize low leverage when nickel markets are strong in order to prepare for the impact of weaker cash flows during down cycles. We always strive to maintain a conservative financial profile that is appropriate for our industry.

Sejak Maret 2006 sampai November 2009, PTI tidak mengikat perjanjian pinjaman jangka panjang. Selama periode tersebut, struktur modal ekuitas kami terdiri dari modal dasar sebesar Rp993.633.872.000 dan modal disetor dan ditempatkan sebesar Rp248.408.268.000 dengan nilai nominal Rp25 per lembar saham. PTI membukukan modal saham sebesar AS\$136,4 juta dan tambahan modal disetor AS\$277,8 juta per 31 Desember 2009, dan tidak berubah sampai 31 Desember 2010.

Pada tanggal 30 November 2009, PTI menandatangani Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior dengan Mizuho Corporate Bank, Ltd. dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., masing-masing sebagai Pemberi Pinjaman, Agen Fasilitas dan Agen Kolateral, dengan Vale, S.A. sebagai Penjamin. Fasilitas sebesar AS\$300 juta terdiri dari pinjaman dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. sebesar AS\$200 juta dan AS\$100 juta dari Mizuho Corporate Bank, Ltd. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca pada bagian Informasi Material tentang Investasi Hutang/Modal, Ekspansi, Divestasi, atau Restrukturisasi pada Laporan Tahunan ini.

Per 31 Desember 2010 PTI telah menarik AS\$150 juta dari fasilitas SEFA. Fasilitas ini telah mengubah struktur modal PTI sejak tahun 2009. Rasio hutang terhadap EBITDA adalah 0,21 pada tahun 2010 (0,43 pada tahun 2009), rasio hutang terhadap nilai perusahaan adalah 0,03 pada tahun 2010 (0,04 pada tahun 2009), dan rasio hutang terhadap arus kas dari aktivitas operasi dikurangi dividen adalah 0,47 pada tahun 2009 (1,42 pada tahun 2009). Meskipun penarikan pertama dari pinjaman SEFA pada bulan Desember 2009 meningkatkan rasio-rasio hutang kami, angka-angka tersebut tetap relatif rendah, selaras dengan kebijakan struktur modal kami. Kewajiban PTI pada sewa pembiayaan per 31 Desember 2010 dan 2009 berturut-turut adalah nihil dan AS\$1,7 juta.

## Likuiditas

Rasio Likuiditas	2010	2009
Aset lancar / kewajiban lancar	4,50	7,24
(Aset lancar - kewajiban lancar) / Jumlah aset	0,25	0,27

Risiko likuiditas muncul jika PTI mengalami kesulitan memperoleh pendanaan. Manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati adalah mempertahankan kecukupan kas dan setara kas. PTI mengelola risiko likuiditas dengan terus memantau perkiraan dan arus kas aktual serta membandingkan jatuh tempo aset-aset dan kewajiban-kewajiban keuangan. Kami yakin likuiditas kami tetap baik meskipun rasio lancar per 31 Desember 2010 adalah 4,50, turun dari 7,24 pada tahun 2009. Penurunan terutama disebabkan oleh peningkatan kewajiban lancar sebesar 82% yang melebihi kenaikan aset lancar sebesar 13%. Pembahasan lebih rinci disajikan pada bagian Analisa Laporan Keuangan pada Laporan Tahunan ini.

## INVESTASI MODAL

Investasi modal diperlukan untuk menopang tingkat produksi saat ini dan menumbuhkan usaha kami. Substitusi dan efisiensi energi, pengurangan biaya dan perbaikan lingkungan hidup menjadi fokus program investasi modal kami saat ini. Kami berada dalam tahap pertengahan dari program modal beberapa tahun, yang mencakup: pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga air di Karebbe; pembaharuan generator di Larona; dan konversi seluruh pembakar pengering bijih menjadi pengapian berbahan bakar ganda yang memungkinkan fleksibilitas penggunaan HSFO atau bubuk batu-bara secara bergantian bergantung pada skala ekonomi masing-masing. Ketiga proyek ini mencakup 84% dari pengeluaran modal untuk aset tetap dalam penyelesaian sebesar AS\$430,8 juta dan 66% dari saldo AS\$319,2 juta pada tahun 2009.

From March 2006 to November 2009, PTI did not enter into any long-term loan agreements. During that period our equity capital structure consisted of authorized capital of IDR993,633,872,000 and issued and paid capital of IDR248,408,468,000 with nominal value of IDR25 per share. PTI recorded share capital of US\$136.4 million and additional paid-in capital of US\$277.8 million on December 31, 2009, and remain unchanged at December 31, 2010.

On November 30, 2009, PTI entered into a Senior Export Facility Agreement with Mizuho Corporate Bank, Ltd. and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., as the Lender, Facility Agent and Collateral Agent, respectively, with Vale S.A. as the guarantor. The facility of US\$300 million consists of loans from the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. of US\$200 million and from Mizuho Corporate Bank, Ltd. of US\$100 million. Please refer to the Material Information for Capital/Debt Investment, Expansion, Divestment, or Restructuring section.

As of December 31, 2010, PTI had drawn down US\$150 million of the SEFA facility. This facility has changed our capital structure since 2009. PTI's debt-to-EBITDA ratio was 0.21 in 2010 (0.43 in 2009), our debt-to-enterprise ratio was 0.03 in 2010 (0.04 in 2009) and our debt-to-operating cash flow minus dividends ratio was 0.47 in 2010 (1.42 in 2009). While the first drawdown of the SEFA loan in December 2009 increased our debt ratios, they remained relatively low, consistent with our conservative capital structure policy. On December 31, 2010 and 2009, PTI's obligations under financial leases were nil and US\$1.7 million, respectively.

### Liquidity

<b>Liquidity Ratios</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Current assets/current liabilities	4.50	7.24
(Current assets - current liabilities)/Total assets	0.25	0.27

Liquidity risk arises in situations where PTI has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. PTI manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flow and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities. We believe our liquidity remained strong although the current ratio at December 31, 2010 was 4.50, a decrease from 7.24 in 2009. The decrease is mainly due to an increase in current liabilities of 82%, outweighed by an increase in current assets of 13%. Please refer to the section Financial Performance Analysis in this Annual Report for further discussion about current assets and current liabilities.

### CAPITAL INVESTMENT

Capital investments are required to sustain our current levels of production and grow our business. Energy substitution and efficiency, cost reduction and environmental improvement are focal points of our current capital investment program. We are in the middle of a multi-year capital program, which includes: the construction of a hydroelectric power generating facility at Karebbe; Larona generator upgrades; and the conversion of all ore dryer burners to dual fuel fire, using either HSFO or pulverized coal, which allows the flexibility to switch between these fuels, depending on the economics of each one. These three projects constituted 84% of our 2010 capital spending for construction in progress of US\$430.8 million and 66% of the US\$319.2 million balance in 2009.

Hampir semua investasi modal didanai secara internal oleh PTI, kecuali proyek Karebbe yang didanai melalui Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior. Pembahasan mengenai fasilitas ini disajikan pada bagian Likuiditas dan Kebijakan Struktur Modal dan Informasi Material tentang Investasi Hutang/Modal, Ekspansi, Divestasi, atau Restrukturisasi dalam Laporan Tahunan ini.

Sebagian besar belanja barang modal kami adalah dalam denominasi dollar AS, yang merupakan mata uang fungsional kami. Karena itu, kami mengharapkan tidak ada risiko valuta yang signifikan.

#### Proyek-Proyek Modal Penting pada Tahun 2010

**Proyek pembangkit listrik tenaga air Karebbe.** Proyek Karebbe diumumkan pada tahun 2004 sebagai komponen pembangkit daya listrik dalam program modal untuk meningkatkan produksi tahunan kami. Pembangunan dihentikan pada bulan Januari 2006 tetapi dilanjutkan kembali sejak tanggal 1 Oktober 2007 sesudah Departemen Kehutanan mengeluarkan izin yang diperlukan bagi proyek tersebut pada akhir Agustus 2007. Estimasi biaya modal semula, yang dihitung sebelum penundaan pembangunan, adalah AS\$275 juta sampai AS\$280 juta, sudah termasuk sekitar AS\$100 juta untuk proyek optimalisasi untuk meningkatkan produksi. Pada bulan Juli 2008 Dewan Komisaris PTI menyetujui revisi perkiraan biaya modal proyek Karebbe menjadi AS\$410 juta. Perkiraan yang lebih tinggi ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga-harga peralatan, komoditi dan tenaga kerja untuk proyek. Perkiraan baru ini juga telah memperhitungkan kenaikan harga dan biaya yang terkait dengan penundaan, serta mencerminkan perhitungan biaya yang baik, selaras dengan



Screening Station No. 8.



Most of the capital investments were funded by PTI's internal sources with the exception of the Karebbe project which was funded by the Senior Export Facility Agreement. Please refer to Capital Structure Policy and Liquidity and Material Information for Capital/Debt Investment, Expansion, Divestment, or Restructuring presented in this Annual Report, for discussion about the facility.

A large portion of our capital expenditures is denominated in U.S. dollars, which is our functional currency. Therefore, we do not expect significant foreign currency exposure.

#### Major Capital Projects in 2010

**Karebbe hydroelectric generation project.** The Karebbe project was announced in October 2004 as the energy generation component of our capital program to raise annual production. Construction was suspended in January 2006 but resumed on October 1, 2007, following the issuance in late August 2007 of the forestry permit required for the project. The original capital cost estimate, prepared prior to suspending construction, was US\$275-to-US\$280 million and included approximately US\$100 million for the PTI's optimization project to increase production. In July 2008, PTI's Board of Commissioners approved a revised capital cost estimate of US\$410 million for the Karebbe project. The higher capital estimate is primarily due to increased prices for equipment, commodities and project labour. The new estimate also takes into account higher prices and associated costs of delays and reflects a sound assessment of cost, given that significant work on procurement and engineering has been



telah selesainya sebagian signifikan pekerjaan teknik dan pengadaan. Setelah semua kontrak ditandatangani dan pembangunan bendungan dimulai, saat ini kami perkirakan proyek Karebbe akan siap beroperasi dalam semester kedua tahun 2011. Informasi mengenai fasilitas pinjaman yang diperoleh PTI untuk mendanai proyek Karebbe disajikan pada bagian Likuiditas dan Kebijakan Struktur Modal pada Laporan Tahunan ini.

Fasilitas Karebbe diperkirakan akan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga air PTI sebesar 90 MW menjadi 365 MW, dan juga mengurangi risiko pasokan energi pada musim kemarau, serta menurunkan biaya pokok produksi per unit dengan menggantikan pembangkit listrik thermal yang mahal dengan pembangkit listrik tenaga air. Proyek Karebbe akan menambah pasokan listrik tenaga air untuk mengoperasikan tanur-tanur listrik di Sorowako dan merupakan inisiatif utama kami dalam program efisiensi energi dan pengurangan biaya. Kami harapkan proyek Karebbe dapat mendukung kami dalam usaha menghadapi perubahan iklim. Sumber energi terbarukan ini akan menghilangkan beberapa ratus ribu metrik ton per tahun emisi gas rumah kaca, dibandingkan dengan pembangkit listrik thermal. Selain itu, PTI berencana memasok tiga megawatt tenaga listrik setiap tahun dari pembangkit listrik Karebbe di daerah Balambano bagi masyarakat sekitarnya. Kami harap ini akan mendorong pertumbuhan industri-industri kecil dan menengah setempat.

Pada tahun 2010, sekitar AS\$148,0 juta telah dipergunakan untuk proyek ini. Per 31 Desember 2010 sekitar AS\$315,8 juta telah dibukukan pada aset tetap dalam penyelesaian dengan komitmen yang masih tersedia sekitar AS\$94,2 juta.

**Pembaharuan pembangkit listrik di Larona.** Kami melanjutkan pembaharuan dua generator pembangkit listrik tenaga air di Larona yang telah beroperasi hampir tanpa henti selama 30 tahun dan segera mencapai akhir masa pakai sesuai rancangannya. Generator ketiga diperbaharui pada tahun 2002 dari 65 Mega Volt Ampere (MVA) menjadi 85 MVA. Proyek kami adalah memperbaharui Generator No. 1 (LGS1) dan No. 2 (LGS2) dari 65 MVA menjadi 85 MVA, dan mengganti sistem pembangkit, perlindungan, pengatur dan pengendali unit. Instalasi pada LGS2 dan LGS1 dijadwalkan selesai tahun 2012. Pada tanggal 31 Desember 2010 kami telah menggunakan AS\$26,5 juta dari total anggaran untuk proyek ini, yaitu sebesar AS\$36,7 juta.

**Proyek transportasi dan konversi batubara.** Kami telah memulai tahap pertama dari proyek dua tahap untuk menggantikan HSFO dengan bubuk batu bara dalam kegiatan operasi tertentu dan mencakup pembaharuan infrastruktur pengelolaan komoditi dalam jumlah besar saat ini. Tujuan utama tahap pertama adalah mengganti sumber energi pengering dari HSFO menjadi bubuk batu bara, termasuk memperbaharui infrastruktur penanganan material dalam jumlah besar saat ini. Tahap kedua adalah konversi tanur pereduksi. Studi kelayakan untuk tahap pertama telah diselesaikan pada awal tahun 2008 dan proyek dimulai pada triwulan pertama tahun 2008. Proyek ini akan memberikan keleluasaan bagi PTI untuk memilih menggunakan batu bara atau HSFO tergantung pada kondisi ekonomi yang terkait dengan sumber-sumber energi ini. Total biaya tahap pertama diperkirakan sekitar AS\$100 juta.

Semula proyek diharapkan selesai pada tahun 2010. Namun mempertimbangkan perkiraan pasar nikel yang sulit dalam jangka pendek, penurunan perbedaan harga HSFO relatif terhadap batu bara, dan manfaat-manfaat jangka pendek dibandingkan biaya langsung, manajemen memperlambat pekerjaan proyek tetapi mengharapkan akan segera kembali pada kegiatan normal. Pada tahun 2010, sekitar AS\$1,0 juta (2009: AS\$13,2 juta) dikeluarkan untuk proyek ini dan sekitar AS\$22,8 juta telah dibukukan pada aset tetap dalam penyelesaian per 31 Desember 2010.

completed. With all main contracts awarded and construction of the dam begun, we currently expect that the Karebbe project will be operational in the second half of 2011. Please refer to the Capital Structure Policy and Liquidity section for information about the facility that PTI has entered into for funding the Karebbe project.

The facility is expected to raise PTI's hydroelectric power generating capacity by 90 MW to 365 MW, while reducing energy supply risk in dry years, and lowering the unit cash cost of nickel production by replacing expensive thermal power with hydroelectricity. The Karebbe project will produce enough hydroelectric energy to operate the electric furnaces at the Sorowako facility and is the main initiative in our energy efficiency and cost reduction program. We expect the Karebbe project to complement our climate change objectives. This renewable energy source will eliminate several hundred thousand metric tons per year of greenhouse gas emissions, compared to conventional thermal power supplies. In addition, PTI plans to supply three megawatts of electricity each year from the delivery point of the Karebbe generation at the Balambano switchyard to surrounding communities. We expect this to stimulate the growth of nearby small and medium-sized industries.

In 2010, about US\$148.0 million was spent on this project. On December 31, 2010, approximately US\$315.8 million had been recorded in our construction in progress account, with outstanding commitments of about US\$94.2 million.

**Larona generators upgrades.** We are continuing to upgrade two of the Larona hydroelectric power plant's generators, which have been operating almost continuously for 30 years and are reaching the end of their expected design life. A third generator was upgraded in 2002 from 65 Mega Volt Ampere (MVA) to 85 MVA. Our project includes upgrading Generators No. 1 (LGS1) and No. 2 (LGS2) from 65 MVA to 85 MVA, and replacing their excitation, protection, governor and unit control systems. Installation at units LGS2 and LGS1 is expected to be complete in 2012. We spent US\$26.5 million of the total budget of US\$36.7 million for the project as of December 31, 2010.

**Coal conversion and transportation project.** We have begun the first phase of a two-phase project that would replace HSFO with pulverized coal in certain operations and involves the upgrade of our existing bulk commodity material handling infrastructure. The main objective of phase one is to convert the energy source in our dryers from HSFO to pulverized coal, including upgrading our existing bulk commodity material handling infrastructure. The second phase would involve conversion of the kilns. A feasibility study for phase one was completed in early 2008 and the project started at the end of the first quarter of 2008. This project will provide PTI with the flexibility to use either coal or HSFO depending on the prevailing economics associated with these fuel sources. The estimated total cost for phase one is about US\$100 million.

Initially the project was expected to be completed in 2010. However, considering the challenging environment for the nickel market during the economic recession, the softening price of HSFO relative to coal and the near-term benefits compared to immediate costs, management slowed down work on the project but expects to ramp up to normal activity again soon. In 2010, about US\$1.0 million (2009: US\$13.2 million) was spent on this project and approximately US\$22.8 million had been recorded in our construction in progress account as of December 31, 2010.

**Reaktor adaptif tanur listrik No. 4.** Lingkup proyek ini adalah instalasi sistem stabilisasi permintaan daya pada Tanur No. 4. Tujuan utama proyek adalah mengurangi fluktuasi daya listrik pada Tanur No. 4 agar dapat beroperasi pada skala 85 MW secara menerus dan meminimalkan masa penghentian tanur sewaktu instalasi. Ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi nikel. Reaktor ini adalah prototipe dan jika proyek senilai AS\$16,4 juta ini berhasil, kami akan memasang reaktor adaptif pada tanur-tanur lain juga. Per 31 Desember 2009 sejumlah AS\$12,7 juta telah dikeluarkan untuk proyek ini. Proyek melambat pada tahun 2010 dan juga tahun 2009 disebabkan oleh evaluasi ulang prioritas di tengah tantangan kondisi ekonomi, namun diperkirakan akan dipercepat pada tahun 2011.

**Kajian pengembangan proyek.** PTI terus mempelajari berbagai kesempatan untuk tumbuh, melakukan efisiensi, pengurangan biaya dan perbaikan lingkungan hidup. Inisiatif-inisiatif penting yang sedang dievaluasi, antara lain adalah proyek pengurangan sulfur dioksida, dan kesempatan di sekitar sumber-sumber daya di Bahodopi dan Pomalaa. Biaya kajian-kajian ini dilaporkan sebagai bagian dari beban lainnya dalam Laporan Laba Rugi.

#### **INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG PERISTIWA LANGKA DAN LUAR BIASA**

Pada tahun 2010, tidak ada pembukuan transaksi yang mengandung peristiwa luar biasa dan langka.

#### **DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN, LABA BERSIH ATAU LABA USAHA PERSEROAN**

Kenaikan rata-rata harga realisasi dari AS\$11.227 per metrik ton pada tahun 2009 menjadi AS\$16.568 per metrik ton pada tahun 2010 menghasilkan peningkatan penjualan sebesar AS\$411,5 juta. Kenaikan rata-rata harga realisasi juga berdampak terhadap laba usaha dan laba bersih, masing-masing meningkat sebesar AS\$404,1 juta dan AS\$303,1 juta dari tahun sebelumnya.

#### **PROSPEK USAHA**

Dalam perspektif usaha kami, Indonesia terletak strategis dalam wilayah Asia Pasifik, yang memegang rekor tingkat pertumbuhan tertinggi konsumsi nikel selama 30 tahun terakhir, dan pertumbuhan yang tinggi ini diharapkan terus berlanjut.

Potensi penggunaan nikel terus tumbuh. Menurut *The International Nickel Study Group* (INSG) Oktober 2010 penggunaan (konsumsi) nikel primer dunia diperkirakan meningkat dari 1,24 juta metrik ton pada tahun 2009 menjadi 1,43 juta metrik ton pada tahun 2010, dan diharapkan terus meningkat menjadi 1,53 juta metrik ton pada tahun 2011. Baja nirkarat yang mengandung nikel hadir dalam banyak ragam aplikasi industri dan konsumen karena tahan dalam lingkungan yang berat, mudah dibersihkan, dapat dibentuk dan dapat didaur-ulang seluruhnya. Baja nirkarat dan produk-produk lainnya dapat ditemukan hampir di mana saja, dalam begitu banyak aplikasi yang berdampak bagi hidup kita sehari-hari, dari peralatan sederhana sampai peralatan teknologi canggih. Baja campuran dengan kandungan nikel rendah sering digunakan untuk produk-produk seperti penyangga bangunan dan peralatan listrik. Logam campuran non-



**Adaptive reactor furnace No. 4.** The scope of this project is to install a power demand stabilization system on Furnace No. 4. The primary project objective is to reduce Furnace No. 4's power fluctuation so that it can operate at an average 85 MW continuously and minimize furnace downtime during installation. This eventually is expected to contribute to further increases in nickel production. This adaptive reactor is a prototype and if the US\$16.2 million project is successful, we will install adaptive reactors on other furnaces as well. As of December 31, 2010, US\$12.7 million has been spent on this project. The project was slowed down in 2010 as well as 2009 due to a reassessment of priorities in view of challenging economic conditions, but forecasted to ramp up in 2011.

**Project Development Studies.** PTI continues to study various opportunities for growth, efficiency, cost reduction and environmental improvement. Among major initiatives being evaluated are sulphur dioxide abatement projects and opportunities around Bahodopi and Pomalaa resources. The costs of these studies are reported as part of other expenses in our Statements of Earnings.

#### FINANCIAL INFORMATION WHICH CONTAINS AN EXTRAORDINARY AND RARE EVENT

In 2010, there was no transaction containing extraordinary and rare events reported.

#### IMPACT OF PRICE CHANGES ON COMPANY'S SALES, NET EARNINGS OR OPERATING PROFIT

The increased average realized price from US\$11,227 per metric ton in 2009 to US\$16,568 per metric ton in 2010 contributes to US\$411.5 million increase in sales. The increased average realized price also impacted operating profit and net earnings, contributing to US\$404.1 million and US\$303.1 million increases from 2009, respectively.

#### BUSINESS PROSPECTS

From the perspective of our business, Indonesia is well situated within the Asia-Pacific region, which has recorded the world's highest growth rates in nickel consumption over the past 30 years. Strong growth rates are expected to continue.

The opportunities of nickel usage continue to grow. According to The International Nickel Study Group (INSG) October 2010, global primary nickel usage (consumption) was estimated to increase from 1.24 million metric tons in 2009 to 1.43 million metric tons in 2010 and a further increase of 1.53 million metric tons is expected in 2011. Nickel-containing stainless steel is present in a broad range of consumer and industrial applications because it is durable in harsh environments, hygienic, fashionable and fully recyclable. Stainless steel and other products can be seen almost everywhere, in a host of applications that impact our daily lives, from simple tools to sophisticated technology. Low alloy steel, with a nickel content of typically less than 1%, is frequently used in products such as support beams for buildings and electrical appliances. Non-ferrous alloys, containing nickel and little

besi, yang mengandung nikel dan sedikit atau tanpa besi, banyak digunakan dalam pembuatan komponen pesawat terbang. Nikel adalah material terbaik untuk memproses produk berbentuk plat seperti furnitur logam. Daftar penggunaan nikel primer murni nyaris tanpa akhir.

#### **Pandangan Tahun 2011**

Produksi nikel kami pada tahun 2011 direncanakan lebih rendah daripada tahun 2010, terutama disebabkan oleh pembangunan kembali tanur listrik No. 2. PTI telah memutuskan untuk mengganti rencana perbaikan besar pada tanur listrik yang telah diumumkan sebelumnya dengan pembangunan kembali tanur listrik No. 2 yang telah mencapai akhir usia operasional. Pembangunan kembali tanur listrik No. 2 ini akan berlangsung pada awal semester kedua tahun 2011 dan akan diselesaikan selama 21 minggu tanur tidak beroperasi. Sebaliknya, karena proyek Karebbe akan beroperasi pada semester kedua tahun 2011, kami mengharapkan biaya pokok produksi per unit akan turun karena pembangkit listrik thermal yang mahal digantikan dengan pembangkit listrik tenaga air. Proyek Karebbe akan menghasilkan daya listrik tenaga air yang cukup untuk mengoperasikan tanur-tanur listrik pada fasilitas di Sorowako dan merupakan inisiatif utama kami dalam program efisiensi energi dan pengurangan biaya.



**Jalur tambang dibersihkan untuk memastikan keselamatan kendaraan dan pengemudinya.**

**Mining roads are cleared to ensure safety for vehicles and their drivers.**



or no iron, are widely used in the manufacture of aeronautical components. Nickel is the best material for plating products such as metal furniture. The list of uses of pure primary nickel is almost endless.

#### **2011 Outlook**

Our nickel production in 2011 is planned to be lower than in 2010, mainly due to the rebuilding of electric furnace number 2. Instead of having a major electric furnace repair, as previously announced, PTI has decided to rebuild the electric furnace number 2 which is reaching the end of its operating life. The rebuild will take place in the beginning of the second half of 2011 and will be completed during a 21-week shut down. Conversely, as the Karebbe project is expected to be operational in the second half of 2011, we will be expecting a decrease of unit cash cost of nickel production by replacing expensive thermal power with hydroelectricity. The Karebbe project will produce adequate hydroelectricity energy to operate electric furnaces at the Sorowako facility and is the main initiative in our energy efficiency and cost reduction program.



PTI merencanakan akan mengeluarkan AS\$232 juta untuk belanja barang modal pada tahun 2011, terdiri dari AS\$120 juta untuk modal kesinambungan usaha, AS\$97 juta untuk modal pertumbuhan, dan AS\$15 juta untuk kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Jumlah ini 27% lebih tinggi daripada belanja barang modal aktual pada tahun 2010. Selain itu, kami juga menyisihkan dana dalam rencana modal untuk membangun jalan dari Bahodopi ke Sorowako dan untuk membangun tambang di Bahodopi sebagai bagian dari kesanggupan Kontrak Karya kami.

Kajian-kajian terkait dengan pengembangan proyek akan berlanjut pada tahun 2011, khususnya yang berkenaan dengan pembangunan wilayah-wilayah Bahodopi dan Pomalaa, optimalisasi produksi di pabrik pengolahan di Sorowako, dan pengurangan emisi sulfur dioksida.

Kami juga sedang melakukan beberapa kajian mengenai optimalisasi umpan pada pabrik pengolahan di Sorowako. Diperlukan suatu inisiatif untuk mempertahankan dan/atau memperbaiki mutu umpan agar dapat mempertahankan tingkat produksi sampai akhir periode Kontrak Karya. PTI sedang melakukan kajian optimalisasi tambang untuk mendapatkan strategi yang memungkinkan kesinambungan pasokan bijih bermutu tinggi bagi pabrik pengolahan di Sorowako. Strategi ini mencakup kemungkinan menambang dan mengangkut bijih dari luar Sorowako untuk umpan pada pabrik pengolahan.

#### **Kekuatan Kami**

**Produsen nikel dalam matte berbiaya rendah.** Kami percaya posisi kami sebagai produsen nikel berbiaya-rendah didukung oleh cadangan bijih yang bermutu tinggi, tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman, dan fasilitas pembangkit listrik tenaga air yang murah. Saat ini dua fasilitas pembangkit listrik tenaga air kami menghasilkan sekitar 2,07 juta MWH dan 1,97 juta MWH, dan memenuhi 90% dari kebutuhan daya listrik kami pada tahun 2010 dan 95% pada tahun 2009. Persentasi penggunaan pembangkit listrik tenaga air tahun 2010 lebih rendah dibandingkan tahun 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan penggunaan pembangkit listrik thermal. Pembangkit listrik tenaga air mengurangi eksposur kami terhadap harga bahan bakar minyak yang mahal dan memberikan keuntungan biaya yang signifikan dibandingkan kebanyakan produsen nikel laterit lain.

**Kontrak penjualan jangka-panjang dan kontrak-kontrak lain dengan pelanggan utama.** Seluruh produksi kami dijual kepada dua pelanggan utama, yang wajib membeli seluruh produksi nikel dalam matte kami (Vale Canada – 80% dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. – 20%). Perjanjian penjualan ini bersifat jangka panjang, "harus ambil", dalam denominasi dollar AS, dengan jangka waktu sampai Kontrak Karya berakhir. Kelompok usaha Logam Dasar Vale dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. memiliki kepentingan strategis jangka panjang terhadap kesinambungan keberhasilan operasi kami. Kami juga memperoleh manfaat dari perjanjian bantuan manajemen dan teknologi jangka panjang dengan Vale Canada, yang berlangsung sampai Kontrak Karya berakhir.

**Cadangan bijih yang kuat.** Perkiraan cadangan mineral per 31 Desember 2010 adalah 75,4 juta metrik ton cadangan bijih terbukti berkadar nikel 1,83% dan 38,3 juta metrik ton cadangan bijih terduga berkadar nikel 1,71%. Kami yakin bahwa cadangan bijih terbukti dan terduga ini cukup untuk mendukung operasi PTI selama sekitar 25 tahun pada tingkat produksi saat ini. PTI mengambil posisi bahwa PTI memiliki hak untuk dua kali perpanjangan didasarkan pada interpretasinya terhadap UU Pertambangan Baru, tetapi mengingat persyaratan bagi dimilikinya hak untuk menambang dan kepastian yang wajar akan kelanjutannya sebelum mendeklarasikan cadangan mineral, PTI memilih untuk menggunakan pendekatan

PTI plans to spend US\$232 million on capital expenditures in 2011, consisting of US\$120 million for sustaining capital, US\$97 million for growth capital and US\$15 million for health, safety and the environment. The amount is 27% higher than actual 2010 capital expenditures. In addition, we also set aside funds in our capital plan to build a road from Bahodopi to Sorowako and to develop a Bahodopi mine as part of our CoW undertakings.

Studies relating to project development will continue in 2011, particularly with respect to development of the Bahodopi and Pomalaa areas, production optimization at our Sorowako smelter and sulphur dioxide emissions reductions.

We are also undertaking some studies on optimizing the feed to the Sorowako smelter. An initiative is required to maintain and/or improve the quality of feed in order to maintain the production rate until the end of CoW period. PTI is conducting a mine optimization study to look at strategy to enable continually supplying high quality ore to the Sorowako smelter. This strategy includes the possibility of mining and hauling the ore from outside Sorowako as feed for the smelter.

### Our Strength

**Low-cost producer of nickel in matte.** We believe the drivers of our low-cost position include our high quality ore reserves, well-trained and highly experienced workforce and captive low-cost hydroelectric power generating facilities. Currently our two hydroelectric power generating facilities produce about 2.07 million MWH and 1.97 million MWH and representing about 90% and 95% of our electric power requirements in 2010 and 2009, respectively. The 2010 percentage of hydroelectric power to total decreased compared to 2009 mainly due to higher utilization of thermal power. Our access to hydroelectric power reduces our exposure to expensive fossil fuels and provides us with a significant cost advantage over most other laterite nickel producers.

**Long-term sales and other contracts with major customers.** All of our production is committed to our two major customers, who are obligated to purchase all of the nickel in matte we produce (Vale Canada – 80% and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. – 20%). These commitments are set forth in long-term, “must-take,” U.S. dollar-denominated sales agreements, with terms that continue until the expiration of the CoW. Vale’s Base Metals business and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. have long-term strategic interests in the continuing success of our operations. We also benefit from our long-term management and technology assistance agreements with Vale Canada, which continue until the expiration of the CoW.

**Substantial mineral reserves.** Estimated mineral reserves at December 31, 2010 were 75.4 million metric tons of proven ore reserves grading 1.83% nickel and 38.3 million metric tons of probable ore reserves grading 1.71% nickel, which are sufficient to support PTI’s operations for approximately 25 years at current production levels. PTI takes the position that it has the right to two extensions based on its interpretation of the New Mining Law, but in view of the requirements to have mining rights and reasonable certainty of their continuance before declaring a mineral reserve, PTI elects to use a conservative approach and only declares mineral reserves until year end 2035. If possession of continuing mining rights after 2035 can be confirmed then PTI could report more mineral reserves provided that economic viability of these additional mineral reserves is demonstrated by industry standard feasibility studies.

konservatif dan hanya menyatakan cadangan mineral sampai dengan akhir tahun 2035. Jika kepemilikan hak untuk menambang yang berkelanjutan setelah tahun 2035 dapat dipastikan maka PTI dapat melaporkan lebih banyak cadangan mineral asalkan kelayakan ekonomi dari cadangan mineral tambahan ini ditunjukkan oleh studi kelayakan standar industri.

***Profil keuangan yang kuat dengan risiko terbatas terhadap mata uang lokal.***

Kami selalu membukukan laba setiap tahun sejak tahun 1987, termasuk di tengah krisis ekonomi dunia pada tahun 2009. Meskipun beroperasi di Indonesia, risiko kami terhadap mata uang lokal terbatas karena seluruh penghasilan kami dalam dollar AS, sesuai dengan perjanjian penjualan kami; lebih lagi, rata-rata hanya 15% dari total biaya kas kami setiap tahun dalam mata uang rupiah.

***Tim manajemen yang berpengalaman dan memiliki sejarah panjang di Indonesia.***

Tim kami terdiri dari orang-orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan luas dalam industri, bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, serta mematuhi Kontrak Karya. Selain itu, kami memiliki lebih dari 40 tahun pengalaman menambang dan beroperasi di Indonesia.

**Pengembangan Usaha**

Substitusi dan efisiensi energi, pengurangan biaya dan perbaikan lingkungan hidup tetap menjadi fokus utama dari program investasi modal dan pengembangan di masa depan kami. PTI juga melanjutkan fokus pada peningkatan efisiensi aktivitas operasi untuk meraih perbaikan struktural pada aktivitas operasi yang akan menghasilkan produktivitas lebih tinggi, pemulihan nikel lebih baik dan konsumsi bahan bakar minyak lebih baik pada pabrik pengolahan.

***Proyek Karebbe.*** Kami mengharapkan akan menyelesaikan Proyek Karebbe pada semester kedua tahun 2011. Ini merupakan inisiatif utama kami dalam program efisiensi energi dan pengurangan biaya. Dari perspektif lingkungan hidup, sumber energi yang terbarukan ini akan mengurangi beberapa ratus ribu metrik ton emisi gas rumah kaca per tahun, dibandingkan dengan pembangkit listrik thermal konvensional.

***Proyek transportasi dan konversi batubara.*** Kami juga berharap menyelesaikan proyek transportasi dan konversi batubara kami dalam waktu dekat. Tujuan utama dari proyek ini adalah mengubah sumber daya energi di tanur penganering dari HSFO menjadi batubara bubuk, dan ini termasuk memperbaharui infrastruktur penanganan material komoditi dalam jumlah besar yang ada saat ini. Proyek ini akan memberikan keleluasaan untuk menggunakan secara bergantian batubara atau HSFO tergantung pada nilai ekonomisnya dan dapat mengurangi biaya kas operasi.

***Proyek optimalisasi produksi.*** Selain itu, kami juga senantiasa berusaha meningkatkan kapasitas produksi kami. Saat ini kami sedang melakukan kajian beberapa tahun untuk mencari cara mengoptimalkan operasi peleburan kami di Sorowako, terutama dengan mengurangi hambatan pada proses yang ada sekarang. Kami sedang mengevaluasi bisnis kami untuk mengidentifikasi bidang-bidang untuk perbaikan efisiensi dan produktivitas, termasuk meningkatkan stabilitas proses dan kehandalan peralatan. Proyek ini memberikan landasan bagi peningkatan produksi. Satu proyek yang sedang kami kaji dan mendekati tahap implementasi adalah pembangunan ulang tanur listrik nomor 2 di pabrik peleburan kami di Sorowako, yang memungkinkan tanur tersebut beroperasi dengan kapasitas daya lebih tinggi untuk mendukung peningkatan produksi. Saat ini kami berencana untuk melaksanakan pembangunan kembali tersebut pada awal semester kedua tahun 2011.

***Strong financial profile with limited local currency exposure.*** We have been profitable every year since 1987, including during the world economic crisis in 2009. Although we operate in Indonesia, we have limited local currency exposure because all of our revenue is received in U.S. dollars, pursuant to our sales agreements; moreover, on average over the years only about 15% of our total cash costs were denominated in rupiah.

***Experienced management team with extensive history in Indonesia.*** Our team consists of people who have extensive experience and knowledge of the industry, working with central and regional governments and adhering to the CoW. Additionally, we have more than 40 years of mining and operating experience in Indonesia.

### **Business Development**

Energy substitution and efficiency, cost reduction and environmental improvement remain the focal points of our future capital investments and developments programs. We also continue to focus on increasing the efficiency of our operations to pursue structural operating improvements which will result in higher productivity, better nickel recovery and better fuel consumptions in the processing plant.

***Karebbe project.*** In the second half of 2011 we expect the Karebbe project, the main initiative of our energy efficiency and cost reduction program, to be completed. From an environmental perspective, this renewable energy source will eliminate several hundred thousand metric tons per year of greenhouse gas emissions, compared to conventional thermal power supplies.

***Coal conversion and transportation project.*** We also expect to complete our coal conversion and transportation project in the near future. The main objective of this project is to convert the energy source in dryers from HSFO to pulverized coal and upgrade our existing bulk commodity material handling infrastructure. The project will provide flexibility to use either coal or HSFO depending on the economics associated with either fuel source and should reduce our operating cash cost.

***Production optimization project.*** In addition, we are looking at increasing our production capacity over the years. We are in the middle of multi-year studies of how to optimize the operation of our smelter in Sorowako, primarily by eliminating bottlenecks in the current process. We are reviewing our business to identify areas for efficiency and productivity improvements, including enhancing process stability and equipment reliability. This project sets the stage for production increases. One project we are studying, which is close to implementation, is the rebuilding of furnace number 2 in our Sorowako smelter, enabling it to operate at a higher power level to support increased production. We currently plan to carry out the rebuild in the beginning of second half of 2011.

**Proyek sulfur dioksida.** Kami juga sedang mempelajari berbagai pilihan untuk mengurangi emisi sulfur dioksida dari pabrik peleburan kami sebagai bagian dari komitmen kami terhadap lingkungan hidup yang lebih baik. Kami berharap memulai pembangunan dalam waktu dekat.

**Perencanaan Bisnis Terpadu.** Sejak akhir tahun 2007 PTI telah melaksanakan banyak inisiatif penghematan biaya di seluruh organisasi. Hal ini merupakan strategi yang tepat khususnya pada tahun 2009 di tengah resesi dunia. Inisiatif-inisiatif kami ditujukan untuk memperbaiki struktur biaya secara permanen, bukan untuk mewujudkan pengurangan biaya sementara. Pada tahun 2009 tanggung jawab inisiatif penghematan biaya distrukturkan secara formal sebagai proyek Perencanaan Bisnis Terpadu (IBP) yang ditujukan untuk memperbaiki arus kas dan memastikan kesinambungan bisnis kami. Tim IBP terdiri dari karyawan dari sejumlah departemen penting.

Proyek IBP menghasilkan rencana peningkatan efisiensi lima tahun yang difokuskan pada: pencapaian produktivitas yang lebih baik dan peningkatan struktur organisasi; optimalisasi sumber-sumber daya internal; pembaharuan sistem dan proses; peningkatan kepatuhan terhadap persyaratan sistem dan proses; memastikan penggunaan tolok ukur terbaik; dan memaksimalkan kesempatan untuk mengurangi biaya dan menaikkan produksi. Implementasi yang berhasil dan tepat waktu dari rencana perbaikan efisiensi ini akan berkontribusi terhadap arus kas yang lebih kuat sampai tahun 2013. Ini akan meningkatkan profitabilitas jangka panjang PTI dan membantu kami tetap kompetitif di tengah pasar nikel global tanpa tergantung pada keadaan iklim ekonomi.

**Pengujian emisi pada salah satu penangkap debu elektrostatik.**

**Emission testing being carried out at one of the electrostatic precipitator stacks.**





**Sulphur dioxide project.** We are also investigating options for reducing sulphur dioxide (SO<sub>2</sub>) emissions from our smelter as part of our commitment to a better environment. We expect to start construction in the near future.

**Integrated Business Planning.** Since late 2007, PTI has implemented many cost containment initiatives across the organization. This was especially true in 2009, given the recessionary environment worldwide. Our initiatives were aimed at improving our cost structure on a permanent basis, rather than realizing a temporary reduction in cost. In 2009, the responsibility for our cost containment initiatives was formally structured as an Integrated Business Planning (IBP) project, intended to improve cash flow and ensure the sustainability of our business. Our IBP team consists of personnel from a number of key departments.

The IBP project resulted in a five-year efficiency improvement action plan, focused on: achieving better productivity and enhancing organizational structure; optimizing internal resources; upgrading systems and processes; increasing compliance with system and process requirements; ensuring the best standards are in place; and maximizing opportunities to avoid costs and increase production. The successful and timely implementation of our efficiency improvement action plan will contribute to stronger cash flow through 2013. It will enhance PTI's long-term profitability and help keep us competitive in the global nickel market, irrespective of the prevailing economic climate.



Berikut ini adalah contoh-contoh inisiatif kami:

- Memperbaiki produktivitas dan struktur organisasi dengan mengisi posisi wajib yang lowong dengan karyawan yang ada, mengevaluasi ulang profil pekerjaan, menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak bernilai tambah, mengkombinasikan tanggung jawab dan departemen yang saling terkait, dan menghentikan rekrutmen;
- Mengoptimalkan sumber daya internal dengan mengurangi penggunaan jasa konsultan eksternal jika dinilai layak;
- Memperbaiki sistem dan proses, termasuk kepatuhan, dengan instalasi sistem pengendalian penggunaan bahan bakar minyak dalam kegiatan operasi yang penting, implementasi Kerangka Sistem Kontraktor Terpadu untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja kontraktor-kontraktor lokal, melanjutkan partisipasi dalam program pengadaan global Vale, mengikat kontrak jangka panjang dengan pemasok-pemasok penting, memberikan pelatihan pada karyawan untuk meningkatkan operasional peralatan demi memperpanjang masa pakai dan mengurangi biaya perawatan, dan memperbaiki pengawasan atas penggantian pengeluaran tertentu; dan
- Implementasi standar-standar terbaik dengan meningkatkan konservasi energi melalui perubahan pendekatan terhadap penggunaan energi dan mencapai kemajuan kasat mata dalam pengurangan konsumsi, perbaikan kondisi jalan dan pengelolaan armada untuk memperpanjang masa pakai ban, pengurangan konsumsi bahan bakar minyak dan penurunan biaya perawatan.

**Pemantauan harga-harga komoditi penting.** Manajemen terus memantau harga-harga komoditi penting – termasuk nikel dan minyak – dan menganalisa secara seksama semua keputusan yang berdampak terhadap biaya, seperti tindakan menon-aktifkan pembangkit listrik thermal saat biaya operasionalnya melebihi nilai tambah yang dihasilkan. Kami juga terus melakukan kajian untuk menurunkan konsumsi HSFO dalam tanur pereduksi di pabrik pengolahan melalui kinerja yang lebih baik dan mempertimbangkan alternatif bagi minyak dalam aspek-aspek tertentu operasional kami.

**Peningkatan bisnis.** Untuk memfasilitasi peningkatan bisnis dan memastikan realisasi tujuan-tujuan kami, kami membentuk Komite Peningkatan Bisnis yang melakukan rapat setiap dua minggu dan diwakili oleh berbagai bidang dalam organisasi kami. Inisiatif peningkatan bisnis yang telah berdampak signifikan adalah inisiatif yang terkait dengan pembayaran invoice, akurasi perkiraan kas, dukungan teknologi informasi dan produktivitas dan jangka waktu pengadaan.

## PEMASARAN

PTI membayar biaya jasa bantuan manajemen dan teknis terkait dengan realisasi proyek-proyek kami, kebutuhan-kebutuhan pembiayaan kami, pembangunan dan pengoperasian fasilitas-fasilitas kami, dan pemasaran produk kami. Pemasaran produk akhir nikel kepada pelanggan, seperti pabrik-pabrik pengolahan baja nirkarat dan produsen-produsen logam campuran, dilakukan oleh tenaga penjualan Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Sebagai hasilnya, kami tidak menanggung biaya pemasaran dan penjualan.

The following are examples of our initiatives:

- improving productivity and organizational structure by filling vacant mandatory positions with existing employees, re-evaluating job profiles, eliminating activities that do not add value, combining related responsibilities and departments and implementing a hiring freeze;
- optimizing internal resources by reducing the use of external consultants whenever feasible;
- enhancing systems and processes, including compliance, by installing systems for fuel usage control in key areas of our operations, implementing an Integrated Contractor System Framework to improve local contractors' capability and performance, continuing to participate in Vale's global procurement program, securing long-term contracts with key suppliers, providing employee training to improve operation of equipment in order to extend its life and reduce maintenance costs and improving controls on disbursements related to discretionary spending; and,
- implementing the best standards by enhancing energy conservation through changes in our approach to energy usage and achieving tangible progress in reducing consumption, improving road conditions and fleet management to extend tire life, cutting fuel consumption and lowering maintenance costs.

**Monitoring key commodity prices.** Management continuously monitors key commodity prices – including those for nickel and oil – and thoroughly analyzes any decisions that can impact our costs, leading to actions such as shutting down thermal generators when their operating costs outweigh the added value they generate. We also continuously study how to lower HSFO consumption in our process plant's reduction kiln through improved performance and consider alternatives to oil in certain aspects of our operations.

**Business improvement.** In order to facilitate business improvement and ensure the realization of our objectives, we established a Business Improvement Committee that meets every two weeks and has representatives from different areas of our organization. Business improvement initiatives that have already had a significant impact are related to invoice payments, cash forecast accuracy, information technology support and productivity and procurement lead times.

## MARKETING

PTI paid management and technical assistance fees related to the realization of our projects, our financing needs, construction and operation of our facilities, and the marketing of our products. The marketing of finished nickel to customers such as stainless steel mills and alloy steel producers is carried out by Vale Canada's and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.'s sales forces. As a result of this arrangement, we do not incur any marketing and selling expenses.

## KEBIJAKAN DIVIDEN DAN RASIO PEMBAYARAN DIVIDEN

Kebijakan PTI adalah melakukan pembayaran dividen berdasarkan ketersediaan kas, sampai sejumlah laba ditahan, setelah melakukan penyisihan yang berhati-hati untuk modal kerja, keperluan pembayaran hutang dan belanja barang modal.

Berikut adalah catatan historis pembayaran dan rasio dividen kami:

	2010	2009	2008*)	2007*)	2006*)
Laba bersih (AS\$ juta)	437,4	170,4	359,3	1.173,0	513,4
Dividen yang diumumkan dari laba tahunan (AS\$ juta)	198,7	110,0	140,1	1.197,4	521,7
Dividen yang diumumkan dari laba tahunan (AS\$ / saham)	0,02	0,01	0,01	0,12	0,05
Rasio pembayaran dividen	0,77	0,63	0,63	1,25	0,21
Jumlah pembayaran dividen tunai dalam setahun (AS\$ juta)	338,8	110,0	225,0	1.469,3	109,3

\*) Disajikan kembali untuk mencerminkan pemecahan saham perseroan dari satu menjadi sepuluh saham yang berlaku efektif sejak tanggal 15 Januari 2008

Pembahasan sejarah dividen disajikan pada bagian Ulasan tahun 2010 dalam Laporan Tahunan ini.

Pada tanggal 5 Maret 2010, pemegang saham menyetujui dividen final dan dividen luar biasa untuk tahun 2008 sebesar AS\$0,0141 per lembar saham, dibayarkan pada tanggal 14 April 2010 kepada pemegang saham. Pada tanggal 16 September 2010, PTI mengumumkan pembagian dividen interim tahun 2010 sebesar AS\$0,02 per lembar saham, dibayarkan pada tanggal 22 Oktober 2010 kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 8 Oktober 2010. Secara historis kami mempertahankan rasio pembayaran dividen yang tinggi, seperti ditunjukkan pada tabel di atas.

## INFORMASI MATERIAL TENTANG INVESTASI HUTANG/MODAL, EKSPANSI, DIVESTASI ATAU RESTRUKTURISASI

### Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior (SEFA)

Mengingat harga nikel yang rendah dan kondisi pasar hutang dunia, termasuk kapasitas perbankan yang sangat terbatas dan rendahnya keinginan untuk memberikan pinjaman sejak akhir tahun 2008 sampai pertengahan tahun 2009, PTI ketika itu percaya bahwa memperoleh pinjaman dari Vale S.A. adalah tindakan yang berhati-hati dan disarankan sampai kondisi pasar cukup baik sehingga dapat menggantikan atau melunasi fasilitas tersebut. Perpanjangan hutang sesuai dengan perjanjian hutang bergulir jangka pendek akan memungkinkan PTI memenuhi komitmen keperluan modal dan operasi dan menghindari kemungkinan kekurangan kas. PTI akan membayar bunga atas pinjaman sejak tanggal penarikan sampai pinjaman tersebut dibayarkan kembali pada tingkat suku bunga berdasarkan LIBOR (suku bunga yang berlaku atas deposito dalam dolar AS di pasar antar bank London, seperti yang dikutip oleh kantor berita komersial) ditambah 5%, dihitung berdasarkan 360 hari dalam setahun untuk jumlah hari aktual yang telah berlalu.

Selain perjanjian-perjanjian pengikatan sesuai dengan transaksi pinjaman bagi perusahaan untuk (a) mematuhi semua undang-undang dan perjanjian-perjanjian material, (b) menjaga dan mempertahankan aset-asetnya, (c) beroperasi sesuai dengan praktik-praktik pertambangan yang wajar dan Kontrak Karya, (d) mengasuransikan aset-aset dan usahanya, dan (e) membebaskan

## DIVIDEND POLICY AND DIVIDEND PAYOUT RATIO

PTI's policy is to make dividend payments based on available cash, up to the amount of retained earnings, after prudently making provision for working capital, debt service requirements and capital expenditures.

The following is our historical record of dividend payments and ratios:

	2010	2009	2008*)	2007*)	2006*)
Net earnings (US\$ million)	437.4	170.4	359.3	1,173.0	513.4
Dividends declared from annual earnings (US\$ million)	198.7	110.0	140.1	1,197.4	521.7
Dividends declared from annual earnings (US\$/share)	0.02	0.01	0.01	0.12	0.05
Dividend payout ratio	0.77	0.63	0.63	1.25	0.21
Total cash dividends paid out in a year (US\$ million)	338.8	110.0	225.0	1,469.3	109.3

\*) Restated to reflect a split of PTI's shares on a 10-for-one basis effective on January 15, 2008.

Please refer to the 2010 in Review section in this Annual Report for dividend history details.

On March 5, 2010, shareholders approved a final and extraordinary dividend for 2008 of US\$0.0141 per share, payable on April 14, 2010 to shareholders. On September 16, 2010, PTI announced a 2010 interim dividend distribution of US\$0.02 per share, payable on October 22, 2010 to shareholders of record as of October 8, 2010. Historically we have maintained a high dividend payout ratio, as shown in the table above.

## MATERIAL INFORMATION FOR CAPITAL/DEBT INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT OR RESTRUCTURING

### Senior Export Facility Agreement (SEFA)

Given the low nickel prices and global credit market conditions, including the extremely limited capacity and appetite of banks to lend from late 2008 until mid-2009, PTI at the time believed that it was prudent and advisable to secure credit from Vale S.A. until market conditions improved sufficiently to allow for the replacement or prepayment of the facility with Vale International SA. An extension of credit under a short-term revolving credit facility agreement would allow PTI to meet its existing capital and operating commitments and avoid a potential cash shortfall. PTI would pay interest on each outstanding advance from the drawdown date until the advance is repaid at an interest rate of LIBOR (the interest rates applicable to U.S. dollar deposits in the London Interbank Market, as quoted by commercial news services) plus 5%, calculated on the basis of a year of 360 days for the actual number of days elapsed.

In addition to the customary covenants provided in a loan transaction for a company to (a) comply with all laws and material agreements, (b) maintain and preserve its assets, (c) operate in accordance with normal mining practices and the CoW, (d) insure its assets and business, and (e) indemnify officers and agents

pejabat-pejabat dan agen-agen pemberi pinjaman dalam hal terjadi pelanggaran perjanjian, perseroan juga setuju untuk mendepositokan semua pendapatan dan jumlah lainnya yang diterima pada rekening di kota New York, asalkan perseroan mempertahankan sejumlah AS\$20 juta pada rekening di Republik Indonesia atau di tempat lain.

Karena transaksi ini adalah Transaksi Material berdasarkan peraturan pasar modal dan merupakan transaksi konflik kepentingan berdasarkan anggaran dasar PTI, maka transaksi ini disetujui pada RUPS Luar Biasa PTI yang diadakan pada tanggal 17 April 2009. Namun dengan kemudian membaiknya kinerja keuangan perseroan dan kondisi pasar keuangan, PTI memutuskan untuk tidak mengeksekusi perjanjian fasilitas pinjaman bergulir jangka pendek dengan Vale S.A. ini. Pada akhir tahun tersebut, PTI memilih untuk memanfaatkan pendanaan jangka panjang dari pihak ketiga yang lebih menarik untuk proyek Karebbe dalam bentuk fasilitas ekspor.

Perkiraan biaya proyek Karebbe adalah AS\$410 juta, dan merupakan arus kas keluar yang signifikan. Per tanggal 31 Desember 2009, PTI telah mengeluarkan biaya sebesar AS\$167,9 juta dan mengantisipasi belanja modal sebesar AS\$242,1 juta. Per tanggal 31 Desember 2010, PTI telah mengeluarkan biaya AS\$315,8 juta dan mengantisipasi belanja modal sebesar AS\$94,2 juta.

Karena itu, pada tanggal 30 November 2009, PTI menandatangani SEFA dengan Mizuho Corporate Bank, Ltd. dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., masing-masing sebagai Pemberi Pinjaman, Agen Fasilitas dan Agen Kolateral, dengan Vale, S.A. sebagai Penjamin. Fasilitas sebesar AS\$300 juta ini (terdiri dari pinjaman dari bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. sebesar \$AS200 juta dan Mizuho Corporate Bank, Ltd. sebesar AS\$100 juta) menetapkan tingkat bunga dengan tarif LIBOR ditambah 1,5% per tahun untuk periode pembayaran bunga yang relevan; pembayaran bunga dimulai pada tanggal 19 Februari 2010. Pokok pinjaman akan dibayar dalam 16 cicilan setengah tahunan mulai tanggal 19 Februari 2012.

Sepanjang pengeluaran ini memenuhi syarat untuk Asuransi Sumber Daya Alam dan Energi, pemberi pinjaman akan meminjamkan dana untuk proyek Karebbe kepada PTI melalui NEXI (sampai sejumlah yang diperjanjikan). NEXI adalah perusahaan asuransi Jepang yang setuju mengasuransikan 100% kerugian yang disebabkan oleh peristiwa politik di Brazil dan 97,5% kerugian yang disebabkan oleh peristiwa komersial. Pinjaman tersedia sejak tanggal SEFA sampai dengan dua tahun setelahnya.

Per 31 Desember 2009, PTI telah membayar biaya jasa dimuka dan biaya jasa agen sebesar AS\$4,5 juta, premi asuransi NEXI sebesar AS\$5,7 juta, dan biaya-biaya jasa lainnya sebesar AS\$240.000. Biaya-biaya tersebut telah dikapitalisasi sebagai pinjaman jangka panjang dan diamortisasi sampai akhir periode fasilitas SEFA.

Biaya-biaya jasa berikut merupakan biaya yang harus dibayar PTI sepanjang masa pinjaman SEFA:

- Biaya jasa agen kepada Agen Fasilitas, sebesar AS\$20.000 per tahun, setiap tanggal 30 November, sampai semua pinjaman telah dibayar penuh;
- Biaya jasa Agen Kolateral sekitar AS\$ 15.000 per tahun;
- Biaya jaminan kepada penjamin sebesar 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman yang belum dilunasi; dan
- Biaya komitmen sebesar 0,5% dari rata-rata harian jumlah yang tidak digunakan dari komitmen masing-masing pemberi pinjaman berdasarkan fasilitas, dibayarkan setiap enam bulan.



**Seorang karyawan melakukan pengisian nikel dalam matte ke dalam kantong.**

**An employee fills bags with nickel in matte.**



of the lender in the event of a breach of such covenants, the Company also agrees to deposit all revenues and other amounts received in accounts in the City of New York, provided that the Company maintains up to US\$20 million in accounts in the Republic of Indonesia or elsewhere.

As the transaction is a Material Transaction under the capital market regulation and a conflict of interest transaction under PTI's articles of association, the transaction was approved at PTI's Extraordinary General Meeting of Shareholders held on April 17, 2009. However, in light of the subsequent improvement in PTI's financial performance and better financial market conditions, PTI decided not to execute the short-term revolving credit facility agreement reached with Vale International SA. Later in the year, PTI chose to take advantage of available and attractive third-party long-term funding for the Karebbe project in the form of an export facility.

The Karebbe project cost is estimated at US\$410 million, representing a significant cash outflow. As at December 31, 2009, PTI had spent US\$167.9 million and anticipates future expenditures of US\$242.1 million. As at December 31, 2010, PTI had spent US\$315.8 million and anticipates future expenditures of US\$94.2 million.

Accordingly, on November 30, 2009, PTI entered into a SEFA with Mizuho Corporate Bank, Ltd. and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., as the Lender, Facility Agent and Collateral Agent, respectively, with Vale S.A. as the guarantor. The facility of US\$300 million (consisting of loans from the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. of US\$200 million and from Mizuho Corporate Bank, Ltd. of US\$100 million) is subject to interest at LIBOR plus 1.5% per annum for the relevant interest period; PTI began paying interest on February 19, 2010. The principal will be repaid in 16 semi-annual installments beginning on February 19, 2012.

To the extent that the expenditures are eligible for Energy and Natural Resources insurance, lenders will make loans to PTI through NEXI (up to their committed facility amounts) to fund the Karebbe project. NEXI is a Japanese insurance agency and has agreed to cover 100% of any loss caused by Brazilian political events and 97.5% of any loss caused by commercial events. Loans are available from the date of the SEFA up to two years from that date.

As of December 31, 2009, PTI had paid upfront fees and agency fees of US\$4.5 million, NEXI insurance premium of US\$5.7 million, and other fees of US\$240,000. These amounts have been capitalized as long-term borrowing and amortized until end of SEFA facility period.

The following fees are to be paid over the life of the SEFA loan by PTI:

- agency fee to the Facility Agent, amounting to US\$20,000 per annum, on every November 30, until all loans have been paid in full;
- Collateral Agent fees of approximately US\$15,000 annually;
- guarantee fee to the guarantor of 1.5% per annum on the outstanding loan amount; and
- commitment fee of 0.5% of the average daily unused amount of the committed amount of each lender under the facility, payable every six months.

Fasilitas SEFA terikat pada perjanjian-perjanjian tertentu, antara lain:

- wajib menyerahkan kepada agen fasilitas dalam jangka waktu masing-masing 180 hari dan 90 hari sejak akhir tiap tahun dan periode fiskal, laporan keuangan yang telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan laporan keuangan triwulanan;
- dana hasil pinjaman hanya akan digunakan untuk mendanai konstruksi, pembangunan dan operasi dari proyek Karebbe;
- perolehan akan diurutkan secara tanggung renteng untuk semua peminjaman saat ini dan masa depan yang terhutang pada obligor;
- sehubungan dengan periode penilaian (setiap enam bulan), nilai pasar dari Perjanjian Lepas-Ambil yang Ditentukan (setiap perjanjian ekspor awal dan setiap perjanjian ekspor lainnya yang dari waktu ke waktu dibentuk oleh peminjam berdasarkan fasilitas ini) tidak boleh kurang dari 110% jumlah hutang berjalan (bunga ditambah dengan pokok angsuran) pada periode penilaian;
- selalu menjaga agar nilai pasar dari Perjanjian Lepas-Ambil yang Ditentukan tidak kurang dari 110% jumlah komitmen ditambah dengan jumlah pokok pinjaman dari pinjaman berjalan dan jumlah hutang berjalan;
- peminjam akan menginstruksikan kepada JP Morgan Chase Bank, N.A. untuk mentransfer cicilan dengan porsi sebagai berikut :
  - Periode bulan kalender pertama bunga 20%
  - Periode bulan kalender kedua bunga 40%
  - Periode bulan kalender ketiga bunga 60%
  - Periode bulan kalender keempat bunga 80%; dan
  - Periode bulan kalender kelima bunga 100%
- Peminjam tidak akan memberikan hak atas penjaminan asetnya kepada Pemberi Pinjaman lain selain dari Pemberi Pinjaman yang disebutkan dalam Perjanjian Penjaminan;
- Peminjam, tanpa izin dari Pemberi Pinjaman, tidak akan mengkonsolidasikan atau melakukan penggabungan usaha dengan perseroan lain atau memindahkan keseluruhan atau sebagian besar asetnya kepada pihak lain;
- Tidak diperbolehkan menghapus aset yang berkaitan dengan proyek Karebbe tanpa persetujuan terlebih dahulu;
- Pemberi Jaminan akan menjaga agar, pada setiap pemeriksaan keuangan akhir periode Pemberi Jaminan, yaitu pada hari terakhir setiap semester fiskal, selalu memenuhi persyaratan keuangan berikut:
  - Rasio Hutang terhadap EBITDA yang telah disesuaikan tidak lebih dari 4,5:1,0, dan
  - Rasio EBITDA yang telah disesuaikan terhadap biaya bunga tidak kurang dari 2,0: 1,0

Peristiwa wan-prestasi akan dipicu oleh beberapa keadaan berikut: tidak membayar pokok pinjaman, tidak membayar biaya jasa atau bunga, gagal memenuhi persyaratan perjanjian, dan bangkrut atau tidak solven.

## **BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA (AFILIASI)**

### **Transaksi Benturan Kepentingan**

Tidak ada transaksi benturan kepentingan dengan pihak mana pun yang tercatat pada tahun 2010 dan 2009.

### **Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa (Afiliasi)**

Pada tanggal 31 Desember 2010, PTI menanda-tangani Perjanjian Kerjasama dengan Vale Serve Malaysia Sdn. Bhd. (Vale Malaysia), berlaku efektif sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011 kecuali diakhiri lebih



The SEFA facility is subject to certain covenants, among others:

- to furnish the facility agent within 180 days and 90 days from the end of each fiscal year and period, respectively, with PTI's audited financial statements with an unqualified opinion and the unaudited quarterly financial statements;
- proceeds of the loan will be used solely to finance the construction, development and operation of the Karebbe project;
- gain *pari passu* ranking for all other present and future senior unsecured and unsubordinated indebtedness of the obligor;
- with respect to the measurement period (six months basis), the market value of the Designated Off-Take Agreement (each of the initial export agreements and each other export agreement from time-to-time designated by the borrower under the facility) will not be less than 110% of the debt service amount (interest plus principal instalment) with respect to the measurement period;
- at all times the market value of the Designated Off-Take Agreement will not be less than 110% of the then sum of the commitments plus the outstanding principal amount of the loans outstanding and the debt service coverage amount;
- the borrower will instruct JP Morgan Chase Bank, N.A. to transfer the instalment portion as follows:
  - in the first calendar month of the interest period 20%;
  - in the second calendar month of the interest period 40%;
  - in the third calendar month of the interest period 60%;
  - in the fourth calendar month of the interest period 80%; and
  - in the fifth calendar month of the interest period 100%;
- the borrower will not create or permit to exist any lien on any collateral, except for the lien created by the Security Agreement;
- no obligor will, without the consent of the lenders, consolidate with or merge into any other corporation or convey or transfer all or substantially all of its assets to any other person;
- no disposal of assets related to the Karebbe project without prior consent;
- the guarantor will maintain, for each financial test period ending on the last day of each fiscal semester of the Guarantor, the following financial covenants:
  - Debt-to-Adjusted EBITDA ratio of not more than 4.5:1.0; and
  - Adjusted EBITDA-to-Interest Expense ratio of not less than 2.0:1.0.

An event of default will be triggered under the following circumstances: non-payment of principal, non-payment of fee or interest, failure to perform any covenant, involuntary proceedings and bankruptcy or insolvency.

## CONFLICT OF INTEREST AND RELATED PARTY (AFFILIATED) TRANSACTIONS

### Conflict of Interest Transactions

There was no transaction containing conflict of interest with any parties reported in 2010 and 2009.

### Related Party (Affiliated) Transactions

On December 31, 2010, PTI signed a Service Agreement with Vale Serve Malaysia Sdn. Bhd. (Vale Malaysia), effective from January 17, 2011 until December 31, 2011, unless terminated earlier with 30 days prior written notice. Pursuant to the Service Agreement, Vale Malaysia provides to PTI certain support service

awal dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, Vale Malaysia memberikan kepada PTI prosedur layanan pendukung tertentu yang dibuat oleh Vale Malaysia, dan PTI akan menggunakan infrastruktur administrasi Vale Malaysia untuk melaksanakan kegiatan pendukung yang berkaitan dengan piutang dagang dan pembayaran gaji tenaga kerja asing. PTI akan menggantikan dan membayar secara bulanan kepada Vale Malaysia sejumlah (i) biaya yang terkait langsung dengan penggunaan infrastruktur administrasi tersebut, dan (ii) pro-rata dari biaya tidak langsung yang terdiri dari biaya-biaya tetap. Verifikasi perhitungan jumlah yang akan diganti dan dibayarkan akan dilakukan secara bulanan oleh Vale Malaysia. Disepakati bahwa Vale Malaysia tidak akan menambahkan biaya jasa, remunerasi atau margin laba terhadap biaya tersebut. Perkiraan biaya yang wajib diganti dan dibayar oleh PTI pada tahun 2011 berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebesar AS\$108.152,07 (nilai penuh) per bulan. Jika pada bulan tertentu, biaya aktual (setelah diverifikasi) berkisar lebih atau kurang 8,33% dari perkiraan biaya, Vale Malaysia wajib memperkirakan ulang biaya untuk setiap prosedur layanan pendukung dan melaporkannya kepada PTI. Setelah perkiraan biaya dihitung ulang, para pihak wajib menggunakan nilai yang baru dan melaksanakan penyesuaian pada saldo sebelumnya.

**Penjualan dan piutang usaha.** Transaksi terbesar kami dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah penjualan, karena seluruh produksi nikel dalam matte kami terikat pada komitmen untuk dijual kepada Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.. Pengikatan ini ditetapkan dalam perjanjian penjualan bersifat jangka panjang, "harus ambil," dalam denominasi dollar AS, yang berakhir pada tahun 2025 kecuali diperpanjang, dimodifikasi atau diperbaharui. Harga jual adalah yang lebih tinggi di antara nilai rata-rata realisasi harga bersih nikel Vale dengan nilai yang dihitung dengan formula berdasarkan harga tunai nikel di Bursa Logam London. Penjualan kepada Vale Canada adalah AS\$1.021,7 juta pada tahun 2010 dan AS\$610,3 juta pada tahun 2009, sedangkan penjualan kepada Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. berjumlah AS\$254,6 juta pada tahun 2010 dan AS\$150,7 juta pada tahun 2009. Piutang usaha berjalan dari Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. per 31 Desember 2010 adalah masing-masing AS\$99,3 juta (2009: AS\$78,5 juta) dan AS\$24,8 juta (2009: AS\$19,3 juta).

**Biaya jasa bantuan manajemen dan teknis.** Biaya jasa dibayarkan kepada Vale Canada berdasarkan perjanjian bantuan manajemen dan teknis yang terkait dengan realisasi proyek-proyek kami, kebutuhan-kebutuhan pembiayaan kami, pembangunan dan pengoperasian fasilitas-fasilitas kami, dan pemasaran produk kami. Sebagai hasilnya, kami tidak menanggung beban penjualan. Biaya jasa ini adalah yang lebih rendah di antara 1,8% dari penjualan bersih atau 4% dari laba kena pajak bersih, asalkan jumlah yang dibayarkan setiap triwulan tidak lebih rendah dari AS\$25.000. Biaya jasa yang dibayarkan pada tahun 2010 adalah AS\$23,0 juta, yang merupakan 83% dari beban penjualan, umum dan administrasi; biaya jasa yang dibayarkan pada tahun 2009 adalah AS\$9,0 juta, yang merupakan 69% dari beban penjualan, umum dan administrasi.

**Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi.** Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi adalah AS\$2,5 juta pada tahun 2010, merupakan 3% dari total biaya karyawan, dan AS\$2,3 juta pada tahun 2009, mewakili 3% dari total biaya karyawan.

**Opsi setara saham.** PTI juga telah memberikan kepada karyawan-karyawan penting berkebangsaan Indonesia opsi untuk membeli "setara saham" PTI dengan harga yang telah ditentukan terlebih dahulu. Selembar "setara saham" memiliki nilai yang sama dengan selembar saham biasa PTI yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Eksekusi opsi ini biasanya dilakukan secara tunai. Opsi yang dieksekusi dibukukan sebagai beban kompensasi karyawan. Opsi yang dieksekusi

procedures developed by Vale Malaysia whereby PTI will use the administrative infrastructure of Vale Malaysia to carry out certain supporting activities relating to accounts payable and expatriates payroll. PTI will reimburse and pay, on a monthly basis, to Vale Malaysia an amount consisting of (i) costs directly related to the use of such administrative infrastructure and (ii) prorated indirect costs which consist of overhead and seat costs. The verification calculation of the amount to be reimbursed and paid shall be done monthly by Vale Malaysia. It is agreed that there will be no fees, remuneration or profit margin added by Vale Malaysia to such costs. The cost estimates to be paid and reimbursed by PTI in 2011 under the Service Agreement amounts to US\$108,152.07 (full amount) per month. If during any monthly period, the costs actually incurred (upon verification) vary more or less than 8.33% in relation to the cost estimate, Vale Malaysia shall re-estimate the costs for each support service procedure and report them to PTI. Whenever the cost estimate is recalculated, the parties shall adopt the new estimated values and carry out settlement of previous accounts.

**Sales and trade receivables.** Our largest related party transactions are our sales, as all of our nickel in matte production is committed to be sold to Vale Canada and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. These arrangements are set forth in long-term, "must-take," U.S. dollar-denominated sales agreements that end in 2025, unless extended, modified or renewed. The selling price is the greater of the value determined by a formula based on Vale's net average realized price for nickel and the value determined by a formula based on the LME cash price for nickel. Sales to Vale Canada were US\$1,021.7 million in 2010 and US\$610.3 million in 2009, while our sales to Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. amounted to US\$254.6 million in 2010 and US\$150.7 million in 2009. Trade receivables outstanding from Vale Canada and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. on December 31, 2010 were US\$99.3 million (2009: US\$78.5 million) and US\$24.8 million (2009: US\$19.3 million), respectively.

**Management and technical assistance fees.** Fees are paid to Vale Canada based on management and technical assistance agreements related to the realization of our projects, our financing needs, construction and operation of our facilities and the marketing of our products. As a result, we do not incur selling expenses. The fee is the lower of 1.8% of net sales or 4% of net taxable income, provided that the amount payable for each quarter is not less than US\$25,000. The fee paid in 2010 was US\$23.0 million, which represented 83% of our selling, general and administration expenses. The fee paid in 2009 was US\$9.0 million, which represented 69% of our selling, general and administration expenses.

**Salaries and allowances of the Board of Commissioners and Directors.** Salaries and allowances of the Boards of Commissioners and Directors were US\$2.5 million in 2010, representing 3% of total employee costs, and US\$2.3 million in 2009, representing 3% of total employee costs.

**Share option equivalents.** PTI has also awarded key Indonesian employees options to purchase "share equivalents" of PTI at a predetermined exercise price. A "share equivalent" has the same value as a common share traded on the Indonesia Stock Exchange. The exercise of these options is usually settled in cash. Options exercised are included in compensation expense. Options exercised for the year ended December 31, 2010 were 2,937.5 thousand share equivalents (2009: 289.9 thousand). For the year ended December 31, 2010 share equivalent compensation cost was US\$8.4 million (2009: US\$10.2 million). As at December 31, 2010, there were outstanding options to purchase an

pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 adalah 2.937,5 ribu setara saham (2009: 289,9 ribu). Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 biaya kompensasi setara saham adalah AS\$8,4 juta (2009: AS\$10,2 juta). Per 31 Desember 2010, terdapat opsi yang belum dieksekusi sejumlah 10.515.000 setara saham (2009: 13.452.500 setara saham) dengan harga yang telah ditentukan terlebih dahulu berkisar antara Rp156 sampai Rp7.350 (2009: antara Rp156 sampai Rp7.350). Per 31 Desember 2010 kewajiban PTI terkait dengan imbalan kerja ini adalah AS\$2,6 juta (2009: AS\$1,97 juta).

**Pinjaman kepada karyawan.** Jumlah pinjaman yang diberikan PTI pada karyawan per 31 Desember 2010 adalah AS\$19,1 juta (2009: AS\$17,6 juta).

**Hutang usaha.** Kami membayarkan kembali kepada perusahaan-perusahaan afiliasi kami di luar negeri belanja-belanja tertentu yang ditanggung dalam memberikan jasa atau bertindak atas nama PTI. Jumlah hutang usaha terkait dengan transaksi ini per 31 Desember 2010 adalah AS\$8,6 juta dan per 31 Desember 2009 adalah AS\$4,3 juta.

**Akrual biaya jaminan.** Sehubungan dengan SEFA (lihat bagian Informasi Material Material tentang Investasi Hutang/Modal, Ekspansi, Divestasi, atau Restrukturisasi dalam Laporan Tahunan ini), PTI dan Vale S.A., entitas induk usaha PTI, menandatangani perjanjian jaminan pinjaman, yaitu Vale S.A. setuju untuk menjamin fasilitas hutang sebesar AS\$300 juta yang diperoleh PTI. Biaya jasa penjaminan sebesar 1,5% per tahun atas setiap penarikan pinjaman yang

Pemantauan tanur pereduksi di  
ruang pengendali.

Monitoring a reduction kiln from the  
control room.



aggregate of 10,515,000 share equivalents (2009: 13,452,500 share equivalents) with predetermined prices ranging from IDR156 to IDR7,350 (2009: from IDR156 to IDR7,350). As at December 31, 2010, PTI's obligation relating to this benefit was US\$2.6 million (2009: US\$1.97 million).

**Loans to employees.** PTI's outstanding loans to employees on December 31, 2010 amounted to US\$19.1 million (2009: US\$17.6 million).

**Trade payables.** We reimburse our other overseas affiliated companies for certain expenditures incurred in providing service or acting on behalf of PTI. Outstanding trade payables related to these transactions on December 31, 2010 were US\$8.6 million and on December 31, 2009 were US\$4.3 million.

**Accrued guarantee fee.** In connection with the SEFA (refer to Material Information for Capital/Debt Investment, Expansion, Divestment or Restructuring section in this Annual Report), PTI and Vale S.A., the ultimate parent entity of PTI, entered into a loan guarantee agreement whereby Vale S.A. has agreed to guarantee a US\$300 million debt facility obtained by PTI. A guarantee fee of 1.5% per annum on each loan drawdown made by PTI under the SEFA is payable to Vale S.A. by PTI on each interest payment date (the first interest payment date was the last business day in February 2010, and thereafter, the last business day of each August and February). Accrued guarantee fee at December 31, 2010, was US\$0.7 million (2009: Nil).



dilakukan PTI berdasarkan SEFA wajib dibayarkan kepada Vale S.A. pada setiap tanggal pembayaran bunga (tanggal pembayaran bunga pertama adalah hari kerja terakhir pada bulan Februari 2010, dan selanjutnya hari kerja terakhir setiap bulan Agustus dan Februari. Akrual biaya jaminan per 31 Desember 2010 adalah AS\$0,7 juta (2009: Nil).

**Biaya jasa lainnya.** Biaya jasa lainnya terutama mewakili biaya-biaya jasa teknis kepada Vale Technology Development Limited dan Vale Europe Limited, sejumlah AS\$4,0 juta pada tahun 2010 (2009: AS\$1,9 juta).

## KONTINJENSI DAN KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN

Berdasarkan Kontrak Karya Perpanjangan, PTI telah menyanggupi, tergantung hasil studi kelayakan ekonomis dan teknis, untuk mengeksplorasi potensi pengembangan deposit nikel di Pomalaa di Sulawesi Tenggara dan di Bahodopi di Sulawesi Tengah. Pembangunan fasilitas pengolahan di Pomalaa dan Bahodopi serta pembangunan jalan antara Bahodopi dan Sorowako merupakan bagian dari kesanggupan Kontrak Karya kami yang masih harus diselesaikan.

- **Pengembangan tambang di Bahodopi.** Kami merencanakan untuk menambang bijih nikel saprolitik di Bahodopi. Bijih dari Bahodopi akan digabungkan dengan bijih dari Sorowako untuk menjadi umpan bagi fasilitas pengolahan pyrometalurgi di Sorowako. Kami sedang mengkaji berbagai opsi sehubungan dengan pembangunan fasilitas pengolahan di Bahodopi. Kami juga sedang mengevaluasi pembangunan jalan dari Bahodopi ke Sorowako.

Rencana jangka menengahnya adalah sebagai berikut:

- Pembangunan jalan dari Bahodopi ke Sorowako untuk keperluan umum dan produksi;
- Pembukaan tambang di wilayah Bahodopi; dan
- Pembangunan pabrik persiapan bijih di bagian barat blok Bahodopi, yang terdiri dari stasiun pemilahan, penyimpanan dan pengeringan bijih basah, dan juga transportasi bijih kering dari Bahodopi ke Sorowako.

PTI sedang mengajukan permohonan izin untuk memulai pembangunan jalan kepada pemerintah, dilanjutkan dengan izin yang relevan untuk memulai pembangunan tambang.

- **Proyek Pomalaa.** Pada tanggal 1 Juli 2010, PTI menyerahkan kepada KESDM revisi studi yang menyimpulkan bahwa pembangunan pabrik produksi di Pomalaa pada saat ini tidak layak secara ekonomi dengan menekankan kondisi-kondisi berikut:

- Tidak ada cukup bukti tentang keberhasilan proyek serupa di tempat lain;
- Potensi harga nikel tidak menguntungkan pada jangka panjang disebabkan oleh kelebihan pasokan nikel; dan
- Ketidakpastian dalam sektor pertambangan disebabkan oleh implementasi Undang-Undang Pertambangan baru.

Namun demikian, kami berkomitmen untuk mengembangkan penambangan dan membangun pabrik produksi di Pomalaa, tergantung kelayakan ekonomi proyek tersebut.

PTI menerima tiga surat resmi dari Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 2 November, 25 November dan 15 Desember 2010, yang mewajibkan tindakan segera untuk membangun pabrik produksi di Pomalaa atau PTI akan dikenakan tuntutan hukum untuk melepaskan wilayah Pomalaa. Pada tanggal 21 Desember 2010 diadakan rapat

**Other fees.** Other fees which mainly represented technical service costs to Vale Technology Development Canada Limited and Vale Europe Limited, with a total amount of US\$4.0 million in 2010 (2009: US\$1.9 million).

## SIGNIFICANT COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Under the Modification Agreement, PTI has undertaken, subject to economic and technical feasibility, to explore the potential development of its nickel deposits at Pomalaa in Southeast Sulawesi and at Bahodopi in Central Sulawesi. Construction of processing facilities at Pomalaa and Bahodopi and the building of a road between Bahodopi and Sorowako are parts of our CoW undertakings that remain to be completed.

- **Bahodopi mine development.** In Bahodopi, we plan to mine a saprolitic nickel ore body. Ore from Bahodopi would be combined with ore from the Sorowako area to feed the existing pyrometallurgical processing facility in Sorowako. We are studying various options with respect to constructing a processing facility in Bahodopi. We are also evaluating the construction of a road from Bahodopi to Sorowako.

The mine plans are as follows:

- Construction of a road from Bahodopi to Sorowako for public and production purpose;
- Open a mine in Bahodopi area; and
- Construction of an ore preparation plant in the west part of Bahodopi block, which consists of a screening station, wet ore stockpile and dryer, as well as dried ore transportation from Bahodopi to Sorowako.

PTI is seeking a government permit to begin the construction of road, followed by the relevant permits to commence construction of the mine.

- **Pomalaa project.** On July 1, 2010, PTI submitted a revised study to the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) which concludes that the construction of a production plant in Pomalaa is not currently economically viable emphasizing the following conditions:
  - There is no sufficient evidence about the accomplishment of a similar project elsewhere;
  - Potential for long-term unfavourable nickel price due to potential nickel over supply; and
  - There is uncertainty in the mining sector due to implementation of the New Mining Law.

Nevertheless, we are committed to developing the mine and to constructing a production plant in Pomalaa subject to economic viability of the project.

PTI received three official letters from the Governor of the Province of Southeast Sulawesi on November 2 and 25, 2010 and December 15, 2010, which required immediate action to construct a production plant in Pomalaa or a lawsuit will be filed demanding that PTI relinquish the Pomalaa area. On December 21, 2010, a meeting with Provincial Officials was conducted to discuss this matter, and it was agreed that this would be followed up by a written statement to be submitted to the Governor of Southeast Sulawesi by January 31, 2011. On January 31, 2011, PTI submitted a response proposing cooperation between PTI, the Governor,

dengan Pejabat Pemerintah tingkat Propinsi untuk membahas hal ini, dan dicapai kesepakatan untuk menindak-lanjuti dengan pernyataan tertulis yang akan diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2011. Pada tanggal 31 Januari 2011 PTI telah menyerahkan proposal mengajukan kerjasama antara PTI, Gubernur dan mitra strategis propinsi. Kami sedang menunggu jawaban dari Gubernur, dan berharap akan tercapai nota kesepakatan antara para pihak, dan dengan demikian tidak akan ada lagi permintaan untuk melepaskan wilayah Pomalaa.

Per 31 Desember 2010, PTI memiliki komitmen belanja barang modal, barang dan jasa dengan 361 pemasok pihak ketiga (219 pihak pada tahun 2009), yang akan dibayarkan mulai tahun 2011 sampai 2019, dan berjumlah AS\$490,6 juta (2009: AS\$405,3 juta).

Fasilitas-fasilitas pembangkit listrik tenaga air PTI yang ada saat ini dibangun dan beroperasi berdasarkan Keputusan Pemerintah Indonesia tahun 1975. Keputusan ini secara efektif mencakup juga fasilitas pembangkit listrik Balambano, yang merupakan tambahan dari fasilitas Larona, dan memberikan hak kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil alih fasilitas pembangkit listrik tenaga air tersebut dengan pemberitahuan tertulis kepada PTI dua tahun sebelumnya. Sampai saat ini tidak ada pemberitahuan tertulis demikian yang diterima PTI. Jika hak tersebut digunakan, fasilitas pembangkit listrik dimaksud akan dialihkan sebesar nilai bukunya dengan syarat Pemerintah menyediakan daya listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasi PTI, dengan tarif yang didasarkan pada biaya ditambah margin laba yang normal, sampai akhir masa Kontrak Karya.

#### **PERISTIWA PENTING PADA TAHUN 2010**

Pada tanggal 5 Maret 2010, PTI menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang menyetujui pengangkatan Peter Poppinga sebagai Presiden Komisaris PTI dan Tito Martins sebagai Komisaris. Dalam rapat yang sama, pemegang saham menyetujui pengunduran diri Arif S. Siregar dan mengangkat Tony Wenas sebagai Presiden Direktur. PTI juga mengumumkan dividen final dan luar biasa untuk tahun 2008 sebesar AS\$0,0141 per lembar saham.

Pada bulan Maret 2010, setelah PTI membentuk pusat layanan bersama untuk memperbaiki proses transaksi, memaksimalkan keunggulan operasi dan memusatkan pengendalian, sebagian besar aktivitas yang ditentukan telah dikerjakan oleh pusat layanan bersama kami. Fungsi rekrutmen dan fungsi aset tetap akan dikerjakan oleh pusat layanan bersama pada tahun 2011.

Pada tanggal 16 April 2010, PTI menyelenggarakan RUPS Tahunan yang menyetujui pengangkatan Peter Poppinga sebagai Presiden Komisaris, Jennifer Maki, Tito Martins, Mark Travers, Arif S. Siregar, Takeshi Kubota, dan Naoyuki Tsuchida sebagai Komisaris, dan juga menyetujui pengangkatan Nicolaas D. Kanter sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen, dan Irwandy Arif dan Arief T. Surowidjojo sebagai Komisaris Independen. Dalam rapat yang sama, pemegang saham menyetujui pengangkatan kembali Tony Wenas sebagai Presiden Direktur, Claudio Bastos sebagai Wakil Presiden Direktur dan Helwanurrachman Djumiril sebagai Direktur.

Helwanurrachman Djumiril mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur PTI pada tanggal 15 Juni 2010 dan berlaku efektif 45 hari sejak tanggal pengunduran diri.



and the province's strategic partner. We are currently having discussions with the Governor and expecting that a memorandum of understanding will be concluded between parties soon and as such there will be no further request to relinquish the Pomalaa area.

As of December 31, 2010, we have capital expenditure, goods and services commitments to 361 third party suppliers (219 in 2009); these commitments are payable between 2011 and 2019 and amount to US\$490.6 million (2009: US\$405.3 million).

PTI's existing hydroelectric facilities were constructed and are currently operated pursuant to a 1975 decree of the Indonesian Government. This decree effectively covers the Balambano generating capacity in addition to the original Larona facility, which was part of the expansion project. It vests an Indonesian Ministry with the right, upon two years' prior written notice to PTI, to acquire the hydroelectric facilities. No such notice has been given to date. If this right is exercised, the decree also provides that the hydroelectric facilities would be acquired at their net book value subject to the ministry providing PTI with sufficient power to meet its operating requirements, at a rate based on cost plus a normal profit margin, for the remaining term of the CoW.

#### **SIGNIFICANT EVENTS IN 2010**

On March 5, 2010, PTI held an Extraordinary General Meeting of Shareholders that approved the appointment of Peter Poppinga as the President Commissioner PTI and Tito Martins as Commissioner. At the same meeting, shareholders approved the resignation of Arif S. Siregar as President Director and appointed Tony Wenas as President Director. PTI also announced a final and extraordinary dividend for 2008 of US\$0.0141 per share.

As of March 2010, following the establishment of a shared service centre to improve our processing of transactions, maximize operational excellence and centralize controls, most of the designated activities had been incorporated by our shared service centre. The recruitment function and fixed assets function will be incorporated into shared service centre in 2011.

On April 16, 2010, PTI held an Annual General Meeting of Shareholders that approved the appointment of Peter Poppinga as the President Commissioner, Jennifer Maki, Tito Martins, Mark Travers, Arif S. Siregar, Takeshi Kubota, and Naoyuki Tsuchida as Commissioners, and also approved Nicolaas D. Kanter as the Vice-President Commissioner and Independent Commissioner and Irwandy Arif and Arief T. Surowidjojo as Independent Commissioners. At the same meeting, shareholders approved the reappointment of Tony Wenas as President Director, Claudio Bastos as Vice President Director and Helwanurrachman Djumiril as a Director.

Helwanurrachman Djumiril tendered his resignation as a director of PTI on June 15, 2010 which was effective 45 days from the date of resignation.

Pada tanggal 16 September 2010, PTI mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun 2010 sebesar AS\$0,02 per lembar saham.

Pada tanggal 28 Oktober 2010, PTI menyelenggarakan RUPS Luar Biasa untuk menyetujui pengunduran diri Naoyuki Tsuchida dan mengangkat Harumasa Kurokawa sebagai Komisaris menggantikan Tsuchida. Pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Bernardus Irmanto sebagai Direktur yang bertanggung jawab atas Layanan Perusahaan dan Sumber Daya Manusia. Pengangkatan Mr. Kurokawa dan Bapak Irmanto akan berakhir pada RUPS Tahunan tahun 2012.

Pada tanggal 3 November 2010, PTI mengumumkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengembalikan beberapa blok dalam wilayah Kontrak Karya kami di Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan No. 483.K/30/DJB/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang berlaku efektif sejak tanggal 10 Desember 2009. Luas blok yang dilepaskan adalah 28.000 hektar atau mewakili 12,8% dari total wilayah Kontrak Karya PTI. Total luas wilayah Kontrak Karya setelah mengembalikan menjadi sekitar 190.000 hektar. Mengembalikan ini diajukan oleh PTI setelah mempertimbangkan rencana penambangan jangka panjang di bawah Undang-Undang Pertambangan Indonesia yang baru. Mengembalikan beberapa blok ini tidak akan berdampak terhadap rencana penambangan atau cadangan PTI, dan akan memungkinkan Pemerintah mempertimbangkan alternatif pengembangan untuk wilayah tersebut sesuai dengan prioritas rencananya.

**Seorang karyawan sedang mengoperasikan *feed bin control panel* pada Furnace No 2.**

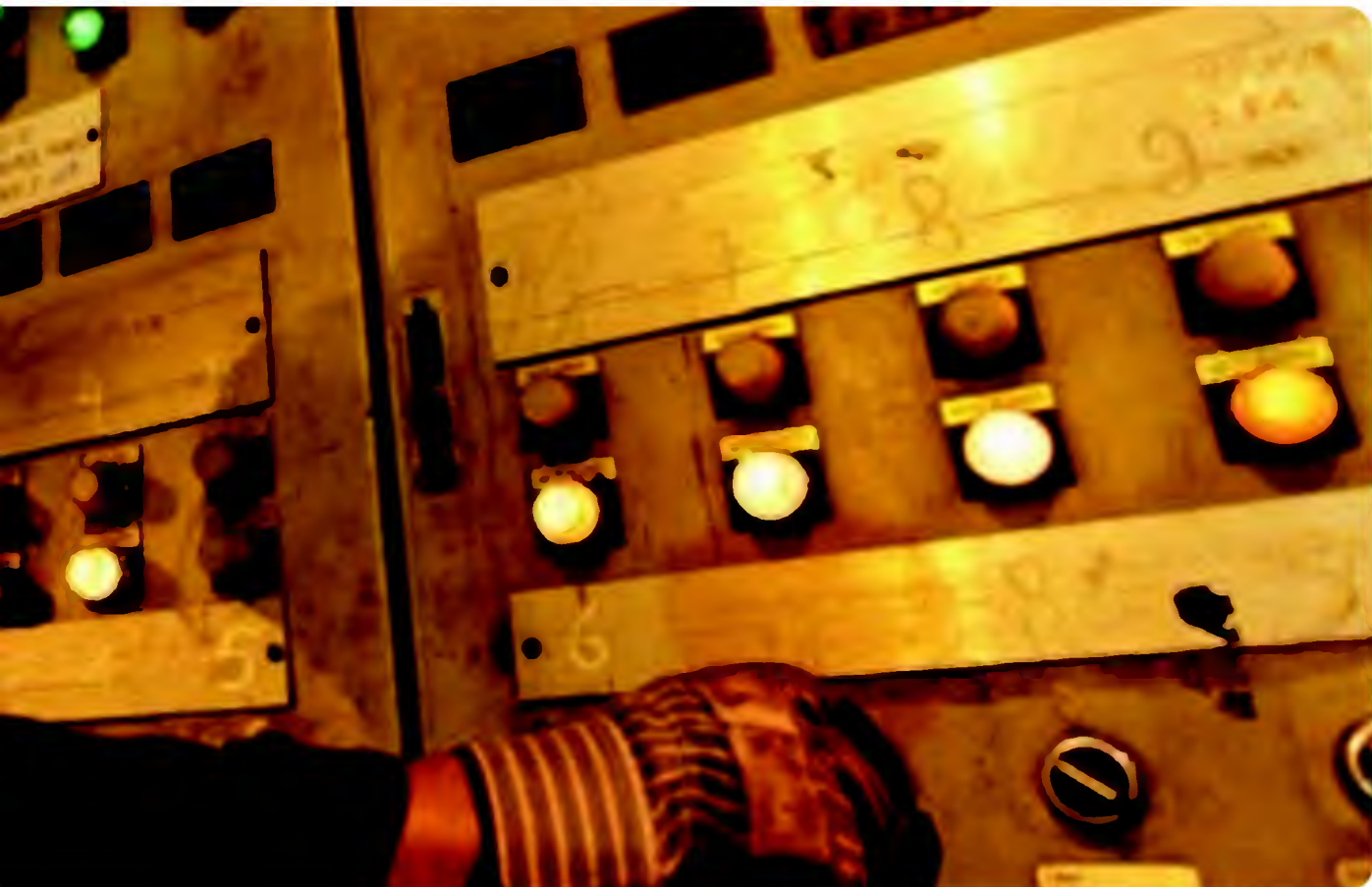
**An employee operates the *feed bin control panel* of Furnace No. 2.**



On September 16, 2010, PTI announced an interim dividend distribution for 2010 of US\$0.02 per share.

On October 28, 2010, PTI held an Extraordinary General Meeting of Shareholders that accepted Naoyuki Tsuchida's resignation and the appointment of Harumasa Kurokawa as Commissioner and Mr. Tsuchida's successor. Shareholders also approved the appointment of Bernardus Irmanto as Director responsible for Human Resources and Corporate Services. The terms of Mr. Kurokawa's and Mr. Irmanto's appointments will expire at PTI's Annual General Meeting of Shareholders in 2012.

On November 3, 2010, PTI announced the Minister of Energy and Mineral Resources' approval of the relinquishment of certain blocks of our CoW area in South Sulawesi by virtue of Decree No. 483.K/30/DJB/2010 dated October 25, 2010 effective as of December 10, 2009. The relinquishment blocks represent a total area of approximately 28,000 hectares or 12.8% of PTI's total current CoW area. The total CoW area after the relinquishment became approximately 190,000 hectares. The relinquishment was proposed by PTI after considering its long-term mining plan prepared under the new Indonesia's New Mining Law. The relinquishment will not impact PTI's mining plan or its reserves and will permit the Government to consider alternative development for the areas in accordance with its planning priorities.



## PERUBAHAN UNDANG-UNDANG YANG MEMPENGARUHI BISNIS KAMI

**Undang-Undang Pertambangan Baru.** Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Pertambangan baru yang berlaku efektif sejak tanggal 12 Januari 2009. Penjelasan lebih rinci disajikan pada bagian berjudul Risiko dan Ketidakpastian pada Laporan Tahunan ini.

**Undang-Undang Lingkungan Hidup.** UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikeluarkan dan berlaku efektif sejak tanggal 3 Oktober 2009. UU ini menetapkan struktur pengaturan secara luas dan mengatur agar banyak rincian penting diklarifikasikan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan yang wajib dikeluarkan dalam waktu satu tahun sejak tanggal efektif UU. Sampai saat ini hanya ada beberapa peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan, dan PTI akan terus mengevaluasi dampak UU ini terhadap PTI setelah seluruh peraturan pelaksanaan diterbitkan.

**Peraturan Pemerintah No. 2/2008.** Pada tanggal 4 Februari 2008 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2/2008 mengenai jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penggunaan tanah kehutanan untuk proyek pengembangan bukan kehutanan. PNBP dihitung berdasarkan tarif tetap sesuai dengan penggunaan yang diajukan untuk kawasan hutan dan jenis hutan dimaksud, dikalikan dengan luas wilayah hutan yang akan digunakan. Tarif ditetapkan dalam rupiah dan berkisar dari Rp1.2 sampai Rp3.0 juta (sekitar AS\$120 sampai AS\$300) per hektar per tahun. Kemudian pada tahun 2008, Menteri Kehutanan menerbitkan peraturan pelaksanaan No. P.56/Menhut II/2008, yang mengklarifikasikan jenis-jenis "penggunaan" kawasan hutan untuk keperluan perhitungan PNBP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 yang mewajibkan 13 pemegang izin atau perjanjian perusahaan tambang (termasuk PTI) untuk mengajukan izin pinjam-pakai, maka PTI akan mengajukan permohonan izin pinjam-pakai atas kawasan hutan dalam wilayah Kontrak Karyanya, tetapi dengan reservasi tegas bahwa hak-hak PTI sebagaimana tertuang dalam Kontrak Karya tidak diabaikan. Ketentuan dalam Kontrak Karya telah memberikan PTI semua lisensi dan izin yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan perusahaannya serta kewenangan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas penambangan di dalam wilayah yang tercakup dalam Kontrak Karya.

PTI belum menerima izin pinjam-pakai kawasan hutan di wilayah Kontrak Karyanya kecuali untuk kawasan hutan untuk proyek Karebbe, yang mana PTI telah membayar PNBP sebesar AS\$30 ribu untuk kawasan hutan yang terganggu pada tanggal 29 Agustus 2010 untuk periode Agustus 2010 – Juli 2011. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PM K.02/2009 PNBP terhutang berdasarkan luas yang tercantum dalam izin pinjam-pakai yang berlaku.

Karena itu, per tanggal 31 Desember 2010, tidak ada pembayaran yang telah dilakukan oleh PTI atas kewajiban PNBP sesuai Peraturan Pemerintah No. 2/2008 untuk wilayah selain Karebbe karena izin pinjam-pakai belum diterbitkan.

**Peraturan Pemerintah No. 78/2010.** Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengumumkan peraturan pelaksanaan bagi UU Pertambangan No. 4/2009, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78/2010 (PP No. 78) yang mengatur reklamasi dan kegiatan pasca penambangan baik untuk pemegang IUP-Eksplorasi maupun IUP-Produksi. Peraturan ini memperbaharui Peraturan Menteri No. 18/2008 yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 29 Mei 2008. Pemegang IUP-Eksplorasi diwajibkan antara lain untuk menyertakan rencana reklamasi dalam rencana kerja dan anggaran eksplorasi dan menyediakan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik pemerintah. Pemegang IUP-Produksi diwajibkan

## CHANGES TO LAW THAT AFFECT OUR BUSINESS

**New Mining Law.** The Government of Indonesia passed the New Mining Law that became effective on January 12, 2009. For further details, please see the discussion in the Risks and Uncertainties section in this Annual Report.

**Environmental Law.** Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management was promulgated and became effective on October 3, 2009. It sets out a broad regulatory structure and provides that many important details will be clarified in later implementing regulations which the law calls should be issued within one year of its effective date. To date there were only a few implementing regulations issued and PTI will continue to assess the impact of the Law once all implementing regulations are issued.

**Government Regulation No. 2/2008.** On February 4, 2008, Government Regulation No. 2/2008 was issued relating to the type and tariff of non-tax state revenue from the use of forestry area for non-forestry development. Non-tax state revenue is calculated based on a fixed tariff according to the purpose of the proposed use and type of forest area being used, multiplied by the size of the forestry area being used. The tariffs are in rupiah and range from IDR1.2 to IDR3.0 million (approximately US\$120 to US\$300) per hectare per annum. Later in 2008, the Minister of Forestry issued implementing regulation No. P.56/Menhut II/2008, clarifying what constitutes "use" of forest area for non-tax state revenue calculation purposes.

Based on Regulation of the Minister of Forestry No. P.43/Menhut-II/2008 dated 10 July 2008 which requires the holders of 13 permits or contracts (including PTI) to apply for a lend-use permit, PTI will apply for a lend-use permit for forest areas within its CoW area, but with strong reservation that its rights as provided in the CoW are not abrogated. The terms of the CoW provide us with all licenses and permits to construct and operate the enterprise as well as all authorization needed to conduct mining activities in the areas covered by the CoW.

PTI has not yet received the lend-use permit for the forest areas within our CoW area except for the forestry areas for the Karebbe project, for which we have paid US\$30,000 in non-tax state revenue for the disturbed forest area on August 29, 2010 for August 2010 – July 2011 period. Based on Minister of Finance regulation No. 91/PM K.02/2009 the non-tax state revenue is payable for areas covered by a valid lend-use permit.

As such, as of December 31, 2010, no other payment has been made by PTI for the non-tax state revenue regulated by Government Regulation No. 2/2008 for areas other than Karebbe, as lend-use permits have not been issued.

**Government Regulation No. 78/2010.** On December 20, 2010, the Government of Indonesia released an implementing regulation for Mining Law No. 4/2009, i.e. Government Regulation No. 78/2010 (GR No. 78) that deals with reclamation and post-mining activities for both IUP-Exploration and IUP-Production Operation holders. This regulation updates Ministerial Regulation No. 18/2008 issued by the Minister of Energy and Mineral Resources on May 29, 2008. An IUP-Exploration holder, among other requirements, must include a reclamation plan in its exploration work plan and budget and provide a reclamation guarantee in the form of a time deposit placed at a state-owned bank. An IUP-Production Operation holder, among other requirements, must (1) prepare a five-year reclamation

antara lain untuk mempersiapkan (1) rencana reklamasi lima tahun; (2) rencana pasca tambang; (3) jaminan reklamasi yang dapat dalam bentuk rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi atau cadangan akuntansi (jika memenuhi syarat); dan (4) garansi pasca tambang dalam bentuk deposito berjangka pada bank milik pemerintah. Kewajiban untuk menyediakan jaminan garansi dan jaminan pasca tambang tidak membebaskan pemegang IUP dari kewajiban untuk melakukan reklamasi dan kegiatan pasca tambang. Provisi transisi dalam PP No. 78 menetapkan bahwa pemegang Kontrak Karya juga diwajibkan untuk mematuhi peraturan ini.

Penempatan (deposito) tersebut tidak disebutkan atau dipersyaratkan dalam Perjanjian Perubahan Kontrak Karya. Berkaitan dengan hal ini, PTI telah atau akan mengambil tindakan-tindakan berikut:

- Untuk reklamasi tambang, PTI telah membentuk cadangan akuntansi. Menteri ESDM telah menyetujui pembentukan cadangan akuntansi tersebut melalui surat No. 2082/87/DJB/2008 tanggal 17 September 2008.
- Untuk penutupan tambang, PTI telah beberapa kali berkorespondensi dengan Kementerian ESDM untuk membahas revisi rencana penutupan tambang.

Manajemen percaya bahwa tidak akan ada dampak material atas ketentuan rehabilitasi atau penutupan tambang yang disebabkan oleh revisi terhadap rencana. Selain itu, kewajiban mengadakan deposito berjangka tidak akan berdampak signifikan terhadap sumber kas atau posisi keuangan PTI.

**Peraturan Menteri No. 25/2008.** Pada tanggal 5 Agustus 2008, Menteri ESDM menerbitkan peraturan baru (Peraturan Menteri No. 25/2008) berkenaan dengan prosedur untuk menentukan pembatasan produksi. Pada dasarnya peraturan ini bersifat prosedur dan menetapkan prosedur untuk melakukan perencanaan, formulasi dan pelaksanaan kebijakan pembatasan produksi. Kebijakan kuota produksi ditetapkan untuk tingkat nasional, sedangkan pembatasan individual ditetapkan untuk masing-masing wilayah (sampai tingkat Kabupaten) untuk wilayah-wilayah lokasi mineral tertentu.

Direktur Jenderal akan menyampaikan rekomendasi kepada Menteri ESDM mengenai pembatasan produksi untuk setiap produk mineral. Peraturan ini mengatur secara spesifik, antara lain, timah, nikel, emas, tembaga dan besi. Otoritas tertinggi untuk menentukan pembatasan berada pada Menteri ESDM.

Peraturan ini menjadi dasar bagi Menteri untuk menentukan batasan bagi tingkat produksi PTI. Secara substansi, peraturan ini berbenturan dengan hak-hak PTI yang diatur dalam Kontrak Karya, yang saat ini memberikan keleluasaan bagi PTI untuk menentukan tingkat produksi. Belum jelas bagaimana sistem ini akan dilaksanakan; mungkin akan diterbitkan peraturan pemerintah terkait dengan pembatasan produksi sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan Baru.

**Peraturan Pemerintah No. 24/2010.** Pada tanggal 1 Februari 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24/2010 mengenai penggunaan kawasan hutan. Peraturan ini adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 41/1999 yang diamandemen dengan Undang-Undang No. 19/2004 mengenai Kehutanan. Peraturan ini menetapkan bahwa penggunaan kawasan hutan mencakup penggunaan bagian dari hutan untuk tujuan pengembangan selain aktivitas kehutanan, tanpa mengubah fungsi atau tujuan hutan. Peraturan ini juga menetapkan bahwa penggunaan kawasan hutan harus atas dasar izin pinjam-pakai, baik untuk penggunaan komersial maupun non-komersial.

Penggunaan kawasan hutan harus didasarkan atas izin pinjam-pakai yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Sebelum memberikan izin, jika permohonan izin telah memenuhi semua persyaratan Menteri akan mengeluarkan persetujuan

plan; (2) prepare a post-mining plan; (3) provide a reclamation guarantee which may be in the form of a joint account or time deposit placed at a state-owned bank, a bank guarantee or an accounting provision (if eligible); and (4) provide a post-mine guarantee in the form of a time deposit at a state-owned bank. The requirement to provide reclamation and post-mine guarantees does not release the IUP holder from the requirement to perform reclamation and post-mine activities. The transitional provisions in GR No. 78 make it clear that CoW holders are also required to comply with this regulation.

No such placement (deposit) is contemplated or required under the Modification Agreement. In view of the foregoing, PTI has taken, or will take, the following actions:

- For mining reclamation, PTI has established an accounting reserve. MEMR, through its letter dated September 17, 2008, No. 2082/87/DJB/2008, has accepted the establishment of the accounting reserve.
- For mine closure, PTI has corresponded with MEMR on several occasions for discussion of the revised mine closure plan.

Management believes that there will be no material impact on rehabilitation or mine closure provisions as a result of revisions to the plan. Further, the requirement to establish a time deposit will not significantly impact PTI's cash resources or financial position.

**Ministerial Regulation No. 25/2008.** On August 5, 2008, the Minister of Energy and Mineral Resources announced a new regulation (Ministerial Regulation No. 25/2008) relating to the procedure for the determination of production limitations. Basically, the regulation is procedural in nature and sets out the procedures for planning, formulating and execution of production limitation policies. While a production quota policy is to be designated at the national level, individual limits are to be allocated on a region by region basis (down to the Regency level), for those regions where a particular mineral is located.

The Director General will make a recommendation to the Minister of Energy and Mineral Resources regarding production limitations for any mineral product. The regulation specifically mentions, among others, tin, nickel, gold, copper and iron. Final authority in determining the limitations rests with the Minister of Energy and Mineral Resources.

This regulation is a basis for the Minister to place a limit on PTI's production level. In conceptual substance, the regulation is in conflict with PTI's rights as provided in its CoW, which currently leaves production levels at the discretion of PTI. It is not clear how, or to what extent the system will be implemented and it is possible that a governmental regulation relating to production limitations may be issued in connection with the New Mining Law.

**Government Regulation No. 24/2010.** On February 1, 2010, the Government issued Government Regulation No. 24/2010 regarding the use of forest areas. This regulation is the implementing regulation of Law No. 41/1999 as amended by Law No. 19/2004 regarding Forestry. The regulation stipulates that the use of forest areas involves the use of part of a forest for development purposes outside of forestry activities, without changing the function or purpose of the forest. The regulation also requires that the use of forestry area must be based on the lend-use permit whether it is for commercial or non-commercial usage.

prinsip bagi penggunaan kawasan hutan. Izin pinjam-pakai akan diterbitkan setelah penerima persetujuan prinsip melaksanakan seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam persetujuan.

Izin pinjam-pakai atas kawasan hutan yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan penambangan yang memiliki "dampak signifikan dan cakupan luas dengan nilai strategis" hanya dapat diterbitkan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kriteria bagi "dampak signifikan dan cakupan luas dengan nilai strategis" dalam peraturan Menteri Kehutanan setelah mempertimbangkan pandangan-pandangan dari Menteri ESDM.

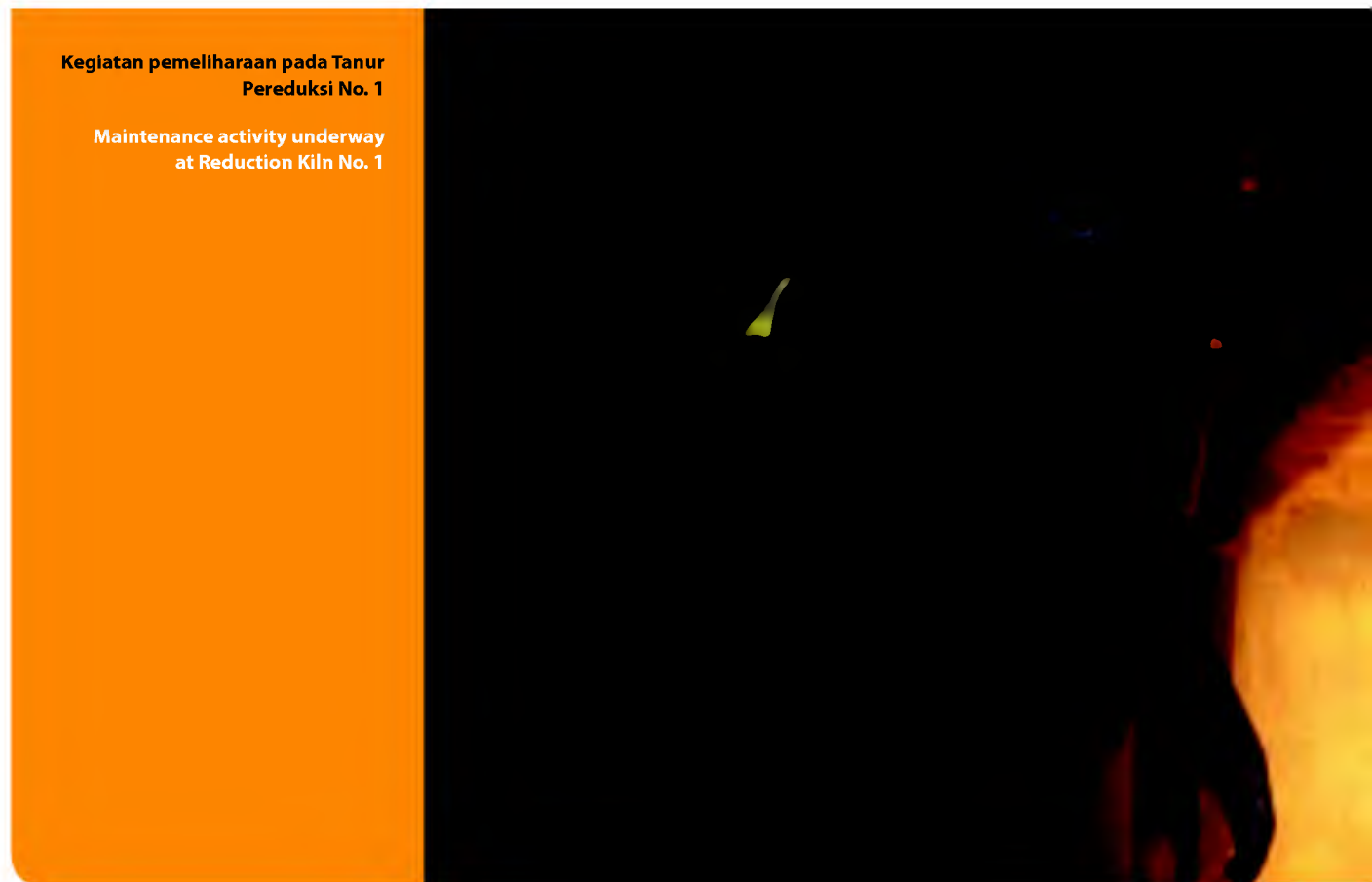
Tergantung pada luas kawasan hutan, izin pinjam-pakai bagi aktivitas penambangan dapat mewajibkan kompensasi tanah atau pembayaran PNBPN ditambah kewajiban untuk penanaman kembali / rehabilitasi kawasan sungai. Rasio kompensasi tanah dan penanaman kembali akan ditentukan kemudian dalam peraturan Menteri. Izin pinjam-pakai berlaku sepanjang periode izin pertambangan.

Namun sampai tanggal laporan ini, peraturan menteri dan peraturan pelaksanaan yang mengatur rincian prosedur kompensasi tanah dan rehabilitasi tersebut di atas belum diterbitkan, dan karena itu per tanggal 31 Desember 2010 PTI tidak membukukan penyisihan atas kewajiban rehabilitasi tersebut. PTI terus memantau perkembangan peraturan dan akan mengevaluasi lebih lanjut dampak jika peraturan pelaksanaan dan peraturan menteri dimaksud diterbitkan.

**Peraturan Menteri No. 17/2010.** Pada tanggal 23 September 2010, Peraturan Menteri ESDM No. 17 tahun 2010 diterbitkan. Berdasarkan peraturan ini, semua pemegang IUP / Izin Usaha Petambangan Khusus (IUPK) diwajibkan

**Kegiatan pemeliharaan pada Tanur  
Pereduksi No. 1**

**Maintenance activity underway  
at Reduction Kiln No. 1**





The use of forest areas shall be based on a lend-use permit issued by the Forestry Minister. Prior to issuing the permit, if the application fulfils all of the requirements, the Minister will issue in-principle approval for the use of the forest. The lend-use permit will then be issued after the in-principle approval holder fulfils all of the obligations set out in the approval.

The lend-use permit for forest areas used for mining activities that have a "significant impact and wide coverage with strategic value" can only be issued with the approval from the House of Representatives. The criteria for "significant impact and wide coverage with strategic value" will be determined by the Minister of Forestry regulation after taking into consideration the views from the Minister of the Environment and the Minister of Energy and Mineral Resources.

Depending upon the size of forest areas, the lend-use permit for mining activities may require land compensation or the payment of non-tax state revenue plus an obligation for re-vegetation/rehabilitation of any river area. The land compensation and re-vegetation ratios will be further determined by Minister regulation. The lend-use permit is valid for the period of the mining license.

However, the ministerial regulation and implementing regulation which regulate the detailed land compensation and rehabilitation procedures mentioned above have not yet been issued up to the date of this report and therefore no provision has been made by PTI for the rehabilitation requirement as at December 31, 2010. We are closely monitoring the development of the regulation and will further assess the impact once the implementing regulation and ministerial regulation are issued.



untuk menggunakan harga patokan yang ditentukan sebagai pedoman untuk penjualan mineral (atau batubara), terlepas dari apakah penjualan di dalam negeri atau untuk ekspor, termasuk penjualan kepada afiliasi. Ketentuan transisi mengatur agar seluruh pemegang Kontrak Karya wajib patuh kepada peraturan tersebut, dan perjanjian yang telah ada sebelum implementasi peraturan ini harus disesuaikan agar mematuhi persyaratan peraturan ini (yaitu formula harga jual) dalam waktu 12 bulan. Selain itu, peraturan mewajibkan agar penentuan harga dalam perjanjian terus menerus disesuaikan setiap 12 bulan. Karena formula harga jual PTI saat ini sesuai dengan peraturan Menteri ESDM (Bursa Logam London merupakan "pasar internasional"), manajemen memutuskan bahwa perjanjian penjualan jangka panjang PTI tidak perlu disesuaikan. Namun demikian, peraturan tidak mendahului perjanjian penjualan jangka panjang PTI.

Harga patokan akan ditentukan berdasarkan mekanisme pasar atau selaras dengan harga yang umum berlaku di pasar internasional. Harga patokan untuk mineral logam (sebagai contoh nikel dalam matte) akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal secara bulanan. Peraturan mewajibkan penggunaan harga patokan sebagai referensi dalam penjualan. Harga patokan adalah atas dasar FOB. Rumus penentuan harga patokan akan diatur dalam peraturan Direktur Jenderal, yang belum diterbitkan. Perlu diperhatikan bahwa harga patokan yang akan berubah secara bulanan, bukan formulanya.

"Penyesuaian biaya" yang ditetapkan dalam peraturan mencakup biaya kapal, biaya surveyor, biaya pengapalan, biaya pengolahan, biaya pemurnian, logam dan/atau biaya asuransi. Logam yang harus dibayar adalah harga yang akan dibayar atas logam yang terkandung dalam produk; ini tentu mengacu kepada praktik harga pasar internasional untuk produk antara (sebagai contoh persentase dari LME).

Untuk perjanjian penjualan di masa depan, formula harga jual harus disampaikan lebih dahulu kepada Direktur Jenderal. Tidak jelas apakah diperlukan persetujuan Direktur Jenderal. Berdasarkan Kontrak Karya, penentuan harga maupun penjualan tidak memerlukan persetujuan Pemerintah, meskipun Pemerintah memiliki hak untuk bertanya mengenai penentuan harga bagi transaksi dengan afiliasi.

Menurut manajemen, terlalu dini untuk menilai dampak peraturan ini terhadap PTI. Penilaian awal manajemen adalah bahwa peraturan ini mengakui atau mengizinkan penyesuaian terhadap standar harga pasar internasional (sebagai contoh persentase dari harga LME). Saat ini, setidaknya terlihat bahwa peraturan ini akan menjadikan LME sebagai rujukan untuk menghitung harga patokan. Masih ada peraturan yang sedang dirancang oleh Direktur Jenderal untuk mengatur metode penentuan kuantum bagi penyesuaian biaya dan memastikan bahwa harga patokan aktual yang ditentukan oleh Direktur Jenderal selaras dengan formula penentuan harga PTI. Manajemen tidak akan dapat memastikan ini sebelum peraturan Direktur Jenderal diterbitkan.

#### **PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2010**

Pada tanggal 16 Februari 2011, PTI menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang menyetujui pengangkatan Bernardus Irmanto, sebelumnya Direktur PTI, menjadi Wakil Presiden Direktur PTI; sedangkan Claudio Bastos tetap menjabat Direksi PTI. Rapat juga menyetujui pengangkatan Fabio Bechara sebagai Direktur. Masa jabatan Bapak Irmanto, Mr. Bastos, dan Mr. Bechara akan berakhir pada RUPS Tahunan tahun 2012.

Pada tanggal 1 Maret 2011 PTI menerima panggilan pengadilan mengenai gugatan yang diajukan oleh 10 perorangan yang bertempat tinggal di Kabupaten Morowali,

**Ministerial Regulation No. 17/2010.** On September 23, 2010, MEMR Regulation No. 17 of 2010 was issued. Pursuant to this regulation, there is an obligation on all IUP/Izin Usaha Petambangan Khusus (IUPK) (Mining Business License) holders to use a prescribed benchmark price as guidance for sales of mineral (or coal), whether sales are being made to domestic users or are for export, including to affiliates. Under the transitional provision, all CoW holders are obligated to comply with the regulation and any term contracts existing prior to the implementation of this regulation must be adjusted to comply with the terms (i.e., the selling price formula) of this regulation within 12 months. In addition, as an ongoing obligation under the regulation, pricing in term contracts must be adjusted every 12 months. As PTI's selling price formula is in line with the MEMR regulation (LME qualifies as an "international market"), management does not believe that any adjustment will be necessary to PTI's long-term sales agreements under either provision. Notwithstanding the foregoing, the regulation does not grandfather PTI's long-term sales contracts.

Benchmark prices will be determined pursuant to a market mechanism or in accordance with prices generally applicable in the international market. Benchmark price for metal minerals (i.e. nickel in matte) will be established by the Director General on a monthly basis. The regulation requires that the benchmark price be used as a reference for sales. The benchmark price will be on a "free on board" basis. The formula for the benchmark prices will be regulated by a Director General regulation, which is yet to be issued. Note that it is the benchmark price that will change monthly, not the formula.

The "cost adjustments" set out in the regulation include barging cost, surveyor cost, trans-shipment cost, treatment cost, refinery cost, metal payable and/or insurance cost. The reference to "metal payable" refers to the price which the customer will pay on the contained metal of the product; it arguably recognizes the international market price practice for nickel intermediate products (i.e., a percentage of LME).

For future sales agreements, the sales price formula must first be submitted to the Director General. It is not clear whether the prior approval of the Director General is required. Under the CoW, neither pricing nor sales requires Government approval, though the Government has the right to question pricing to affiliates.

Management believes that it is too early to determine the impact of this regulation. Management's initial assessment is that this regulation recognizes or permits adjustments to the international market price standard (i.e., a percentage of LME price). At the present time, at a minimum, it appears that the regulation will set LME price as a reference point in calculating the benchmark price. What remains is the outstanding regulation of the Director General on the methods of determining the quantum for the cost adjustments and to make sure that the actual benchmark price posted by the Director General is in line with PTI's pricing formula. Management will not know this until the Director General regulation is issued.

#### **SIGNIFICANT EVENTS SINCE DECEMBER 31, 2010**

On February 16, 2011, PTI held an Extraordinary General Meeting of Shareholders that approved the appointment of Bernardus Irmanto, formerly Director of PTI, to become Vice President Director, while Claudio Bastos remains a Director on the Board of Directors of PTI. The meeting also approved the appointment of Fabio

Sulawesi Tengah. Gugatan ini diajukan oleh penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap (1) Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai Tergugat I, (2) PTI sebagai Tergugat II, dan (3) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebagai Turut Tergugat berdasarkan Modifikasi dan Perpanjangan Kontrak Karya tahun 1996 dan wilayah Kontrak Karya yang berlokasi di Kabupaten Morowali. Penggugat berargumentasi bahwa Modifikasi dan Perpanjangan Kontrak Karya cacat hukum karena bertentangan dengan hukum dan peraturan, dan menuntut Tergugat I dan PTI telah melakukan tindakan melanggar hukum. Penggugat meminta Pengadilan, antara lain, untuk menyatakan bahwa PTI telah melakukan tindakan pelanggaran hukum dan bahwa Modifikasi dan Perpanjangan Kontrak Karya tidak sah dan menghukum PTI untuk membayar kerugian terhadap penggugat sejumlah total Rp5.648.050.750.000 (sekitar AS\$630 juta). Manajemen berkeyakinan bahwa Modifikasi dan Perpanjangan tahun 1996 telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk persetujuan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan karena itu, kasus ini tidak memiliki dasar hukum. Manajemen akan gigih mempertahankannya.

## BAGAIMANA KAMI MENGELOLA RISIKO

PTI memahami bahwa risiko hadir dalam seluruh operasional dan keberhasilan kami tergantung pada seberapa baik kami mengelola risiko. Kami menggunakan pendekatan yang proaktif dan sistematis untuk mengelola risiko dan terus meningkatkan kemampuan manajemen kami. Kami memiliki Tim Manajemen Risiko yang mengkaji rencana manajemen risiko kami. Tim ini terdiri dari wakil-wakil dari berbagai departemen dalam perseroan dan mengadakan rapat setiap triwulan. Program manajemen risiko kami dimulai dengan evaluasi yang mengidentifikasi dan mengurutkan semua risiko yang signifikan, termasuk menentukan pengendalian yang tepat untuk mengatasi risiko secara tahunan. Evaluasi ini akan menjadi dasar dari rencana manajemen risiko.

Kinerja keuangan dan operasi PTI dipengaruhi oleh berbagai risiko yang terkadang berada di luar kendali PTI. Berikut ini adalah pembahasan mengenai risiko-risiko yang paling penting dan bagaimana kami mengelola atau meminimalkan dampak dari risiko yang berada di luar kendali kami.

**Risiko Struktural.** Seluruh operasi dan aset material PTI berada di Indonesia. Kinerja PTI dapat dipengaruhi oleh risiko-risiko tertentu yang berkaitan dengan lokasi operasi dan berada di luar kendali kami. Beberapa contoh risiko tersebut mencakup ketidak-stabilan sosial dan terorisme, ketidak-stabilan politik, ekonomi dan hukum yang disebabkan oleh terjadinya perubahan dalam kebijakan pemerintah dan penerapan kebijakan yang tidak konsisten, peristiwa-peristiwa geofisika seperti banjir, lumpur, atau gempa bumi, dan peristiwa-peristiwa geopolitik seperti resesi ekonomi dunia.

**Risiko-Risiko Kontrak Karya dan UU Pertambangan yang Baru.** Kontrak Karya PTI merupakan landasan hukum bagi kami dalam melakukan usaha. Indonesia terus dipengaruhi ketidakpastian politik dan hukum sepanjang tahun 2010. Beberapa dari ketidakpastian ada dalam beberapa bagian dari UU Pertambangan baru. Penjelasan lebih rinci disajikan pada bagian Risiko dan Ketidakpastian pada Laporan Tahunan ini.

**Risiko Harga Nikel.** Harga nikel merupakan faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil-hasil operasional kami. Pendapatan PTI diperoleh dari perjanjian penjualan dengan Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Harga nikel dalam matte dalam perjanjian penjualan tersebut terkait dengan rata-rata harian harga nikel pada penutupan LME atau harga realisasi bersih Vale Canada untuk nikel. Dengan demikian, kinerja keuangan kami telah dan diharapkan akan

Bechara as a Director. The terms of Mr. Irmanto, Mr. Bastos, and Mr. Bechara will expire at the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2012.

On March 1, 2011, PTI was served with the court summons regarding a class action filed by 10 individuals residing in Morowali Regency, Central Sulawesi. The class action was brought by the plaintiffs before the Central Jakarta District Court against (1) the Government of the Republic of Indonesia, in this case the Minister of Energy and Mineral Resources, as Defendant I, (2) PTI as Defendant II and (3) the Director General of Minerals and Coal as Ancillary Defendant with respect to the Modification and Extension of the Contract of Work dated 1996 and the reservation of the Contract of Work areas located in Morowali Regency. The plaintiffs argue that the Modification and Extension of the Contract of Work was legally defective since it is contrary to laws and regulations, and alleged that Defendant I and PTI have committed a wrongful act. The plaintiffs asked the Court, among others, to declare that PTI has committed a wrongful act and that the 1996 Modification and Extension of the Contract of Work is not valid and to condemn PTI to pay damages to the plaintiffs in the aggregate amount of IDR5,648,050,750,000 (approximately US\$630 million). Management believes it is clear that the 1996 Modification and Extension complied with all applicable regulations at that time, including the approval of the President and a committee of the House of Representatives, and therefore, the case is without any legal basis. Management will vigorously defend the action.

#### HOW WE MANAGE RISK

PTI acknowledges that risk is present in all operations and our success depends on how well we manage it. We take a proactive and systematic approach to the management of risk and to continuously improving our management capability. We have a Risk Management Team to review our risk management plan. This team consists of representatives from various departments within our Company and meets on a quarterly basis. Our risk management program begins with an assessment that identifies and ranks all significant risks, including annually determining appropriate controls to mitigate risks. This assessment forms the basis of our risk management plan.

PTI's financial and operational performance is affected by a variety of risks that, in some cases, are beyond our control. Following is a discussion of the most important risks and how we manage or minimize their impact if their onset is beyond our control.

**Structural Risks.** All PTI's material assets and operations are located in Indonesia. The Company's performance could be affected by certain risks beyond our control that are associated with the location of our operations. Examples of these risks include social instability and terrorism, political, economic and legal instability caused by changes in government policies and the inconsistent application of governmental jurisdiction, geophysical events such as floods, mudflows, or earthquakes and geopolitical events such as a global economic recession.

**CoW and New Mining Law Risks.** PTI's CoW is the fundamental legal instrument under which we conduct our business. Indonesia continued to be impacted by political and legal uncertainties during 2010. Some of these uncertainties stem from the passage of the New Mining Law. For further details, please see the Risks and Uncertainties section in this Annual Report.

tetap sangat berkaitan dengan harga nikel. Harga nikel berfluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh permintaan dan pasokan global dan oleh ketersediaan dan harga produk substitusi nikel.

Karena harga nikel berada di luar kendali, maka kami terus mengusahakan praktik manajemen biaya yang berhati-hati dan terus mencari kesempatan meningkatkan efisiensi biaya untuk memastikan daya saing kami.

**Risiko Curah Hujan.** Curah hujan yang rendah atau faktor-faktor hidrologi lain dapat berpengaruh negatif terhadap produksi listrik pada pabrik-pabrik PTI di masa depan, yang dapat meningkatkan secara signifikan risiko kenaikan biaya atau penurunan volume produksi. Pada tahun 2010 dan 2009, sekitar 90% dan 95% dari kebutuhan tenaga listrik kami pasok oleh pembangkit listrik tenaga air yang berbiaya operasi rendah. Kemampuan pembangkit listrik tenaga air kami bergantung pada ketersediaan air yang mengalir melalui turbin. Sumber air utama berasal dari curah hujan. Curah hujan di bawah rata-rata dapat menurunkan tinggi permukaan air sehingga jumlah tenaga listrik yang dihasilkan pun berkurang. Penurunan daya listrik dapat menghambat volume produksi dan mengharuskan kami menggunakan pembangkit listrik tenaga thermal yang lebih mahal atau melakukan usaha-usaha lain yang cukup mahal untuk meningkatkan ketinggian permukaan air.

Kami terus berusaha mencapai sasaran yang dicanangkan pada bulan Oktober 2004 untuk membangun bendungan dan fasilitas pembangkit listrik baru di Karebbe di Sungai Larona. Fasilitas ini diharapkan akan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga air yang dimiliki PTI sebesar 90 megawatt menjadi 365 megawatt, serta mengurangi risiko kekurangan pasokan tenaga listrik pada musim kemarau, dan menurunkan biaya pokok produksi per unit dengan mengganti

**Kegiatan skimming pada  
tungku listrik (electric furnace).**

**Skimming activity at  
the electric furnace.**



**Nickel Price Risks.** The price of nickel represents the major factor influencing our financial condition and results of operations. PTI's revenue is overwhelmingly derived from its sales agreements with Vale Canada and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. The price for nickel in matte sold under our sales agreements is tied to the average daily LME closing price for nickel or Vale Canada's average net realized price for nickel. Thus our financial performance has been, and is expected to remain, closely linked to the price of nickel. This price is volatile and is largely influenced by global supply and demand factors as well as by the availability and prices of other sources of substitutes for nickel.

As the nickel price is beyond our control, we maintain prudent cost management practices and continuously explore further opportunities to enhance our cost efficiencies to ensure our competitiveness.

**Rainfall Risks.** Low rainfall or other hydrological factors could adversely affect electricity production at PTI's plants in the future, which could significantly increase the risk of higher costs or lower production volume. In 2010 and 2009, approximately 90% and 95% of our electric power requirements were obtained from low-cost hydroelectric power generation. Our hydroelectric power generating ability depends on the availability of water flowing through our turbines. The principal source of water is rainfall. Lower than average rainfall can reduce water levels and consequently reduce the amount of power we generate. Reduced power generation can constrain production volumes and require us to use more expensive thermal power, or engage in costly efforts to increase water levels.



pembangkit listrik tenaga thermal yang mahal dengan pembangkit listrik tenaga air. Saat ini kami memperkirakan fasilitas pembangkit listrik tenaga air di Karebbe akan selesai pada semester kedua tahun 2011.

**Risiko Biaya Bahan Bakar Minyak.** Walaupun sangat sensitif terhadap harga nikel, kinerja keuangan kami dapat juga dipengaruhi secara signifikan oleh harga minyak. Biaya bahan bakar mencapai 41% dan 34% dari biaya tunai produksi kami pada tahun 2010 dan 2009. Sumber biaya bahan bakar minyak tertinggi kami adalah HSFO, yang mencapai 78% dari total biaya bahan bakar minyak dan pelumas pada tahun 2010 dan sekitar 79% pada tahun 2009. Ini mencakup biaya HSFO yang digunakan pada tanur pengering dan tanur pereduksi selama proses pengolahan bijih nikel dan yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga thermal. Pada tahun 2010 kami menggunakan 2,77 juta barrel HSFO untuk mengoperasikan tanur pengering, tanur pereduksi dan fasilitas pembangkit listrik tenaga berbahan bakar minyak, termasuk pembangkit listrik thermal. Harga HSFO naik sekitar 28% pada tahun 2010 menjadi sekitar AS\$75 per barrel dari harga rata-rata sebesar AS\$59 per barrel pada tahun 2009. Harga HSFO relatif stabil sepanjang tahun 2010, yaitu AS\$74 per barrel pada awal tahun dan sekitar AS\$77 per barrel pada akhir tahun.

**Risiko Pinjaman.** PTI tidak memiliki pinjaman jangka panjang sejak Maret 2006 sampai tanggal 30 November 2009, yaitu ketika kami menandatangani Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior (SEFA) untuk mendanai proyek Karebbe. Penarikan pertama dari fasilitas ini dilakukan pada tanggal 30 Desember 2009 dengan jumlah AS\$150 juta. Tidak ada jumlah terhutang dari sewa pembiayaan pada tahun 2010 dibandingkan dengan AS\$1,7 juta pada tahun 2009 yang hanya mewakili 0,4% dari total kewajiban tahun 2009. Sebagai akibat dari pembiayaan SEFA, rasio hutang terhadap ekuitas kami adalah 8% pada tahun 2010 dan 9% pada 2009. Kami yakin bahwa risiko pinjaman kami sangat minimal.

**Risiko Operasional.** Risiko operasional mencakup risiko terhadap karyawan, lingkungan hidup, produksi, aset, reputasi dan masyarakat sekitar wilayah kami beroperasi. Kami memiliki program-program yang ditujukan untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut, seperti: Program Perbaikan Layanan Darurat dan Kebakaran, Standar Keadaan Darurat Utama (program yang dirancang untuk mengurangi risiko kecelakaan fatal), Sistem Produksi Vale, Program Perbaikan Hidrokarbon untuk mencegah limbah pada lingkungan hidup, Kajian Dampak Danau (dilakukan oleh pakar *aquatic toxicology* internasional) untuk melindungi danau-danau di wilayah Kontrak Karya kami dan kebijakan tanpa-kecelakaan. Kami terus meningkatkan sistem keselamatan kerja. Selain itu, kami telah mengasuransikan secara layak potensi kerugian keuangan signifikan karena kegiatan operasional.

**Risiko Cadangan dan Eksplorasi.** Sebagai perusahaan tambang, kami menghadapi risiko bahwa perkiraan cadangan kami dapat lebih rendah dari jumlah yang dapat kami realisasikan secara ekonomis. Namun risiko ini minimal, karena berdasarkan interpretasinya terhadap UU Pertambangan baru, PTI mengambil posisi bahwa PTI memiliki hak untuk dua kali perpanjangan, tetapi mengingat persyaratan bagi dimilikinya hak untuk menambang dan kepastian yang wajar akan kelanjutannya sebelum mendeklarasikan cadangan mineral, PTI memilih untuk menggunakan pendekatan konservatif dan hanya menyatakan cadangan mineral sampai dengan akhir tahun 2035. Jika kepemilikan hak untuk menambang yang berkelanjutan setelah tahun 2035 dapat dipastikan dengan Pemerintah maka PTI dapat melaporkan lebih banyak cadangan mineral asalkan kelayakan ekonomi dari cadangan mineral tambahan ini ditunjukkan oleh studi kelayakan standar industri. Selain itu, untuk meminimalkan risiko-risiko ini, PTI memperkirakan cadangan mineral dan melakukan eksplorasi sesuai dengan standar-standar internasional.



We continue to work toward our goal, announced in October 2004, of building a new dam and generating facility at Karebbe on the Larona River. This facility is expected to raise PTI's hydroelectric power generating capacity by 90 MW to 365 MW while reducing energy supply risk in dry years and lowering the unit cash cost of nickel production by replacing expensive thermal power with hydroelectricity. We currently expect that the Karebbe hydroelectric power generating facility will be completed in the second half of 2011.

**Fuel Cost Risks.** Although our financial performance is most sensitive to nickel price, it can also be significantly affected by the price of oil. Fuel costs represented about 41% and 34% of our production costs in 2010 and 2009, respectively. Our highest cost fuel source is HSFO, which represented about 78% of our fuels and lubricants cost in 2010 and about 79% in 2009. This included the cost of HSFO used in our dryers and kilns during the processing of ore and to fuel our thermal power generators. In 2010, we consumed 2.77 million barrels of HSFO to operate our dryers, kilns and other oil-fired facilities, including our thermal generators. HSFO prices increased by about 28% in 2010 to approximately US\$75 per barrel from an average price of US\$59 per barrel in 2009. The HSFO price remained relatively stable during 2010, beginning at US\$74 per barrel and finished the year at about US\$77 per barrel.

**Leverage Risk.** PTI had no long-term loans from March 2006 until November 30, 2009, when we entered into a Senior Export Facility Agreement to fund our Karebbe project. The first drawdown under this facility occurred on December 30, 2009 and was in the amount of US\$150 million. There was no amount outstanding under finance leases in 2010 compared to US\$1.7 million in 2009 which constituted only 0.4% of total liabilities in 2009. As a result of the SEFA financing, our debt-to-equity ratios were 8% in 2010 and 9% in 2009. We believe that our leverage risk is very minimal.

**Operational Risks.** Operational risk includes risks to our employees, the environment, production, assets, reputation and the local communities in which we operate. We have programs targeting the minimization of these risks, such as a Fire and Emergency Services Improvement Program, our Major Hazard Standards Program (a program designed to reduce the risk of serious accidents), Vale Production System, a Hydrocarbon Improvement Program for preventing environmental spills, Lake Impact Studies (conducted by internationally-recognized aquatic toxicologists) to address the protection of lakes in our CoW area and a zero-accident policy. We are continuously improving our safety system. In addition, we have placed adequate insurance to cover potential significant financial losses from operations.

**Mineral Reserves and Exploration Risks.** As a mining company, we face the risk that our reserves estimates could be lower than what we can recover in an economically feasible manner. However, this risk is minimal, since PTI, based on its interpretation of the New Mining Law, takes the position that it has the right to two extensions, but in view of the requirements to have mining rights and reasonable certainty of their continuance before declaring a mineral reserve, PTI elects to use a conservative approach and only declares mineral reserves until year end 2035. If possession of continuing mining rights after 2035 can be confirmed with the Government then PTI could report more mineral reserves provided that economic viability of these additional mineral reserves is demonstrated by industry standard feasibility studies. Also in order to minimize these risks, PTI estimates its mineral reserves and conducts its exploration in accordance with international standards.

**Risiko Mata Uang dan Tingkat Bunga.** Karena perjanjian penjualan kami, yaitu kontrak pengadaan utama dan pengeluaran barang modal penting, dalam mata uang Dollar AS, maka risiko PTI terhadap mata uang asing terbatas pada gaji dan pembayaran jasa/pasokan lokal dalam mata uang Rupiah. Kami berharap risiko fluktuasi kurs mata uang Rupiah dan Dollar AS pada tahun 2011 tidak signifikan, dan kami tidak melakukan transaksi lindung nilai mata uang. Pada 31 Desember 2010 kami memiliki pinjaman sebesar AS\$140,6 juta (2009: AS\$139,6 juta), setelah dipotong biaya-biaya yang ditunda, yang berasal dari penarikan pertama pembiayaan SEFA pada tanggal 31 Desember 2009. Kami belum membayarkan bunga atas pinjaman ini, namun karena jumlah yang sejauh ini telah diterima dari fasilitas ini hanya 21% dari EBITDA tahun 2010 (2009: 43% dari EBITDA tahun 2009) dan tingkat bunga adalah LIBOR plus 1,5% per tahun untuk periode bunga terkait, kami percaya risiko tingkat bunga kami tidak material.

**Risiko Pemasaran.** Seluruh produksi nikel dalam matte kami terikat pada komitmen untuk dijual kepada Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. berdasarkan perjanjian penjualan jangka panjang bersifat harus ambil dalam denominasi Dollar AS yang akan berakhir pada tahun 2025 kecuali diperpanjang, diubah atau diperbaharui. Pada tahun yang sama berakhir juga Kontrak Karya kami, yaitu perjanjian dengan Pemerintah Indonesia yang memungkinkan kami menambang dan memproduksi nikel dalam matte. Karena perjanjian penjualan kami bersifat wajib, maka risiko pemasaran kami adalah marjinal.

**Risiko Otonomi Daerah.** Selain kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, PTI juga tunduk pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di lokasi penambangan dan operasional PTI. Ini mencakup peraturan-peraturan yang



**Currency and Interest Rate Risks.** Since our sales agreements, primary procurement contracts and major capital spending are denominated in U.S. dollars, PTI's exposure to foreign exchange rate risk is limited to salary and local supply/service payments that are rupiah denominated. We expect the currency risk of exchange rates between the rupiah and the U.S. dollar to be insignificant in 2011 and we have no currency hedges in place. As at December 31, 2010 we had an outstanding borrowings of US\$140.6 million (2009: US\$139.6 million), net of deferred charges, from the first drawdown of SEFA financing on December 30, 2009. We have not yet paid any principal on this loan, however, considering that the amount received so far under this facility is only 21% of our 2010 EBITDA (2009: 43% of 2009 EBITDA) and the interest rate is LIBOR plus 1.5% per annum for the relevant interest period, we believe our exposure to interest rates is not material.

**Marketing Risks.** All of our nickel in matte production is committed to be sold to Vale Canada and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. pursuant to long-term, "must-take," U.S.-dollar denominated sales agreements that end in 2025 unless extended, modified or renewed. This is also the year of expiry of our current CoW, the agreement with the Indonesian Government under which we mine and produce our nickel in matte. Considering the "must-take" nature of our sales agreements, our marketing risks are marginal.

**Regional Autonomy Risk** In addition to compliance with the laws and regulations at the central government level, PTI is also subject to regulations issued by the regional authorities where PTI's mining and related operations are located. This



dikeluarkan oleh pemerintah daerah propinsi Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara maupun pemerintah Kabupaten yang bersangkutan. Meskipun PTI terus bekerja untuk memenuhi persyaratan-persyaratan daerah yang tidak berbenturan dengan Kontrak Karya, dari waktu ke waktu namun apabila timbul masalah pada tingkat daerah maka hal tersebut dapat berdampak terhadap bisnis dan operasi PTI.

### **INFORMASI MATERIAL DAN FAKTA SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN**

Pada tanggal 25 Maret 2011, PTI menarik dana sejumlah AS\$150 juta yang merupakan penarikan kedua dari SEFA. Sebagai imbas dari penarikan ini, PTI telah memanfaatkan total fasilitas sejumlah AS\$300 juta. Pembahasan lebih rinci mengenai SEFA disajikan pada bagian Informasi Material tentang Investasi Hutang/Modal, Ekspansi, Divestasi atau Restrukturisasi.

### **PERKEMBANGAN TERAKHIR STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan revisi standar akuntansi berikut yang berlaku efektif pada laporan keuangan untuk periode yang berawal pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011:

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 (Revisi 2009) – Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 2 (Revisi 2009) – Laporan Arus Kas;
- PSAK 3 (Revisi 2009) – Laporan Keuangan Interim;
- PSAK 4 (Revisi 2009) – Kejadian setelah Tanggal Laporan Keuangan;
- PSAK 5 (Revisi 2009) – Segmen Operasi;
- PSAK 7 (Revisi 2009) – Keterbukaan Informasi Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa;
- PSAK 12 (Revisi 2009) – Penyertaan pada Usaha Patungan;
- PSAK 15 (Revisi 2009) – Investasi dalam Perusahaan Asosiasi;
- PSAK 19 (Revisi 2009) – Aset Tak Berwujud;
- PSAK 22 (Revisi 2009) – Penggabungan Usaha;
- PSAK 23 (Revisi 2009) – Pendapatan;
- PSAK 25 (Revisi 2009) – Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan;
- PSAK 48 (Revisi 2009) – Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 57 (Revisi 2009) – Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi; dan
- PSAK 58 (Revisi 2009) – Aset Tidak Lancar Tersedia untuk Dijual dan Operasi dalam Penghentian.

Ikatan Akuntansi Indonesia juga telah mengeluarkan perubahan standar akuntansi berikut yang dapat berlaku pada laporan keuangan PTI mencakup periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012:

- PSAK 10 (Revisi 2009) – Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing.

PTI masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan PTI dan pada saat ini PTI berkeyakinan bahwa pengadopsian perubahan PSAK tersebut tidak akan mengakibatkan perubahan yang substansial terhadap kebijakan akuntansi PTI atau pun dampak signifikan terhadap laporan keuangan PTI.

includes regulations issued by the regional governments of the South, Central and South East Sulawesi Provinces and the respective Regencies. While PTI continually works to meet local requirements resolve conflicts with the CoW, from time to time issues may arise at the regional or local level which could have an effect on PTI's business and operations.

#### **MATERIAL INFORMATION AND FACTS SUBSEQUENT TO THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE**

On March 25, 2011, PTI drew down US\$150 million being the second drawdown of the Senior Export Facility Agreement (SEFA). As a result of this second drawdown, PTI has fully utilized the total facility of US\$300 million. Please refer to the Material Information for Capital/Debt Investment, Expansion, Divestment or Restructuring section for detailed discussion about the SEFA.

#### **PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARD PRONOUNCEMENTS**

The Indonesian Institute of Accountants has issued the following revised accounting standards effective for financial statements covering periods beginning on or after January 1, 2011:

- Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) 1 (Revised 2009) – Presentation of Financial Statements;
- SFAS 2 (Revised 2009) – Statement of Cash Flows;
- SFAS 3 (Revised 2009) – Interim Financial Reporting;
- SFAS 4 (Revised 2009) – Events after the Reporting Period;
- SFAS 5 (Revised 2009) – Operating Segments;
- SFAS 7 (Revised 2009) – Related Parties Disclosures;
- SFAS 12 (Revised 2009) – Interest in Joint Ventures;
- SFAS 15 (Revised 2009) – Investments in Associates;
- SFAS 19 (Revised 2009) – Intangible Assets;
- SFAS 22 (Revised 2009) – Business Combinations;
- SFAS 23 (Revised 2009) – Revenue;
- SFAS 25 (Revised 2009) – Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors;
- SFAS 48 (Revised 2009) – Impairment of Assets;
- SFAS 57 (Revised 2009) – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets; and
- SFAS 58 (Revised 2009) – Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations.

The Indonesian Institute of Accountants has also issued the following revised accounting standard that may be applicable to PTI's financial statements covering periods beginning on or after January 1, 2012:

- SFAS 10 (Revised 2009) – The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.

PTI is in the process of evaluating the possible effects of these standards on PTI's financial statements and at this time believes that the adoption of these amended SFAS will not result in any substantial changes to PTI's accounting policies nor any significant impact on PTI's financial statements.

## TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2010 RESPONSIBILITY FOR THE 2010 ANNUAL REPORT

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas ketepatan dari Laporan Tahunan ini berikut laporan-laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya yang terkait.

The Board of Commissioners and the Board of Directors are fully responsible for the correctness of this Annual Report and the accompanying financial statements and related financial information.

29 Maret 2011 March 29, 2011

### DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS



**Peter Poppinga**

Presiden Komisaris President Commissioner



**Nicolaas D. Kanter**

Wakil Presiden Komisaris Vice President Commissioner  
Komisaris Independen Independent Commissioner



**Tito Martins**

Komisaris Commissioner



**Mark Travers**

Komisaris Commissioner



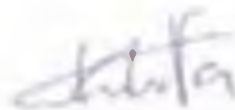
**Jennifer Maki**

Komisaris Commissioner



**Arif S. Siregar**

Komisaris Commissioner




**Takeshi Kubota**

Komisaris Commissioner



**Harumasa Kurokawa**

Komisaris Commissioner



**Arief T. Surowidjojo**

Komisaris Independen Independent Commissioner



**Irwandy Arif**

Komisaris Independen Independent Commissioner

**DIREKSI BOARD OF DIRECTORS**



**Tony Wenas**

Presiden Direktur **President Director**



**Bernardus Irmanto**

Wakil Presiden Direktur **Vice President Director**



**Claudio R. C. Bastos**

Direktur **Director**



**Ciho Bangun**

Direktur **Director**



**Fabio Bechara**

Direktur **Director**

**SURAT PERNYATAAN DIRRESMI TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN  
KEUANGAN PADA DAN UNTUK  
Tahap Tahun yang Berakhir Tanggal  
31 Desember 2010 dan 2009**

**DIRECTORS' STATEMENT REGARDING  
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL  
STATEMENTS AS AT AND FOR  
THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2010 AND 2009**

**PT INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk**

Atas nama Dewan Direksi yang bertanggung jawab di bawah: (On behalf of the Board of Directors, as the undersigned:

No	Nama Asisten	Clayton Allen Wenas Plaza Borealis, Cilandak Timur, Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12180	Name Office Address
1	Nama Asisten (untuk kartu KTP) Nomor Telepon Jabatan	J. Cempaka Putih Tengah 20 No. 34 Cempaka Putih, Jakarta Pusat +62 21 524 9000/524 9000 Finance (Marketing)/Procurement Director	Address of Director (as per Identity Card) Telephone Position
2	Nama Asisten	Felix Hibi Bekhara Plaza Borealis, Cilandak Timur, Lt. 22 J. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12180	Name Office Address
	Nama Asisten (untuk kartu KTP) Nomor Telepon Jabatan	Belendong Baru, Jakarta Selatan +62 21 524 9000/524 9000 (Divisi Keuangan)/Chief Financial Officer	Address of Director (as per Identity Card) Telephone Position

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>Mengatakan bahwa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan perawatan laporan keuangan PT International Nickel Indonesia Tbk ("Perusahaan").</li> <li>2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.</li> <li>3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah ditinjau secara menyeluruh dan benar.<br/>b. Laporan keuangan Perusahaan telah mengungkapkan informasi yang relevan yang telah mengungkapkan informasi atau fakta material.</li> <li>3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.</li> </ol> | <p><b>(States that:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. We are responsible for the preparation and maintenance of the financial statements of PT International Nickel Indonesia Tbk (the "Company").</li> <li>2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with accounting practices generally accepted in Indonesia.</li> <li>3. a. All information in the Company's financial statements has been disclosed in a complete and correct manner.<br/>b. The Company's financial statements do not contain any material information or important facts, nor do they omit information or material facts, and</li> <li>4. We are responsible for the Company's internal control systems.</li> </ol> |
|--|---|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Thus, we statement is made entirely.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta, 6 Maret 2011/ March 6, 2011

Presiden Direktur/President Director (Divisi Keuangan)/Chief Financial Officer




  
 (Clayton Allen Wenas) (Felix Hibi Bekhara)





**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
KEPALA PUBLIK PERUSAHAAN BAHAM**

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT  
TO THE SHAREHOLDERS OF**

**PT INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk**

Kami telah mengaudit laporan PT International Nickel Indonesia Tbk ("Perseroan") tanggal 31 Desember 2010 dan semua, serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perseroan. Tanggung jawab kami terletak pada penyajian pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

We have audited the accompanying balance sheets of PT International Nickel Indonesia Tbk (the "Company") as of 31 December 2010 and 2009, and the related statements of earnings, of changes in equity and of cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami melaksanakan audit dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah satu material, suatu audit melalui pemeriksaan, atau dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung, bersifat-judisial dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan penilaian signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap pengaplikasian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami tidak bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

We conducted our audits in accordance with auditing standards prescribed by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance that the financial statements are free of material misstatement. An audit includes reviewing, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami audit di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT International Nickel Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT International Nickel Indonesia Tbk as of 31 December 2010 and 2009, and the results of its operations and its cash flows for the years then ended, in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia.

Jakarta, 4 Maret/March 2011

**Dwi Wahyu Daryanto, Ak, CPA**  
Kantor Iain Akuntan Publik/Jakarta of Public Accountants No. 101 10001

**NOTES TO READERS**

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations, and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in Indonesia and jurisdictions other than Indonesia. The standards, practices and concepts utilized in Indonesia to audit such financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Assessing the accompanying financial statements and the auditor's report therefore are not intended for use by those who are not familiar about Indonesian accounting principles and the auditing standards and their application in practice.

**Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan**

Plaza No. 11, J.R. Soekarno Blvd. No. 17, Jakarta Selatan 10110 - INDONESIA, P.O. Box 10175 JNP 10111  
T : +62 (0) 21 7201001, F : +62 (0) 21 7201000 / 7201002, www.pwrekan.com/id

**Neraca**

**Per 31 Desember 2010 dan 2009**

(Dalam ribuan dolar AS, kecuali nilai nominal dan data saham)

**Balance Sheets**

**At December 31, 2010 and 2009**

(US\$, in thousands except for par value and share data)

	Catatan <i>Notes</i>	2010	2009	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>Aset Lancar</b>				<b>Current Assets</b>
Kas dan setara kas	2.1 & 3	404,129	261,050	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar nihil per 31 Desember 2010 dan 2009)	2.3, 5 & 30e	124,061	97,752	Trade receivables - related parties (net of provision for impairment of nil at December 31, 2010 and 2009)
Piutang lainnya	6 & 30e	10,893	8,310	Other receivables
Piutang pajak	2.12 & 13a	63,858	132,695	Taxes receivable
Persediaan, bersih	2.4 & 7	101,986	117,649	Inventories, net
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	2.5 & 8	6,768	11,780	Prepaid expenses and advances
		<u>711,695</u>	<u>629,236</u>	Total current assets
<b>Jumlah aset lancar</b>				
<b>Aset Tidak Lancar</b>				<b>Non-Current Assets</b>
Kas yang dibatasi penggunaannya	2.1 & 4	1,211	-	Restricted cash
Aset tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar AS\$1.283.232 per 31 Desember 2010 dan AS\$1.189.949 per 31 Desember 2009)	2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 9 & 10	1,464,508	1,379,103	Property, plant and equipment (net of accumulated depreciation of US\$1,283,232 at December 31, 2010 and US\$1,189,949 at December 31, 2009)
Aset lainnya	11 & 30e	12,821	19,217	Other assets
		<u>1,478,540</u>	<u>1,398,320</u>	Total non-current assets
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>				
<b>Jumlah aset</b>		<u>2,190,235</u>	<u>2,027,556</u>	<b>Total assets</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**Neraca**

**Per 31 Desember 2010 dan 2009**

(Dalam ribuan dolar AS, kecuali nilai nominal dan data saham)

**Balance Sheets**

**At December 31, 2010 and 2009**

(US\$, in thousands except for par value and share data)

	Catatan /Notes	2010	2009	
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>Kewajiban Lancar</b>				<b>Current Liabilities</b>
Hutang usaha				Trade payables
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2.18, 12 & 30f	8,556	4,307	- Related parties
- Pihak ketiga	2.19 & 12	32,864	28,597	- Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	2.19,14 & 30h	43,069	29,969	Accrued expenses
Hutang pajak	2.12 & 13b	49,416	8,712	Taxes payable
Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:				Current maturities of long-term liabilities:
- Sewa pembiayaan	2.7 & 17	-	1,708	- Finance leases
Kewajiban lancar lainnya	15	24,192	13,669	Other current liabilities
Jumlah kewajiban lancar		158,097	86,962	Total current liabilities
<b>Kewajiban Tidak Lancar</b>				<b>Non-Current Liabilities</b>
Kewajiban pajak penghasilan tangguhan, bersih	2.12 & 13d	171,931	182,762	Deferred income tax liabilities, net
Kewajiban jangka panjang (setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun):				Long-term liabilities (net of current maturities):
- Pinjaman	2.18 & 16	140,561	139,556	- Borrowings
Kewajiban imbalan kerja	2.13 & 18	3,235	2,452	Employee benefits liability
Kewajiban penghentian pengoperasian aset	2.10 & 26a	36,571	34,518	Asset retirement obligation
Jumlah kewajiban tidak lancar		352,298	359,288	Total non-current liabilities
Jumlah kewajiban		510,395	446,250	Total liabilities
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Modal saham - modal dasar 39.745.354.880 (2009: 39.745.354.880) saham, ditempatkan dan disetor penuh 9.936.338.720 (2009: 9.936.338.720) saham dengan nilai nominal Rp25 (2009: Rp25) per saham (nilai penuh)	19	136,413	136,413	Share capital - authorized capital 39,745,354,880 (2009: 39,745,354,880) shares, issued and fully paid 9,936,338,720 (2009: 9,936,338,720) shares at par value of Rp25 (2009: Rp25) per share (full amount)
Tambahan modal disetor	21	277,760	277,760	Additional paid-in capital
Cadangan jaminan reklamasi	2.10 & 22a	16,854	24,344	Reclamation guarantee reserve
Cadangan umum	22b	5,342	5,342	General reserve
Saldo laba ditahan		1,243,471	1,137,447	Retained earnings
Jumlah ekuitas		1,679,840	1,581,306	Total equity
<b>Jumlah kewajiban dan ekuitas</b>		<b>2,190,235</b>	<b>2,027,556</b>	<b>Total liabilities and equity</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Laporan Laba – Rugi  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2010 dan 2009  
(Dalam ribuan dolar AS,  
kecuali laba bersih per saham dasar)

Statements of Earnings  
For the years ended  
December 31, 2010 and 2009  
(US\$, in thousands  
except basic earnings per share)

	Catatan /Notes	2010	2009	
Penjualan	2.11 & 30a	1,276,323	760,952	Sales
Harga pokok penjualan	2.11 & 23	652,245	516,059	Cost of goods sold
Laba kotor		624,078	244,893	Gross profit
Beban penjualan, umum, dan Administrasi	2.11 & 24	27,704	13,018	Selling, general and administration expenses
Laba usaha		596,374	231,875	Operating p rofit
(Beban)/pendapatan lainnya				Other (expenses)/income
Pendapatan keuangan		737	358	Finance income
Penyisihan untuk bahan pembantu usang, bersih	2.4 & 7	(1,201)	(2,872)	Allowance for obsolete supplies, net
Beban keuangan		(4)	(190)	Finance costs
Laba/(rugi) selisih kurs	2.2	10,351	(680)	Gain/(loss) on currency translation adjustments
Rugi pelepasan aset tetap	2.6 & 9	(1,529)	(1,182)	Loss on disposal of property, plant and equipment
Lainnya, bersih	25	(23,385)	9,395	Others, net
Jumlah (beban)/pendapatan lainnya, bersih		(15,031)	4,829	Total other (expenses)/ income, net
Laba sebelum pajak penghasilan		581,343	236,704	Earnings before income tax
Beban pajak penghasilan	2.12 & 13c	143,980	66,287	Income tax expense
Laba bersih		437,363	170,417	Net earnings
Laba bersih per saham dasar (Dolar AS)	2.14 & 28	0.044	0.017	Basic earnings per share (in US\$)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Laporan Perubahan Ekuitas  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2010 dan 2009  
(Dalam ribuan Dolar AS)

Statements of Changes in Equity  
For the years ended  
December 31, 2010 and 2009  
(US\$, in thousands)

Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Cadangan jaminan reklamasi/ Reclamation guarantee reserve	Cadangan umum/ General reserve	Saldo laba ditahan/ Retained earnings	Jumlah/ Total
<b>Saldo 1 Januari 2009</b>	136,413	277,760	26,875	5,342	1,074,494	1,520,884
Laba bersih Dividen yang dideklarasikan	-	-	-	-	170,417 (109,995)	170,417 (109,995)
Cadangan jaminan reklamasi	-	-	(2,531)	-	2,531	-
<b>Saldo 31 Desember 2009</b>	136,413	277,760	24,344	5,342	1,137,447	1,581,306
Laba bersih Dividen yang dideklarasikan	-	-	-	-	437,363 (338,829)	437,363 (338,829)
Cadangan jaminan reklamasi	-	-	(7,490)	-	7,490	-
<b>Saldo 31 Desember 2010</b>	136,413	277,760	16,854	5,342	1,243,471	1,679,840

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**Laporan Arus Kas**  
**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009**  
(Dalam ribuan Dolar AS)

**Statements of Cash Flows**  
**For the years ended**  
**December 31, 2010 and 2009**  
(US\$, in thousands)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>			<b>Cash Flows from Operating Activities</b>
Penerimaan dari pelanggan	1,250,014	726,766	Receipts from customers
Pembayaran ke pemasok	(528,561)	(379,956)	Payments to suppliers
Pembayaran pajak penghasilan Perseroan	(110,265)	(62,571)	Payments of corporate income tax
Pembayaran ke karyawan	(76,660)	(67,386)	Payments to employees
			Payments of employee benefits
Pembayaran kontribusi imbalan kerja	(2,671)	(3,118)	contributions
Penerimaan lainnya	136,363	27,002	Other receipts
Pembayaran lainnya	(27,376)	(34,284)	Other payments
	<u>640,844</u>	<u>206,453</u>	<b>Net Cash Flows Provided From Operating Activities</b>
<b>Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>			
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>			<b>Cash Flows from Investing Activities</b>
Pembayaran aset tetap	(153,108)	(137,927)	Payments for property, plant and equipment
	<u>(153,108)</u>	<u>(137,927)</u>	<b>Net Cash Flows Used for Investing Activities</b>
<b>Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>			
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>			<b>Cash Flows from Financing Activities</b>
Penerimaan pinjaman jangka panjang	-	150,000	Proceeds of long-term borrowing
Pembayaran beban pinjaman	(4,106)	(10,444)	Payments of finance charges
Pembayaran dividen	(338,829)	(106,912)	Payments of dividends
Pembayaran sewa pembiayaan	(1,708)	(6,017)	Payments of finance leases
Pembayaran bunga sewa pembiayaan	(14)	(210)	Payments of interest on finance leases
	<u>(344,657)</u>	<u>26,417</u>	<b>Net Cash Flows (Used for)/Provided from Financing Activities</b>
<b>Arus Kas Bersih yang (Digunakan)/Diterima untuk Aktivitas Pendanaan</b>			
<b>Kenaikan Kas dan Setara Kas</b>	143,079	94,943	<b>Increase in Cash and Cash Equivalents</b>
<b>Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun</b>	261,050	166,107	<b>Cash and Cash Equivalents at The Beginning of The Year</b>
<b>Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun</b>	<u>404,129</u>	<u>261,050</u>	<b>Cash and Cash Equivalents at The End of The Year</b>
<b>Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:</b>			<b>Non – cash transactions:</b>
Beban pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tetap dalam penyelesaian	7,475	-	Finance charges capitalized into construction in progress

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

## 1. Umum

### a. Informasi Umum

PT International Nickel Indonesia Tbk. ("PT Inco" atau "Perseroan") didirikan pada tanggal 25 Juli 1968 dengan akta No. 49 tanggal 25 Juli 1968, yang dibuat dihadapan Eliza Pondaag, notaris publik di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/18 tanggal 26 Juli 1968 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Agustus 1968, Tambahan No. 93. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan akta Nomor 18 tanggal 14 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., notaris publik di Jakarta yang memuat tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian lebih lanjut dengan Peraturan Bapepam-LK no. IX.J.1. Perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10.21039 tanggal 23 Nopember 2009 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Kotamadya Jakarta Selatan dengan surat No. 09.03.1.13.29245 tanggal 6 Januari 2010. Sekitar 58,73% saham Perseroan dimiliki oleh Vale Canada Limited (sebelumnya "Vale Inco Limited"), sekitar 21,14% oleh masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia, dan sekitar 20,09% oleh Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

Entitas pengendali utama Perseroan adalah Vale S.A., sebuah perusahaan yang terdaftar di Brasil.

Pabrik Perseroan berlokasi di Sorowako, Sulawesi Selatan dan kantor pusatnya berlokasi di Jakarta.

Operasi Perseroan didasarkan atas Kontrak Karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") dan Perseroan. Kontrak Karya ini memberikan hak kepada Perseroan untuk mengembangkan dan mengoperasikan proyek nikel dan mineral-mineral tertentu lainnya di daerah yang sudah ditentukan di pulau Sulawesi. Kontrak Karya ini pada awalnya ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1968 ("Kontrak Karya 1968") dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Pada tanggal 15 Januari 1996, Perseroan dan Pemerintah menandatangani Persetujuan Perubahan dan Perpanjangan Kontrak Karya 1968 ("Persetujuan Perpanjangan"), yang memperpanjang izin operasi Perseroan sampai tahun 2025.

Sebagai tambahan, Perseroan telah menyepakati, tergantung pada kelayakan ekonomis dan teknis, untuk mengembangkan potensi endapan nikel di Pomalaa (Sulawesi Tenggara) dan di Bahodopi (Sulawesi Tengah).

Menurut Persetujuan Perpanjangan, ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi dari Kontrak Karya 1968 secara umum tetap berlaku sampai 31 Maret 2008, kecuali untuk aturan-aturan tertentu yang terkait dengan bidang fiskal. Mulai tanggal 29 Desember 1995 (ditetapkan sebagai Tanggal Efektif dalam Persetujuan Perpanjangan), ketentuan-ketentuan perpajakan tertentu dari Kontrak Karya 1968, khususnya di bidang pemotongan pajak dan kredit investasi, telah diubah untuk lebih sejalan dengan peraturan perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia. Per tanggal 1 April 2008, semua ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi Persetujuan Perpanjangan diberlakukan.

Berikut adalah perubahan-perubahan prinsip dalam Persetujuan Perpanjangan yang berlaku mulai tanggal 1 April 2008:

- royalti bijih nikel (garnierite) akan dibayarkan berdasarkan tarif tetap sebesar A\$70,00 hingga A\$78,00 per ton, tergantung jumlah produksi;
- tarif sewa tanah per tahun akan naik menjadi A\$1,50 per hektar dari A\$1,00 per hektar;

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

## 1. General

### a. General Information

PT International Nickel Indonesia Tbk. ("PT Inco" or the "Company") was established on July 25, 1968 by deed No. 49 dated July 25, 1968 drawn up before Eliza Pondaag, a public notary in Jakarta. The Company's Articles of Association were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in decision letter No. J.A.5/59/18 dated July 26, 1968 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 62 dated August 2, 1968, Supplement No. 93. These Articles of Association have been amended several times and the latest amendment was made by deed No. 18, dated October 14, 2009, drawn up before Poerbaningsih Adi Warsito S.H., a public notary in Jakarta, to reflect amendments to the Company's Articles of Association to conform with Bapepam-LK Regulation no. IX.J.1. This amendment was accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in letter No. AHU-AH.01.10.21039 dated November 23, 2009 and registered with the South Jakarta District Registration Office in letter No. 09.03.1.13.29245 dated January 6, 2010. Approximately 58.73% of the Company's outstanding shares are currently owned by Vale Canada Limited (formerly "Vale Inco Limited"), approximately 21.14% by the public through the Indonesia Stock Exchange, and approximately 20.09% by Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

The ultimate parent entity of the Company is Vale S.A., a company registered in Brazil.

The Company's plant is located in Sorowako, South Sulawesi and the head office is located in Jakarta.

The Company's operations are conducted pursuant to a Contract of Work entered into with the Government of the Republic of Indonesia (the "Government"). The Contract of Work grants the Company the right to develop and operate a project for nickel and certain other minerals in defined areas within the island of Sulawesi. The original Contract of Work entered into on July 27, 1968 (the "1968 Contract") expired on March 31, 2008. On January 15, 1996, the Company and the Government signed the Agreement on Modification and Extension of the 1968 Contract (the "Extension Agreement"), extending the Company's operations to 2025.

In addition, the Company has undertaken, subject to economic and technical feasibility, to explore the potential development of its nickel deposits at Pomalaa in Southeast Sulawesi and at Bahodopi in Central Sulawesi.

According to the Extension Agreement, the terms and conditions of the 1968 Contract generally remained in place until March 31, 2008, except for certain fiscal related provisions. Effective December 29, 1995 (defined as the Effective Date in the Extension Agreement), these provisions of the 1968 Contract, notably in the area of withholding taxes and investment credits, were modified to bring them more in line with current tax legislation in Indonesia. As of April 1, 2008, all of the remaining terms and conditions of the Extension Agreement took effect.

The following are the principal changes in the Extension Agreement that had immediate impact beginning on April 1, 2008:

- royalties on nickel ore (garnierite) are payable at a fixed rate of US\$70.00 to US\$78.00 per metric ton, depending on total production;
- land rent increased to US\$1.50 per hectare per annum from US\$1.00 per hectare;

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

1. Umum (lanjutan)

1. General (continued)

a. Informasi Umum (lanjutan)

a. General Information (continued)

- aset yang tidak berhubungan dengan kegiatan ekspansi yang disepakati dalam Persetujuan Perpanjangan dan digunakan setelah tanggal 31 Maret 2008 untuk tujuan perhitungan Pajak penghasilan Badan dapat diatur dengan formula depresiasi yang berbeda dari formula yang digunakan sebelumnya;
- dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham pendiri hingga 31 Maret 2008 dibebaskan dari pungutan pajak. Pembayaran dividen kepada pemegang saham pendiri yang dideklarasikan antara tanggal 1 April 2008 hingga dan meliputi tanggal 1 April 2010 juga akan dibebaskan dari pemotongan pajak jika jumlahnya tidak melebihi saldo laba ditahan Perseroan seperti yang dilaporkan dalam neraca Perseroan pada tanggal 31 Maret 2008;
- Perseroan wajib membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan Kontrak Karya 1968 Perseroan tidak perlu membayar pajak bumi dan bangunan; dan
- Perseroan membayar berbagai retribusi, pajak, beban dan pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah di area operasional Perseroan sepanjang hal tersebut disetujui oleh pemerintah pusat. Tarif yang dikenakan tidak boleh melebihi tarif yang berlaku pada tanggal 29 Desember 1995 (tanggal yang dimuat dalam Perjanjian Perpanjangan). Ketentuan ini berlaku untuk semua perusahaan tambang lainnya dengan ketentuan dan persyaratan yang sama.

- assets not related to expansion undertakings and placed in service after March 31, 2008 could be subject to different formulas of depreciation for corporate income tax calculation purposes;
- dividends paid to the founding shareholders until March 31, 2008 are exempt from withholding tax. Payment of dividends to the founding shareholders declared between April 1, 2008 up to and including April 1, 2010 will also be exempted from withholding tax, in an aggregate amount not to exceed the amount of the Company's retained earnings as reported in the Company's balance sheet on March 31, 2008;
- the Company must pay land and building taxes. Under the 1968 Contract the Company was not required to pay these taxes; and
- the Company pays levies, taxes, charges and duties imposed by local governments with jurisdiction over the Company's area, if approved by the central government. The rates must not be higher than those prevailing on December 29, 1995 (the date stipulated in the Extension Agreement) and will be imposed on all other mining companies in the applicable jurisdiction on the same terms and conditions.

Fasilitas pembangkit listrik tenaga air Perseroan yang ada pada saat ini dibangun dan beroperasi berdasarkan Keputusan Pemerintah Indonesia tahun 1975. Keputusan ini, yang secara efektif juga mencakup pembangkit listrik Balambano yang merupakan tambahan dari fasilitas Larona, memberikan hak kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil alih fasilitas listrik tenaga air tersebut dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dua tahun sebelum pengambilalihan. Tidak ada pemberitahuan tertulis yang diterima oleh Perseroan sampai saat ini. Apabila hak tersebut digunakan, fasilitas tersebut akan dialihkan sebesar nilai bukunya dengan syarat Pemerintah menyediakan tenaga listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasi Perseroan, yang tarifnya ditentukan berdasarkan biaya ditambah dengan margin laba yang normal, selama sisa masa Kontrak Karya.

The Company's existing hydroelectric facilities were constructed and are currently operated pursuant to a 1975 decree of the Indonesian Government. This decree, which effectively covers the Balambano generating capacity in addition to the original Larona facility, which was part of the expansion project, vests an Indonesian ministry with the right, upon two years' prior written notice to the Company, to acquire the hydroelectric facilities. No such notice has been given to date. If this right is exercised, the decree also provides that the hydroelectric facilities would be acquired at their net book value subject to the ministry providing the Company with sufficient power to meet its operating requirements, at a rate based on cost plus a normal profit margin, for the remaining term of the Contract of Work.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan utama Perseroan adalah dalam eksplorasi dan penambangan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran nikel beserta produk mineral terkait lainnya. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1978.

As stated in Article 3 of its Articles of Association, the Company's main activities are exploration and mining, processing, storage, transportation and marketing of nickel and associated mineral products. The Company started its commercial operations in 1978.

Pada tahun 1990, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 49,7 juta lembar saham atau 20% dari 248,4 juta lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Saham yang ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana tersebut dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), pada tanggal 16 Mei 1990.

In 1990, the Company conducted an Initial Public Offering ("IPO") of 49.7 million shares or 20% of the 248.4 million shares issued and fully paid. The shares offered to the public in the IPO were registered on the Jakarta Stock Exchange (now the Indonesia Stock Exchange) on May 16, 1990.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juli 2004, para pemegang saham menyetujui dilakukannya pemecahan saham biasa, dari satu saham menjadi empat saham. Hal ini berlaku efektif mulai tanggal 3 Agustus 2004.

At an Extraordinary General Meeting of Shareholders held on July 6, 2004, the shareholders approved a four-for-one stock split of the Company's common shares. This became effective on August 3, 2004.

Pada RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2007, para pemegang saham menyetujui pemecahan saham biasa, dari satu saham menjadi sepuluh saham, yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham Perseroan. Hal ini berlaku efektif di Bursa Efek Indonesia mulai tanggal 15 Januari 2008, sehingga jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan naik menjadi 9.936.338.720 lembar saham dengan nilai nominal dalam Rupiah ("IDR") 25 (nilai penuh) per saham.

At an Extraordinary General Meeting of Shareholders held on December 17, 2007, the shareholders approved a 10-for-one stock split of the Company's common shares, with the objective of increasing the liquidity of the Company's shares. This became effective on the Indonesia Stock Exchange on January 15, 2008 and therefore the Company's total issued and fully paid shares were increased by a factor of 10-to-one to 9,936,338,720 shares with a nominal value of Rupiah ("IDR") 25 (full amount) per share.

Per 31 Desember 2010 dan 2009, komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2010 and 2009, the composition of the Company's Board of Commissioners, Audit Committee and Board of Directors were as follows:



Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

1. Umum (lanjutan)

1. General (continued)

a. Informasi Umum (lanjutan)

a. General Information (continued)

31 Desember	2010	2009	December 31
Presiden Komisaris/ <i>President Commissioner:</i>	Gerd Peter Poppinga	Tito Botelho Martins	
Komisaris/ <i>Commissioners:</i>	Jennifer Maki Tito Botelho Martins Mark J. Travers Harumasa Kurokawa Takeshi Kubota Arif Soeleman Siregar Arief T. Surowidjojo*) Irwandy Arif*) Nicolaas D. Kanter*)	Jennifer Maki Gerd Peter Poppinga Mark J. Travers Naoyuki Tsuchida Takeshi Kubota Roberto Moretzsohn Arief T. Surowidjojo*) Rozik B. Soetjipto*) Nicolaas D. Kanter*)	
Ketua Komite Audit/ <i>Chairman of Audit Committee:</i>	Arief T. Surowidjojo	Rozik B. Soetjipto	
Komite Audit/ <i>Audit Committee:</i>	Erry Firmansyah Kanaka Puradireja	Jusuf Halim Kanaka Puradireja	
Presiden Direktur/ <i>President Director:</i>	Clayton Allen Wenas	Arif Soeleman Siregar	
Wakil Presiden Direktur/ <i>Vice President Director:</i>	Claudio Renato Chaves Bastos	Claudio Renato Chaves Bastos	
Direktur/ <i>Directors:</i>	Bernardus Irmanto Ciho D. Bangun	Ciho D. Bangun Helwanurrachman Djumiril	

\*) Komisaris Independen

\*) Independent Commissioners

Setelah tanggal neraca, pada tanggal 16 Februari 2011, Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang mengesahkan pengangkatan Bernardus Irmanto, sebelumnya Direktur Perseroan, menjadi Wakil Presiden Direktur Perseroan, sedangkan Claudio Renato Chaves Bastos tetap menjabat sebagai anggota Dewan Direksi Perseroan. Rapat ini juga menyetujui pengangkatan Fabio Bechara sebagai Direktur Perseroan. Masa jabatan Irmanto, Bastos, dan Bechara akan berakhir pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") 2012.

Subsequent to the balance sheet date, on February 16, 2011, the Company held an Extraordinary General Meeting of Shareholders that approved the appointment of Bernardus Irmanto, formerly a Director of the Company, to become Vice President Director of the Company, while Claudio Renato Chaves Bastos remains as a member of the Board of Directors of the Company. The meeting also approved the appointment of Fabio Bechara as a Director of the Company. The terms of Mr. Irmanto, Mr. Bastos, and Mr. Bechara will expire at the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2012.

Pada tanggal 28 Oktober 2010, Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menerima pengunduran diri Naoyuki Tsuchida dan menyetujui pengangkatan Harumasa Kurokawa sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Tsuchida. Para Pemegang Saham juga menyetujui pengangkatan Bernardus Irmanto sebagai Direktur Perseroan yang bertanggung jawab atas Sumber Daya Manusia dan Layanan Korporat. Masa jabatan Kurokawa dan Irmanto akan berakhir pada RUPS 2012.

On October 28, 2010, the Company held an Extraordinary General Meeting of Shareholders that accepted Naoyuki Tsuchida's resignation and appointment of Harumasa Kurokawa as Commissioner as Tsuchida's successor. Shareholders also approved the appointment of Bernardus Irmanto as Director of the Company responsible for Human Resources and Corporate Services. The terms of Mr. Kurokawa's and Mr. Irmanto's appointments will expire at the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2012.

Helwanurrachman Djumiril mengajukan pengunduran diri sebagai direktur Perseroan pada tanggal 15 Juni 2010 yang berlaku efektif 45 hari sejak tanggal pengunduran diri.

Helwanurrachman Djumiril tendered his resignation as a director of the Company on June 15, 2010 which was effective 45 days from the date of resignation.

Pada tanggal 16 April 2010, Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan yang menyetujui pengangkatan Gerd Peter Poppinga sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Jennifer Maki, Tito Botelho Martins, Mark J. Travers, Arif S. Siregar, Takeshi Kubota, dan Naoyuki Tsuchida sebagai Komisaris Perseroan, serta Nicolaas D. Kanter sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen, Irwandy Arif, dan Arief T. Surowidjojo sebagai Komisaris Independen. Pada RUPS Tahunan yang sama pemegang saham menyetujui pengangkatan kembali Clayton Allen Wenas sebagai Presiden Direktur, Claudio Renato Chaves Bastos sebagai Wakil Presiden Direktur, dan Helwanurrachman Djumiril sebagai Direktur.

On April 16, 2010, the Company held an Annual General Meeting of Shareholders that approved the appointment of Gerd Peter Poppinga as the President Commissioner of the Company, Jennifer Maki, Tito Botelho Martins, Mark J. Travers, Arif S. Siregar, Takeshi Kubota, and Naoyuki Tsuchida as Commissioners of the Company, and also approved Nicolaas D. Kanter as the Vice-President Commissioner and Independent Commissioner, Irwandy Arif, and Arief T. Surowidjojo as Independent Commissioners. At the same meeting, shareholders approved the reappointment of Clayton Allen Wenas as President Director, Claudio Renato Chaves Bastos as Vice President Director and Helwanurrachman Djumiril as a Director.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

1. Umum (lanjutan)

a. Informasi Umum (lanjutan)

Pada tanggal 5 Maret 2010, Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui pengangkatan Gerd Peter Poppinga sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Tito Botelho Martins sebagai Komisaris Perseroan. Pada RUPSLB yang sama pemegang saham menyetujui pengunduran diri Arif S. Siregar sebagai President Direktur dan mengangkat Clayton Allen Wenas sebagai Presiden Direktur.

Jumlah seluruh karyawan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah 3.136 (2009: 3.319) (tidak diaudit).

b. Wilayah Eksplorasi dan Eksploitasi/Pengembangan (tidak diaudit)

Berdasarkan hasil survei terakhir yang dilakukan oleh ahli geologi Perseroan, jumlah cadangan terbukti nikel pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Lokasi/Location	Tanggal izin penambangan/ Acquired date	Tanggal berakhir/ Expiry date	Jumlah cadangan terbukti/ Total proven reserves	Jumlah produksi periode berjalan/ Current period production
			juta Metrik Ton/million Dry Metric Tonnes	
Sorowako	Kontrak Karya/ Contract of Work – 27 Juli/July 27, 1968	28 Desember/ December 28, 2025	75.4	0.076

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

Ikhtisar kebijakan akuntansi Perseroan yang signifikan berikut ini disajikan untuk membantu pembaca dalam mengevaluasi laporan keuangan terlampir. Kebijakan akuntansi ini telah diterapkan secara konsisten dalam semua hal yang material untuk periode yang tercakup oleh laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan lain. Laporan keuangan Perseroan dibuat dan disetujui oleh Direksi pada tanggal 4 Maret 2011.

2.1. Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan Kontrak Karya dengan Pemerintah, pembukuan Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau "AS\$") dan dalam Bahasa Inggris.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang didasarkan pada konsep harga perolehan historis kecuali aset dan kewajiban keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Laporan keuangan ini juga disusun berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) No. VIII.G.7 mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan Surat Edaran Ketua BAPEPAM & LK No. SE-02/BL/2008 tertanggal 31 Januari 2008 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum.

Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas berdasarkan kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan Laporan Arus Kas, kas dan setara kas mencakup kas, bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan.

Dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan kewajiban yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia juga mengharuskan manajemen untuk melakukan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan.

1. General (continued)

a. General Information (continued)

On March 5, 2010, the Company held an Extraordinary General Meeting of Shareholders that approved the appointment of Gerd Peter Poppinga as the President Commissioner of the Company and Tito Botelho Martins as Commissioner. At the same meeting, shareholders approved the resignation of Arif S. Siregar as President Director and appointed Clayton Allen Wenas as President Director.

The total number of employees at December 31, 2010 was 3,136 (2009: 3,319) (unaudited).

b. Exploration and Exploitation/Development Areas (unaudited)

Based on the latest survey report by the Company's geologists, as of December 31, 2010 the proven reserves of nickel on that date were as follows:

2. Summary of Significant Accounting Policies

The following summary of the significant accounting policies of the Company is presented to assist the reader in evaluating the accompanying financial statements. These policies have been followed consistently in all material respects for the periods covered in the financial statements, unless otherwise stated. The Company's financial statements were prepared and approved by the Board of Directors on March 4, 2011.

2.1. Presentation of Financial Statements

As required by its Contract of Work with the Government, the Company maintains its books in United States Dollars ("US Dollars" or "US\$") and in English.

The financial statements are prepared in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia, based on the historical cost concept except for financial assets and liabilities at fair value through profit or loss. The financial statements have also been prepared in conformity with Regulation of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Board (BAPEPAM & LK) No. VIII.G.7 for Guidance on Financial Statement Presentation and Circular Letter of BAPEPAM & LK Chairman No. SE-02/BL/2008 dated January 31, 2008 for Preparation and Disclosure Guidance for Financial Statements of an Issuer or Public Company in the General Mining Industry.

The Statements of Cash Flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the Statements of Cash Flows, cash and cash equivalents includes cash on hand, cash in banks and short-term investments with a maturity of three months or less, net of overdrafts.

The preparation of financial statements in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and actions, actual results ultimately may differ from these estimates. The accounting principles generally accepted in Indonesia also require management to exercise its judgment in the process of applying the Company's accounting policies

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

### 2.1. Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi ribuan Dolar AS yang terdekat.

### 2.2. Penjabaran Mata Uang

Pada setiap tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter yang signifikan dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada akhir tahun. Penjabaran dari aset dan kewajiban lainnya umumnya dilakukan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Dalam tahun berjalan, transaksi-transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke Dolar AS dengan kurs rata-rata tertimbang yang berlaku pada bulan berjalan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penjabaran dan transaksi dalam mata uang asing dibukukan pada Laporan Laba Rugi.

### 2.3. Piutang Usaha

Piutang usaha adalah jumlah tagihan dari pelanggan untuk nikel dalam matte yang dijual dalam transaksi bisnis pada umumnya. Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan untuk penurunan nilai. Penyisihan untuk penurunan nilai dari piutang usaha dibuat ketika terdapat bukti objektif bahwa Perseroan tidak dapat menagih keseluruhan nilai yang terdapat pada ketentuan awal dari piutang tersebut. Kesulitan keuangan yang signifikan pada debitur, kemungkinan bahwa debitur mengalami kebangkrutan atau restrukturisasi keuangan, dan wanprestasi atau tunggakan terhadap pembayaran dipertimbangkan sebagai indikator bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai. Nilai dari penyisihan adalah selisih antara nilai tercatat piutang dengan nilai kini dari perkiraan arus kas dimasa datang, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga efektif awal. Nilai tercatat dari aset dikurangi pos cadangan, dan jumlah kerugian diakui pada Laporan Laba Rugi. Ketika piutang usaha tidak dapat tertagih, piutang usaha dihapus terhadap pos cadangan untuk piutang usaha. Pemulihan jumlah tertagih yang sebelumnya dihapus dikreditkan terhadap Laporan Laba Rugi.

### 2.4. Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai dari persediaan barang jadi nikel ditetapkan dengan metode "masuk pertama keluar pertama" (*first-in first-out method*), sedangkan nikel dalam proses dinilai dengan metode biaya produksi rata-rata dan persediaan bahan pembantu (*supplies*) dinilai dengan metode harga pembelian rata-rata.

Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja serta alokasi biaya *overhead* yang terkait secara langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

### 2.5. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka dibebankan ke laba rugi tahun berjalan berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaatnya.

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

## 2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

### 2.1. Presentation of Financial Statements (continued)

Figures in the financial statements are rounded to and stated in thousands of US Dollars unless otherwise stated.

### 2.2. Translation of Currencies

At each balance sheet date, significant monetary assets and liabilities in currencies other than US Dollars are translated into US Dollars at year-end exchange rates. The translation of all other assets and liabilities generally recognizes the rates historically applicable.

During the year, transactions in currencies other than US Dollars are translated at weighted average rates prevailing during each month. Gains or losses resulting from the translation and from foreign exchange transactions are included in the Statements of Earnings.

### 2.3. Trade Receivables

Trade receivables are amounts due from customers for nickel in matte sold in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less provision for impairment. A provision for impairment of trade receivables is established when there is objective evidence that the Company will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables. Significant financial difficulties of the debtor, the probability that the debtor will enter bankruptcy or financial reorganisation, and default or delinquency in payments are considered indicators that the trade receivable is impaired. The amount of the provision is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account, and the amount of the loss is recognized in the Statements of Earnings. When a trade receivable is uncollectible, it is written off against the allowance account for trade receivables. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited to the Statements of Earnings.

### 2.4. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost of finished nickel inventory is determined on a first-in first-out basis, while nickel in process is determined on an average production cost basis and supplies at an average purchase cost basis.

Cost of finished goods and work in progress is comprised of materials, labor and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads. Net realizable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less the costs of completion and the estimated selling expenses.

### 2.5. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are charged to earnings on a straight-line basis over the expected year of benefit.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

## 2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

### 2.6. Aset Tetap – Pemilikan Langsung

### 2.6. Property, Plant and Equipment – Direct Ownership

Aset tetap yang diperoleh secara langsung diakui berdasarkan harga perolehan historis, dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Property, plant and equipment directly acquired are stated at historical cost, less depreciation. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

Biaya pengembangan tambang merupakan biaya-biaya yang terjadi di area penambangan sebelum aktivitas penambangan dimulai. Termasuk kedalam biaya ini adalah biaya-biaya untuk pembuatan jalan yang memberikan akses ke area-area tambang.

Mine development costs represent expenditures incurred in a mining area before mining activities commence. Included in these costs are construction of roads providing access to mining areas.

Biaya selanjutnya diikutsertakan kedalam nilai tercatat aset atau diakui sebagai aset terpisah, jika memadai, hanya ketika besar kemungkinan masa manfaat ekonomis di masa yang akan datang terkait dengan aset tetap akan mengalir kedalam Perseroan dan biaya dari aset tetap tersebut dapat diukur secara andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Keseluruhan perbaikan dan perawatan dibebankan kedalam laporan laba rugi pada periode keuangan dimana hal tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that the future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized. All other repairs and maintenance are charged to the income statement during the financial period in which they are incurred.

Biaya eksplorasi dibebankan pada saat terjadinya.

Exploration costs are expensed as incurred.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi sebagai akibat dari penghapusan aset tetap tersebut diakui dalam Laporan Laba Rugi.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of property, plant and equipment are recognized in the Statements of Earnings.

Pada tanggal neraca, Perseroan menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya, termasuk aset tak berwujud ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai sebagai akibat dari terjadinya kondisi atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut, yaitu nilai yang lebih tinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai aset. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

At the balance sheet date, the Company reviews whether there is any indication of asset impairment. Property, plant and equipment and other non-current assets, including intangible assets, are reviewed for impairment losses whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, which is the higher of an asset's net selling price and value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows. Property, plant, and equipment and other non current assets that have suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

### 2.7. Sewa

### 2.7. Leases

Apabila dalam suatu kontrak sewa porsi yang signifikan atas risiko dan manfaat kepemilikan aset tetap berada ditangan *lessor*, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi dibebankan ke Laporan Laba Rugi atas dasar garis lurus selama masa sewa.

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases are charged to the Statements of Earnings on a straight-line basis over the period of the lease.

Sewa aset tetap dimana Perseroan memiliki secara substansi seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.

Leases of property, plant and equipment where the Company has substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased property and the present value of the minimum lease payments.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara bagian yang merupakan pelunasan kewajiban dan bagian yang merupakan beban keuangan sedemikian rupa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo pembiayaan. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama dengan metode penyusutan aset tetap yang dimiliki sendiri. Jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Perseroan akan mendapatkan kepemilikan atas aset pada akhir masa sewa, aset tersebut disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset dan masa sewa.

Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a constant rate of interest on the finance balance outstanding. Property, plant and equipment acquired under finance leases are depreciated similarly to owned assets. If there is no reasonable certainty that the Company will hold the ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease term.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

## 2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

### 2.8. Aset Tetap Dalam Penyelesaian

### 2.8. Construction in Progress

Akumulasi biaya dari konstruksi bangunan dan instalasi mesin dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam penyelesaian. Biaya-biaya ini direklasifikasi kedalam aset tetap ketika instalasi telah selesai. Depresiasi dibebankan sejak tanggal dimana aset tersebut siap digunakan.

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of machinery are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to property, plant, and equipment when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat, dikapitalisasi sampai proses pembangunan tersebut selesai. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset tertentu yang memenuhi syarat. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang seluruh biaya pinjaman atas seluruh pinjaman yang belum dibayarkan, diluar pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset tertentu yang memenuhi syarat.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expended on the qualifying asset. The capitalization rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specially for the purpose of obtaining a qualifying asset under construction.

### 2.9. Penyusutan, Depleksi dan Amortisasi

### 2.9. Depreciation, Depletion and Amortisation

Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus yang didasarkan atas taksiran masa manfaat suatu aset, estimasi masa produksi cadangan bijih, atau selama masa berlakunya Kontrak Karya yang mana yang lebih dulu. Pengecualian terhadap kebijakan ini adalah untuk fasilitas bendungan air yang penyusutannya dilakukan selama masa manfaat 40 tahun berdasarkan Keputusan Pemerintah Indonesia tahun 1975, seperti yang dijelaskan pada Catatan 1 atas laporan keuangan ini.

Depreciation of property, plant and equipment is calculated on the straight-line method based on the earlier of the estimated useful life of the asset, the estimated period of production from ore reserves, or the period of the Contract of Work. An exception to this policy is the hydroelectric dam facilities, which are depreciated over a 40-year useful life based on the 1975 decree of the Indonesian Government, referred to in Note 1 to these financial statements.

Estimasi masa manfaat untuk penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

The estimated useful lives of property, plant and equipment used for depreciation are as follows:

	Tahun
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	40
Jalan dan jembatan	30
Bangunan	30
Pengembangan tambang	30
Pabrik dan mesin	5 - 30
Perabotan dan peralatan kantor	5

	Years
Hydroelectric dam buildings and facilities	40
Roads and bridges	30
Buildings	30
Mine development	30
Plant and machinery	5 - 30
Furniture and office equipments	5

Perseroan mengidentifikasi bagian dari aset tetap yang biaya perolehannya signifikan dan mendepresiasi komponen tersebut secara terpisah jika bagian tersebut memiliki masa manfaat yang berbeda.

The Company allocates significant parts of the property, plant and equipment costs and depreciates separately each significant part if those parts have different useful lives.

Amortisasi biaya pemugaran dihitung berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Amortisation of refurbishment costs is calculated on the estimated economic useful life of the refurbishment using a straight-line method.

### 2.10. Pengeluaran untuk Lingkungan Hidup

### 2.10. Environmental Expenditures

Operasi Perseroan telah, dan di masa akan datang mungkin akan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam peraturan perundangan mengenai lingkungan hidup. Kebijakan Perseroan adalah memenuhi atau, jika mungkin, melampaui semua ketentuan Pemerintah tersebut, dengan menerapkan langkah-langkah yang secara teknis telah teruji dan layak secara ekonomis.

The operations of the Company have been, and may in the future be affected from time to time to varying degrees by changes in environmental regulations. The Company's policy is to meet or, if possible, surpass the requirements of all applicable regulations issued by the Government by the application of technically proven and economically feasible measures.

Pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan program lingkungan hidup dan reklamasi yang sedang berjalan dibebankan pada Laporan Laba Rugi pada saat terjadinya atau dikapitalisasi dan disusutkan tergantung pada masa manfaat ekonomisnya. Cadangan Jaminan Reklamasi juga telah dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku (lihat Catatan 22a). Disamping itu, kewajiban penghentian pengoperasian aset telah diakui sebesar taksiran biaya penutupan area tambang.

Expenditures that relate to ongoing environmental and reclamation programs are charged to the Statements of Earnings as incurred, or capitalized and depreciated depending on their future economic benefits. A Reclamation Guarantee Reserve has also been set up in accordance with applicable Government requirements (see Note 22a). In addition, an asset retirement obligation has been recognized for the estimated costs of mine closure.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

### 2.10. Pengeluaran untuk Lingkungan Hidup (lanjutan)

Kewajiban penghentian pengoperasian aset dicatat untuk mengakui kewajiban hukum yang berkaitan dengan penghentian penggunaan aset tetap yang berasal dari akuisisi, pembangunan atau pengembangan dan/atau operasi normal aset tetap. Penghentian aset tetap ini tidak termasuk penghentian pemakaian yang sifatnya sementara, tapi termasuk penjualan, penelantaran, pendaurulangan atau penghapusan dengan cara lainnya.

Kewajiban penghentian pengoperasian aset diakui sebagai kewajiban pada saat kewajiban hukum yang berkaitan dengan penghentian pengoperasian sebuah aset timbul, dan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya. Kewajiban ini bertambah dari waktu ke waktu sampai mencapai jumlah yang seharusnya melalui pembebanan ke Laporan Laba Rugi. Disamping itu, biaya penghentian pengoperasian aset dalam jumlah yang sama dengan jumlah kewajibannya dikapitalisasi sebagai bagian dari aset yang berkaitan yang kemudian disusutkan nilainya sepanjang masa manfaat aset tersebut. Kewajiban penghentian pengoperasian aset dibebankan pada lebih dari satu periode pelaporan, jika kejadian yang menimbulkan kewajiban itu timbul dalam lebih dari satu periode pelaporan. Misalnya, bila ada sebuah fasilitas yang ditutup untuk selamanya tetapi rencana penutupan ditetapkan lebih dari satu periode pelaporan, biaya penutupan tersebut akan diakui selama periode pelaporan sampai rencana penutupan selesai. Adanya penambahan kewajiban yang terjadi setelah periode pelaporan akan dianggap sebagai tambahan terhadap kewajiban awal. Setiap tambahan kewajiban akan diakui sebesar nilai wajar. Tambahan kewajiban akan dinilai terpisah, diakui dan dicatat tanpa mempengaruhi kewajiban masa lalu. Kewajiban penghentian pengoperasian aset Perseroan mencakup biaya – biaya yang berkaitan dengan reklamasi tambang, pembongkaran fasilitas dan aktivitas penutupan tambang.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak berkaitan dengan penghentian pengoperasian aset, dimana Perseroan merupakan pihak yang bertanggung jawab dan diidentifikasi adanya suatu kewajiban serta jumlahnya dapat diukur, maka Perseroan akan mencatat estimasi kewajiban tersebut. Dalam menentukan keberadaan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan, Perseroan mengacu pada kriteria pengakuan kewajiban sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

### 2.11. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penjualan merupakan penghasilan yang diperoleh dari penjualan produk Perseroan. Penjualan diakui sebagai penghasilan ketika terjadi pengalihan risiko kepada pelanggan berdasarkan ketentuan dalam kontrak penjualan, dan:

- Produk tersebut berada dalam kondisi yang layak untuk dikirimkan dan tidak diperlukan proses lebih lanjut oleh, atau atas nama, Perseroan;
- Besar kemungkinan Perseroan memperoleh manfaat ekonomis dari transaksi tersebut;
- Produk telah diserahkan kepada pelanggan dan secara fisik sudah tidak berada dalam pengendalian Perseroan (atau kepemilikan atas produk telah terlebih dahulu beralih ke pelanggan); dan
- Harga dan serta biaya penjualan dapat ditentukan dengan tingkat akurasi yang memadai.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan metode akrual.

## 2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

### 2.10. Environmental Expenditures (continued)

The asset retirement obligation provides for legal obligations associated with the retirement of a tangible long-lived asset that results from the acquisition, construction or development and/or the normal operation of a long-lived asset. The retirement of a long-lived asset is its other than temporary removal from service, including its sale, abandonment, recycling or disposal in some other manner.

Asset retirement obligations are recognized as liabilities when a legal obligation with respect to the retirement of an asset is incurred, with the initial measurement of the obligation at fair value. These obligations are accreted to full value over time through charges to the Statements of Earnings. In addition, an asset retirement cost equivalent to the liabilities is capitalized as part of the related asset's carrying value and is subsequently depreciated or depleted over the asset's useful life. A liability for an asset retirement obligation is incurred over more than one reporting period when the events that create the obligation occur over more than one reporting period. For example, if a facility is permanently closed but the closure plan is developed over more than one reporting period, the cost of the closure of the facility is incurred over the reporting periods when the closure plan is finalized. Any incremental liability incurred in a subsequent reporting period is considered to be an additional layer of the original liability. Each layer is initially measured at fair value. A separate layer will be measured, recognized and accounted for prospectively. The Company's asset retirement obligation consists of costs associated with mine reclamation, dismantling of facilities and mine closure activities.

For environmental issues that may not involve the retirement of an asset, where the Company is a responsible party and it is determined that a liability exists, and amounts can be quantified, the Company accrues for the estimated liability. In determining whether a liability exists in respect of such environmental issues, the Company applies the criteria for liability recognition under applicable accounting standards.

### 2.11. Revenue and Expense Recognition

Sales represent revenue earned from the sale of the Company's products. Sales are recognized as revenue when there has been passing of the risk of ownership to the customer, based on the terms of the contract, and:

- The product is in a form suitable for delivery and no further processing is required by, or on behalf of, the Company;
- Economic inflow related to the transaction is probable;
- The product has been dispatched to the customer and is no longer under the physical control of the Company (or ownership in the product has earlier been passed to the customer); and
- The selling price and expenses can be determined with reasonable accuracy.

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

## 2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

### 2.12. Pajak Penghasilan

### 2.12. Income Taxes

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan memakai metode kewajiban di neraca, untuk semua perbedaan temporer yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan antara dasar perpajakan untuk aset dan kewajiban dengan nilainya dalam laporan keuangan. Untuk menentukan jumlah pajak penghasilan tangguhan digunakan tarif pajak yang berlaku saat ini.

Deferred income taxes are provided, using the balance sheet liability method, for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values for financial reporting purposes. Currently enacted tax rates are used to determine deferred income taxes.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dimanfaatkan.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilized.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan Perseroan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan banding, pada saat keputusan banding tersebut ditetapkan.

Amendments to the Company's taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed, when the result of the appeal is determined.

### 2.13. Kewajiban Imbalan Kerja

### 2.13. Employee Benefits Liability

#### a. Kewajiban Imbalan Pensiun

#### a. Retirement Benefits Liability

Perseroan memiliki program pensiun imbalan pasti yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan/atau kebijakan yang dimiliki oleh Perseroan. Program ini pada umumnya didanai melalui pembayaran kepada pengelola dana pensiun yang besarnya ditentukan dengan perhitungan aktuarial berkala. Suatu program pensiun imbalan pasti adalah sebuah program pensiun yang menyatakan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

The Company maintains a defined benefit pension plan in accordance with prevailing labor-related laws and regulations and/or the Company's policies. The plan is generally funded through payments to trustee-administered funds as determined by periodic actuarial calculations. A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefits to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service or compensation.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di neraca adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal neraca dikurangi dengan nilai wajar aset program, setelah disesuaikan dengan keuntungan/kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah yang berkualitas tinggi (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan saat jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan saat jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

The liability recognized in the balance sheet in respect of defined benefit pension plan is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the value of plan assets, together with adjustment for unrecognized actuarial gains or losses and past service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high quality government bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the term of the related pension liability.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial (termasuk laba dan rugi investasi) dicatat di Laporan Laba Rugi dengan cara mengamortisasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih, apabila nilainya melebihi 10% dari kewajiban imbalan pensiun atau dari nilai wajar aset program, yang mana yang lebih besar, selama sisa masa kerja rata-rata para karyawan.

Actuarial gains and losses arising from adjustments based on experience, and changes in actuarial assumptions (including investment gains and losses) are recognized in the Statements of Earnings by amortizing the excess of net actuarial gains and losses, where exceeding 10% of the greater of the post-retirement benefits obligation or fair value of plan assets, over the expected average remaining service life of employees.

Biaya masa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak (*vested*). Jika belum menjadi hak (*non-vested*) akan diakui sebagai beban selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested* dengan metode garis lurus.

Past service costs are directly expensed if benefits are already vested. Where benefits are not yet vested, the past service costs are recognized over the average vesting period under a straight-line method.

Termasuk didalam kewajiban imbalan pensiun ini adalah bonus masa kerja yaitu tambahan imbalan yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan yang mencapai usia pensiun normal (55 tahun). Imbalan ini merupakan tambahan dari program pensiun reguler. Besarnya imbalan ini dihitung oleh Perseroan berdasarkan golongan dan usia karyawan.

Included in the liabilities recognized for retirement benefits, is an additional benefit provided by the Company, referred to as a service bonus, which is provided to employees who reach normal retirement age (55 years). This benefit is in addition to the regular pension benefit provided under the plan. The Company has calculated this benefit based on the grade and age of employees.

Perseroan harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu dalam menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

The Company is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003. Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of pension benefits, in substance, pension plans under Labor Law represent defined benefit plans.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

## 2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

### 2.13. Kewajiban Imbalan Kerja (lanjutan)

### 2.13. Employee Benefits Liability (continued)

#### a. Kewajiban Imbalan Pensiun (lanjutan)

#### a. Retirement Benefits Liability (continued)

Perhitungan imbalan pensiun yang dilakukan oleh Towers Watson, aktuaris independen menunjukkan bahwa perkiraan imbalan yang disediakan oleh dana pensiun Perseroan akan melebihi persyaratan minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan.

The calculation of the benefit obligation performed by Towers Watson the independent actuary, shows that the expected benefits provided by the Company's pension plan will exceed the minimum requirements of the Labor Law.

#### b. Kewajiban Imbalan Kesehatan Pasca-Kerja

#### b. Post-Retirement Medical Benefits Liability

Perseroan memberikan imbalan kesehatan pasca-kerja untuk para karyawan yang telah pensiun. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Perkiraan biaya imbalan ini diakru sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh Towers Watson, aktuaris independen, yang berkualifikasi.

The Company provides post-retirement healthcare benefits to eligible retirees. The entitlement to these benefits is usually given to those employees who remain in service up to retirement age. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to that for defined benefit pension plans. Towers Watson, a qualified independent actuary, values these obligations annually.

#### c. Kewajiban Imbalan Pesangon

#### c. Termination Benefits Liability

Pesangon pemutusan hubungan kerja terhutang pada saat karyawan diberhentikan sebelum usia pensiun normal. Perseroan mengakui pesangon pemutusan hubungan kerja pada saat Perseroan menunjukkan komitmennya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih 12 bulan setelah tanggal neraca didiskontokan untuk mencerminkan nilai kininya.

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement date. The Company recognizes termination benefits when it is demonstrably committed to terminate the employment of current employees according to a detailed formal plan with low possibility of withdrawal. Benefits falling due more than 12 months after the balance sheet date are discounted to present value.

#### d. Program Bagi Laba dan Bonus

#### d. Profit Sharing and Bonus Plans

Perseroan mengakui kewajiban dan beban untuk bonus dan pembagian laba, berdasarkan suatu rumus yang memperhitungkan laba yang tersedia bagi para pemegang saham Perseroan setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Perseroan mengakui adanya kewajiban ini apabila terdapat kewajiban kontraktual atau apabila praktek di masa lalu telah menimbulkan kewajiban ini.

The Company recognizes a liability and an expense for bonuses and profit sharing, based on a formula that takes into consideration the profit attributable to the Company's shareholders after certain adjustments. The Company recognizes a provision where it is contractually obligated or when a past practice has created a constructive obligation.

#### e. Imbalan Opsi Setara Saham

#### e. Share Option Equivalents

Perseroan memberikan imbalan opsi saham kepada karyawan tertentu yang besarnya setara dengan kas, sebesar selisih antara harga pasar saham dengan harga opsi saham pada tanggal jatuh tempo. Biaya imbalan ini dicatat ketika harga pasar melebihi harga opsi saham, sebesar selisih antara kedua harga tersebut. Perubahan yang terjadi pada harga pasar saham antara tanggal pemberian imbalan dan tanggal pencatatan akan dicatat sebagai perubahan estimasi biaya imbalan tersebut dan diakui pada Laporan Laba Rugi.

The Company awards certain employees share option equivalents to receive cash, equal to the excess of the market price of the Company's shares at the exercise date over the option price. The cost is measured as the amount by which the quoted market value of the vested shares covered by the grant exceeds the option price. The changes in the quoted market value of the shares between the date of the grant and the measurement date result in a change in the estimate of the compensation and are recognized in the Statements of Earnings.

## 2.14. Laba Bersih per Saham Dasar

## 2.14. Basic Earnings Per Share

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar dalam tahun yang bersangkutan.

Basic earnings per share is calculated by dividing net earnings by the weighted average number of common shares outstanding for the relevant year.

## 2.15. Pelaporan Segmen

## 2.15. Segment reporting

Sebuah segmen usaha adalah sekelompok aset dan operasi yang menyediakan barang atau jasa yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen usaha lainnya. Sebuah segmen geografis menyediakan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain.

A business segment is a group of assets and operations engaged in providing products or services that are subject to risks and returns that are different from those of other business segments. A geographical segment is engaged in providing products or services within a particular economic environment that are subject to risks and returns that are different from those of segments operating in other economic conditions.



Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

### 2.16. Aset dan Kewajiban Keuangan

Pada tahun 2006, Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Standar-standar ini menggantikan PSAK 50 "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan PSAK 55 "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai". Kedua standar ini berlaku untuk laporan keuangan yang dimulai sejak dan setelah 1 Januari 2010. Perseroan telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) sejak 1 Januari 2010. Manajemen telah menganalisa dampak penerapan kedua PSAK ini dan berkesimpulan bahwa tidak ada dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan pada dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 yang dengan pengaruh paling besar adalah reklasifikasi akun aset tidak lancar lainnya pada komparasi laporan keuangan tahun seperti dijelaskan dalam Catatan 37.

Dalam mengimplementasikan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006), Perseroan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam aset dan kewajiban keuangan.

#### Aset keuangan

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori berikut (i) aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman dan piutang, (iii) aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Pengklasifikasian tergantung kepada tujuan perolehan aset keuangan. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangannya saat pengakuan awal.

#### (i) Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang diklasifikasikan untuk tujuan diperdagangkan. Aset keuangan akan diklasifikasikan untuk tujuan diperdagangkan apabila tujuan utama perolehannya adalah untuk dijual atau dibeli kembali dalam jangka pendek dan terdapat bukti aktual akan adanya pola pengambilan keuntungan dalam jangka pendek. Derivatif juga dikategorikan sebagai diperdagangkan kecuali jika mereka ditujukan dan berlaku efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak ada aset keuangan yang dikategorikan sebagai diperdagangkan.

#### (ii) Pinjaman dan piutang

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang tetap dan dapat ditentukan dan tidak diperdagangkan pada pasar aktif. Piutang dan pinjaman awalnya diakui pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai buku setelah dikurangi biaya amortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman dan piutang terdiri dari investasi bersih pada sewa guna usaha, piutang usaha, dan piutang lainnya.

#### (iii) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang tetap dan dapat ditentukan serta masa jatuh tempo yang tetap dimana Perseroan memiliki maksud positif dan kemampuan untuk memilikinya hingga jatuh tempo, selain daripada:

- aset keuangan yang pengakuan awalnya diakui sebagai aset keuangan nilai wajar melalui laba rugi oleh Perseroan;
- aset keuangan diakui Perseroan sebagai tersedia untuk dijual;
- aset keuangan yang memenuhi definisi pinjaman dan piutang.

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

## 2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

### 2.16. Financial Assets and Liabilities

In 2006, the *Dewan Standar Akuntansi Keuangan* ("DSAK") issued Statement of Financial Accounting Standard ("SFAS") 50 (Revised 2006) "Financial Instruments: Presentation and Disclosures" and SFAS 55 (Revised 2006) "Financial Instruments: Recognition and Measurement". These standards amend both SFAS 50 "Accounting for Investments in Certain Securities" and SFAS 55 "Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities". Both standards are applicable for financial statements covering periods beginning on or after January 1, 2010. The Company has implemented SFAS 50 (Revised 2006) and SFAS 55 (Revised 2006) since January 1, 2010. The management has analysed the impact of these SFAS and believes that there is no significant impact to the financial statements as at and for the year ended December 31, 2010 with the main effect being the reclassification of other non-current assets account in the comparative financial statements as explained in Note 37.

In implementing SFAS 50 (Revised 2006) and SFAS 55 (Revised 2006), the Company classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities.

#### Financial assets

The Company classifies its financial assets into the categories of (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity financial assets, and (iv) available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financials assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

#### (i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets classified as held for trading. A financial asset is classified as held for trading if it is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking. Derivatives are also categorised as held for trading unless they are designated and effective as hedging instruments.

As of December 31, 2010, there are no financial assets categorised as held for trading.

#### (ii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are initially recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Loans and receivables consist of net investment in finance leases, trade receivables, and other receivables.

#### (iii) Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Company has the positive intention and ability to hold to maturity, other than:

- those that the Company upon initial recognition designates as financial assets at fair value through profit or loss;
- those that the Company designates as available for sale; and
- those that meet the definition of loans and receivables.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

## 2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

### 2.16. Aset dan Kewajiban Keuangan (lanjutan)

### 2.16. Financial Assets and Liabilities (continued)

#### Aset keuangan (lanjutan)

#### Financial assets (continued)

#### (iii) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)

#### (iii) Held-to-maturity financial assets (continued)

Pengakuan awal aset keuangan ini diakui pada nilai wajarnya termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai buku setelah dikurangi biaya amortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

These are initially recognized at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method.

Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak ada aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo.

As at December 31, 2010, there are no financial assets classified as held-to-maturity financial assets.

#### (iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

#### (iv) Available-for-sale financial assets

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual merupakan aset keuangan yang diperoleh dan disimpan untuk periode tidak dapat ditentukan, dimana dapat dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, nilai tukar atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo maupun aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Available-for-sale financial assets are financial assets that are intended to be held for an indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held-to-maturity investments or financial assets at fair value through profit or loss.

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual diakui awalnya pada nilai wajar, ditambah dengan biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada nilai wajar dengan laba atau ruginya dilaporkan pada laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk rugi penurunan nilai dan laba atau rugi selisih kurs, sampai aset bersangkutan dilepas. Jika suatu investasi yang tersedia mengalami penurunan nilai, laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui pada laporan perubahan ekuitas akan diakui pada Laporan Laba Rugi. Akan tetapi, bunga akan dihitung menggunakan metode suku bunga efektif, dan laba atau rugi pada aset moneter yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual akan diakui pada Laporan Laba Rugi.

Available-for-sale financial assets are initially recognized at fair value, plus transaction costs, and measured subsequently at fair value with gains and losses being recognized in the statements of changes in equity, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets are derecognized. If an available-for-sale financial asset is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously recognized in the statements of changes in equity is recognized in the Statements of Earnings. However, interest is calculated using the effective interest rate method, and foreign currency gains or losses on monetary assets classified as available-for-sale are recognized in the Statements of Earnings.

Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak ada aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

As at December 31, 2010, there are no financial assets classified as available-for-sale financial assets.

#### Kewajiban keuangan

#### Financial liabilities

Perseroan mengklasifikasikan kewajiban keuangannya sebagai kategori (i) kewajiban keuangan pada nilai wajar melalui laba atau rugi dan (ii) kewajiban keuangan yang diukur pada nilai buku setelah dikurangi biaya amortisasi.

The Company classifies its financial liabilities into the categories of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

#### (i) Kewajiban keuangan pada nilai wajar melalui laba atau rugi

#### (i) Financial liabilities at fair value through profit or loss

Kewajiban keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi adalah kewajiban keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk diperdagangkan. Kewajiban keuangan akan diklasifikasikan sebagai tersedia untuk diperdagangkan apabila pada saat perolehan awalnya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam jangka pendek dan terdapat bukti aktual adanya pola pengambilan keuntungan dalam jangka pendek. Derivatif juga dikategorikan sebagai diperdagangkan kecuali jika mereka ditujukan dan berlaku efektif sebagai instrument lindung nilai.

Financial liabilities at fair value through profit or loss are financial liabilities classified as held for trading. A financial liability is classified as held for trading if it is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking. Derivatives are also categorised as held for trading unless they are designated and effective as hedging instruments.

Laba dan rugi yang muncul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola sebagai kewajiban keuangan diakui sebagai "laba/rugi selisih kurs".

Gains and losses arising from changes in the fair value of derivatives that are managed in conjunction with designated financial liabilities are included in "foreign exchange gain/loss".

#### (ii) Kewajiban keuangan yang diukur pada nilai buku dikurangi biaya amortisasi

#### (ii) Financial liabilities measured at amortized cost

Kewajiban keuangan yang tidak diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi akan masuk ke dalam kategori ini dan diukur pada nilai buku dikurangi biaya amortisasi. Kewajiban keuangan yang diukur pada nilai buku dikurangi biaya amortisasi adalah hutang lainnya, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman, dan obligasi.

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss fall into this category and are measured at amortized cost. Financial liabilities measured at amortized cost are other payables, accrued expenses, loans and bonds.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

### 2.16. Aset dan Kewajiban Keuangan (lanjutan)

#### Kewajiban keuangan (lanjutan)

##### (ii) Kewajiban keuangan yang diukur pada nilai buku dikurangi biaya amortisasi (lanjutan)

#### Estimasi nilai wajar

Nilai wajar dari instrumen keuangan yang diperdagangkan pada pasar aktif ditentukan melalui kuotasi harga pasar pada tanggal neraca. Kuotasi harga pasar yang terdaftar yang digunakan untuk aset keuangan yang dimiliki Perseroan adalah harga penawaran saat ini. Sedangkan untuk kewajiban keuangan, digunakan harga permintaannya.

Nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan melalui teknik valuasi. Perseroan menggunakan arus kas yang didiskontokan dan menggunakan asumsi yang didasarkan pada kondisi pasar yang ada pada setiap tanggal neraca dimana digunakan juga untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan lainnya.

### 2.17. Penurunan nilai dari aset keuangan

#### (i) Aset yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Pada setiap tanggal neraca Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang Perseroan gunakan untuk menentukan bahwa ada bukti obyektif dari suatu penurunan nilai meliputi:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak pemegang;
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak pemegang, memberikan keringanan pada pihak pemegang yang tidak mungkin diberikan jika pihak pemegang tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terdapat kemungkinan bahwa pihak pemegang akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
  - memburuknya status pembayaran pihak pemegang dalam kelompok tersebut; dan
  - kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada Laporan Laba Rugi.

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

## 2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

### 2.16. Financial Assets and Liabilities (continued)

#### Financial liabilities (continued)

##### (ii) Financial liabilities measured at amortized cost (continued)

#### Fair value estimation

The fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices at the balance sheet date. The quoted market price used for financial assets held by the Company is the current bid price while for financial liabilities it uses offer price.

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined by using valuation techniques. The Company uses discounted cashflow methods and makes assumptions that are based on market conditions existing at each balance sheet date which are used to determine the fair value of the remaining financial instruments.

### 2.17. Impairment of financial assets

#### (i) Assets carried at amortized cost

The Company assesses at the balance sheet date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The criteria that the Company uses to determine that there is objective evidence of an impairment loss include:

- significant financial difficulty of the issuer or obligor;
- a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- the lenders, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, granting to the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
- it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified with the individual financial assets in the portfolio, including:
  - adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
  - national or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of the loss is recognized in the Statements of Earnings.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

## 2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

### 2.17. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

### 2.17. Impairment of financial assets (continued)

#### (i) Aset yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

#### (i) Assets carried at amortized cost (continued)

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada Laporan Laba Rugi.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognized impairment loss will be reversed either directly or by adjusting an allowance account. The reversal will not result in the carrying value of the financial asset exceeding what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date of the impairment reversal. The reversal amount will be recognized in the Statements of Earnings.

#### (ii) Aset yang tersedia untuk dijual

#### (ii) Assets classified as available-for-sale

Ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual telah diakui secara langsung dalam ekuitas dan terdapat bukti obyektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam ekuitas harus dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada Laporan Laba Rugi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada Laporan Laba Rugi merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada Laporan Laba Rugi.

When a decline in the fair value of an available for sale financial asset has been recognized directly in equity and there is objective evidence that the assets are impaired, the cumulative loss that had been recognized in equity will be reclassified from equity to the Statements of Earnings even though the financial asset has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified from equity to the Statements of Earnings will be the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in the Statements of Earnings.

Kerugian penurunan nilai yang diakui pada Laporan Laba Rugi atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui Laporan Laba Rugi.

The impairment losses recognized in the Statements of Earnings for an investment in an equity instrument classified as available-for-sale will not be reversed through Statements of Earnings.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada Laporan Laba Rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui Laporan Laba Rugi.

If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available-for-sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the Statements of Earnings, the impairment loss is reversed through the Statements of Earnings.

### 2.18. Pinjaman

### 2.18. Borrowings

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar jumlah yang diterima, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian disajikan pada nilai perolehan yang diamortisasi.

Borrowings are recognized initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently stated at amortized cost.

Sebelum 1 Januari 2010 selisih antara pinjaman yang diterima dengan (dikurangi biaya transaksi yang terjadi) dengan nilai yang masih harus dibayar diakui pada Laporan Laba Rugi selama periode pinjaman menggunakan metode garis lurus.

Prior to January 1, 2010 the difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value was recognized in the Statements of Earnings over the period of the borrowings using the straight line method.

Mulai 1 Januari 2010, selisih antara pinjaman yang diterima (dikurangi biaya transaksi yang terjadi) dan nilai yang masih harus dibayar diakui pada laporan laba rugi selama periode pinjaman menggunakan metode tingkat suku bunga efektif.

Effective January 1, 2010, any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognized in the Statements of Earnings over the period of the borrowings using the effective interest rate method.

Biaya yang dibayar untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya pinjaman sejauh besar kemungkinannya bahwa sebagian atau seluruh dari fasilitas pinjaman akan digunakan. Dalam hal ini, biaya yang timbul ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Apabila tidak ada bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas pinjaman akan ditarik, biaya akan dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa-jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas pinjaman terkait.

Fees paid on establishment of loan facilities are recognized as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until drawn-down occurs. To the extent there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalized as a pre-payment for liquidity services and amortized over the period of the facility to which it relates.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.18. Pinjaman (lanjutan)

2.18. Borrowings (continued)

Pinjaman diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar kecuali Perseroan mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran untuk paling tidak 12 bulan setelah tanggal neraca.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Company has an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the balance sheet date.

2.19. Hutang usaha

2.19. Trade payables

Hutang usaha adalah kewajiban untuk membayar atas barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam transaksi bisnis pada umumnya. Hutang usaha dikelompokkan sebagai kewajiban lancar apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama). Jika tidak, hutang usaha tersebut disajikan sebagai kewajiban tidak lancar.

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-current liabilities.

Hutang usaha pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur pada harga perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Trade payables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

2.20. Dividen

2.20. Dividends

Pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan Perseroan pada periode dimana dividen tersebut dideklarasikan.

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognized as a liability in the Company's financial statements in the period in which the dividends are declared.

3. Kas dan Setara Kas

3. Cash and Cash Equivalents

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US\$, in thousands)
<b>Kas</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>Cash on Hand</b>
<b>Bank:</b>			<b>Cash in Bank:</b>
Dalam Mata Uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
JP Morgan Chase Bank N.A.	3,574	2,115	JP Morgan Chase Bank N.A.
Citibank N.A.	242	394	Citibank N.A.
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	-	2	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Dalam Mata Uang Rupiah			Denominated in Rupiah
Citibank N.A.	1,765	1,216	Citibank N. A.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	391	521	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	2	1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	-	104	PT Bank CIMB Niaga Tbk
	<b>5,974</b>	<b>4,353</b>	
<b>Deposito Berjangka</b>			<b>Time Deposits</b>
Dalam Mata Uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	127,148	-	Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
BNP Paribas Inc.	106,296	35,008	BNP Paribas Inc.
ANZ Bank	69,413	-	ANZ Bank
JP Morgan Chase Bank N.A.	56,000	69,078	JP Morgan Chase Bank N.A.
Standard Chartered Bank	39,233	113,532	Standard Chartered Bank
UBS AG	-	39,003	UBS AG
Dalam Mata Uang Rupiah			Denominated in Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	42	39	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
	<b>398,132</b>	<b>256,660</b>	
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>404,129</b>	<b>261,050</b>	<b>Total Cash and Cash Equivalents</b>

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

**3. Kas dan Setara Kas (lanjutan)**

Rata-rata suku bunga deposito berjangka di atas adalah:

31 Desember	2010	2009	December 31
Deposito Dolar AS	0.20%	0.23%	US Dollar Deposits
Deposito Rupiah	6.5%	6.0%	Rupiah Deposits

Tidak ada kas dan setara kas pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

**3. Cash and Cash Equivalents (continued)**

The average interest rates on the above time deposits are as follows:

31 Desember	2010	2009	December 31
Deposito Dolar AS	0.20%	0.23%	US Dollar Deposits
Deposito Rupiah	6.5%	6.0%	Rupiah Deposits

There are no cash and cash equivalents held with related parties.

**4. Kas yang Dibatasi Penggunaannya**

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US\$, in thousands)
Union Bank N.A.	1,211	–	Union Bank N.A.
Jumlah	1,211	–	Total

Rekening Union Bank N.A. tersebut ditujukan untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhutang. Rekening ini dibuka untuk memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior antara Perseroan dengan Mizuho Corporate Bank Ltd. dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. untuk proyek Karebbe (lihat Catatan 16).

**4. Restricted Cash**

The account with Union Bank N.A. is intended for payment of loan principal and interest payable. This account was established to fulfill the requirement of the Senior Export Facility Agreement ("SEFA") between the Company and Mizuho Corporate Bank Ltd. and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. for the Karebbe project (see Note 16).

**5. Piutang Usaha**

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US\$, in thousands)
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	124,061	97,752	Related parties

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US\$, in thousands)
Lancar*	124,061	97,752	Current*

\*Jumlah piutang di atas adalah lancar sesuai dengan ketentuan pembayaran seperti disepakati dalam kontrak penjualan.

**5. Trade Receivables**

Aging analysis of trade receivables is as follows:

\*All amounts are current within the payment terms as set out in the sales contracts.

Semua piutang usaha adalah dalam mata uang Dolar AS.

All trade receivables are denominated in US Dollars.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha. Tidak ada piutang yang dijamin pada tanggal 31 Desember 2010.

Based on a review of the status of each customer's receivable accounts at the end of the period, the Company's management believes that no provision for impairment is necessary to provide for losses from the potential non-collection of these accounts. There were no trade receivables pledged as collateral as of December 31, 2010.

Lihat Catatan 30e untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Refer to Note 30e for details of related party balances and transactions.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

6. Piutang Lainnya

6. Other Receivables

31 Desember	2010	2009	December 31
			(US\$, in thousands)
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Tagihan kepada karyawan	6,311	5,409	Employee receivables
Dana Pensiun International Nickel Indonesia	3,772	2,127	Dana Pensiun International Nickel Indonesia
Tagihan kepada kontraktor dan lain – lain	810	774	Receivables from contractors and others
<b>Jumlah</b>	<b>10,893</b>	<b>8,310</b>	<b>Total</b>

Perseroan tidak membuat penyisihan penurunan nilai karena manajemen berpendapat bahwa piutang dapat tertagih seluruhnya.

The Company has not made a provision for impairment as management is of the opinion that these receivables will be collected in full.

Lihat Catatan 30e untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Refer to Note 30e for details of related party balances and transactions.

7. Persediaan, bersih

7. Inventories, net

31 Desember	2010	2009	December 31
			(US\$, in thousands)
(Dalam ribuan Dolar AS)			
<b>Nikel</b>			<b>Nickel</b>
Dalam proses	27,640	31,305	In process
Barang jadi	7,647	4,279	Finished
	<b>35,287</b>	<b>35,584</b>	
<b>Bahan Pembantu</b>	<b>73,138</b>	<b>88,358</b>	<b>Supplies</b>
Dikurangi: Penyisihan untuk bahan pembantu usang	(6,439)	(6,293)	Less: Allowance for obsolete supplies
	<b>66,699</b>	<b>82,065</b>	
<b>Jumlah</b>	<b>101,986</b>	<b>117,649</b>	<b>Total</b>

Mutasi penyisihan bahan pembantu usang adalah sebagai berikut:

Movement in the allowance for obsolete supplies is as follows:

31 Desember	2010	2009	December 31
			(US\$, in thousands)
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Saldo awal – 1 Januari	(6,293)	(3,421)	Beginning balance – January 1
Penyisihan untuk bahan pembantu usang, bersih	(1,201)	(2,872)	Allowance for obsolete supplies, net
Penghapusan bahan pembantu	1,055	–	Write-off of supplies inventory
<b>Saldo akhir</b>	<b>(6,439)</b>	<b>(6,293)</b>	<b>Ending balance</b>

Manajemen Perseroan yakin bahwa penyisihan untuk bahan pembantu usang telah mencukupi terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari bahan pembantu usang. Tidak ada persediaan yang dijamin pada tanggal 31 Desember 2010.

The Company's management believes that the provision for obsolete supplies is adequate to cover possible losses from obsolete supplies. There were no inventories pledged as collateral as of December 31, 2010.

Pada tanggal 31 Desember 2010, semua aset Perseroan termasuk persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh semua risiko industri berikut, tapi tidak terbatas pada gempa bumi, kebakaran, kerusakan mekanis atau listrik termasuk gangguan usaha lainnya. Total pertanggungan untuk seluruh aset Perseroan pada saat ini adalah AS\$2.774 juta dengan batasan sebesar AS\$1.250 juta per kejadian. Bahan pembantu diasuransikan sebesar biaya penggantian, nikel dalam proses sebesar biaya bahan baku bijih dan tenaga kerja ditambah proporsi tertentu biaya tidak langsung, sedangkan untuk barang jadi nikel dalam *matte* sebesar mana yang lebih tinggi antara harga jual tunai bersih atau biaya memproduksinya kembali. Menurut pendapat manajemen Perseroan, pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

As of December 31, 2010, all of the Company's assets including inventories were insured against the risk of direct physical loss or damage caused by industrial all risks, including but not limited to earthquake, fire and electrical or mechanical breakdown and including related business interruption. The total insured value of all assets as of this date was up to a maximum of US\$2,774 million with policy limits of US\$1,250 million per occurrence. Supplies are insured at replacement cost, metals in process at the cost of raw materials and labor expended plus a proper proportion of overhead charges, while nickel in *matte* finished goods are insured at the regular net cash selling price or at reproduction cost, whichever is higher. In management's opinion, the insurance is adequate to cover possible losses from such risks.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

8. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

8. Prepaid Expenses and Advances

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US\$, in thousands)			
Uang muka untuk kontraktor dan pemasok	4,520	8,868	Advances to contractors and suppliers
Asuransi dibayar dimuka	1,994	2,826	Prepaid insurance
Lainnya	254	86	Others
<b>Jumlah</b>	<b>6,768</b>	<b>11,780</b>	<b>Total</b>

9. Aset Tetap

9. Property, Plant and Equipment

	1 Januari/ January 1, 2010	Penambahan/ Additions	Transfer/ Transfers	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 31, 2010	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US\$, in thousands)						
<b>Harga perolehan</b>						<b>Cost</b>
<b>Pemilikan langsung</b>						<b>Direct ownership</b>
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	413,087	–	7,188	–	420,275	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	29,543	–	3,170	–	32,713	Roads and bridges
Bangunan	577,483	–	2,170	–	579,653	Buildings
Pabrik dan mesin	1,153,259	–	73,707	(4,466)	1,222,500	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	32,579	–	–	–	32,579	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	29,175	–	–	–	29,175	Mine development
Aset tetap dalam penyelesaian	319,163	183,154	(71,472)	–	430,845	Construction in progress
	2,554,289	183,154	14,763	(4,466)	2,747,740	
<b>Aset dengan sewa pembiayaan</b>						<b>Assets under finance leases</b>
Mesin	14,763	–	(14,763)	–	–	Machinery
<b>Jumlah</b>	<b>2,569,052</b>	<b>183,154</b>	<b>–</b>	<b>(4,466)</b>	<b>2,747,740</b>	<b>Total</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>
<b>Pemilikan langsung</b>						<b>Direct ownership</b>
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	(162,921)	(14,009)	–	–	(176,930)	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	(11,104)	(1,739)	–	–	(12,843)	Roads and bridges
Bangunan	(353,148)	(14,603)	55	–	(367,696)	Buildings
Pabrik dan mesin	(621,569)	(63,197)	(4,597)	2,937	(686,426)	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	(30,364)	(1,064)	–	–	(31,428)	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	(6,781)	(1,128)	–	–	(7,909)	Mine development
	(1,185,887)	(95,740)	(4,542)	2,937	(1,283,232)	
<b>Aset dengan sewa pembiayaan</b>						<b>Assets under finance leases</b>
Mesin	(4,062)	(480)	4,542	–	–	Machinery
<b>Jumlah</b>	<b>(1,189,949)</b>	<b>(96,220)</b>	<b>–</b>	<b>2,937</b>	<b>(1,283,232)</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai buku bersih</b>	<b>1,379,103</b>	<b>86,934</b>	<b>–</b>	<b>(1,529)</b>	<b>1,464,508</b>	<b>Net book value</b>

Lihat Catatan 10 untuk rincian aset tetap dalam penyelesaian.

Refer to Note 10 for details of construction in progress.



Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

9. Aset Tetap (lanjutan)

9. Property, Plant and Equipment (continued)

	1 Januari/ January 1, 2009	Penambahan/ Additions	Transfer/ Transfers	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 31, 2009	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US\$, in thousands)
<b>Harga perolehan</b>						<b>Cost</b>
<b>Pemilikan langsung</b>						<b>Direct ownership</b>
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	404,800	–	8,287	–	413,087	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	28,995	–	548	–	29,543	Roads and bridges
Bangunan	570,116	–	7,412	(45)	577,483	Buildings
Pabrik dan mesin	1,114,790	–	50,726	(12,257)	1,153,259	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	31,752	–	827	–	32,579	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	29,175	–	–	–	29,175	Mine development
Aset tetap dalam penyelesaian	242,517	139,288	(62,642)	–	319,163	Construction in progress
	2,422,145	139,288	5,158	(12,302)	2,554,289	
<b>Aset dengan sewa pembiayaan</b>						<b>Assets under finance leases</b>
Mesin	19,921	–	(5,158)	–	14,763	Machinery
<b>Jumlah</b>	<b>2,442,066</b>	<b>139,288</b>	<b>–</b>	<b>(12,302)</b>	<b>2,569,052</b>	<b>Total</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>
<b>Pemilikan langsung</b>						<b>Direct ownership</b>
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	(149,929)	(13,008)	16	–	(162,921)	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	(9,933)	(1,171)	–	–	(11,104)	Roads and bridges
Bangunan	(338,832)	(14,350)	–	34	(353,148)	Buildings
Pabrik dan mesin	(567,380)	(58,064)	(3,030)	6,905	(621,569)	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	(29,176)	(1,188)	–	–	(30,364)	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	(7,125)	(1,142)	1,486	–	(6,781)	Mine development
	(1,102,375)	(88,923)	(1,528)	6,939	(1,185,887)	
<b>Aset dengan sewa pembiayaan</b>						<b>Assets under finance leases</b>
Mesin	(3,569)	(2,021)	1,528	–	(4,062)	Machinery
<b>Jumlah</b>	<b>(1,105,944)</b>	<b>(90,944)</b>	<b>–</b>	<b>6,939</b>	<b>(1,189,949)</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai buku bersih</b>	<b>1,336,122</b>	<b>48,344</b>	<b>–</b>	<b>(5,363)</b>	<b>1,379,103</b>	<b>Net book value</b>

Lihat Catatan 10 untuk rincian aset tetap dalam penyelesaian.

Refer to Note 10 for details of construction in progress.

Seluruh biaya penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dibebankan ke biaya produksi.

All depreciation expenses for the years ended December 31, 2010 and 2009 were allocated to production costs.

Pelepasan aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Disposals of property, plant and equipment for the years ended December 31, 2010 and 2009 were as follows:

	2010	2009	
31 Desember			December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Nilai buku aset tetap yang dilepas, tidak termasuk pelepasan penyisihan kewajiban penghentian pengoperasian aset (lihat Catatan 26a)	1,529	1,182	Book value of disposed property, plant and equipment, excluding de-recognition of asset retirement obligation (refer to Note 26a)
Kas yang diterima dari pelepasan aset tetap	–	–	Proceeds from disposals of property, plant and equipment
Kerugian atas penjualan aset tetap	1,529	1,182	Loss on disposal of property, plant and equipment

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

9. Aset Tetap (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2010, semua aset Perseroan termasuk aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh semua risiko industri dan, tapi tidak terbatas pada gempa bumi, kebakaran, kerusakan mekanis atau listrik termasuk gangguan usaha lainnya. Total pertanggungan untuk seluruh aset Perseroan pada saat ini adalah AS\$2.774 juta dengan batasan sebesar AS\$1.250 juta per kejadian. Sebagian besar dari aset tetap diasuransikan sebesar biaya pengganti. Menurut pendapat manajemen Perseroan, pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Tidak ada aset tetap yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2010.

10. Aset Tetap dalam Penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari proyek yang belum selesai pada tanggal neraca.

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari:

31 Desember	2010	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu penyelesaian/ Estimated completion date	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)				(US\$, in thousands)
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Karebbe	315,823	78	2011	Karebbe Hydroelectric Project
Konversi Batubara Tahap I	17,461	30	2011	Coal Conversion Phase I
Pemutakhiran Pembangkit Listrik Larona Unit 2	13,696	75	2011	Larona Unit 2 Generator Upgrade
Pemutakhiran Pembangkit Listrik Larona Unit 1	12,820	70	2011	Larona Unit 1 Generator Upgrade
Reaktor Tanur Listrik No. 4	12,747	79	2011	Adaptive reactor Furnace No. 4
Lainnya di bawah AS\$10.000	58,298	-	-	Others below US\$10,000
<b>Jumlah</b>	<b>430,845</b>			<b>Total</b>

31 Desember	2009	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu penyelesaian/ Estimated completion date	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)				(US\$, in thousands)
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Karebbe	167,850	42	2011	Karebbe Hydroelectric Project
Kiln 1,2,3 ESP	53,714	75	2010	Kiln 1,2,3 ESP
Konversi Batubara Tahap 1	16,468	28	2011	Coal Conversion Phase 1
Pemutakhiran Pembangkit Listrik Larona Unit 2	13,307	73	2011	Larona Unit 2 Generator Upgrade
Pemutakhiran Pembangkit Listrik Larona Unit 1	11,725	64	2011	Larona Unit 1 Generator Upgrade
Reaktor Tanur Listrik No. 4	11,592	72	2011	Adaptive reactor Furnace No. 4
Lainnya di bawah AS\$10.000	44,507	-	-	Others below US\$10,000
<b>Jumlah</b>	<b>319,163</b>			<b>Total</b>

Biaya pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar AS\$7,5 juta yang timbul dari pembiayaan untuk pembangunan proyek Karebbe, dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan. Tingkat kapitalisasi yang digunakan adalah 1,88% (2009: Nihil), angka ini mencerminkan biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut.

Tidak ada proyek atau aset tetap dalam penyelesaian yang mengalami masalah teknis maupun non-teknis dalam proses penyelesaiannya pada tanggal 31 Desember 2010.

9. Property, Plant and Equipment (continued)

As of December 31, 2010, all of the Company's assets including property, plant and equipment were insured against the risk of direct physical loss or damage caused by industrial all risks, including but not limited to earthquake, fire and electrical or mechanical breakdown and including related business interruption. The total insured value for all assets as of this date was up to a maximum of US\$2,774 million, with policy limits of US\$1,250 million per occurrence. The property, plant and equipment are mostly insured at replacement cost. In management's opinion, the insurance is appropriate and adequate to cover possible losses arising from such risks. There were no fixed assets pledged as collateral as of December 31, 2010.

10. Construction in Progress

Construction in progress represents capital projects that have not been completed at the balance sheet dates.

The construction in progress is as follows:

For the year ended December 31, 2010, borrowing costs of US\$7.5 million arising from financing for the Karebbe Project, were capitalized. The capitalization rate of 1.88% (2009: Nil) was used, representing the borrowing cost of the loan used to finance the project.

There were no construction in progress assets having technical or non-technical problems during the construction progress as of December 31, 2010.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

11. Aset Lainnya

11. Other Assets

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US\$, in thousands)	
Pinjaman kepada karyawan – jangka panjang	12,821	12,171	Loans to personnel – long-term
Lainnya	–	7,046	Others
<b>Jumlah</b>	<b>12,821</b>	<b>19,217</b>	<b>Total</b>

Lihat Catatan 30e untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Refer to Note 30e for details of related party balances and transactions.

12. Hutang Usaha

12. Trade Payables

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US\$, in thousands)	
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa			Related parties
Dalam mata uang Dolar AS	7,184	4,306	Denominated in US Dollars
Dalam mata uang Dolar Kanada	1,372	1	Denominated in Canadian Dollars
	<b>8,556</b>	<b>4,307</b>	
Pihak ketiga			Third parties
Dalam mata uang Dolar AS	28,913	25,020	Denominated in US Dollars
Dalam mata uang Rupiah	2,327	761	Denominated in Rupiah
Dalam mata uang Dolar Singapura	414	220	Denominated in Singapore Dollars
Dalam mata uang Krone Norwegia	405	338	Denominated in Norwegian Krone
Dalam mata uang Dolar Australia	268	148	Denominated in Australian Dollars
Dalam mata uang Euro	184	34	Denominated in Euro
Dalam mata uang Dolar Kanada	172	136	Denominated in Canadian Dollars
Dalam mata uang Pounds Sterling Inggris	162	378	Denominated in UK Pounds Sterling
Dalam mata uang Yen Jepang	19	1,561	Denominated in Japanese Yen
Dalam mata uang Dolar Selandia Baru	–	1	Denominated in New Zealand Dollars
	<b>32,864</b>	<b>28,597</b>	
<b>Jumlah</b>	<b>41,420</b>	<b>32,904</b>	<b>Total</b>

Hutang usaha timbul dari pembelian barang dan jasa. Semua jumlah yang disebutkan di atas adalah lancar sesuai dengan ketentuan pembayaran seperti yang tertuang dalam perjanjian yang bersangkutan.

The trade payables arose from the purchase of goods and services. All amounts are current within the payment terms as set out in the relevant agreement.

Rincian pemasok dengan saldo melebihi 10% dari total hutang usaha, selain saldo pihak yang memiliki hubungan istimewa yang dijelaskan di Catatan 30f adalah sebagai berikut:

Details of suppliers that make up more than 10% of the trade payables balance, other than related party balances disclosed in Note 30f are:

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US\$, in thousands)	
Pihak ketiga			Third parties
Kuo Oil (S) Pte Ltd.	9,190	8,811	Kuo Oil (S) Pte Ltd.
PT SNC Lavalin	538	–	PT SNC Lavalin
Kajima PP	–	3,238	Kajima PP
Prism Sulphur Corp.	–	1,577	Prism Sulphur Corp.

Lihat Catatan 30f untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Refer to Note 30f for details of related party balances and transactions.

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perseroan atas hutang usahanya pada tanggal 31 Desember 2010.

There were no guarantees made by the Company for its payables as of December 31, 2010.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

13. Perpajakan

13. Taxation

a. Piutang Pajak

a. Taxes Receivable

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US\$, in thousands)			
Piutang Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	60,397	60,741	Value Added Tax ("VAT") receivable
Pajak dalam proses banding	3,461	211	Tax in dispute
Pajak Penghasilan ("PPH") Badan 2008	–	71,743	Corporate Income Tax ("CIT") 2008
<b>Jumlah</b>	<b>63,858</b>	<b>132,695</b>	<b>Total</b>

b. Hutang Pajak

b. Taxes Payable

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US\$, in thousands)			
PPH Badan 2010	43,903	–	CIT 2010
PPH Badan 2009	–	4,763	CIT 2009
Hutang pajak lainnya			Other taxes payable
PPN terhutang	3,774	2,445	VAT payable
PPH Pasal 23 dan 26	944	676	Withholding tax articles 23 and 26
PPH Pasal 21	795	828	Withholding tax article 21
<b>Jumlah</b>	<b>49,416</b>	<b>8,712</b>	<b>Total</b>

c. Beban Pajak Penghasilan

c. Income Tax Expense

Beban pajak penghasilan untuk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

The income tax expense for the years ended December 31, 2010 and 2009 was as follows:

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US\$, in thousands)			
Kini	154,811	63,094	Current
Tanggung	(10,831)	3,193 <sup>*)</sup>	Deferred
<b>Beban pajak penghasilan</b>	<b>143,980</b>	<b>66,287</b>	<b>Income tax expense</b>

<sup>\*)</sup> Termasuk penyesuaian atas pemberlakuan tarif baru pajak Penghasilan. Lihat Catatan 13e.

<sup>\*)</sup> Includes an adjustment from impact of new corporate tax rate enacted. Refer to Note 13e.

Perhitungan pajak penghasilan kini adalah berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Jumlah tersebut mungkin disesuaikan ketika surat pemberitahuan pajak tahunan disampaikan ke kantor pajak.

Current income tax calculations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when annual tax returns are filed with the tax authorities.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

13. Perpajakan (lanjutan)

13. Taxation (continued)

c. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Tax Expense (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between earnings before income tax as shown in these financial statements and the estimated taxable income is as follows:

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US\$, in thousands)	
Laba sebelum pajak penghasilan	581,343	236,704	Earnings before income tax
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	19,196	(7,895)	Difference between commercial and tax depreciation
Manfaat pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya	783	(342)	Employee benefits and other post-retirement obligations
Penyisihan bahan pembantu usang	146	2,872	Allowance for obsolete inventory
Kewajiban penghentian pengoperasian aset	2,053	(2,007)	Asset retirement obligation
Penyisihan imbalan opsi setara saham	587	1,532	Provision for share option equivalents
Penyisihan lain-lain	9,287	(6,311)	Other provision
	613,395	224,553	
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Pendapatan bunga kena pajak final	(43)	(69)	Interest income subject to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	5,892	851	Non-deductible expenses
	5,849	782	
Laba kena pajak	619,244	225,335	Taxable profit
Pajak penghasilan – kini pada tarif 25% (2009: 28%)	154,811	63,094	Income tax – current at 25% (2009: 28%)
Pajak yang dibayar dimuka	(110,908)	(58,331)	Prepaid tax
Kurang bayar pajak	43,903	4,763	Underpayment of tax

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan teoritis dari laba sebelum pajak penghasilan Perseroan adalah sebagai berikut:

The reconciliation of income tax expense to the theoretical tax amount on the Company's earnings before income tax is as follows:

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US\$, in thousands)	
Laba sebelum pajak penghasilan	581,343	236,704	Earnings before income tax
Pajak dihitung pada tarif 25% (2009: 28%)	145,336	66,277	Tax calculated at 25% (2009: 28%)
Pendapatan bunga kena pajak final	(11)	(19)	Interest income subject to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1,473	238	Non-deductible expenses
Penyesuaian atas pemberlakuan tarif baru			Adjustment from impact of
pajak penghasilan badan (Catatan 13e)	–	(209)	new corporate income tax rate enacted (Note 13e)
Penyesuaian tahun sebelumnya	(2,818)	–	Prior period adjustment
Beban pajak penghasilan	143,980	66,287	Income tax expense

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

13. Perpajakan (lanjutan)

13. Taxation (continued)

d. Kewajiban Pajak Penghasilan Tangguhan, bersih

d. Deferred Income Tax Liabilities, net

Perubahan kewajiban pajak penghasilan tangguhan untuk 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Changes in the deferred income tax liabilities for 2010 and 2009 are shown below:

	1 Januari/ January 1, 2010	Dibebankan/ (Dikreditkan) ke Laporan Laba-Rugi/ Charged / (Credited) to Statements of Earnings	Penyesuaian tahun sebelumnya/ Prior year adjustment	31 Desember/ December 31, 2010	
(Dalam ribuan Dolar AS)					(US\$, in thousands)
Perbedaan temporer:					Temporary differences:
Penyusutan dan amortisasi	194,386	(4,798)	-	189,588	Depreciation and amortization
Kewajiban imbalan kerja	(613)	(196)	-	(809)	Employee benefits liability
Penyisihan bahan pembantu usang	(1,573)	(37)	-	(1,610)	Allowance for obsolete inventory
Kewajiban penghentian pengoperasian aset	(8,630)	(513)	-	(9,143)	Asset retirement obligation
Penyisihan imbalan opsi setara saham	(493)	(147)	-	(640)	Provision for share option equivalents
Akrual/penyisihan lain-lain	(315)	(2,322)	-	(2,637)	Other accrual/provision
Lainnya	-	-	(2,818)	(2,818)	Others
<b>Kewajiban pajak tangguhan, bersih</b>	<b>182,762</b>	<b>(8,013)</b>	<b>(2,818)</b>	<b>171,931</b>	<b>Deferred income tax liabilities, net</b>

	1 Januari/ January 1, 2009	Dibebankan/ (Dikreditkan) ke Laporan Laba-Rugi/ Charged / (Credited) to Statements of Earnings	Dibebankan/ (Dikreditkan) ke Laporan Laba-Rugi atas Pemberlakuan Tarif Baru Pajak Penghasilan/ Charged / (Credited) to Statements of Earnings from New Corporate Tax Rate Enacted *	31 Desember/ December 31, 2009	
(Dalam ribuan Dolar AS)					(US\$, in thousands)
Perbedaan temporer:					Temporary differences:
Penyusutan dan amortisasi	192,269	2,210	(93)	194,386	Depreciation and amortization
Kewajiban imbalan kerja	(698)	96	(11)	(613)	Employee benefits liability
Penyisihan bahan pembantu usang	(855)	(804)	86	(1,573)	Allowance for obsolete inventory
Kewajiban penghentian pengoperasian aset	(9,131)	562	(61)	(8,630)	Asset retirement obligation
Penyisihan imbalan opsi setara saham	(123)	(429)	59	(493)	Provision for share option equivalents
Akrual/penyisihan lain-lain	(1,893)	1,767	(189)	(315)	Other accrual/provision
<b>Kewajiban pajak tangguhan, bersih</b>	<b>179,569</b>	<b>3,402</b>	<b>(209)</b>	<b>182,762</b>	<b>Deferred income tax liabilities, net</b>

(Dalam ribuan Dolar AS)

(US\$, in thousands)

\*) Lihat Catatan 13e.

\*) Refer to Note 13e.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

### 13. Perpajakan (lanjutan)

### 13. Taxation (continued)

#### e. Dampak Pemberlakuan Tarif Baru Pajak Penghasilan Badan

Pada 23 September 2008, perubahan-perubahan tertentu terhadap undang-undang pajak penghasilan telah dianggap berlaku. Salah satu dari perubahan tersebut adalah ditetapkannya tarif tetap untuk pajak penghasilan badan menjadi 28% mulai 1 Januari 2009 dan kemudian dikurangi menjadi 25% mulai 1 Januari 2010.

#### e. Impact of New Corporate Income Tax Rate Enacted

On September 23, 2008 certain amendments to the income tax law were enacted. One of the amendments stipulates that the income tax for corporations will be set at a flat rate of 28% commencing January 1, 2009 and further reduced to 25% from January 1, 2010.

#### f. Surat Ketetapan Pajak

#### f. Tax Assessment Letters

##### PPH Badan 2008

Pada tanggal 26 Maret 2010, Perseroan menerima surat hasil pemeriksaan pajak untuk PPh Badan tahun 2008 yang menyetujui kelebihan pembayaran pajak sebesar AS\$68,5 juta dibandingkan dengan AS\$71,6 juta nilai awal yang ditagihkan dan dicatat sebagai piutang pajak pada laporan keuangan 31 Desember 2009. Pembayaran oleh Direktorat Jendral Pajak ("DJP") telah diterima pada tanggal 14 April 2010 yang terdiri dari penerimaan kas sebesar IDR603,7 milyar (setara dengan AS\$66,3 juta) dan beberapa pemindahbukuan berkaitan dengan hasil pemeriksaan pajak tahun 2008 lainnya sebesar IDR22,4 milyar (setara dengan AS\$2,5 juta). Perseroan telah menyetujui hasil pemeriksaan sebesar AS\$1,3 juta dan mengakuinya sebagai beban di Laporan Laba Rugi, sementara untuk sisa tagihan sebesar AS\$2,2 juta telah dikirimkan surat keberatan ke DJP pada tanggal 24 Juni 2010. Keberatan ini dicatat pada akun pajak dalam proses banding di bagian piutang pajak (lihat Catatan 13a).

##### CIT 2008

On March 26, 2010, the Company received a tax assessment letter for CIT 2008 which confirmed a CIT overpayment of US\$68.5 million compared to the US\$ 71.6 million originally claimed by the Company and booked in its financial statements as a tax receivable as of December 31, 2009. Reimbursement of US\$68.5 million from the Directorate General of Tax ("DGT") was received on April 14, 2010 which consists of cash transfer amounting to IDR603.7 billion (equivalent to US\$66.3 million) and several overbookings related to other 2008 tax assessments of IDR22.4 billion (equivalent to US\$2.5 million). While the Company has agreed with part of the assessment amounting to US\$1.3 million which was recognized as an expense in the Statements of Earnings, the remaining US\$2.2 million has been objected to by the Company in its objection letter to the DGT submitted on June 24, 2010. This objected amount is currently recognized as part of the tax in dispute account under taxes receivable (refer to Note 13a).

##### Pajak-pajak lainnya

Pada tanggal 26 Maret 2010, Perseroan juga menerima beberapa surat pemeriksaan pajak lainnya berkaitan dengan pajak penghasilan lainnya dan PPN sebesar AS\$34,2 juta dengan rincian sebagai berikut:

##### Other taxes

On March 26, 2010, the Company also received several other tax assessment letters concerning the underpayment of several withholding taxes and VAT totaling US\$34.2 million as follows:

Jenis pajak/Tax article	Kurang bayar (IDR nilai penuh)/ Underpayment (IDR full amount)	Setara AS\$ (nilai penuh)/ Equivalent US\$ (full amount)	Jumlah yang disetujui (setara AS\$ nilai penuh)/ Amount agreed (equivalent US\$ full amount)	Jumlah yang diajukan keberatan (AS\$ nilai penuh)/ Underpayment objected (US\$ full amount)	Jumlah keberatan yang ditolak (AS\$ nilai penuh)/ Objection amount rejected (US\$ full amount)	Jumlah yang diajukan banding (AS\$ nilai penuh)/ Underpayment to be appealed (US\$ full amount)
PPH pasal 15/ Withholding tax article 15	50,463,553	5,613	5,518	95	-	-
PPH pasal 23/ Withholding tax article 23	5,201,652,257	578,540	2,417	576,123	-	-
PPH pasal 26/ Withholding tax article 26	296,887,634,509	33,020,535	1,855,874	31,164,665	31,164,665	31,164,665
PPH pasal 4(2)/ Withholding tax article 4(2)	13,263,097	1,475	1,450	2	-	-
PPN/VAT	5,579,010,679	620,511	319,486	301,025	-	-
<b>Total</b>	<b>307,732,024,095</b>	<b>34,226,674</b>	<b>2,184,745</b>	<b>32,041,910</b>	<b>31,164,665</b>	<b>31,164,665</b>

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

13. Perpajakan (lanjutan)

13. Taxation (continued)

f. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

f. Tax Assessment Letters (continued)

Pajak-pajak lainnya (lanjutan)

Other taxes (continued)

Jumlah yang telah disetujui diatas telah diakui sebagai biaya pada laporan laba rugi dan pembayaran ke DJP dilakukan melalui pemindahbukuan (lihat penjelasan PPh Badan 2008 diatas). Selain jumlah yang telah disetujui seperti dijelaskan diatas, manajemen berkeyakinan bahwa hasil pemeriksaan tidak memiliki dasar yang kuat. Terutama interpretasi Kontrak Karya mengenai keharusan pemotongan PPh pasal 26 untuk dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham pendiri. Manajemen percaya bahwa interpretasi Perseroan atas klausul di Kontrak Karya saat ini telah tepat yang didukung oleh pendapat penasehat hukum Perseroan. Lebih lanjut, praktik Perseroan saat ini telah konsisten dengan praktik-praktik di tahun-tahun sebelumnya tanpa sanggahan dari DJP.

The amount agreed by the Company has been recognized as an expense in the Statements of Earnings and payment to the DGT was made through several overbookings (refer to explanation for CIT 2008 above). Other than the agreed amounts noted above, management believes that these assessments are without merit. In particular, the disputed portion of the withholding tax article 26 assessment relates to the DGT's interpretation of a clause in the Company's Contract of Work ("CoW") relating to withholding tax to be applied to dividends paid to founding shareholders of the Company. Management believes that the Company's interpretation of the clause is correct, and the Company has received legal advice to that effect. Further, the Company's treatment is consistent with the treatment that has been adopted in previous years without challenge from the DGT.

Setelah tanggal neraca, pada tanggal 2 Pebruari 2011, Perseroan menerima Surat Keputusan Pajak No. S-75/WPJ.19/2011 yang menolak keberatan kurang bayar pajak untuk PPh 26 mengenai pengenaan pajak penghasilan atas pembayaran dividen kepada pemegang saham pendiri sebesar IDR278 miliar atau setara dengan AS\$31 juta.

Subsequent to the balance sheet date, on February 2, 2011, the Company received a Tax Decision Letter No. S-75/WPJ.19/2011 which rejected the Company's objection to the tax underpayment for article 26 regarding the withholding tax on the dividend payments to the founding shareholders amounting to IDR278 billion or equivalent to US\$31 million.

Perseroan berencana untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak dalam waktu tiga bulan setelah tanggal Surat Keputusan Pajak dikeluarkan.

The Company intends to submit an appeal letter to the tax court within three months of the date of the Tax Decision Letter.

Manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki dasar yang kuat bahwa upaya banding akan diterima dan oleh sebab itu tidak ada kewajiban untuk jumlah tersebut perlu dibuat dalam laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2010.

Management believes that the Company has strong grounds to believe that the appeal will be accepted and as such no liability for this amount has been recognized in the financial statements as at December 31, 2010.

g. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

g. Preliminary Tax Audit Result

Setelah tanggal neraca, pada tanggal 7 Januari 2011, Perseroan telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ("SPHP") untuk tahun-tahun pajak 2004 dan 2006 yang menyatakan kurang bayar pajak Perseroan sebesar IDR103,6 milyar atau setara dengan AS\$16,8 juta untuk tahun pajak 2004 dan IDR268,1 milyar atau setara dengan AS\$37,6 juta untuk tahun pajak 2006 sebagai berikut:

Subsequent to the balance sheet date, on January 7, 2011, the Company received Preliminary Tax Audit Result Letters for the 2004 and 2006 fiscal years. These tax letters indicate tax underpayments of IDR103.6 billion or equivalent to US\$16.8 million for the 2004 fiscal year and IDR268.1 billion or equivalent to US\$37.6 million for the 2006 fiscal year as follows:

	Kurang bayar (AS\$)/ Underpayment (US\$)	Kurang bayar (IDR nilai penuh)/ Underpayment (IDR full amount)	Setara AS\$ (nilai penuh)/ Equivalent US\$ (full amount)
<b>Audit Pajak 2004/2004 Tax Audit</b>			
PPh Badan/CIT	5,296,403	-	5,296,403
PPh 21/Withholding tax article 21	-	5,431,101,672	603,456
PPh 23/Withholding tax article 23	-	224,418,353	24,935
PPh 4 (2)/Withholding Tax article 4 (2)	-	35,296,705	3,922
PPh 15/Withholding Tax article 15	-	512,598,073	56,955
PPh 26/Withholding Tax article 26	-	87,164,631,586	9,684,959
PPN import/VAT import	-	10,099,913,100	1,122,213
Denda Pajak dari PPN impor/Tax Penalty from VAT import	-	106,310,508	11,812
<b>Jumlah/Total</b>	<b>5,296,403</b>	<b>103,574,269,997</b>	<b>16,804,655</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

13. Perpajakan (lanjutan)

13. Taxation (continued)

g. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (lanjutan)

g. Preliminary Tax Audit Result (continued)

	Kurang bayar (AS\$)/ Underpayment (US\$)	Kurang bayar (IDR nilai penuh)/ Underpayment (IDR full amount)	Setara AS\$ (nilai penuh)/ Equivalent US\$ (full amount)
<i>Audit Pajak 2006/2006 Tax Audit</i>			
PPh Badan/CIT	7,790,035	-	7,790,035
PPh 21/Withholding tax article 21	-	14,571,825,622	1,619,092
PPh 23/Withholding tax article 23	-	530,701,184	58,967
PPh 4 (2)/Withholding tax article 4 (2)	-	2,698,037	300
PPh 15/Withholding tax article 15	-	229,589,560	25,510
PPh 26/Withholding tax article 26	-	197,168,334,749	21,907,593
VAT dalam negeri/Onshore VAT	-	38,160,526,258	4,240,058
PPN import/VAT import	-	10,303,250,094	1,144,806
PPN Wajib Pungut/VAT Collector	-	5,906,016,201	656,224
Denda Pajak dari PPN import/Tax Penalty from VAT import	-	1,232,144,159	136,905
<b>Jumlah/Total</b>	<b>7,790,035</b>	<b>268,105,085,864</b>	<b>37,579,490</b>

Manajemen telah menyampaikan surat tanggapan terhadap hasil pemeriksaan pajak tersebut kepada DJP pada tanggal 14 Januari 2011. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, belum ada surat ketetapan pajak yang diterima. Konsisten dengan temuan audit pajak 2008 seperti dijabarkan pada Catatan 13f diatas, manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki dasar yang kuat atas pendekatannya, dan oleh sebab itu tidak ada kewajiban yang perlu dibuat untuk jumlah tersebut dalam laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2010.

Management has submitted a response letter to the preliminary tax audit results to the DGT on January 14, 2011. As of the date of these financial statements no tax assessment letter has been received. Consistent with the 2008 tax findings described in Note 13f above, management believes that the Company has strong grounds to support its approach, and as such no liability for this amount has been recognized in the financial statements as at December 31, 2010.

h. Administrasi

h. Administration

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Perseroan menyampaikan surat pemberitahuan pajak berdasarkan metode *self-assessment* (menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang). Sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Karya 1968, Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan pemeriksaan pajak dan menerbitkan surat ketetapan dalam kurun waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak (sepuluh tahun efektif 1 April 2008 berdasarkan Persetujuan Perpanjangan). Dalam Kontrak Karya 1968 juga disebutkan bahwa pajak penghasilan harus dihitung dan dibayar dalam Dolar AS. Hal ini dipertegas lagi dalam Persetujuan Perpanjangan yang menyatakan bahwa perhitungan dan pembayaran pajak Perseroan harus dilakukan dalam Dolar AS berdasarkan pendapatan bersih kena pajak yang juga dinyatakan dalam Dolar AS. Kelebihan cicilan pembayaran pajak penghasilan atas pajak yang terhutang dicatat sebagai Piutang Pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on a self-assessment basis. As provided under the 1968 Contract, the tax authorities may audit the tax returns and issue an assessment within five years (10 years effective April 1, 2008 under the Extension Agreement) of the due date of the tax liability. Also under the terms of the 1968 Contract, corporation taxes should be calculated in US Dollars and paid in US Dollars. It was confirmed in the Extension Agreement that the calculation of the tax payment to be made by the Company in any year will be made in US Dollars based on the Net Taxable Income of the Company expressed in US Dollars, and that all payments of income tax should be made in US Dollars. Installments paid in excess of tax payable are classified as taxes receivable.

14. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

14. Accrued Expenses

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US\$, in thousands)	
Barang dan jasa	18,697	18,055	Goods and services
Barang modal	14,810	8,632	Capital items
Royalti, retribusi air, sewa tanah, dan lain-lain	7,934	3,245	Royalties, water levy, land rent and others
Beban bunga dan biaya pinjaman	1,628	37	Interest and borrowing costs
<b>Jumlah</b>	<b>43,069</b>	<b>29,969</b>	<b>Total</b>

Lihat Catatan 30h untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Refer to Note 30h for details of related party balances and transactions.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

15. Kewajiban Lancar Lainnya

15. Other Current Liabilities

31 Desember	2010	2009	December 31
(US\$, in thousands)			
Gaji, upah, dan manfaat karyawan lainnya	13,457	12,431	Salaries, wages and other employee benefits
Uang jaminan yang ditahan	9,907	-	Guarantee retention
Hutang dividen	828	1,229	Dividends payable
Lainnya	-	9	Others
<b>Jumlah</b>	<b>24,192</b>	<b>13,669</b>	<b>Total</b>

Lihat Catatan 30g untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Refer to Note 30g for details of related party balances and transactions.

16. Pinjaman Jangka Panjang

16. Long-Term Borrowings

31 Desember	2010	2009	December 31
(US\$, in thousands)			
Mizuho Corporate Bank, Ltd. dan Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd.	150,000	150,000	Mizuho Corporate Bank, Ltd. and Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd.
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(9,439)	(10,444)	Unamortized debt issuance costs
	<b>140,561</b>	<b>139,556</b>	
Bagian jangka pendek	-	-	Current portion
Bagian jangka panjang	<b>140,561</b>	<b>139,556</b>	Non-current portion

Nilai wajar pinjaman jangka panjang saat ini adalah mendekati nilai tercatatnya.

The fair value of the long-term borrowings approximates the carrying amount.

Pada Tanggal 30 November 2009, Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior dengan Mizuho Corporate Bank, Ltd. dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., dengan Vale S.A. (entitas pengendali utama Perseroan) bertindak sebagai penjamin.

On November 30, 2009, the Company entered into a SEFA with Mizuho Corporate Bank, Ltd. and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., with Vale S.A. (the Company's ultimate parent entity) acting as the guarantor.

Fasilitas sebesar AS\$300 juta (terdiri dari pinjaman dari bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. sebesar AS\$200 juta dan Mizuho Corporate Bank, Ltd. sebesar AS\$100 juta) dibebani tingkat bunga LIBOR ditambah 1.5% per tahun untuk tiap periode pembayaran bunga yang di mulai dari tanggal 19 Februari 2010. Pokok hutang akan dibayar dalam 16 kali tengah tahunan mulai tanggal 19 Februari 2012.

The facility of US\$300 million (consisting of loans from the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. of US\$200 million and from Mizuho Corporate Bank, Ltd. of US\$100 million) is subject to interest at LIBOR plus 1.5% per annum for the relevant interest period; interest is payable commencing February 19, 2010. The principal will be repaid in 16 semi-annual installments commencing February 19, 2012.

Pada saat penarikan pinjaman pada tahun 2009, Perseroan telah membayar biaya dimuka dan biaya agen sebesar AS\$4,5 juta; premi asuransi yang terikat kepada perjanjian ini sebesar AS\$5,7 juta; dan biaya – biaya lainnya sebesar AS\$240 ribu.

On draw-down of the facility in 2009, the Company paid upfront fees and agency fees of US\$4.5 million; insurance premium tied to the agreement of US\$5.7 million; and other fees of US\$240 thousand.

Biaya-biaya berikut merupakan biaya yang harus dibayar sepanjang umur pinjaman:

The following fees are to be paid over the life of the loan by the Company:

- Biaya agen kepada *Facility Agent*, sebesar AS\$20 ribu per tahun, yang dibayarkan setiap tanggal 30 November, sampai seluruh pinjaman dilunasi.
- Biaya jaminan kepada penjamin dihitung dari 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman yang belum dilunasi (lihat Catatan 30h).

- Agency fee to the Facility Agent, amounting to US\$20 thousand per annum, on every November 30, until all loans have been paid in full.
- Guarantee fee to the guarantor of 1.5% per annum on the outstanding loan amount (refer to Note 30h).

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

## 16. Pinjaman Jangka Panjang (lanjutan)

Fasilitas tersebut terikat pada persyaratan-persyaratan tertentu antara lain:

- Untuk menyerahkan kepada kreditor dalam jangka waktu masing-masing 180 hari dan 90 hari pada setiap akhir tahun dan setiap kwartal, laporan keuangan yang telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan laporan keuangan kuartalan.
- Dana dari pinjaman akan digunakan hanya untuk membiayai konstruksi, pembangunan dan pengoperasian dari proyek Karebbe.
- Memastikan paling tidak perlakuan *pari passu* dengan semua pinjaman senior lain yang dimiliki pemegang baik yang tidak dijamin maupun yang bersifat *unsubordinated* yang ada saat ini maupun di masa datang
- Sehubungan dengan Periode Penilaian (setiap 6 bulan), nilai pasar dari *Designated Off-take Agreement* (setiap perjanjian ekspor awal dan setiap perjanjian ekspor lainnya yang dibentuk oleh Pemegang dari waktu ke waktu) tidak kurang dari 110% *debt service* (bunga ditambah dengan pokok angsuran).
- Selalu menjaga agar nilai pasar dari *Designated Off-take Agreement* tidak kurang dari 110% jumlah komitmen ditambah dengan jumlah pokok pinjaman dan jumlah *debt service coverage*.
- Pemegang akan memerintahkan JP Morgan Chase Bank, N.A. untuk mentransfer cicilan sebagai berikut :
  - Periode bulan kalender pertama bunga 20%
  - Periode bulan kalender kedua bunga 40%
  - Periode bulan kalender ketiga bunga 60%
  - Periode bulan kalender keempat bunga 80%
  - Periode bulan kalender kelima bunga 100%
- Pemegang tidak akan memberikan hak atas penjaminan asetnya kepada Pemberi Pinjaman lain selain dari Pemberi Pinjaman yang disebutkan dalam Perjanjian Penjaminan.
- Pemegang dan Penjamin tidak akan melakukan penggabungan usaha dengan Perseroan lain atau memindahkan keseluruhan atau bagian signifikan dari asetnya ke pihak lain, tanpa ijin dari Pemberi Pinjaman.
- Tidak diperbolehkan menghapus aset yang berkaitan dengan Karebbe tanpa mendapat izin terlebih dahulu.
- Pemberi Jaminan akan menjaga , agar setiap akhir periode semester fiskal dari Pemberi Jaminan, persyaratan posisi keuangan sebagai berikut :
  - Rasio Hutang terhadap Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi ("LBPDA") yang telah disesuaikan tidak lebih dari 4,5 : 1,0
  - Rasio LBPDA yang telah disesuaikan terhadap biaya bunga tidak kurang dari 2,0 : 1,0

Kejadian *default* : tidak membayar pokok pinjaman; tidak membayar fee atau bunga; tidak memenuhi persyaratan perjanjian; kebangkrutan atau tidak solven.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan telah menarik AS\$150 juta dari fasilitas ini.

Fasilitas kredit diatas digunakan untuk mendanai proyek Karebbe. Pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan telah mematuhi persyaratan-persyaratan perjanjian fasilitas kredit ini.

## 16. Long-Term Borrowings (continued)

The facility is subject to certain covenants; among others:

- To furnish to the Facility Agent within 180 days and 90 days of the end of each fiscal year and quarter, respectively, the audited financial statements with an unqualified opinion and the unaudited quarterly financial statements.
- Proceeds of the loan will be used solely to finance the construction, development and operation of the Karebbe project.
- Ensure at least *pari passu* ranking with all other present and future senior unsecured and unsubordinated indebtedness of the obligor.
- With respect to each Measurement Period (six-month basis), the market value of the Designated Off-take Agreements (each of the initial Export Agreements and each other Export Agreement from time to time designated by the Borrower) will be not less than 110% of the debt service amount (interest plus principal installment) with respect to the Measurement Period.
- At all times the market value of the Designated Off-take Agreements will be not less than 110% of the then sum of the commitments plus the outstanding principal amount of the loans together with the debt service coverage amount.
- The borrower will instruct JP Morgan Chase Bank, N.A. to transfer the installment portion as follows:
  - in the 1st calendar month of the interest period 20%
  - in the 2nd calendar month of the interest period 40%
  - in the 3rd calendar month of the interest period 60%
  - in the 4th calendar month of the interest period 80%
  - in the 5th calendar month of the interest period 100%
- The borrower will not create or permit to exist any lien on any collateral, except for the lien created by the Security Agreement.
- No obligor will, without the consent of the lenders, consolidate with or merge into any other corporation or convey or transfer all or substantially all of its assets to any other person.
- No disposal of assets related to Karebbe project without prior consent.
- The Guarantor will maintain, for each Financial Test Period ending on the last day of each fiscal semester of the Guarantor, the following financial covenants:
  - Debt to Adjusted Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation ("EBITDA") ratio not more than 4.5 : 1.0
  - Adjusted EBITDA to Interest Expense ratio not less than 2.0 : 1.0

Events of default: non-payment of principal; non-payment of fee or interest; failure to satisfy any covenant; involuntary proceedings and bankruptcy or insolvency.

As of December 31, 2010 the Company has drawn down US\$150 million of the facility.

The above credit facilities were utilized for financing the Karebbe Project. At December 31, 2010, the Company was in compliance with the covenants under this facility.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

### 17. Sewa Pembiayaan

Pembayaran pokok sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US\$, in thousands)
Kurang dari satu tahun	–	1,737	Payable within one year
Dikurangi: Beban bunga yang belum jatuh tempo	–	(29)	Less: Future finance charges
Nilai tunai sewa pembiayaan	–	1,708	Present value of finance leases
Dikurangi: Bagian jangka pendek	–	(1,708)	Less: Current maturities
Bagian jangka panjang	–	–	Non-current portion

Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak ada jumlah terhutang atas hutang sewa pembiayaan kepada PT Citigroup Finance (2009: AS\$1,7 juta).

Tidak ada jaminan yang diberikan sehubungan dengan sewa pembiayaan ini. Beban bunga selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah AS\$3,6 ribu (2009: AS\$190 ribu) dengan rata-rata tingkat bunga pinjaman sebesar 2,3% (2009: 2,9%). Selain itu, tidak ada pembatasan-pembatasan kepada Perseroan dalam perjanjian sewa pembiayaan tersebut. Sewa pembiayaan terkait dengan mesin dan peralatan yang dibeli untuk kepentingan operasi.

### 18. Kewajiban Imbalan Kerja

Perseroan memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. Kep-434/KM.17/1997, tanggal 31 Juli 1997 seperti diumumkan dalam Berita Negara No. 73/1997 tanggal 12 September 1997 untuk mendirikan Dana Pensiun International Nickel Indonesia, suatu dana pensiun yang dikelola secara tersendiri, dimana seluruh karyawan yang telah memenuhi persyaratan masa kerja tertentu berhak untuk memperoleh imbalan tertentu, apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia.

Kewajiban di neraca terdiri dari:

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US\$, in thousands)
Imbalan Kesehatan Pasca-Kerja	2,237	1,746	Post-Employment Medical Benefits
Imbalan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan	998	706	Labor Law Benefits
Jumlah	3,235	2,452	Total

### 17. Finance Leases

Principal payment obligations under finance leases are as follows:

As at December 31, 2010 there is no amount outstanding under this finance lease with PT Citigroup Finance (2009: US\$1.7 million).

There is no collateral given in respect of the leases. Interest expense on the obligations during the year ended December 31, 2010 was US\$3.6 thousand (2009: US\$190 thousand) with an average rate of interest of 2.3% (2009: 2.9%). In addition, there are no covenants stipulated in the lease agreements. The finance leases are related to machinery and equipment and are procured for operations.

### 18. Employee Benefits Liability

The Company received approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. Kep-434/KM.17/1997 dated July 31, 1997, as published in State Gazette No. 73/1997 dated September 12, 1997, to establish Dana Pensiun International Nickel Indonesia, a separate trustee administered pension fund, from which all employees, after serving a qualifying period, are entitled to a defined benefit on retirement, disability or death.

Liability in the balance sheet consists of:

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

## 19. Modal Saham

Pemegang saham Perseroan, jumlah kepemilikan saham dan nilai nominal IDR25 (nilai penuh) per saham adalah sebagai berikut:

## 19. Share Capital

The Company's shareholders, number of shares and the related par value IDR25 (full amount) per share were as follows:

31 Desember 2010	Jumlah Saham/ Total Shares	Ribuan AS\$/ US\$ in thousands	%	December 31, 2010
Vale Canada Limited	5,835,607,960	80,115	58.73	Vale Canada Limited
Publik	2,001,284,160	27,476	20.14	Public
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1,996,281,680	27,406	20.09	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Vale Japan Limited *)	54,083,720	743	0.55	Vale Japan Limited *)
Mitsui & Co., Ltd.	35,060,640	481	0.35	Mitsui & Co., Ltd.
Sumitomo Corporation	14,018,480	192	0.14	Sumitomo Corporation
Ciho D. Bangun	2,080	-	-	Ciho D. Bangun
<b>Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>9,936,338,720</b>	<b>136,413</b>	<b>100</b>	<b>Total shares issued and fully paid</b>

\*) Sebelumnya Vale Inco Japan Limited

\*) Formerly Vale Inco Japan Limited

31 Desember 2009	Jumlah Saham/ Total Shares	Ribuan AS\$/ US\$ in thousands	%	December 31, 2009
Vale Canada Limited	5,835,607,960	80,115	58.73	Vale Canada Limited
Publik	2,001,284,160	27,476	20.14	Public
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1,996,281,680	27,406	20.09	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Vale Japan Limited	54,083,720	743	0.55	Vale Japan Limited
Mitsui & Co., Ltd.	35,060,640	481	0.35	Mitsui & Co., Ltd.
Sumitomo Corporation	14,018,480	192	0.14	Sumitomo Corporation
Ciho D. Bangun	2,080	-	-	Ciho D. Bangun
<b>Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>9,936,338,720</b>	<b>136,413</b>	<b>100</b>	<b>Total shares issued and fully paid</b>

Tidak ada pemegang saham publik yang memiliki lebih dari 5% dari total modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

No public shareholder owned more than 5% of the total shares issued and fully paid.

## 20. Deklarasi Dividen

Dividen yang telah diumumkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

## 20. Dividends Declared

Dividends declared during the years ended December 31, 2010 and 2009 were as follows:

	Tanggal Dideklarasikan/ Date Declared	Tanggal Pembayaran/ Date Paid	Tahun Dideklarasikan/ Year Declared	Dividen Per Lembar Saham AS\$ (nilai penuh)/ Dividend Per Share US\$ (full amount)	Jumlah AS\$, dalam ribuan/ Amount US\$, in thousands	
Dividen interim 2010	16 September/ September 16, 2010	22 Oktober/ October 22, 2010	2010	0.02	198,727	Interim dividend for 2010
Dividen akhir dan luar biasa untuk tahun 2008	5 Maret/ March 5, 2010	14 April/ April 14, 2010	2010	0.0141	140,102	Final and extraordinary dividend for 2008
Dividen interim 2009	19 November/ November 19, 2009	29 Desember/ December 29, 2009	2009	0.01107	109,995	Interim dividend for 2009

**Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009**

**Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009**

**20. Deklarasi Dividen (lanjutan)**

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2010, Perseroan mengumumkan dividen akhir dan luar biasa untuk tahun 2008 sebesar AS\$0,0141 per lembar saham. Pada tanggal 16 September 2010 Perseroan mengumumkan pembagian interim dividen sebesar AS\$0.02 per lembar saham.

Pada Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada tanggal 19 Nopember 2009, Perseroan mengumumkan interim dividen sebesar AS\$0,01107 per lembar saham.

**21. Tambahan Modal Disetor**

Saldo Tambahan Modal Disetor senilai AS\$277,76 juta merupakan sisa atas surplus yang terjadi akibat penerbitan saham di atas nilai nominal dan penurunan nilai nominal saham yang terjadi di tahun 1983. Di tahun 1983, Perseroan melakukan restrukturisasi modal (kuasi-reorganisasi) sehingga terjadi alokasi bersih sebesar AS\$205,9 juta ke Akumulasi Defisit pada saat itu.

**22. Cadangan Modal**

**a. Cadangan Jaminan Reklamasi**

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US\$, in thousands)	
Saldo awal	24,344	26,875	Beginning balance
Ditransfer dari cadangan pada tahun berjalan	(7,490)	(2,531)	Transferred from reserve during the year
<b>Jumlah</b>	<b>16,854</b>	<b>24,344</b>	<b>Total</b>

Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 yang mengharuskan Perseroan menyediakan jaminan keuangan atau jaminan reklamasi. Peraturan tersebut mengharuskan setiap perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia untuk melakukan studi tahunan yang memperkirakan besarnya jumlah biaya reklamasi dan melaporkan rencana reklamasinya. Rencana tersebut mencakup perkiraan biaya dari pekerjaan untuk pemulihan lahan tambang bila dikerjakan oleh kontraktor luar. Untuk setiap pekerjaan yang tidak dilaksanakan sendiri oleh Perseroan sesuai dengan rencana pada periode tersebut, Pemerintah dapat menuntut pembayaran untuk pekerjaan yang masih harus dikerjakan oleh para kontraktor. Jaminan tersebut dapat berupa rekening bersama, deposito berjangka, bank garansi atau, pada kondisi tertentu yang menyangkut perusahaan-perusahaan publik, dapat berupa cadangan yang dicatat dalam buku Perseroan. Sebelum dikeluarkannya PP 78/2010 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan No.336.K/271/DDJP/1996 tanggal 1 Agustus 1996, Perseroan membentuk cadangan pada tahun 1998 dengan cara mengalokasikan dari saldo laba suatu jumlah yang dianggap cukup untuk menutup biaya langsung dan biaya tidak langsung yang direncanakan untuk reklamasi pada lima tahun mendatang. Rencana reklamasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi sesuai dengan Surat Keputusan No. 1912/87/DJB/2009 tanggal 6 Juli 2009 untuk wilayah Soroako dan Surat Keputusan No. 1126/87/DJB/2009 tanggal 6 April 2009 untuk wilayah Pomalaa. Selama tahun 2009, Perseroan memindahkan sejumlah AS\$2.531 ribu dari Cadangan Jaminan Reklamasi ke Saldo Laba Ditahan untuk merefleksikan pengurangan cadangan seperti yang diharuskan dalam surat di atas. Rencana reklamasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi sesuai dengan Surat Keputusan No. 1239/87/DJB/2010 tanggal 6 Mei 2010 untuk wilayah Soroako dan Surat Keputusan No.1240/87/DJB/2010 tanggal 6 Mei 2010 untuk wilayah Pomalaa. Selama tahun 2010, Perseroan memindahkan sejumlah AS\$7.490 ribu dari Cadangan Jaminan Reklamasi ke Saldo Laba Ditahan untuk merefleksikan pengurangan cadangan seperti yang diharuskan dalam surat di atas.

**20. Dividends Declared (continued)**

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on March 5, 2010, the Company announced a final and extraordinary dividend for 2008 of US\$0.0141 per share. On September 16, 2010, the Company announced an interim dividend distribution of US\$0.02 per share.

At the Board of Commissioners Meeting held on November 19, 2009, the Company announced an interim dividend of US\$0.01107 per share.

**21. Additional Paid-in Capital**

The Company has an Additional Paid-in Capital balance of US\$277.76 million representing the remaining surplus arising from the issuance of shares in excess of par value and a reduction in the par value of its shares in 1983. In 1983, the Company underwent a capital restructuring (quasi reorganization) that resulted in the allocation of a net amount of US\$205.9 million to the Accumulated Deficit at the time.

**22. Capital Reserves**

**a. Reclamation Guarantee Reserve**

A financial surety, or reclamation guarantee, is required under Government Regulations No. 78 of 2010. The regulation require that an annual study be undertaken by a mining company operating in Indonesia to estimate its reclamation costs and that a plan be submitted to the Government. The plan includes an estimate of the cost of performing the rehabilitation work by an outside contractor. For any work a company does not carry out in the period pursuant to the plan, the Government can require payment for the outstanding work to be carried out by the contractor. The surety can be in the form of joint account, time deposit, bank guarantee or, in certain circumstances involving public companies, a financial reserve recorded in the accounts of the Company. Prior to the issuance of GR 78 of 2010 in accordance with the Decision Letter of the Director General of Mining No. 336.K/271/DDJP/1996 dated August 1, 1996, the Company established in 1998 a financial reserve, by transfer from retained earnings, in an amount sufficient to cover its planned direct and indirect costs of reclamation for the next five years. A plan was agreed upon with the Government for the period to December 31, 2009, as set out in the Decision Letters of the Directorate General of Minerals, Coal and Geothermal No. 1912/87/DJB/2009 dated July 6, 2009 for Sorowako area and No. 1126/87/DJB/2009 dated April 6, 2009 for Pomalaa area. During 2009 the Company transferred US\$2,531 thousand from the Reclamation Guarantee Reserve to Retained Earnings to reflect the reduction in the reserve as required in the above mentioned letters. A plan was agreed upon with the Government for the period to December 31, 2010, as set out in the Decision Letters of the Directorate General of Minerals, Coal and Geothermal No. 1239/87/DJB/2010 dated May 6, 2010 for Sorowako area and No. No.1240/87/DJB/2010 dated May 6, 2010 for Pomalaa area. During 2010 the Company transferred US\$7,490 thousand from the Reclamation Guarantee Reserve to Retained Earnings to reflect the reduction in the reserve as required in the above mentioned letters.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

22. Cadangan Modal (lanjutan)

22. Capital Reserves (continued)

b. Cadangan Umum

b. General Reserve

Sesuai dengan Undang-undang Perseroan No. 40/2007, Perseroan telah membentuk cadangan minimum sampai jumlah minimum sebesar 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor sebesar AS\$5,34 juta, berdasarkan jumlah modal ditempatkan dan disetor sebesar IDR248.408.468.000 (nilai penuh).

In accordance with Indonesian Limited Company Law No. 40/2007, the Company has set up a reserve amounting to a minimum of 20% of its issued and paid up capital of US\$5.34 million, based upon the issued and paid up capital of IDR248,408,468,000 (full amount).

23. Harga Pokok Penjualan

23. Cost of Goods Sold

Harga pokok penjualan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Cost of goods sold for the years ended December 31, 2010 and 2009 were as follows:

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US\$, in thousands)	
Bahan bakar minyak dan pelumas	269,594	174,553	Fuels and lubricants
Bahan pembantu	105,652	95,041	Supplies
Depresiasi, amortisasi dan depleksi	96,220	90,944	Depreciation, amortization and depletion
Biaya karyawan	76,092	66,531	Employee costs
Kontrak dan jasa	53,294	43,994	Services and contracts
Pajak dan asuransi	18,159	17,984	Taxes and insurance
Royalti	10,685	5,286	Royalties
Lainnya	22,252	14,832	Others
	651,948	509,165	
Barang dalam proses			Inventory in process
Persediaan awal	31,305	41,610	Beginning balance
Persediaan akhir	(27,640)	(31,305)	Ending balance
Harga pokok produksi	655,613	519,470	Cost of production
Barang jadi			Finished goods
Persediaan awal	4,279	868	Beginning balance
Persediaan akhir	(7,647)	(4,279)	Ending balance
Harga pokok penjualan	652,245	516,059	Cost of goods sold
Rincian pemasok dengan transaksi pembelian melebihi 10% dari jumlah pembelian:		Details of suppliers having transactions representing more than 10% of total purchases:	
31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US\$, in thousands)	
Pihak ketiga			Third parties
Kuo Oil (S) Pte Ltd.	199,626	142,143	Kuo Oil (S) Pte Ltd.
PT Pertamina (Persero) UPDN VII	52,356	24,454	PT Pertamina (Persero) UPDN VII
PT Trakindo Utama Services	17,855	17,786	PT Trakindo Utama Services

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

**24. Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi**

**24. Selling, General and Administration Expenses**

Rincian beban penjualan, umum, dan administrasi adalah sebagai berikut:

The components of selling, general and administration expenses were as follows:

31 Desember	2010	2009	December 31
			(US\$, in thousands)
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Beban bantuan manajemen dan teknis	22,974	9,013	Management and technical assistance fees
Biaya jasa profesional	3,683	2,657	Professional fees
Biaya karyawan	567	1,172	Employee costs
Lainnya	480	176	Others
<b>Jumlah</b>	<b>27,704</b>	<b>13,018</b>	<b>Total</b>

Lihat Catatan 30c untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Refer to Note 30c for details of related party balances and transactions.

**25. (Beban)/Pendapatan Lainnya**

**25. Other (Expenses)/Income**

31 Desember	2010	2009	December 31
			(US\$, in thousands)
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Biaya eksplorasi	-	(2,365)	Exploration costs
Biaya pengembangan proyek	(14,402)	(11,968)	Project development costs
Klaim asuransi	1,159	26,644	Insurance claim proceeds
Beban tambahan Pajak Penghasilan Badan 2009 atas revisi pelaporan pajak 2009	(3,717)	-	Additional Corporate Income Tax 2009 due to revision of 2009 tax return
Beban atas surat ketetapan pajak yang tidak diajukan keberatan	(3,750)	-	Provision for tax assesment letters not objected to
Lainnya dibawah AS\$3,000	(2,675)	(2,916)	Others below US\$3,000
<b>Jumlah</b>	<b>(23,385)</b>	<b>9,395</b>	<b>Total</b>

**26. Pengeluaran untuk Lingkungan Hidup**

**26. Environmental Expenditures**

**a. Kewajiban Penghentian Pengoperasian Aset**

**a. Asset Retirement Obligation**

Pergerakan di saldo kewajiban penghentian pengoperasian aset adalah sebagai berikut:

Movement in the asset retirement obligation balance is as follows:

31 Desember	2010	2009	December 31
			(US\$, in thousands)
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Saldo awal	34,518	36,525	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	2,053	2,174	Provision made during the year
Pelepasan Penyisihan	-	(4,181)	De-recognition of provision
<b>Saldo akhir</b>	<b>36,571</b>	<b>34,518</b>	<b>Ending balance</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

## 26. Pengeluaran untuk Lingkungan Hidup (lanjutan)

### b. Pengeluaran untuk Lingkungan Hidup Lainnya

Pada tahun 1993, Perseroan memperoleh persetujuan Pemerintah atas Studi Evaluasi Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang disusun oleh Perseroan. Laporan-laporan tersebut memberikan informasi dan rencana-rencana pendahuluan kepada Pemerintah mengenai program-program pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan Perseroan saat ini. Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2010, sejumlah inisiatif, yang merupakan sebagian dari komitmen Perseroan di dalam rencana-rencana tersebut, telah diselesaikan, sementara yang lainnya masih sedang berlangsung. Inisiatif-inisiatif yang kini sedang terus berlangsung termasuk penghijauan daerah puma tambang untuk menyeimbangkannya dengan tingkat pembukaan wilayah tambang yang baru.

Pengeluaran untuk lingkungan hidup yang dibebankan ke laporan laba rugi adalah sebesar AS\$4,58 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 (2009: AS\$2,7 juta). Pengeluaran barang modal yang berhubungan dengan proyek lingkungan hidup berjumlah AS\$1,74 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 (2009: AS\$25,1 juta). Di samping itu, Cadangan Jaminan Reklamasi telah dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku (lihat Catatan 22a).

### 27. Biaya karyawan

Jumlah biaya karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar AS\$76,9 juta (2009: AS\$68,5 juta).

### 28. Laba Bersih per Saham Dasar

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diperuntukkan kepada pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan. Tidak ada laba bersih per saham yang terdilusi.

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS, kecuali nilai laba bersih per saham dasar)			(US\$, in thousands, except basic earnings per share)
Laba bersih untuk pemegang saham	437,363	170,417	Net income attributable to shareholders
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (dalam ribuan)	9,936,339	9,936,339	Weighted average number of ordinary shares outstanding (in thousands)
Laba bersih per saham dasar (dalam AS\$)	0.044	0.017	Basic earnings per share (in US\$)

## 29. Ikatan dan Perjanjian-Perjanjian Penting yang Signifikan

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan mempunyai komitmen pembelian barang modal, barang dan jasa kepada 361 pemasok pihak ketiga, yang harus dilunasi dalam periode 2011 – 2019 sejumlah AS\$490,6 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan menandatangani perjanjian jasa dengan Vale Serve Malaysia SDN.BHD. ("Vale Malaysia"), yang berlaku efektif sejak tanggal 17 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 kecuali dihentikan lebih awal dengan 30 hari pemberitahuan dimuka. Dengan perjanjian jasa ini, Vale Malaysia akan menyediakan infrastruktur jasa pendukung yang dikembangkan oleh Vale Malaysia untuk digunakan oleh Perseroan dalam pemrosesan hutang dan penggajian tenaga ekspatriat. Perseroan akan melakukan pembayaran secara bulanan kepada Vale Malaysia yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Estimasi biaya untuk pengadaan jasa ini adalah AS\$108 ribu per bulan. Sampai dengan tanggal neraca, belum terdapat pembayaran sehubungan atas perjanjian jasa ini.

## 26. Environmental Expenditures (continued)

### b. Other Environmental Expenditures

In 1993, the Company received approval from the Government for its Environmental Evaluation Study, Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan. These reports provided the Government with information and preliminary plans regarding the Company's current environmental programs. During the year ended December 31, 2010, a number of initiatives, representing part of the Company's commitments under these plans, were completed while others were still in progress. Ongoing initiatives include the revegetation of mined-out areas to match the stripping rates of new mining areas.

Environmental expenditures charged to earnings were US\$4.58 million for the year ended December 31, 2010 (2009: US\$2.7 million). Capital expenditures for environmental projects were US\$1.74 million for the year ended December 31, 2010 (2009: US\$25.1 million). In addition, a Reclamation Guarantee Reserve has been set up in accordance with applicable Government requirements (refer to Note 22a).

### 27. Employee Costs

Total employee costs for the year ended December 31, 2010 amounted to US\$76.9 million (2009: US\$68.5 million).

### 28. Basic Earnings per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing net earnings attributable to shareholders by the weighted average number of common shares outstanding during the period. There is no diluted earnings per share.

## 29. Significant Commitments and Agreements

As of December 31, 2010, the Company had capital expenditure, goods and services commitments with 361 third party suppliers, which are payable from 2011 - 2019, amounting to US\$490.6 million.

On December 31, 2010, the Company signed a Service Agreement with Vale Serve Malaysia SDN. BHD. ("Vale Malaysia"), effective from January 17, 2011 until December 31, 2011, unless terminated earlier with 30 (thirty) days prior written notice. Pursuant to the Service Agreement, Vale Malaysia will provide to the Company certain support service procedures developed by Vale Malaysia whereby the Company will use the administrative infrastructure of Vale Malaysia to carry out certain supporting activities relating to accounts payable and expatriate payroll. The Company will reimburse and pay, on a monthly basis, to Vale Malaysia an amount consisting of direct and indirect costs. The cost estimates to be paid by the Company under the Service Agreement amount to US\$108 thousand per month. As of the balance sheet date, no amounts have been paid under this Service Agreement.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

### 30. Informasi Mengenai Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perseroan berada di bawah pengendalian Vale Canada Limited. Induk perusahaan Perseroan adalah Vale S.A. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

#### a. Penjualan

Seluruh penjualan Perseroan dilakukan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS, di mana harga ditentukan dengan formula yang didasarkan atas harga tunai nikel di Pasar Bursa Logam London ("the London Metal Exchange" atau "LME") dan harga realisasi rata-rata nikel Vale Canada Limited. Pasal 6 dari Kontrak Karya 1968 menyatakan bahwa Perseroan harus menjual hasil produksinya dengan harga dan syarat-syarat yang sesuai dengan keadaan pasar dunia. Juga dinyatakan bahwa Pemerintah berhak untuk meninjau setiap perubahan atas perumusan harga. Semua penjualan merupakan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Penjualan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 terdiri dari:

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US\$, in thousands)
Penjualan kepada Vale Canada Limited	1,021,739	610,313	Sales to Vale Canada Limited
Penjualan kepada Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	254,584	150,639	Sales to Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
	1,276,323	760,952	
(Persentase penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa terhadap jumlah penjualan)	100%	100%	(Related parties sales as a percentage of total sales)

#### b. Gaji dan Tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan, imbalan triwulanan, program insentif manajemen, pensiun, dan imbalan kesehatan pasca kerja.

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US\$, in thousands)
Gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi	2,491	2,266	Salaries and allowances of the Boards of Commissioners and Directors
(Sebagai persentase terhadap jumlah biaya karyawan)	3%	3%	(As a percentage of total employee costs)

### 30. Related Party Information

The Company is controlled by Vale Canada Limited. The ultimate parent company is Vale S.A. Transactions with related parties are as follows:

#### a. Sales

The Company's sales are made based on long-term, "must take", US Dollar-denominated sales contracts, with prices determined by a formula that is based on the London Metal Exchange ("LME") cash price for nickel and Vale Canada Limited's average net realized price for nickel. Article 6 of the 1968 Contract states that the Company is obliged to sell its product at prices and on terms compatible with world market conditions. The article also states that the Government has the right to review adjustments in the pricing formula. All amounts represent sales to related parties.

Sales for the year ended December 31, 2010 and 2009 consist of:

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

30. Informasi Mengenai Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (lanjutan)

30. Related Party Information (continued)

b. Gaji dan Tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

b. Salaries and Allowances of the Boards of Commissioners and Directors (continued)

Kisaran jumlah gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang pernah dan masih bertugas selama tahun-tahun adalah sebagai berikut:

Range of salaries and allowances of the members of the Boards of Commissioners and Directors in office at any time during the years were as follows:

Dolar AS (nilai penuh)	31 Desember/December 31, 2010					US\$ (full amount)
	0	\$1-\$100,000	\$100,001-\$200,000	\$200,001-\$300,000	\$300,001-\$800,000	
Dewan Komisaris: Anggota	8	4	–	–	–	Board of Commissioners: Member
Direksi: Anggota	–	–	1	–	5	Board of Directors: Member

Dolar AS (nilai penuh)	31 Desember/December 31, 2009					US\$ (full amount)
	0	\$1-\$100,000	\$100,001-\$200,000	\$200,001-\$300,000	\$300,001-\$800,000	
Dewan Komisaris: Anggota	9	5	–	–	–	Board of Commissioners: Member
Direksi: Anggota	–	1	–	–	5	Board of Directors: Member

Perseroan juga memberi opsi kepada karyawan kunci dan para direktur berkebangsaan Indonesia untuk membeli "setara saham" Perseroan dengan harga yang telah ditentukan terlebih dahulu. "setara saham" mempunyai nilai yang sama dengan saham Perseroan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Pengekskusi opsi biasanya dilakukan dengan pembayaran kas. Opsi yang dieksekusi dicatat sebagai biaya kompensasi karyawan. Opsi yang dieksekusi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah 2.937,5 ribu (2009: 289,9 ribu) setara saham. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 biaya kompensasi setara saham adalah AS\$8,4 juta (2009: AS\$10,2 juta).

The Company has also awarded key Indonesian employees and directors options to purchase "share equivalents" of the Company at a predetermined exercise price. A "share equivalent" has the same value as a common share of the Company traded on the Indonesia Stock Exchange. The exercise of such options is usually settled in cash. Options exercised are included in compensation expense. Options exercised for the year ended December 31, 2010 were 2,937.5 thousand (2009: 289.9 thousand) share equivalents. For the year ended December 31, 2010 share equivalent compensation cost was US\$8.4 million (2009: US\$10.2 million).

Pada tanggal 31 Desember 2010, terdapat opsi yang belum dilaksanakan untuk membeli 10.515.000 setara saham (2009: 13.452.500 setara saham) dengan harga yang ditentukan terlebih dahulu berkisar antara IDR156 sampai dengan IDR7.350 dalam nilai penuh (2009: antara IDR156 sampai dengan IDR7.350). Pada tanggal 31 Desember 2010, kewajiban Perseroan sehubungan dengan imbalan ini berjumlah AS\$2,6 juta (2009: AS\$1,97 juta).

As at December 31, 2010, there were outstanding options to purchase an aggregate of 10,515,000 share equivalents (2009: 13,452,500 share equivalents) with predetermined prices ranging from IDR156 to IDR7,350 in full amount (2009: from IDR156 to IDR7,350). As at December 31, 2010, the Company's obligation relating to this benefit was US\$2.6 million (2009: US\$1.97 million).

c. Beban Bantuan Manajemen dan Teknis

c. Management and Technical Assistance Fees

Bantuan manajemen dan teknis merupakan bantuan Vale Canada Limited untuk merealisasikan proyek-proyek Perseroan, mekanisme pembiayaannya, konstruksi dan operasi dari fasilitas Perseroan, dan pemasaran produk Perseroan.

Management and technical assistance represents Vale Canada Limited's assistance for realization of the Company's projects, its financing scheme, the construction and operation of the Company's facilities, and the marketing of the Company's products.

Imbalan untuk bantuan manajemen dan teknis digolongkan sebagai beban penjualan, umum dan administrasi di dalam Laporan Laba Rugi. Imbalan bantuan manajemen dan teknis dihitung dari nilai terendah antara 1,8% dari nilai penjualan bersih atau 4% dari laba kena pajak, tetapi dengan syarat jumlah terhutang per kuartal tidak kurang dari AS\$25.000 (nilai penuh).

Management and technical assistance fees are classified as selling, general and administration expenses in the Statements of Earnings. The management and technical assistance fee is calculated as the lower of 1.8% of net sales or 4% of net taxable income, provided that the amount payable for each quarter should not be less than US\$25,000 (full amount).

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US\$, in thousands)
Vale Canada Limited	22,974	9,013	Vale Canada Limited
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban penjualan, umum, dan administrasi)	83%	69%	(As a percentage of total selling, general and administration expenses)

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

30. Informasi Mengenai Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (lanjutan)

30. Related Party Information (continued)

d. Beban Lainnya

d. Other Fees

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US\$, in thousands)
Vale Europe Limited <sup>*)</sup>	74	48	Vale Europe Limited <sup>*)</sup>
(Sebagai persentase terhadap jumlah harga pokok penjualan)	0.01%	0.01%	(As a percentage of total cost of goods sold)

<sup>\*)</sup> Sebelumnya Vale Inco Europe Limited

<sup>\*)</sup> Formerly Vale Inco Europe Limited

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US\$, in thousands)
Vale Technology Development (Canada) Limited <sup>*)</sup>	3,898	1,883	Vale Technology Development (Canada) Limited <sup>*)</sup>
(Sebagai persentase terhadap jumlah (beban)/ pendapatan lainnya)	17%	20%	(As a percentage of total other (expense)/income)

<sup>\*)</sup> Sebelumnya Vale Inco Technical Services Limited

<sup>\*)</sup> Formerly Vale Inco Technical Services Limited

e. Aset

e. Assets

(i) Piutang Usaha

(i) Trade Receivables

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US\$, in thousands)
Vale Canada Limited	99,302	78,495	Vale Canada Limited
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	24,759	19,257	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Jumlah	124,061	97,752	Total
(Sebagai persentase terhadap piutang usaha)	100%	100%	(As a percentage of trade receivables)

(ii) Piutang lainnya

(ii) Other receivables

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US\$, in thousands)
Pinjaman kepada karyawan diatas IDR1 milyar*	760	1,251	Loans to personnel above IDR1 billion*
Pinjaman kepada karyawan dibawah IDR1 milyar	5,551	4,158	Loans to personnel below IDR1 billion
Dana Pensiun International Nickel Indonesia	3,772	2,127	Dana Pensiun International Nickel Indonesia
Jumlah	10,083	7,536	Total
(Sebagai persentase terhadap piutang lainnya)	93%	91%	(As a percentage of other receivables)

\* Karyawan yang mempunyai saldo pinjaman lebih dari IDR1 milyar per 31 Desember 2010 adalah Edi Permadi, Kuyung Andrawina, Valentinus Geta dan Andi Suntoro (2009: Ratih Amri, Harry Asmar, Mappaselle, Kuyung Andrawina, Jannus Siahaan, Edi Permadi, Valentinus Geta dan Andi Suntoro).

\* Employees with a loan balance of more than IDR1 billion at December 31, 2010 are Edi Permadi, Kuyung Andrawina, Valentinus Geta and Andi Suntoro (2009: Ratih Amri, Harry Asmar, Mappaselle, Kuyung Andrawina, Jannus Siahaan, Edi Permadi, Valentinus Geta and Andi Suntoro).

(iii) Aset lainnya

(iii) Other assets

31 Desember	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US\$, in thousands)
Pinjaman kepada karyawan – jangka panjang	12,821	12,171	Loans to personnel – long-term
Jumlah	12,821	12,171	Total
(Sebagai persentase terhadap aset lainnya)	100%	63%	(As a percentage of other assets)
Jumlah aset yang terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa	146,965	117,459	Total assets associated with related parties
(Sebagai persentase terhadap jumlah aset)	7%	6%	(As a percentage of total assets)

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

30. Informasi Mengenai Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (lanjutan)

30. Related Party Information (continued)

f. Hutang Usaha

f. Trade Payables

31 Desember	2010	2009	December 31
			(US\$, in thousands)
Vale Canada Limited	6,956	3,694	Vale Canada Limited
Vale Technology Development (Canada) Limited	1,372	489	Vale Technology Development (Canada) Limited
Vale Europe Limited	228	124	Vale Europe Limited
<b>Jumlah</b>	<b>8,556</b>	<b>4,307</b>	<b>Total</b>
(Sebagai persentase terhadap jumlah hutang usaha)	<b>21%</b>	13%	(As a percentage of total trade payables)

g. Kewajiban Lancar Lainnya

g. Other Current Liabilities

31 Desember	2010	2009	December 31
			(US\$, in thousands)
Penyisihan untuk opsi setara saham			Provision for share option equivalents
Diatas IDR1 milyar*	2,306	1,636	Above IDR1 billion*
Dibawah IDR1 milyar	252	335	Below IDR1 billion
<b>Jumlah</b>	<b>2,558</b>	<b>1,971</b>	<b>Total</b>
(Sebagai persentase terhadap kewajiban lancar lainnya)	<b>18%</b>	14%	(As a percentage of other current liabilities)

\* Opsi setara saham telah diberikan kepada beberapa karyawan kunci (lihat Catatan 30b). Pihak-pihak yang mempunyai saldo opsi setara saham dengan nilai pasar lebih dari IDR1 milyar per 31 Desember 2010 adalah Ciho D. Bangun (2009: Ciho D. Bangun).

\* Share option equivalents have been provided to certain key personnel (refer to Note 30b). The individual with a balance of share option equivalents with a market value of more than IDR1 billion at December 31, 2010 is Ciho D. Bangun (2009: Ciho D. Bangun).

h. Lainnya

Berkaitan dengan Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior (lihat Catatan 16), Perseroan dan Vale S.A., entitas pengendali utama dari Perseroan, melakukan perjanjian jaminan dimana Vale S.A. setuju untuk menjamin AS\$300 juta fasilitas hutang yang diterima Perseroan. Biaya jaminan sebesar 1,5% per tahun dari setiap jumlah pinjaman yang diambil oleh Perseroan dari Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior akan terhutang kepada Vale S.A. pada setiap tanggal pembayaran bunga (tanggal pembayaran bunga pertama akan dimulai pada hari kerja terakhir di bulan Pebruari 2010, dan selanjutnya pada setiap hari kerja terakhir bulan Agustus dan Pebruari).

h. Other

In connection with the SEFA (refer to Note 16), the Company and Vale S.A., the ultimate parent entity of the Company, entered into a loan guarantee agreement whereby Vale S.A. has agreed to guarantee a US\$300 million debt facility obtained by the Company. A guarantee fee of 1.5% per annum on each loan drawdown made by the Company under the SEFA is payable to Vale S.A. by the Company on each interest payment date (the first interest payment date was the last business day in February 2010, and thereafter, the last business day of each August and February).

31 Desember	2010	2009	December 31
			(US\$, in thousands)
Biaya garansi yang masih harus dibayar	725	—	Accrued guarantee fee
(Sebagai persentase terhadap jumlah biaya yang masih harus dibayar)	<b>2%</b>	—	(As a percentage of total accrued expenses)
<b>Jumlah kewajiban yang terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa</b>	<b>11,839</b>	<b>6,278</b>	<b>Total liabilities associated with related parties</b>
(Sebagai persentase terhadap jumlah kewajiban)	<b>2%</b>	1%	(As a percentage of total liabilities)

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

30. Informasi Mengenai Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (lanjutan)

30. Related Party Information (continued)

i. Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

i. Related Parties

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa/ <i>Nature of relationship with the related parties</i>	Transaksi/ <i>Transaction</i>
Vale S.A.	Entitas pengendali utama/ <i>Ultimate parent entity</i>	Penjamin dari pinjaman Perseroan dengan kompensasi biaya jaminan/ <i>Guarantee of loans to the Company in return for guarantee fee</i>
Vale Canada Limited	Perusahaan induk/ <i>Parent entity</i>	Penjualan barang jadi; Jasa profesional; Jasa manajemen dan teknis/ <i>Sale of finished goods; Professional services; Management and technical services</i>
Vale Europe Limited	Perusahaan Afiliasi/ <i>Affiliated Company</i>	Tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan/ <i>Reimbursement of expenses</i>
Vale Japan Limited	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan/ <i>Reimbursement of expenses</i>
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penjualan barang jadi/ <i>Sale of finished goods</i>
Vale Technology Development (Canada) Limited	Perusahaan Afiliasi/ <i>Affiliated Company</i>	Jasa teknis/ <i>Technical services</i>
Inco Australia Management Pty Ltd.	Perusahaan Afiliasi/ <i>Affiliated Company</i>	Tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan/ <i>Reimbursement of expenses</i>
Dana Pensiun International Nickel Indonesia	Dana pensiun pemberi kerja untuk karyawan Perseroan/ <i>Trustee administered pension fund for Company employees</i>	Pendanaan program pensiun/ <i>Funding of pension plan</i>
Manajemen kunci/ <i>Key Management</i>	Karyawan kunci dari Perseroan/ <i>Key employees of the Company</i>	Pinjaman rumah dan pinjaman pribadi; Opsi setara saham/ <i>Housing and personal loans; Share option equivalents</i>

Kebijakan Perseroan terkait penetapan harga untuk transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

The Company's pricing policy related to the transactions with related parties are as follows:

- Penjualan barang jadi:  
Berdasarkan kontrak-kontrak penjualan "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS dengan penentuan harga jual berdasarkan harga tunai nikel di Pasar Bursa Logam London ("*the London Metal Exchange*") dan harga realisasi rata-rata nikel Vale Canada Limited (lihat Catatan 30a).
- Beban bantuan manajemen dan teknis:  
Dihitung dari nilai terendah antara 1,8% dari nilai penjualan bersih atau 4% dari laba kena pajak, dengan syarat jumlah terutang per kuartal tidak kurang dari AS\$25.000 (nilai penuh). Ini didasarkan pada perjanjian beban manajemen dan teknis antara Perseroan dan Vale Canada Limited (lihat Catatan 30c).
- Sale of finished goods:  
Based on long-term, "must take" US Dollar denominated sales contracts, with price determined based on the London Metal Exchange cash price for nickel and Vale Canada Limited's average net realized price for nickel (refer to Note 30a).
- Management and technical assistance fee:  
Calculated as the lower of 1.8% of net sales or 4% of net taxable income, provided that the amount payable for each quarter should not be less than US\$25,000 (full amount). This is based on a management and technical assistance fee agreement between the Company and Vale Canada Limited (refer to Note 30c).

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

30. Informasi Mengenai Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (lanjutan)

i. Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (lanjutan)

- Jasa teknis, tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan ditagih pada harga perolehan.
- Biaya jaminan terhadap pinjaman jangka panjang sebesar AS\$300 juta dihitung dari 1,5% dari setiap hutang yang diambil oleh Perseroan berdasarkan perjanjian jaminan pinjaman antara Perseroan dan Vale S.A.

31. Aset dan Kewajiban Moneter Dalam Mata Uang Selain Dolar AS

Aset dan kewajiban moneter dalam mata uang Rupiah pada 31 Desember 2010 telah dikonversikan ke dalam mata uang Dolar AS dengan menggunakan kurs AS\$1 = IDR9.000.

Hingga 4 Maret 2011 kurs bergerak dari AS\$1 = IDR9.000 menjadi AS\$1 = IDR8.809. Ada kemungkinan bahwa Rupiah akan makin berfluktuasi di masa yang akan datang, dan mungkin akan terdepresiasi atau terapresiasi secara signifikan.

Apabila aset dan kewajiban dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2010 dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal 4 Maret 2011, maka aset bersih dalam mata uang asing Perseroan akan naik sebesar AS\$1,3 juta.

30. Related Party Information (continued)

i. Related Parties (continued)

- Technical assistance and reimbursement of expenses and expenditures on the Company's behalf are charged at cost.
- Guarantee fee on US\$300 million long-term borrowings is 1.5% of each loan drawdown by the Company based on a loan guarantee agreement between the Company and Vale S.A.

31. Monetary Assets and Liabilities Denominated in Currencies Other Than US Dollars

At December 31, 2010 monetary assets and liabilities denominated in Rupiah have been translated into US\$ using an exchange rate of US\$1 = IDR9,000.

As of March, 4 2011 the exchange rate has moved from US\$1 = IDR9,000 to US\$1 = IDR8,809. It is possible that the Indonesian Rupiah may become more volatile in the future, and may depreciate or appreciate significantly.

If assets and liabilities in foreign currency as at December 31, 2010 are translated using the exchange rate at March 4, 2011, the total net foreign currency assets of the Company will increase by approximately US\$1.3 million.

31 Desember	2010		December 31
	Mata Uang asing (Jutaan/ Foreign currencies (Millions)	Dolar AS Ekuivalen (Ribuan/ US\$ Equivalent (Thousands)	
<b>Aset</b>			<b>Assets</b>
Kas dan Setara Kas	IDR 19,964	2,218	Cash and Cash Equivalents
Piutang Lainnya	IDR 56,452	6,272	Other Receivables
Piutang Pajak	IDR 574,719	63,858	Taxes Receivable
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	IDR 2,166	241	Prepaid Expenses and Advances
Aset Lainnya	IDR 115,392	12,821	Other Assets
<b>Jumlah Aset Moneter Dalam Mata Uang Asing</b>		<b>85,410</b>	<b>Total Foreign Currency Monetary Assets</b>
<b>Kewajiban</b>			<b>Liabilities</b>
Hutang Usaha			Trade Payables
Pihak Ketiga	CAD (0.171)	(172)	Third Parties
	AUD (0.263)	(268)	
	EUR (0.138)	(184)	
	GBP (0.104)	(162)	
	YEN (1.585)	(19)	
	NOK (2.362)	(405)	
	SGD (0.532)	(414)	
	RPS (20,947)	(2,327)	
Pihak yang mempunyai hubungan Istimewa	CAD (1.370)	(1,372)	Related parties
Hutang Pajak	IDR (48,293)	(5,366)	Taxes Payable
Kewajiban Lancar Lainnya	IDR (120,076)	(13,342)	Other Current Liabilities
<b>Jumlah Kewajiban Moneter Dalam Mata Uang Asing</b>		<b>(24,031)</b>	<b>Total Foreign Currency Monetary Liabilities</b>
<b>Aset Moneter Bersih Dalam Mata Uang Asing</b>		<b>61,379</b>	<b>Net Foreign Currency Monetary Assets</b>

Perseroan tidak melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar, karena seluruh penjualan dan sebagian besar biaya Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar AS, sehingga secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami (lihat Catatan 33).

The Company does not hedge the risk of fluctuation in the exchange rate of Rupiah since all sales and most of the Company's expenses are carried out in US Dollars which indirectly represents a natural hedge (refer to Note 33).

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

32. Informasi Segmen

Perseroan beroperasi hanya dalam satu segmen usaha dan geografis, yaitu penambangan dan pengolahan nikel di Indonesia. Seluruh produk Perseroan dijual berdasarkan kontrak penjualan jangka panjang.

32. Segment Information

The Company operates in only one business and geographical segment: nickel mining and processing in Indonesia. All of the Company's products are delivered under long-term sales contracts.

33. Aset dan Kewajiban Keuangan

Informasi di bawah ini berkaitan dengan aset dan kewajiban keuangan berdasarkan kategori akun:

33. Financial Assets and Liabilities

The information given below relates to the Company's financial assets and liabilities by category:

31 Desember 2010	Jumlah/ Total	Pinjaman dan piutang/ Loans and receivables	Nilai wajar diakui pada laba-rugi/ Fair value through profit or loss	Aset keuangan lainnya/ Other financial assets	December 31, 2010
(Dalam ribuan Dolar AS) (US\$, in thousands)					
Aset keuangan:					Financial assets:
Kas dan setara kas	404,129	-	-	404,129	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	124,061	124,061	-	-	Trade receivables
Piutang lainnya	10,893	10,893	-	-	Other receivables
Aset lainnya – pinjaman kepada Karyawan – jangka panjang	12,821	-	-	12,821	Other assets – loans to personnel – long-term
<b>Total aset keuangan</b>	<b>551,904</b>	<b>134,954</b>	<b>-</b>	<b>416,950</b>	<b>Total financial assets</b>

31 Desember 2009	Jumlah/ Total	Pinjaman dan piutang/ Loans and receivables	Nilai wajar diakui pada laba-rugi/ Fair value through profit or loss	Aset keuangan lainnya/ Other financial assets	December 31, 2009
(Dalam ribuan Dolar AS) (US\$, in thousands)					
Aset keuangan:					Financial assets:
Kas dan setara kas	261,050	-	-	261,050	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	97,752	97,752	-	-	Trade receivables
Piutang lainnya	8,310	8,310	-	-	Other receivables
Aset lainnya – pinjaman kepada Karyawan – jangka panjang	12,171	-	-	12,171	Other assets – loans to personnel – long-term
<b>Total aset keuangan</b>	<b>379,283</b>	<b>106,062</b>	<b>-</b>	<b>273,221</b>	<b>Total financial assets</b>

31 Desember 2010	Jumlah/ Total	Pinjaman dan piutang/ Loans and receivables	Nilai wajar diakui pada laba-rugi/ Fair value through profit or loss	Kewajiban keuangan lainnya/ Other financial liabilities	December 31, 2010
(Dalam ribuan Dolar AS) (US\$, in thousands)					
Kewajiban keuangan:					Financial liabilities:
Hutang usaha	(41,420)	(41,420)	(41,420)	-	Trade payables
Biaya yang masih harus dibayar	(43,069)	(43,069)	(43,069)	-	Accrued expenses
Kewajiban lancar lainnya	(24,192)	(24,192)	(24,192)	-	Other current liabilities
Pinjaman	(140,561)	(140,561)	(140,561)	-	Long-term borrowings
<b>Total kewajiban keuangan</b>	<b>(249,242)</b>	<b>(249,242)</b>	<b>(249,242)</b>	<b>-</b>	<b>Total financial liabilities</b>

31 Desember 2009	Jumlah/ Total	Pinjaman dan piutang/ Loans and receivables	Nilai wajar diakui pada laba-rugi/ Fair value through profit or loss	Kewajiban keuangan lainnya/ Other financial liabilities	December 31, 2009
(Dalam ribuan Dolar AS) (US\$, in thousands)					
Kewajiban keuangan:					Financial liabilities:
Hutang usaha	(32,904)	(32,904)	(32,904)	-	Trade payables
Biaya yang masih harus dibayar	(29,969)	(29,969)	(29,969)	-	Accrued expenses
Kewajiban lancar lainnya	(13,669)	(13,669)	(13,669)	-	Other current liabilities
Pinjaman	(139,556)	(139,556)	(139,556)	-	Long-term borrowings
<b>Total kewajiban keuangan</b>	<b>(216,098)</b>	<b>(216,098)</b>	<b>(216,098)</b>	<b>-</b>	<b>Total financial liabilities</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

### 33. Aset dan Kewajiban Keuangan (lanjutan)

### 33. Financial Assets and Liabilities (continued)

#### Pengelolaan risiko keuangan

#### Financial risk management

Aktivitas Perseroan terpengaruh oleh berbagai jenis risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara umum, program pengelolaan risiko keuangan Perseroan berfokus kepada ketidaktastian pasar keuangan dan berusaha meminimalkan efek tidak wajar terhadap kinerja keuangan Perseroan.

The Company's activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company's overall financial risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the financial performance of the Company.

Pengelolaan risiko dilakukan oleh Dewan Direksi Perseroan. Dewan Direksi mengidentifikasi, mengevaluasi dan melakukan lindung nilai atas risiko keuangan, sesuai keperluan. Dewan Direksi menyediakan prinsip-prinsip keseluruhan untuk pengelolaan risiko, termasuk risiko pasar, kredit dan likuiditas.

Risk management is carried out by the Company's Board of Directors. The Board identifies, evaluates and hedges financial risks, where considered appropriate. The Board of Directors provides principles for overall risk management, including market, credit and liquidity risks.

#### Risiko pasar

#### Market risk

##### i) Risiko nilai tukar

##### i) Foreign exchange risk

Penjualan, pendanaan dan mayoritas pengeluaran operasional Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar AS, sehingga Perseroan tidak terekspos secara signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar.

The Company's sales, financing and the majority of its operating expenditures are denominated in US Dollars, and as such the Company does not have a significant exposure to fluctuations in foreign exchange rates.

Manajemen berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah/Dolar AS tidak berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Management is of the opinion that volatility in the Rupiah/US\$ exchange rate is not likely to have a significant impact on the Company.

##### ii) Risiko harga

##### ii) Price risk

Perseroan terpengaruh oleh fluktuasi dalam harga nikel dan bahan bakar. Operasi dan kinerja keuangan dapat terpengaruh negatif dari harga nikel, dimana akan ditentukan lebih lanjut oleh permintaan dan penawaran nikel dunia, harga minyak dan faktor lainnya seperti curah hujan yang cukup untuk menjamin keberlanjutan operasi PLTA. Perseroan mengelola secara aktif risiko-risiko ini dan melakukan penyesuaian seperlunya atas jadwal dan operasi pertambangan untuk mengurangi dampak fluktuasi.

The Company is exposed to fluctuations in nickel and fuel prices. The Company's operations and financial performance may be adversely affected by the price of nickel, which in turn will be determined by worldwide nickel supply and demand, oil price and other factors such as sufficient rainfall to maintain hydroelectric operations. The Company actively manages these risks and adjusts production schedules and mining operations as necessary to reduce the impact of volatility.

##### iii) Risiko suku bunga

##### iii) Interest rate risk

Paparan suku bunga dimonitor untuk meminimalkan akibat negatifnya terhadap Perseroan. Pinjaman yang diterima pada suku bunga variabel membuat arus kas Perseroan terpengaruh oleh risiko suku bunga.

Interest rate exposure is monitored to minimize any negative impact to the Company. Borrowings issued at variable rates expose the Company to cash flow interest rate risk.

Tabel berikut menyajikan aset dan kewajiban keuangan Perseroan yang terpengaruh oleh suku bunga.

The following table presents a breakdown of the Company's financial assets and financial liabilities which are impacted by interest rates.

	31 Desember/December 31, 2010						Total
	Suku bunga mengambang/ <i>Floating rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed rate</i>		Tidak terikat bunga/ <i>Non interest bearing</i>		
	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>			
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US\$, in thousands)
<b>Aset</b>							<b>Assets</b>
Kas dan setara kas	5,997	-	-	-	-	5,997	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	-	-	398,132	-	-	398,132	Time deposits
<b>Total aset keuangan</b>	<b>5,997</b>	<b>-</b>	<b>398,132</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>404,129</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>Kewajiban</b>							<b>Liabilities</b>
Pinjaman jangka panjang	-	140,561	-	-	-	140,561	Long-term borrowings
<b>Total kewajiban keuangan</b>	<b>-</b>	<b>140,561</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140,561</b>	<b>Total financial liabilities</b>

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

### 33. Aset dan Kewajiban Keuangan (lanjutan)

#### Risiko kredit

Risiko kredit cukup rendah karena produk nikel dalam *matte* Perseroan, yang merupakan produk setengah jadi, dijual di pasar ekspor menggunakan kontrak "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS dengan Vale Canada Limited (induk perusahaan) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. yang merupakan salah satu pemegang saham mayoritas Perseroan.

#### Risiko likuiditas

Risiko likuiditas muncul dalam situasi dimana Perseroan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Pengelolaan risiko likuiditas dengan kehati-hatian mengimplikasikan pemeliharaan kecukupan kas dan setara kas. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan melakukan pengawasan berkala atas arus kas yang direncanakan dan arus kas aktual dan memasangkan profil jatuh tempo dari aset dan kewajiban keuangan.

#### Nilai wajar

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan kewajiban keuangan mendekati nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2010.

### 34. Aset dan Kewajiban Kontinjensi

#### a. Proyek Bendungan Karebbe

Pada tahun 2005 Perseroan mendapat informasi bahwa sebagian dari wilayah yang akan digunakan untuk pembangunan proyek bendungan Karebbe (sebagai bagian dari rencana ekspansi Perseroan), berada dalam kawasan hutan. Total proyek Karebbe mencakup wilayah seluas 265 hektar, dimana 70 hektar diantaranya berada di dalam wilayah Kontrak Karya sementara 195 hektar berada di luar wilayah Kontrak Karya. Dari wilayah yang berada di luar area Kontrak Karya ini, 16 hektar diantaranya berada di kawasan hutan lindung, sementara sisanya berada di kawasan hutan produksi terbatas. Sehingga, untuk menggunakan area tersebut, Perseroan harus mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan.

Persetujuan prinsip untuk menggunakan area tersebut telah diperoleh pada bulan Oktober 2005. Sebagai bagian dari persyaratannya, Perseroan diharuskan untuk menyediakan lahan kompensasi sebesar dua kali dari 195 hektar kawasan hutan yang digunakan kepada Kementerian Kehutanan. Peraturan Kehutanan yang mendasari diterbitkannya persetujuan prinsip dikeluarkan pada tahun 1994, sebagaimana diubah terakhir pada tahun 1998 ("Peraturan Kehutanan 1994").

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

### 33. Financial Assets and Liabilities (continued)

#### Credit risk

Credit risk is minimal due to the Company's nickel in *matte*, an intermediate product, is sold in export markets pursuant to long-term, US Dollar denominated "must take" contracts with Vale Canada Limited (parent company) and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. one of the Company's major shareholders.

#### Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

#### Fair value

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

Management is of the opinion that the carrying value of its financial assets and liabilities approximated the fair value of the financial assets and liabilities as at 31 December 2010.

### 34. Contingent Assets and Liabilities

#### a. Karebbe Dam Project

The Company became aware during 2005 that part of the area to be developed for the Karebbe Dam project (which is part of the Company's planned expansion), falls within a forest area. The total Karebbe project covers 265 hectares of which 70 hectares fall inside of the Contract of Work ("CoW") area and 195 hectares outside of the CoW area. Of the area outside the CoW, 16 hectares are within a protected forest area and the remainder is located in limited production forest. As a result, the Company was required to obtain approval from the Ministry of Forestry for use of the land.

An approval in-principle for the use of land was received in October 2005. As part of the conditions, the Company is required to provide to the Ministry of Forestry compensation land covering an area of two times the 195 hectares of the affected forest area. The underlying Forestry Regulation for the approval in-principle was issued in 1994, and most recently changed in 1998 (the "1994 Forestry Regulation").

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

#### 34. Aset dan Kewajiban Kontinjensi (lanjutan)

#### 34. Contingent Assets and Liabilities (continued)

##### a. Proyek Bendungan Kerebbe (lanjutan)

##### a. Kerebbe Dam Project (continued)

Pada 10 Maret 2006, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri No. P.14/Menhut-II/2006 ("Peraturan Kehutanan 2006") mengenai Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang mengatur izin penggunaan hutan untuk aktivitas non-kehutanan. Peraturan Kehutanan 2006 ini mencabut Peraturan Kehutanan 1994 secara keseluruhan. Berdasarkan Peraturan Kehutanan 2006 tersebut, suatu perusahaan dapat diberikan izin kehutanan untuk menggunakan kawasan hutan untuk aktivitas non-kehutanan (misal kegiatan komersial) dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan, untuk jangka waktu lima tahun (yang dapat diperpanjang). Sebagaimana juga dipersyaratkan dalam Peraturan Kehutanan 1994 (dan persetujuan prinsip kepada Perseroan), salah satu prasyarat penting yang ditentukan dalam Peraturan 2006 tersebut adalah menyediakan kawasan non-hutan sebesar dua kali luas kawasan hutan yang digunakan ("lahan kompensasi"). Terdapat juga persyaratan teknis berkaitan dengan lahan kompensasi, yaitu statusnya harus "*clean and clear*", letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan, terletak dalam sub-daerah aliran sungai (atau daerah aliran sungai) yang sama dengan kawasan hutan yang digunakan dan dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional. Kemudian, lahan kompensasi tersebut harus dijadikan hutan. Untuk meyakinkan status "*clean and clear*", lahan kompensasi harus mempunyai suatu hak kepemilikan atas tanah. Atau, sebagai alternatif, jika dalam dua tahun Perseroan tidak dapat menyediakan lahan kompensasi yang disyaratkan, Perseroan harus membayar penerimaan negara bukan pajak secara tahunan kepada Kementerian Kehutanan. Formula penerimaan Negara bukan pajak dimaksud dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 2/2008, seperti diuraikan dalam Catatan 34b.

On March 10, 2006, the Ministry of Forestry issued a Ministerial Regulation No. P.14/Menhut-II/2006 (the "2006 Forestry Regulation") regarding Guidelines for Lend-Use of Forest Areas describing the permit to use forests for non-forestry activities. This 2006 Forestry Regulation superseded the 1994 Forestry Regulation in its entirety. Pursuant to the 2006 Forestry Regulation, a company may be given a forestry permit to use a forest area for non-forestry activities (e.g. commercial activities), subject to a number of pre-conditions, for a period of five years (extendable). As also required by the 1994 Forestry Regulation (and the Company's approval in-principle), one of the most significant preconditions under the 2006 Forestry Regulation is to provide non-forest land in the size of two times the forest area to be used ("compensation land"). There are also technical requirements for the compensation land, i.e. the status should be "clean and clear", it should be adjacent to a forest area, it should be in the same sub-watershed (or watershed) as the forest area being used and it can be reforested by conventional means. The compensation land must then be reforested. To ensure that the status is "clean and clear", compensation land should be covered by a land title. Alternatively, if within two years the Company cannot provide the required compensation land, the company must pay on an annual basis non-tax state revenue to the Ministry of Forestry. The formula of the non-tax state revenue is provided in Government Regulation No.2/2008, as explained in Note 34b.

Pada 28 Juli 2006, Perseroan menerima Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.410/Menhut-II/2006 yang memberikan izin sementara (atau dispensasi) kepada Perseroan untuk memulai pembangunan di kawasan hutan seluas 195 hektar meskipun Perseroan belum dapat menyediakan lahan kompensasi. Izin sementara tersebut berlaku maksimum sampai tanggal 28 Juli 2007 dan dapat diperpanjang untuk periode yang berakhir tanggal 20 Oktober 2007 (tanggal berakhirnya persetujuan prinsip).

On July 28, 2006, the Company received a Decision Letter from the Ministry of Forestry No. SK 410/Menhut-II/2006, which granted the Company an interim permit (or dispensation) to start the project in the forest area of 195 hectares, although the Company was not yet able to provide the compensation land. The interim permit was valid until July 28, 2007 and extendable for a maximum period and ended on October 20, 2007 (the expiration date of the approval in-principle).

Pada 5 Januari 2007, Perseroan menyampaikan permohonan resmi kepada Menteri Kehutanan untuk memperoleh izin pinjam pakai final. Pada akhir Agustus 2007, Perseroan telah memperoleh izin final dari Menteri Kehutanan yang memberikan hak kepada Perseroan untuk menggunakan kawasan hutan yang letaknya berbatasan langsung dengan wilayah konsesi Kontrak Karya Perseroan. Pada tanggal 28 September 2007, Dewan Komisaris Perseroan menyetujui dimulainya kembali pembangunan proyek PLTA Kerebbe.

On January 5, 2007, the Company submitted to the Minister of Forestry an official request for a final lend-use permit. In late August 2007, the Company obtained a final permit from the Minister of Forestry, which provided the Company with the right to use the forest area adjacent to the Company's CoW concession area. On September 28, 2007, the Board of Commissioners of the Company approved the resumption of construction at the Kerebbe hydroelectric project.

##### b. Peraturan Pemerintah No. 2/2008

##### b. Government Regulation No. 2/2008

Pada tanggal 4 Februari 2008, Peraturan Pemerintah No 2/2008 ("PP No. 2/2008") mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dikeluarkan. Penerimaan negara bukan pajak tersebut dihitung berdasarkan suatu formula tertentu atas tarif-tetap tergantung pada maksud, rencana, penggunaan dan jenis kawasan hutan yang digunakan dikalikan dengan luasnya kawasan hutan yang digunakan. Tarif tersebut berkisar antara IDR1,2 sampai IDR3 juta per hektar per tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 yang mewajibkan 13 izin atau perjanjian pertambangan perusahaan tambang (termasuk Perseroan) untuk mengajukan izin pinjam pakai, maka Perseroan akan mengajukan permohonan izin pinjam pakai bagi kawasan hutan di dalam wilayah Kontrak Karya Perseroan, tetapi dengan penegasan bahwa hak-hak Perseroan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Karya Perseroan tidak diabaikan. Ketentuan dalam Kontrak Karya telah memberikan Perseroan semua lisensi dan izin yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan perusahaannya serta kewenangan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas pertambangan di dalam area yang tercakup dalam Kontrak Karya.

On February 4, 2008 Government Regulation No. 2/2008 ("GR No. 2/2008") regarding the type and tariff of non-tax state revenue from the use of forestry land for non-forestry development was issued. The non-tax state revenue is calculated based on a specific formula of fixed tariff depending on the purpose of the proposed use and type of forest area being used, multiplied by the size of forest area being used. The tariffs range from IDR1.2 to IDR3 million per hectare per annum. Based on Regulation of the Minister of Forestry No. P.43/Menhut-II/2008 dated July 10, 2008 which requires 13 permits or contracts mining companies (including the Company) to apply for a lend-use permit, the Company will apply for a lend-use permit for forest areas within its CoW area, but with strong reservation that its rights as provided in the CoW are not abrogated. The terms of the CoW provide the Company with all licenses and permits to construct and operate the enterprise as well as all authorization needed to conduct mining activities in the areas covered by the CoW.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

**34. Aset dan Kewajiban Kontinjensi (lanjutan)**

**34. Contingent Assets and Liabilities (continued)**

**b. Peraturan Pemerintah No. 2/2008 (lanjutan)**

**b. Government Regulation No. 2/2008 (continued)**

Perseroan belum menerima izin pinjam-pakai kawasan hutan di wilayah Kontrak Karya Perseroan kecuali untuk kawasan hutan untuk proyek Karebbe, untuk dimana Perseroan telah membayar pendapatan negara bukan pajak untuk kawasan hutan Karebbe yang terganggu pada tanggal 29 Desember 2009. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.02/2009 pendapatan negara bukan pajak terhutang berdasarkan area yang tercantum dalam izin pinjam-pakai tersebut. Oleh karena itu sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Perseroan belum mengakui kewajiban untuk pendapatan negara bukan pajak yang diatur dalam PP No. 2/2008 untuk area selain Karebbe dikarenakan izin pinjam pakai untuk area tersebut belum dikeluarkan.

The Company has not yet received the lend-use permit for the forest areas within the Company's CoW area except for the forestry areas for the Karebbe project, for which the Company has paid non-tax state revenue for the disturbed forest area in December 29, 2009. Based on Minister of Finance regulation No. 91/PMK.02/2009 the non-tax state revenue is payable for areas covered by a valid lend-use permit. Therefore, as of the date of these financial statements, no accrual has been made for the non-tax state revenue regulated by GR No. 2/2008 for areas other than Karebbe, as lend-use permits have not been issued.

Per tanggal 31 Desember 2010, tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan terkait dengan pendapatan bukan pajak yang diatur dalam PP no.2/2008 untuk area – area lain selain Karebbe, dikarenakan ijin penggunaan belum diterbitkan. Berdasarkan hasil analisa Perseroan meyakini bahwa hutang iuran tahunan untuk area yang ijin penggunaannya belum diterbitkan sekitar AS\$2 juta per tahun. Hal ini konsisten dengan perlakuan yang diterapkan pada kebanyakan perusahaan tambang yang ada di Indonesia.

As such, as at December 31, 2010, no other payment has been made by the Company for the non-tax state revenue regulated by GR No. 2/2008 for areas other than Karebbe, as lend-use permits have not been issued. Based on its analysis the Company believes the annual fee payable for other areas for which lend-use permits have not yet been issued would be approximately US\$2 million per annum. This is consistent with the treatment being adopted by most mining companies in Indonesia.

Pada tanggal 1 Februari 2010, Peraturan Pemerintah No 24/2010 terkait dengan penggunaan area kehutanan diterbitkan. Peraturan tersebut mengatur penggunaan area kehutanan harus dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai, baik untuk tujuan komersial maupun non komersial. Untuk penggunaan kawasan dimana luas kawasan hutan adalah 30% atau kurang, pemegang izin pinjam pakai hanya diharuskan untuk menyediakan kompensasi lahan dengan rasio 1:1 untuk tujuan non komersial dan 1:2 untuk tujuan komersial. Untuk penggunaan kawasan dimana luas kawasan hutannya adalah lebih dari 30%, pemegang izin pinjam pakai diharuskan membayar pendapatan bukan pajak dan melakukan rehabilitasi untuk area yang terganggu dengan rasio 1:1 untuk tujuan non komersial dan sedikitnya 1:1 untuk tujuan komersial. Sebagai tambahan, pemegang izin pinjam pakai dapat melakukan aktivitas pembukaan lahan namun harus membayar kompensasi dalam bentuk iuran tetap, penyisihan untuk sumber daya alam mineral dan /atau dana rehabilitasi. Namun, peraturan menteri dan peraturan pelaksanaan yang mengatur secara rinci kompensasi tanah dan prosedur rehabilitasi belum diterbitkan sampai dengan tanggal laporan ini dan oleh karena itu tidak ada penyisihan yang dibuat oleh Perseroan untuk keperluan rehabilitasi pada tanggal 31 Desember 2010. Perseroan secara intensif memonitor perkembangan dari peraturan tersebut dan akan menilai lebih lanjut dampaknya pada Perseroan pada saat peraturan pelaksanaan dan peraturan menteri tersebut diterbitkan.

On February 1, 2010, Government Regulation No 24/2010 regarding the use of forestry areas was issued. The regulation requires that the use of forestry areas must be based on the lend-use permit whether it is for commercial or non-commercial usage. For the use of an area with 30% or less area covered by forest, the holder of a lend-use permit is only required to provide land compensation in a ratio of 1:1 for non-commercial use and 1:2 for commercial use. For the use of an area with more than 30% area covered by forest, the holder of a lend-use permit is required to pay non-tax state revenue and perform rehabilitation of the disturbed area in a ratio of 1:1 for non-commercial use and at least 1:1 for commercial use. In addition, the holder of a lend-use permit may perform deforestation activities but must pay compensation in the form of a fixed fee, provision for mineral resources and/or rehabilitation funds. However, the ministerial regulation and implementing regulation which regulate the detailed land compensation and rehabilitation procedures mentioned above have not yet been issued up to the date of this report and therefore no provision has been made by the Company for the rehabilitation requirement as at December 31, 2010. The Company is closely monitoring the development of the regulation and will further assess the impact once the implementing regulation and ministerial regulation are issued.

**c. Reklamasi Tambang dan Penutupan Tambang**

**c. Mine Reclamation and Mine Closure**

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-undang Mineral No. 4/2009, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78/2010 ("PP No. 78") yang mengatur aktivitas reklamasi dan pascatambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi. Peraturan ini memperbaharui Peraturan Menteri No. 18/2008 yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral pada tanggal 29 Mei 2008.

On December 20, 2010, the Government of Indonesia released an implementing regulation for Mining Law No. 4/2009, i.e. Government Regulation No. 78/2010 ("GR No. 78") that deals with reclamation and post-mining activities for both IUP-Exploration and IUP-Production Operation holders. This regulation updates Ministerial Regulation No. 18/2008 issued by the Minister of Energy and Mineral Resources on May 29, 2008.

Pemegang IUP-Eksplorasi dipersyaratkan antara lain, harus memuat rencana eksplorasi didalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

An IUP-Exploration holder, among other requirements, must include a reclamation plan in its exploration work plan and budget and provide a reclamation guarantee in the form of a time deposit placed at a state-owned bank.

Pemegang IUP-Operasi Produksi dipersyaratkan antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima-tahunan; (2) rencana pascatambang; (3) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi (jika disetujui), dan (4) menyediakan jaminan pascatambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

An IUP-Production Operation holder, among other requirements, must prepare (1) a five-year reclamation plan; (2) a post-mining plan; (3) provide a reclamation guarantee which may be in the form of a joint account or time deposit placed at a state-owned bank, a bank guarantee, or an accounting provision (if eligible); and (4) provide a post-mine guarantee in the form of a time deposit at a state-owned bank.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

#### 34. Aset dan Kewajiban Kontinjensi (lanjutan)

##### c. Reklamasi Tambang dan Penutupan Tambang (lanjutan)

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pascatambang.

Ketentuan peralihan didalam PP No. 78 menegaskan bahwa para pemegang Kontrak Karya juga wajib mematuhi peraturan ini.

Penempatan (deposito) tersebut tidak tercermin atau disyaratkan di dalam Perjanjian Perpanjangan yang ditandatangani pada tahun 1996. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan telah atau akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- untuk reklamasi tambang, Perseroan telah membuat cadangan akuntansi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM") melalui surat tertanggal 17 September 2008, No. 2082/87/DJB/2008, telah menerima pembentukan cadangan akuntansi tersebut.
- untuk penutupan tambang, Perseroan berencana untuk memperoleh persetujuan KESDM untuk cadangan akuntansi. Sehubungan dengan Peraturan Menteri No 18/2008, Perseroan melalui Asosiasi Pertambangan Indonesia, telah mengkomunikasikan hal yang dimaksudkan kepada KESDM, dan Kementerian memberitahukan bahwa keputusan lebih lanjut akan dikeluarkan setelah peraturan pelaksanaan atas peraturan dimaksud diumumkan. Pada tanggal 13 Oktober 2009, KESDM telah menetapkan bahwa Perseroan harus membentuk deposito untuk provisi penutupan tambang. Sebagai tindak lanjut atas konfirmasi dari KESDM diatas, Perseroan telah melakukan beberapa korespondensi, yang terakhir 18 Februari 2010 tentang penyampaian revisi rencana penutupan tambang berdasarkan usulan perubahan atas hasil evaluasi oleh KESDM. Perseroan saat ini sedang menunggu persetujuan dari KESDM termasuk petunjuk rinci mengenai, antara lain, jumlah deposito yang harus disetorkan, rincian rekening bank pemerintah yang akan dipakai dan kapan deposito tersebut harus dibentuk.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan ada dampak yang materiil pada provisi untuk rehabilitasi atau penutupan tambang sebagai akibat dari perubahan terhadap rencana penambangan. Lebih lanjut, ketentuan untuk menciptakan deposito berjangka tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap sumber kas atau posisi keuangan Perseroan.

##### d. Kesanggupan Kontrak Karya

Pada 3 Pebruari 2003, Pemerintah Indonesia mengindikasikan bahwa kesanggupan Perseroan untuk membangun pabrik pengolahan di Pomalaa sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Perpanjangan dianggap telah terpenuhi sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama Sumberdaya dengan PT Antam (Persero) Tbk. Dimana setelahnya Perseroan diharuskan untuk melaporkan kepada Pemerintah Indonesia evaluasi keekonomian dan kelayakan teknis pembangunan pabrik pengolahan tersebut. Dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama Sumberdaya, Perseroan diwajibkan untuk menyerahkan laporan tersebut.

Berdasarkan surat Pebruari 2003 tersebut, Perseroan mempunyai kesempatan selama 120 hari waktu tunggu terhitung sejak 31 Desember 2008 untuk melaporkan evaluasi keekonomian dan kelayakan pembangunan pabrik pengolahan di Pomalaa.

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

#### 34. Contingent Assets and Liabilities (continued)

##### c. Mine Reclamation and Mine Closure (continued)

The requirement to provide reclamation and post-mine guarantees does not release the IUP holder from the requirement to perform reclamation and post-mine activities.

The transitional provisions in GR No. 78 make it clear that CoW holders are also required to comply with this regulation.

Such a placement (deposit) is not contemplated or required under the Company's Extension Agreement signed in 1996. In view of the foregoing, the Company has taken or will take the following actions:

- for mine reclamation the Company has established an accounting reserve. The Ministry of Energy and Mineral Resources ("MEMR"), through its letter dated September 17, 2008, No. 2082/87/DJB/2008, has accepted the establishment of the accounting reserve.
- for mine closure, the Company plans to seek the approval of the MEMR for an accounting reserve. In response to Ministerial Regulation No 18/2008, the Company, through the Indonesian Mining Association, communicated its intention to the MEMR and was informed by the Ministry that a further decision will be made once the draft of the implementing regulation related to this Ministerial Regulation is announced. On October 13, 2009, the MEMR confirmed its position that the Company should establish a time deposit for the mine closure provision. As a follow-up to the confirmation from the MEMR referred to above, the Company has corresponded with the MEMR on several occasions, the latest being February 18, 2010 regarding the submission of the revised mine closure plan based on the evaluation performed by the MEMR. The Company is awaiting approval from the MEMR including further guidance on among others, the deposit amount, details of the state treasury bank account and when the deposit must be established.

Management believes that there will be no material impact on rehabilitation or mine closure provisions as a result of revisions to the plan. Further, the requirement to establish a time deposit will not significantly impact the Company's cash resources or financial position.

##### d. Contract of Work Undertaking

On February 3, 2003, the Government of Indonesia indicated that the Company's undertaking to construct a production plant in Pomalaa, as stipulated in the Extension Agreement, will be satisfied at the later of December 31, 2008 or upon the termination of the Cooperative Resources Agreement ("CRA") with PT Antam (Persero) Tbk., following which the Company will be obliged to report to the Government of Indonesia on the economic and technical feasibility of constructing such a production plant. As the CRA has now been discontinued, the Company is required to prepare this report.

Based on the February 2003 letter, there is a 120 day waiting period from December 31, 2008 for the Company to submit a report evaluating the economic and technical feasibility of constructing a production plant in Pomalaa.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

#### 34. Aset dan Kewajiban Kontinjensi (lanjutan)

#### 34. Contingent Assets and Liabilities (continued)

##### d. Kesanggupan Kontrak Karya (lanjutan)

##### d. Contract of Work Undertaking (continued)

Pada bulan April 2009, Perseroan telah menyampaikan laporan studi kelayakan pembangunan pabrik dimaksud kepada KESDM yang menjelaskan bahwa pembangunan pabrik pengolahan diatas belum layak secara ekonomis untuk kondisi saat ini sehubungan dengan harga nikel yang tidak menguntungkan. Perseroan meminta waktu dua tahun untuk mengoptimalkan hasil studi kelayakan dimaksud. Akan tetapi, KESDM meminta Perseroan untuk melaporkan hasil studi kelayakan terbaru paling lambat pada akhir tahun 2009.

In April 2009, the Company submitted the feasibility report to the MEMR, explaining that the construction of a production plant in Pomalaa is not currently economically feasible given the unfavourable metal price and requested a two-year waiting period for an optimization study. The MEMR has requested that the Company prepare a new study by the end of 2009.

Pada tanggal 1 Juli 2010, Perseroan mengirimkan revisi studi kelayakan terbaru ke KESDM menjelaskan bahwa pembangunan pabrik pengolahan belum layak secara ekonomis untuk saat ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

On July 1, 2010, the Company submitted the revised feasibility study to the MEMR which concludes that the construction of a production plant in Pomalaa is not currently economically feasible emphasizing the following considerations:

- Belum banyaknya terdapat bukti keberhasilan proyek yang diusulkan di tempat lain;
- Potensi harga nikel jangka panjang yang mungkin kurang menguntungkan akibat potensi kelebihan pasokan;
- Ketidakpastian di sektor pertambangan sehubungan penerapan undang-undang pertambangan yang baru (lihat Catatan 34e dibawah ini)

- There is not enough evidence about the success of a similar project elsewhere;
- Potential for long-term unfavourable nickel price due to potential nickel over supply; and
- Uncertainty in the mining sector due to implementation of the new mining law (refer to Note 34e below).

Namun demikian, Perseroan masih berkomitmen untuk mengembangkan tambang di Pomalaa dan membangun pabrik pengolahan yang berdasarkan kelayakan ekonomisnya.

However, the Company is committed to developing the mine and to constructing a production plant in Pomalaa subject to economic feasibility of the project.

Perseroan menerima tiga surat resmi dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 2 dan 26 November 2010 dan 15 Desember 2010 yang mengharuskan adanya tindakan segera untuk mendirikan fasilitas produksi di Pomalaa atau tuntutan hukum akan diajukan untuk menuntut Perseroan untuk melepaskan area Pomalaa. Pertemuan dengan aparat setempat dilakukan pada 21 Desember 2010 untuk mendiskusikan masalah ini dan disepakati akan ditindaklanjuti dengan pernyataan tertulis yang akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara paling lambat pada 30 Januari 2011. Perseroan berkeyakinan bahwa penyelesaian atas situasi tersebut tidak akan memberikan dampak material pada posisi keuangan dan aktivitas operasi Perseroan.

The Company received three official letters from the Governor of the Province of Southeast Sulawesi on November 2 and 26, 2010 and December 15, 2010 which required immediate action to construct a production plant in Pomalaa or a lawsuit will be filed demanding that the Company relinquish the Pomalaa area. A meeting with Provincial Officials was conducted on December 21, 2010 to discuss this matter and it was agreed that this would be followed by a written statement to be submitted to the Governor of Southeast Sulawesi by January 30, 2011. The Company believes the resolution of this situation will not materially impact its financial position or operations.

Perseroan telah mengajukan surat balasan pada tanggal 31 Januari 2011 yang mengusulkan adanya kerja sama antara Perseroan, Gubernur, dan mitra strategis propinsi tersebut. Perseroan sedang menunggu respon balasan dari Gubernur dan mengharapkan perjanjian kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat dapat segera terjadi, dan dengan demikian tidak akan ada permintaan lebih lanjut untuk melepaskan area Pomalaa.

The Company has submitted a response on January 31, 2011 proposing a cooperation between the Company, the Governor and the province's strategic partner. The Company is waiting for a reply from the Governor and expects that a memorandum of understanding will be concluded between the parties and as such there will be no further request to relinquish the Pomalaa area.

##### e. Undang-undang Pertambangan baru

##### e. New Mining Law

Pada tanggal 16 Desember 2008, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru ("Undang-undang"), yang telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 12 Januari 2009 dan menjadi UU No. 4/2009. Undang-undang tersebut mengindikasikan bahwa walaupun Kontrak Karya yang ada sekarang, seperti yang dimiliki oleh Perseroan, akan tetap berlaku namun ketentuan peralihan dalam Undang-undang ini tidak jelas, dan perlu di klarifikasi lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah yang terpisah. Ada beberapa hal yang sedang dianalisa oleh para pemegang Kontrak Karya, termasuk oleh Perseroan, antara lain:

On December 16, 2008, the Indonesian Parliament passed a new Law on Mineral and Coal Mining (the "Law"), which received the assent of the President on January 12, 2009, becoming Law No. 4/2009. While the Law indicates that existing CoWs, such as the Company's, will be honoured, the transition provisions are unclear, and will require clarification in separate government regulations. There are a number of issues that existing CoW holders, including the Company, are currently analyzing. Among these are:

- Ketentuan peralihan sehubungan dengan Kontrak Karya. Undang-undang baru menyatakan bahwa Kontrak Karya yang ada pada saat ini akan tetap berlaku hingga akhir masa berlakunya. Namun Undang-undang ini juga menyatakan bahwa Kontrak Karya harus disesuaikan dalam jangka waktu satu tahun dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (selain dari ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Penerimaan Negara – yang tidak dijelaskan, tetapi mungkin termasuk royalti dan pajak);
- The transitional provisions related to CoWs. The new Law notes that existing CoWs will be honoured until their expiration. However, it also states that existing CoWs must be adjusted within one year to conform with the provisions of the Law (other than terms related to State Revenue – which is not defined, but presumably includes royalties and taxes);

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

#### 34. Aset dan Kewajiban Kontinjensi (lanjutan)

#### 34. Contingent Assets and Liabilities (continued)

##### e. Undang-undang Pertambangan baru (lanjutan)

##### e. New Mining Law (continued)

- Kewajiban para pemegang Kontrak Karya yang telah memulai aktivitasnya, dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya Undang-undang, untuk menyerahkan rencana aktivitas penambangannya di seluruh wilayah kontrak. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka wilayah kontrak karyanya akan dikurangi, seluas yang diizinkan oleh Undang-undang (yang luasnya jauh lebih kecil dari wilayah yang sekarang dimiliki Perseroan); dan
- Kewajiban para pemegang Kontrak Karya bahwa dalam jangka waktu lima tahun sejak berlakunya Undang-undang, diwajibkan untuk membuat pabrik pemrosesan barang tambangnya didalam negeri. Apa yang dimaksud dengan pemrosesan dalam negeri tidak cukup jelas.

- The requirement for CoW holders that have already commenced some form of activity to, within one year of enactment of the new Law, submit a mining activity plan for the entire contract area. If this plan is not fulfilled, the contract area may be reduced to that allowed for licences under the Law (which is significantly smaller than the Company's current area); and
- The requirement for holders of existing CoWs, within five years of the enactment of the Law, to comply with the obligation under the Law to conduct onshore processing of their ore. Onshore processing is not clearly defined.

Diharapkan oleh para pemegang Kontrak Karya, dengan dukungan dari asosiasi-asosiasi pertambangan Indonesia, akan dapat mempertahankan hak mereka sesuai dengan yang dimuat dalam Kontrak Karya. Akan tetapi terdapat kemungkinan bahwa hal ini akan dibawa ke tingkat arbitrase jika Pemerintah memaksakan kehendaknya untuk merubah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kontrak Karya tanpa persetujuan dari para pemegang kontrak terkait. Perseroan sedang menganalisa dampak dari Undang-undang baru ini, dan berkeyakinan bahwa dalam waktu dekat ini tidak akan ada dampak yang signifikan, karena para pelaku industri dan Pemerintah kini sedang berusaha untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah ini.

It is expected that CoW holders, with the support of industry associations, will vigorously defend their rights under their existing contracts. It is possible that the arbitration provisions of the CoWs will be invoked if the Government attempts to force changes in CoW terms without the agreement of the contractors. The Company is analyzing the impact of this situation on its operations, and believes that there will be no significant impact in the near term, as the industry and Government work towards a consensus on these issues.

Pada tanggal 16 Juni 2009, Perseroan bersama-sama dengan perusahaan tambang lainnya menghadiri rapat yang diadakan oleh KESDM tentang rancangan usulan penyesuaian atas struktur Kontrak Karya yang berlaku saat ini pada seluruh pemegang Kontrak Karya. Perseroan telah mengirimkan tanggapan resminya ke Kementerian menyatakan kesediaan untuk berdialog lebih lanjut mengenai rancangan usulan penyesuaian dimaksud. Untuk saat ini mungkin belum dapat ditentukan apakah hasil dari dialog nantinya akan berdampak buruk terhadap operasi atau posisi keuangan Perseroan.

On June 16, 2009, the Company, together with other mining companies, attended a meeting held by the MEMR in which the Ministry announced the proposed adjustments to the current CoW structure applicable to all CoW holders. The Company has submitted a formal response to the Ministry explaining its intention to conduct further dialogue to discuss the best solution in respect to the proposed changes. It is not possible at this time to determine whether the results of this dialogue will have an adverse impact on the operations or financial position of the Company.

Pada tanggal 4 Januari 2010, Perseroan menyerahkan rencana aktivitas penambangannya kepada KESDM dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut diatas. Hingga tanggal laporan keuangan ini, belum ada korespondensi lebih lanjut antara Perseroan dengan KESDM mengenai hal ini.

On January 4, 2010, the Company submitted a mining activity plan to the MEMR in order to satisfy the requirement noted above. Until the date of these financial statements, there has been no further correspondence between the Company and the MEMR on this matter.

Lebih lanjut, pada tanggal 1 Februari 2010, Presiden Republik Indonesia menandatangani dua Peraturan Pemerintah ("PP"), yaitu PP No. 22/2010 dan PP No. 23/2010, yang dikeluarkan di bawah payung Undang – Undang Pertambangan Baru ini. PP No. 22 pada dasarnya mengatur tentang pembentukan area pertambangan di Indonesia. PP No. 23 menjelaskan lebih detail beragam tipe perizinan pertambangan yang dapat diperoleh dalam hubungannya dengan Undang – Undang ini, dan menjelaskan syarat dan kondisi yang wajib dipenuhi oleh pihak yang mengajukan maupun pihak berwenang yang mengeluarkan izin pertambangan. Pada tanggal 5 Juli 2010, PP No. 55/2010 dikeluarkan. PP ini mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

Furthermore, on February 1, 2010, the President of the Republic of Indonesia signed two implementing regulations for the Law, i.e. Government Regulations ("GR") No. 22/2010 and GR No. 23/2010. GR 22 deals with the establishment of mining areas in Indonesia. GR 23 offers further details of different types of mining licenses which may be made available under this Law, and sets out the basic terms and conditions which need to be satisfied by license applicants and issuing authorities. On July 5, 2010, GR No. 55/2010 was issued. This GR regulates the guidance and supervision of mineral and coal mining business in Indonesia.

Perseroan terus memonitor perkembangan dari implementasi peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini dan menganalisa pengaruhnya terhadap operasional Perseroan.

The Company is closely monitoring the progress of the implementing regulations for the Law and is currently assessing the impact on its operations.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

#### 34. Aset dan Kewajiban Kontinjensi (lanjutan)

#### 34. Contingent Assets and Liabilities (continued)

##### f. Peraturan Menteri No. 17/2010

##### f. Ministerial Regulation No. 17/2010

Pada tanggal 23 September 2010, Peraturan KESDM No. 17 tahun 2010 telah disahkan. Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan ini, terdapat kewajiban dari seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan ("IUP"/Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") untuk menggunakan harga patokan dalam penjualan mineral (atau batubara), baik penjualan kepada pasar domestik maupun ekspor, termasuk kepada afiliasi. Dalam peraturan peralihan, semua pemegang Kontrak Karya diwajibkan untuk mentaati peraturan ini dan persyaratan kontrak yang sudah ada sebelum diimplementasikannya peraturan ini harus disesuaikan agar memenuhi persyaratan peraturan ini (sebagai contoh, formula harga jual) dalam waktu 12 bulan. Selain itu, sebagai kewajiban berkelanjutan dalam peraturan ini, penerapan harga dalam persyaratan kontrak harus disesuaikan setiap 12 bulan. Karena formula harga yang digunakan Perseroan telah sesuai dengan peraturan KESDM ini (LME dapat dikualifikasikan sebagai "pasar internasional"), Perseroan berpendapat bahwa tidak diperlukan penyesuaian terhadap kontrak penjualan jangka panjang Perseroan terhadap ketentuan ini. Meskipun demikian, peraturan ini tidak mensyaratkan penyesuaian kontrak penjualan jangka panjang Perseroan terhadap ketentuan peraturan ini.

On September 23, 2010, MEMR Regulation No. 17 of 2010 was issued. Pursuant to this regulation, there is an obligation on all *Izin Usaha Pertambangan* ("IUP"/*Izin Usaha Pertambangan Khusus* ("IUPK") holders to refer to prescribed benchmark prices for the sale of minerals (or coal), whether sales are being made to domestic users or are for export, including to affiliates. Under the transitional provision, all CoW holders are obligated to comply with the regulation and any term contracts existing prior to the implementation of this regulation must be adjusted to comply with the terms (i.e., the selling price formula) of this regulation within 12 months. In addition, as an ongoing obligation under the regulation, pricing in term contracts must be adjusted every 12 months. As the Company's selling price formula is in line with the MEMR regulation (LME qualifies as an "international market"), the Company does not believe that any adjustment will be necessary to the Company's long term sales agreements under either provision. Notwithstanding the foregoing, the regulation does not grandfather the Company's long-term sales contracts.

Harga patokan akan ditentukan berdasarkan mekanisme pasar atau sejalan dengan harga yang berlaku pada pasar internasional. Harga patokan untuk mineral logam (misalnya nikel dalam *matte*) akan ditentukan oleh Direktur Jenderal setiap bulannya. Peraturan ini mengharuskan harga patokan digunakan sebagai referensi penjualan. Harga patokan akan didasarkan pada basis "*free on board*". Formula untuk harga patokan akan diatur oleh peraturan Direktur Jenderal yang belum ditetapkan saat ini. Perlu dicatat bahwa yang mengalami perubahan setiap bulannya adalah harga patokan, dan bukan formulanya.

Benchmark prices will be determined pursuant to market mechanisms or in accordance with prices generally applicable in the international market. Benchmark price for metal minerals (e.g. nickel *matte*) will be established by the Director General on a monthly basis. The regulation requires that the benchmark prices be used as a reference for sales. The benchmark price will be on a "free on board" basis. The formula for the benchmark prices will be regulated by a Director General regulation, which is yet to be issued. Note that it is the benchmark price that will change monthly, not the formula.

Penyesuaian harga yang diatur di dalam peraturan ini termasuk biaya pengapalan, biaya survei, biaya perpindahan kapal, biaya pemeliharaan, biaya penyulingan, biaya metal terutang dan/atau biaya asuransi. Referensi metal terutang mengacu kepada harga yang akan dibayar oleh pembeli berdasarkan kandungan metal dalam produk; atau secara eksplisit mengakui harga pasar internasional untuk produk nikel setengah jadi (berupa persentase harga LME).

The "cost adjustments" set out in the regulation include barging cost, surveyor cost, transshipment cost, treatment cost, refinery cost, metal payable and/or insurance cost. The reference to "metal payable" refers to the price which the customer will pay on the contained metal of the product; it arguably recognizes the international market price practice for nickel intermediate products (i.e., a percentage of LME price).

Untuk perjanjian penjualan di masa yang akan datang, formula harga jual harus disampaikan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal. Masih belum terdapat kejelasan apakah diperlukan persetujuan Direktur Jenderal mengenai harga yang akan digunakan ini. Sebagaimana diatur dalam Kontrak Karya, baik penetapan harga atau penjualan tidak memerlukan persetujuan Pemerintah, meskipun Pemerintah memiliki hak untuk mempertanyakan penetapan harga jual kepada afiliasi.

For future sales agreements, the sales price formula must first be submitted to the Director General. It is not clear whether the prior approval of the Director General is required. Under the CoW, neither pricing nor sales requires Government approval, though the Government has the right to question pricing to affiliates.

Manajemen berpendapat bahwa masih terlalu dini untuk menentukan pengaruh dari peraturan ini terhadap Perseroan. Penilaian awal Perseroan adalah bahwa peraturan ini mengakui atau memperbolehkan penyesuaian terhadap standar harga pasar internasional (misalnya sejumlah persentase tertentu dari harga LME). Saat ini, pada level minimum, peraturan ini akan menggunakan harga LME sebagai referensi dalam menghitung harga patokan. Peraturan Direktur Jenderal yang menetapkan mengenai rentang penyesuaian harga masih belum ditetapkan dan perlu dipastikan bahwa harga patokan aktual yang diatur oleh Direktorat Jenderal akan sejalan dengan formula harga yang digunakan Perseroan. Manajemen belum akan mengetahui lebih jauh mengenai hal ini hingga Peraturan Direktur Jenderal dikeluarkan.

Management believes that it is too early to determine the impact of this regulation on the Company. Management's initial assessment is that, this regulation recognizes or permits adjustments to the international market price standard (e.g. a percentage of LME price). At the present time, at a minimum, it appears that the regulation will set LME price as a reference point in calculating the benchmark price. What remains is the outstanding regulation of the Director General on the methods of determining the quantum for the cost adjustments and to make sure that the actual benchmark price posted by the Director General is in line with the Company's pricing formula. Management will not know this until the Director General regulation is issued.



Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

### 34. Aset dan Kewajiban Kontinjensi (lanjutan)

#### g. Pelepasan Area Kontrak Karya

Pada tanggal 25 Oktober 2010, KESDM mengeluarkan Surat Keputusan No. 483.K/30/DJB/2010 yang memberikan mengkonfirmasi pelepasan beberapa blok tertentu di wilayah Kontrak Karya Perseroan di Sulawesi Tenggara, yang meliputi Malupulu, Torobulu, Lasolo dan Paopao, dengan keseluruhan luas wilayah sekitar 28.000 hektar atau setara dengan 12,8% dari total luas wilayah Kontrak Karya saat ini. Pelepasan tersebut termasuk dalam Rencana Jangka Panjang yang disampaikan Perseroan kepada pemerintah sebagai bagian dari kewajiban berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia yang baru.

Manajemen berkeyakinan pelepasan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan atau aktivitas operasi Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010.

### 35. Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa standar akuntansi revisi sebagai berikut yang mungkin mempunyai dampak terhadap laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011:

- PSAK 1 (Revisi 2009) – Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 2 (Revisi 2009) – Laporan Arus Kas;
- PSAK 3 (Revisi 2009) – Laporan Keuangan Interim;
- PSAK 4 (Revisi 2009) – Kejadian Setelah Periode Pelaporan;
- PSAK 5 (Revisi 2009) – Segmen Operasi;
- PSAK 7 (Revisi 2009) – Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;
- PSAK 12 (Revisi 2009) – Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama;
- PSAK 15 (Revisi 2009) – Investasi Dalam Perusahaan Asosiasi;
- PSAK 19 (Revisi 2009) – Aset Tidak Berwujud;
- PSAK 22 (Revisi 2009) – Akuntansi Penggabungan Usaha;
- PSAK 23 (Revisi 2009) – Pendapatan;
- PSAK 25 (Revisi 2009) – Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- PSAK 48 (Revisi 2009) – Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 57 (Revisi 2009) – Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi; dan
- PSAK 58 (Revisi 2009) – Aset Tidak Lancar Tersedia Untuk Dijual dan Operasi Dalam Penghentian.

Ikatan Akuntan Indonesia juga telah menerbitkan standar akuntansi revisi sebagai berikut yang mungkin mempunyai dampak terhadap laporan keuangan Perseroan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012:

- PSAK 10 (Revisi 2009) – Efek dari Perubahan Kurs Mata Uang Asing.

Perseroan masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan Perseroan dan pada saat ini Perseroan berkeyakinan bahwa pengadopsian terhadap perubahan PSAK tersebut di atas tidak akan mengakibatkan perubahan yang substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan ataupun pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.

### 34. Contingent Assets and Liabilities (continued)

#### g. Relinquishment of CoW Area

On October 25, 2010, the MEMR issued a Decision Letter No. 483.K/30/DJB/2010 confirming the relinquishment of several blocks within the Company's CoW area located in Southeast Sulawesi, covering Malupulu, Torobulu, Lasolo and Paopao, with a total area of 28,000 hectares or equivalent to 12.8% of the Company's total CoW area. The relinquishment was part of the Long Term Plan framework submitted by the Company to the Government as part of the requirements of the new Indonesian Law on Mineral and Coal Mining.

Management believes that the relinquishment does not have a significant effect on the Company's financial statements or operations as at and for the year ended December 31, 2010.

### 35. Prospective Accounting Standard Pronouncements

The Indonesian Institute of Accountants has issued the following revised accounting standards effective for financial statements covering periods beginning on or after January 1, 2011:

- SFAS 1 (Revised 2009) – Presentation of Financial Statements;
- SFAS 2 (Revised 2009) – Statement of Cash Flows;
- SFAS 3 (Revised 2009) – Interim Financial Reporting;
- SFAS 4 (Revised 2009) – Events after the Reporting Period;
- SFAS 5 (Revised 2009) – Operating Segments;
- SFAS 7 (Revised 2009) – Related Party Disclosures;
- SFAS 12 (Revised 2009) – Interests in Joint Ventures;
- SFAS 15 (Revised 2009) – Investments in Associates;
- SFAS 19 (Revised 2009) – Intangible Assets;
- SFAS 22 (Revised 2009) – Business Combinations;
- SFAS 23 (Revised 2009) – Revenue;
- SFAS 25 (Revised 2009) – Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors;
- SFAS 48 (Revised 2009) – Impairment of Assets;
- SFAS 57 (Revised 2009) – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets; and
- SFAS 58 (Revised 2009) – Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations.

The Indonesian Institute of Accountants has also issued the following revised accounting standard that may be applicable to the Company's financial statements covering periods beginning on or after January 1, 2012:

- SFAS 10 (Revised 2009) – The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.

The Company is in the process of evaluating the possible impact of these standards on the Company's financial statements and at this time believes that the adoption of these amended SFAS will not result in any substantial changes to the Company's accounting policies nor any significant impact on the financial statements of the Company.

Catatan atas Laporan Keuangan  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
31 Desember 2010 dan 2009

Notes to the Financial Statements  
PT International Nickel Indonesia Tbk  
December 31, 2010 and 2009

### 36. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Pada tanggal 1 Maret 2011, Perseroan mendapatkan surat panggilan pengadilan sehubungan adanya gugatan perwakilan kelompok ("class action") yang dilayangkan oleh 10 orang warga Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. *Class Action* tersebut dilayangkan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri ("PN") Jakarta terhadap (1) Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini KESDM sebagai Terdakwa I, (2) Perseroan sebagai Terdakwa II dan (3) Direktur Jendral Mineral dan Batubara sebagai Terdakwa tambahan, berkaitan dengan dengan Perubahan dan Perpanjangan Kontrak Karya tahun 1996 dan reservasinya atas area Kontrak Karya di Kabupaten Morowali. Penggugat berpendapat bahwa Perubahan dan Perpanjangan Kontrak Karya tahun 1996 adalah cacat hukum dan bertentangan dengan UU dan peraturan yang berlaku, sehingga Terdakwa I dan Perseroan telah melakukan kesalahan hukum. Penggugat meminta PN, antara lain, meminta Perseroan mengakui kesalahan dimaksud dan membayar kompensasi tambahan atas kerugian dalam jumlah keseluruhan sebesar IDR5,6 triliun (sekitar AS\$630 juta).

Dalam pandangan Perseroan, *class action* diatas adalah tanpa dasar yang kuat. Perseroan dengan segala upayanya akan mempertahankan kepemilikan dan hak-haknya terhadap *class action* dimaksud.

### 37. Reklasifikasi Akun

Angka komparatif pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah diubah untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

### 36. Subsequent Event

On March 1, 2011, the Company was served with a court summons regarding a class action filed by ten individuals residing in Morowali Regency, Central Sulawesi. The class action was brought by the plaintiffs before the Central Jakarta District Court against (1) the Government of the Republic of Indonesia, in this case the MEMR, as Defendant I, (2) the Company as Defendant II and (3) the Director General of Minerals and Coal as Ancillary Defendant with respect to the Modification and Extension of the Contract of Work dated 1996 and the reservation of the Contract of Work areas located in Morowali Regency. The plaintiffs argue that the Modification and Extension of the Contract of Work was legally defective since it is contrary to laws and regulations, and alleged that Defendant I and the Company have committed a wrongful act. The plaintiffs asked the Court, among others, to declare that the Company has committed a wrongful act and that the 1996 Modification and Extension of the Contract of Work is not valid and to require the Company to pay damages to the plaintiffs in the aggregate amount of IDR5.6 trillion (approximately US\$630 million).

In the Company's view such class action is groundless. The Company will vigorously defend its rights and interests against the class action.

### 37. Reclassification of Accounts

Certain comparative figures in the financial statements for the year ended December 31, 2009 have been amended to conform with the basis on which the financial statements for the year ended December 31, 2010 have been presented.

Akun yang terpengaruh/ <i>Accounts affected</i>	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2009	Sifat/ <i>Nature</i>
Aset lainnya - biaya pinjaman yang ditangguhkan / <i>Other assets - deferred borrowing costs</i>	10,444	Direklasifikasi ke pinjaman <i>/Reclassified as part of borrowings</i>

INFORMASI PERUSAHAAN

# CORPORATE INFORMATION

## SEJARAH PERUSAHAAN

# CORPORATE HISTORY

PT International Nickel Indonesia Tbk didirikan pada bulan Juli 1968 sebagai anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Vale Canada Limited (dahulu Vale Inco Limited). PTI menanda-tangani Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Juli 1968 (Kontrak Karya Awal).



PT International Nickel Indonesia Tbk (PTI) was incorporated in July 1968 as a wholly-owned subsidiary of Vale Canada Limited (formerly Vale Inco Limited). PTI entered into a Contract of Work with the Government of Indonesia on July 27, 1968 (the Original CoW).



Setelah penanda-tanganan Kontrak Karya Awal, PTI memulai eksplorasi pada wilayah seluas 6,6 juta hektar yang semula diberikan. Sebagaimana diatur dalam Kontrak Karya Awal, kami telah mengembalikan sebagian besar wilayah tersebut setelah kami menemukan lokasi yang lebih tepat bagi operasi kami. Luas wilayah Kontrak Karya kami saat ini (seperti ditunjukkan di bawah ini) adalah 190.510 hektar, kurang dari 5% dari wilayah yang semula diberikan.

Kami mulai membangun pabrik pertama pada tahun 1973 dengan satu lini pengolahan pyrometalurgi dan fasilitas-fasilitas terkait. Pada tahun 1975 kami mulai membangun dua lini pengolahan tambahan dan satu instalasi pembangkit listrik tenaga air. Kami memulai produksi komersial pertama pada bulan April 1978. Pada tahun 1993 kami menyelesaikan perluasan fasilitas pengolahan dari kapasitas produksi tahunan nominal semula 36.300 metrik ton nikel dalam matte menjadi 47.600 metrik ton.

Propinsi	Blok	Luas (Ha)
<b>Sulawesi Tengah</b> (Jumlah: 36.635,36 Ha or 19,23%)	Kolonodale	4.512.35
	Bahodopi	32.123.01
<b>Sulawesi Selatan</b> (Jumlah: 118.387,45 Ha or 62,14%)	Sorowako-Towuti	108.377.25
	Matano	6.176.48
	Bulubalang	2.249.33
	Lingke	1.584.39
<b>Sulawesi Tenggara</b> (Jumlah: 35.486.35 Ha or 18,63%)	Latao	3.148.11
	Matarape	1.679.87
	Suasua	10.372.68
	Pomalaa	20.286.19
	<b>Jumlah</b>	<b>190.509.66</b>

Pada tanggal 15 Januari 1996, kami menanda-tangani Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Kontrak Karya untuk mengubah dan memperpanjang kontrak tersebut dari tanggal 1 April 2008 menjadi tanggal 28 Desember 2025 ("Perjanjian Perubahan," dan bersama dengan Kontrak Karya Awal, "Kontrak Karya"). Sesuai dengan kesanggupan kami dalam Kontrak Karya, kami menyelesaikan perluasan besar pada tahun 1999, yang meningkatkan kapasitas terpasang tahunan fasilitas pengolahan kami menjadi 68.000 metrik ton nikel dalam matte. Selama perluasan tersebut, kami menambah lini produksi keempat dan satu pembangkit listrik tenaga air baru di Balambano. Pada tahun 2003 kami melampaui kapasitas terpasang tahunan untuk pertama kali dengan produksi sebesar 70.216 metrik ton.

Following the signing of the Original CoW, PTI began to explore the 6.6 million hectares that we were initially granted. As contemplated by the Original CoW, we have relinquished a significant amount of the area as we have identified more precise locations for our operations. Our current CoW (as shown below) area is 190,510 hectares, less than 5% of our original granted area.

We began construction of our original plant in 1973 with one pyrometallurgical processing line and associated facilities. In 1975, we started construction of two more processing lines and a hydroelectric generating plant. First commercial production began in April 1978. In 1993, we completed an expansion of our processing facility from the original nominal annual capacity of 36,300 metric tons of nickel in matte to a nominal annual production capacity of 47,600 metric tons.

Province	Block	Area (Ha)
<b>Central Sulawesi</b> (Total: 36,635.36 Ha or 19.23%)	Kolonodale	4,512.35
	Bahodopi	32,123.01
<b>South Sulawesi</b> (Total: 118,387.45 Ha or 62.14%)	Sorowako-Towuti	108,377.25
	Matano	6,176.48
	Bulubalang	2,249.33
	Lingke	1,584.39
<b>Southeast Sulawesi</b> (Total: 35,486.35 Ha or 18.63%)	Latao	3,148.11
	Matarape	1,679.87
	Suasua	10,372.68
	Pomalaa	20,286.19
	<b>TOTAL</b>	<b>190,509.66</b>

On January 15, 1996, we signed an Agreement on Modification and Extension of the Original CoW, modifying and extending it from April 1, 2008 to December 28, 2025 (the Extension Agreement, and together with the Original CoW, the CoW). Pursuant to our undertakings under the CoW, we completed a major expansion in 1999, which increased our processing facility's annual nameplate capacity to 68,000 metric tons of nickel in matte. In the course of this major expansion, we added a fourth line of production and a new hydroelectric power generating facility at Balambano. We first exceeded our nameplate capacity in 2003, producing 70,216 metric tons.

## NAMA DAN ALAMAT INSTITUSI ATAU PROFESIONAL PENDUKUNG PASAR MODAL

# NAME AND ADDRESS OF INSTITUTIONS OR PROFESSIONALS SUPPORTING THE CAPITAL MARKET

### REGISTRASI SAHAM **SHARE REGISTRAR**

PT International Nickel Indonesia Tbk  
Plaza Bapindo  
Citibank Tower  
22nd floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
T: +62-21-524 9031  
F: +62-21-524 9020  
E: [ptishareadmin@valeinco.com](mailto:ptishareadmin@valeinco.com)





## AKUNTAN INDEPENDEN PERUSAHAAN

# COMPANY INDEPENDENT ACCOUNTANT INFORMATION

### AUDITOR

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan – PwC Indonesia  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6  
Jakarta 12940  
T: +62-21-521 2901  
F: +62-21-5290 5555  
E: [www.pwc.com/id](http://www.pwc.com/id)



## BIOGRAFI DEWAN KOMISARIS

# BOARD OF COMMISSIONERS BIOGRAPHIES

### **Peter Poppinga**

Presiden Komisaris

Mr. Poppinga adalah Executive Vice-President Asia-Pacific dari Vale Base Metals dan Presiden dari Vale Nouvelle-Calédonie.

Mr. Poppinga bergabung dengan Vale pada tahun 1999 dan memegang posisi Direktur bidang Bijih Besi pada Rio Doce America, Inc. pada tahun 2000. Pada tahun berikutnya, beliau pindah ke Rio Doce International di Belgia, semula sebagai Direktur Penjualan Bijih Besi untuk Eropa, Timur Tengah dan Afrika, dan kemudian sebagai Senior Managing Director. Tanggung jawab beliau mencakup penjualan mangan dan logam campuran, dan negosiasi tolak ukur dunia untuk bijih besi.

Pada bulan Februari 2006, Mr. Poppinga diangkat sebagai Senior Managing Director, CVRD International S.A. di Swiss. Pada bulan Oktober 2007, ketika Mr. Poppinga bergabung dengan Vale Canada, beliau berperan sebagai Executive Vice-President, bidang Strategi dan Teknologi Informasi.

Mr. Poppinga memulai karir sebagai ahli geologi dan insinyur tambang di SAMITRI, sebuah perusahaan tambang di Brazil, dan bekerja selama 15 tahun dalam bidang eksplorasi, perencanaan tambang, produksi, pemasaran dan penjualan di berbagai posisi manajer di dalam dan luar negeri.

Beliau meraih gelar magister dalam bidang Administrasi Bisnis dari Fundação Dom Cabral di Brazil dan gelar sarjana dalam bidang Geologi dari Universität Clausthal di Jerman.



### **Peter Poppinga**

President Commissioner

Mr. Poppinga is Executive Vice-President Asia-Pacific Vale Base Metals and President of Vale Nouvelle-Calédonie.

Mr. Poppinga joined Vale in 1999 and assumed the New York-based position of Director for Iron Ore of Rio Doce America, Inc. in 2000. The following year, he moved to Rio Doce International in Belgium, initially as Iron Ore Sales Director for Europe, Middle East and Africa, and later as Senior Managing Director. His responsibilities included the sale of manganese and alloys, as well as world benchmark negotiations in iron ore.

In February 2006, Mr. Poppinga was appointed Senior Managing Director, CVRD International S.A. in Switzerland. In October 2007, when Mr. Poppinga joined Vale Canada, he assumed the role of Executive Vice President, Strategy and Information Technology and one year later he also assumed responsibility for HR, Sustainability and Process Technology.

Mr. Poppinga began his career as a geologist and mining engineer at SAMITRI, a Brazilian mining company, where he worked for 15 years in exploration, mine planning, production, marketing and sales in managerial positions domestically and abroad.

He holds a master's degree in business administration from Fundação Dom Cabral in Brazil and a bachelor's degree in geology from the Universität Clausthal in Germany.

### **Nicolaas D. Kanter**

Wakil Presiden Komisaris & Komisaris Independen

Bapak Kanter dipilih menjadi Komisaris Independen PTI pada bulan April 2009. Beliau adalah Head of Country di British Petroleum (BP) Indonesia sejak tahun 2008. Beliau mengawasi seluruh bisnis BP dan bertanggung jawab mengintegrasikan seluruh operasional BP di Indonesia. Sebelumnya, beliau adalah Executive Vice President Sumber Daya Manusia dan Hubungan di BP Indonesia sejak tahun 2005.



Bapak Kanter mengawali karir di BP Indonesia pada tahun 1984 sebagai penasihat hukum. Sejak tahun 1987 sampai 1996 beliau bekerja dalam berbagai departemen, termasuk pengadaan, keuangan, perencanaan dan pengendalian, dan pemasaran dan penjualan. Beliau menjabat sebagai Manager Sumber Daya Manusia pada tahun 1996 sampai 1999 dan dipromosikan menjadi Vice President, Urusan-Urusan Masyarakat dan Pemerintah. Bapak Kanter menjadi Senior Vice President Sumber Daya Manusia dan General Support di Vico Indonesia (diakuisisi oleh BP) pada tahun 2001 sampai 2002, dan setelah itu ditugaskan di BP Asia Pasifik dan Timur Tengah (Hong Kong) sebagai Executive Assistant Group Vice President Upstream.

Kembali ke Indonesia pada tahun 2003, Bapak Kanter menjabat sebagai Senior Vice President, Urusan Masyarakat dan Pemerintah. Selanjutnya beliau dipromosikan menjadi Executive Vice President Sumber Daya Manusia dan Hubungan.

Bapak Kanter meraih gelar magister dalam bidang Hukum dari Universitas Indonesia, dan gelar magister dalam Administrasi Bisnis (Bisnis Internasional) dari University of Southern California, Amerika Serikat.

### **Tito Martins**

Komisaris

Mr. Martins adalah Presiden dan Chief Executive Officer dari Vale Canada. Beliau juga menjabat sebagai Eksekutif Direktur untuk bidang usaha logam dasar dari Vale, perusahaan induk dari Vale Canada.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Eksekutif Direktur bidang Urusan Perusahaan and Energi dari Vale, dan sebelum itu Managing Director departemen Keuangan Perusahaan periode Agustus 1999 sampai September 2003. Sejak tahun 1985 hingga 1999, Mr. Martins menjabat berbagai posisi yang berbeda dalam bidang keuangan Vale. Beliau juga pernah menjadi CEO CAEMI (tambang and metalurgi) dan Ketua dan CEO MBR Minerações Brasileiras Reunidas (tambang bijih besi) pada tahun 2003 sampai 2006.

Karena keahlian beliau di bidang administrasi dan keuangan, Mr. Martins menjadi anggota Direksi pada beberapa perusahaan di Brazil dan di luar negeri, termasuk Vale Foundation, Ferrovias Centro Atlantica (perusahaan kereta api), Samarco (pengolahan bijih besi), FERROBAN – Ferrovias Bandeirantes S.A., Aço Minas Gerais S.A. (Açominas), Gulf Industrial Investment Company (GIIC) di Bahrain, Itabasco dan Hispanobras. Beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur MRN – Mineração Rio de Norte S.A. (bauxit).

### **Nicolaas D. Kanter**

Vice President Commissioner & Independent Commissioner

Nicolaas D. Kanter was elected as an Independent Commissioner of PTI in April 2009. He has served as Head of Country, British Petroleum (BP) Indonesia since 2008. He oversees all BP business and is responsible for integrating all of BP's operations in Indonesia. Previously, he was Executive Vice President, Human Resources and Relations of BP, a position he assumed in 2005.

Mr. Kanter's career at BP began in 1984 as a lawyer. From 1987 to 1996, he worked in a number of departments at BP, including Purchasing, Finance, Control and Planning and Marketing and Commercial. He served as Human Resources Manager from 1996 to 1999 and was promoted to Vice-President Public and Government Affairs. Mr. Kanter was named Senior Vice-President, Human Resources and General Support of Vico Indonesia (acquired by BP) from 2001 to 2002 and thereafter was seconded to BP Asia-Pacific and Middle East (Hong Kong) as Executive Assistant to the Group Vice-President Upstream.

Returning to Indonesia in 2003, Mr. Kanter was named Senior Vice President, Public and Government Affairs. He was subsequently promoted to Executive Vice President, Human Resources and Relations.

Mr. Kanter has a Master of Law degree from the University of Indonesia and a Master of Business Administration (international business) from the University of Southern California.



### **Tito Martins**

Commissioner

Mr. Martins is CEO of Vale Canada. He also serves as the Executive Director for base metals operations of Vale S.A. (Vale), the parent company of Vale Canada.

He previously served as Vale's Executive Director for Corporate Affairs and Energy, and prior to that was Managing Director of the Corporate Finance department from August 1999 to September 2003. From 1985 to 1999, Mr. Martins held various positions in Vale's financial areas. He was the CEO of CAEMI (mining and metallurgy) and Chairman and CEO of MBR Minerações Brasileiras Reunidas (iron ore mining) from 2003 to 2006.

As a result of his expertise in the fields of administration and finance, Mr. Martins has been asked to serve on the boards of directors of several corporations in Brazil and abroad, including the Vale Foundation, Ferrovia Centro Atlântica (railway), Samarco (iron ore and pelletizing), FERROBAN – Ferrovias Bandeirantes S.A., Aço Minas Gerais S.A. (Açominas), Gulf Industrial Investment Company (GIIC) in Bahrain, Itabasco and Hispanobras. Mr. Martins is also the Chairman of the Board of Directors of MRN – Mineração Rio de Norte S.A. (bauxite).

Mr. Martins meraih gelar sarjana dalam bidang Ekonomi dari Federal University of Minas Gerais dan pasca sarjana dalam bidang Manajemen dari Federal University of Rio de Janeiro. Beliau juga mengambil program-program pendidikan eksekutif lain di INSEAD (Perancis) dan di Kellogg School of Management di Northwestern University (Amerika Serikat).

**Mark Travers**

Komisaris

Mr. Travers dipilih menjadi Dewan Komisaris pada bulan Agustus 2009. Beliau adalah Executive Vice President Urusan Hukum dan Perusahaan, Vale Base Metals, dan juga Deputy General Counsel dan Direktur Urusan Perusahaan untuk wilayah Amerika Utara dan Tengah, dan Asia Pasifik untuk Vale. Dalam posisi beliau saat ini di Vale Base Metals, Mr. Travers mengelola urusan hukum dan perusahaan bagi usaha logam dasar global Vale. Dalam kapasitas sebagai Deputy General Counsel di Vale, Mr. Travers mengelola masalah-masalah hukum bagi seluruh bisnis Vale di wilayah Amerika Utara dan Tengah, dan Asia Pasifik, dan urusan-urusan perusahaan bagi seluruh bisnis Vale di Amerika Utara dan Tengah, Eropa dan Asia Pasifik.



Mr. Travers bergabung dengan Vale Canada pada bulan Juni 2001 sebagai Assistant General Counsel. Beliau diangkat menjadi Associate General Counsel pada bulan Januari 2005 dan diangkat sebagai Deputy General Counsel, Asia Pasifik pada bulan September 2007. Pada bulan Mei 2008, Mr. Travers diangkat sebagai General Counsel di Vale Canada. Pada bulan Mei 2009, beliau menjabat posisi saat ini dengan tambahan tanggung jawab atas urusan-urusan perusahaan. Mr. Travers mengambil tanggung jawab tambahan sebagai Deputy General Counsel wilayah Amerika Utara dan Tengah, dan Asia Pasifik untuk Vale pada bulan September 2009.

Sebelumnya, Mr. Travers adalah senior associate bidang hukum perusahaan dan sekuritas pada sebuah perusahaan besar di Toronto. Beliau meraih gelar MBA dan LLB dari York University/Osgoode Hall di Toronto pada tahun 1993.

**Jennifer Maki**

Komisaris

Ms. Maki adalah Executive Vice President dan Chief Financial Officer dari Logam Dasar Vale Canada. Dalam posisi ini, yang dipegang sejak Oktober 2007, beliau bertanggung jawab secara keseluruhan atas urusan keuangan dari kelompok usaha Vale's Base Metals.

Sebelum posisi saat ini, Ms. Maki menjabat sebagai Vice President dan Treasurer dari Vale Canada dengan tanggung jawab atas implementasi strategi-strategi pendanaan, dan kebijakan-kebijakan pengelolaan kas, asuransi dan hutang Vale Canada. Jabatan-jabatan beliau sebelumnya di Vale Canada termasuk sebagai Assistant Comptroller, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dengan tanggung jawab utama mengawasi persiapan laporan-laporan keuangan untuk keterbukaan informasi kepada publik dan untuk memenuhi kewajiban kepada pemerintah; dan sebagai Assistant Comptroller, Analisa dan Perencanaan Keuangan, dengan tanggung jawab atas perencanaan-perencanaan keuangan, analisa hasil keuangan dan aspek pengawasan korporat dari program-program investasi modal Vale Canada.

Mr. Martins holds a bachelor's degree in economics from the Federal University of Minas Gerais and a master's degree in management from the Federal University of Rio de Janeiro. He has attended executive education programs at INSEAD (France) and at the Kellogg School of Management at Northwestern University.

#### **Mark Travers**

Commissioner

Mr. Travers was elected to the Board of Commissioners in August 2009. He is Executive Vice President, Legal and Corporate Affairs, Vale's Base Metals business, as well as Deputy General Counsel and Director Corporate Affairs, North and Central Americas, Asia-Pacific, for Vale. In his current role, Mr. Travers manages legal and corporate affairs for Vale's global base metals business. In his capacity as a Deputy General Counsel and Director, Corporate Affairs for Vale, Mr. Travers manages legal matters for all of the company's businesses in North and Central Americas and Asia-Pacific and corporate affairs matters for all of the company's businesses in North and Central Americas, Europe and Asia-Pacific.

Mr. Travers joined Vale Canada in June 2001 as Assistant General Counsel. He was named Associate General Counsel in January 2005 and appointed Deputy General Counsel, Asia-Pacific, in September 2007. In May 2008, Mr. Travers was appointed General Counsel of Vale Canada. In May 2009, he assumed his current position with the addition of responsibilities for Corporate Affairs. Mr. Travers took on additional responsibilities as Deputy General Counsel, North and Central Americas, Asia-Pacific, for Vale in September 2009.

Previously, Mr. Travers was a senior associate practicing corporate and securities law at a large firm in Toronto. He is a graduate of York University/Osgoode Hall in Toronto, where he completed a joint MBA/LLB program in 1993.



#### **Jennifer Maki**

Commissioner

Ms. Maki is the Executive Vice President and Chief Financial Officer of Vale Canada, a position that she has held since October 2007. Ms. Maki has overall responsibility for the financial affairs of the Vale's Base Metals business.

Prior to assuming her current position, Ms. Maki held the position of Vice President and Treasurer of Vale Canada, where she was responsible for the implementation of Vale Canada's funding strategies, cash management, insurance and credit policies. Ms. Maki's previous positions at Vale Canada included Assistant Comptroller, Financial Accounting and Reporting, in which her primary responsibility included oversight of the preparation of financial statements for public disclosure and regulatory purposes, and Assistant Comptroller, Financial Planning and Analysis, in which she was responsible for Vale Canada's financial plans, analysis of financial results and the corporate control aspects of capital investment programs.

Sebelum bergabung dengan Vale Canada pada tahun 2003, Ms. Maki bekerja selama 10 tahun di PricewaterhouseCoopers LLP dalam berbagai posisi dengan tanggung jawab yang meningkat. Ms. Maki meraih gelar sarjana dalam bidang Commerce dari Queen's University dan beliau juga seorang Chartered Accountant di Kanada.

**Arif S. Siregar**  
Komisaris

Sebelum diangkat sebagai Komisaris, Bapak Siregar menjabat sebagai Presiden Direktur PTI, dan President and Chief Executive Officer PTI.

Sebelum bergabung dengan PTI, sejak tahun 2003 Bapak Siregar menjabat sebagai Presiden Direktur PT Kelian Equatorial Mining, perusahaan tambang emas yang beroperasi di Kutai Barat, Kalimantan Timur, dan merupakan bagian dari kelompok usaha Rio Tinto. Beliau juga menjabat sebagai Vice President pada PT Rio Tinto Indonesia. Sebelumnya, beliau bekerja pada Palabora Mining Company dari Afrika Selatan sebagai General Manager bidang Mineral-Mineral Industri. Beliau pernah menjadi General Manager bidang Batubara pada PT Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur. Bapak Siregar adalah Ketua Asosiasi Perusahaan Tambang Indonesia, Wakil Ketua Komite Energi dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), dan anggota Dewan Penasehat dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia.

Bapak Siregar meraih gelar Sarjana Tambang dan Metalurgi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1980. Beliau meraih gelar doktor dalam bidang Metalurgi dari University of Queensland di Brisbane, Australia pada tahun 1992.



**Takeshi Kubota**  
Komisaris

Mr. Kubota adalah Executive Officer dan General Manager pada divisi Logam Non-Ferrous di Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Beliau bergabung dengan Sumitomo sejak bulan April 1977 dan telah bekerja dalam berbagai posisi. Mr. Kubota lulus dari Fakultas Ekonomi, Keio University.



Prior to joining Vale Canada in 2003, Ms. Maki spent 10 years at PricewaterhouseCoopers LLP in positions of increasing responsibility. Ms. Maki has a Bachelor of Commerce degree from Queen's University and is a chartered accountant in Canada.

**Arif S. Siregar**

Commissioner

Prior to his appointment to the Board of Commissioners, Mr. Siregar served as President Director as well as President and Chief Executive Officer of PTI.

From 2003 until joining PTI, Mr. Siregar held the position of President Director of PT Kelian Equatorial Mining, a member of the Rio Tinto Group, and a gold mining company operating in Kutai Barat, East Kalimantan. He also served as Vice-President of PT Rio Tinto Indonesia. Prior to that, Mr. Siregar was employed by Palabora Mining Company South Africa as General Manager Industrial Minerals. He held the position of General Manager Coal Chain of PT Kaltim Prima Coal in East Kalimantan. Mr. Siregar is Chairman of the Indonesian Mining Association, Vice-Chairman of the Energy Committee of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN), and a member of the Board of Advisors of the Organization of the Indonesian Mining Experts.

Mr. Siregar is a graduate of Bandung Institute of Technology, where he obtained his Bachelor of Science degree (mining and metallurgy) in 1980. He completed his PhD (metallurgy) at the University of Queensland in Brisbane, Australia in 1992.



**Takeshi Kubota**

Commissioner

Mr. Kubota is Executive Officer and General Manager of Non-Ferrous Metals Division, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. He joined Sumitomo in April 1977 and has served in various capacities. He was appointed to the PTI Board of Commissioners in 2005. Mr. Kubota graduated from the Faculty of Economics, Keio University.

**Harumasa Kurokawa**

Komisaris

Harumasa Kurokawa adalah General Manager, divisi Logam Non-Besi, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., posisi yang telah dijabat sejak April 2008. Sebelum itu, beliau adalah General Manager Pemulihan Nikel, Sumitomo, sejak Januari 2007. Beliau bergabung dengan Sumitomo pada bulan April 1981 dan telah bekerja pada berbagai jabatan, termasuk Manager Teknis dan Peleburan di Pemulihan Peleburan Tembaga Toyo, Assistant President pada Peleburan Tembaga Jinlong Cina, dan Vice General Manager di Pemulihan Peleburan Tembaga Toyo.



Mr. Kurokawa meraih gelar sarjana dalam bidang metalurgi pada tahun 1981 dari Tokyo University, Jepang, dan gelar doktoral dalam bidang teknik pada tahun 2003 dari universitas yang sama.

**Arief T. Surowidjojo**

Komisaris Independen

Bapak Surowidjojo dipilih menjadi Komisaris Independen PTI pada bulan April 2009. Beliau adalah Pendiri dan Senior Partner pada kantor penasehat hukum Lubis Ganie Surowidjojo, yang didirikan pada tahun 1985. Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam hukum perusahaan dan menulis buku, makalah dan artikel dalam bidang hukum dan tata kelola.

Proyek-proyek penting dalam karir hukum beliau antara lain menjadi penasehat hukum utama bagi pemerintah Indonesia dalam restrukturisasi industri perbankan selama krisis finansial pada tahun 1997, melakukan audit tata kelola dan kepatuhan terhadap debitur-debitur terbesar di Indonesia pada tahun 2000, dan sejak tahun 2008 membantu suatu komite yang dibentuk oleh Gubernur Bank Indonesia dan pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan bank yang gagal demi menopang industri perbankan.

Bapak Surowidjojo adalah Ketua Dewan Komisaris PT Agrakom, Komisaris Independen PT Holcim Indonesia Tbk dan PT Sampoerna Agro Tbk, Ketua Dewan Komisaris PT Justika Siar Publika, dan Ketua Komite Tata Kelola PT Indika Energy Tbk.

Bapak Surowidjojo memperlihatkan komitmen terhadap pendidikan hukum melalui berbagai peran. Beliau adalah dosen senior pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1990. Pada tahun 1993 sampai 1998 beliau adalah editor Indonesia pada Asia Business Law Review, Singapura. Sejak tahun 2000 beliau menjadi anggota Dewan Pengawas dari Yayasan Putera Sampoerna.

Beliau adalah pendiri dan anggota Dewan Pengawas dari Institut Tata Kelola Indonesia, sebuah institusi yang didirikan untuk mempromosikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Bapak Surowidjojo adalah pendiri dan wakil ketua Dewan Eksekutif WWF Indonesia, yang didirikan untuk mempromosikan konservasi lingkungan. Beliau juga adalah pendiri dan ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, yang mempromosikan reformasi hukum dan institusional.

Bapak Surowidjojo meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1977. Pada tahun 1984, beliau meraih gelar magister dalam bidang Hukum, dengan fokus studi pada transaksi bisnis internasional, dari School of Law, University of Washington di Seattle.

### **Harumasa Kurokawa**

Commissioner

Harumasa Kurokawa is General Manager, Non-Ferrous Metals Division, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., a position he has held since April 2008. Prior to this, he was General Manager of Nickel Refinery, Sumitomo, a position he assumed in January 2007. He joined Sumitomo in April 1981 and has served in various capacities, including as Manager, Technical and Smelting, Toyo Copper Smelter Refinery, Assistant President, Jinlong Copper Smelter China, and Vice General Manager, Toyo Copper Smelter Refinery.

Mr. Kurokawa obtained his degree in metallurgy in 1981 from Tokyo University, Japan and a PhD in engineering in 2003 from the same university.



### **Arief T. Surowidjo**

Independent Commissioner

Mr. Surowidjo was elected as an Independent Commissioner of PTI in April 2009. He is a Founding and Senior Partner of the law firm of Lubis Ganie Surowidjo. He has more than 30 years of corporate law experience and has published books, papers and articles on legal and good governance matters.

Key assignments in his legal career include serving as lead lawyer for the Indonesian Government in restructuring the banking industry during the financial crisis of 1997, conducting governance and compliance audits of Indonesia's biggest debtors in 2000 and, since 2008, has assisted a committee established by the Governor of the Indonesian Central Bank and the Indonesian Government in matters pertaining to the banking industry.

Mr. Surowidjo is Chairman of the Board of Commissioners of PT Agrakom, an Independent Commissioner of PT Holcim Indonesia Tbk and PT Sampoerna Agro Tbk, Chairman of the Board of Commissioners of PT Justika Siar Publik, and Chairman of the Good Corporate Governance Committee of PT Indika Energy Tbk.

Mr. Surowidjo demonstrates his commitment to legal education through a wide range of roles. Since 1990, he has been a senior lecturer at the Faculty of Law, University of Indonesia. Since 2004, he has served as Chief Editor of the Jentera, an Indonesian Law Journal. From 1993 to 1998, he was Indonesian Editor of the Asia Business Law Review, Singapore. Since 2000, he has served as a member of the Board of Supervision of Putera Sampoerna Foundation.

He is a Founder and Member of the Board of Supervision of the Indonesia Institute for Corporate Governance, an institute established to promote good corporate governance principles. Mr. Surowidjo is a Founder and Vice-Chairman of the Board of Executives of WWF Indonesia, which was established to promote environmental conservation. He is also a Founder and Chairman of the Indonesian Law and Policy Study Center, which promotes legal and institutional reforms.

Mr. Surowidjo obtained his Bachelor of Law degree from the Faculty of Law, University of Indonesia in 1977. In 1984, he obtained a master's degree in law, focusing on international business transactions, from the School of Law, University of Washington in Seattle.

### **Irwandy Arif**

Komisaris Independen

Irwandy Arif meraih gelar sarjana dalam bidang pertambangan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1976. Sejak saat itu beliau menjadi dosen senior pada Departemen Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Mineral dan Sains Bumi, ITB, menjadi Ketua Komite Anggaran Majelis Wali Amanat (MWA) ITB. MWA adalah lembaga penting di ITB yang mewakili dan bertindak atas nama pemerintah sebagai pemegang saham dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Beliau juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Profesional Pertambangan Indonesia (PERHAPI) dan Ketua Komisi Akreditasi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bapak Arif adalah Komisaris Independen pada PT Multi Harapan Utama, sebuah perusahaan tambang batu bara, dan anggota Komite Audit PT Adaro Energy Tbk.

Sebelumnya, beliau adalah Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit pada PT Aneka Tambang Tbk dan Dekan Fakultas Teknologi Mineral dan Sains Bumi di ITB.

Bapak Arif memiliki pengalaman luas dalam bidang peningkatan produktivitas, stabilitas sudut dan aspek tiang pancang. Beliau juga memimpin beberapa studi kelayakan bagi perusahaan-perusahaan tambang batu bara.

Bapak Arif meraih gelar doktoral dari Ecole des Mines de Nancy, Perancis, pada tahun 1991.



### **Irwandy Arif**

#### Independent Commissioner

Irwandy Arif graduated from the Department of Mining Engineering at the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1976. Since his graduation, Mr. Arif has been a senior lecturer at the Department of Mining Engineering, Faculty of Earth Sciences and Mineral Technology at ITB, Head of the Budget Committee of Majelis Wali Amanat: MWA (Board of Trustees) ITB. MWA is the supreme body at ITB, representing and acting on behalf of the government as the owner/shareholder and the public/community as the stakeholders.

He has also held the positions of Chairman of the Association of Indonesian Mining Professionals (PERHAPI) and Chairman of the Accreditation Commission with the Indonesia Ministry of Energy and Mineral Resources. Mr. Arif is an Independent Commissioner of PT. Multi Harapan Utama, a coal mining company, and member of the Audit Committee of PT Adaro Energy Tbk

Previously, he was Independent Commissioner and Head of the Audit Committee of PT Aneka Tambang Tbk and Dean of Faculty of Earth Sciences and Mineral Technology at ITB.

Mr. Arif has extensive experience in productivity improvement, slope stability and stockpile aspect. He has also led several feasibility studies for coal mining companies.

Mr. Arif obtained his PhD from Ecole des Mines de Nancy, France in 1991.

## BIOGRAFI DIREKSI

# BOARD OF DIRECTORS BIOGRAPHIES

### **Tony Wenas**

Presiden Direktur



Bapak Wenas diangkat sebagai Presiden Direktur, dan President and Chief Executive Officer Perseroan dalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 5 Maret 2010.

Sebelum bergabung dengan PTI, Bapak Wenas adalah Director & Executive Vice President/General Counsel pada PT Freeport Indonesia, perusahaan afiliasi dari Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. Beliau memulai karir di PT Freeport Indonesia pada bulan Juni 2001. Tanggung jawab utama beliau mencakup seluruh kegiatan hubungan eksternal, masalah-masalah hukum dan perpajakan. Pada tahun 1999 Bapak Wenas menempati posisi sebagai Senior Manager bidang Hukum pada PT Pasifik Satelit Nusantara, perusahaan yang sahamnya terdaftar di NASDAQ dan dimiliki bersama oleh Garuda, Palapa C Satelit dan induk usaha dari ACeS International. Periode tahun 1994 sampai 1999, Bapak Wenas bekerja sebagai Corporate Secretary dan Manajer Hukum pada Bakrie Communications Corporations, induk usaha dari Bakrie Electronics Company, Ratelindo, Bakrie Uzbek Telecom dan Link Communication. Bapak Wenas pernah menjadi Manajer Hukum dan Asisten Khusus pada Board of Merchant Investment Corporation (Merincorp), sejak tahun 1991. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Administratur Kontrak dan Koordinator Tender pada Atlantic Richfield Indonesia Inc. sejak tahun 1989.

Pada tahun 2004 Bapak Wenas menjabat sebagai acting Executive Director dari Asosiasi Perusahaan Tambang Indonesia. Pada tahun yang sama, beliau diangkat sebagai Wakil Ketua Komite Permanen bidang Sumber Daya Mineral dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Sejak tahun 2009 beliau menjadi Wakil Ketua Komite Permanen bidang Investasi dari KADIN dan anggota dari Komisi Bilateral Indonesia-Amerika Serikat pada KADIN. Sampai tahun 2007 beliau adalah anggota Komisi Pemulihan Ekonomi Nasional.

Bapak Wenas meraih gelar Sarjana Hukum dengan bidang studi Hukum Bisnis dari Universitas Indonesia pada tahun 1985, dan kuliah di Fakultas Ekonomi pada universitas yang sama pada periode tahun 1981 sampai 1984.

### **Tony Wenas**

President Director

Mr. Wenas was appointed as President Director, as well as President and Chief Executive Officer of the Company, at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on March 5, 2010.

Immediately prior to joining PTI, Mr. Wenas was Director and Executive Vice-President / General Counsel of PT Freeport Indonesia, an affiliate of Freeport McMoRan Copper and Gold Inc. He joined PT Freeport Indonesia in June 2001. His primary responsibilities included all external relations activities, legal matters and taxation. In 1999, Mr. Wenas assumed the post of Senior Manager, Legal, for NASDAQ-listed PT Pasifik Satelit Nusantara, co-owner of Garuda and Palapa C satellites and the parent company of ACeS International. From 1994 to 1999, Mr. Wenas served as Corporate Secretary and Legal Manager of Bakrie Communications Corporation, the parent company of Bakrie Electronics Company, Ratelindo, Bakrie Uzbek Telecom and Link Communication. Mr. Wenas was Legal Manager and Special Assistant to the Board of Merchant Investment Corporation, starting in 1991. Prior to assuming that role, he held the post of Contract Administrator and Tender Coordinator for Atlantic Richfield Indonesia Inc., which he joined in 1989.

Mr. Wenas served as the acting Executive Director of the Indonesia Mining Association in 2004. In the same year, he was appointed Vice-Chairman of the Permanent Committee of KADIN. Since 2009, he has served as Vice-Chairman of KADIN's Permanent Investment Committee and a member of the U.S.-Indonesia Bilateral Commission of KADIN. Until 2007, he was a member of the National Economic Recovery Commission.

Mr. Wenas obtained his Bachelor of Law (majoring in business law) from the University of Indonesia in 1985 and from 1981 to 1984, studied in the Faculty of Economics at the same school.

### **Bernardus Irmanto**

Wakil Presiden Direktur



Bapak Irmanto pertama kali diangkat menjadi Direksi pada tanggal 28 Oktober 2010. Sebelum pengangkatan menjadi anggota Direksi, beliau adalah General Manager yang bertanggung jawab atas operasi layanan bersama di PTI.

Bapak Irmanto bergabung dengan PTI pada bulan Agustus 2004 sebagai Senior Systems Analyst. Sejak saat itu beliau telah bekerja pada berbagai posisi dengan tanggung jawab yang terus meningkat dalam departemen IT. Pada bulan Februari 2007, Bapak Irmanto diangkat menjadi General Manager IT. Sebelum bergabung dengan PTI beliau telah memegang berbagai jabatan pada perusahaan-perusahaan Newmont Nusa Tenggara, Fujitsu Asia Pacific Pty Ltd., Bali Camp, University of South Wales dan PT Freeport Indonesia.

Bapak Irmanto meraih gelar sarjana dalam bidang sains komputer dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1997 dan gelar magister dalam bidang sains komputer dan teknik dari University of New South Wales, Australia, pada tahun 2003.

Pada tanggal 16 Februari 2011 PTI mengadakan RUPS Luar Biasa untuk menyetujui pengangkatan Bapak Irmanto sebagai Wakil Presiden Direktur PTI menggantikan Claudio Bastos. Bapak Bastos tetap menjadi anggota Direksi Perseroan.

### **Claudio Bastos**

Direktur

Bapak Bastos pertama kali diangkat menjadi Direksi pada tanggal 23 November 2007.

Bapak Bastos diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur PTI dalam RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 5 Desember 2008. Beliau bertanggung jawab atas urusan-urusan keuangan PTI sebagai Wakil Presiden Direktur dan Chief Financial Officer.

Sebelum bergabung dengan PTI, Bapak Bastos menempati berbagai posisi dengan tanggung jawab meningkat dalam Vale, termasuk General Manager dari perusahaan-perusahaan terafiliasi. Beliau juga pernah menjadi anggota Komite Keuangan dari Samarco Minerações, MRS (perusahaan kereta api), CAEMI Minerações dan lainnya.

Sebelum bergabung dengan Vale pada tahun 2003, Bapak Bastos menjabat sebagai Chief Financial Officer pada berbagai perusahaan Brazil dalam sektor media (televisi, koran, internet dan radio), sektor retail dan transportasi kargo. Beliau mengawali karir sebagai seorang ekonom untuk Brazil pada Komisi Ekonomi PBB untuk negara-negara Amerika Latin dan Karibia, dan selanjutnya menempati berbagai posisi pada Departemen Industri dan Perdagangan serta Departemen Keuangan Pemerintah Federal Brazil.

Bapak Bastos meraih gelar sarjana dalam bidang ekonomi dari Universidade de Brasilia, dan gelar magister dalam bidang ekonomi dari Universidade Federal do Rio de Janeiro. Beliau juga mengambil berbagai pelatihan di Fundação



### **Bernardus Irmanto**

Vice-President Director

Mr. Irmanto was first appointed to the Board of Directors on October 28, 2010. Prior to this appointment as a member of the Board of Directors, Mr. Irmanto served as General Manager and was responsible for the shared services operation of PTI.

Mr. Irmanto joined PTI in August 2004 as a Senior Systems Analyst. Since that time, he has held positions of increasing responsibility in the IT department. In February 2007, Mr. Irmanto was appointed to the position of General Manager of IT. Prior to joining PTI, he held various positions of increasing responsibility in Newmont Nusa Tenggara, Fujitsu Asia Pacific Pty Ltd., Bali Camp, University of New South Wales and PT Freeport Indonesia.

Mr. Irmanto obtained a bachelor's degree in computer science from Gadjah Mada University Yogyakarta, Indonesia in 1997 and a master's degree of engineering science in computer science and engineering from the University of New South Wales Sydney, Australia in 2003.

On February 16, 2011, PTI held an Extraordinary General Meeting of Shareholders that approved the appointment of Mr. Irmanto as Vice-President Director of PTI to replace Claudio Bastos. Mr. Bastos remains as a member of the Board of Directors of the Company.



### **Claudio Bastos**

Director

Claudio Bastos was first appointed to the Board of Directors on November 23, 2007.

Mr. Bastos was appointed Vice-President Director of PTI at an Extraordinary General Meeting of Shareholders held on December 5, 2008. Concurrently, Mr. Bastos was responsible for the financial affairs of PTI as Senior Vice President and Chief Financial Officer.

Prior to joining PTI, Mr. Bastos held various positions of increasing responsibility within Vale and other companies in the Vale group, including General Manager and Director of CVRD Holding GmbH in Vienna, Austria. He was also a member of the finance committees of Samarco Minerações, MRS (railway), CAEMI Minerações and other companies.

Before joining Vale in 2003, Mr. Bastos held the position of Chief Financial Officer at various Brazilian companies in the media (television, newspaper, internet and radio), retail and cargo transportation sectors. He began his career as an economist at the Brazilian Office of the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean and went on to positions at the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Finance within the Federal Government of Brazil.

Mr. Bastos has an economics degree from Universidade de Brasília and a master's degree in economics from the Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mr. Bastos has also studied at Fundação Dom Cabral, Northwestern University's

Dom Cabral, Northwestern University's Kellogg School of Management, Sloan School of Management - MIT dan IMD di Lausanne, Switzerland.

Pada tanggal 16 Februari 2011 PTI mengadakan RUPS Luar Biasa yang menyetujui pengangkatan Bernardus Irmanto sebagai Wakil Presiden Direktur PTI untuk menggantikan Claudio Bastos. Bapak Bastos tetap sebagai anggota Direksi.

#### **Ciho Bangun**

Direktur

Bapak Bangun diangkat sebagai Chief Operating Officer PTI pada bulan Desember 2008. Beliau bertanggung jawab atas kegiatan operasional Perseroan dan ditempatkan di Sorowako, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Bapak Bangun menjabat sebagai Vice President, Business Support and Organizational Development, dan bertanggung jawab atas dukungan bisnis dan pengembangan organisasi PTI. Bapak Bangun pertama kali diangkat menjadi Direksi pada bulan Agustus 2002.



Bapak Bangun meraih gelar sarjana dalam bidang teknik kimia dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1984. Beliau bergabung dengan PTI pada tahun yang sama. Sejak saat itu, beliau menempati berbagai posisi dengan tanggung jawab meningkat dalam manajemen operasional, terutama dalam pabrik pengolahan.

#### **Fabio Bechara**

Direktur

Pada tanggal 16 Februari 2011 PTI mengadakan RUPS Luar Biasa untuk menyetujui pengangkatan Fabio Bechara sebagai Direktur PTI. Mr. Bechara bergabung dengan Vale sebagai *trainee* pada tahun 1993 dan sejak saat itu terus bekerja untuk Vale. Beliau memegang jabatan General Manager Keuangan di Mozambique, Afrika, dan Managing Director Vale Emirates di Dubai. Beliau juga memimpin Kantor Manajemen Proyek untuk Proyek-proyek Batubara di Afrika dan Australia. Sebelum itu, Mr. Bechara menjabat berbagai posisi dalam departemen keuangan Vale dan Ferrovias Centro-Atlântica, sebuah perusahaan jalan kereta api yang dikendalikan oleh Vale.

Mr. Bechara meraih gelar sarjana dalam bidang Ekonomi dari UERJ, Universitas Negeri di Rio de Janeiro, gelar magister administrasi bisnis dalam bidang Keuangan dari IBMEC, Brazil, dan gelar pasca sarjana dalam Administrasi Bisnis dari Fundação Dom Cabral, Brazil. Beliau telah mengikuti program pelatihan eksekutif di London Business School, Columbia University dan MIT.

Kellogg School of Management, Sloan School of Management, MIT and IMD in Lausanne, Switzerland.

On February 16, 2011, PTI held an Extraordinary General Meeting of Shareholders that approved the appointment of Bernardus Irmanto as Vice President Director of PTI to replace Mr. Bastos. Mr. Bastos remains as a member of the Board of Directors.

#### **Ciho Bangun**

Director

Mr. Bangun was appointed to the role of Chief Operating Officer of PTI in December 2008. Based in Sorowako, South Sulawesi, he is responsible for the operations of the Company. Prior to this appointment, Mr. Bangun was responsible for business support and the organizational development of PTI in his role as Vice President Business Support and Organizational Development. Mr. Bangun was first appointed to the Board of Directors in August 2002.

Mr. Bangun graduated from Bandung Institute of Technology in 1984 in chemical engineering. He joined PTI the same year. Since that time, he has held positions of increasing responsibility in operations management, mainly in the process plant.



#### **Fabio Bechara**

Director

On February 16, 2011, PTI held an Extraordinary General Meeting of Shareholders that approved the appointment of Fabio Bechara as a Director of PTI. Mr. Bechara joined the Vale as a trainee in 1993 and has been working for Vale since. He has served as Vale's Financial General Manager in Mozambique, Africa and Managing Director of Vale Emirates in Dubai. He was also the head of the Project Management Office for Coal Projects in Africa and Australia. Prior to that, Mr. Bechara held various positions in Vale's financial department and Ferrovias Centro-Atlântica, a railway company controlled by Vale.

Mr. Bechara holds a bachelor's degree in economics from UERJ, the State University of Rio de Janeiro, an MBA in finance from IBMEC, Brazil and a post graduate degree in business administration from Fundação Dom Cabral, Brazil. He has attended executive programs at London Business School, Columbia University and MIT.

## PERISTILAHAN

# GLOSSARY OF TERMS

<p>Kalsin adalah produk yang dihasilkan tanur pereduksi dan berfungsi sebagai bahan untuk tanur peleburan listrik.</p>	<p><b>KALSIN</b> CALCINE</p>	<p>The output of a reduction kiln. Calcine serves as the feed material for our electric smelting furnaces.</p>
<p>Jenis bijih yang banyak terdapat di blok pertambangan Sorowako Timur dan juga di daerah pertambangan Petea. Kandungan mineral dari tipe bijih ini lebih seragam bila dibandingkan dengan tipe bijih di Sorowako Barat, karena bijih itu berada dalam batu-batuan peridotite yang mengandung mineral serpentine dan tanah liat saprolite dengan kandungan serpentine.</p>	<p><b>BIJIH DARI TIMUR</b> EAST-TYPE ORE</p>	<p>The type of ore prevalent in our Sorowako East mining block and also in our Petea mining location. Mineralization in this type of ore is more uniform than in West-type ore, since it is contained within serpentinized peridotite boulders and serpentine saprolite clay.</p>
<p>Matte tanur adalah hasil dari proses peleburan, dan digunakan sebagai umpan untuk alat pengubah.</p>	<p><b>MATTE TANUR</b> FURNACE MATTE</p>	<p>The product of the smelting process, used as the feed product for the converters.</p>
<p>Tanah merah yang terdiri dari tanah liat yang diperkaya dengan kandungan nikel, sebagai bahan untuk membuat bijih nikel. Laterite juga mengandung banyak besi, magnesium dan kobalt. Laterite merupakan hasil dari proses laterisasi batu yang terbentuk oleh panas, peridotite. Laterite terdiri dari dua lapisan, lapisan bawah yang mengandung saprolite dan lapisan di atasnya yang mengandung limonite.</p>	<p><b>LATERITE</b></p>	<p>A red-colored soil composed of clay that is sufficiently enriched in nickel to make nickel ore. Laterite is also enriched in iron, magnesium and cobalt. It results from the laterization (a weathering process) of a type of igneous rock called peridotite. Laterite consists of two layers: a lower layer of saprolite and an overlying zone of limonite.</p>
<p>Bursa Logam London adalah pasar komoditas untuk perdagangan bahan dasar dan logam, termasuk nikel. Setiap hari, produsen, pembeli dan penjual menggunakan LME sebagai akses ke harga nikel di pasar terbuka yang banyak digunakan di industri sebagai harga acuan dalam transaksi.</p>	<p><b>BURSA LOGAM LONDON</b> LONDON METAL EXCHANGE</p>	<p>The London Metal Exchange, (LME) is a terminal market for the trading of materials and metals, including nickel. Producers, consumers and traders use the LME to reach, on a daily basis, open market prices for nickel, which are widely used throughout the industry as reference prices for physical transactions.</p>
<p>1.000.000 watt, ukuran untuk tenaga.</p>	<p><b>MEGAWATT (MW)</b></p>	<p>1,000,000 watts, a measure of power.</p>
<p>Kumpulan mineral dengan kandungan logam secara alami yang memiliki nilai jual.</p>	<p><b>ENDAPAN MINERAL</b> MINERAL DEPOSIT</p>	<p>A naturally occurring concentration of minerals containing metals of economic interest.</p>
<p>Produk setengah jadi yang dapat dijual secara komersial yang berasal dari bijih yang mengandung nikel. Nikel dalam matte adalah produk utama kami.</p>	<p><b>NIKEL DALAM MATTE</b> NICKEL IN MATTE</p>	<p>An intermediate product in the production of commercially saleable nickel, made from nickel containing ores. Nickel in matte is our principal product.</p>
<p>Jenis pertambangan di mana seluruh kegiatan penambangannya dilakukan di permukaan tanah.</p>	<p><b>TAMBANG TERBUKA</b> OPEN PIT MINING</p>	<p>A type of mining where all activity occurs above ground.</p>
<p>Bagian dari endapan mineral yang diekstraksi.</p>	<p><b>BIJIH</b> ORE</p>	<p>The portion of a mineral deposit that is extracted.</p>
<p>Lapisan sisa bernilai rendah yang harus dibuang untuk mencapai bijih di daerah pertambangan kami.</p>	<p><b>LAPISAN SISA</b> OVERBURDEN</p>	<p>The low-value waste layer that must be removed at a mining site in order to access ore.</p>
<p>Tabung panjang berputar dengan diameter besar yang digunakan untuk memanaskan bijih sampai 750 derajat Celcius dan pada titik tersebut, bijih bereaksi secara kimiawi dan sudah siap untuk dimasukkan kedalam tanur peleburan listrik.</p>	<p><b>TANUR PEREDUKSI</b> REDUCTION KILN</p>	<p>A long, large diameter rotating cylinder that is used to heat ore to about 750 degrees Celsius. At this temperature the ore undergoes a chemical reaction, making it suitable for introduction into the electric smelting furnace.</p>
<p>Persiapan dan pembentukan permukaan tanah dari daerah purna tambang untuk mengatur erosi dan memungkinkan revegetasi.</p>	<p><b>REKLAMASI</b> RECLAMATION</p>	<p>The preparation and landscaping of formerly mined-out areas in order to control erosion and allow revegetation.</p>
<p>Penanaman dengan tanaman penutup dan pelopor pada daerah paska reklamasi.</p>	<p><b>REVEGETASI</b> REVEGETATION</p>	<p>The planting with cover crops and pioneer trees of areas post-reclamation.</p>
<p>Penanaman tanaman lokal di daerah revegetasi setelah satu sampai dua tahun untuk mengembalikan daerah ke bentuk alaminya.</p>	<p><b>REHABILITASI</b> REHABILITATION</p>	<p>Planting of native trees in areas one to two years after revegetation in order to return each area to its original state.</p>
<p>Lokasi pada pertambangan kami, di mana bahan mentah dimasukkan ke dalam proses pengolahan awal, termasuk pembersihan dari batu-batuan dan lain lainnya.</p>	<p><b>STASIUN PENYARING</b> SCREENING STATION</p>	<p>A location at a mining site where run-of-mine material is brought for initial processing, including removal of low-grade boulders and other waste material.</p>
<p>Proses pengolahan kalsin, sebagai hasil dari tanur pereduksi, dilebur dengan tanur listrik untuk memisahkan terak dari campuran nikel-sulfur-besi yang terdapat dalam kalsin. Proses ini menghasilkan matte tanur listrik.</p>	<p><b>PELEBURAN</b> SMELTING</p>	<p>A process whereby calcine, the output of the reduction kiln, is melted through the use of an electric arc furnace, separating slag from the denser nickel-sulphur-iron mixture. This process produces electric furnace matte.</p>
<p>Jenis bijih ini banyak terdapat di blok tambang Sorowako Barat. Mineralisasi bijih dari jenis ini terkonsentrasi di tanah liat saprolite yang kaya dengan goethite; batu-batuan peridotite yang tidak mengandung mineral serpentine di dalam bijih jenis ini termasuk berkadar nikel sangat rendah.</p>	<p><b>BIJIH DARI BARAT</b> WEST-TYPE ORE</p>	<p>The type of ore prevalent in our Sorowako West mining block. Mineralization in this type of ore is concentrated in goethite-rich saprolite clay. The un-serpentinized peridotite boulders present in this ore type have a very low nickel content.</p>
<p>Satu ton material, termasuk berat air yang terkandung di dalamnya.</p>	<p><b>TON BASAH</b> WET TON</p>	<p>One metric ton of material and the free water associated with it.</p>





**PT INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK**

Plaza Bapindo, Citibank Tower, 22nd Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55

Jakarta 12290 - Indonesia

Tel: (021) 524 9000, Fax:(021) 524 9020

[www.pt-inco.co.id](http://www.pt-inco.co.id)